The Power to Grow

Laporan Tahunan **2008** PT INDOSAT Tbk

indosat

Tema Halaman Muka:
The Power To Grow - Kekuatan Untuk Tumbuh

Daftar isi

01 Kata Pengantar
02 Kekuatan untuk Tumbuh
04 Sekilas Indosat
06 Solusi Inovatif
08 Referensi untuk Peraturan Bapepam-LK X.K.6
10 Ikhtisar Keuangan
12 Ikhtisar Operasional
14 Ikhtisar Saham dan Obligasi
16 Peristiwa Penting dan Penghargaan 2008
18 Struktur Organisasi dan Karyawan
19 Anak Perusahaan yang Terkonsolidasi
20 Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Baik
22 Pesan Komisaris Utama
28 Laporan Direksi
34 Laporan Tata Kelola Perusahaan
63 Laporan Tahunan dalam Format 20-F
241 Laporan Keuangan Konsolidasi
A-1 Pertanggungjawaban Direksi atas Laporan Keuangan Konsolidasi 2008
A-2 Pertanggungjawaban terhadap Laporan Tahunan 2008
A-3 Informasi Bagi Pemegang Saham

Disclaimer

Laporan Tahunan ini adalah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan disajikan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 dan X.K.7. Format 20-F dalam Laporan Tahunan ini diambil dari Laporan Tahunan dalam Format 20-F yang telah kami sampaikan kepada US-SEC.

Dalam Laporan Tahunan ini, kata "Indosat", "Perusahaan", dan "kami" merujuk kepada PT Indosat Tbk dan anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Sedangkan kata "Indonesia" merujuk kepada Republik Indonesia. "Pemerintah" adalah Pemerintah Indonesia. "Amerika Serikat" atau "U.S." adalah Amerika Serikat. "Rupiah" atau "Rp" adalah mata uang resmi Indonesia dan "U.S. Dollars" atau "US$" adalah mata uang resmi Amerika Serikat. Beberapa angka tertentu (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk mempermudah, sehingga angka, perhitungan, persentase dan rasio yang diberikan dengan yang sesungguhnya dapat berbeda. Kecuali jika disebutkan, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan kami, disajikan dalam Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan ini mencantumkan beberapa informasi keuangan dan hasil-hasil usaha tertentu, serta mungkin juga mencantumkan beberapa proyeksi, rencana, strategi dan tujuan tertentu dari Indosat, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis, yang akan dianggap sebagai pernyataan pandangan ke depan dalam batasan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan bergantung kepada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kejadian-kejadian nyata dan hasil-hasil masa depan Indosat yang secara material berbeda dengan yang diharapkan atau ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan yang demikian. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi, atau ditunjukkan oleh setiap pernyataan yang bersifat pandangan ke depan, akan dicapai.

Tidak ada informasi apapun yang terdapat di dalamnya yang boleh direproduksi tanpa izin tertulis dari Perusahaan. Untuk informasi termutakhir, silahkan hubungi Divisi Investor Relations, Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta 10110, Indonesia. Tel. (62-21) 3000 3001, 3869 615, Fax. (62-21) 380 4045 atau E-mail: investor@indosat.com.

Kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka dengan setiap *Stakeholder*. *Stakeholder* kami dapat melihat situs kami di www.indosat.com untuk informasi lebih lanjut mengenai Indosat. Versi *online* dari dokumen ini juga tersedia di www.indosat.com.

Di
tahun
2008

pencapaian
kinerja
Perusahaan yang
menggembirakan
mencerminkan
perpaduan
KEKUATAN dari
seluruh unsur Perusahaan dalam
menghadapi tantangan yang
semakin ketat dan meningkatnya
jumlah operator di industri telekomunikasi.
Melalui inovasi dan penyediaan layanan yang
berkualitas, ketiga lini usaha kami, yakni Selular,
Telepon Tetap, dan Data Tetap terus menunjukkan
pertumbuhan yang mampu memberikan kontribusi
terhadap peningkatan pendapatan Perusahaan.
Kami berhasil mempertahankan marjin EBITDA pada
tingkat yang sehat, serta membukukan perolehan laba
bersih sebesar Rp1,8 triliun. **UNTUK** meraih pencapaian
tersebut, kami senantiasa menerapkan langkah-langkah
strategi yang cermat dengan memperhatikan azas kehati-hatian.
Indosat, sekali lagi memperlihatkan tahun yang penuh
keberhasilan tercermin dari program ekspansi, terbentuknya
kerjasama yang kuat, serta pelaksanaan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan diimbangi
dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial, semakin
melengkapi sejarah 41 tahun perjalanan Perusahaan.
Ke depan, kami berkomitmen untuk terus **TUMBUH**
dengan memberikan nilai dan layanan terbaik
bagi para pelanggan sekaligus mewujudkan
pembangunan masyarakat berkelanjutan
bagi para *stakeholder* lainnya.

Kekuatan untuk Tumbuh

Indosat meyakini bahwa sinergi yang terbentuk dari perpaduan aspek-aspek bisnis, masyarakat dan lingkungan dapat membentuk suatu kekuatan untuk bergerak maju dalam menjawab tantangan pasar dan industri. Kekuatan ini akan menjadi modal utama untuk mencapai pertumbuhan usaha dan nilai Perusahaan yang berkelanjutan.

Tumbuh Melalui Kerjasama

Setiap karyawan Indosat dianugerahi beragam potensi serta keunikan talenta tersendiri dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha Perusahaan. Keberhasilan memadukan kemampuan setiap karyawan menjadi kerjasama yang kuat dan sinergis, telah mempercepat pencapaian pertumbuhan tersebut. Melalui kerjasama dan hubungan yang efektif, kami bekerja erat dengan pemegang saham, mitra usaha, pelanggan, regulator dan institusi terkait lainnya di Indonesia dan Amerika Serikat.

Perluasan Pasar

Indosat berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dengan menjaga dan meningkatkan posisi di pasar melalui perluasan jaringan telekomunikasi, inovasi produk dan layanan serta peningkatan kualitas jaringan distribusinya.

Berbasis Transparansi

Pertumbuhan usaha Indosat didukung oleh prinsip keterbukaan dan kami memiliki komitmen untuk selalu memberikan informasi material yang relevan, mudah didapat, dan mudah dipergunakan bagi para *stakeholder*. Kami yakin bahwa keterbukaan akan mendorong kepercayaan atas Perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan dan nilai Perusahaan di mata *stakeholder*.

Sekilas Indosat

Sejarah Indosat

- 1967 : Indosat menjadi penyelenggara telekomunikasi internasional pertama di Indonesia
- 1994 : Indosat menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Amerika Serikat
- 2003 : Indosat melakukan penggabungan usaha dengan tiga anak perusahaannya, Satelindo, IM3 dan Bimagraha, sehingga menjadi salah satu operator selular utama di Indonesia
- 2008 : Indosat menjadi penyedia layanan telekomunikasi terlengkap di Indonesia mencakup Selular, Telepon Tetap dan MIDI
  Pada 31 Desember 2008, saham Indosat dimiliki oleh Qatar Telecom Q.S.C. (Qtel) secara tidak langsung melalui Indonesia Communications Limited (ICLM) dan Indonesia Communications Pte Ltd (ICLS) sebesar 40,81%, sementara Pemerintah Republik Indonesia dan Publik memiliki masing-masing 14,29% dan 44,90%

Kinerja Perusahaan 2008

Pendapatan Usaha Rp18,66 triliun, meningkat 13,2%
Laba Usaha Rp4,73 triliun, meningkat 4,7%
EBITDA Rp9,32 triliun, meningkat 7,0%
Laba Bersih Rp1,88 triliun, turun 8,0%
Laba per Saham Dasar Rp345,7, turun 8,0%
Pelanggan Selular 36,5 juta, meningkat 48,7%
Base Transceiver Station 14.162 unit, meningkat 31,6%

Inisiatif Perusahaan 2008

- Inovasi produk, layanan dan program pemasaran
- Meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasi sesuai kondisi pasar
- Memperluas layanan dan memperkenalkan skema pra-bayar untuk layanan *wireless broadband*
- Mempersiapkan peluncuran satelit Palapa-D sebagai jaringan pendukung *(backbone)*
- Mendapatkan sertifikasi syariah untuk beberapa produk dan layanan dasar
- Membentuk komite CSR

Visi

Menjadi perusahaan penyedia solusi informasi dan komunikasi pilihan di Indonesia

- Menawarkan produk, layanan, dan solusi informasi dan komunikasi yang lengkap dan berkualitas
- Berada pada *"Top-Of-Mind"* pelanggan dalam menyediakan produk, layanan, dan solusi informasi dan komunikasi
- Menyediakan produk dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat yang dilayani

Misi

- Menyediakan dan mengembangkan produk, layanan dan solusi inovatif dan berkualitas untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pelanggan
- Meningkatkan *shareholder value* secara terus menerus
- Mewujudkan kualitas kehidupan *stakeholder* yang lebih baik

Nilai-nilai Perusahaan

Integritas

Mematuhi standar etika tertinggi dalam semua aspek kerja berdasarkan prinsip-prinsip loyalitas, tanggung-jawab, dan dedikasi terhadap perusahaan.

Kerjasama

Bekerja dalam tim dengan kinerja yang baik, memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari kolega dan mitra kami dalam suasana yang saling percaya.

Keunggulan

Bertekad untuk menghasilkan yang terbaik dalam hal apapun yang dilakukan dan berupaya untuk mencapai perbaikan yang berkesinambungan serta memperoleh hasil yang melebihi harapan.

Kemitraan

Bertekad menjadi mitra yang baik, menjalin hubungan yang kolaboratif, produktif, dan saling menguntungkan.

Fokus pada pelanggan

Bertekad untuk mencapai dan melebihi harapan dari pelanggan dalam semua hal yang dikerjakan.

Solusi Inovatif

Bukan sekedar produk dan layanan yang kami tawarkan, namun sebuah solusi

Solusi yang ditawarkan mencerminkan kedalaman pemahaman kami atas kebutuhan pelanggan dan komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Mulai dari kemudahan komunikasi telepon, hingga akses internet tanpa batas, tempat dan waktu, kami senantiasa berupaya mengembangkan solusi inovatif yang dirancang untuk melebihi ekspektasi para pelanggan.

Jasa Selular dan *Broadband* 3.5G

IM3

Kebutuhan Pelanggan
Layanan selular pra-bayar yang terjangkau, dengan fleksibilitas isi ulang.

Manfaat untuk Pelanggan
Waktu bicara lebih lama dan jumlah sms yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau.

Mentari

Kebutuhan Pelanggan
Layanan selular pra-bayar yang terjangkau untuk pengguna reguler.

Manfaat untuk Pelanggan
Biaya percakapan yang lebih hemat bagi pelanggan yang sering melakukan panggilan *(frequent caller)* dengan perhitungan tarif yang sederhana.

Matrix

Kebutuhan Pelanggan
Layanan selular pasca bayar.

Manfaat untuk Pelanggan
Kebebasan melakukan komunikasi dengan tarif pasca bayar yang inovatif.

Matrix Auto

Kebutuhan Pelanggan
Layanan selular pasca bayar yang dapat diisi ulang.

Manfaat untuk Pelanggan
Fleksibilitas mengontrol pemakaian. Kombinasi dari manfaat layanan pasca bayar dan pra-bayar.

Blackberry Pasca bayar/Pra-bayar

Kebutuhan Pelanggan
Layanan selular pasca bayar/pra-bayar dan *push-mail global*.

Manfaat untuk Pelanggan
Layanan *push-email* dengan konektivitas tanpa batas.

Indosat *Broadband* 3.5G

Kebutuhan Pelanggan
Akses internet *mobile* berkecepatan tinggi.

Manfaat untuk Pelanggan
Layanan *wireless broadband* dengan kecepatan akses hingga 7,2Mbps.

i Games, i Ring, i Go, i Menu

Kebutuhan Pelanggan
Layanan nilai tambah untuk pengguna layanan selular dengan berbagai pilihan fitur.

Manfaat untuk Pelanggan
Memberikan pilihan fitur, *content*, dan *games*.

Jasa Telepon Tetap

StarOne Pasca bayar/Pra-bayar

Kebutuhan Pelanggan
Layanan telepon tetap nirkabel dengan tarif pasca bayar dan pra-bayar.

Manfaat untuk Pelanggan
Melakukan komunikasi bergerak secara terbatas dengan tarif layanan telepon tetap.

Indosat 001, Indosat 008

Kebutuhan Pelanggan
Sambungan Langsung Internasional.

Manfaat untuk Pelanggan
- Untuk telepon SLI yang jernih dan berkualitas.
- SLI yang ekonomis.
- Dapat digunakan untuk menjangkau mitra bicara yang luas.

Flat Call 01016, Global Save

Kebutuhan Pelanggan
Layanan *Voice over Internet Protocol* (VoIP) domestik dan internasional.

Manfaat untuk Pelanggan
- Tarif internasional yang terjangkau.
- Kartu telepon VoIP untuk jarak jauh.
- Biaya telepon yang terkontrol.

Jasa MIDI (Multimedia, Komunikasi Data dan Internet)

IPLC *(International Private Leased Circuit)* & DPLC *(Domestic Private Leased Circuit)*, *Frame Relay* & ATM *(Asynchronous Transfer Mode)*, INP *(Internet Network Provider)*, IDIA *(Indosat Dedicated Internet Access)*, INIX (*Indosat National Internet Exchange*), MPLS *(Multi-Protocol Label Switching) Based Services, Satellite Services,* DRC (*Disaster Recovery Center*).

Kebutuhan Pelanggan
Layanan Komunikasi Data.

Manfaat untuk Pelanggan
- Koneksi sirkit *private point to point.*
- Fleksibilitas untuk trafik yang beragam.
- Akses internet global.
- Dapat membuat jaringan pribadi melalui paket data.
- Solusi layanan *broadcast* nasional dan internasional.
- Layanan keamanan data.

Bapepam-LK mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan informasi yang setara kepada otoritas pasar modal dan bursa efek, seperti ditetapkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.7. Bagian ini memberikan referensi untuk Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang ada :

Referensi untuk Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6

No.	Hal-hal yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6	informasi dapat ditemukan pada	Halaman
1.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	Ikhtisar Keuangan	10
2.	Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam dua tahun buku terakhir	• Ikhtisar Saham dan Obligasi • Format 20-F - Butir 9 Penawaran dan Pencatatan *(Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan)*	14 205
3.	Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir yang disesuaikan karena pemecahan saham, dividen saham dan saham bonus	Format 20-F - Butir 10 Informasi Tambahan *(Uraian tentang Anggaran Dasar dan Permodalan)*	208
4.	Laporan Dewan Komisaris	• Pesan Komisaris Utama • Laporan Dewan Komisaris	22 54
5.	Laporan Direksi	Laporan Direksi	28
6.	Profil Perusahaan		
	a. Nama dan alamat Perusahaan	Informasi untuk Pemegang Saham	A-3
	b. Riwayat singkat Perusahaan	Format 20-F - Butir 4 Informasi tentang Perusahaan *(Sejarah dan Perkembangan Perusahaan)*	101
	c. Bidang dan kegiatan usaha Perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan	Format 20-F - Butir 4 Informasi tentang Perusahaan • Tinjauan Usaha • Jasa Selular • Jasa Telekomunikasi Telepon Tetap • Jasa MIDI • Jasa-Jasa Lainnya	103
	d. Struktur organisasi dalam bentuk bagan	• Struktur Organisasi dan Karyawan • Format 20-F-Butir 4 Informasi tentang Perusahaan (Struktur Organisasi)	18 129
	e. Visi dan Misi Perusahaan	Sekilas Indosat	4
	f. Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Format 20-F - Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan *(Dewan Komisaris)*	188
	g. Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Format 20-F - Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan *(Direksi)*	191
	h. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensi	• Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Sumber Daya Manusia)* • Format 20-F - Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan *(Karyawan)*	52 197
7.	Uraian tentang nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikannya		
	a. Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham perusahaan	• Ikhtisar Saham dan Obligasi • Format 20-F - Butir 7 Pemegang Saham Utama dan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa *(Pemegang Saham Utama)* • Laporan Tata Kelola Perusahaan	15 199 49
	b. Direktur dan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan	• Format 20-F - Butir 7 Pemegang Saham Utama dan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa *(Pemegang Saham Utama)*	199
	c. Kelompok Pemegang Saham masyarakat, yaitu kelompok Pemegang Saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham Perusahaan	• Ikhtisar Saham dan Obligasi	14
8.	Besarnya persentase kepemilikan saham, bidang usaha dan status operasi pada anak Perusahaan dan perusahaan asosiasi	• Anak Perusahaan yang Terkonsolidasi • Format 20-F - Butir 4 Informasi tentang Perusahaan *(Struktur Organisasi)*	19 129
9.	Kronologi pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Perusahaan dicatatkan	• Format 20-F - Butir 9 Penawaran dan Pencatatan *(Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan)* • Format 20-F Butir 10 Informasi Tambahan *(Uraian tentang Anggaran Dasar dan Permodalan)*	205 208

No.	Hal-hal yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6	informasi dapat ditemukan pada	Halaman
10.	Kronologi Pencatatan efek lainnya dan peringkat efek	• Ikhtisar Saham dan Obligasi	15
		• Format 20-F - Butir 5 Analisa Operasional & Keuangan dan Prospek Usaha *(Hutang-hutang Pokok)*	164
		• Laporan Tata Kelola Perusahaan	46
11.	Nama dan alamat Perusahaan pemeringkat efek	Informasi untuk Pemegang Saham	A-3
12.	Nama dan alamat lembaga dan profesi penunjang pasar modal	Informasi untuk Pemegang Saham	A-3
13.	Penghargaan dan sertifikat yang diterima Perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	Peristiwa Penting dan Penghargaan 2008	16
14.	Nama dan alamat anak Perusahaan	Informasi untuk Pemegang Saham	A-3
15.	Nama dan alamat kantor cabang atau kantor perwakilan	Format 20-F - Butir 4 Informasi tentang Perusahaan *(Alamat kantor -kantor Utama)*	131
16.	Analisa dan Pembahasan Manajemen	Format 20-F - Butir 5 Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha	164
17.	Tata Kelola Perusahaan		
	a. Dewan Komisaris		
	• Uraian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Format 20-F Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan *(Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi)*	194
	• Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Remunerasi Dewan Komisaris)*	41
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris	Laporan Tata Kelola Perusahaan	40
	b. Direksi		
	• Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi	Format 20-F - Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan *(Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi)*	194
	• Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Remunerasi Direksi)*	44
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi Periode Tahun 2008)*	43
	• Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi	Laporan Tata Kelola Perusahaan	44
	c. Komite Audit		
	• Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Komite	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Komite Audit)*	41
	• Uraian tugas dan tanggung jawab Komite	Format 20-F - Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan *(Komite Audit)*	196
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Laporan Komite Audit)*	55
	• Uraian Pelaksanaan Kegiatan Komite	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Laporan Komite Audit)*	55
	d. Komite-komite lain yang dimiliki Perusahaan		
	• Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Komite	• Format 20-F - Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan *(Dewan Komisaris)*	188
		• Laporan Tata Kelola Perusahaan	42
	• Independensi anggota Komite	Laporan Tata Kelola Perusahaan	41
	• Uraian tugas dan tanggung jawab, frekuensi pertemuan, tingkat kehadiran serta uraian pelaksanaan kegiatan Komite	Format 20-F Butir 6 Direktur, Manajemen Senior dan karyawan *(Komite Remunerasi, Komite Manajemen Risiko)*	197
	e. Sekretaris Perusahaan	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Corporate Secretary)*	60
	f. Uraian mengenai Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal (*internal control* & audit)	Laporan Tata Kelola Perusahaan *(Sistem Pengendalian Internal)*	38 46
	g. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan	Format 20-F - Butir 3 Informasi Penting *(Faktor-Faktor Risiko)*	
	h. Uraian mengenai aktifitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan	• Laporan Tata Kelola Perusahaan (Tanggung Jawab pada *Stakeholder*)	78
		• Sustainability Report	47
	i. Perkara penting yang dihadapi Perusahaan	Format 20-F - Butir 8 Informasi tentang Keuangan *(Proses Perkara*	202
	j. Tempat dan alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan	Informasi untuk Pemegang Saham	A-3 A-1
18.	Tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan	Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan	A-2
19.	Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	

Ikhtisar Keuangan

(dalam Milyar Rupiah)	2008	2007	2006	2005	2004
Laporan Laba Rugi					
Pendapatan Usaha*	18.659,1	16.488,5	12.239,4	11.589,8	10.430,1
Beban Usaha*	13.925,9	11.968,9	8.840,7	7.937,9	7.232,0
Laba Usaha	4.733,3	4.519,6	3.398,7	3.651,9	3.198,1
Penghasilan (Beban) Lain - Bersih	(2.408,2)	(1.590,0)	(1.375,8)	(1.299,2)	(876,8)
Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Asosiasi	0,0	0,0	(0,2)	0,1	61,5
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.325,1	2.929,6	2.022,7	2.352,8	2.382,8
Beban Pajak Penghasilan Bersih	(419,8)	(859,5)	(576,1)	(697,9)	(724,6)
Laba Sebelum Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan	1.905,3	2.070,1	1.446,6	1.654,9	1.658,2
Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan	(26,8)	(28,1)	(36,5)	(31,4)	(25,0)
Laba Bersih	1.878,5	2.042,0	1.410,1	1.623,5	1.633,2
Jumlah Saham Beredar (dalam jutaan lembar saham)**	5.433,9	5.433,9	5.433,9	5.356,2	5.285,3
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah)**	345,7	375,8	260,9	309,0	313,9
Dividen per Saham (dalam Rupiah)**	-	187,90	129,75	149,32	154,23
EBITDA***	9.321,2	8.714,8	7.051,9	6.732,1	6.016,7
Neraca					
Jumlah Aktiva	51.693,3	45.305,1	34.228,7	32.787,1	27.872,5
Aktiva Tetap - Bersih****	38.394,1	30.572,8	24.918,6	21.564,8	17.243,2
Modal Kerja	(1.015,5)	(864,5)	(1.137,8)	2.095,6	2.080,3
Jumlah Kewajiban	33.994,8	28.463,0	18.826,3	18.296,1	14.523,4
Hak Minoritas	288,9	297,4	200,6	175,7	164,5
Jumlah Ekuitas	17.409,6	16.544,7	15.201,7	14.315,3	13.184,6
Rasio Usaha (%)					
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha	25,37	27,41	27,77	31,51	30,66
Laba Usaha terhadap Ekuitas	27,19	27,32	22,36	25,51	24,26
Laba Usaha terhadap Jumlah Aktiva	9,16	9,98	9,93	11,14	11,47
Marjin EBITDA	49,96	52,85	57,62	58,09	57,69
Marjin Laba bersih	10,07	12,38	11,52	14,01	15,66
Pengembalian Modal	10,79	12,34	9,28	11,34	12,39
Pengembalian Aktiva	3,63	4,51	4,12	4,95	5,86
Rasio Keuangan (%)					
Rasio Lancar	90,49	92,59	83,28	138,58	146,30
Rasio Hutang terhadap Ekuitas	124,97	100,89	75,13	87,34	71,96
Total Kewajiban terhadap Total Aktiva	65,76	62,83	55,00	55,80	52,11
Dividen per Saham (Rp)					
Final	-	187,90	129,75	149,32	154,23
Tanggal Pembayaran	-	15/7/2008	13/07/07	8/8/2006	15/07/05

* Terhitung mulai tahun 2007, Indosat melaporkan Pendapatan Usaha dan Beban Usaha dari interkoneksi secara kotor.

** Setelah memperhitungkan pemecahan saham dari 1 saham menjadi 5 saham di bulan Maret 2004, Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam tahun berjalan setelah memperhitungkan pengaruh dari ESOP Tahap I dan Tahap II.

*** EBITDA : Laba sebelum bunga, penghasilan dan beban non-usaha lainnya, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi yang dihitung berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia.

**** Setelah pengelompokan kembali oleh perusahaan untuk tahun 2008.

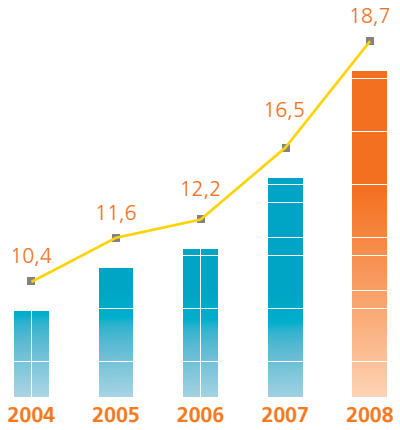

Pendapatan Usaha

(Triliun Rupiah)

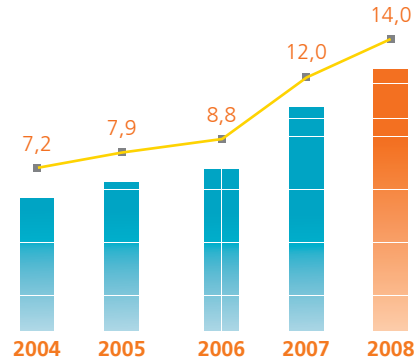

Beban Usaha

(Triliun Rupiah)

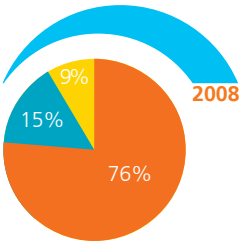

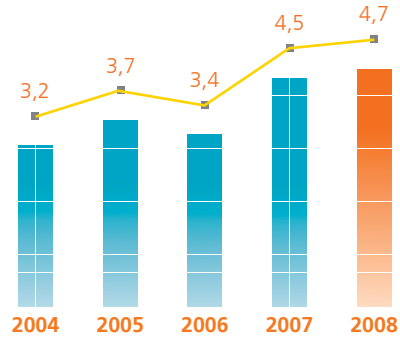

Laba Usaha

(Triliun Rupiah)

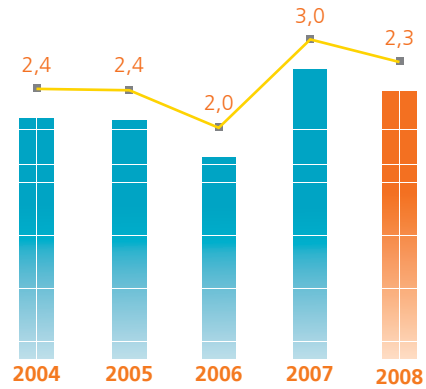

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(Triliun Rupiah)

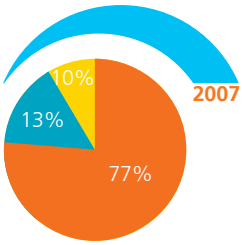

Pendapatan Usaha per Segmen Bisnis

- Selular
- MIDI dan lain-lain
- Telepon Tetap (Telekomunikasi Tetap)

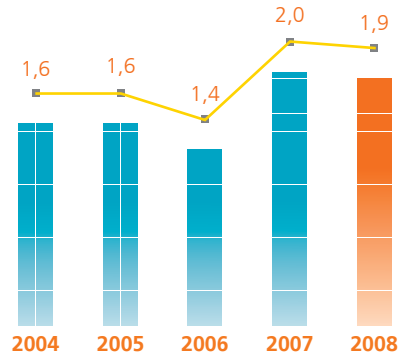

Laba Bersih

(Triliun Rupiah)

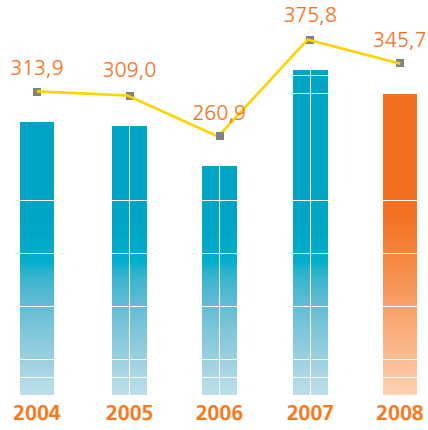

Laba per Saham Dasar

(Rupiah)

Beban Usaha per Akun (%)

(Juta)

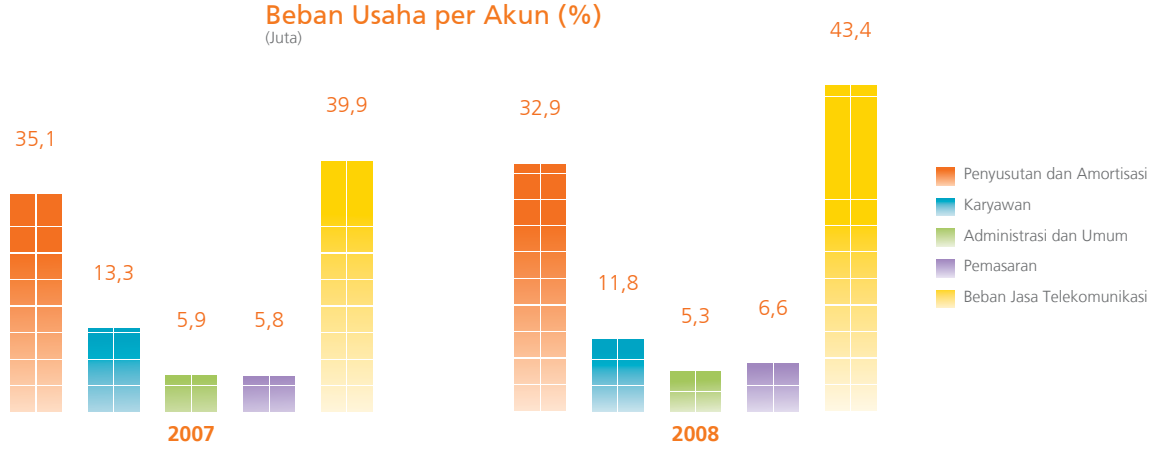

Ikhtisar Operasional

	Satuan	2008	2007	% Perubahan
Selular				
Pelanggan Pra-bayar	pelanggan	35.591.033	23.945.431	48,6%
Pelanggan Pasca bayar	pelanggan	919.213	599.991	53,2%
Total Pelanggan	pelanggan	36.510.246	24.545.422	48,7%
ARPU Pra-bayar	Rp	34.610	47.028	-26,4%
ARPU Pasca bayar	Rp	189.710	182.682	3,8%
ARPU Gabungan	Rp	38.639	52.828	26,9%
Telepon Tetap Nirkabel				
Pelanggan Pra-bayar	pelanggan	681.362	594.203	14,7%
Pelanggan Pasca bayar	pelanggan	80.227	33.731	137,8%
Total Pelanggan	pelanggan	761.589	627.934	21,3%
ARPU Pra-bayar	Rp	17.955	26.590	-32,5%
ARPU Pasca bayar	Rp	94.555	170.160	-44,4%
ARPU Gabungan	Rp	22.858	34.641	-34,0%
SLI				
Trafik Outgoing	menit	473.991.957	296.891.382	59,7%
Trafik Incoming	menit	1.484.450.321	1.236.603.921	20,0%
Total Trafik	menit	1.958.442.278	1.533.495.303	27,7%
Rasio Incoming/Outgoing	-	3,1	4,2	-24,8%
MIDI				
Wholesale				
Sirkit Sewa Internasional Kecepatan Tinggi	sirkit/64kbps	45.594	19.195	137,5%
Sirkit Sewa Domestik Kecepatan Tinggi	sirkit/64kbps	129.315	50.750	154,8%
Sewa Transponder Satelit	transponder	17,2	13,7	25,6%
Komunikasi Data				
Sirkit Sewa Internasional Kecepatan Tinggi	sirkit/64kbps	1.482	1.055	40,5%
Sirkit Sewa Domestik Kecepatan Tinggi	sirkit/64kbps	14.056	11.778	19,3%
Frame Relay	port	494	789	-37,4%
IPVPN	sirkit/64kbps	18.114	7.242	150,1%
Lintasarta				
Sirkit Sewa Kecepatan Tinggi	sambungan	906	922	-1,7%
Frame Relay	akses	4.431	4.652	-4,8%
VSAT	terminal	2.564	1.880	36,4%
IPVPN	sambungan	6.182	4.206	47,0%
IMM				
Internet Dial Up	pelanggan	13.142	21.222	-38,1%
Internet Dedicated	sambungan	1.665	1.396	19,3%
IPVPN	sambungan	562	369	52,3%
Karyawan (Tetap dan Tidak tetap termasuk anak perusahaan)	orang	7.700	7.645	0,7%

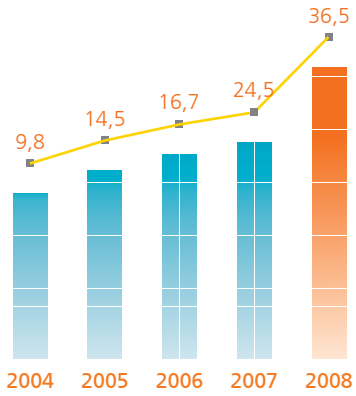

Total Pelanggan Selular
(Juta)

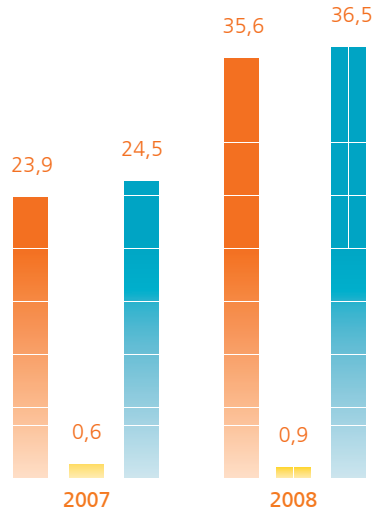

Komposisi Pelanggan Selular
(Juta)

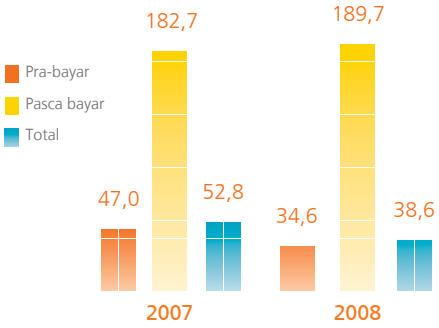

ARPU-Gabungan* Selular
(Ribuan Rupiah)

*ARPU-Gabungan: Pendapatan rata-rata per pelanggan

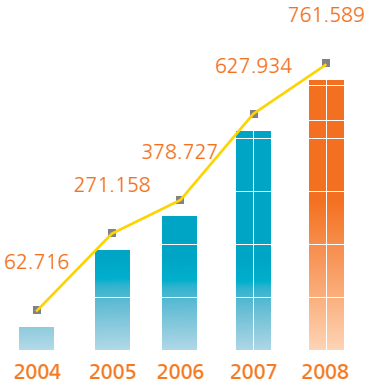

Total Pelanggan *Fixed Wireless*

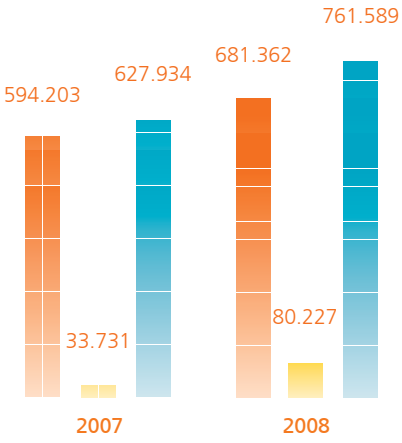

Komposisi Pelanggan *Fixed Wireless*

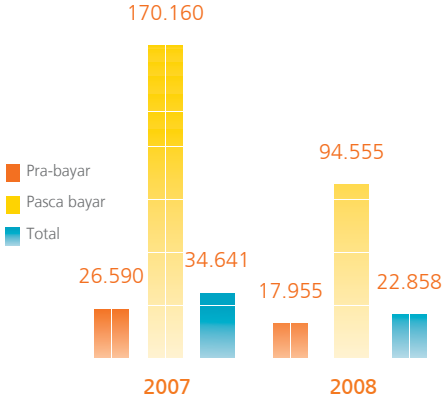

ARPU-Gabungan* *Fixed Wireless*
(Ribuan Rupiah)

*ARPU-Gabungan: Pendapatan rata-rata per pelanggan

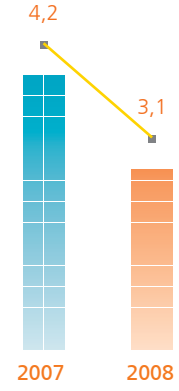

Rasio SLI *Incoming/Outgoing*

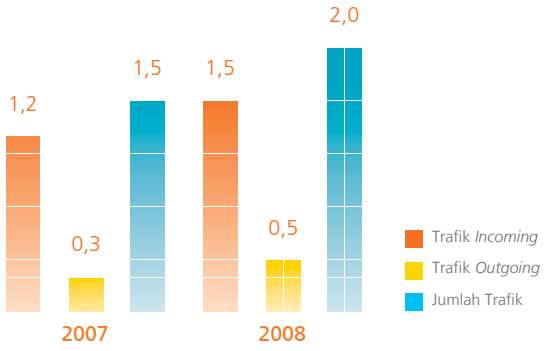

Trafik SLI
(Juta Menit)

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Kinerja Saham	New York Stock Exchange (US$/ADR)		Bursa Efek Indonesia (Rp/Saham)	
	2008	2007	2008	2007
Tertinggi	47,01	51,81	8.750	9.900
Terendah	16,00	30,20	3.950	5.600
Di Akhir tahun	25,85	46,64	5.750	8.650
Laba Bersih per ADR/Saham	1,58	2,00	345,7	375,8
Dividen per Saham	-	0,86	-	187,90
Rasio Dividen yang Dibayarkan (%)	-	50	-	50,00
(%) Dividen Yield Dividen per ADR/Saham Harga Saham di Akhir Tahun	-	0,04	-	2,17
Rasio P/E Harga ADR/Saham Akhir Tahun Laba Bersih per ADR/Saham	16,36x	23,32x	16,63x	23,02x

Harga Saham per Triwulan di NYSE (US$/ADR)	2008		2007		Volume 2008 (ADS)	
Periode	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Triwulan Pertama	47,01	32,72	38,51	30,20	456.187	11.900
Triwulan Kedua	38,91	29,20	40,20	34,21	777.000	15.100
Triwulan Ketiga	37,45	29,86	43,67	33,39	166.100	1.500
Triwulan Keempat	31,80	16,00	51,81	42,85	298.362	4.500

Harga Saham per Triwulan di BEI (Rp)	2008		2007		Volume 2008 (LOT)	
Periode	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Triwulan Pertama	8.750	5.850	6.750	5.600	56.466	2.268
Triwulan Kedua	7.000	5.300	7.050	6.250	255.909	4.232
Triwulan Ketiga	6.750	5.800	7.700	6.550	85.518	1.460
Triwulan Keempat	5.750	3.950	9.900	7.600	132.762	2.514

Profil Obligasi

Keterangan	Jumlah	Suku Bunga	Jatuh Tempo
Obligasi Indosat II	Obligasi seri B: Rp200,0 milyar	16,0% per tahun	2032
Obligasi Indosat III	Obligasi seri B: Rp640,0 milyar	12,875 % per tahun	2010
Obligasi Indosat IV	Obligasi Rp815,0 milyar	12% per tahun	2011
Obligasi Indosat V	Obligasi seri A: Rp1.230 milyar Obligasi seri B: Rp1.370 milyar	10,20% per tahun 10,65 % per tahun	2014 2017
Obligasi Indosat VI	Obligasi seri A: Rp760,0 milyar Obligasi seri B: Rp320,0 milyar	10,25% per tahun 10,80 % per tahun	2013 2015
Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2010	US$234,7 juta	7,75% per tahun	2010
Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2012	US$109,4 juta	7,125% per tahun	2012
Obligasi Syariah Ijarah I	Rp285,0 milyar	Cicilan Imbalan ijarah Rp34,2 milyar per tahun	2011
Sukuk Ijarah Indosat II	Rp400,0 milyar	Cicilan Imbalan ijarah Rp40,8 milyar per tahun	2014
Sukuk Ijarah Indosat III	Rp570,0 milyar	Cicilan Imbalan ijarah Rp58,43 milyar per tahun	2013

Kinerja Saham

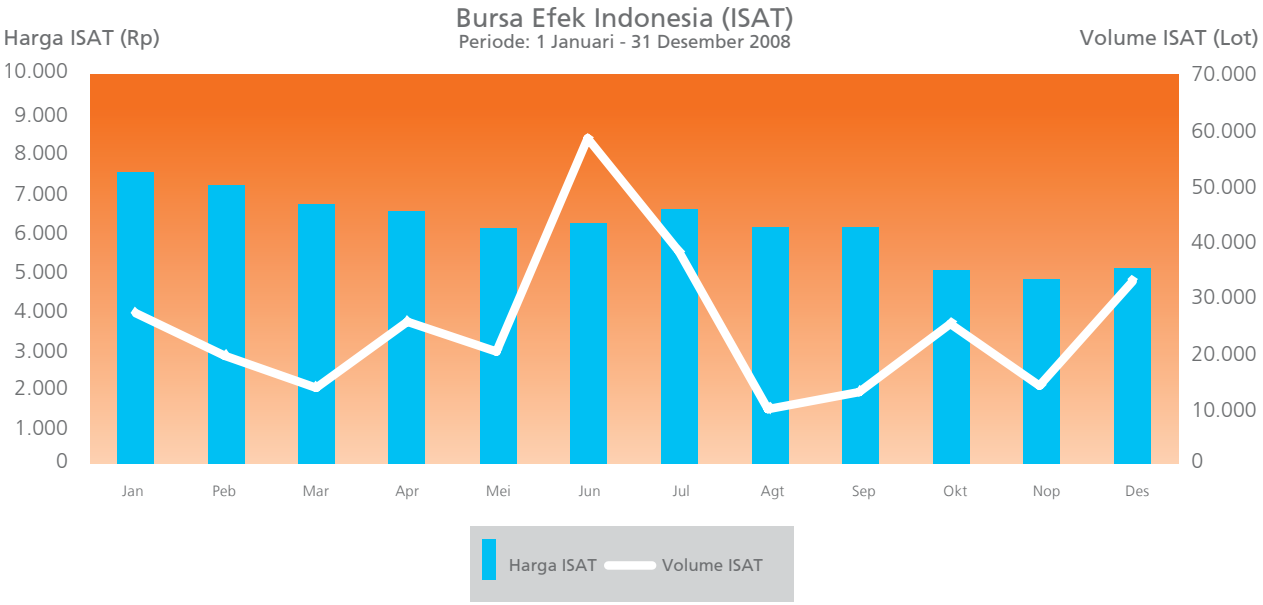

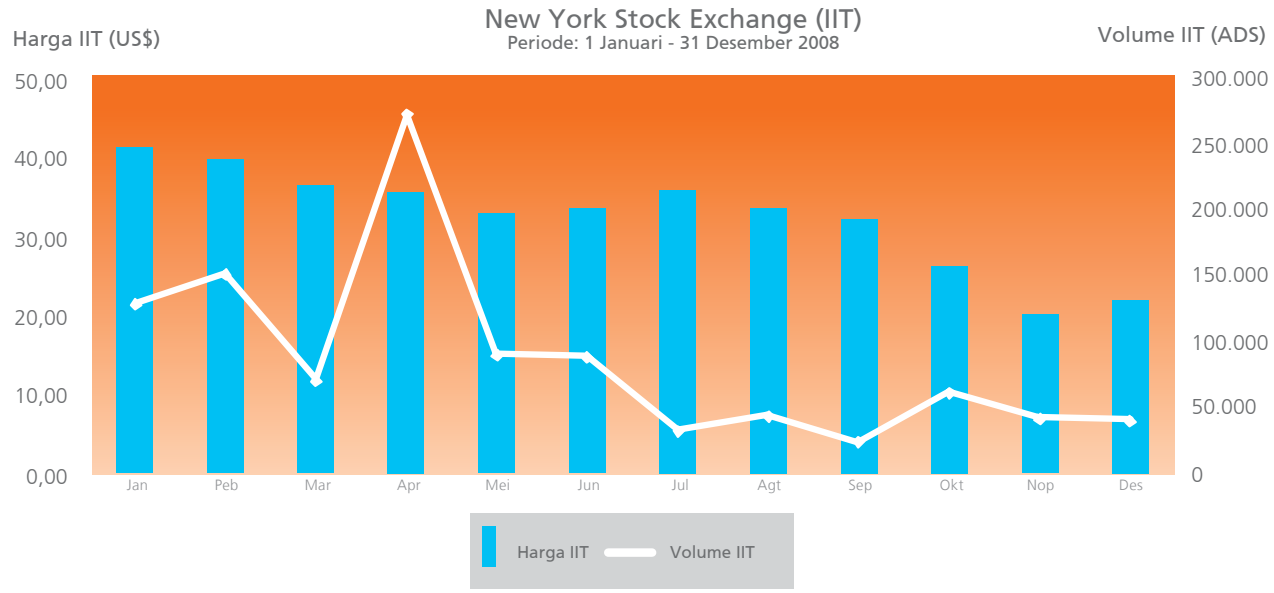

Profil Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan per 31Desember 2008

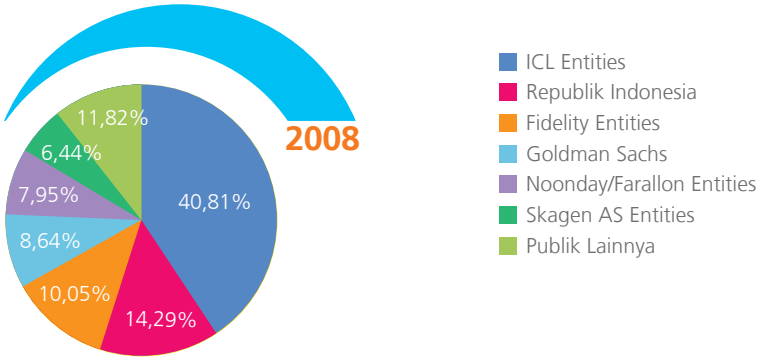

Peristiwa Penting dan Penghargaan 2008

21 Januari

Mentari Gratis 1 Menit Pertama dan IM3 Ce eS-an. Peluncuran program Mentari Gratis 1 Menit Pertama yang memberi fasilitas berbicara secara gratis pada 1 menit pertama setiap kali pelanggan Mentari menelpon pelanggan IM3 juga mendapatkan SMS gratis sepanjang hari ke dua pelanggan Indosat lainnya yang telah didaftarkan sebelumnya.

24 Januari

Penghargaan untuk Rekonstruksi NAD & Nias. Indosat memperoleh penghargaan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD & Nias yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

17 Februari

Top Brand Award 2008. Tiga produk selular Indosat berhasil meraih "Top Brand Award 2008" dari Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing. Matrix berhasil meraih penghargaan untuk kategori kartu Pasca bayar, sementara Mentari dan IM3 untuk kategori kartu Pra-bayar.

21 Februari

IM3 Rp0,01 per detik. Peluncuran IM3 Rp0,01 per detik, membuktikan bahwa IM3 tidak hanya memiliki tarif SMS paling murah, tapi kini juga memiliki penawaran tarif percakapan telepon yang paling kompetitif ke seluruh pengguna selular di Indonesia.

12 Maret

Call Center Award 2008. Contact Center Indosat berhasil meraih peringkat teratas pada penghargaan "Call Center Award 2008" untuk kategori industri telekomunikasi dengan predikat Excellent. Penghargaan diberikan oleh majalah Marketing dan Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL), lembaga konsultan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

23 April

Mentari Sakti, IM3 Rp240 dan StarOne sejam Rp500 (StarOne Gopek). Peluncuran Program Promo Baru Indosat untuk Mentari, IM3 dan StarOne yaitu Mentari Sakti, IM3 Rp240 dan StarOne sejam Rp500 (StarOne Gopek) yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Jakarta pada bulan April.

24 April

Selular Awards 2008. Indosat berhasil meraih tiga penghargaan pada Selular Awards 2008, yaitu "*The Best Corporate Social Responsibility* (CSR) *Program*", "*The Best Brand Value Added Service* (VAS)" untuk Matrix dan "*The Best Brand Mobile Banking* (Matrix)".

30 April

Corporate VPN (Virtual Private Network) dan Mobile Extention. Pada bulan April dilaksanakan peluncuran layanan Corporate VPN (*Virtual Private Network*) suatu solusi layanan yang memberikan kecepatan akses dengan menggunakan teknologi *broadband* 3.5G dan perluasan fasilitas telepon bergerak, layanan integrasi dari PABX *(Private Authomatic Branch Exchange)* dan GSM,sebagai bagian dari Indosat Corporate Solution (ICS), yaitu solusi layanan komunikasi terpadu dari Indosat untuk segmen pelanggan korporat.

4 Mei

Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) "JAKABARE". Pembangunan penggelaran jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) "JAKABARE" yang akan menghubungkan Indonesia dengan Singapura. JAKABARE merupakan singkatan dari pulau-pulau yang akan dihubungkan oleh jaringan kabel laut ini yaitu Jawa – Kalimantan – Batam – Singapore sepanjang lebih dari 1.300 kilometer.

10 Mei

The Biggest and the Most Active Sukuk Issuer Award. Indosat memperoleh penghargaan dari Karim Business Consulting dalam Award Night 2008.

10 Juni

StarOne Jelajah dan StarOne Duo. Peluncuran program StarOne Jelajah, layanan Multi Number bagi pelanggan StarOne pasca bayar dan StarOne pra-bayar yang sering melakukan perjalanan serta peluncuran StarOne Duo, fasilitas yang menggabungkan StarOne pra-bayar dengan Mentari atau IM3 dengan layanan *automatic call forwading* dari StarOne pra-bayar ke Mentari atau IM3.

24 Juni

IWIC for School. Peluncuran "*IWIC for School"* dalam ajang *Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC)* 2008 yang bertajuk *"The 3rd Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC)* 2008" . *"IWIC for School"* adalah kategori baru dalam ajang IWIC 2008 yang sudah berlangsung ketigakalinya. Kategori lain yang dilombakan adalah kategori IWIC for All. Kedua kategori tersebut fokus pada inovasi dalam pengembangan perangkat lunak di teknologi nirkabel yang aplikatif.

12 Agustus

Donasi 17-8-45. Dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Indosat mengajak seluruh pelanggan dan *stakeholder* lainnya untuk berpartisipasi dalam program Donasi 17-8-45 melalui penyisihan pendapatan dari setiap penggunaan layanan Indosat oleh pelanggan Indosat, dimana donasi yang terkumpul akan disumbangkan untuk dunia pendidikan, khususnya sekolah-sekolah di seluruh pelosok tanah air.

13 Agustus

Annual Report Award. Indosat berhasil meraih peringkat pertama penghargaan *"Annual Report Award 2007"* untuk kategori Swasta Non Keuangan Terdaftar (Perusahaan Publik non-BUMN & non-Keuangan).

14 September

Indonesia's Best Wealth Creator Award 2008. Indosat berhasil meraih penghargaan Indonesia's *Best Wealth Creator Award* 2008 dalam acara Penganugrahan Pemenang SWA *100 Wealth Creator Award 2008*. Pemeringkatan ini menggunakan metode pengukuran *Wealth Added Index atau WAI*™ untuk mengukur *shareholder value* yang diciptakan perusahaan yang melebihi harapan para investor atau pemegang saham. Dasar perhitungan yang digunakan dalam metode ini mencakup kinerja keuangan perusahaan yang diperoleh para pemegang saham.

16 Oktober

The 1st Bali Asian Beach Games 2008. Indosat menjadi *Official Partner* dan *Official Telecom Provider* dalam the 1st Bali Asian Beach Games 2008.

4 November

Broadband Service Provider of the Year. Indosat memperoleh penghargaan dalam Forst & Sullivan Telecoms Award sebagai *the Broadband Service Provider of the Year*.

10 November

The Best Achievement Award. Indosat berhasil memperoleh "*The Best Achievement Award"* untuk Penyelenggara Telepon Bergerak Selular, yang merupakan penghargaan tertinggi dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

19 Desember

Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2007. Indosat berhasil meraih penghargaan Kategori Prestasi Perusahaan Terpercaya pada acara penganugerahan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* 2007 yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)* bekerjasama dengan Majalah SWA Sembada.

Struktur Organisasi dan Karyawan

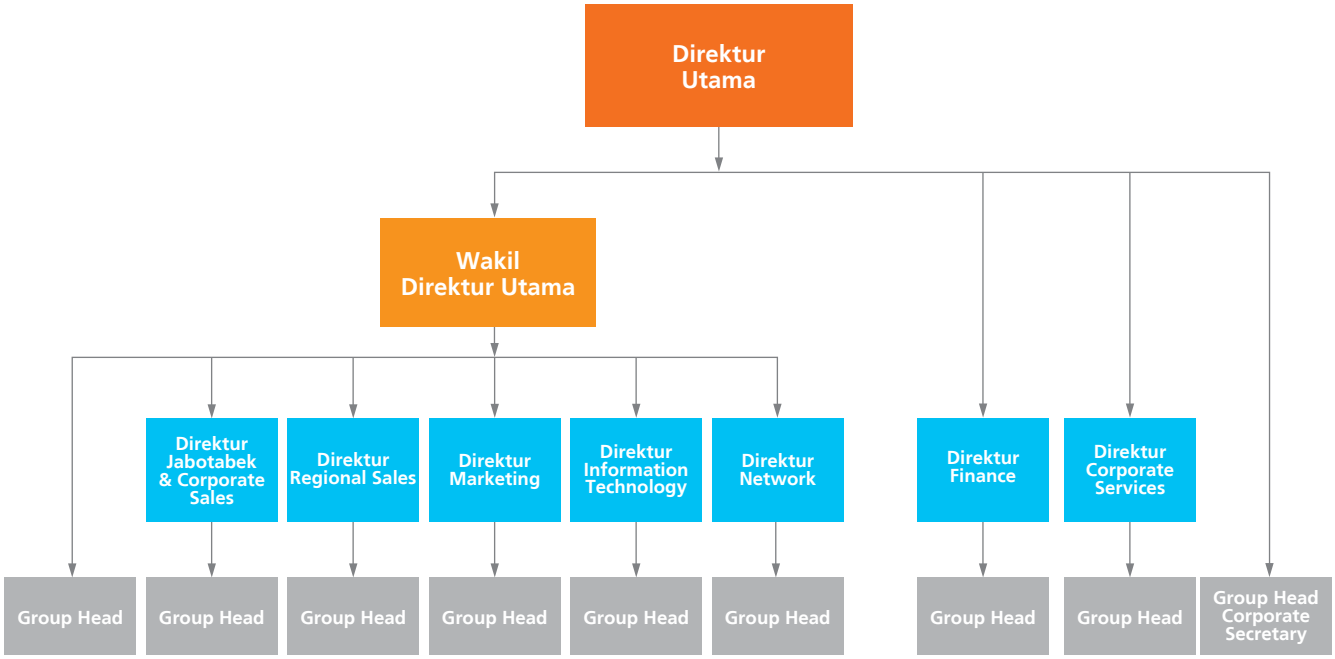

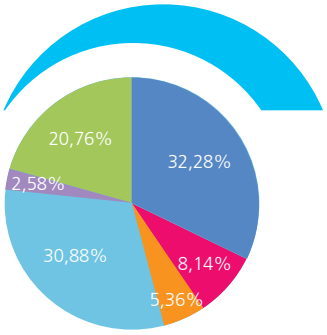

Berdasarkan Fungsi

- Commerce
- Keuangan
- IT
- Jaringan
- Anak Perusahaan
- Support

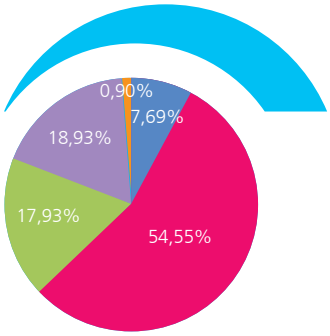

Berdasarkan Pendidikan

- S2 / S3
- S1
- Diploma
- SLTA
- <SLTP

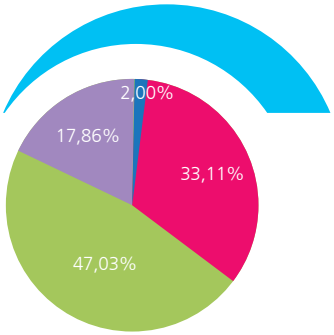

Berdasarkan Usia

- 18 - <25
- 25 - <35
- 35 - <45
- Diatas 45

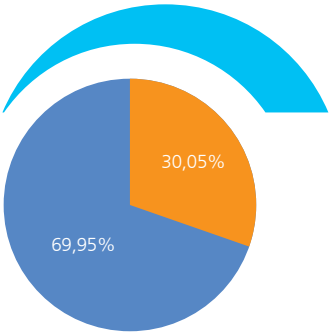

Berdasarkan Jenis Kelamin

- Perempuan
- Laki-laki

Catatan :
Jumlah karyawan per 31 Desember 2008 adalah 7.700 karyawan.

Anak Perusahaan yang Terkonsolidasi

PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")

Indosat memiliki 72,36% saham Lintasarta yang bergerak di bidang jasa komunikasi data kecepatan tinggi dan jaringan korporat

PT Indosat Mega Media ("IMM")

Indosat memiliki 99,85% saham IMM yang bergerak di bidang jasa multimedia dan internet termasuk jasa IP-based multimedia, Internet, dan IP-based LAN dan WAN.

Indosat Finance Company B.V. ("IFB")

IFB didirikan di Amsterdam, Belanda pada Oktober 2003. IFB bergerak di bidang keuangan. Pada tahun 2003, IFB menerbitkan *guaranteed notes* yang jatuh tempo tahun 2010.

Indosat International Finance Company B.V. ("IIFB")

IIFB didirikan di Amsterdam, Belanda pada April 2005. IIFB bergerak di bidang keuangan. Pada tahun 2005, IIFB menerbitkan *guaranteed notes* yang jatuh tempo tahun 2012.

Indosat Singapore Pte.Ltd ("ISP")

ISP didirikan di Singapura pada 21 Desember 2005. ISP adalah anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Indosat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

PT StarOne Mitra Telekomunikasi ("SMT")

SMT didirikan pada 15 Juni 2006 untuk mendukung usaha konstruksi dan operasi jaringan akses tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi *Code Division Multiple Access* (CDMA) 2000-1x di Jawa Tengah dan sekitarnya. Indosat memiliki saham di SMT sebesar 72,54%.

PT Satelindo Multi Media ("SMM") (Dalam Likuidasi)

Indosat memiliki 99,60% saham SMM yang saat ini sedang dalam proses likuidasi.

Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Baik

Pertumbuhan perusahaan yang menciptakan manfaat kepada masyarakat serta mendukung pelestarian lingkungan merupakan sebuah usaha yang patut diteladani. Hal ini dapat tercapai jika perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan tercapainya satu usaha yang berkelanjutan. Indosat adalah korporasi yang berkomitmen untuk menjadi suatu perusahaan yang dapat diandalkan, patuh pada ketentuan dan regulasi serta melaksanakan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertemakan "Indosat Cinta Indonesia".

Indosat telah mengimplementasikan program-program CSR dan fokus dalam lima inisiatif utama yaitu tata kelola perusahaan, kepedulian terhadap pelanggan, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Sepanjang tahun 2008, Indosat telah menyalurkan dana sekitar Rp40 milyar untuk mendukung pelaksanaan program CSR.

Laporan CSR yang lebih rinci, kami sajikan dalam suatu laporan terpisah, yakni "*Sustainability Report* 2008".

Pesan Komisaris Utama

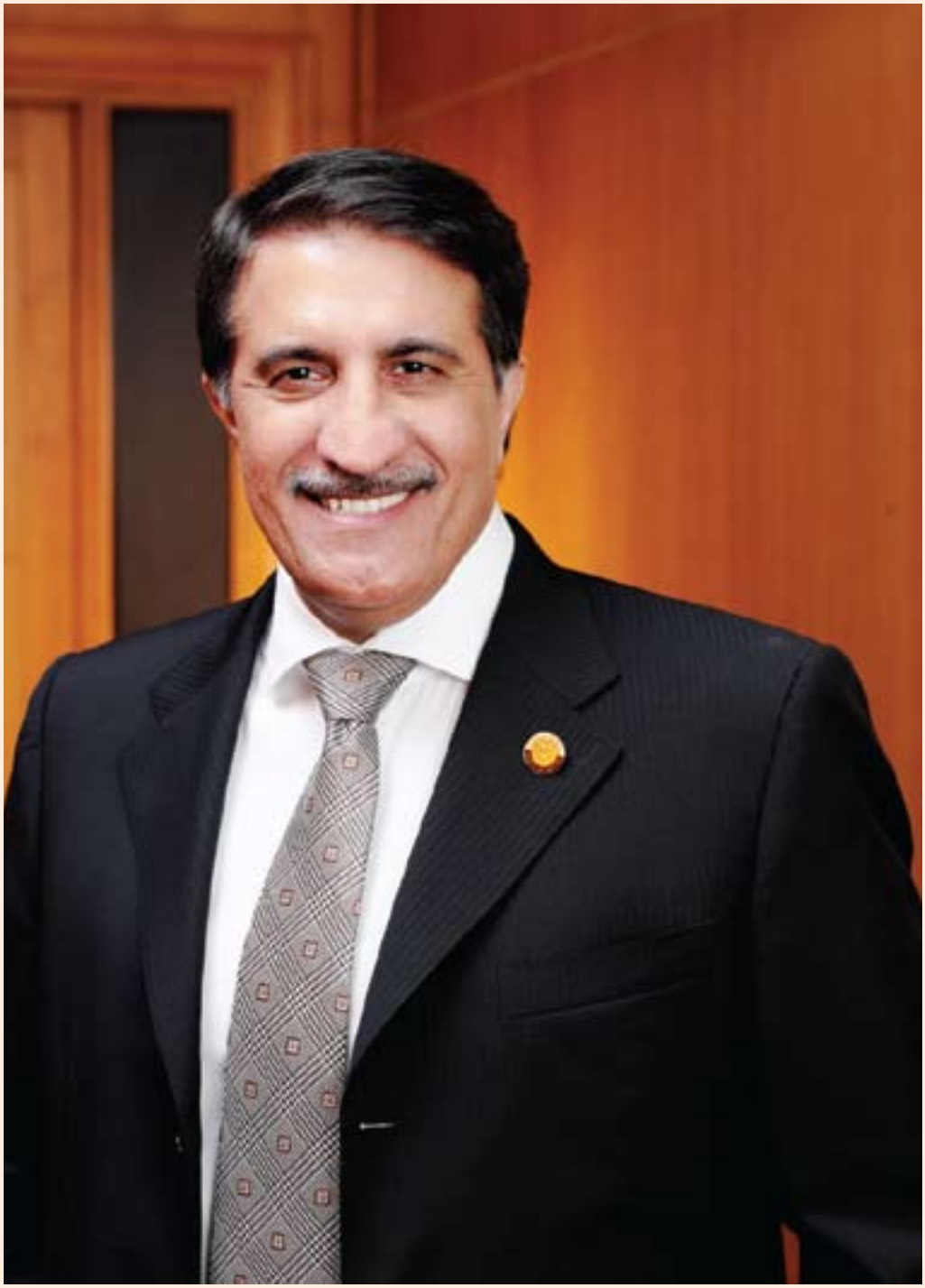

H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani
Komisaris Utama

Sebuah Semangat Dinamis di Tahun Gemilang

Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk dapat memberikan sambutan dalam Laporan Tahunan Indosat 2008 yang merupakan laporan pertama semenjak bergabungnya Indosat ke dalam keluarga besar Qtel. Saya beserta segenap jajaran manajemen Qtel merasa sangat bangga telah dapat mengambil bagian dalam kemajuan Indosat, dan secara pribadi, saya merasa terhormat untuk menyampaikan pesan dalam kapasitas saya sebagai Komisaris Utama dari sebuah perusahaan yang penuh dinamika, inovasi dan tekad yang kuat.

Kekuatan dari semangat yang dinamis ini tidak hanya tercermin pada kegigihan Indosat dalam menghadapi tantangan yang terjadi sepanjang tahun 2008, akan tetapi tercermin pula pada kemampuannya untuk terus tumbuh dan berhasil di tengah bayang-bayang tantangan tersebut. Indonesia dikaruniai dengan potensi ekonomi yang melimpah. Sebagai negara dengan populasi terbesar ke-empat di dunia, Indonesia telah membuktikan keberhasilan dalam pengembangan ekonominya dalam sepuluh tahun terakhir ini. Saya percaya keberhasilan tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Perpaduan semangat dan potensi yang dimiliki Indonesia memiliki kesamaan dengan tekad dan tujuan yang ingin dicapai oleh Qtel. Persamaan ini semakin memantapkan kepercayaan saya akan masa depan Indosat yang kini telah menjadi bagian dari keluarga besar kami.

Pasar telepon nirkabel di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat di dunia. Kondisi pasar selalu diwarnai oleh persaingan ketat disertai tuntutan dan permintaan konsumen yang semakin tinggi dan dinamis. Indosat senantiasa mengikuti perubahan yang terjadi dan tanggap dalam mengambil langkah sepanjang tahun 2008. Hal tersebut telah meningkatkan reputasi Perusahaan sebagai penyedia layanan telepon dan data yang lengkap dengan harga yang kompetitif. Dibutuhkan suatu langkah berani untuk mampu mengembangkan kapasitas serta jangkauan jaringan yang kami miliki. Peningkatan ini telah berhasil menjadikan kami sebagai pemrakarsa layanan *wireless broadband* pra-bayar.

Peningkatan produk dan layanan Indosat telah mendapat tanggapan pasar yang sangat positif, terbukti dengan bertambahnya 12 juta pelanggan baru Indosat di tahun 2008. Kami semua merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Dengan pangsa pasar GSM sebesar 28,7% atau jumlah pelanggan sebesar 36,5 juta, dengan mantap Indosat melangkah memasuki tahun 2009. Hal ini menjadi landasan yang kokoh bagi kami untuk terus mempertahankan tradisi dalam inovasi, pelayanan, dan pertumbuhan.

Mempertahankan Posisi yang Kokoh

Sepanjang tahun 2008, pengenaan tarif yang beraneka ragam di industri telekomunikasi serta meningkatnya penggunaan layanan telepon nirkabel sepanjang tahun 2008, meningkatkan beban jaringan seluruh operator telekomunikasi di Indonesia. Namun, kami berhasil mengambil langkah strategis dalam menghadapi tekanan tersebut berkat kemampuan Indosat dalam pengidentifikasian dini. Langkah-langkah strategis tersebut diterapkan melalui penyesuaian tarif, peningkatan kapasitas jaringan, penawaran fasilitas lainnya serta peningkatan kualitas produk.

Pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut di atas telah mendorong keberhasilan Indosat selama tahun ini. Kami berhasil mempertahankan pangsa pasar yang kuat dan meningkatkan pertumbuhan di ketiga lini usaha kami yaitu Selular, Data Tetap dan Telepon Tetap. Di tingkat operasional, pada akhir tahun 2008 kami berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan operasional terkonsolidasi sebesar Rp18,7 triliun atau 13,2% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Yang patut dicatat, Perusahaan juga berhasil mempertahankan pertumbuhan pendapatan triwulanan secara konsisten sepanjang tahun, walaupun didera oleh persaingan harga yang ketat. Kemampuan Indosat dalam menyediakan beragam layanan yang menjadi daya tarik bagi konsumen merupakan modal utama bagi perusahaan terutama di saat persaingan pasar yang kian meningkat.

Dari sisi profitabilitas, kami membukukan EBITDA terkonsolidasi sebesar Rp9,3 triliun pada akhir tahun 2008. Pencapaian ini setara dengan peningkatan sebesar 7% dibanding tahun lalu dan merupakan kelanjutan pertumbuhan yang baik dan menggembirakan. Tentu saja, seperti halnya yang terjadi di perusahaan lain di Indonesia, pencapaian laba bersih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah sepanjang tahun. Perlu ditekankan bahwa dampak ini utamanya terjadi pada triwulan IV, sebagaimana terlihat dalam pencapaian tahun 2008, Indosat berhasil mempertahankan kinerja operasional dengan baik. Kondisi ini semakin menunjukkan kekuatan jaringan Indosat. Sepanjang tahun 2008, kami membangun 3.402 BTS baru sehingga secara total, saat ini kami telah mengoperasikan 14.162 BTS di seluruh Indonesia.

Komitmen Kuat

Salah satu nilai yang dipegang teguh oleh Indosat dan juga keluarga besar Qtel adalah komitmen untuk beroperasi dengan mengutamakan tanggung jawab sosial. Seperti layaknya Qtel, Indosat telah menerapkan standar tertinggi atas pelaksanaan tata kelola perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), tidak terkecuali pula di tahun 2008.

Di bidang tata kelola, Indosat senantiasa melakukan upaya penyempurnaan dan perbaikan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek New York (*New York Stock Exchange*/NYSE), Indosat selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kedua bursa tersebut. Seluruh peraturan yang dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), *the US Securities and Exchange Commission* (US-SEC) dan aturan-aturan yang ditetapkan pada *Sarbanes - Oxley Act* (SOX) 404, dipastikan terpenuhi oleh Perusahaan sesuai atau bahkan melebihi standar yang dipersyaratkan.

Tujuan jangka panjang CSR Indosat terfokus pada pelaksanaan kegiatan di lima bidang. Perusahaan bertekad untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, memegang teguh komitmen terkait pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, sehingga seluruh kegiatan ini akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat sekitar dimana kami beroperasi.

Contoh komitmen sangat beragam dan bervariasi. Pada tahun 2008, Indosat terus melaksanakan program Pelayanan Terbaik yang berfokus pada perbaikan tingkat pelayanan dan kualitas yang diberikan kepada pelanggan. Indosat tidak pernah mengenal lelah dalam melaksanakan inisiatif ini, sehingga di tahun 2008, kami dianugerahi penghargaan sebagai *Best Contact Center and Service Quality*.

Di bidang lingkungan, Indosat berhasil menyelesaikan satu kajian inovatif atas potensi penggunaan energi alternatif dalam pengoperasian BTS pada jaringan yang kami miliki. Pelaksanaan solusi ramah lingkungan ini diharapkan akan mulai diterapkan pada jaringan kami di tahun 2009.

Lebih jauh lagi, Perusahaan berhasil mempertahankan komitmen terhadap sejumlah program yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan bidang sosial dan kesejahteraan, yakni Indonesia Belajar, Indonesia Sehat, Berbagi Bersama Indosat dan Indosat Peduli. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan standar pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Jajaran Komisaris dan saya pribadi merasa bangga mampu melanjutkan dukungan terhadap lima program CSR tersebut yang juga mencerminkan komitmen Qtel terhadap dukungan atas peningkatan kesehatan dan pendidikan di masa yang akan datang di lingkungan tempat kami beroperasi.

Penghargaan Tulus

Perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi sumbangsih pada kesuksesan Indosat di tahun 2008. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan Indosat yang masing-masing telah memberikan kontribusinya pada perusahaan, yang dapat mereka banggakan. Rasa terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada mitra kerja dan institusi lain yang selama ini telah menjalin hubungan kerjasama dalam mendukung kegiatan usaha yang kami lakukan tahun ini. Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham yang tidak pernah berhenti mendukung pertumbuhan serta pengembangan Perusahaan.

Menatap ke Depan

Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,5 juta serta masih rendahnya tingkat penetrasi telepon nirkabel relatif terhadap skala perekonomian nasional, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Memperhatikan gejolak dan tantangan ekonomi yang masih berlanjut hingga saat ini, kami yakin bahwa operator telekomunikasi yang mampu bertahan di tahun 2009 adalah mereka yang mampu menawarkan layanan dinamis, jangkauan jaringan komprehensif serta layanan konsumen terbaik.

Indosat merupakan satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Ke depan, Indosat akan memfokuskan pada upaya mempertahankan momentum yang telah diraihnya di tahun 2008, sekaligus menjawab kompetisi pasar melalui penyediaan jaringan terbaik, nilai ekonomis dan kualitas percakapan, sebagai salah satu negara di Asia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa tahun 2009 akan tetap diwarnai dengan ketidakpastian bagi kami dan seluruh industri telekomunikasi. Oleh karenanya, kami akan senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan rencana kerja Perusahaan akan dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

Melalui dukungan yang diberikan oleh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, mitra kerja, dan anda, para pemegang saham, saya yakin Indosat akan melanjutkan kesuksesannya di tahun 2009 sekaligus mampu mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan disertai peningkatan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani
Komisaris Utama

Dewan Komisaris

H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani - *Komisaris Utama*

H.E. Sheikh Mohamed Bin Suhaim Hamad Al Thani - *Komisaris*

Dr Nasser Marafih - *Komisaris*

Jarman - *Komisaris*

Rachmat Gobel - *Komisaris*

Rionald Silaban - *Komisaris*

George Thia Peng Heok - *Komisaris Independen*

Setyanto P. Santosa - *Komisaris Independen*

Soeprapto - *Komisaris Independen*

Michael Latimer - *Komisaris Independen*

Biografi Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 188.

Laporan Direksi

Johnny Swandi Sjam
Direktur Utama

Kinerja di Tengah Tekanan

Tahun 2008 merupakan periode yang penuh tantangan bagi Indosat. Krisis keuangan dunia yang mulai meruak di paruh kedua tahun 2007, dan terus berlanjut sepanjang tahun 2008, mulai terasa dampaknya di Indonesia seiring meluasnya krisis tersebut ke kawasan Asia Pasifik. Gejolak ekonomi di kawasan ini hingga sekarang masih terus berlanjut, oleh karenanya kami senantiasa mencurahkan segenap perhatian untuk terus mengikuti perkembangan kondisi tersebut.

Pasar sektor usaha yang kami geluti pun tidak luput dihadapkan pada tantangan yang sama di tahun 2008. Pasar telepon nirkabel di Indonesia diwarnai dengan kompetisi yang semakin meningkat pada pertengahan dan sepanjang paruh kedua tahun 2007. Sepanjang tahun 2008, dorongan untuk penurunan tarif yang disertai dengan peningkatan signifikan terhadap penggunaan dan lalu lintas jasa telepon nirkabel, telah banyak memberi tekanan bagi para pemain telekomunikasi di Indonesia. Beberapa faktor tersebut telah membawa angin perubahan yang signifikan, dimana sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara dengan tarif selular yang tinggi, kini menjadi salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang menyediakan layanan selular dengan tarif terendah.

Alhamdulillah, di tengah bayang-bayang tantangan tersebut di atas, dapat saya laporkan bahwa memasuki usianya yang ke-41, Indosat mampu mempertahankan kemampuannya dalam mewujudkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2008. Indosat berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari ketiga lini usahanya serta memberikan pertumbuhan EBITDA. Seluruh pencapaian ini telah berhasil meningkatkan nilai Perusahaan bagi para pemegang saham serta meletakkan landasan yang kokoh untuk terus berkarya di tahun 2009. Pelaksanaan strategi yang dilakukan secara efektif telah berhasil meningkatkan kinerja kami dalam pencapaian target operasional, melalui langkah-langkah yang menitikberatkan pada tema "Pelayanan Terbaik".

Atas nama Direksi, saya ingin menggarisbawahi semangat, kegigihan serta pencapaian yang telah ditunjukkan oleh seluruh karyawan Indosat dan untuk itu, saya sampaikan ucapan terima kasih atas keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan pasar secara efisien dan efektif sepanjang tahun 2008.

Kekuatan untuk Tumbuh

Melalui perencanaan dan pelaksanaan strategi yang berorientasi pada target, selama tahun 2008 kami mampu menjaga pertumbuhan ketiga lini usaha Indosat - Selular, Data Tetap, dan Telepon Tetap - meskipun sepanjang tahun kami dan juga para pelanggan kerap dihadapkan pada tantangan kondisi perekonomian.

Secara operasional, kami berhasil meraih pertumbuhan pendapatan operasional terkonsolidasi sebesar 13,2% dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lebih jauh lagi, kami mampu menjaga pertumbuhan pendapatan triwulanan secara konsisten di tengah peningkatan persaingan di pasar industri. Hal ini mencerminkan kekuatan yang melandasi kegiatan operasional serta kekuatan tim Indosat untuk terus mendorong pertumbuhan di masa yang akan datang walaupun dihadapkan pada kompetisi yang semakin ketat. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang membanggakan bagi Indosat.

Dengan kontribusi pendapatan sebesar 76% terhadap pendapatan terkonsolidasi, jasa selular kami berhasil mencapai laju pertumbuhan sebesar 11,2% dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini utamanya didukung oleh peningkatan jumlah pelanggan secara signifikan. Pada tahun 2008, kami mencatat 12 juta pelanggan baru yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam sejarah kami, sehingga total pengguna jasa kami pada akhir tahun 2008 berjumlah 36,5 juta pelanggan. Faktor lain yang mendorong peningkatan

ini adalah kenaikan permintaan masyarakat akan jasa *wireless broadband* 3.5G yang kini sudah tersedia di 19 kota di Indonesia. Keberhasilan ini sangat mendorong kami dan mengindikasikan bisnis kami yang masih berpotensi, bahkan pada masa-masa yang penuh tantangan, pelanggan kami tetap membutuhkan produk dan layanan terbaru dengan nilai yang lebih dimana bisnis kami telah memiliki kapasitas dan kekuatan untuk memberikan pelayanan.

Pada lini usaha lainnya, layanan data tetap, kami berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 26,1% hingga akhir tahun 2008, dengan perolehan pendapatan sebesar lebih dari Rp2,7 triliun. Pertumbuhan yang menggembirakan ini didorong oleh adanya peningkatan permintaan dari segmen pelanggan korporasi atas produk-produk internet, sambungan berkecepatan tinggi serta IP/VPN. Di samping itu, kami juga berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan pada lini usaha kami lainnya, layanan telepon tetap, yang meningkat sebesar 11,3% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang sehat ini tercapai berkat peningkatan *incoming traffic* dari sambungan internasional langsung (IDD) serta peningkatan jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel. Hingga akhir tahun 2008, jumlah pengguna jasa telepon tetap nirkabel kami tercatat sebesar lebih dari 750.000 pelanggan yang tersebar di 52 kota di Indonesia.

Kekuatan pertumbuhan kami pada tahun 2008 tidak semata ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian pendapatan, namun juga perolehan laba usaha. EBITDA pada akhir tahun 2008 tercapai sebesar Rp9,3 triliun atau meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kelanjutan tingkat pertumbuhan yang menggembirakan.

Sebagai upaya kami dalam merespon tekanan kompetisi pasar secara efektif yang muncul pada tahun ini, kami telah melaporkan kenaikan beban usaha sebesar 16,4%. Kenaikan ini terjadi seiring dengan langkah Perusahaan yang memandang perlu dilakukannya pengembangan jaringan yang ada. Pada akhirnya, kenaikan belanja operasional ini telah memberikan dukungan untuk perkembangan penting terhadap tingkat, pilihan serta kualitas layanan kami. Pengembangan ini juga telah meningkatkan daya saing kami di tahun 2008, sehingga kami mampu meraih pertumbuhan di tengah-tengah besarnya tantangan yang hadir sepanjang tahun ini.

Namun, peningkatan belanja operasional ini telah memberi sedikit tekanan pada perolehan margin EBITDA di tahun 2008. Marjin EBITDA untuk tahun 2008 tercatat sebesar 50%, dibandingkan dengan 52,8% pada tahun 2007.

Terkait dengan perolehan laba, Perusahaan mencatat penurunan laba sebesar 8% dibanding dengan perolehan laba di tahun sebelumnya. Perlu dicatat bahwa penurunan ini terjadi akibat merosotnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dolar secara tajam yang terjadi pada tahun 2008, terutama di triwulan IV. Namun demikian, hasil akhir kinerja tersebut tidak mempengaruhi kekuatan serta kemampuan kinerja operasional kami secara keseluruhan. Kami terus melakukan lindung-nilai (*hedging*) lebih dari 50% total kewajiban dalam mata uang asing kami sebagai antisipasi perlindungan Perusahaan atas fluktuasi nilai tukar di masa depan.

Kekuatan Berinovasi

Di setiap lini usaha yang telah kami miliki, kami senantiasa berupaya untuk melakukan inovasi tingkat layanan dan produk. Sepanjang tahun 2008, kami menjadi pemrakarsa, bahkan menjadi pemimpin, dari dua bidang yang memiliki prospek penting di masa depan, yakni Data dan *Wireless Broadband*.

Terkait layanan data tetap, kami berkeyakinan bahwa Indosat menempati posisi terdepan untuk pasar *BlackBerry* di Indonesia. Lebih jauh lagi, kami juga senantiasa menyediakan pelayanan dengan nilai-tambah untuk para pelanggan, yakni *I-GPS* dan *I-Stock* yang hanya dapat diunduh oleh para pengguna *BlackBerry* kami.

Selain itu, untuk layanan *Wireless Broadband*, Indosat merupakan operator pertama di Indonesia yang menyediakan pelayanan pra-bayar untuk produk yang disediakan oleh IMM, salah satu anak perusahaan Indosat. Peluncuran produk ini mendapat sambutan yang sangat baik dari pasar dan menjadi salah satu produk *broadband* pelanggan yang paling laris terjual di tahun 2008. Kami juga menyederhanakan akses dan tata cara pembayaran, salah satunya melalui *single voucher*, dimana pelanggan pra-bayar dapat mengisi ulang pulsa, baik untuk GSM maupun CDMA dengan *voucher* yang sama. Selanjutnya, kami akan terus berkonsentrasi pada inovasi produk dan layanan sejenis dimasa yang akan datang.

Kami memahami bahwa salah satu tuntutan pengguna jasa telepon bergerak di Indonesia adalah kualitas serta kehandalan percakapan. Kemampuan kami dalam menjawab tuntutan tersebut sangat didukung oleh fasilitas jaringan yang kami miliki, dimana pada tahun 2008, kami telah membangun sejumlah 3.402 BTS baru. Di samping itu, guna meningkatkan jangkauan dan kehandalan jaringan lebih baik lagi, kami telah menginvestasikan sekitar US$200 juta untuk peluncuran Satelit Palapa-D sebagai bagian dari komitmen total investasi tahun 2008 sebesar US$1,4 milyar untuk mengembangkan cakupan dan kehandalan jaringan.

Komitmen Berkelanjutan; Mewujudkan Pelayanan Terbaik

Sejak berdirinya Indosat pada tahun 1967, Perusahaan selalu meyakini bahwa salah satu peran yang diemban oleh Perusahaan adalah memberikan pelayanan bagi lingkungan sekitarnya. Pada tahun 2008, Indosat memperluas cakupan perannya melalui pengembangan komitmen menuju konsep *triple bottom line*, yakni masyarakat, bumi dan laba. Pada tahun 2008, Indosat membentuk sebuah komite yang didedikasikan secara khusus untuk menangani serta mengembangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fungsi utama komite ini adalah melakukan evaluasi bagi langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Perusahaan untuk mendukung realisasi atas konsep tersebut.

Kemudian, kami menentukan langkah-langkah tersebut melalui komitmen kami untuk menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia. Dengan meningkatkan jumlah dana, teknologi serta keahlian yang kami salurkan, Indosat senantiasa berupaya membuat perbedaan dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dimana kami beroperasi. Hal ini tercermin dari jumlah dana yang disalurkan oleh Perusahaan selama tahun 2008 sebesar Rp40 milyar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 33% dibandingkan dengan dana yang disalurkan pada tahun 2007.

Seluruh program yang dilaksanakan serta dana yang disalurkan telah memberikan manfaat bagi setiap lapisan masyarakat. Salah satunya adalah keterlibatan Perusahaan dalam program-program internasional, seperti *UN Global Compact*, yang telah beberapa tahun diterapkan oleh Perusahaan. Penerapan inisiatif ini kami terapkan terlebih dahulu di lingkungan yang terdekat dengan Perusahaan. Kami senantiasa menelaah hal-hal yang berpotensi menghambat pengembangan sosial dan ekonomi di negeri ini, baik hal-hal yang ada di lingkungan Perusahaan maupun isu-isu lain yang lebih besar di luar Perusahaan. Saya merasa bangga bahwa beberapa upaya kami terkait pengembangan sosial dan ekonomi ini telah berhasil memperoleh pengakuan dan penghargaan, seperti:

1. Penghargaan *The Best Achievement Award* dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia pada malam Penghargaan Telekomunikasi 2008.
2. Predikat Perusahaan Terpercaya dari *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) bekerja sama dengan majalah SWA sehubungan dengan program *Corporate Governance Perception Index* 2007.
3. Peringkat pertama untuk kategori Perusahaan Swasta Non-Keuangan terdaftar pada *Annual Report Award* 2007.
4. Peringkat Kedua atau *Gold* dalam *Service Quality Awards* untuk kategori *Service Point Celular* GSM dari *Indonesian Service Satisfaction Index*.
5. Penghargaan tertinggi untuk *Goal* 5 untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dalam *MDGs Award* yang merupakan kerjasama Metro TV dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ke depan, kami mengharapkan untuk dapat terus melaksanakan program-program CSR selanjutnya secara efektif. Selain itu, kami terus mengkaji dan menelaah upaya-upaya yang dapat meningkatkan dukungan kami serta mengembangkan bidang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Sigap Menghadapi Tantangan

Dengan keyakinan yang mantap dalam mengakhiri tahun 2008 dan menapaki tahun 2009, Indosat telah menjadi anggota penting dengan peranan besar dari keluarga besar Qtel sejak pertengahan tahun 2008. Seperti layaknya Indosat, Qtel pun merupakan suatu kelompok usaha yang memiliki visi dan tekad yang menatap ke masa depan. Kelompok usaha ini bertekad untuk menjadi salah satu dari 20 besar perusahaan telekomunikasi dunia pada tahun 2020. Dengan tekad yang sama, Indosat akan memainkan peranan penting dalam mendukung tujuan Qtel dalam mewujudkan visinya. Saya beserta jajaran Direksi lainnya sangat

bersemangat mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dari proses perwujudan tujuan tersebut.

Indosat dan Qtel bersama-sama meyakini bahwa potensi pertumbuhan pasar telekomunikasi di Indonesia masih menjanjikan. Indosat kini memiliki kesempatan luas untuk dapat berbagi pengalaman dengan Qtel, meningkatkan sinergi di antara kedua perusahaan serta memanfaatkan kemampuan bersama guna mewujudkan tujuan strategis Indosat.

Kami menyadari faktor ketidakpastian akan kembali hadir di tahun 2009. Namun demikian, dengan kekuatan pasar yang Indosat miliki, kami memasuki tahun 2009 dengan rasa optimisme disertai kehati-hatian; cermat dalam mengidentifikasi potensi pasar serta fokus dalam menjalankan seluruh rencana Perusahaan dengan penuh perhitungan.

Memasuki tahun 2009 dengan berbekal fokus yang jelas, Indosat percaya akan mampu mempertahankan posisi terdepannya di Pulau Jawa melalui penyediaan produk dan layanan yang unggul serta didukung dengan jaringan kapasitas yang lebih baik. Di samping itu, kami juga akan mencurahkan tenaga dan pemikiran untuk mengembangkan pelayanan telepon bergerak di luar Pulau Jawa dimana kami masih melihat adanya potensi pertumbuhan. Kami juga berharap untuk dapat menyelesaikan beberapa proyek investasi strategis yang akan mendukung peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan kami, dimana 3.5G *wireless broadband* memiliki peranan di tahun 2009.

Ungkapan Terima kasih dan Penghargaan

Saya beserta segenap anggota Direksi lainnya, Insya Allah, akan senantiasa menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan kepada kami serta melakukan yang terbaik bagi kepentingan seluruh pemegang saham Indosat. Kami juga menghaturkan terima kasih atas segala kepercayaan dan keyakinan yang telah diberikan, semoga dukungan ini akan terus berlangsung di tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya.

Atas nama pribadi dan juga mewakili Direksi, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Peter Seah Lim Huat, Bapak Roes Aryawijaya, Bapak Sio Tat Hiang, Bapak Sum Soon Lim, Bapak Lim Ah Doo dan Bapak Lee Theng Kiat, yang telah menyelesaikan masa pengabdian dengan penuh dedikasi dan semangat di Dewan Komisaris.

Direksi juga menyambut hangat bergabungnya H.E.Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani, Dr. Nasser Marafih, Bapak Jarman, Bapak Rionald Silaban, Bapak Rachmat Gobel dan Bapak Michael Latimer sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru pada tahun 2008. Kami yakin bahwa pengalaman serta keahlian dan komitmen yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris yang baru akan membawa semangat baru serta pemikiran segar dalam melanjutkan langkah-langkah strategis yang telah dirintis oleh para anggota Dewan Komisaris sebelumnya.

Secara pribadi, saya juga sampaikan penghargaan kepada anggota Direksi serta seluruh karyawan Indosat atas seluruh kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama tahun 2008. Atas nama Direksi, saya sampaikan pula penghargaan serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh mitra kerja, *stakeholder* serta pelanggan atas dukungan yang diberikan kepada Indosat sepanjang tahun 2008.

Memasuki tahun 2009, saya bertekad untuk melanjutkan langkah strategis Indosat, mengingat kesempatan, pengalaman serta kemampuan yang semakin luas terbuka bagi Indosat yang kini telah menjadi bagian dari keluarga besar Qtel. Semoga kita semua akan semakin dapat mewujudkan lebih banyak lagi sinergi yang mampu mewujudkan pelaksanaan langkah-langkah strategis di tahun 2009, maupun di tahun-tahun berikutnya.

Johnny Swandi Sjam
Direktur Utama

Direksi

Johnny Swandi Sjam - *Direktur Utama*

Kaizad Bomi Heerjee - *Wakil Direktur Utama*

Fadzri Sentosa - *Direktur Jabotabek & Corporate Sales*

Guntur S. Siboro - *Direktur Marketing*

Syakieb Ahmad Sungkar - *Direktur Regional Sales*

Raymond Tan Kim Meng - *Direktur Network*

Roy Kannan - *Direktur Information Technology*

Wong Heang Tuck - *Direktur Finance*

Wahyu Wijayadi - *Direktur Corporate Services*

Biografi Direksi dapat dilihat pada halaman191.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* merupakan syarat penting bagi tercapainya tujuan Perusahaan. Kami senantiasa berupaya maksimal untuk menjalankan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi para pemegang saham dan para *stakeholder*. Terkait dengan hal tersebut, kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menuju standar tertinggi.

Sebagai perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya secara *dual listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *New York Stock Exchange* (NYSE), kami senantiasa berupaya mematuhi seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2008, kami berhasil menjaga komitmen dengan baik yang terbukti dengan tidak adanya teguran yang bersifat material, baik dari otoritas pasar modal maupun pemegang saham.

Tahun 2008 juga ditandai oleh keberhasilan Indosat untuk ketiga kalinya memenuhi ketentuan Pasal 404 *Sarbanes Oxley Act* (SOX). Hal tersebut dicerminkan dalam opini yang dikeluarkan oleh Auditor Independen kami dalam Laporan Tahunan 2008 dalam Format 20-F yang kami sampaikan ke *United States-Securities and Exchange Commission* (US-SEC), yang menyatakan bahwa Perusahaan memelihara pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara efektif pada tahun 2008.

Dalam menjalankan perusahaan, kami menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia. Pada saat yang sama kami berupaya untuk senantiasa memperhatikan perkembangan praktek tata kelola terbaik yang dari perusahaan-perusahaan dunia lainnya.

Kegiatan tata kelola perusahaan dilandasi oleh lima prinsip utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kesetaraan seperti tertuang dalam Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan di bawah ini:

Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan

Transparansi

Komite Keterbukaan Informasi
Informasi Material
Media Distribusi
Paparan Publik
Corporate Secretary

Pertanggung Jawaban

Perubahan Anggaran Dasar
Asset Liability Management
Kepatuhan terhadap batasan (Covenant)
Kepatuhan terhadap Regulasi
Pengendalian Internal
Tanggung jawab pada Stakeholder

Akuntabilitas

Kode Etik & Nilai-nilai Perusahaan
Struktur Pengelolaan Perusahaan
Dewan Komisaris
Komite-komite Dewan Komisaris
– Komite Audit
– Komite Remunerasi
– Komite Manajemen Risiko
Direksi
Indikator Kinerja Utama
Kebijakan Penanganan Pengaduan

Independensi

Perangkapan Jabatan
Daftar Khusus
Auditor Independen
Rapat Umum Pemegang Saham

Kesetaraan

Kesetaraan Informasi bagi Pemegang Saham
Larangan Perdagangan Orang Dalam
Sumber Daya Manusia
Perjanjian Kerja Bersama
Komunikasi Internal

TRANSPARANSI

Kami berupaya menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, dan akurat, serta mudah diakses oleh para *stakeholder*.

Komite Keterbukaan Informasi

Kami memiliki kebijakan "Prosedur dan Pengawasan Keterbukaan Informasi". Kami juga membentuk Komite Keterbukaan Informasi (*Disclosure Committee*) sejak tahun 2004 sesuai Pasal 302 *Sarbanes Oxley Act*.

Komite Keterbukaan Informasi material bertanggung jawab untuk menjamin pengungkapan informasi secara akurat dan tepat waktu. Komite ini bertanggung jawab kepada Direksi dan beranggotakan beberapa pejabat senior antara lain *Corporate Secretary* dan *Group Head* yang bertanggung jawab dalam bidang Akuntansi, *Controlling, Treasury, Internal Audit*, Pengendalian Internal, *Legal*, dan Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2008, Komite Keterbukaan Informasi telah mengadakan empat kali sesi rapat dan 19 kali pembahasan melalui media elektronik.

No.	Diskusi Secara Elektronik	Rapat
1	Prospektus Awal Indosat Obligasi VI	1. 23 Januari 2008 : Prospektus Awal Obligasi Indosat VI dan Sukuk Ijarah III
2	Prospektus Awal Sukuk Ijarah Indosat III	2. 29 Januari 2008 : Prospektus Final Obligasi Indosat VI dan Sukuk Ijarah III
3	Prospektus Final Obligasi Indosat VI	3. 25 Februari 2008 : *Due Diligence* dan Paparan Publik Obligasi Indosat VI dan Sukuk Ijarah III
4	Prospektus Final Sukuk Ijarah Indosat III	4. 13 Mei 2008 : Persiapan GCG *Self Assesment*
5	Laporan Keuangan Tahunan 2007	
6	Laporan Tahunan dalam Format 20-F tahun 2007	
7	Laporan Tahunan 2007	
8	*Corporate Profile* 2007	
9	Laporan Keuangan Triwulan 1 Tahun 2008	
10	Laporan Keuangan Triwulan 2 Tahun 2008	
11	Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun 2008	
12	Info Memo Tahunan Tahun 2007	
13	Info Memo Triwulan 1 Tahun 2008	
14	Info Memo Triwulan 2 Tahun 2008	
15	Info Memo Triwulan 3 Tahun 2008	
16	Siaran Pers Hasil Penawaran US$ *Bond*	
17	*Quite Period*	
18	Penyampaian Data untuk Regulator	
19	Item 15 Laporan Tahunan dalam Format 20-F	

Informasi Material

Sepanjang tahun 2008, perusahaan telah mengeluarkan sebanyak 63 informasi yang bersifat material yang terdiri dari empat laporan keuangan, 21 siaran pers, 16 pengumuman, dan 22 informasi lainnya.

Adapun rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Informasi Material	Tanggal Diumumkan
	Laporan Keuangan	
1	Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Auditor Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005	26 Maret
2	Laporan Keuangan Konsolidasi beserta laporan review akuntan independen untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2007 dan 2008	28 Mei
3	Laporan Keuangan Konsolidasi beserta laporan review akuntan independen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2007 dan 2008	28 Agustus
4	Laporan Keuangan Konsolidasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2007 dan 2008	28 Oktober
	Siaran Pers	
1	Indosat *Finance Company BV and International Finance BV* Berencana Melakukan Pembelian Sebagian Surat Hutang Bergaransi Yang Jatuh Tempo pada 2010 & 2012	6 Februari
2	Indosat Akan Menerbitkan Obligasi Rupiah dan Sukuk Ijarah pada Semester I Tahun 2008	20 Februari
3	Indosat Akan Menerbitkan Obligasi Indosat VI Tahun 2008 dan Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	25 Februari
4	Indosat Melayani 24.5 juta Pelanggan sampai dengan Akhir Tahun 2007	25 Februari
5	Indosat Memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK untuk Obligasi Indosat VI dan Sukuk Ijarah Indosat III	28 Maret
6	Indosat Membukukan Laba Bersih Rp2.0 Triliun atau Tumbuh sebesar 45% di Tahun 2007	31 Maret
7	Obligasi Indosat VI Sukuk Ijarah Indosat III tercatat di Bursa Efek Jakarta	11 April
8	Indosat Mengumumkan Kebijakan Tarif Dasar Baru: Penurunan Tarif Dasar hingga 73%	11 April
9	Indosat berencana untuk memperoleh pendanaan dari Fasilitas Pinjaman Sindikasi	7 Mei
10	Laporan Tahunan dan Laporan tahunan dalam Format 20-F Indosat Tahun 2007 tersedia di website Perusahaan	15 Mei
11	Indosat Membukukan Laba Bersih sebesar Rp614 Miliar atau tumbuh 27% pada triwulan pertama 2008	28 Mei
12	Indosat Mendapatkan Fasilitas Pinjaman Sindikasi sebesar US$450 Juta dengan Permintaan yang melebihi penawaran (*Oversubscribed*)	13 Juni
13	Indosat Mengumumkan Penawaran Perubahan Kendali kepada setiap dan seluruh Pemegang *Notes* berdasarkan Indosat *Finance Company BV* 7,75% *Guaranteed Notes* yang Jatuh Tempo 2010 dan Setiap dan Seluruh Pemegang *Notes* Berdasarkan Indosat *International Finance Company BV* 7,125% *Guaranteed Notes* yang jatuh tempo 2012 sehubungan dengan adanya perubahan pengendalian	22 Juli
14	Indosat Melayani 32,4 juta pelanggan sampai dengan Akhir Juni 2008	24 Juli
15	Laba Bersih Indosat Tumbuh 25% pada Semester Pertama 2008	28 Agustus
16	Indosat Mengumumkan Hasil Penawaran Perubahan Kendali atas sebagian dan seluruh Surat Hutang Bergaransi dari Indosat *Finance Company BV* 7.75% Yang Jatuh tempo pada 2010 dan Surat Hutang Bergaransi dari *International Company BV* 7.125% Yang Jatuh Tempo pada 2012	22 September
17	Moody's Menegaskan Peringkat Ba.1 kepada Indosat untuk mata uang lokal dan Ba2 untuk mata uang asing dengan prospek stabil	10 Oktober
18	Laba Bersih Indosat Mencapai Rp1,47 Triliun dalam Sembilan Bulan Tahun 2008	21 Oktober
19	Indosat Melunasi Pokok dan Bunga Obligasi Indosat III Seri A Tahun 2003	23 Oktober
20	Indosat Menyampaikan Laporan Keuangan tidak diaudit periode Sembilan Bulan yang berakhir 30 September 2008	28 Oktober
21	Indosat telah Mencairkan Seluruh Fasilitas Pinjaman Sindikasi sejumlah US$450 Juta	11 November

No.	Informasi Material	Tanggal Diumumkan
	Pengumuman	
1	Prospektus Awal terkait Obligasi Rupiah VI Indosat Rupiah Tahun 2008 dan Sukuk Ijarah III Indosat Tahun 2008	20 Februari
2	Pengumuman atas Tambahan Informasi dan atau Perubahan Prospektus Awal atas Obligasi VI Indosat Tahun 2008 dan Sukuk Ijarah III Indosat Tahun 2008	28 Maret
3	Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	22 April
4	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Surat Kabar	30 April
5	Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Surat Kabar	14 Mei
6	Rencana Paparan Publik	22 Mei
7	Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	6 Juni
8	Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	9 Juni
9	Pengumuman Perusahaan terkait Transaksi Qtel	9 Juni
10	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Surat Kabar	13 Juni
11	Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Surat Kabar	27 Juni
12	Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	16 Juli
13	Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB yang Kedua di tahun 2008)	16 Juli
14	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Surat Kabar	24 Juli
15	Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Surat Kabar	8 Agustus
16	Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	27 Agustus
	Lain-lain	
1	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat V tahun 2007 dan Sukuk Ijarah Indosat II	8 Januari
2	Pemberitahuan hasil pemeringkatan atas efek bersifat hutang tahun 2008 dari Pefindo	21 Februari
3	Bukti Iklan Pemeringkatan Obligasi untuk tahun 2008 dari Pefindo	22 Februari
4	Bukti Iklan Neraca Konsolidasi. Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Indosat dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007	31 Maret
5	Tanggapan Indosat terhadap Pertanyaan Bursa Efek Indonesia	31 Maret
6	Pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan 2007	
7	Rencana Penyelenggaraan Kajian terbatas terhadap hasil Triwulan Pertama tahun 2008	30 April
8	Laporan Tahunan 2007	5 Mei
9	Laporan Tahunan dalam Format 20-F	5 Mei
10	Tanggapan Indosat terhadap Pertanyaan Bursa Efek Indonesia	14 Mei
11	Penyerahan Materi Paparan Publik	2 Juni
12	Pemberitahuan dari Qatar Telecom (Keterbukaan Informasi)	9 Juni
13	Pemberitahuan dari Qatar Telecom (Keterbukaan Informasi)	24 Juni
14	Pemberitahuan dari Qatar Telecom (Keterbukaan Informasi)	27 Juni
15	Rencana Penyelenggaraan Kajian terbatas terhadap hasil Triwulan Kedua tahun 2008	3 Juli
16	Pemberitahuan dari Qatar Telecom (Keterbukaan Informasi)	3 Juli
17	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi VI Triwulan II	10 Juli
18	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi VI Indosat dan Sukuk Ijarah III Indosat	20 Agustus
19	Bukti Iklan Neraca Konsolidasi. Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Indosat dan Anak Perusahaan 6 bulan yang berakhir pada tangal-tanggal 30 Juni 2008 dan 2007	1 September
20	Bukti Iklan Pemeringkatan Obligasi untuk tahun 2008 dari Perusahaan Pemeringkatan Internasional Moody's	15 Oktober
21	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi VI tahun 2008 dan Sukuk Ijarah III Indosat tahun 2008	10 Oktober
22	Tanggapan Indosat terhadap Pertanyaan Bursa Efek Indonesia	30 Desember

Media Distribusi

Di tahun 2008 Indosat menawarkan kepada para *stakeholder* berbagai media distribusi informasi. Kami berkomunikasi dengan para *stakeholder* melalui situs Perusahaan **http : //www.indosat.com**, *fact sheet*, buletin investor triwulanan, pengumuman Perusahaan, *mailing list*, konferensi pers, telepon langsung dan rapat interaktif.

Setiap triwulan, kami juga menyelenggarakan *conference call* dengan investor, analis, dan masyarakat keuangan lainnya untuk menyampaikan perkembangan operasional dan keuangan Perusahaan, menyusul penyampaian Laporan Keuangan kepada Bapepam-LK di Indonesia dan US-SEC di Amerika Serikat. Selama tahun 2008, kami mengadakan empat kali *conference call* dengan sesi tanya jawab yang ekstensif terkait kinerja triwulanan. *Conference call* tersebut dapat diakses pula oleh pemegang saham dan investor melalui akses langsung *webcast* pada situs perusahaan.

Perusahaan juga menyelenggarakan lima kali *Non-Deal Roadshow* serta berpartisipasi di delapan konferensi masyarakat keuangan yang diadakan di Jakarta, Hong Kong, New York, dan Singapura. Di samping itu, kami membuka akses untuk permintaan informasi mengenai perusahaan dan merespon pertanyaan tersebut melalui kunjungan investor dan analis, telepon, maupun korespondensi elektronik.

Perusahaan juga terus berupaya untuk memperluas jangkauan. Kesuksesan utama pada tahun 2008 adalah penyempurnaan situs Perusahaan, menjadi lebih mudah (*user-friendly*) dan lebih cepat diakses oleh publik. Pelanggan dapat dengan mudah menemukan rincian dan keuntungan dari produk Indosat terkini, sementara investor dan pemegang saham dapat dengan mudah mengetahui informasi pencapaian Perusahaan terkini dengan akurat.

Paparan Publik

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan pada 5 Juni 2008 untuk membahas pencapaian Perusahaan pada Tahun 2007. Paparan Publik Tahunan tersebut dihadiri oleh pemegang saham, analis pasar modal, wartawan/media serta masyarakat umum/publik.

Sebelumnya, pada 25 Februari 2008, kami juga telah melaksanakan Paparan Publik dalam rangka emisi Obligasi Indosat VI dan Sukuk Ijarah Indosat III dalam mata uang rupiah sebagai bagian dari rencana pendanaan eksternal untuk pengembangan usaha Perusahaan.

Corporate Secretary

Grup *Corporate Secretary* bertanggung jawab untuk mengelola informasi yang bersifat material, termasuk pendistribusiannya. Grup ini didukung empat divisi yaitu *Investor Relations, Public Relations, Internal Communications* dan *Corporate Data*. Sejak Maret 2004, *Group Head Corporate Secretary* dijabat oleh Strasfiatri Auliana.

***Strasfiatri Auliana** memulai karirnya di Indosat pada tahun 1987. Insinyur Teknik Elektro lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dipercaya untuk menjabat Group Head Corporate Secretary Indosat sejak tahun 2004. Dalam rentang perjalanan karirnya selama lebih dari 20 tahun, beliau dipercaya untuk memegang beberapa posisi penting, di antaranya Senior Vice President Corporate Communications Indosat antara tahun 2002-2004. Pada periode yang sama, beliau juga ditugaskan menjadi staf ahli Ketua di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).*

AKUNTABILITAS

Kami telah menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, dan Komite-Komite sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, serta strategi Perusahaan.

Kami meyakini bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Kode Etik & Nilai-nilai Perusahaan

Kami sangat meyakini bahwa kinerja perusahaan seharusnya dilandaskan pada etika bisnis yang baik dan dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi para *stakeholder*. Setiap perbaikan yang dilakukan Perusahaan harus sesuai dan tetap konsisten dengan misi usaha dan nilai Perusahaan kami.

Nilai-nilai perusahaan, dirintis dengan nilai-nilai yaitu "*Kretartha Karya Samuha*" atau "*Success through Teamwork*' dan terus dikembangkan dan kini insan Indosat memiliki "Insan Gemilang" yang mencakup prinsip "Integritas, Kerjasama, Keunggulan, Kemitraan, dan Fokus pada Pelanggan."

Hal ini ditampilkan dalam Kode Etik yang diterbitkan di tahun 2004 dan diperbaharui dari waktu ke waktu sebagai acuan bagi Direksi dan seluruh karyawan dalam menjalankan praktek bisnis.

Kode Etik merangkum dasar-dasar berperilaku yang bertanggung jawab yang dianut oleh seluruh Direksi dan karyawan Indosat sejak Perusahaan berdiri.

Hal ini untuk memastikan kegiatan usaha dijalankan dengan penuh integritas serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, Kode Etik ini juga mengatur antara lain tentang larangan perdagangan orang dalam, benturan kepentingan, peluang perusahaan, tindakan yang melawan hukum atau tidak etis.

Seluruh Direktur dan karyawan Indosat diharapkan untuk memahami dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang digariskan dalam Kode Etik Perusahaan. Sejak tahun 2007, setiap semester, perusahaan memberlakukan suatu proses dimana seluruh karyawan wajib memberikan pernyataan telah membaca dan memahami Kode Etik Perusahaan.

Setiap Direktur atau karyawan yang melanggar ketentuan atau asas dari kebijakan-kebijakan ini akan dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin, sampai dengan dan termasuk kepada pemutusan hubungan kerja.

Dokumen lengkap dari Kode Etik Perusahaan dapat dilihat pada situs Perusahaan di: http://www.indosat.com

Struktur Pengelolaan Perusahaan

Sebagai Perusahaan yang berbasis di Indonesia, kami menggunakan struktur dua dewan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan tanggung jawab dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris, Direksi, dan para Komite.

Struktur Pengelolaan Perusahaan

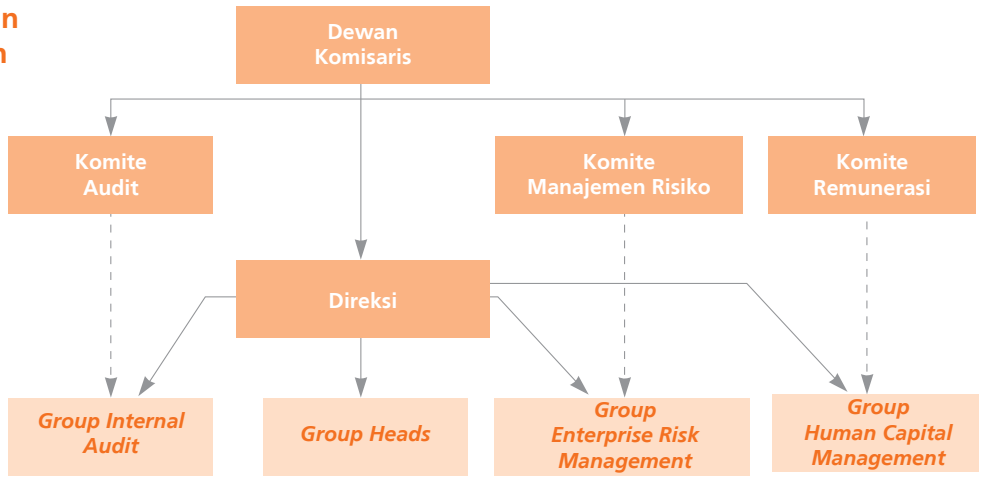

Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap pengelolaan Perusahaan termasuk di antaranya rencana pengembangan Perusahaan, pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Saat ini, Dewan Komisaris Indosat terdiri dari 10 orang anggota, dimana empat anggotanya adalah Komisaris Independen. Komposisi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait Komisaris Independen.

Pada 5 Juni 2008, Lim Ah Doo dan Setio Anggoro Dewo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit. Sebagai pengganti George Thia Peng Heok diangkat sebagai anggota Komisaris Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari yang sama.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan atas arahan Komisaris Utama atau bila diminta oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2008, Dewan Komisaris Indosat telah melaksanakan rapat sebanyak enam kali.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Periode Tahun 2008

Nama	Jumlah Rapat yang Dihadiri
H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani	2 dari 3
H.E. Sheikh Mohammed Bin Suhaim Hamad Al Thani	2 dari 6
Dr Nasser Marafih	3 dari 3
Jarman	3 dari 3
Rachmat Gobel	3 dari 3
Rionald Silaban	3 dari 3
George Thia Peng Heok	4 dari 4
Setyanto P. Santosa	6 dari 6
Soeprapto	6 dari 6
Michael Latimer	3 dari 3
Peter Seah Lim Huat	3 dari 3
Lee Theng Kiat	2 dari 3
Sio Tat Hiang	3 dari 3
Sum Soon Lim	3 dari 3
Roes Aryawijaya	2 dari 3
Setio Anggoro Dewo	2 dari 3
Lim Ah Doo	3 dari 3

Catatan:

- Lee Theng Kiat, Roes Aryawijaya dan Setio Anggoro Dewo diberhentikan dengan hormat pada RUPS 5 Juni 2008.
- Jarman, Rionald Silaban, and George Thia diangkat pada RUPS 5 Juni 2008.
- Peter Seah, Sio Tat Hiang, Sum Soon Lim and Lim Ah Doo diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 25 Agustus 2008.
- Sheikh Abdullah, Dr Nasser, Rachmat Gobel dan Michael Latimer diangkat pada pada RUPSLB 25 Agustus 2008.

Remunerasi

Jumlah total dari remunerasi yang diusulkan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 5 Juni 2008 adalah sebesar Rp 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar Rupiah) dan diberikan berdasarkan komposisi Dewan Komisaris pada saat RUPST.

Pemberian remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dapat berbeda satu dengan lainnya, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam komite-komite Dewan Komisaris. Adapun rata-rata atau jumlah remunerasi yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Rp2.347.675.665,- (total kas) dan
Komisaris : Rp1.635.599.268,- (rata-rata total kas).

Rincian dari remunerasi Dewan Komisaris disajikan dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Dewan Komisaris

Total Kas Bersih Setahun untuk Dewan Komisaris (Rp)			
	Semester I	Semester II	Total
Honorarium	2.634.729.000	3.328.158.095	5.962.887.095
Tunjangan (termasuk THR)	2.089.800.000	2.788.642.049	4.878.442.049
Tunjangan Aktivitas Komite	543.818.681	1.050.539.179	1.594.357.860
Initial On-Board Service	-	1.050.000.000	1.050.000.000
End-of-Service Compensation	-	4.140.380.000	4.140.380.000
Total	**5.268.347.681**	**12.357.719.323**	**17.626.067.004**

Catatan:
Total Kas tidak termasuk Pajak Penghasilan.

Komite-Komite Dewan Komisaris
Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dapat dilihat pada Laporan Komite Audit 2008 yang dicantumkan dalam bagian lain Laporan Tahunan ini. Di samping itu *Charter* Komite Audit terdapat di situs Perusahaan di http://www.indosat.com.

Laporan kegiatan Komite Audit sepanjang tahun 2008 berikut jumlah rapat dan kehadiran rapat dari masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat di Laporan Komite Audit pada halaman 55 Laporan Tahunan ini.

Pada 5 Juni 2008, Lim Ah Doo dan Setio Anggoro Dewo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dalam RUPST dan tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit. Pada saat yang sama, George Thia Peng Heok diangkat sebagai anggota Komisaris Independen. Pada 31 Desember 2008, anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari George Thia Peng Heok (Ketua), Soeprapto, Rusdy Daryono, dan Unggul Saut Marupa Tampubolon. Pada 1 Januari 2009, terjadi penambahan dan perubahan, sehingga anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari George Thia Peng Heok (Ketua), Soeprapto, Michael Latimer, Kanaka Puradiredja, dan Unggul Saut Marupa Tampubolon.

Riwayat singkat dari George Thia Peng Heok, Soeprapto, dan Michael Latimer dapat dilihat di Butir 6 mengenai Komisaris pada Laporan Tahunan 2008 dalam Format 20-F. Sedangkan riwayat singkat Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon, adalah sebagai berikut:

Kanaka Puradiredja *menjadi anggota Komite Audit sejak Januari 2009. Beliau adalah pendiri Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dan menjadi Senior Partner sejak 2000 hingga Oktober 2007. Saat ini, beliau menjabat Ketua pada Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Komite Audit Indonesia, serta anggota dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA). Sebelumnya beliau menjabat beberapa posisi, yaitu anggota Marketing & Communication Committee KPMG International pada tahun 1995, anggota KPMG Asia Pacific Board tahun 1994-1998, Managing Partner di KPMG Indonesia tahun 1978-1999 dengan posisi terakhir sebagai Chairman dan sebelumnya bekerja pada Peat Marwick Mitchell (pendahulu KPMG) di Melbourne, Australia tahun 1975-1977 dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (sekarang BPKP) tahun 1971-1974. Beliau memperolah gelar dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1971 dan merupakan Charter Member dari Lembaga Komisaris Direksi Indonesia (LKDI).*

Unggul Saut Marupa Tampubolon *telah menjadi anggota Komite Audit sejak Juli 2008. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan termasuk Direktur Utama PT Satelindo sejak 2001 sampai dengan 2002, General Manager Hukum Indosat sejak 2000 sampai dengan 2001, Komisaris PT MGTI (Indosat Group) sejak 2000 sampai 2001, Direktur Utama PT Indosel sejak 1997 sampai dengan 1999, Komisaris PT Sisindosat (Indosat Group) sejak 1997 sampai 1999, Direktur PT Menara Jakarta sejak 1996 sampai dengan 1997, Komisaris PT Patrakom (Indosat Group) sejak 1996 sampai 1997 dan General Manager Hukum dan Humas Indosat sejak 1988 sampai dengan 1997. Sebelum bergabung dengan Indosat, beliau adalah penasihat hukum PT Nickel Indonesia sejak 1980 sampai dengan 1983 dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Imam & Associates. Bapak Tampubolon memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977.*

Komite Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi tercantum pada *Charter* Komite Remunerasi yang dapat dilihat di situs Perusahaan di http://www.indosat.com.

Laporan kegiatan Komite Remunerasi sepanjang tahun 2008 berikut jumlah rapat dan kehadiran rapat dari masing-masing anggota Komite Remunerasi dapat dilihat di Laporan Komite Remunerasi pada halaman 60 Laporan Tahunan ini. Pada 31 Desember 2008, anggota Komite Remunerasi terdiri dari Dr. Nasser Marafih (Ketua), Michael Latimer, dan Soeprapto

Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko tercantum pada *Charter* Komite Manajemen Risiko yang dapat dilihat di situs Perusahaan di http://www.indosat.com.

Laporan kegiatan Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2008 berikut jumlah rapat dan kehadiran rapat dari masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat di Laporan Komite Manajemen Risiko pada halaman 61 Laporan Tahunan ini.

Pada 31 Desember 2008, anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari Rachmat Gobel (Ketua), George Thia Peng Heok, Jarman, dan Rionald Silaban.

Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi Indosat bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan serta menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Dalam rangka menjalankan prinsip tata kelola usaha yang baik, Direksi Indosat harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atas hal-hal berikut: (1) membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain di pasar modal; (2) mengadakan perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain; (3) membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan aktiva tetap atau aktiva lain milik Perusahaan; (4) tidak menagih lagi dan menghapuskan

piutang dari pembukuan serta persediaan barang; (5) mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*); (6) menerima atau memberikan pinjaman jangka waktu menengah/panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku); (7) melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal; (8) mendirikan anak perusahaan; (9) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing unit usaha sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (10) menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pembayaran (*asset liability management*) Perusahaan; (11) menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian, dan penjualan aktiva, pinjaman dan komitmen-komitmen lainnya; (12) mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan, atau 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perusahaan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit.

Dewan Komisaris berkewajiban menetapkan batasan-batasan atas tindakan-tindakan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan melakukan modifikasi atas batasan-batasan tersebut dari waktu ke waktu.

Saat ini, Direksi Indosat terdiri dari sembilan orang anggota, dimana setiap anggota memiliki keahlian khusus untuk menangani berbagai kepentingan bisnis. Kami juga telah mendefinisikan wewenang Direksi dalam berbagai kebijakan yang relevan seperti pengadaan barang dan jasa serta wewenang keuangan. Kami meyakini, dengan pembagian wewenang yang jelas akan tercipta akuntabilitas serta level komitmen yang tinggi dari masing-masing anggota Direksi dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Direksi mengadakan rapat secara rutin tiap minggunya dan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau atas usulan dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Direksi. Selama tahun 2008, Direksi Indosat telah melakukan rapat sebanyak 41 (empat puluh satu) kali. Adapun daftar kehadiran masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi Periode Tahun 2008

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Johnny Swandi Sjam	Direktur Utama	29
Kaizad Bomi Heerjee	Wakil Direktur Utama	34
Wahyu Wijayadi	Direktur *Corporate Services*	29
Wong Heang Tuck	Direktur *Finance*	27
Raymond Tan Kim Meng	Direktur *Network*	35
Fadzri Sentosa	Direktur Jabotabek dan *Corporate Sales*	38
Guntur S. Siboro	Direktur *Marketing*	35
Syakieb Ahmad Sungkar	Direktur *Regional Sales*	33
Roy Kannan	Direktur *Information Technology*	32

Catatan:
Ketidakhadiran anggota Direksi dikarenakan dinas atau sakit.

Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap yang terdiri atas gaji, tunjangan, insentif jangka panjang, tantiem, dan fasilitas serta tunjangan lainnya, termasuk tunjangan akhir masa jabatan bagi mantan Direksi yang jumlahnya ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 8 Maret 2004. Jumlah total dari remunerasi dilaporkan Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Rincian dari remunerasi yang diberikan kepada Direksi di tahun 2008 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Direksi

Total Kas Bersih Setahun untuk Direksi (Rp)			
	Semester I	Semester II	Total
Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan	4.986.000.000	6.066.000.000	11.052.000.000
Tunjangan (termasuk THR)	4.323.800.000	6.048.550.003	10.372.350.003
STI (Tantiem) 2007	9.611.495.733	-	9.611.495.733
STI (Tantiem) 2008	-	-	-
Initial On-Board Service	-	1.350.000.000	1.350.000.000
Total	**18.921.295.733**	**13.464.550.003**	**32.385.845.736**

Catatan:
- Total Kas tidak termasuk Pajak Penghasilan

Seiring dengan tuntutan perkembangan usaha, Direksi mengikuti berbagai sesi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya secara konsisten. Direksi secara rutin mendapatkan pelatihan dan pengarahan terstruktur dari pejabat senior dalam bidang yang berhubungan dengan tanggung jawab masing-masing dan menghadiri kursus eksekutif eksternal yang relevan. Selain itu, Direksi diberi pengarahan mengenai peraturan terbaru, perkembangan dalam praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, teknologi informasi, isu-isu yang timbul dalam manajemen risiko serta perubahan-perubahan dalam standar akuntansi.

Selama tahun 2008, Direksi mengikuti pelatihan-pelatihan berikut: *Telecommunication Strategy and Marketing, Executive Development Program, Transition to General Management*, serta sebuah pelatihan kepemimpinan / *Leadership Training* bersama para *Group Head* dengan tajuk Indosat *Senior Management Session on Leadership, Strategy, and Execution* yang difasilitasi oleh Ram Charan sebagai penulis, *lecturer* dan *coach* bereputasi internasional.

Indikator Kinerja Utama

Perusahaan telah menyempurnakan sistem Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*/KPI) sejak tiga tahun yang lalu, sehingga kami dapat mengukur kinerja Perusahaan sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tingkatan individu, grup, direktorat, dan perusahaan, dimana hasil penilaian KPI yang diperoleh karyawan akan secara langsung mempengaruhi pemberian insentif serta bonus oleh Perusahaan.

KPI disusun setelah melalui proses studi dan perencanaaan yang dilakukan oleh manajemen, dibantu oleh penasihat independen dan ahli sumber daya manusia, termasuk Komite Remunerasi. Penyusunan KPI merupakan indikator penting dalam mengukur

akuntabilitas manajemen terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan sebagaimana dipersyaratkan oleh pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya.

Kebijakan Penanganan Pengaduan

Kami juga mengeluarkan kebijakan penanganan pengaduan (*whistle-blower policy*), dimana pihak eksternal maupun internal perusahaan dapat memberikan masukan kepada Komite Audit berkenaan dengan ketidaksesuaian atau ketidakakuratan laporan keuangan Perusahaan, siaran pers dan keterbukaan informasi, akuntansi, pengendalian internal serta masalah-masalah audit lainnya.

Tata cara pengaduan secara lengkap dapat dilihat pada situs Perusahaan di: http://www.indosat.com.

PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap tanggung jawab perusahaan, kami berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.

Perubahan Anggaran Dasar

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) yang mewajibkan perseroan yang telah memperoleh status badan hukum untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UUPT, kami telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada tanggal 14 Juli 2008.

Perubahan pokok terhadap Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan
2. Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
3. Pasal 4 Modal
4. Pasal 5 Saham
5. Pasal 7 Pengganti Surat Saham
6. Pasal 10 Rapat Umum Pemegang Saham
7. Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
8. Pasal 12 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
9. Pasal 13 Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
10. Pasal 15 Keputusan dan Hak Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
11. Pasal 16 Direksi
12. Pasal 17 Tugas dan Wewenang Direksi
13. Pasal 20 Dewan Komisaris
14. Pasal 21 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
15. Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
16. Pasal 26 Pembagian Laba
17. Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar
18. Pasal 29 Pembubaran dan Likuidasi

Asset Liability Management

Kami menerapkan kebijakan Asset Liability Management (ALM) sebagai acuan untuk memastikan berlangsungnya kegiatan sesuai prinsip kehati-hatian, ketertiban serta efisiensi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja pengawasan bagi manajemen sehubungan dengan manajemen likuiditas kas, risiko keuangan dan risiko hutang-hutang atau pinjaman serta pendanaan.

Kami juga melakukan program lindung-nilai dalam upaya untuk meminimalkan risiko naik-turunnya (*volatility*) pergerakan nilai tukar valuta asing, yaitu dengan membuat posisi lindung-nilai yang mendekati netral. Program lindung-nilai tidak dirancang untuk mencapai target keuntungan dan spekulasi tertentu. Program lindung-nilai juga tidak dimaksudkan untuk mengunci pada nilai tukar tertentu. Penentuan transaksi yang akan dilaksanakan dalam program lindung nilai akan dasarkan pada pertimbangan yang seimbang antara biaya dan risiko.

Kepatuhan Terhadap Batasan (*Covenant*)

Dengan menerbitkan berbagai obligasi kami juga senantiasa mematuhi batasan-batasan (*covenant*) dari obligasi yang diterbitkan. Pembayaran dari bunga obligasi dan pembagian imbalan telah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditentukan. Kami juga senantiasa memonitor peringkat kredit dan Perusahaan setiap tahun dan menyediakan informasi terbaru dan tepat waktu kepada para *investor* dan publik dengan mempublikasikannya dalam surat kabar dan juga situs kami.

Peringkat Kredit dan Perusahaan (Per 31 Desember 2008)

Lembaga Pemeringkat	Peringkat
Pefindo	*idAA+/LT Local Currency Debt*
Moody's	*Stable Outlook* *Ba1/Local Currency Rating* *Ba2/Foreign Currency Rating*
Standard & Poor's	*Stable Outlook* *BB/LT Foreign Issuer Credit* *BB/LT Local Issuer Credit*
Fitch	*Stable Outlook* *BB-/Foreign Currency LT Debt* *BB-/Local Currency LT Debt*

Kepatuhan terhadap Regulasi

Sebagai perusahaan telekomunikasi, kami juga senantiasa mematuhi Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Dalam hal kepatuhan, Perusahaan menetapkan *compliance* atau kewajiban mentaati ketentuan yang berlaku dengan konsisten sebagai salah satu praktek bisnis yang penting sejak awal Perusahaan ini didirikan 41 tahun lalu. Ini dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab Perusahaan dan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder* sehingga dapat menangkis berbagai isu negatif yang bisa muncul dari waktu ke waktu yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Sebagai salah satu contoh, terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No 5 tahun 1995, khususnya terkait dengan SMS Kartel, dimana Indosat dan beberapa operator lainnya menjadi terlapor, namun pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU memutuskan bahwa Indosat dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 UU No.5 tahun 1999.

Untuk paparan yang lebih lengkap mengenai Proses Perkara Hukum dapat dilihat di Butir 8: Informasi tentang Keuangan mengenai Proses Perkara Hukum Laporan Tahunan dalam Format 20-F, pada halaman 202 Laporan Tahunan 2008 ini.

Pengendalian Internal

Sejak tahun 2006 Grup *Enterprise Risk Management* (ERM) dibentuk untuk melakukan penilaian, analisa, dan pemetaan risiko dalam seluruh kegiatan Perusahaan berdasarkan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Panduan dan peta risiko telah dibuat sebagai petunjuk bagi semua pemilik risiko dalam menerapkan manajemen risiko Perusahaan. Grup ERM telah mensosialisasikan kultur risiko untuk semua unit bisnis dan menciptakan pemahaman yang sama dalam mengelola risiko Perusahaan.

Perusahaan telah mengeluarkan kerangka mediasi yang komprehensif di pertengahan tahun 2008 untuk seluruh unit bisnis hingga ke tingkat proses. Semua risiko di unit usaha dan grup dimonitor dan ditelaah setiap triwulan oleh Grup *Enterprise Risk Management* dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko. Peta risiko yang dibuat menjadi acuan bagi Grup Internal Audit untuk merencanakan dan melaksanakan program-program audit.

Untuk paparan yang lebih detil mengenai Risiko Perusahaan dapat dilihat di Faktor Risiko Perusahaan dalam Laporan Tahunan dalam Format 20-F, pada halaman 78 Laporan Tahunan 2008 ini.

Grup *Internal Audit* yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, meninjau, dan menganalisis seluruh kegiatan dalam Perusahaan dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada Direksi dan Komite Audit.

Grup *Internal Audit* juga berkoordinasi dengan unit-unit bisnis dalam mengidentifikasi paparan risiko Perusahaan dan untuk mengoptimalkan sumber daya Internal Audit. Grup *Internal Audit* memberikan kontribusi bagi Grup ERM atas perbaikan prosedur, Grup ERM juga memberikan Grup *Internal Audit* penambahan nilai dalam penilaian risiko mereka. Sinergi ERM dan *Internal Audit* menjadikan pengendalian internal Perusahaan semakin efektif.

Internal Audit membagi fungsi kerja ke dalam beberapa divisi dan fungsi sebagai berikut berikut:

1. Divisi Audit Sistem Keuangan dan Pendukung (*Support*)
2. Divisi Audit Usaha (Bisnis)
3. Divisi Audit Operasional & Teknis
4. Divisi Audit Regional (Jabotabek, Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan & Sulawesi, Maluku & Papua)
5. Fungsi Pelanggaran (*Fraud*) & Investigasi

Di tahun 2008, Grup *Internal Audit* telah melaksanakan sembilan puluh lima audit, menggunakan metode *risk-based*.

Kami juga mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 404 SOX terkait penilaian efektivitas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang telah diterapkan sejak tahun fiskal 2006. Perusahaan telah menugaskan Grup *Sarbox Compliance Management* untuk memastikan aplikasi dan kepatuhan sesuai dengan kerangka *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) dan Pasal 404 SOX. Di tahun 2008, Auditor Independen kami telah menyatakan opini mereka tentang efektivitas pengendalian internal perusahaan pada Laporan Tahunan 2008 dalam Format 20-F yang disampaikan kepada US-SEC. Opini yang dikeluarkan menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tahun 2008 telah dilaksanakan dengan efektif.

Kepatuhan Kami Terhadap SOX 404

Kami telah berhasil dalam melaksanakan tahap akhir dari Pasal 404 SOX yaitu pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan tahun 2008. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Indosat karena telah berhasil secara penuh mematuhi Pasal 404 SOX yang disyaratkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2006, 2007, dan 2008. Kami adalah salah satu dari perusahaan Indonesia yang memenuhi ketentuan SOX.

Auditor Independen kami, Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, member of Ernst & Young Global telah melakukan pengujian dan menyelesaikan laporan kepatuhan SOX seperti diungkapkan di Laporan Tahunan 2008 dalam Format 20-F.

''Menurut pendapat kami, PT Indosat Tbk dan Anak Perusahaan memelihara dalam semua hal yang material, pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara efektif pada tanggal 31 Desember 2008, berdasarkan kriteria COSO.''

Tanggung jawab pada *Stakeholder*

Indosat berkomitmen untuk selalu tumbuh bersama masyarakat. Kami menetapkan rencana pengembangan CSR yang lebih komprehensif sejak 2008 dengan dibentuknya Komite CSR. Khusus di tahun 2008, yang merupakan 100 tahun kebangkitan Indonesia, Indosat menetapkan kampanye wujud semangat nasionalisme Perusahaan, dengan tema Indosat Cinta Indonesia yang merefleksikan komitmen Indosat sebagai perusahaan telekomunikasi yang mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penerapan dan patuh terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta secara aktif berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup komunitas.

Tujuan utama pelaksanaan CSR bagi kami adalah menjadi perusahaan yang bertumbuh, mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku serta peduli kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, kami kemudian menerjemahkan implementasi CSR Indosat ke dalam lima inisiatif utama yaitu dalam bidang *Organizational Governance*, kepedulian terhadap pelanggan (*Consumer Issues*), pengembangan sumber daya manusia (*Labour Practice*), upaya pelestarian lingkungan (*Environment*) dan kemandirian masyarakat (*Community Involvement*).

Untuk paparan yang lebih detil mengenai Tanggung Jawab kepada *Stakeholder* dapat dilihat dalam "*Sustainability Report*."

INDEPENDENSI

Dalam rangka memenuhi prinsip independensi, kami berupaya agar masing-masing unit di Perusahaan bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Berbagai upaya kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan.

Perangkapan Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan individu yang memiliki keahlian dan bakat khusus yang memungkinkan mereka untuk memegang beberapa jabatan dan menerima penunjukkan yang lebih luas di masyarakat. Kami mengupayakan rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di perusahaan lain tidak saling menghambat dalam pelaksanaan tugasnya.

Rangkap Jabatan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Perusahaan Lain
H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani	Komisaris Utama	*Chairman of the Board of Directors* Qatar Telecom (Qtel)
H.E. Sheikh Mohamed Bin Suhaim Hamad Al Thani	Komisaris	*Vice Chairman of the Board* dan *Chairman of the Investment Committee* Qatar Telecom (Qtel)
Dr Nasser Marafih	Komisaris	Chief Executive Officer Qatar Telecom (Qtel)
Jarman	Komisaris	Asisten Deputi Menteri Negara BUMN Urusan Usaha Energi
Rachmat Gobel	Komisaris	Pimpinan PT Gobel Indonesia
Rionald Silaban	Komisaris	Direktur Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Kementerian Keuangan
George Thia Peng Heok	Komisaris Independen	Director/Consultant di Asiainc Private Limited
Setyanto P. Santosa	Komisaris Independen	Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran
Michael Latimer	Komisaris Independen	Perusahaan pribadi
Johnny Swandi Sjam	Direktur Utama	Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
Fadzri Sentosa	Direktur Jabotabek & Corporate Sales	Komisaris di PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa Lintasarta

Daftar Khusus

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan, kami mewajibkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk memberikan konfirmasi atas kepemilikan saham, baik saham Indosat maupun saham perusahaan lainnya, termasuk kepemilikan saham oleh anggota keluarga langsung. Konfirmasi tersebut selanjutnya disimpan oleh *Corporate Secretary*.

Rincian dari Kepemilikan Saham Indosat pada tahun 2008 berdasarkan konfirmasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	%
Johnny Swandi Sjam	Direktur Utama	30.000	0,0006
Wahyu Wijayadi	Direktur Corporate Services	152.500	0,0028
Fadzri Sentosa	Direktur Jabotabek & Corp. Sales	10.000	0,0002
Raymond Tan Kim Meng	Direktur Network	222.500	0,0041
Wong Heang Tuck	Direktur Finance	75.000	0,0014

Auditor Independen

Auditor Independen ditunjuk oleh RUPST berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dalam RUPST yang dilangsungkan pada 5 Juni 2008 telah disetujui penunjukan Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (anggota Ernst & Young Global) sebagai Auditor Independen Perusahaan untuk melakukan audit perhitungan tahunan untuk tahun buku 2008, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan dan kondisi penunjukan tersebut.

RUPST juga memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik alternatif dan menentukan persyaratan dan kondisi atas penunjukan tersebut jika Akuntan yang telah ditunjuk sebelumnya tidak mampu melanjutkan atau melaksanakan tugas mereka karena beberapa hal, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel berikut ini memuat rangkuman biaya jasa yang dibayar kepada Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (sebelumnya bernama Prasetio, Sarwoko & Sandjaja), anggota Ernst & Young Global di Indonesia, auditor eksternal independen Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

	2007	2008
	(US$)	(US$)
Biaya Jasa Audit	2.132.600	1.963.307
Biaya Terkait dengan Audit	1.557.200	953.962
Biaya Pajak	-	-
Total Biaya Lainnya	-	-
Total	**3.689.800**	**2.917.269**

Informasi lebih lanjut mengenai biaya dan jasa Akuntan Publik dapat dilihat pada butir 16C: Biaya dan Jasa Akuntan pada Laporan Tahunan 2008 dalam Format 20-F, atau yang tercantum pada halaman 235 Laporan Tahunan ini.

Untuk menjamin independensi dari Auditor Independen, kami menetapkan kebijakan terkait dengan rekrutmen terhadap mantan karyawan atau karyawan yang masih aktif bekerja sebagai auditor independen dan/atau juga kerabat dekat mereka untuk menjadi karyawan Indosat.

Kebijakan Hubungan Kerja dengan Mantan Karyawan Auditor Independen mewajibkan adanya *cooling off period* atau periode jeda sebelum dapat bekerja di Indosat, khususnya untuk posisi-posisi tertentu yang sudah ditetapkan. Kebijakan ini juga merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Bapepam-LK No. VIII.A.2 dan Pasal 206 *Sarbanes Oxley Act*.

Rapat Umum Pemegang Saham

Kami menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memanfaatkan teknologi terkini, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyebaran informasi hasil RUPS secara elektronik.

Pada tahun 2008, kami menyelenggarakan tiga kali Rapat Umum Pemegang Saham, yang semuanya dilaksanakan di Kantor Pusat Indosat di Jakarta.

Rincian dari waktu dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Indosat pada tahun 2008 disajikan dalam tabel berikut ini:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pengumuman : 30 April 2008
Undangan : 14 Mei 2008
Penyelenggaraan : 5 Juni 2008
Agenda :

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, sekaligus pembebasan tanggung jawab Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk dana cadangan, dividen dan lain-lain, serta persetujuan atas waktu, jumlah dan tata cara pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

3. Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2008.

4. Persetujuan penunjukan Auditor Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa I

Pengumuman : 13 Juni 2008
Undangan : 27 Juni 2008
Penyelenggaraan : 14 Juli 2008
Agenda : Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II

Pengumuman : 14 Juli 2008
Undangan : 8 Agustus 2008
Penyelenggaraan : 25 Agustus 2008
Agenda : Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

KESETARAAN

Dalam rangka memenuhi prinsip kesetaraan, kami berupaya untuk memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh *stakeholder*. Kami juga memberikan kesempatan yang sama dalam proses penerimaan karyawan dan kesempatan berkarir bagi seluruh karyawan Indosat.

Kesetaraan Informasi bagi Pemegang Saham

Setiap pemegang saham memiliki akses yang sama pada saat menerima informasi material terbaru dari kami. Untuk menghindari pengungkapan terbatas, kami menempatkan seluruh informasi yang telah kami ungkapkan ke publik, juga tersedia dalam situs kami di http://www.indosat.com.

Untuk menjamin seluruh pemegang saham memiliki informasi yang sama, sejak tahun 2007, kami telah memuat pula Laporan Tahunan dalam Format 20-F yang kami sampaikan ke *United States-Securities and Exchange Commission* dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Kedua buah Laporan Tahunan juga kami sampaikan secara bersamaan ke otoritas pasar modal, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Larangan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kami menerapkan kebijakan *Trading Window* setiap triwulanan demi menghindari terjadinya perdagangan orang dalam. Kebijakan ini didasarkan pada konsep bahwa suatu periode setelah pengungkapan laba perusahaan triwulanan merupakan masa aman untuk melakukan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam. Periode *Trading Window* dibuka dua hari kerja setelah pengumuman pencapaian triwulanan perusahaan dan berakhir 10 (sepuluh) hari setelahnya. Waktu dua hari dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pasar bereaksi terhadap pengumuman triwulanan Perusahaan, serta kesempatan bagi pasar untuk mencerna informasi tersebut.

Sumber Daya Manusia

Masing-masing karyawan Perusahaan yang datang dengan berbagai latar belakang dan kemampuan memiliki potensi kreatif tersendiri. Demi menjaga keutuhan keberagaman tersebut, Indosat menerapkan budaya peluang yang adil dimana setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja dan meniti karir.

Setiap dua tahun sekali, Perusahaan menyelenggarakan survei kepuasan kerja guna mengukur tingkat kepuasan kerja serta loyalitas karyawan. Hasil survei tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan indeks, dengan satu indikator terpenting, yaitu tingkat *turnover* karyawan, tercatat sebesar 2% per tahun atau jauh lebih rendah dibanding standar industri telekomunikasi yang berkisar pada angka 6% per tahun. Hasil ini akan menjadi landasan bagi kami kami untuk terus menjadi perusahaan pilihan bagi karyawan di lebih dari 20 propinsi tempat kami beroperasi.

Kami sangat meyakini bahwa karyawan dan sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting Perusahaan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Kami bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan karyawan agar bisa mempertahankan kelangsungan usaha. Kami memandang penting proses pembinaan dan pengembangan karyawan, sehingga kami terus berupaya untuk meningkatkan jumlah hari pelatihan serta memasukkan komponen pelatihan karyawan sebagai bagian dari evaluasi kerja mereka.

Di tahun 2008, jumlah hari pelatihan rata-rata setiap karyawan adalah 15,92 hari atau meningkat sebesar 0,76% dibandingkan dengan 15,8 hari per karyawan di tahun 2007.

Program pelatihan yang diselenggarakan mencakup 988 program, baik berbentuk *in-house training, ex-house training, on-line training*, maupun *project training* dengan total investasi mencapai Rp31,5 miliar untuk keseluruhan program pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan. Nilai investasi untuk program ini meningkat sebesar 11,7% dibanding tahun 2007.

Selain menyelenggarakan pelatihan dan pembelajaran, kami juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti kantin, *nursery room*, poliklinik, poliklinik gigi, laboratorium, apotik, fasilitas olah raga, mini market, dan berbagai fasilitas lainnya. Di samping itu, kami juga menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit yang menjadi rekanan perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh karyawan.

Pada tahun 2008, kami menyempurnakan kebijakan sistem merit dalam pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Kami juga melakukan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Manusia termasuk persetujuan on-line untuk perjalanan dinas, klaim penggantian kesehatan serta pembelajaran secara *on-line* melalui program *My learning*. Terkait dengan program pembelajaran secara *on-line*, kami berhasil memperoleh *E-Learning Award* untuk kategori Korporasi dari Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selanjutnya, guna memberikan jaminan kehidupan yang tetap baik setelah masa purna bakti, kami telah menerapkan skema perencanaan masa pensiun karyawan melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK.

Perjanjian Kerja Bersama

Pada tanggal 25 Agustus 1999, karyawan kami membentuk suatu serikat pekerja yang dinamakan Serikat Pekerja Indosat, atau SPI. Pada tanggal 5 Juni 2008, manajemen kami dan SPI telah menandatangani suatu perjanjian kerja bersama yang memuat ketentuan-ketentuan kerja umum, meliputi jam kerja, gaji, pengembangan dan kompetensi karyawan,

kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, tata tertib karyawan dan tata cara penyelesaian perselisihan. Sejumlah karyawan kami berhak atas pensiun berdasarkan program tunjangan yang telah ditetapkan, dimana mereka memperoleh pembayaran sekaligus dan tunjangan bulanan melalui program asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Komunikasi Internal

Kami berupaya menerapkan pendekatan manajemen terbuka kepada masing-masing anggota Perusahaan.

Struktur organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut: Direksi membawahi Grup dan setiap Grup membawahi Divisi. Masing-masing Grup mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas kegiatan operasional dalam masing-masing Grup. Dalam skala yang lebih besar, setiap periode tertentu dilakukan rapat Direktorat yang dipimpin oleh masing-masing Direktur dan dihadiri oleh pejabat senior dalam Direktorat tersebut. Sedangkan rapat manajemen yang melibatkan seluruh pimpinan grup dan divisi diadakan minimal tiga bulan sekali. Selain itu, satu kali dalam satu tahun, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Dinas yang dihadiri oleh seluruh pimpinan grup dan divisi untuk membahas rencara kerja tahunan perusahaan.

Perusahaan juga menyelenggarakan acara rutin temu muka antara karyawan dan Direksi untuk menginformasikan berbagai hal penting dan diselenggarakan minimal dua kali dalam setahun. Temu muka ini juga dapat diikuti secara aktif oleh seluruh karyawan di wilayah-wilayah melalui sarana *video conference*. Selain itu, Direksi juga melakukan perjalanan rutin secara bergantian ke wilayah-wilayah operasional Indosat, untuk memberikan motivasi, menyampaikan target-target Perusahaan, serta menyampaikan secara langsung informasi-informasi penting tentang Perusahaan kepada karyawan. Inisiatif ini juga sekaligus sebagai wahana bagi karyawan di berbagai wilayah untuk dapat berdialog langsung dengan Direksi serta sekaligus memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi Perusahaan.

Pada tahun 2008, Direksi telah melakukan empat kali kunjungan dan temu muka dengan karyawan di wilayah-wilayah operasional, yakni Pontianak, Lampung, Padang, dan Manado. Selain itu, masing-masing Direktur juga melakukan berbagai kunjungan ke daerah-daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Semua informasi terkait Perusahaan juga dapat diakses secara *on line* oleh karyawan melalui portal *MyIndosat*. Berbagai menu dan aplikasi dapat dilihat dan dipergunakan karyawan melalui portal ini, seperti I-Policy, suatu data bank elektronik yang menyimpan seluruh kebijakan Perusahaan serta berbagai menu lainnya terkait dengan Peraturan Telekomunikasi, Pengetahuan Produk, dan *MyValues*, yang memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengingat kembali nilai-nilai Perusahaan. Berita terkait Perusahaan dan penyedia jasa telekomunikasi lain juga bisa dilihat pada portal ini.

Direktur Utama kami juga memiliki *blog* CEO tersendiri. *Blog* CEO merupakan sarana komunikasi dua arah antara CEO dengan seluruh karyawan.

Selain itu, kami juga memiliki aplikasi *MyInfo* yang memuat data pribadi dari masing-masing karyawan seperti *curriculum vitae*, cuti tahunan, dan sistem penilaian elektronik.

Laporan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat manajemen Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga Komite, yakni Komite Audit, Komite Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko.

Fungsi pengawasan dan penasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian kepada masing-masing Komite terkait.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan Perusahaan sebelum dilaporkan ke otoritas pasar modal dan bursa saham serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan yang menyangkut pengkajian risiko dan pengelolaan Perusahaan.

Komite ini juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perusahaan serta merekomendasikan perubahan-perubahan jika diperlukan.

Komite Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran menyangkut remunerasi, bonus dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain ketiga komite tersebut, pada bulan Agustus 2008 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Anggaran. Komite Anggaran merupakan sebuah komite ad-hoc yang memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris dalam menyusun rencana strategis Perusahaan yakni Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang juga mencakup perencanaan Pengeluaran Modal.

Sepanjang tahun 2008, Dewan Komisaris telah mengadakan enam kali pertemuan. Partisipasi beserta catatan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris tergambar dalam tabel yang terdapat pada halaman 40 dalam Laporan Tahunan ini.

Dalam menerapkan tugas pengawasan dan penasihat berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut di tahun buku 2008:

1. Menelaah dan menyetujui Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan untuk tahun 2008.
2. Memonitor dan memberi saran atas kinerja Direksi dalam menerapkan Anggaran dan Rencana Kerja 2008 yang telah disetujui.
3. Melakukan penelaahan awal atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk tahun 2009 sesuai pengajuan Direksi.
4. Menelaah dan menyetujui rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan.
5. Menelaah dan menyetujui remunerasi Direksi untuk tahun 2008 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
6. Memberikan rekomendasi pada Rapat Umum Pemegang Saham atas penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa kondisi keuangan Perusahaan guna keperluan pelaporan bagi pemegang saham Perusahaan.
7. Menelaah dan menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan dan Format 20-F Perusahaan untuk penyerahan ke otoritas pasar modal dan bursa efek berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Laporan Komite Audit

Tinjauan Umum

Komite Audit ("Komite") PT Indosat Tbk. ("Perseroan'') melaksanakan tugasnya berdasarkan Charter tertulis yang disahkan oleh Dewan Komisaris ("Dewan") pada tanggal 31 Mei 2003, yang terakhir direvisi pada tanggal 16 Mei 2008.

Berdasarkan Charter, Komite harus terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan dua tenaga ahli eksternal independen sebagai anggota. Salah satu Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua.

Anggota dari Komite Audit sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di bualan Juni 2008 terdiri dari Lim Ah Doo sebagai Ketua, Soeprapto dan Setio Anggoro Dewo sebagai anggota serta Achmad Rivai dan Achmad Fuad Lubis sebagai anggota ahli independen. Sejak 1 Juli 2008 hingga 26 Agustus 2008, keanggotaan terdiri dari George Thia sebagai Ketua, Soeprapto sebagai anggota dan Rusdy Daryono dan U S M Tampubolon sebagai anggota ahli independen. Terhitung 26 Agustus 2008, setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menunjuk Michael Latimer, Komisaris Independen, sebagai anggota tambahan pada Komite Audit. Terhitung 1 Januari 2009, menyusul pengunduran diri Bapak Rusdy Daryono sebagai anggota ahli independen dari Komite, Bapak Kanaka Puradiredja ditunjuk untuk menjadi anggota ahli independen.

Laporan Kegiatan Komite Audit

Pada tahun 2008, Komite telah menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Charter, dengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan pasar modal dan bursa efek di Indonesia dan Amerika Serikat.

Komite juga terlibat dalam pengawasan program penerapan Sarbanes Oxley Act of 2002 Pasal 404 ("SOX 404") oleh Manajemen di 2007 melalui pertemuan dan pembahasan bersama dengan Direktur Utama, Direktur Keuangan, tim penerapan SOX 404, para konsultan dan Auditor Eksternal Independen. Dalam mengawasi penerapannya, Komite juga memantau perkembangan dan merekomendasikan kepada Manajemen langkah-langkah tertentu untuk mempercepat penerapannya.

Sepanjang tahun, Komite telah menyelenggarakan 9 rapat, baik langsung maupun melalui *teleconference* seperti diizinkan dalam Charter, yang dihadiri para anggota dengan rincian sebagai berikut:

Komisaris	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Lim Ah Doo	4
Setio Anggoro Dewo	3
Soeprapto	9
Achmad Rivai	4
Achmad Fuad Lubis	4
George Thia Peng Heok	5
Michael F Latimer	3
Rusdy Daryono	5
U S M Tampubolon	5

Dalam perubahan terakhir pada Charter, Komite Audit telah memformalkan pertemuan/rapat Kelompok Kerja Komite Audit yang kegiatan utamanya adalah menindaklanjuti penerapan serta status dari resolusi yang dihasilkan dalam rapat Komite Audit dan menelaah kecukupan atas isu-isu yang akan didiskusikan pada rapat Komite Audit berikutnya. Rapat Kelompok Kerja ini harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua anggota Komite Audit dan melaporkan hasilnya kepada Komite Audit. Pada tahun 2008, terselenggara 12 kali pertemuan Kelompok Kerja.

Seperti disyaratkan oleh Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bursa Efek Jakarta No.1-A mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terdaftar (setelah diubah), Komite melaporkan hal-hal sebagai berikut setelah melakukan penelaahan yang berdasarkan (i) Surat dari Direktur Utama Perseroan No. 012/I00-IBO/REL/09, tanggal 10 Februari 2009 (ii) surat-surat dari Auditor Independen Eksternal No. PSS-34019/02 tanggal 5 Februari 2009 dan PSS-34650/02 tanggal 19 Maret 2009, ditujukan kepada Komite Audit, dengan ini melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Kewaspadaan tentang pelanggaran yang dilakukan Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku**

   Komite meminta kepada Manajemen untuk menelaah kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh keyakinan dari Manajemen bahwa di tahun 2008 Manajemen, sepengetahuan mereka, tidak melihat adanya ketidakpatuhan Perseroan sehubungan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

   Di samping itu, Komite juga meminta Auditor Eksternal Independen dari Perseroan untuk menelaah hal yang sama, dan memperoleh opini sesuai dengan penugasan mereka berdasarkan standar audit Ikatan Akuntasi Indonesia SA 317, mereka tidak melihat adanya ketidakpatuhan oleh Perseroan sehubungan dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

   Berdasarkan penelahaan ini, Komite sejauh sepengetahuannya tidak melihat adanya ketidakpatuhan oleh Perseroan sehubungan dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku di tahun 2008.

2. **Kewaspadaan terhadap setiap kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi dari auditor Perseroan**

a. Manajemen bertanggungjawab atas akuntansi Perseroan, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (''SAK'') di Indonesia. Auditor Eksternal Independen Perseroan bertanggungjawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku umum di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan ''SAK''.

   Komite bertanggung jawab untuk menelaah, dalam kapasitas pengawasan, proses pelaporan dan pemeriksaan keuangan sesuai dengan Charter.

   i. Manajemen telah menyatakan dalam surat pernyataan mereka bahwa selama tahun 2008, mereka tidak melihat adanya kekurangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi yang diaudit tahun 2008 termasuk adanya kesalahan pernyataan yang bersifat material. Komite telah menelaah Laporan Keuangan Konsolidasi yang diaudit tahun 2008 bersama dengan Manajemen dan Auditor Eksternal Independen. Penelaahan

mencakup pembahasan dengan Auditor Eksternal Independen mengenai hal-hal yang terkait bagian 404 dari Sarbanes Oxley Act, khususnya tentang kebijakan akuntansi penting, perkiraan dan pertimbangan yang penting, kebijakan akuntansi alternatif, risiko dalam pelaporan keuangan dan setiap penyesuaian audit yang penting.

ii. Sehubungan dengan tahun keuangan sebelumnya di 2007, Manajemen telah menyerahkan di bulan April 2008, laporan penilaian mereka mengenai Pengendalian Internal terhadap laporan keuangan untuk tahun buku 2007 kepada Komite untuk penelaahan, termasuk langkah-langkah yang harus diambil dan kepastian bahwa tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pengendalian internal. Lebih lanjut, Manajemen memberikan keyakinan kepada Komite mengenai usaha-usaha mereka yang terus menerus dilakukan, dengan dibantu konsultan, untuk menerapkan SOX 404. Berdasarkan penelaahan terhadap laporan asesmen manajemen tentang pengendalian internal dan pengesahan Auditor Eksternal Independen atas asesmen Manajemen terhadap pengendalian internal bahwa Perseroan menjaga, dalam semua aspek yang material, pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan untuk tahun buku 2007, Komite telah menyetujui laporan asesmen untuk dimasukkan dalam Laporan Tahunan 2007 yang dikirimkan kepada US-SEC.

iii. Komite telah menelaah Surat Auditor Eksternal Independen tentang temuan-temuan untuk tahun 2007 dan 2008 serta telah meminta perhatian Manajemen terhadap temuan-temuan penting tersebut, dengan menekankan pentingnya untuk mempercepat upaya-upaya perbaikan. Komite telah memantau dan mendiskusikan upaya-upaya perbaikan dari kekurangan ini dengan Manajemen dan Auditor Eksternal Independen beberapa kali sepanjang tahun.

iv. Berdasarkan kerangka kerja COSO, seperti yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya, Komite di tahun 2008 telah merekomendasikan Manajemen untuk meningkatkan sosialisasi atas kebijakan dan prosedur pelaporan penyimpangan Perseroan (Whistleblower Channel) secara internal dan eksternal. Pada tahun 2008, Komite menerima dua pengaduan dari pihak eksternal terkait pasokan listrik dan tenaga kerja dari BTS yang berlokasi di daerah Kalimantan serta pengaduan terkait pelayanan pelanggan di daerah Jabotabek. Kedua keluhan tersebut telah ditangani oleh Manajemen sebagaimana mestinya.

v. Sebagai bagian dari uji Entity Level Control, Auditor Eksternal Independen telah meminta Komite untuk memverifikasi jika terdapat pelanggaran kode etik selama tahun 2008. Berdasarkan hasil diskusi dengan Manajemen Sumber Daya Manusia dan konfirmasi yang diberikan oleh Direktur Corporate Services, sepanjang tahun 2008, dapat dikonfirmasikan tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik.

vi. Komite telah mencatat upaya yang dibuat oleh Manajemen dari 2007 hingga 2008, untuk mendokumentasi, merancang, dan menguji struktur pengendalian internal sehubungan dengan penerapan SOX.

vii. Komite telah menelaah independensi dari Auditor Eksternal Independen yang terkait dengan keputusan Bapepam-LK No. Kep 020/PM/2002, tanggal 12 November 2002 dan telah memperoleh jaminan dari Auditor Eksternal Independen, sesuai dengan surat mereka Nomor PSS -29840 /02, tanggal 8 April 2008, yang menyatakan bahwa mereka sepenuhnya independen dan bebas dari

benturan kepentingan untuk penugasan memeriksa laporan keuangan Persoran tahun 2008. Lebih jauh lagi, Manajemen telah memberitahu Komite bahwa mereka tidak melihat adanya kekeliruan dalam independensi auditor eksternal.

viii. Agar tidak mempengaruhi independensi dari Auditor Independen Eksternal selama melaksanakan audit tahunan, Komite telah memastikan bahwa setiap penugasan lain kepada Auditor Eksternal Independen atas jasa audit, jasa terkait audit dan/atau jasa non-audit, telah mendapatkan persetujuan awal oleh Komite, sesuai dengan kebijakan dan prosedur atas persetujuan awal untuk jasa-jasa yang menugaskan Auditor Eksternal Independen (Keputusan Direksi No. 04/ DIREKSI/2007).

ix. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 5 Juni 2008 telah menunjuk Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota Ernst & Young Global sebagai Auditor Eksternal Independen untuk melakukan audit laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2008 dengan jumlah biaya untuk penugasan ini sebagaimana yang dilaporkan dalam bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2008 ini.

x. Sehubungan dengan laporan keuangan 2008, Manajemen telah memberikan kepada Komite di bulan Maret 2009, laporan penilaian mereka terhadap pelaporan keuangan untuk tahun buku 2008 untuk penelaahan, termasuk langkah-langkah yang akan diambil dan kepastian bahwa tidak terdapat perubahan signifikan dalam Pengendalian Internal. Lebih lanjut, Manajemen memberi keyakinan kepada Komite untuk melanjutkan upaya-upaya menerapkan SOX 404, dengan bantuan konsultan. Auditor Independen Eksternal telah memberikan laporan audit independent Pengendalian Internal untuk tahun 2008 dan memberikan opini bahwa Perseroan menjaga, dalam semua aspek yang material, pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan per 31 Desember 2008. Berdasarkan penelaahan terhadap laporan penilaian Manajemen terhadap pengendalian internal dan laporan audit auditor independent eksternal tentang hal yang sama, Komite telah menyetujui laporan penilaian, yang merupakan bagian dari laporan Format 20-F, yang akan secara otomatis dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan untuk Bapepam-LK dan US-SEC pada bulan April 2008.

Berdasarkan penelaahan, Komite sejauh pengetahuan mereka, tidak melihat adanya kekeliruan material dalam Laporan Keuangan Konsolidasi yang diaudit Tahun 2008. Di samping itu, Komite berpendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi yang Diaudit tahun 2008 telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntasi yang berlaku umum; dan bahwa hasil audit oleh Auditor Ekternal Independen konsisten dengan rencana dan spesifikasi audit seperti tercantum dalam kontrak penugasan audit. Komite telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar laporan keuangan yang diaudit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dimasukkan dalam Laporan Tahunan Perseroan kepada Pemegang Saham, untuk dikirimkan ke Bapepam-LK paling lambat bulan April 2009.

3. Penelaahan pelaksanaan paket remunerasi total kepada Direktur dan Komisaris.
Komite telah menelaah pelaksanaan pemberian paket remunerasi total untuk Direktur dan Komisaris untuk tahun 2008. Telaah ini dilaksanakan oleh Auditor Eksternal Independen atas permintaan Komite sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Bursa Efek Indonesia.

Komite mencatat bahwa keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 5 Juni 2008 telah menentukan besaran remunerasi dan bonus untuk para Komisaris, selanjutnya melalui keputusannya, Dewan Komisaris telah menentukan remunerasi dan bonus untuk Direksi.

Berdasarkan penelaahannya, Komite mengkonfirmasikan bahwa remunerasi dan bonus yang diberikan kepada para Komisaris dan Direktur telah sesuai, masing-masing, dengan keputusan RUPST dan keputusan Dewan Komisaris. Jumlah dari remunerasi dan bonus adalah seperti yang dilaporkan oleh Direksi dalam Laporan Tahunan 2008 ini.

Laporan Komite Remunerasi

Komite Remunerasi bertanggung jawab memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris atas remunerasi, bonus dan tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan Perusahaan lainnya termasuk struktur, syarat dan pelaksanaan atas insentif jangka panjang bagi Direksi.

Anggota Komite Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari para anggotanya, dengan keanggotaan tidak kurang dari tiga anggota.

Hingga penyelenggaraan RUPS 2008, anggota Komite Remunerasi terdiri dari Sio Tat Hiang sebagai ketua, Lim Ah Doo dan Soeprapto sebagai anggota. Sejak 26 Agustus 2008 keanggotaan terdiri dari Dr Nasser Marafih sebagai ketua, Michael Latimer dan Soeprapto sebagai anggota. Komite Remunerasi juga dapat dibantu oleh tenaga ahli profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk mendapat tambahan masukan mengenai "talent management" dan praktek remunerasi, apabila diperlukan.

Komite telah melaksanakan rapat sebanyak tiga kali di tahun 2008. Daftar partisipasi dan kehadiran Komisaris pada rapat Komite Remunerasi sepanjang tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Sio Tat Hiang	2
Lim Ah Doo	2
Dr Nasser Marafih	1
Michael Latimer	1
Soeprapto	3

Kegiatan

Sepanjang tahun, Komite Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Kegiatan-kegiatan utama yang telah dilaksanakan Komite di tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur dan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2008.
2. Menelaah dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi (termasuk menelaah gaji, bonus, dan pemberian insentif jangka panjang) bagi Direksi untuk tahun 2008.
3. Menelaah dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bonus kinerja Direksi untuk tahun 2007.

Laporan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko membantu Komisaris dalam membuat kebijakan yang tepat mengenai penilaian risiko dan manajemen risiko, penelaahan atas kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko Perseroan, serta memberikan rekomendasi kepada Komisaris terkait perbaikan-perbaikan bila diperlukan.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari empat orang anggota yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan berasal dari para anggota Dewan Komisaris.

Hingga tanggal 5 Juni 2008, Komite Manajemen Risiko terdiri dari Sum Soon Lim sebagai Ketua, Sio Tat Hiang sebagai anggota, Roes Aryawijaya sebagai anggota dan Setyanto P. Santosa sebagai anggota. Terhitung tanggal 26 Agustus 2008, menyusul persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris, keanggotaan Komite Manajemen Risiko berubah menjadi Bapak Rachmat Gobel sebagai Ketua, Bapak Jarman sebagai anggota, Bapak Rionald Silaban sebagai anggota dan Bapak George Thia sebagai anggota.

Komite telah menyelenggarakan empat rapat sepanjang tahun 2008. Partisipasi dan kehadiran Komisaris dalam rapat-rapat Komite selama tahun tersebut terlihat dalam tabel berikut ini:

Komisaris	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Sum Soon Lim	2
Sio Tat Hiang	2
Roes Aryawijaya	2
Setyanto P. Santosa	2
Rachmat Gobel	2
Jarman	2
Rionald Silaban	2
George Thia	2

Kegiatan

Komite Manajemen Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan penugasannya.

Kegiatan-kegiatan utama yang dijalankan oleh Komite sebagai berikut:

1. Menelaah dan mengawasi Rencana kerja dan Jadwal Manajemen Risiko Perusahaan.
2. Menelaah dan mengawasi Profil Risiko Utama dari Perusahaan serta tindakan penanggulangan terhadap masing-masing risiko yang diambil oleh Perusahaan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Tahunan dalam Format 20-F
(Laporan yang Kami Sajikan Kepada *US-Securities and Exchange Commission*)

Daftar Isi

BEBERAPA DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM 67
FORWARD-LOOKING STATEMENTS 67
DAFTAR ISTILAH 68

BAGIAN 1

Butir 1: IDENTITAS DIREKSI, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT 73
Butir 2: STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL 73
Butir 3: INFORMASI PENTING 73
Butir 4: INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN 98
Butir 5: ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA 146
Butir 6: DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN 170
Butir 7: PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 179
Butir 8: INFORMASI KEUANGAN 181
Butir 9: PENAWARAN DAN PENCATATAN 184
Butir 10: INFORMASI TAMBAHAN 187
Butir 11: PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR 200
Butir 12: PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK BERSIFAT EKUITAS 206

BAGIAN 2

Butir 13: CIDERA JANJI, DIVIDEN YANG BELUM DIBAYARKAN DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN 207
Butir 14: PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL 207
Butir 15: PENGAWASAN DAN PROSEDUR 207
Butir 16A: AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT 207
Butir 16B: KODE ETIK 207
Butir 16C: BIAYA DAN JASA AKUNTAN 207
Butir 16D: PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN BURSA EFEK NEW YORK UNTUK KOMITE AUDIT 207
Butir 16E: PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI 207
Butir 16F: PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT 207
Butir 16G: TATA KELOLA PERUSAHAAN *(CORPORATE GOVERNANCE)* 207

BEBERAPA DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM

Kecuali dinyatakan lain, istilah "Perusahaan" dan "kami" di dalam Laporan Tahunan dalam Format 20-F ("Format 20-F") ini merujuk pada PT Indosat Tbk dan anak-anak perusahaan terkonsolidasi. Semua istilah "Indonesia" merujuk pada negara Republik Indonesia. Semua istilah "Pemerintah" merujuk pada Pemerintah Indonesia. Istilah "Amerika Serikat" atau "AS" merujuk pada negara Amerika Serikat. Istilah "Inggris" merujuk pada Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara. Istilah "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang yang sah dari negara Indonesia dan istilah "dolar AS" atau "US$" merujuk pada mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk kemudahan, dan oleh karenanya setiap jumlah, perbandingan, persentase dan rasio dapat berbeda dengan angka yang sebenarnya. Kecuali dinyatakan lain, semua informasi keuangan berkenaan dengan Perusahaan dinyatakan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia.

Semata-mata untuk memudahkan para pembaca, sejumlah nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi menjadi dolar AS dengan nilai tukar tertentu. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan dalam mata uang dolar AS untuk nilai-nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2008, yaitu Rp10.950 untuk US$1,00. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar AS pada tanggal 7 April 2009 adalah Rp11.380 untuk US$1,00. Federal Reserve Bank of New York untuk keperluan pabean tidak menetapkan nilai tukar beli siang hari untuk transfer dalam mata uang Rupiah. Kami tidak membuat pernyataan apapun bahwa mata uang Rupiah maupun dolar AS yang tercantum di dalam Format 20-F ini seharusnya dapat atau dapat dikonversi menjadi dolar AS atau Rupiah, yang berlaku, dengan nilai tukar tertentu atau apapun. Lihat "Butir 3: Informasi Penting—Informasi tentang Nilai Tukar" untuk informasi lebih lanjut mengenai nilai tukar Rupiah atau dolar AS.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Format 20-F ini memuat *"forward-looking statements"* (pernyataan mengenai proyeksi di masa mendatang), sebagaimana didefinisikan dalam Section 27A of the Securities Act, Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana diubah atau "Exchange Act" dan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, yang meliputi pernyataan-pernyataan mengenai proyeksi kami untuk kinerja operasi dan prospek bisnis Perusahaan di masa mendatang. Kata-kata seperti "yakin," "harap," "antisipasi," "estimasi," "perkiraan," dan kata-kata serupa merupakan *forward-looking statements*. Selain itu, semua pernyataan kecuali pernyataan tentang fakta historis yang dimuat dalam Format 20-F ini merupakan *forward-looking statements*. Meskipun kami yakin bahwa proyeksi yang tercermin dalam *forward-looking statements* di dalam Format 20-F adalah wajar, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa proyeksi tersebut akan terbukti benar adanya. *Forward looking statements* ini dapat dipengaruhi oleh beberapa risiko dan ketidakpastian, termasuk perubahan lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. "Butir 3: Informasi Penting—Faktor-Faktor Risiko" dan di bagian lain dari Format 20-F ini menjelaskan faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil yang sebenarnya menjadi sangat berbeda dengan proyeksi kami.

DAFTAR ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah-istilah teknis di bawah ini dimaksudkan untuk membantu anda memahami istilah-istilah tersebut, tetapi tidak dimaksudkan sebagai definisi teknis.

"3G"	Jasa telekomunikasi selular GSM generasi ketiga
"analog"	Sinyal suara, video atau data yang dikirim dalam bentuk sinyal analog, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan transmisi telepon dan/atau layanan-layanan yang memanfaatkan switching bukan digital
"ARPU"	*Average Revenue Per User*, suatu evaluasi statistik untuk mengukur basis pelanggan operator selular
"ATM"	*Asynchronous Transfer Mode*, standar protokol *packet-switching protocol* untuk mengirim dan menerima data melalui *uniform 53-byte cells*, yang memungkinkan kecepatan pengiriman data melebihi 600 MBps
"backbone"	Tingkat tertinggi dalam hirarki jaringan dan dirancang untuk menyalurkan trafik yang sangat besar. *Backbone* dapat berupa *switched* (sistem *switching*) (menggunakan ATM, *frame relay* atau keduanya) atau *routed* (hanya menggunakan *routers* dan tidak ada *switches)*. Link transmisi antara nodes atau fasilitas *switching* dapat berupa jaringan gelombang mikro, kabel laut, satelit, serat optik atau teknologi transmisi lainnya
"bandwidth"	Kapasitas saluran komunikasi
"base station controller"	Perangkat pengontrol dalam jaringan GSM generasi kedua (2G) yang mengkoordinasikan pengoperasian dari beberapa BTS
"base station subsystem"	Bagian dari jaringan selular yang bertanggung jawab untuk menyalurkan trafik dan signaling antara telepon genggam dan sub-sistem jaringan *switching*
"BTS"	*Base Transceiver Station*, perangkat elektronik yang ditempatkan di lemari-lemari, termasuk unit pendingin ruangan/ac, pemanas, aliran listrik, sambungan telepon dan perlengkapan aliran listrik, yang bersama-sama dengan antena merupakan fasilitas layanan komunikasi pribadi
"CDMA"	*Code Division Multiple Access*, suatu teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan ke beberapa frekuensi dan suatu kode tertentu diberikan untuk setiap pengiriman data atau suara, yang dapat membuat beberapa pengguna menggunakan spektrum frekuensi yang sama

"churn rate"	Deaktivasi (pemberhentian) pelanggan untuk suatu periode tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah deaktivasi baik secara sukarela maupun tidak sukarela selama suatu periode tertentu dibagi rata-rata jumlah pelanggan pada periode yang sama
"circuit"	Koneksi fisik (atau *path*) dari kanal, konduktor dan perangkat antara dua buah titik tertentu yang dilalui aliran listrik dan termasuk kemampuan pengiriman dan penerimaan
"dBW"	*decibel* yang merujuk pada satu watt
"digital"	Metode penyimpanan, proses dan pengiriman informasi dengan menggunakan pulsa elektronik atau pulsa optik tertentu yang dinyatakan dalam angka binary 0 dan 1. Teknologi transmisi dan *switching* digital menggunakan urutan dari *pulses* ini untuk menyampaikan informasi yang merupakan kebalikan dari sinyal variabel analog yang terus menerus. Dibandingkan dengan jaringan analog, jaringan digital mempunyai kapasitas yang lebih besar, tingkat gangguan yang lebih kecil, terlindung dari penyadapan dan koreksi kesalahan secara otomatis
"SLJJ"	Sambungan Langsung Jarak Jauh, jasa telekomunikasi sambungan jarak jauh dalam suatu negara
"EDGE"	*Enhanced Data GSM Environment*, *Global System* untuk layanan nirkabel GSM yang dirancang untuk mengirim data pada tingkat kecepatan sampai dengan 384 Kbps, sehingga dapat mengirimkan aplikasi multimedia dan *broadband* bagi pemakai selular
"erlang"	Adalah satuan ukuran untuk trafik telepon yang sama dengan satu jam percakapan
"kabel serat optik"	Media transmisi yang dibangun dari bahan gelas yang sangat murni dan konsisten, dimana sinyal digital ditransmisikan sebagai kecepatan cahaya. Kabel serat optik mempunyai kapasitas transmisi yang lebih besar dengan tingkat gangguan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel tembaga yang biasa digunakan

"frame relay"	bentuk sistem *packet switching* yang menggunakan ukuran packet yang lebih besar dan membutuhkan pengecekan kesalahan yang lebih baik daripada bentuk *packet switching* yang biasa (juga disebut sebagai *"frame net"* di dalam laporan keuangan kami yang telah diaudit sebagaimana terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini)
"FWA"	*Fixed Wireless Access Service*, pelayanan telekomunikasi bergerak terbatas yang terhubung dengan suatu kode area
"Fixed Telecommunication"	Disebut juga sebagai *"fixed voice services"* dan termasuk SLI, SLJJ dan layanan telepon tetap. Layanan ini juga termasuk FWA
"GPRS"	General Packet Radio Service, suatu standar komunikasi selular yang mendukung kapasitas bandwidth yang besar, terutama untuk pengiriman dan penerimaan data, termasuk e-mail dan aplikasi bandwidth tinggi lainnya
"GSM"	*Global System for Mobile Communications*, suatu sistem telekomunikasi selular digital yang distandarisasi oleh *European Telecommunications Standards Institute* yang didasarkan pada rancangan transmisi digital dan jaringan selular dengan *roaming* yang digunakan di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya
"HSDPA"	*High-Speed Downlink Packet Access*, suatu protocol untuk transmisi data telepon genggam yang dapat melakukan downlink transmisi data dengan kecepatan dari delapan sampai 10 Mbps
"SLI"	Sambungan Langsung Internasional, suatu layanan telekomunikasi yang dapat membuat penggunanya melakukan sambungan telepon jarak jauh internasional tanpa melalui jasa operator
"interkoneksi"	Suatu tindakan yang dapat membuat suatu operator telekomunikasi dapat menghubungkan jaringannya ke jaringan atau unsur-unsur jaringan dari beberapa operator telekomunikasi lainnya untuk dapat melakukan terminasi trafik yang berasal dari pelanggan jaringan milik operator telekomunikasi tersebut ke pelanggan jaringan milik operator telekomunikasi lainnya
"IPLC"	*International Private Line Circuit*, yaitu suatu sirkit sambungan khusus internasional

"IP VPN"	*Internet Protocol Virtual Private Network*, suatu layanan yang membuat pelanggan dapat melakukan panggilan yang serupa dengan bila menggunakan sistem *international private automatic branch exchange* atau PABX yaitu sistem yang dapat melakukan panggilan internasional dengan *international abbreviation* dan fitur PABX lainnya
"ISP"	*Internet Service Provider*, suatu perusahaan yang menyediakan akses ke Internet dengan menyediakan *interface* ke *Internet backbone*
"Kbps"	*kilobits (103) per second*, ukuran kecepatan transmisi digital
"LAN"	*Local Area Network*, suatu jaringan jarak dekat yang dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer dalam satu lingkungan agar dapat berbagi data dan melakukan komunikasi lainnya
"Mbps"	*megabits (106) per second*, ukuran kecepatan transmisi digital
"MMS"	*Multimedia Messaging Services*, suatu sistem telekomunikasi selular yang membuat pesan SMS dapat memuat komponen gambar, suara atau video
"media gateway"	Unit penerjemahan antar jaringan-jaringan telekomunikasi yang menggunakan standar yang berbeda, seperti PSTN, *next generation networks* dan *radio access networks*
"MIDI"	*Fixed data services*, termasuk layanan multimedia, komunikasi data dan Internet
"MPLS"	*Multi-Protocol Label Switching*, teknologi platform jaringan komunikasi data yang meningkatkan efisiensi aliran trafik data melalui pola manajemen trafik yang menggolongkan data berdasarkan aplikasinya
"infrastruktur jaringan"	Perangkat infrastruktur tetap yang terdiri dari kabel-kabel serat optik, perangkat transmisi, perangkat *multiplexing*, *switches*, pemancar radio, antena, sistem informasi manajemen dan perangkat lainnya yang menerima, mengirim dan memproses sinyal dari dan ke perangkat pelanggan dan/atau antara jaringan nirkabel dan jaringan tetap
"Node B"	BTS untuk jaringan 3G

"PSTN"	*Public Switched Telephone Network*, jaringan telepon tetap yang dioperasikan dan dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
"DPI"	Daftar Penawaran Interkoneksi, suatu istilah perundang-undangan yang meliputi semua fasilitas termasuk tarif interkoneksi, fasilitas teknis dan masalah-masalah administrasi lainnya yang ditawarkan oleh satu operator telekomunikasi kepada operator telekomunikasi lainnya untuk keperluan akses interkoneksi
"roaming"	Fitur telekomunikasi selular yang dapat membuat pelanggan dari suatu jaringan menggunakan telepon genggam dan nomor teleponnya di suatu wilayah dimana terdapat cakupan jaringan selular yang diselenggarakan oleh penyelenggara lain
"RNC"	*Radio Network Controllers*, perangkat pengendali dalam jaringan 3G yang melakukan koordinasi atas pengoperasian beberapa *Node* B
"SIM" atau "kartu SIM"	*Subscriber Identity Module*, kartu "pintar" yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam telepon genggam, yang memuat semua data yang berhubungan dengan pengguna, seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori penyimpanan pesan-pesan
"SMS"	*Short Message Service*, alat untuk mengirim atau menerima pesan yang berisi huruf dan angka kepada atau dari telepon genggam selular
"VoIP"	*Voice over Internet Protocol*, alat pengiriman informasi suara dengan menggunakan *Internet protocol*. Informasi suara dikirimkan dengan *discrete packets* dalam bentuk digital, bukan melalui *circuit-committed protocols* dari PSTN seperti biasanya, sehingga dapat menghindari biaya yang dikenakan oleh para penyelenggara sambungan jarak jauh konvensional
"VSAT"	*Very Small Aperture Terminal*, *satellite dish* yang ukurannya relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai dengan 3,8 meter, yang diletakkan di tempat pengguna dan digunakan untuk komunikasi data dua arah melalui satelit

"WAP"	*Wireless Application Protocol*, suatu teknologi *platform* standar yang bersifat terbuka dan global yang dapat membuat pengguna selular mengakses dan berinteraksi dengan layanan informasi bergerak seperti e-mail, situs internet (situs), informasi keuangan, informasi *on-line banking*, informasi hiburan, permainan dan pembayaran mikro
"x.25"	Standar *packet-switching* data yang banyak digunakan, yang sebagian telah diganti oleh layanan *frame relay*

Bagian 1

Butir 1: IDENTITAS DIREKSI, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT

Tidak digunakan.

Butir 2: STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL

Tidak digunakan.

Butir 3: INFORMASI PENTING

Beberapa Data Keuangan

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi keuangan konsolidasi kami dan statistik pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan per tanggal dan untuk setiap periode yang disebutkan. Informasi keuangan ini harus dibaca bersama-sama dengan, dan secara keseluruhan harus mengacu pada laporan keuangan konsolidasi Perusahaan, termasuk catatan-catatan di dalamnya, dan informasi lainnya yang terdapat di bagian lain dari laporan tahunan ini. Informasi keuangan akhir tahun ini dibuat berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008. Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit per dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2005 telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 telah diaudit oleh Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, *Indonesian member firm* dari Ernst & Young Global.

Pada tahun 2007, Pemerintah telah menetapkan sistem pendapatan interkoneksi baru yang berdasarkan biaya, menggantikan sistem bagi hasil yang berlaku sebelumnya. Berdasarkan sistem ini, kami melaporkan pendapatan operasional kami dalam jumlah kotor *(gross)* dan tidak dalam jumlah bersih *(net)*. Dengan menggunakan metode pencatatan dalam jumlah bersih *(net)*, pendapatan interkoneksi dicatat setelah dikurangi dengan beban interkoneksi. Pada pencatatan dalam jumlah kotor *(gross)*, kami mencatat pendapatan interkoneksi dalam pendapatan usaha dan beban interkoneksi dalam beban usaha. Kami tidak melakukan penyajian kembali atas laporan laba rugi kami untuk periode sebelumnya untuk mencerminkan pencatatan dalam jumlah kotor *(gross)*, dikarenakan metode penghitungan baru tersebut baru berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007.

Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit tersebut disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau "SAK", yang dalam beberapa hal penting berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat atau "US GAAP". Lihat Catatan 39, 40 dan 41 dari catatan-catatan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit yang terdapat pada bagian lain dari laporan tahunan ini, yang menjelaskan beberapa perbedaan penting antara SAK dan US GAAP, sebagaimana terkait dengan Perusahaan dan rekonsiliasi terhadap jumlah laba bersih berdasarkan US GAAP untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 dan jumlah ekuitas berdasarkan US GAAP per tanggal 31 Desember 2007 dan 2008.

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2004 Rp.	2005 Rp.	2006 Rp.	2007 Rp.	2008 Rp.	2008 US$ (1)
	(Rp, dalam miliar dan US$ dalam juta, kecuali per saham dan per ADS)					
Data Laporan Rugi/Laba:						
SAK:						
Pendapatan Usaha:						
Selular(2)	7.342,1	8.645,0	9.227,5	12.752,5	14.178,9	1.294,9
MIDI(2)	1.483,9	1.694,0	1.902,6	2.168,6	2.735,5	249,8
Telekomunikasi tetap	1.544,7	1.250,8	1.109,3	1.567,4	1.744,7	159,3
Jasa-jasa lainnya	59,4	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan usaha	**10.430,1**	**11.589,8**	**12.239,4**	**16.488,5**	**18.659,1**	**1.704,0**
Jumlah beban usaha	**7.232,0**	**7.937,9**	**8.840,7**	**11.968,9**	**13.925,8**	**1.271,7**
Laba usaha	3.198,1	3.651,9	3.398,7	4.519,6	4.733,3	432,34
Penghasilan (beban) lainnya:						
Laba penjualan investasi pada perusahaan afiliasi	286,2	14,6	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	187,4	215,1	212,8	232,4	460,1	42,0
Laba penjualan investasi jangka panjang lainnya	110,9	1,2		-	-	-
Laba (rugi) kurs-bersih	(66,1)	(79,9)	304,4	(155,3)	(885,7)	(80,9)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif-bersih	(170,5)	(44,2)	(438,8)	68,0	136,6	12,5
Amortisasi *goodwill*	(226,3)	(226,4)	(226,5)	(226,5)	(227,3)	(20,8)
Beban pendanaan	(1.097,5)	(1.264,8)	(1.248,9)	(1.428,6)	(1.858,3)	(169,7)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	99,1	85,2	21,2	(80,0)	(33,6)	(3,1)
Jumlah Penghasilan (beban) lainnya - bersih	**(876,8)**	**(1.299,2)**	**(1.375,8)**	**(1.590,0)**	**(2.408,2)**	**(220,0)**
Bagian laba bersih dari perusahaan asosiasi	61,5	0,1	(0,2)	-	-	-
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(25,0)	(31,4)	(36,5)	(28,1)	(26,8)	(2,4)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	(724,6)	(697,9)	(576,1)	(859,5)	(419,8)	(38,3)
Laba bersih	1.633,2	1.623,5	1.410,1	2.042,0	1.878,5	171,6
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang ditempatkan	5.202.760.294	5.253.249.519	5.404.654.859	5.433.933.500	5.433.933.500	-
Laba usaha dari usaha per saham	614,7	695,2	628,8	831,7	871,1	0,08
Laba per saham dilusian	313,6	309,0	258,8	375,8	345,7	0,03
Laba per saham dasar(3)	313,9	309,0	260,9	375,8	345,7	0,03
Dividen yang dibagikan per saham(3)	154,23	149,32	129,75	187,90	-	-
Dividen per saham yang dibagikan (US$)(3)(5)	0,016	0,017	0,014	0,017	-	-
Dividen per ADS yang dibagikan (US$)(3)(4)(5)	0,80	0,83	0,69	0,86	-	-
US GAAP:(6)						
Laba bersih	1.924,8	1.875,6	1.751	2.475,8	2.740,2	250,2
Laba per saham dasar(3)	370,0	357,0	324,0	455,6	504,3	0,05
Laba per ADS dasar(3)(4)	18.497,5	17.851,4	16.199,3	22.781,0	25.213,4	2,30
Laba per saham dasar dilusian	369,6	353,3	321,9	455,6	504,3	0,05
Laba per ADS dilusian	18.481,0	17,663,5	16.097,2	22.781,0	25.213,4	2,30

	Per tanggal 31 Desember					
	2004 Rp.	2005 Rp.	2006 Rp.	2007 Rp.	2008 Rp.	2008 US$[1]
	(Rp, dalam miliar dan US$ dalam juta)					
Data Neraca:						
SAK:						
Aktiva						
Aktiva lancar	6.573,1	7.527,0	5.665,4	10.794,1	9.659,8	882,2
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	48,0	30,4	23,3	56,5	42,5	3,9
Aktiva pajak tangguhan-bersih	33,2	44,2	46,6	87,1	68,4	6,3
Investasi jangka panjang	135,3	3,2	8,8	3,0	3,4	0,3
Aktiva tetap-bersih	17.243,2	21.564,8	24.918,6	30.572,9	38.394,1	3.506,3
Goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya-bersih	3.012,6	2.682,6	2.689,8	2.350,5	2.064,7	188,6
Aktiva tidak lancar lainnya	827,1	934,9	876,2	1,441,1	1.460,4	133,3
Jumlah aktiva	27.872,5	32.787,1	34.228,7	45.305,1	51.693,3	4.720,9
Kewajiban						
Kewajiban lancar	4.492,8	5.431,4	6.803,2	11.658,6	10.675,2	974,9
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	39,1	16,6	29,4	64,9	14,7	1,4
Kewajiban pajak tangguhan-bersih	489,1	865,7	1.244,5	1.482,2	1.305,2	119,2
Hutang jangka panjang	1.588,1	1.308,8	1.504,8	4.249,0	10.812,2	987,4
Hutang obligasi	7.524,1	10.161,9	8.734,0	10.088,7	10.315,6	942,1
Kewajiban tidak lancar lainnya	390,3	511,8	510,4	919,6	871,9	79,6
Jumlah kewajiban	14.523,4	18.296,1	18.826,3	28.463,0	33.994,8	3.104,6
Aktiva bersih	13.349,0	14.491,0	15.402,4	16.842,5	17.698,6	1.616,3
Hak minoritas	164,5	175,7	200,6	297,4	288,9	26,4
Modal saham	528,5	535,6	543,4	543,4	543,4	49,6
Ekuitas	13.184,6	14.315,3	15.201,8	16.544,7	17.409,6	1.589,9
Jumlah kewajiban dan ekuitas	27.872,5	32.787,1	34.228,7	45.305,1	51.693,3	4.720,9
Jumlah saham yang ditempatkan	5.285.308.500	5.356.174.500	5.433.933.500	5.433.933.500	5.433.933.500	-
US GAAP:[6]						
Jumlah aktiva	30.045,1	35.414,4	36.990,9	48.840,1	56.620,0	5.170,8
Jumlah ekuitas	14,295,0	15.744,3	16.574,8	18.260,6	20.441,1	1.866,8

	Per atau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2004	2005	2006	2007	2008
Data Usaha:[2]					
Persentase kenaikan (penurunan) dari periode sebelumnya:					
Pendapatan usaha	26,74%	11,12%	5,6%	34,7%	13,2%
Laba usaha	36,21	14,19	(6,9)	33,0	4,7
Laba bersih	(73,15)	(0,60)	(13,1)	44,8	(8,0)
Jumlah aktiva	6,96	17,63	4,4	32,4	14,1
Jumlah ekuitas	9,51	8,58	6,2	8,8	5,2
Rasio usaha (dalam persentase):					
Laba usaha terhadap pendapatan usaha	30,66	31,51	27,77	27,41	25,37
Laba usaha terhadap ekuitas	24,26	25,51	22,36	27,32	27,19
Laba usaha terhadap jumlah aktiva	11,47	11,14	9,93	9,98	9,16
Marjin laba bersih	15,66	14,01	11,52	12,38	10,07
Pengembalian modal	12,39	11,34	9,28	12,34	10,79
Pengembalian aktiva	5,86	4,95	4,12	4,51	3,6
Rasio keuangan (dalam persentase):					
Rasio lancar	146,30	138,58	83,28	92,59	90,49
Rasio hutang terhadap ekuitas	72,03	87,34	75,13	100,89	125,00
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva	52,11%	55,80%	55,00%	62,83%	65,76%

(1) Dalam Dolar AS berdasarkan nilai tukar Rp10.950 = US$1,00, Nilai Tukar Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2008, Lihat "-Informasi Nilai Tukar" di bawah.

(2) Sejak triwulan keempat tahun 2008, kami telah mengklasifikasikan penjualan modem *wireless broadband*, serta penggunaan komunikasi *wireless broadband* dari layanan MIDI menjadi layanan selular dan mulai mencatat penghasilan tersebut sebagai penghasilan usaha layanan selular.

(3) Laba per saham/ADS dasar, dan dividen per saham/ADS yang dibagikan dilaporkan dalam Rupiah dan Dolar AS, Laba per saham/ADS dasar, dan dividen per saham/ADS yang dibagikan untuk semua periode yang disebutkan telah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang ditempatkan setelah memperhatikan dampak dari pemecahan saham.

(4) Data tentang laba dasar dan dividen yang dibagikan per ADS dihitung berdasarkan bahwa setiap ADS mewakili lima puluh saham biasa dan tidak membuat cadangan untuk pajak penghasilan yang dikenakan pada pemegang ADS.

(5) Dihitung dengan menggunakan Nilai Tukar Bank Indonesia untuk setiap tanggal pembayaran dividen.

(6) Nilai berdasarkan US GAAP memperlihatkan penyesuaian terutama akibat perbedaan dalam perlakuan akuntansi atas kapitalisasi beban bunga, kapitalisasi rugi valuta asing, pengakuan pendapatan, modal dalam laba (rugi) bersih dari perusahaan asosiasi, amortisasi *goodwill*, amortisasi hak atas tanah, biaya manfaat pasca pensiun, program pensiun dan pajak penghasilan tangguhan akibat penyesuaian US GAAP.

(7) Persentase dan rasio data operasi dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK.

Informasi Tentang Nilai Tukar Valuta

	nilai tukar rupiah per dolar AS			
	Akhir periode	Rata-rata (1)(2)	Tinggi	Rendah
Periode				
2004	9.290	8.985	9.415	8.441
2005	9.830	9.751	10.310	9.165
2006	9.020	9.141	9.395	8.775
2007	9.419	9.137	9.479	8.672
2008	10.950	9.761	12.400	9.051
September	9.430	9.345	9.470	9.163
Oktober	10.995	10.048	11.743	9.555
November	12.151	11.711	12.400	10.800
Desember	10.950	11.325	12.300	10.885
2009				
Januari	11.355	11.167	11.355	10.863
Februari	11.980	11.853	11.988	11.685
Maret	11.575	11.850	12.065	11.435
April (sampai dengan 7 April)	11.380	11.461	11.620	11.345

Sumber: Bank Indonesia

(1) Nilai tukar rata-rata per tahun dihitung berdasarkan rata-rata nilai tukar dari setiap periode akhir bulan.

(2) Nilai tukar rata-rata per bulan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai tukar dari setiap penutupan hari.

Bank Indonesia adalah satu-satunya penerbit mata uang Rupiah dan bertanggung jawab dalam mempertahankan stabilitas Rupiah. Sejak tahun 1970, Indonesia telah menggunakan tiga sistem nilai tukar mata uang, yaitu: (i) nilai tukar tetap antara 1970 sampai dengan 1978; (ii) nilai tukar mata uang mengambang antara 1978 sampai dengan 1997; dan (iii) nilai tukar mata uang bebas mengambang sejak 14 Agustus 1997. Berdasarkan sistem nilai tukar mata uang mengambang, Bank Indonesia telah mempertahankan nilai Rupiah dengan kebijakan *trading band*, dimana Bank Indonesia masuk ke pasar valuta asing dan membeli dan menjual Rupiah, bila diperlukan, ketika perdagangan Rupiah melebihi nilai lelang dan penawaran yang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap harinya. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia tidak lagi menerapkan kebijakan *trading band* dan membiarkan nilai tukar Rupiah mengambang tanpa nilai tukar yang diumumkan dimana Bank Indonesia dapat melakukan intervensi, yang berakibat pada penurunan yang substansial pada nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Berdasarkan sistem yang digunakan saat ini, nilai tukar mata uang Rupiah ditentukan oleh pasar, yang merupakan refleksi dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Namun demikian, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil. Nilai tukar adalah Rp9.020 = US$1,00 per 31 Desember 2006, Rp9.419 = US$1,00 per 28 Desember 2007 dan Rp10.950 = US$1,00 per 31 Desember 2008. Pada tanggal 7 April 2009, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS adalah Rp11.380 per Dolar AS. The Federal Reserve Bank of New York untuk keperluan pabean tidak menetapkan nilai tukar tengah hari *(noon buying rate)* untuk transfer dalam mata uang Rupiah.

Mata uang Rupiah sebelumnya dan saat ini secara umum dapat dikonversi atau dipindahkan secara bebas. Bank Indonesia memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang Rupiah dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan valuta asing dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya satu tahun.

Valuta Asing

Pengawasan valuta asing telah dihapuskan pada tahun 1971, dan Indonesia saat ini memberlakukan sistem valuta asing liberal yang memperbolehkan aliran valuta asing secara bebas. Transaksi modal, termasuk pengiriman modal, keuntungan, dividen dan bunga, bebas dari pengawasan valuta asing. Akan tetapi ada beberapa peraturan yang berdampak pada sistem valuta asing. Bank Indonesia belum lama ini memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang Rupiah dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan valuta asing dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya selama satu tahun.

FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Risiko-Risiko yang berkaitan dengan Indonesia

Kami didirikan di Indonesia dan hampir semua bisnis, aktiva dan pelanggan kami berlokasi di Indonesia. Oleh karena itu, keadaan politik, ekonomi, hukum dan sosial Indonesia di masa mendatang serta tindakan dan kebijakan tertentu yang mungkin, atau mungkin tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi Indonesia, antara lain, terjadinya depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis di Indonesia, termasuk memberikan dampak yang negatif bagi kualitas dan pertumbuhan basis pelanggan dan pemberian layanan kami, yang bergantung pada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Banyak perusahaan Indonesia yang masih belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi, dan masih dalam proses restrukturisasi hutang mereka atau terlibat dalam sengketa yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi atas kewajiban hutang tersebut. Krisis keuangan global yang sebagian dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek, dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari melemahnya ekonomi dunia telah mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi karena hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya risiko akibat ketidakpastian ekonomi dunia. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak negatif pada bisnis dan konsumen Indonesia, dan dapat berakibat pada menurunnya permintaan jasa telekomunikasi.

Gejolak harga minyak dan kemungkinan berkurangnya persediaan makanan dapat pula menyebabkan penurunan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia dapat pula menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh para kreditur Indonesia dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kegiatan bisnis, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional dan prospek kami. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal dalam jumlah besar dan hutang luar negeri yang tinggi. Cadangan mata uang asing Pemerintah dalam jumlah yang rendah dan melemahnya sektor perbankan yang diakibatkan oleh tingginya kredit macet. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan yang dibelanjakan oleh konsumen atau menyebabkan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan untuk jasa telekomunikasi, termasuk jasa kami.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan di pasar yang sedang berkembang dan juga pasar lainnya, dapat meningkatkan ketidakstabilan pada pasar uang Indonesia dan penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat atau pertumbuhan yang negatif dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Ketidakstabilan politik dan sosial dapat memberikan dampak negatif bagi Perusahaan

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan tatanan demokrasi yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang menimbulkan ketidakpastian pada kerangka politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga beberapa kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara demokrasi yang masih cukup baru, Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah sosiopolitik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial politik. Kejadian-kejadian tersebut telah memperlihatkan ketidakstabilan perubahan politik Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa ada satu partai politik yang memperoleh kemenangan secara mayoritas. Hal-hal tersebut telah mengakibatkan ketidakstabilan politik, dan keresahan sosial secara umum pada beberapa kejadian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Walaupun pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dilakukan di tahun 2004 telah berjalan lancar, peningkatan kegiatan politik dapat terjadi di tahun 2009 sebagai akibat dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di bulan April 2009 dan antisipasi pemilihan presiden yang dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Juli 2009.

Misalnya, pada bulan Juni 2001, rangkaian demonstrasi dan mogok kerja mewarnai sekurang-kurangnya 19 kota setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 30,0%. Demonstrasi serupa juga terjadi pada bulan Januari 2003 ketika Pemerintah kembali berupaya menaikkan harga bahan bakar, tarif listrik dan tarif telepon. Di dalam kedua peristiwa ini, Pemerintah terpaksa menangguhkan atau benar-benar menurunkan tingkat kenaikan tarif yang direncanakan.

Ketidakstabilan politik regional tetap menjadi masalah. Pada bulan April 2006 beratus-ratus orang terlibat dalam aksi protes yang berujung pada kekerasan terhadap pengoperasian tambang emas Freeport di propinsi Papua dan juga terjadinya beberapa bentrokan antara para pendukung pergerakan separatis dan militer Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi politik semakin memanas di Maluku dan Poso, sebuah kabupaten di propinsi Sulawesi Tengah, dan bentrokan-bentrokan yang terjadi antar kelompok agama di daerah-daerah ini telah menimbulkan ribuan korban dan orang hilang. Perkembangan politik dan sosial yang terkait di Indonesia memang tidak dapat dipastikan sejak dahulu, dan kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi lagi di masa mendatang dan dalam skala besar, atau bahwa gangguan-gangguan tersebut tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Indonesia terletak pada zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian secara ekonomi

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan vulkanik dan musim kemarau, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya di luar kendali Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia (selain tsunami Asia pada tahun 2004), termasuk tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006, gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2006 serta semburan dan banjir lumpur panas di Jawa Timur pada tahun 2006. Indonesia juga mengalami banjir besar di Jakarta pada bulan Februari 2007 dan Solo, Jawa Tengah pada bulan Januari 2008.

Sebagai akibat dari bencana-bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk bantuan keadaan darurat dan penempatan kembali. Sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah negara lain dan organisasi bantuan internasional. Kami tidak dapat menjamin bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan, atau bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada para penerimanya pada

waktunya. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut pada waktunya, keresahan sosial dan politik dapat terjadi. Sebagai tambahan, upaya perbaikan dan bantuan tersebut kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah, dan dapat berakibat pada kemampuannya untuk memenuhi kewajibanya berdasarkan hutang Pemerintah. Kegagalan Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya tersebut, atau pernyataan Pemerintah atau adanya moratorium atas hutang negara, dapat menimbulkan wanprestasi atas pinjaman pihak swasta termasuk pinjaman Perusahaan, sehingga mengakibatkan dampak negatif yang material atas bisnis kami.

Kami tidak dapat menjamin bahwa asuransi kami akan cukup untuk melindungi kami dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam tersebut dan hal-hal lain yang terjadi diluar kendali kami. Sebagai tambahan, kami tidak dapat menjamin bahwa premi yang dibayarkan untuk polis asuransi-asuransi tersebut pada saat perpanjangan jumlahnya tidak akan meningkat secara substansial, sehingga dapat secara material mengakibatkan dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil dari kegiatan operasional kami. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi, kerusakan geologis atau bencana alam di kota-kota yang memiliki populasi yang besar atau merupakan pusat keuangan di Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kegiatan teroris di Indonesia dapat membuat negara tidak stabil, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Beberapa insiden pengeboman telah terjadi di Indonesia, terutama pada bulan Oktober 2002 di Bali, suatu wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang aman dari kerusuhan-kerusuhan yang mempengaruhi bagian-bagian lain dari negeri ini. Selain itu, beberapa insiden pengeboman, walaupun dalam skala yang lebih kecil, juga telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk di tempat perbelanjaan dan tempat ibadah. Pada bulan April 2003, sebuah bom meledak di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, dan pada bulan Mei 2003, sebuah bom meledak di depan terminal domestik di Bandara Udara Internasional Jakarta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, dan pada bulan September 2004, sebuah bom meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta. Pada bulan Mei 2005, sebuah bom meledak di Sulawesi Tengah yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 21 orang dan korban luka-luka sekurang-kurangnya 60 orang. Pada tanggal 1 Oktober 2005, terjadi ledakan bom di Bali, yang menewaskan sekurang-kurangnya 23 orang dan melukai sekurang-kurangnya 101 orang lainnya. Pejabat Pemerintah, Australia dan AS mengindikasikan bahwa pengeboman ini kemungkinan terkait dengan organisasi teroris internasional. Beberapa demonstrasi juga terjadi di Indonesia sebagai reaksi atas rencana aksi militer dan penambahan pasukan AS, Inggris dan Australia di Irak. Pada Januari 2007, kelompok teroris sektarian melakukan beberapa pengeboman di Poso. Tindakan teroris lain mungkin saja terjadi di masa mendatang dan ditargetkan pada warga negara asing di Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari, dan mengarah pada, ketidakstabilan dan kerusuhan ini dapat menggoyahkan Indonesia dan Pemerintah dan telah, dan dapat terus memberikan dampak negatif yang material bagi investasi dan kepercayaan pada, serta kinerja perekonomian Indonesia, dan dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Indonesia sangat bergantung pada pendanaan dari kreditur multinasional, dan ketidakmampuan memperoleh pendanaan tersebut akan berakibat negatif bagi Indonesia dan Perusahaan

Bank Dunia merupakan sumber pendanaan yang penting bagi Indonesia. Bank Dunia telah menyatakan keprihatinannya mengenai lambatnya reformasi kelembagaan di Indonesia dan mengenai rencana desentralisasi Pemerintah, terutama pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman, yang mana hal ini dapat menyebabkan Pemerintah pusat tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Program pinjaman Bank Dunia ini mensyaratkan bahwa pengkajian atas kepatuhan akan dilakukan secara berkala dan bahwa pinjaman ini dapat dikurangi atau dibatalkan pada setiap saat. Per tanggal 31 Desember 2006, Pemerintah memiliki hutang sekitar US$8,97 milyar kepada Bank Dunia.

Sebagai tambahan, Pemerintah bergantung pada pinjaman dari kreditur multinasional untuk membiayai defisit anggaran. Para anggota Paris Club, Consultative Group in Indonesia atau CGI yang dulu pernah ada dan International Monetary Fund atau IMF, juga menjadi sumber pendanaan yang penting bagi Pemerintah. Paris Club adalah suatu kelompok negara kreditur sukarela informal yang berupaya mengkoordinasi pemecahan masalah kesulitan pembayaran yang dialami oleh negara-negara debitur. CGI adalah kelompok negara dan organisasi internasional pendonor yang bertemu setiap tahun untuk mengkoordinasi bantuan donor untuk Indonesia. Pemerintah telah beberapa kali berhasil melakukan penjadwalan ulang atas pembayaran hutang-hutang luar negerinya. Akan tetapi, pada tahun 2004, Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri program IMF dan sebagai akibat dari keputusan ini, CGI menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak akan melakukan penjadwalan ulang pinjaman-pinjaman yang masih belum dibayar kepada para anggotanya atau kepada para kreditur lainnya. Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri keikutsertaannya di CGI pada bulan Januari 2007 dan mengumumkan keinginannya untuk melakukan diskusi secara langsung dengan para kreditur mengenai hutang eksternal Pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2008, pinjaman eksternal Pemerintah yang masih belum dibayar adalah sebesar US$66,5 milyar.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan beberapa obligasi retail domestik dan internasional dan mungkin akan terus memperoleh dana dari pasar komersial untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Mengingat jumlah defisit neraca dan kurangnya cadangan devisa Pemerintah, ketidakmampuan Pemerintah untuk memperoleh pendanaan yang memadai sebagai akibat diturunkannya jumlah atau dihapuskannya pendanaan dari Bank Dunia, Paris Club, CGI atau lembaga atau negara lain, atau melalui pasar komersial dapat memberikan dampak yang negatif bagi keadaan ekonomi, politik dan sosial Indonesia, yang pada akhirnya, akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan. Kami tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah dapat memperoleh alternatif sumber pendanaan untuk mengganti pendanaan yang sebelumnya diberikan oleh para kreditur saat ini atau untuk memperoleh tambahan dana untuk mengganti pendanaan yang jumlahnya diturunkan atau ditiadakan dari sumber-sumber pendanaan lainnya.

Gerakan dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang No. 13/2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang isinya antara lain, meningkatkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi kepada pekerja yang diberhentikan dan peraturan pelaksana yang memperbolehkan para pekerja untuk membentuk serikat kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan adanya forum bipartit antara pekerja dan pemberi kerja dan peran serta lebih dari 50% pekerja suatu perusahaan untuk membuat suatu perjanjian kerja bersama, untuk menegosiasikan dan menciptakan prosedur yang lebih ringan untuk mengadakan pemogokan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan,

pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak untuk memperoleh pembayaran (i) cuti tahunan yang belum diambil; (ii) biaya relokasi; dan (iii) kompensasi untuk perumahan dan biaya pengobatan. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, beberapa serikat pekerja telah meminta kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menetapkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah valid, kecuali untuk beberapa ketentuan mengenai (i) prosedur untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan (ii) tindakan terhadap pekerja yang merencanakan atau ikut serta dalam mogok kerja yang ilegal, baik dalam bentuk penahanan atau denda dalam bentuk uang. Liberalisasi peraturan yang memperkenankan pembentukan serikat buruh dengan disertai keadaan ekonomi yang lemah telah mengakibatkan dan kemungkinan akan terus berakibat pada, terjadinya kerusuhan dan gerakan buruh di Indonesia. Pemerintah mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menurut para aktifis buruh dapat mengakibatkan penurunan besarnya pensiun, peningkatan penggunaan karyawan alih jasa (*outsource*) dan larangan bagi serikat buruh untuk melakukan mogok kerja. Rancangan perubahan undang-undang tersebut telah ditunda pembahasannya, dan peraturan pemerintah mengenai pemutusan hubungan kerja belum berlaku efektif. Kerusuhan dan gerakan buruh dapat menganggu jalannya bisnis kami dan dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya dan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lainnya, yang mana hal-hal ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Depresiasi nilai Rupiah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Salah satu penyebab paling utama atas terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan ketidakstabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain, seperti Dolar AS. Meskipun Rupiah telah menguat secara tajam dari titik rendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar AS di tahun 1998, mata uang Rupiah dapat saja kembali mengalami ketidakstabilan di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2008, nilai tukar mata uang Rupiah/Dolar AS bervariasi dari titik terendah Rp12.400 per Dolar AS sampai dengan titik tertinggi yaitu Rp8.672 per Dolar AS, dan selama tahun 2008, bervariasi dari titik terendah sebesar Rp12.400 per Dolar AS ke titik tertinggi sebesar Rp9.051 per Dolar AS. Sebagai akibatnya, kami mencatat kerugian bersih pada nilai tukar mata uang asing sebesar Rp155,3 milyar, dan Rp885,7 milyar, masing-masing di tahun 2007 dan 2008. Kami tidak dapat menjamin bahwa depresiasi lebih lanjut dari nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya termasuk Dolar AS tidak akan terjadi. Apabila Rupiah terdepresiasi lagi dari nilai tukar mata uang yang berlaku pada 31 Desember 2008, maka kewajiban kami berdasarkan akun hutang dagang, hutang pengadaan dan hutang serta obligasi dalam mata uang asing yang kami miliki akan bertambah dalam mata uang Rupiah. Depresiasi lebih lanjut atas Rupiah dapat berakibat pada bertambahnya kerugian pada nilai tukar valuta asing dan akan berdampak secara signifikan terhadap pendapan lain-lain dan pendapatan bersih kami.

Sebagai tambahan, walaupun Rupiah secara umum bebas dikonversi dan ditransfer (kecuali bank-bank Indonesia dapat menolak melakukan transfer Rupiah kepada pihak-pihak di luar Indonesia yang tidak mempunyai tujuan perdagangan atau investasi yang jelas), Bank Indonesia dari waktu ke waktu telah melakukan intervensi ke dalam pasar uang dalam rangka melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah atau membeli Rupiah dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan nilai tukar mengambang dari Bank Indonesia tidak akan berubah, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lain untuk menstabilkan, mempertahankan atau menguatkan nilai Rupiah, ataupun bahwa salah satu tindakan-tindakan ini, apabila dilakukan, dapat membuahkan hasil yang baik. Perubahan kebijakan

nilai tukar mengambang dapat berakibat pada sangat meningginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas, diawasinya permodalan atau pertukaran valuta atau tidak diberikannya bantuan dana tambahan oleh para kreditur multinasional. Hal ini dapat berakibat menurunnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, terjadinya cidera janji dalam pembayaran hutang atau berkurangnya penggunaan oleh para pelanggan kami, dan sebagai dampaknya, kami juga akan mengalami kesulitan dalam membiayai pengeluaran modal dan dalam menjalankan strategi bisnis kami. Salah satu dari konsekuensi-konsekuensi yang disebutkan ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kami mungkin tidak dapat mengelola risiko pertukaran valuta asing Perusahaan secara sukses

Perubahan nilai tukar mata uang telah mempengaruhi dan mungkin terus mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha kami. Sebagian besar kewajiban pembayaran hutang kami dalam Rupiah dan sebagian besar pengeluaran modal kami adalah dalam mata uang Dolar AS. Sebagian besar pendapatan kami adalah dalam mata uang Rupiah tetapi sebagian pendapatan usaha kami dalam Dolar AS atau yang terkait dengan Dolar AS. Kami juga mungkin akan memiliki hutang jangka panjang lainnya dalam mata uang selain dari Rupiah, termasuk Dolar AS, untuk membiayai pengeluaran modal tambahan.

Kami saat ini melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian dari kewajiban kami dalam valuta asing terutama karena pendapatan usaha tahunan kami dalam mata uang Dolar AS lebih kecil dari seluruh biaya operasi kami dalam mata uang Dolar AS dan pembayaran tahunan untuk hutang pokok dan bunga dalam mata uang Dolar AS. Dalam rangka upaya mengelola eksposur valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami secara keseluruhan, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing dengan tiga lembaga keuangan internasional di tahun 2005. Selain itu, sejak tahun 2006 sampai dengan 2008, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing dengan enam lembaga keuangan internasional dengan tujuan untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang. Untuk kontrak-kontrak ini, kami membayar biaya di muka atau suku bunga premi tetap. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil mengelola risiko valuta asing di masa mendatang atau bahwa kami tidak terkena dampak negatif dengan adanya eksposur terhadap risiko nilai tukar tersebut.

Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Sejak tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. atau Moody's, Standard & Poor's Rating Group atau Standard & Poor's dan Fitch Ratings, atau Fitch, menurunkan peringkat hutang pemerintah (*sovereign rating*) Indonesia dan peringkat hutang dari berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan lainnya di Indonesia. Saat ini, hutang jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat "Ba2 stable" oleh Moody's, "BB stable" oleh Standard & Poor's dan "BB+ stable" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar hutangnya dan kesanggupan dan kemauannya untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo.

Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat hutang Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk menurunkan peringkat hutang kami. Setiap penurunan peringkat tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi likuiditas di pasar uang Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan kami, untuk memperoleh pendanaan tambahan serta tingkat suku bunga dan ketentuan-

ketentuan komersial lainnya dimana pendanaan tambahan tersedia. Tingkat suku bunga mengambang atas hutang dalam mata uang Rupiah kemungkinan juga akan naik. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional serta prospek kami.

Standar akuntasi Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat

Kami menyusun laporan keuangan konsolidasi kami sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan (SAK) Indonesia, yang berbeda dengan US GAAP. Akibatnya, laporan keuangan konsolidasi kami dan pendapatan yang dilaporkan dapat sangat berbeda dengan yang dilaporkan berdasarkan US GAAP. Kami telah menyusun laporan rekonsiliasi terhadap US GAAP atas pendapatan bersih konsolidasi kami per tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 dan permodalan para pemegang saham konsolidasi kami per tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, dimana laporan rekonsiliasi tersebut terdapat dalam Catatan 40 dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terdapat di bagian lain dari laporan tahunan ini.

Kami didirikan di Indonesia, dan para investor mungkin tidak dapat melakukan tindakan hukum atau memberlakukan putusan pengadilan tertentu, terhadap kami di Amerika Serikat

Kami adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, yang menjalankan usaha dalam kerangka hukum Indonesia tentang perusahaan penanaman modal asing, dan hampir semua aktiva kami berada di Indonesia. Selain itu, beberapa Komisaris dan hampir semua Direktur kami bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar aktiva dari pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Akibatnya, para investor mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan, terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat, atau memberlakukan putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat.

Penasihat hukum Indonesia kami telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan AS, termasuk putusan-putusan mengenai ketentuan kewajiban perdata dari undang-undang pasar modal federal AS atau undang-undang Pasar Modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat, tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan tersebut dapat dijadikan bukti yang tidak bersifat final dalam pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan Indonesia. Tidak dapat dipastikan apakah pengadilan Indonesia akan mengeluarkan putusan berdasarkan gugatan asli yang diajukan di hadapannya, yang mana hanya didasarkan pada ketentuan kewajiban perdata (*civil liability*) dari undang-undang pasar modal federal AS atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak penggugat harus mengajukan gugatan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di pengadilan Indonesia.

Timbulnya wabah severe acute respiratory syndrome atau flu burung atau wabah epidemi lainnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional kami

Indonesia rentan terhadap epidemi, seperti *severe acute respiratory syndrome* atau SARS dan flu burung. Berkembangnya wabah SARS ini di Cina dan bagian-bagian lain dari Asia, termasuk Indonesia pada tahun 2003 telah menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai kegiatan usaha dan ekonomi pada umumnya. Baru-baru ini, Indonesia dan beberapa negara lainnya telah mengalami wabah flu burung. Lebih dari 110 orang di Indonesia telah menjadi korban flu burung. Apabila wabah flu burung ini lebih menyebar lagi atau apabila pecah wabah SARS lainnya di masa mendatang atau epidemi lainnya di Indonesia, keadaan ekonomi dapat terkena dampaknya dan kami juga dapat mengalami gangguan yang material terhadap kegiatan usaha kami, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional kami.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Perusahaan

Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami

Perusahaan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan telepon tetap milik para pesaing kami dan infrastruktur terkait agar pengoperasian bisnis Perusahaan berhasil. Apabila terjadi perselisihan mengenai interkoneksi, baik yang disebabkan oleh kegagalan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban kontraktual atau karena alasan lainnya, maka satu atau lebih layanan kami dapat terhambat, terganggu atau terhenti sama sekali, kualitas layanan kami dapat menurun, *churn rate* pelanggan kami dapat meningkat atau tarif interkoneksi kami dapat naik, yang mana semua ini dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Selain itu, Pemerintah telah mengundangkan peraturan interkoneksi baru pada bulan Februari 2006, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007. Peraturan baru ini mendefinisikan para operator yang mengendalikan lebih dari 25,0% dari pangsa pasar sebagai "operator dominan" dan mewajibkan para operator tersebut untuk menawarkan interkoneksi kepada para operator telekomunikasi lainnya yang akan disetujui oleh Pemerintah. Selain daripada hal tersebut di atas, peraturan interkoneksi baru tersebut juga menetapkan biaya interkoneksi baru dimana para operator jaringan yang melakukan terminasi panggilan akan menentukan tarif interkoneksi berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan No. 8/PER/KOMINFO/02/2006. Formula baru tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2007 dan sebagai akibatnya, para operator diwajibkan untuk menagih pembayaran berdasarkan biaya untuk melakukan panggilan tersebut. Biaya interkoneksi akan dihitung dan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi atau DJPT untuk disetujui dalam bentuk Daftar Penawaran Interkoneksi atau DPI. Sampai dengan akhir tahun 2006 Pemerintah telah menyetujui DPI milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, atau Telkom, PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel, dan Perusahaan. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah telah menyetujui DPI dari Telkom, Telkomsel, dan Perusahaan yang merupakan perubahan dari DPI sebelumnya. Dewasa ini, semua operator telekomunikasi telah mengadakan suatu perjanjian pokok interkoneksi yang baru. Akan tetapi, masing-masing operator harus mengadakan perjanjian lebih lanjut agar dapat melakukan interkoneksi dengan operator lainnya, yang mana hal ini dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan peraturan interkoneksi yang baru. Kegagalan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian tersebut dapat menurunkan pendapatan usaha kami yang diperoleh dari atau meningkatkan biaya yang harus kami bayarkan kepada para operator telekomunikasi lainnya untuk interkoneksi.

Kami menjalankan usaha di dalam keadaan dimana hukum dan perundang-undangan sedang mengalami reformasi. Reformasi ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang dapat mengakibatkan, antara lain, berkurangnya marjin dan pendapatan usaha, yang semua ini dapat memberikan dampak material yang negatif bagi kami

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1999 telah mendorong liberalisasi industri telekomunikasi sampai pada titik tertentu, termasuk di antaranya kemudahan bagi para pemain baru untuk masuk ke sektor industri telekomunikasi dan perubahan struktur persaingan industri telekomunikasi. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan peraturan tersebut menjadi sedemikian banyak dan rumit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seiring dengan terus berlangsungnya reformasi di sektor telekomunikasi Indonesia, para pesaing lain dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari kami mulai memasuki sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan kami dalam menyediakan

layanan telekomunikasi. Pada bulan Januari 2007, Pemerintah memberlakukan peraturan interkoneksi yang baru dan sistem kode akses lima angka yang baru untuk jasa VoIP. Lihat "Risiko Berkaitan Dengan Bisnis Layanan Telekomunikasi Tetap Kami-penggunaan VoIP semakin meningkat, dan beberapa pelanggan tertentu menggunakan VoIP dibandingkan layanan SLI, hal ini menyebabkan dampak negatif yang material terhadap bisnis layanan telekomunikasi tetap kami." Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan mengenai interkoneksi oleh Pemerintah, kami menghadapi beberapa ketidakpastian sehubungan dengan tarif interkoneksi, yang merupakan salah satu sumber pendapatan kami. Pendapatan ini diperoleh dari trafik telekomunikasi yang ditransmisikan oleh operator lain dari dan ke jaringan kami. Pemerintah tiap tahunnya akan menentukan formula yang digunakan untuk menghitung tarif interkoneksi yang akan diberlakukan kepada seluruh operator telekomunikasi dalam menentukan biaya interkoneksi. Formula tarif interkoneksi yang ditentukan oleh Pemerintah tiap tahunnya memiliki kecenderungan penurunan biaya interkoneksi. Penurunan biaya interkoneksi tersebut dapat mengurangi pendapatan kami dan juga biaya trafik antar operator. Pengurangan dalam jumlah pendapatan dan biaya interkoneksi akan lebih banyak ditentukan oleh volume trafik antar operator. Di masa mendatang, Pemerintah akan mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan lainnya, seperti perubahan kebijakan tarif yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis atau ijin yang kami miliki saat ini. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil bersaing dengan para operator telekomunikasi dalam negeri maupun asing atau bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kami dapat menjadi subyek pembatasan kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007, atau Peraturan Presiden, menetapkan jenis industri dan bidang usaha dalam mana investasi asing dilarang, dibatasi atau harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur oleh institusi Pemerintah yang terkait atau Daftar Negatif Investasi. Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi, dan oleh karena itu investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia terpengaruh oleh pembatasan dan ketentuan yang berlaku. Daftar Negatif Investasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pasar Modal, atau BKPM. Pembatasan yang berlaku bagi industri telekomunikasi bergantung pada jenis usaha telekomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pembatasan yang berbeda berlaku tergantung pada apakah usaha tersebut terkait dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Batasan terhadap kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi berkisar dari 49,0% sampai dengan 65,0%, dan batasan pada kepemilikan saham oleh asing pada perusahaan Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa multimedia (termasuk komunikasi data seperti jasa *wireless broadband*), berkisar dari 49,0% sampai dengan 95,0%. Berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Presiden, pembatasan yang diatur dalam Peraturan tersebut tidak berlaku bagi investasi yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Presiden; dengan ketentuan bahwa investasi tersebut ditetapkan oleh suatu surat persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh BKPM. Dengan demikian, pembatasan yang diatur dalam Peraturan Presiden tidak berlaku pada persetujuan investasi yang telah kami peroleh sebelum berlakunya Peraturan Presiden. Selanjutnya, sebagai perseroan terbuka, kami percaya bahwa, meskipun persentase kepemilikan saham oleh asing dalam Perusahaan melampaui 65,0%, pembatasan dalam Daftar Negatif Investasi tidak berlaku bagi kami. Apabila pihak regulator yang berwenang hendak memberlakukan Daftar Negatif Investasi terhadap Perusahaan, terlepas dari status Perusahaan sebagai perseroan terbuka, pemegang saham pengendali atau pemegang saham asing lain kami dapat diminta untuk mengurangi kepemilikan sahamnya pada Perusahaan, hal mana dapat mempengaruhi penurunan harga perdagangan saham Perusahaan dan dapat memiliki pengaruh negatif yang material terhadap usaha, kondisi keuangan dan prospek kami. Kami juga dapat diharuskan untuk memisahkan bidang usaha kami menjadi dua bagian, bergerak atau

selular dan jaringan tetap atau jaringan tertutup tetap, agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemisahan bidang usaha kami ke dalam dua sektor dapat dilakukan melalui pengalihan jaringan tetap kami atau jasa selular kami kepada anak Perusahaan atau pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami secara material dan dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan usaha kami. Sebagai tambahan, apabila pihak regulator yang berwenang menetapkan bahwa kepemilikan asing di Perusahaan masih melebihi batasan yang ditetapkan dalam Daftar Negatif Investasi, regulator yang berwenang mungkin melarang kami untuk mengikuti tender atau untuk memperoleh izin lain atau spektrum tambahan. Apabila hal ini terjadi, usaha, peluang, kondisi keuangan dan hasil usaha kami menjadi terpengaruh.

Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, gateway menuju jaringan kami atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Untuk menyediakan layanan kami, Perusahaan sangat bergantung pada lancarnya pengoperasian jaringan. Misalnya, Perusahaan bergantung pada akses ke PSTN untuk terminasi dan sumber panggilan selular ke dan dari telepon dengan jaringan tetap, dan sebagian besar dari trafik sambungan selular dan sambungan jarak jauh internasional Perusahaan disalurkan melalui PSTN. Terbatasnya fasilitas interkoneksi PSTN yang tersedia untuk Perusahaan telah memberikan dampak negatif bagi bisnis kami pada masa lalu dan dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami di masa mendatang.

Oleh karena hambatan kapasitas interkoneksi, para pelanggan selular kami sesekali mengalami kesulitan dalam melakukan panggilan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa fasilitas interkoneksi ini akan ditingkatkan atau dipertahankan pada level saat ini.

Perusahaan juga bergantung pada beberapa sistem informasi manajemen atau sistem lainnya yang canggih dalam hal teknologi, seperti sistem tagihan pelanggan yang membuat kami dapat menjalankan bisnis. Selain itu, kami cukup bergantung pada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lainnya yang menghubungkan sambungan telepon para pelanggan kami ke para pelanggan operator telepon jaringan tetap dan para operator selular lainnya baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jaringan kami, yang meliputi sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur, dan jaringan para operator lainnya dengan mana para pelanggan kami berinterkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan dan gangguan operasi akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, putusnya aliran listrik, tidak berfungsinya perangkat, cacat pada *software* jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa-peristiwa yang serupa. Misalnya, pusat pengendali telekomunikasi dan fasilitas back-up teknologi informasi kami sangat berkonsentrasi di kantor pusat dan *principal operating and tape back-up storage facilities* di dua tempat di Jakarta. Setiap kegagalan yang mengakibatkan gangguan pada operasional kami atau penyediaan salah satu layanan, baik akibat gangguan operasional, bencana alam atau lainnya, dapat menghambat kami dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, yang mana hal ini dapat menyebabkan para pelanggan menjadi sangat tidak puas dan memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Sebagai operator telekomunikasi SLI yang dominan, DPI kami harus mendapat persetujuan dari Pemerintah dan dapat disesuaikan sehingga mengakibatkan hal yang yang tidak menguntungkan bagi kami, dan dapat berdampak negatif bagi Perusahaan

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada bulan Februari 2006, Pemerintah telah menetapkan skema biaya interkoneksi dengan membuat pedoman rumusan tarif bagi para operator telekomunikasi. Berdasarkan skema

tarif ini, operator telekomunikasi SLI, seperti kami, yang menguasai lebih dari 25,0% pangsa pasar digolongkan sebagai "operator dominan", dan diwajibkan untuk mengajukan DPI untuk disetujui oleh Pemerintah. DPI tersebut harus mengungkapkan jenis jasa interkoneksi yang ditawarkan oleh operator telekomunikasi dan tarif yang dibebankan kepada tiap-tiap jasa tersebut. Pemerintah dapat menilai dan mengkaji secara berkala DPI yang diajukan oleh para operator dominan untuk mendapat persetujuan Pemerintah. Di lain pihak, para operator telekomunikasi yang tidak dianggap dominan cukup hanya memberitahukan tarifnya kepada Pemerintah dan dapat memberlakukan tarif tersebut kepada para pelanggannya tanpa perlu mendapat persetujuan dari Pemerintah. Skema tarif interkoneksi baru tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2007. Perbedaan perlakuan antara para operator telekomunikasi yang dominan dan non-dominan ini dapat membuka peluang bagi para pemain baru di industri telekomunikasi, memperbesar keleluasaan bagi mereka dalam menetapkan tarif yang rendah dan menawarkan ketentuan tarif yang rendah kepada para pelanggannya, yang mana hal-hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Industri telekomunikasi terbentuk dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Kami dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari segi teknologi yang saat ini sedang dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan di kemudian hari. Perkembangan atau penerapan teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa mendatang memerlukan perubahan besar terhadap model bisnis Perusahaan, pengembangan produk baru, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, perkembangan teknologi konvergensi telepon tetap-selular yang dapat membuat sambungan telepon yang berasal dari selular tidak melalui jaringan selular, tetapi sebaliknya melalui jaringan telepon tetap, dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis Perusahaan. Pengembangan produk dan layanan baru membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat mengakibatkan lahirnya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perubahan teknologi yang baru muncul dan yang akan ada di kemudian hari dapat mempengaruhi operasional atau daya saing layanan kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa teknologi kami tidak akan menjadi usang, atau tidak akan mendapat persaingan dengan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa kami akan dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, agar dapat bersaing di situasi yang telah berubah.

Kami mungkin tidak dapat memperoleh pendanaan yang memadai agar dapat tetap bersaing di sektor industri telekomunikasi Indonesia

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan bidang usaha padat modal. Agar dapat bersaing, kami harus terus melakukan perluasan, modernisasi dan pembaharuan teknologi kami, yang memerlukan investasi modal dalam jumlah yang besar. Selama tahun 2007 dan 2008, total pengeluaran modal konsolidasi Perusahaan masing-masing adalah Rp9726,4 milyar dan Rp12.341,9 milyar. Untuk tahun 2009, rencana pengeluaran modal Perusahaan adalah kurang lebih US$600 juta yang akan digunakan untuk pengembangan aset tetap pada selular, data tetap dan data telekomunikasi tetap. Kemampuan kami untuk membiayai pengeluaran modal di masa mendatang akan bergantung pada kinerja operasi kami di masa mendatang, yang mana bergantung pada keadaan ekonomi, tingkat suku bunga dan faktor keuangan, bisnis dan faktor-faktor lainnya, dimana banyak di antaranya berada di luar kekuasaan kami, dan pada kemampuan kami untuk memperoleh tambahan pendanaan eksternal. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa tambahan pendanaan akan tersedia bagi kami dengan persyaratan-persyaratan yang secara komersial dapat diterima, ataupun tidak ada sama sekali. Selain itu, kami hanya akan dapat memperoleh tambahan pendanaan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian

hutang kami. Dengan demikian, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami akan mempunyai sumber dana yang mencukupi untuk meningkatkan atau memperluas infrastruktur selular atau memperbaharui teknologi kami yang lain yang diperlukan agar dapat tetap bersaing di pasar telekomunikasi Indonesia, yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dari para pesaing utama kami, yaitu Telkom dan Telkomsel. Pemerintah dapat memberikan prioritas pada bisnis Telkom dan Telkomsel daripada Perusahaan

Per tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah memiliki saham sebanyak 14,29% di Perusahaan, termasuk satu saham Seri A, yang memiliki hak suara istimewa dan hak veto atas beberapa hal strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk keputusan untuk melikuidasi Perusahaan dan memperbolehkan Pemerintah untuk menominasikan satu Direktur dan satu Komisaris.

Per tanggal 31 Desember 2008, Pemerintah juga memiliki saham sebanyak 51,2% di Telkom, yang merupakan pesaing utama kami di sektor jasa telepon tetap SLI. Per tanggal yang sama, Telkom memiliki saham sebanyak 65,0% di Telkomsel, salah satu pesaing utama kami dalam penyelenggaraan jasa selular. Persentase kepemilikan saham Pemerintah di Telkom jauh lebih besar dibandingkan di Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan dan rencana Pemerintah akan banyak mendukung bisnis Perusahaan atau bahwa Pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada Telkom dan Perusahaan ketika memberlakukan keputusan-keputusan di kemudian hari, atau ketika menggunakan wewenang regulasinya terhadap industri telekomunikasi Indonesia.

Kepentingan para pemegang saham pengendali kami dapat berbeda dengan kepentingan para pemegang saham lainnya

Per tanggal 31 Maret 2008, ICLM, suatu perusahaan Mauritius dan ICLS memiliki sekitas 65% saham yang telah ditempatkan dan disetor kami, ICLM dan ICLS saat ini seluruhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Qtel, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Qatar dan pihak terkaitnya. ICLM dan pemegang saham pengendalinya dapat menggunakan kendalinya atas bisnis Perusahaan dan dapat membuat kami mengambil tindakan yang tidak berhubungan dengan, atau dapat berbenturan dengan, kepentingan terbaik kami ataupun para pemegang saham Perusahaan lainnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan kebijakan kami. Meskipun orang-orang yang ditunjuk oleh ICLM memegang jabatan baik di dalam Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pemegang saham pengendali kami akan memilih untuk atau dapat mempengaruhi usaha kami dengan cara yang menguntungkan para pemegang saham lainnya.

Kami mengandalkan personil manajemen inti, dan bisnis kami dapat terkena dampak negatif apabila tidak mampu mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti

Kami yakin bahwa tim manajemen kami saat ini telah memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian yang besar dalam mengelola bisnis Perusahaan. Keberhasilan bisnis kami dan kemampuan kami dalam melaksanakan strategi-strategi bisnis kami di masa mendatang sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh personil inti kami. Personil yang terampil di sektor industri telekomunikasi di Indonesia tidak banyak jumlahnya

dan kelangkaan ini mungkin akan terus terjadi. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan personil ahli tertentu menjadi semakin tinggi. Selain itu, seiring dengan masuknya para pemain baru di pasar yang mulai menjalankan atau memperluas bisnisnya di Indonesia, beberapa karyawan inti kami dapat meninggalkan jabatannya saat ini. Ketidakmampuan kami dalam mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti dapat memberikan dampak negatif yang material bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa kami terbukti bersalah melakukan penetapan harga, kami dapat dikenakan sanksi yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pendapatan kami dan berdampak pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami

Pada tanggal 1 November 2007, KPPU telah mengeluarkan keputusan mengenai pemeriksaan awal terhadap kami dan delapan perusahaan telekomunikasi lainnya dengan tuduhan penetapan harga SMS dan pelanggaran Pasal 5 dari Undang-Undang Anti Monopoli (Undang-Undang No. 5/1999). Pada 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa hanya Telkom, Telkomsel, Excelcomindo, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom secara bersama-sama telah melanggar Pasal 5 dari UU No. 5/1999. Telkomsel dan Excelcomindo selanjutnya telah mengajukan banding atas putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memanggil kami untuk menghadap sebagai turut terlapor dalam perkara ini. Sebagai tambahan, selama tahun 2007 dan 2008 beberapa gugatan *class action* telah ditujukan kepada Perusahaan, Telkomsel dan Excelcomindo di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, berkaitan dengan kepemilikan silang Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh telah mengakibatkan pengaturan harga telekomunikasi yang tinggi sehingga merugikan masyarakat.

Apabila keputusan KPPU menyatakan bahwa penetapan harga ini merugikan konsumen, keputusan tersebut dapat juga menyebabkan timbulnya gugatan *class action* lebih lanjut terhadap kami. Faktor-faktor tersebut di atas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Risiko yang terkait dengan Bisnis Jasa Selular Perusahaan

Kami mungkin tidak dapat melaksanakan perluasan jaringan selular secara tepat waktu, atau tidak sama sekali atau sebagaimana direncanakan, dan keterlambatan atau kegagalan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Saat ini kami berencana melakukan pengeluaran modal sekitar US$600,0 juta di tahun 2009 dimana sekitar 75% dari jumlah tersebut akan dialokasikan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan jaringan selular, termasuk perluasan wilayah cakupan dan perluasan kapasitas. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa target perluasan jaringan kami akan tercapai karena mungkin saja terdapat kegagalan pada sumber daya internal kami atau pada pihak luar yang kami tunjuk.
Kegagalan mencapai target perluasan jaringan kami dapat mempengaruhi dan membatasi kapasitas dan kualitas jaringan, yang mana dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan. Selain itu, kami mungkin akan menemui banyak kesulitan dalam bersaing dengan para pesaing kami dalam menyediakan cakupan jaringan dan layanan kepada para pelanggan kami.

Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa selular Perusahaan

Persaingan di industri jasa selular terutama didasarkan pada faktor-faktor seperti harga, kualitas dan cakupan jaringan, ragam layanan dan fitur yang ditawarkan serta pelayanan pelanggan. Bisnis jasa selular kami bersaing terutama dengan Telkomsel dan Excelcomindo. Beberapa penyelenggara jasa selular lainnya juga menyediakan jasa selular di Indonesia. Selain para penyelenggara jasa selular yang ada, Menteri Komunikasi dan Informatika dapat kembali memberikan ijin penyelenggaraan jasa selular di kemudian hari, dan pemain baru tersebut akan bersaing dengan kami. Sebagai contoh, PT Hutchison Charoen Pokphand Telekomunikasi dan PT Natrindo Selular meluncurkan layanan selular mereka di triwulan pertama tahun 2007 dan Smart Telecom meluncurkan jasa selularnya pada pertengahan tahun 2007. Pada tahun 2008, persaingan antara para pelaku industri yang ada saat ini dan pemain baru di pasar jasa selular menimbulkan promosi harga yang agresif antara para penyedia jasa selular selama triwulan pertama tahun 2008. Promosi harga yang agresif ini menimbulkan penurunan pada ARPU bagi seluruh industri, dari yang sebelumnya sebesar US$0,08 sampai dengan US$0,10 menjadi hanya US$0,02 per menit bagi seluruh industri. Penurunan harga untuk pemakaian selular juga menimbulkan peningkatan jumlah pelanggan dan meningkatkan trafik jaringan sehingga menimbulkan kemacetan jaringan antar operator, yang akan mengharuskan kami untuk melakukan penambahan belanja modal untuk meningkatkan perluasan kapasitas jaringan. Selain itu, kami bersama dengan para pesaing kami saat ini juga dapat menghadapi persaingan dengan para penyelenggara baru yang menggunakan teknologi baru dan konvergensi berbagai jasa telekomunikasi. Para penyelenggara jasa selular yang baru maupun yang lama juga menaikkan biaya yang signifikan untuk memperoleh pelanggan, dengan adanya penawaran paket-paket produk dan layanan yang lebih menarik, yang mana hal ini mengakibatkan semakin tingginya *churn rates*, rendahnya ARPU atau berkurangnya atau lambatnya pertumbuhan basis pelanggan selular Perusahaan.

Selain itu, meskipun Pemerintah telah mengalokasikan semua spektrum GSM 900 dan 1800 yang ada, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa spektrum lainnya tidak akan tersedia di kemudian hari atau Pemerintah tidak akan melakukan realokasi spektrum yang ada dari para penyelenggara jasa selular yang lama, termasuk Perusahaan. Apabila kami tidak menggunakan kapasitas spektrum kami secara efisien, atau apabila kami tidak dapat membiayai pengeluaran modal yang besar untuk memanfaatkan kapasitas spektrum kami secara baik, sebagaimana dan ketika diperlukan, maka kami akan mengalami kesulitan menarik dan mempertahankan pelanggan selular, yang mana hal ini akan memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa selular kami. Apabila para pesaing kami yang ada saat ini atau di kemudian hari di sektor jasa selular GSM memperoleh kapasitas spektrum tambahan, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi posisi persaingan, bisnis jasa selular, hasil usaha dan prospek kami.

Pada awal tahun 2006, Pemerintah mengumumkan kepada semua operator telekomunikasi tentang tender atas tiga blok 5 MHz spektrum 3G. Kami memperoleh satu ijin spektrum 3G untuk 5 MHz berpasangan dengan biaya sebesar Rp320,0 milyar yang harus dibayar di muka. Berdasarkan ijin ini, kami diwajibkan untuk mulai menyediakan layanan 3G sekurang-kurangnya di dua wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya (Jawa Timur) serta wilayah sekitarnya, dan untuk menyediakan jasa layanan yang mencakup 10,0% dari total penduduk dalam setiap wilayah tersebut pada tahun 2006, 20,0% pada tahun 2007 dan 30,0% pada tahun 2009. Ijin ini juga mengharuskan kami untuk menyediakan layanan 3G di daerah-daerah lainnya secara bertahap dalam waktu 5 tahun mendatang. Pesaing utama kami, Telkomsel dan Excelcomindo, juga diberikan ijin penyelenggaraan layanan 3G. Oleh karenanya, saat ini ada lima operator telekomunikasi di Indonesia yang menyelenggarakan layanan 3G dan kemungkinan ijin-ijin baru akan diberikan untuk alokasi spektrum 3G lainnya. Berdasarkan ketentuan ijin tersebut, kami disyaratkan untuk memenuhi perluasan jaringan 3G untuk menyediakan cakupan

jaringan terhadap 20,0% populasi dari Jakarta dan Surabaya dan 10,0% populasi dari Jawa Barat, Yogyakarta dan Sumatera Utara pada akhir tahun 2007. Berdasarkan perkiraan kami per 31 Maret 2009, kami telah memiliki 100% cakupan populasi di Jakarta namun belum memenuhi kewajiban memberikan cakupan populasi untuk wilayah lainnya. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat terus memperluas jaringan 3G kami sebagaimana yang direncanakan, atau dapat berhasil memenuhi tingkat cakupan penduduk yang diharuskan oleh Pemerintah. Kemudian, dikarenakan Pemerintah tidak mengeluarkan petunjuk dalam hal menghitung persentase dari cakupan populasi, hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah kami telah memenuhi persyaratan ini berdasarkan ketentuan ijin kami. Apabila kami tidak melanjutkan perluasan jaringan 3G kami pada tahun 2010, akan mengakibatkan peningkatan nilai *performance bond* kami untuk ijin tersebut, atau kami dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah akibat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ijin yang diberikan dan hal ini dapat memberikan dampak yang negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kami menghadapi persaingan dari para pesaing di sektor jasa telepon tetap nirkabel yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis telekomunikasi selular dan tetap kami

Pada bulan Desember 2002, Telkom meluncurkan produk TelkomFlexi di Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali) dan Balikpapan (Kalimantan Timur) dengan menggunakan teknologi telepon tetap nirkabel CDMA2000 1x. Pada bulan Mei 2003, Telkom memperluas cakupan TelkomFlexi ke wilayah Jakarta, dan Bakrie Telecom juga meluncurkan layanan yang serupa untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat sejak tahun 2004. Telkom sejak saat itu telah memperluas layanan TelkomFlexi ke lebih dari 250 kota di seluruh Indonesia. Telkom memberlakukan tarif telepon PSTN untuk jasa akses telepon tetap nirkabelnya, dimana tarifnya lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang berlaku untuk jasa selular, dan membayar biaya wajib berdasarkan peraturan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang dikenakan pada para penyelenggara jasa selular. Jasa akses telepon tetap nirkabel yang menggunakan teknologi CDMA2000 1x mempunyai fungsi mobilitas dan fitur yang serupa dengan yang ditawarkan oleh para penyelenggara selular di dalam satu kode area yang sama. Kualitas jasa akses telepon tetap nirkabel bahkan melebihi kualitas jasa selular GSM karena pemanfaatan spektrum yang lebih efisien. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika tidak akan mengambil langkah tegas untuk mendorong *network build-out* dari akses jaringan telepon tetap nirkabel.

Diluncurkan dan tersedianya jasa akses telepon tetap nirkabel dan teknologi serupa lainnya telah memperketat persaingan dalam hal paket harga dan produk dan layanan yang ditawarkan di antara para penyelenggara jasa selular. Layanan akses telepon tetap nirkabel, khususnya layanan-layanan yang ditawarkan tanpa ada banyak batasan aturan mengenai mobilitas dan sistem untuk menyeimbangkan biaya dan tarif yang diatur perundang-undangan, dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan, yang mana dapat berakibat, antara lain, meningkatnya *churn rates*, menurunnya ARPU, melambatnya pertumbuhan jumlah pelanggan selular dan meningkatnya biaya perolehan pelanggan. Sejak kami meluncurkan layanan telepon tetap nirkabel StarOne di bulan Mei 2004, kami telah memperluas layanan ini ke 52 kota dan berencana untuk kembali memperluas ke beberapa kota lainnya. Akan tetapi, persaingan dengan Telkom, Bakrie Telecom, dan para penyelenggara jasa akses telepon tetap nirkabel lainnya yang bersaing secara langsung dengan kami, dapat menyebabkan menurunnya tarif untuk layanan tersebut sehingga menghalangi upaya kami dalam meningkatkan jumlah pelanggan akses telepon tetap nirkabel dan memperluas bisnis jasa akses telepon tetap nirkabel Perusahaan. Ijin-ijin baru untuk penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel berskala nasional yang diberikan kepada Bakrie Telecom dan Mobile-8 juga telah menimbulkan promosi jasa akses telepon tetap nirkabel yang lebih agresif di daerah cakupan mereka yang lama maupun yang baru. Selanjutnya, selama tahun 2008, telah terjadi kampanye harga yang agresif pada industri selular dan jasa akses telepon tetap nirkabel dan perbedaan harga antara selular dan jasa akses telepon tetap nirkabel makin menyempit, yang

menimbulkan dampak pada persaingan dan pertumbuhan industri jasa akses telepon tetap nirkabel kami. Para analis industri juga telah menyatakan kekhawatirannya terhadap konsolidasi antara para operator jasa telepon tetap nirkabel saat ini untuk mempertahankan persaingan. Apabila konsolidasi tersebut terjadi atau apabila para pesaing seperti Telkomsel dan Exelcomindo diberikan ijin untuk menyelenggarakan jasa akses telepon tetap nirkabel oleh Pemerintah, maka persaingan ini akan terus meningkat dan hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Banyaknya jaringan selular dan terbatasnya ketersediaan spektrum dapat menghambat peningkatan jumlah pelanggan selular kami dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan selular Perusahaan kami

Cepatnya pertumbuhan basis pelanggan kami bersama dengan meningkatnya permintaan telah mengakibatkan tingkat penggunaan selular yang tinggi, terutama di daerah kota yang padat penduduknya. Ketersediaan spektrum yang dapat digunakan oleh jaringan selular terbatas kapasitasnya. Oleh karena itu, teknik rekayasa frekuensi radio, yang meliputi rancangan selular makro, mikro dan *indoor*, diperlukan untuk meningkatkan "*erlang per square kilometer*" dan untuk mempertahankan kualitas jaringan selular terlepas dari adanya gangguan frekuensi radio dan makin ketatnya pola penggunaan kembali frekuensi radio. Teknik frekuensi radio tersebut dapat digunakan di daerah yang padat penduduknya seperti Hong Kong, dan digunakan apabila batas *erlang per square kilometer* telah mendekati profil penggunaan tersebut. Namun demikian, apabila basis pengguna selular kami harus meningkat secara tajam di dalam daerah yang padat penduduknya, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa upaya ini memadai untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan, dan kami perlu melakukan pengeluaran modal yang besar jumlahnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan selular berdasarkan alokasi spektrum yang kami miliki saat ini.

Rencana pertumbuhan Perusahaan telah mengantisipasi dilakukannya perluasan jaringan selular dalam skala besar seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan selular kami. Secara khusus, pada tahun 2007, kami telah mendistribusikan jaringan spektrum 3G/HSDPA 5 Mhz kami. Permintaan yang tinggi untuk akses *wireless broadband* dan tersedianya peralatan 3G yang makin bertambah telah meningkatkan hambatan pada jaringan dan dapat mengakibatkan penurunan pada kualitas pelayanan kami. Dikarenakan terbatasnya kapasitas alokasi spektrum 3G/HSDPA kami, kami memerlukan block spektrum 5MHz/HSDPA yang baru untuk melayani permintaan saat ini dan mempertahankan tingkat pelayanan yang diinginkan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat memperoleh spektrum tersebut pada saatnya atau dengan harga yang wajar. Apabila kami tidak dapat memperoleh spektrum tersebut atau tidak dapat membiayai belanja modal untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jaringan 3G/HSDPA kami, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek kami. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa rencana perluasan tersebut dapat diwujudkan, atau kalaupun diwujudkan, kami berhasil mengintegrasi tambahan pelanggan selular. Apabila kami tidak dapat mengaktifkan pelanggan selular yang baru secara tepat waktu dan mengukur unit operasional yang ada agar dapat menangani peningkatan trafik selular, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Migrasi frekuensi CDMA dari frekuensi 1900 MHz ke 800 MHz di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan optimalisasi frekuensi 800 MHz di wilayah lainnya dapat menyebabkan penurunan kualitas jasa selular dan kemungkinan gangguan pada jaringan

Pada tanggal 12 Desember 2006, Pemerintah memberikan kepada kami ijin untuk menyediakan dua kanal penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel berskala nasional di frekuensi 800 MHz. Ijin ini menggantikan

ijin kami yang lama untuk penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel pada frekuensi 1900 MHz. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 181/2006 tentang alokasi frekuensi 800 MHz untuk jasa akses telepon tetap nirkabel lokal mewajibkan kami untuk bermigrasi dari frekuensi 1900 MHz ke frekuensi 800 MHz yang baru, selambat-lambatnya akhir tahun 2007 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Akibat adanya perubahan-perubahan pada layanan kami yang mana diperlukan untuk melaksanakan migrasi frekuensi, kami mengalami ketidakstabilan dalam hal kualitas layanan selular di jaringan selular GSM dan kemungkinan gangguan pada jaringan selular kami, dan masalah layanan ini sulit di atasi karena frekuensi 800 MHz yang baru terletak di dekat alokasi frekuensi GSM kami pada spektrum frekuensi yang tersedia. Kami telah menyelesaikan proses migrasi untuk CDMA pada akhir tahun 2007 dan untuk GSM selambat-lambatnya pada bulan Maret 2008. Akan tetapi, kami harus memasang beberapa filter tambahan untuk mengurangi gangguan antara jaringan GSM dan CDMA kami. Tanpa filter-filter tersebut, kinerja jaringan GSM dapat sangat menurun akibat gangguan dari jaringan CDMA. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa tidak akan ada cakupan jaringan yang tidak konsisten dan gangguan jaringan selular setelah diselesaikannya migrasi jasa akses telepon tetap nirkabel kami. Kualitas jasa selular yang tidak konsisten sebagai akibat dari atau setelah diselesaikannya migrasi jasa telepon tetap kami. Kegagalan untuk melakukan migrasi atas jasa tersebut dalam waktu yang telah ditentukan atau penurunan kualitas jasa akses telepon tetap atau selular dan kemungkinan adanya gangguan atas jaringan selular sebagai akibat dari migrasi tersebut dapat memberikan dampak terhadap kemampuan kami untuk mengembangkan jasa StarOne ke kota-kota lainnya dan dapat memberikan dampak negatif yang material bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kami bergantung pada menara telekomunikasi kami dan pelaksanaan penggunaan menara telekomunikasi bersama dengan para operator telekomunikasi lainnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kapasitas jaringan dan kualitas panggilan kami

Kami sangat tergantung pada menara telekomunikasi kami untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi seperti selular GSM, FWA dan 3G dan jasa telekomunikasi bergerak selular dengan memasang pemancar dan antena penerima dan fasilitas pendukung BTS lainnya pada menara kami. Ketersediaan dan pemasangan menara telekomunikasi tersebut memerlukan izin dari instansi berwenang di pusat dan daerah. Baru-baru ini, beberapa instansi berwenang di daerah telah memberlakukan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mensyaratkan kewajiban berbagi menara di antara berbagai operator telekomunikasi. Selain itu, pada tanggal 17 Maret 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 mengenai Tata Cara Pendirian dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama atau Peraturan Mengenai Menara. Berdasarkan peraturan ini, pendirian menara telekomunikasi memerlukan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah berhak menentukan wilayah penempatan menara telekomunikasi tersebut. Suatu peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala BKPM pada 30 Maret 2009, juga mewajibkan tiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi harus memperoleh ijin mendirikan bangunan untuk menunjukkan kepatuhan pada beberapa spesifikasi teknis. Apabila suatu menara tidak memperoleh ijin tersebut, maka pihak berwenang di daerah berhak untuk menentukan denda yang diberikan kepada pemilik menara. Selanjutnya, suatu penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi wajib memperbolehkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menaranya, tanpa diskriminasi apapun. Peraturan baru ini mewajibkan seluruh operator telekomunikasi atau penyedia menara yang telah mendirikan menara telekomunikasi sebelum adanya keputusan ini untuk mematuhi ketentuan peraturan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun sejak tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan tersebut dapat mewajibkan kami untuk menyesuaikan rencana pembangunan menara telekomunikasi kami, melakukan relokasi menara telekomunikasi yang sudah

ada dan memperbolehkan operator lainnya untuk menggunakan menara kami dan melakukan hal-hal lain yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya pendirian menara telekomunikasi, keterlambatan dalam konstruksi menara dan gangguan terhadap layanan serta menurunnya kualitas panggilan untuk pelanggan kami. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban ini atau memenuhi target kapasitas jaringan untuk menara telekomunikasi kami, kami mungkin dapat memperoleh hambatan dalam mengembangkan dan menyediakan jasa GSM selular, FWA dan 3G. Ketergantungan kami terhadap menara telekomunikasi, digabungkan dengan risiko dan beban penggunaan menara telekomunikasi bersama, dapat juga menyebabkan dampak negatif terhadap daya saing kami kepada operator lain. Penyelenggara telekomunikasi baru, sebagai contoh, dapat memiliki akses kepada jaringan yang lebih banyak tanpa harus mengeluarkan modal untuk membangun menara telekomunikasi, sehingga menyebabkan tingkat kompetisi yang lebih tinggi bagi kami dan penurunan pendapatan. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kapasitas jaringan kami, kinerja dan kualitas jaringan serta jasa dan reputasi kami.

Peraturan Mengenai Menara juga memerintahkan bahwa kontraktor menara, penyedia dan pemilik masing-masing harus dimiliki oleh 100% perusahaan lokal. Di masa lalu kami pernah melakukan kontrak untuk konstruksi menara dan penyewaan menara dengan perusahaan asing. Apabila kami tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan kontrak dengan kontraktor menara, penyedia dan pemilik lokal, kami harus bernegosiasi untuk kontrak baru dan mengeluarkan biaya tambahan.

Terlepas dari dikeluarkannya dana yang besar untuk meningkatkan basis pelanggan selular kami, jumlah pelanggan selular kami meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan usaha Perusahaan

Ketika kami mengeluarkan dana yang besar untuk mengembangkan dan memperluas jaringan selular, kami yakin bahwa kami akan terus menambah jumlah pelanggan selular. Akan tetapi, keadaan ekonomi Indonesia yang tidak menentu dan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan pokok dapat menurunkan kemampuan membeli dari para pelanggan selular kami. Selanjutnya, terus menurunnya tarif efektif untuk penggunaan telepon sebagai dampak kampanye "free-talk" dan promosi-promosi baru-baru ini, meningkatnya penggunaan SMS dan meningkatnya laju penetrasi selular pada segmen penduduk berpenghasilan rendah di pasar menyebabkan menurunnya ARPU dan meningkatnya jumlah pelanggan selular kami yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan usaha Perusahaan. Jumlah pelanggan selular kami telah meningkat dari sekitar 16,7 juta per 31 Desember 2006 menjadi sekitar 24,5 juta per 31 Desember 2007 dan menjadi sekitar 36,5 juta per 31 Desember 2008. Namun demikian, selama periode yang sama, ARPU gabungan kami, yang merupakan gabungan dari ARPU pasca bayar dan pra-bayar kami, telah mengalami penurunan dari sekitar Rp60.023 per 31 Desember 2006 menjadi sekitar Rp52.821 per 31 Desember 2007 dan menjadi sekitar Rp38.639 per 31 Desember 2008. Kami bermaksud untuk terus menggunakan sumber pembiayaan yang signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan kami dan memperluas basis pelanggan selular, kami tidak dapat menjamin bahwa pengeluaran tersebut akan diikuti dengan peningkatan ARPU atau pendapatan usaha Perusahaan. Biaya akuisisi pelanggan dan belanja modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas jaringan kami dapat mengalami peningkatan tanpa mengakibatkan terjadinya peningkatan pada penghasilan usaha atau keuntungan Perusahaan, hal tersebut dapat menimbukan dampak negatif dan material terhadap usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha kami.

Kemampuan kami untuk memelihara dan memperluas jaringan selular atau menjalankan usaha kami dapat dipengaruhi oleh gangguan pemasokan dan layanan dari para pemasok utama kami

Perusahaan bergantung pada beberapa pemasok utama untuk menyediakan sebagian besar perangkat yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperluas jaringan selular, termasuk *microwave backbone*, dan pada beberapa pemasok lainnya berkenaan dengan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha kami. Perusahaan mengandalkan perangkat dan barang dan jasa lainnya dari para pemasok tersebut untuk memelihara dan mengganti komponen utama dari jaringan selular dan untuk menjalankan usaha kami. Apabila kami tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mencukupi secara tepat waktu atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, atau apabila terjadi kenaikan harga yang tajam atas barang atau jasa tersebut, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kami untuk dapat memelihara dan memperluas jaringan selular dan hasil usaha serta prospek Perusahaan.

Kami bergantung pada ijin-ijin yang kami miliki untuk menyelenggarakan jasa selular, dan ijin-ijin ini dapat dibatalkan apabila kami tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin tersebut

Kami bergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk penyelenggaraan jasa selular serta penggunaan alokasi spektrum frekuensi. Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengubah ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atas kebijakannya sendiri. Apabila kami melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin-ijin tersebut atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka ijin-ijin kami dapat dicabut. Apabila terjadi pencabutan atau perubahan yang tidak menguntungkan terhadap ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atau kami tidak dapat memperbaharui ijin-ijin tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang serupa, maka hal ini dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha kami

Saat ini kami diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi berdasarkan jumlah unit *transmitter* dan *receiver* pada suatu BTS di jaringan telekomunikasi GSM kami. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM kami dibayarkan secara periodik di muka berdasarkan tagihan yang diterima dari Pemerintah. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi 3G kami dibayarkan per tahun di muka secara *lump sum*, berdasarkan formula yang ditentukan oleh Pemerintah. Selama kami meningkatkan jumlah BTS kami untuk meningkatkan jumlah pelanggan kami, biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM kami juga meningkat, sehingga meningkatkan biaya operasional kami, yang dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha kami.

Anggapan adanya risiko kesehatan sebagai akibat dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari BTS dan peralatan telepon genggam, serta gugatan hukum dan publikasi mengenai hal tersebut, tanpa memperhatikan nilainya, dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami

Beberapa spekulasi mengenai risiko terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik dari BTS dan penggunaan telepon genggam telah timbul di masyarakat. Kami tidak dapat menjamin bahwa penelitian di masa mendatang mengenai risiko kesehatan ini tidak akan menyimpulkan adanya hubungan antara medan

elektromagnetik dan dampak merugikan terhadap kesehatan sehingga Perusahaan dapat menjadi subyek gugatan dari individu yang menuduh adanya cidera atau hal-hal lainnya, yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha kami.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Layanan Data Tetap ("MIDI")

Persaingan layanan MIDI kami meningkat, dan kami mungkin akan mengalami penurunan marjin dari jasa tersebut seiring dengan meningkatnya persaingan

Layanan MIDI kami menghadapi persaingan yang semakin ketat dari para operator yang telah ada, yang mungkin memiliki basis pelanggan yang lebih banyak dan sumber dana yang lebih besar dari Perusahaan, seperti Telkom yang memiliki jangkauan internasional yang luas dan infrastruktur dalam negeri yang telah berkembang. Selain itu, para operator seperti Excelcomindo, First Media dan Icon+, beberapa di antaranya yang mempunyai aliansi dengan operator telekomunikasi asing, bersaing dengan kami di segmen bisnis ini. Baru-baru ini, layanan jasa World Link kami menghadapi peningkatan persaingan tahun ini dengan diluncurkannya layanan kabel internasional "Matrix" oleh PT NAP Info Lintas Nusa.

Bisnis satelit kami juga menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring dengan diluncurkannya satelit-satelit baru dan berkemampuan lebih besar dan dengan adanya beberapa perusahaan yang memperoleh ijin eksklusif untuk menyelenggarakan jasa penyiaran di Indonesia. Kami menyewakan *transponder* satelit Palapa-C2 kami untuk jangka waktu dua sampai lima tahun, dan kami perkirakan sisa umur produktif satelit tersebut adalah berkisar empat tahun. Mengingat adanya satelit-satelit lain yang beroperasi dan sewa *transponder* kami yang akan berakhir atau diakhiri dan adanya persaingan harga yang semakin ketat, maka pihak penyewa *transponder* kami kemungkinan akan menggunakan satelit-satelit lain, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasional dan pendapatan usaha kami dari sektor jasa ini.

Satelit kami memiliki umur produktif yang terbatas dan dapat rusak atau benar-benar musnah selama pengoperasiannya. Hilangnya atau menurunnya kinerja satelit kami, baik yang disebabkan kerusakan perangkat atau dicabutnya ijin, dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan, hasil usaha dan kemampuan untuk menyediakan beberapa layanan Perusahaan

Satelit Palapa-C2 kami mempunyai umur produktif yang terbatas, yang saat ini diperkirakan berakhir pada bulan Januari 2011. Berapa faktor mempengaruhi umur produktif satelit, di antaranya konstruksi, daya tahan komponen, cadangan minyak *on-board*, kendaraan peluncuran yang digunakan dan cara satelit tersebut dimonitor dan dioperasikan. Saat ini kami menggunakan kapasitas *transponder* satelit kami sehubungan dengan berbagai aspek dari bisnis kami, termasuk sewa langsung untuk kapasitas tersebut dan untuk menyalurkan sambungan jarak jauh internasional dan jasa selular kami. Satelit kami dapat saja tidak berfungsi sebelum bulan Januari 2011 dan kami yakin bahwa perbaikan di orbit tidak memungkinkan. Peraturan International Telecommunications Union menyatakan bahwa slot satelit yang telah ditentukan sudah dialokasikan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak menentukan pihak mana yang akan diberikan ijin untuk menggunakan slot tersebut. Meskipun kami saat ini memiliki ijin untuk menggunakan slot satelit yang telah ditentukan, apabila satelit Palapa-C2 kami mengalami masalah teknis atau tidak berfungsi, Pemerintah dapat menyatakan bahwa kami tidak berhasil memanfaatkan

slot yang ada berdasarkan ijin yang diberikan kepada kami, dan dengan demikian Pemerintah dapat mencabut ijin kami dan memberikannya kepada salah satu pesaing kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami akan dapat terus mempertahankan penggunaan slot satelit yang telah ditentukan dengan cara yang dianggap baik oleh Pemerintah.

Kami memiliki asuransi *in-orbit* apabila terjadi kerusakan total atas satelit Palapa-C2 sebelum tahun 2011, dimana kami berhak atas pembayaran satu kali sebesar US$14,0 juta apabila satelit tersebut hilang atau musnah. Alat kendali satelit Palapa-C2 telah diidentifikasi sebagai benda yang mudah rusak, dan asuransi satelit kami tidak mencakup tidak berfungsinya satelit akibat kerusakan alat kendali satelit tersebut. Apabila kerusakan atau kegagalan tersebut mengakibatkan satelit kami tidak layak lagi untuk digunakan, maka kami mungkin akan memilih untuk menghentikan pengoperasian satelit atau menyewa kapasitas *transponder* dari penyelenggara pihak ketiga daripada membeli satelit baru. Penghentian bisnis satelit kami dapat memberikan dampak yang negatif yang material bagi keseluruhan usaha kami dan dapat meningkatkan biaya operasional yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi lainnya.

Kegagalan kami untuk meluncurkan satelit Palapa-D yang baru dapat memberikan dampak yang negatif bagi keadaan keuangan, hasil usaha dan kemampuan kami untuk menyediakan layanan-layanan tertentu

Pada tanggal 29 Juni 2007, kami menandatangani kontrak pembelian Palapa-D, sebuah satelit baru yang akan menggantikan satelit Palapa-C2. Kami berencana untuk meluncurkan Satelit Palapa-D pada September 2009.

Berdasarkan kontrak pembelian dan sebagai bagian dari prosedur manajemen risiko kami, kami akan membeli komponen-komponen satelit yang memiliki masa tenggang yang lama. Dikarenakan kami melakukan pembelian komponen-komponen satelit yang memiliki masa tenggang yang lama, perusahaan manufaktur satelit setuju untuk menyediakan satelit pengganti yang siap untuk diluncurkan dalam waktu 18 bulan apabila terjadi kegagalan dalam peluncuran satelit Palapa-D, apabila dibandingkan dengan tipe periode persiapan yang biasanya adalah 26 bulan. Sementara kami mempersiapkan peluncuran satelit Palapa-D, kami berupaya untuk memperpanjang umur produktif satelit Palapa-C2 sampai dengan triwulan pertama tahun 2011 dengan menggunakan teknik "inclined orbit". Keterlambatan dalam peluncuran atau pengoperasian satelit Palapa-D akibat terjadinya kegagalan dalam proses pembangunan, pengiriman ke lokasi peluncuran, peluncuran dari atau pengiriman ke dalam orbit/*in-orbit delivery* (IOD) dari satelit, atau faktor-faktor lainnya dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kemampuan kami dalam menyediakan jasa satelit, terutama jika keterlambatan tersebut terjadi pada atau melampaui umur produktif satelit Palapa-C2. Apabila keterlambatan tersebut terjadi, kami akan menderita kenaikan beban usaha yang terkait dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan kehilangan atau kerusakan pada satelit Palapa-D yang baru selama proses pembuatan, pengiriman dan peluncuran yang tidak ditanggung oleh asuransi.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Jasa Telekomunikasi Tetap Kami

Masuknya operator telekomunikasi Indonesia lainnya sebagai penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasi, pangsa pasar dan hasil usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap

Telkom, perusahaan telekomunikasi Indonesia yang telah lama berdiri dengan sumber-sumber keuangan dan politik yang kuat, memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa sambungan jarak jauh internasional pada tanggal 13 Mei 2004 dan meluncurkan layanan komersialnya pada tanggal 7 Juni 2004. Sebagai akibat dari masuknya Telkom ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, kami kehilangan pangsa pasar dan mengalami dampak negatif lainnya yang mempengaruhi usaha jasa telekomunikasi tetap kami. Pada akhir tahun 2006, Telkom telah menguasai pangsa pasar yang jauh lebih besar dari kami untuk sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan ijin baru untuk penyelenggaraan jasa sambungan jarak jauh internasional kepada Bakrie Telekom dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih besar lagi di pasar jasa sambungan jarak jauh internasional. Munculnya operator baru dan pemain lama ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional akan terus menimbulkan ancaman persaingan yang signifikan kepada Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa dampak negatif tersebut tidak akan terus berlanjut atau bahwa meningkatnya persaingan tidak akan terus mengikis pangsa pasar kami atau memberikan dampak negatif bagi marjin operasi dan hasil usaha kami di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional.

Kami menghadapi risiko berkenaan dengan pembukaan kode akses baru untuk sambungan jarak jauh

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ dan akses telekomunikasi lokal, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan telepon SLJJ. Pada tanggal 1 April 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika mengumumkan bahwa penggunaan kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilakukan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan bahwa Departemen Komunikasi dan Informatika akan memberikan kode akses "01016" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "01017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada tanggal 3 Desember 2007, Pemerintah mengundangkan Keputusan Menteri No. 43/1007, yang memperpanjang tanggal pelaksanaan kode akses SLJJ sampai dengan tanggal 3 April 2008. Keputusan Menteri tersebut juga menetapkan jadwal pelaksanaan kode akses jarak jauh "01X". Pada bulan Januari 2007, pemerintah menetapkan peraturan interkoneksi baru dan sistem kode akses lima angka untuk jasa VoIP. Pada bulan April 2008, kode akses tersebut telah diberlakukan di Balikpapan. Sejak tanggal pelaksanaan tersebut, penduduk Balikpapan akan dapat memilih untuk menggunakan kode akses "0", "01016" atau "01017" untuk melakukan panggilan jarak jauh. Pada bulan April 2008, Perusahaan dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari masing-masing pelanggan kami di Balikpapan. Berdasarkan perjanjian ini, pelanggan jaringan tetap Telkom dapat menggunakan kode 01016 untuk mengakses jaringan SLJJ kami dan pelanggan FWA kami dapat menggunakan kode 01017 untuk mengakses jaringan Telkom. Penggunaan kode akses SLJJ tersebut di kota-kota lain akan dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRTI atas pelanggan jasa telepon tetap Indosat dan Telkom dan atas beberapa kriteria seperti (i) Telkom harus membuka kode akses SLJJ "0101X" di wilayah tertentu dalam waktu tertentu apabila Indosat, sebagai operator SLJJ kedua, memiliki FWA dengan mobilitas terbatas yang sama dengan atau lebih dari 30,0% dari FWA Telkom dengan mobilitas terbatas atau (ii) Telkom harus membuka kode akses SLJJ "0101X" di beberapa wilayah tertentu dalam waktu tertentu apabila Indosat, sebagai operator SLJJ kedua, memiliki pelanggan *Fixed Terminal* yang sama dengan atau lebih dari 15,0% dari pelanggan PSTN dan FWA Telkom dengan mobilitas terbatas. Selain daripada hal-hal tersebut di atas, pembukaan kode akses SLJJ baru tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kompetisi dan berkurangnya kerjasama oleh operator saat ini, yang dapat mengakibatkan berkurangnya marjin dan pendapatan

operasional, di satu sisi, yang seluruhnya dapat menimbulkan dampak material yang negatif kepada kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kode akses di Balikpapan akan terus ada atau dapat berhasil meningkatkan pendapatan Perusahaan dari sektor sambungan jarak jauh. Kami juga tidak dapat memberikan kepastian bahwa kode akses yang serupa akan dilaksanakan di kota-kota lain.

Penggunaan VoIP meningkat, dan beberapa pelanggan menggunakan jasa VoIP daripada jasa sambungan jarak jauh internasional yang biasa, yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa telekomunikasi tetap kami

Tren dunia dan Indonesia mengindikasikan adanya peningkatan penggunaan jasa VoIP dan pada saat yang bersamaan terjadi penurunan penggunaan jasa sambungan jarak jauh internasional tradisional. Struktur biaya untuk penyelenggara jasa VoIP lebih rendah dibandingkan dengan para operator tetap tradisional dan dengan demikian, jasa VoIP biasanya ditawarkan dengan tarif yang sangat murah dibandingkan dengan jasa sambungan jarak jauh internasional. Adanya layanan VoIP, terlepas dari kualitasnya yang lebih rendah dibandingkan dengan jasa sambungan jarak jauh internasional, dapat memberikan dampak yang negatif bagi pendapatan usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap akibat rendahnya volume trafik dan diturunkannya tarif untuk jasa sambungan jarak jauh internasional yang diselenggarakan oleh kami.

Penurunan accounting rate yang berlaku dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan usaha kami yang berasal dari tarif interkoneksi yang dikenakan pada operator telekomunikasi asing

Para penyelenggara telekomunikasi mengadakan kesepakatan interkoneksi berdasarkan *accounting rate* yang telah ada sebagaimana dimuat dalam perjanjian-perjanjian antara para penyelenggara tersebut. Perjanjian-perjanjian ini dapat dinegosiasi ulang secara berkala dan, pada tahun-tahun terakhir ini, beberapa operator telekomunikasi asing telah melakukan negosiasi penurunan *accounting rate*. Akibatnya, *accounting rate* internasional telah turun dalam beberapa tahun terakhir ini, dan kami perkirakan bahwa tarif ini akan terus menurun. Penurunan *accounting rate* dengan operator telekomunikasi asing dapat berakibat berkurangnya pendapatan interkoneksi yang berasal dari panggilan masuk internasional.

Pendapatan interkoneksi dari operator telekomunikasi asing mungkin tidak dapat diandalkan, dan kami mungkin tidak dapat memperoleh semua pembayaran yang terhutang sehubungan dengan jasa telekomunikasi tetap kami

Sebagian besar pendapatan usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap terdiri dari jumlah diterima dari operator telekomunikasi asing yang menangani sambungan masuk ke Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa para operator tersebut tidak segera membayar biaya interkoneksi ini kepada kami pada saat jatuh tempo. Selain itu, kondisi ekonomi yang menurun yang dialami oleh operator telekomunikasi asing di negara mereka juga berdampak negatif pada kemampuannya untuk membayar biaya interkoneksi kepada kami secara tepat waktu atau tidak dapat membayar sama sekali.

Situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil di Indonesia dapat berdampak negatif pada tingkat kegiatan bisnis internasional di Indonesia, yang mana hal ini dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi pendapatan usaha kami dari jasa sambungan jarak jauh internasional

Jasa sambungan jarak jauh internasional kami dipengaruhi oleh tingkat kegiatan bisnis internasional dan pariwisata di Indonesia, jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri, *accounting rate* internasional, tarif

sambungan jarak jauh internasional, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan kompensasi kepada perusahaan telekomunikasi dan penyedia jasa. Ketidakstabilan situasi ekonomi dan politik yang terus berlanjut di Indonesia, termasuk peristiwa sebelum pemilihan Presiden di bulan Juli 2009, memberikan dampak negatif bagi investasi asing dan kegiatan bisnis internasional di Indonesia, yang mana mengakibatkan rendahnya permintaan atas jasa sambungan jarak jauh internasional kami. Selain itu, situasi ekonomi global yang berdampak pada kegiatan usaha internasional, seperti krisis keuangan global saat ini, telah menimbulkan dampak negatif terhadap permintaan dan pemakaian jasa sambungan jarak jauh internasional kami, yang berakibat pada penurunan lalu lintas panggilan keluar dan panggilan masuk.

Kami mungkin tidak dapat mempertahankan kedua kode akses internasional kami, dan lepasnya salah satu kode akses tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap dan strategi pemasaran kami untuk jasa telekomunikasi tetap

Pada bulan Agustus 2003, kami menerima konfirmasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa kami dapat terus menyelenggarakan jasa sambungan jarak jauh internasional berdasarkan ijin penyelenggaraan dari anak perusahaan kami, Satelindo, dengan menggunakan kode akses internasional "008" bersama-sama dengan kode akses internasional kami sendiri yaitu "001". Kami telah berupaya untuk memasarkan kedua kode akses internasional ini dengan merek tersendiri dengan target berbagai segmen perusahaan dan konsumen. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pemerintah akan mengijinkan kami untuk terus menggunakan kedua kode akses internasional tersebut. Apabila Pemerintah melarang kami untuk menggunakan kedua kode akses internasional tersebut, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi strategi pemasaran kami untuk jasa sambungan jarak jauh internasional dan pendapatan usaha yang terkait dengan jasa tersebut.

Butir 4: INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Indosat Tbk didirikan pada tanggal 10 November 1967 oleh Pemerintah, sebagai Perusahaan penanaman modal asing untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969 untuk membangun, mentransfer dan mengoperasikan stasiun bumi International Telecommunications Satellite Organization atau Intelsat, di Indonesia untuk mengakses satelit-satelit di wilayah Samudera Hindia milik Intelsat untuk jangka waktu selama 20 tahun. Sebagai konsorsium global dari organisasi komunikasi satelit internasional, Intelsat memiliki dan mengoperasikan beberapa satelit telekomunikasi.

Setelah diadakannya perubahan peraturan di bidang industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 1999 dan 2000, kami mulai menjalankan strategi bisnis yang dirancang untuk mengubah Perusahaan dari penyelenggara jasa telekomunikasi internasional utama menjadi penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi terpadu penuh yang terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah memberlakukan UU Telekomunikasi untuk mendorong liberalisasi industri yang memberikan dampak langsung pada bisnis kami. Pada tahun 2001, sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi, kami mengadakan suatu perjanjian dengan Telkom yang bertujuan untuk menghapus kepemilikan silang kami masing-masing di

beberapa anak-anak perusahaan, yaitu:

- pembelian 22,5% kepemilikan saham Telkom di Satelindo oleh Perusahaan;
- pembelian 35,0% kepemilikan saham kami di Telkomsel oleh Telkom; dan
- pembelian 37,2% kepemilikan saham Telkom di Lintasarta oleh Perusahaan dan pembelian obligasi konversi Lintasarta yang dipegang oleh Telkom.

Setelah diadakan perjanjian dengan Telkom, kami membeli 45,0% kepemilikan saham di Satelindo, melalui pembelian PT Bimagraha Telekomindo atau Bimagraha pada tahun 2001 dan membeli 25,0% kepemilikan saham lainnya di Satelindo dari DeTe Asia pada bulan Juni 2002. Untuk memperkuat struktur permodalan Satelindo dan menghapus beberapa ketentuan mengenai pembatasan yang timbul akibat hutang Satelindo, kami menyetor tambahan modal ke Satelindo sebesar US$75.0 juta pada bulan Juli 2002.

Pada bulan Agustus 2002, kami memasuki sektor jasa telekomunikasi domestik setelah memperoleh ijin penyelenggaraan jasa jaringan tetap lokal di wilayah Jakarta dan Surabaya. Kami menyediakan sekitar 13.000 sambungan telepon di wilayah tersebut untuk menyediakan jasa telepon tetap lokal dan mencanangkan tujuan strategis kami sebagai penyelenggara jasa dan jaringan terpadu penuh di Indonesia. Pada tahun 2002, Pemerintah melakukan divestasi secara dua tahap atas 517,5 juta sahamnya, yaitu sekitar 50,0% dari saham Seri B Perusahaan pada saat itu. Pada bulan Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan di Perusahaan melalui tender global yang dipercepat. Pada bulan Desember 2002, Pemerintah menjual 41,9% dari saham Seri B di Perusahaan kepada (bekas) anak perusahaan dari STT. Per tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah memiliki 14,29% dari saham yang telah ditempatkan oleh Perusahaan, termasuk satu saham Seri A, dan ICLM dan ICLS, memiliki 65,0% dari saham biasa Seri B di Perusahaan. ICLM dan ICLS dimiliki oleh Qtel. Per tanggal 31 Maret 2009, 20,71% dari saham Seri B Perusahaan dimiliki oleh masyarakat. Lihat "Butir 6: Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan – Kepemilikan Saham."

Pada tanggal 20 November 2003, kami melakukan penggabungan dengan Satelindo, Bimagraha dan IM3 dan semua aktiva dan kewajiban dari anak-anak perusahaan yang bergabung tersebut dipindahkan kepada kami pada tanggal tersebut. Sejak memasuki pasar selular Indonesia melalui pembelian Satelindo dan pendirian IM3 dan integrasi dari perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2003, jasa selular menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan usaha kami.

Pada tanggal 22 Juni 2008, Qtel membeli seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam masing-masing ICLM dan ICLS, berdasarkan perjanjian jual beli saham (*share purchase agreement*) tanggal 6 Juni 2008 antara Qtel dan STT, suatu perusahaan yang didirikan di Singapura. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, Qtel melalui anak perusahaannya Qatar South East Asia Holding S.P.C., melakukan akuisisi atas saham ICLM dan ICLS dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. atau AMH, suatu perusahaan yang didirikan di Singapura, yang 75,0% sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh STT dan 25,0% secara tidak langsung dimiliki oleh Qtel. Setelah akuisisi ini, terjadi perubahan pengendalian di Indosat dan Qtel, serta anak perusahaannya, ICLS dan Qatar South East Asia Holding S.P.C., telah melakukan penawaran tender untuk membeli sampai dengan 1.314.466.775 saham Seri B, yang merupakan 24,19% saham Seri B kami yang telah ditempatkan dan disetor (termasuk saham Seri B dengan dasar ADS), dengan harga pembelian dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang memiliki nilai yang sama dengan Rp369.400 per ADS dan Rp7.388 per saham Seri B, bersih tanpa potongan kepada para penjual secara tunai (tanpa bunga dan tunduk pada ketentuan mengenai pajak-pajak yang ditahan (*withholding*

taxes)). Setelah dilakukannya penyelesaian penawaran tender pada 5 Maret 2009, Qtel dan anak perusahaannya memiliki sekitar 65% dari seluruh saham Perusahaan yang telah ditempatkan.

Untuk deskripsi mengenai belanja modal pokok kami sejak 1 Januari 2006 dan belanja modal pokok kami yang sedang dijalankan saat ini, termasuk jumlah yang diinvestasikan dan metode pembiayaan, lihat "butir 5, Tinjauan Usaha dan Keuangan serta Prospek-Likuiditas dan Sumber Pendanaan-Belanja Modal."

Kantor kami berlokasi di Gedung Indosat, jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Republik Indonesia dan nomor telepon kami adalah +62 (21) 3000 3001. Website Perusahaan kami dapat dikases melalui URL **http://www.indosat.com.** Informasi yang ada dalam website kami bukan merupakan bagian dari laporan tahunan ini dan tidak dijadikan sebagai referensi dalam laporan tahunan ini. Service Agent kami di Amerika Serikat sehubungan dengan ADS adalah Bank of New York Mellon, Divisi Depository Receipt, 101 Barclay Street, New York, New York 10286, U.S.A.

Tinjauan Usaha

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Kami adalah operator selular terbesar kedua, berdasarkan jumlah pelanggan selular, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Kami juga menyediakan layanan MIDI kepada para pelanggan perusahaan dan retail Indonesia dan regional. Pada tahun 2008, total pendapatan usaha kami adalah sebesar Rp18.659,1 milyar (US$1,704.0 juta). Produk dan jasa utama kami meliputi sebagai berikut:

- *Jasa selular*. Kami menyediakan jasa selular GSM 900 dan 1800 kepada sekitar 36,5 juta pelanggan selular di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2008. Kami saat ini sedang fokus pada perluasan cakupan, peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan selular kami, dengan membeli perangkat baru dan menempatkan kembali perangkat yang sudah ada.

- *Jasa telekomunikasi telepon tetap (suara).* Kami adalah salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2008. Untuk mendukung jasa selular kami dan meningkatkan akses kami ke pelanggan jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional, kami meluncurkan jasa telepon tetap nirkabel pada tahun 2004 dan terus memperluas layanan tersebut. Kami juga menyediakan jasa SLJJ sejak tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002.

- *Jasa MIDI*. Kami menyediakan jasa MIDI *broadband* dan *narrowband*, yang meliputi jasa *frame relay*, jasa VSAT, *leased circuits* dan jasa Internet, secara langsung dan melalui anak perusahaan kami, Lintasarta dan PT Indosat Mega Media atau IMM. Kami menawarkan produk-produk ini terutama kepada para pelanggan perusahaan dan pelanggan retail dan *wholesaler* dalam upaya untuk menyediakan solusi telekomunikasi terpadu.

Bisnis kami tidak mengalami perubahan *trend* permintaan yang signifikan.

Pemegang saham utama kami adalah ICLM dan ICLS, dengan kepemilikan saham sekitar 65.0% dari saham biasa kami, dan Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham sebesar

14,29% dari saham biasa kami, termasuk satu saham Seri A, masing-masing per tanggal 31 Maret 2009. ICLM dan ICLS adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Qtel. Qtel adalah perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara Qatar dan perusahaan afiliasinya. Qtel didirikan berdasarkan hukum negara Qatar dengan saham yang terdaftar di Doha Securities Market, Abu Dhabi Securities Market serta memiliki Global Depository Receipts yang diperdagangkan di London Stock Exchange. Qtel adalah satu-satunya perusahaan penyelenggara telekomunikasi di Qatar dan salah satu perusahaan publik terbesar di negara tersebut serta menyediakan pilihan produk telekomunikasi yang luas, termasuk antara lain, jasa GSM bergerak nasional dan internasional, internet dan jasa televisi kabel.

Tabel berikut ini menguraikan pendapatan usaha kami untuk setiap periode yang disebutkan dan persentasi kontribusi dari setiap layanan terhadap pendapatan usaha kami:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2006		2007		2008	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	(Rp. dalam juta, kecuali persentase)					
Jasa selular	9.227,5	75,4%	12.752,5	77,3%	14.178,9	76,0%
Telekomunikasi telepon tetap	1.109,3	9,1	1.567,4	9,5	1.744,7	9,3
Jasa MIDI	1.902,6	15,5	2.168,6	13,2	2.735,5	14,7
Jumlah pendapatan usaha	**12.239,4**	**100,0%**	**16.488,5**	**100,0%**	**18.659,1**	**100,0**

Jasa selular

Jasa selular telah membukukan pendapatan sebesar Rp14.178,9 milyar untuk tahun 2008, yang merupakan 76,0% dari total pendapatan usaha konsolidasi Perusahaan di tahun 2008. Perusahaan adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular, yaitu 36,5 juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2008. Untuk tahun 2008, kami menguasai sekitar 28,7% dari pangsa pasar, berdasarkan estimasi dengan menggunakan data pasar yang tersedia. Jaringan selular kami saat ini menyediakan cakupan jaringan di semua kota besar dan pusat kependudukan di seluruh Indonesia. Kami menyediakan jasa selular dengan teknologi GSM 900, GSM 1800 dan teknologi 3G.

Setelah dilakukannya penggabungan Satelindo dan IM3 ke dalam Perusahaan di tahun 2003, kami mulai melakukan proses integrasi jaringan untuk menggabungkan dua jaringan ini dengan menggunakan platform selular yang sama. Oleh karena proses integrasi jaringan ini menghadapi kendala dalam hal luasnya wilayah geografis dan kesesuaian perangkat, maka sejumlah pelanggan selular kami mengalami masa ketidakstabilan kualitas layanan selular selama berbagai tahapan proses integrasi, terutama pada tahun 2005 dan di daerah Jawa. Akibatnya, kami tidak dapat meluncurkan inisiatif pemasaran yang berkaitan dengan jasa selular secara nasional sampai dengan triwulan pertama tahun 2006. Kami yakin bahwa masalah integrasi jaringan ini merupakan penyebab utama berkurangnya sekitar 1,5 juta pelanggan selular pada triwulan pertama tahun 2006. Kami berhasil menyelesaikan integrasi jaringan pada triwulan pertama tahun 2006 dan kami yakin bahwa kualitas layanan selular kami telah meningkat. Setelah dilakukannya integrasi jaringan, kami mulai meluncurkan inisiatif pemasaran secara nasional untuk menarik pelanggan selular baru, yaitu program Mentari "Free Talk" dan IM3 "Raja SMS." Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan penggunaan SMS dan trafik suara daripada jumlah

pelanggan selular di tahun 2006 dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2008, kami terus melakukan beberapa inisiatif pemasaran, termasuk Mentari "Free Talk" dan IM3 "Raja SMS" dan untuk mempromosikan Mentari "Hebat". Sebagai hasil dari program-program ini, kami mencatat peningkatan sebesar 49% jumlah pelanggan selular dari 24,5 juta menjadi 36,5 juta di bulan Desember 2008. Meskipun kualitas jaringan selular telah meningkat dan beberapa inisiatif pemasaran telah diluncurkan pada semester pertama tahun 2007, dampak dari peristiwa-peristiwa ini terhadap kondisi keuangan kami terus berlanjut di semester kedua tahun 2007 dan di tahun 2008.

Layanan-layanan

Layanan selular utama kami merupakan jasa penyediaan transfer suara dan data, yang mengukur tingkat penggunaan jaringan selular kami oleh para pelanggan kami, dan dijual melalui program pra-bayar dan pasca bayar. Struktur tarif program pra-bayar berbeda dengan pasca bayar, dimana pelanggan pra-bayar dikenakan tarif yang lebih tinggi untuk mengkompensasikan biaya langganan bulanan yang ditiadakan.

Kami menawarkan program pasca bayar dengan merek "Matrix". Matrix adalah produk pasca bayar yang ditujukan untuk konsumen tingkat atas. Kami menawarkan promosi yang berbeda terkait dengan konsumen layanan selular ini. Matrix adalah paket layanan dasar dengan program pembayaran pasca bayar dan, sejak bulan Oktober 2005, memberikan fasilitas *roaming* nasional secara gratis kepada semua pelanggan Matrix. Selain tiga paket program Matrix yang disebutkan sebelumnya yang kami luncurkan di tahun 2005, kami juga mulai menawarkan paket Matrix yang dikenal sebagai "Matrix Strong" di tahun 2006. Paket "Matrix Strong" menawarkan 50 menit gratis untuk sambungan telepon sesama jaringan, 50 SMS gratis dan tarif senilai Rp50 per enam-detik interval, dengan biaya bulanan sebesar Rp50.000. Pada bulan Januari 2007, kami meluncurkan paket "Matrix Strong Become Stronger", yang menawarkan pelanggan selular dua pilihan promosi tambahan: (i) 125 menit gratis untuk sambungan telepon sesama jaringan, 125 SMS gratis dan tarif sebesar Rp50 per enam-detik interval, dengan biaya bulanan sebesar Rp100.000; dan (ii) 200 menit gratis untuk sambungan telepon sesama jaringan, 200 SMS gratis dan tarif sebesar Rp50 per enam-detik interval, dengan biaya bulanan sebesar Rp150.000. Pada bulan November 2007, kami meluncurkan program pemasaran baru yang dikenal sebagai "Matrix Auto". Program ini memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk menentukan sendiri jumlah penggunaan maksimum mereka untuk satu bulan, dan mengisi ulang kartunya dengan *voucher* pra-bayar ketika batas ini terlampaui. Tarif untuk produk ini terdiri dari tarif antara tarif pelanggan pra bayar dan pelanggan pasca bayar. Merek Matrix kami memiliki tingkat kepedulian merek yang tinggi dan berhasil memperoleh penghargaan Top Brand Award dari Frontier Consulting Group dan majalah Marketing keduanya di tahun 2008 dan 2009. Kami juga menawarkan Matrix Haji dan Umroh untuk para pelanggan pasca bayar kami. Pada bulan April 2008, kami meluncurkan produk paket Matrix, Tarif Tunggal Matrix, kami menawarkan tarif tetap, yaitu tarif tunggal Rp15 per detik ke seluruh tujuan di Indonesia.

Kami menawarkan program pra-bayar dengan merek "Mentari" dan "IM3". Mentari dan IM3 memberikan fasilitas roaming nasional secara gratis, dan kami yakin bahwa produk Mentari dan IM3 memiliki tingkat kepedulian merek yang tinggi, sehingga memberikan keuntungan dalam persaingan memperoleh dan mempertahankan pelanggan di pasar yang bersaing. Pada tahun 2008 dan 2009, Frontier Consulting Group dan majalah Marketing memberikan penghargaan "Top Brand Award" untuk merek Mentari dan IM3 kami untuk prestasi luar biasa dalam membangun kesadaran akan merek dan pangsa pasar, yang berdasarkan pilihan dan

kesetiaan pelanggan. Kami membedakan dua merek pra-bayar kami berdasarkan segmen pasar. Merek Mentari dipasarkan untuk keluarga, teman dan siapapun yang bepergian di dalam komunitas, dimana tarif telepon dipromosikan dengan harga yang bersaing. Merek IM3 dipasarkan untuk generasi muda dengan SMS sebagai penawaran kami yang menarik. Sejak awal tahun 2008, kami telah menyesuaikan promosi untuk merek pra bayar kami untuk memenuhi permintaan pasar. Sebagai contoh, merek Mentari memberikan tarif tetap *(flat)* untuk panggilan nasional, sedangkan IM3 memberikan penawaran jumlah menit lebih banyak untuk panggilan suara sesama pelanggan Indosat *(on-net voice call)* dan meningkatkan penggunaan SMS. Kami telah mengembangkan merek "Mentari" dan "IM3" untuk promosi dan membuat iklan yang dirancang untuk segmen pasar khusus tersebut.

Selama tahun 2008, kami telah meluncurkan beberapa program untuk para pelanggan Mentari. Pada bulan April 2008, kami meluncurkan Mentari Hebat yang menawarkan layanan panggilan lokal kepada pelanggan dengan tarif tetap Rp100/30 detik untuk empat pelanggan Indosat yang terdaftar, setiap saat setiap hari. Pada bulan Mei 2008, kami meluncurkan "Mentari Rp5/detik" untuk pelanggan baru Mentari dan pelanggan terdaftar. Promosi ini menawarkan tarif Rp5/detik untuk panggilan *on-net* dan *off-net* kepada seluruh operator di Indonesia dari pukul 11:00 malam sampai dengan pukul 5:00 pagi. Sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 kami juga telah meluncurkan "Seribu Panggilan Mentari" yang menawarkan program Rp1,000 per hari untuk tiap wilayah.

Kami juga telah meluncurkan beberapa promosi tarif baru untuk para pelanggan IM3. Pada awal 2008, kami meluncurkan program IM3 Ce-eSan untuk para pelanggan IM3, yang memberikan layanan SMS gratis ke dua teman yang terdaftar sebagai Ce-eSan mereka apabila mereka melakukan percakapan melalui telepon sekurang-kurangnya Rp2.000 per hari. Pada bulan Agustus 2008, kami menawarkan "Rp0.1/detik" dan "Rp0.1 per SMS" sepanjang hari. Kami juga telah meluncurkan program "Super Voucher 2000 SMS" dengan tarif Rp30.000 dengan masa aktif 30 hari dan dengan tarif SMS sebesar Rp15/SMS untuk SMS kepada seluruh operator dan pengguna Raja SMS.

Para pelanggan pasca bayar dan pra-bayar memiliki akses ke sambungan telepon lokal, SLJJ dan sambungan langsung jarak jauh internasional. Selain itu, kami menawarkan berbagai layanan, fungsi dan fitur tambahan dan nilai tambah untuk para pelanggan kami, yang dikemas sesuai dengan paket yang dipilih, yaitu:

- *SMS:* para pelanggan dapat mengirimkan teks pesan pendek ke layar selular milik pengguna lainnya;
- *MMS:* para pelanggan jasa GSM dapat mengirimkan gambar, teks dan suara dalam satu paket pesan;
- *Voice SMS:* para pelanggan dapat mengirim pesan suara;
- *Ring-back tone:* para pelanggan dapat memilih lagu favorit mereka sebagai nada panggil yang dapat didengar oleh penelpon untuk telepon yang masuk;
- *GPRS:* menyediakan komunikasi mobile data dengan teknologi berbasis GSM, yaitu mobile Internet, data transfer dan push e-mail (layanan Blackberry™);
- *Layanan mobile data dan faksimili:* para pelanggan dapat mengunduh *content* olah raga, berita, horoskop, film, musik dan keuangan ke telepon genggam mereka dan mengirim serta menerima faks;

- *Voicemail:* penelepon dapat merekam pesan suara mereka yang kemudian akan didengar oleh pelanggan;

- *Caller identification:* menampilkan nomor telepon yang masuk pada layar telepon genggam pelanggan;

- *Call holding:* para pelanggan dapat menahan telepon masuk atau keluar ketika sedang melakukan sambungan atau menerima telepon lainnya;

- *Call waiting:* sinyal bagi pelanggan bahwa ada telepon masuk ketika telpon sedang digunakan. Setelah mendengar sinyal tersebut, pelanggan dapat menerima telepon kedua yang masuk sambil tetap menahan telepon pertama yang masuk;
- *Call forwarding:* para pelanggan dapat mengalihkan telepon yang masuk ke nomor selular atau telepon tetap;

- *Tagihan terperinci:* memberikan tagihan yang terperinci kepada pelanggan yang menunjukkan durasi dan biaya telepon yang dilakukan ke dan dari telepon selular tertentu;

- *Pembayaran debit langsung:* memberikan opsi pembayaran yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank atau kartu kredit pelanggan;

- *Isi ulang via SMS dan automatic teller machines:* pelanggan dapat mengisi ulang program pra-bayar mereka via SMS dan *automatic teller machines* yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank milik pelanggan; dan

- *International roaming:* baik pelanggan pra-bayar maupun pasca bayar dapat menerima layanan SMS dan telepon ketika *roaming* di jaringan selular luar negeri.

Layanan faksimili, tagihan terperinci dan pembayaran debit-langsung hanya tersedia untuk para pelanggan pasca bayar. Kami menawarkan sejumlah layanan gratis, seperti *caller identification*, *call holding*, *call waiting* dan *call forwarding*; sementara layanan lainnya, seperti SMS, *mobile data* dan faksimili dan tagihan terperinci dikenakan biaya tambahan. Kami meluncurkan layanan SMS untuk para pelanggan selular pasca bayar di tahun 1995 dan selanjutnya, untuk para pelanggan layanan pra-bayar pada bulan Mei 2000. Tingkat penggunaan meningkat dari rata-rata sekitar 319.000 pesan teks per hari di bulan Juni 2000 menjadi rata-rata sekitar 100,0 juta dan 126,2 juta pesan teks per hari, masing-masing di bulan Desember 2007 dan Desember 2008. Pada tahun 2006, 2007 dan 2008, biaya penggunaan SMS menjadi bagian yang terbesar dari pendapatan usaha Perusahaan dari layanan nilai tambah dan fitur selular. Kami berharap layanan SMS terus memberikan pendapatan terbesar dari layanan nilai tambah dan fitur selular, tetapi juga mengantisipasi peningkatan pendapatan dari layanan GPRS dan *mobile* data di periode mendatang.

Kami meluncurkan portofolio layanan *mobile data* di tahun 2000. Layanan ini dapat diakses dengan SMS atau melalui koneksi *dial-up* langsung ke server WAP. Pelanggan dapat mengakses berbagai informasi, termasuk jadwal film, harga saham, nilai tukar mata uang, olah raga dan berita bisnis dan ramalan bintang, dan isi ulang kartu pra-bayar SMS-nya. Selain itu, pelanggan dapat mengirim dan menerima e-mail dan menggunakan layanan *mobile banking* dengan beberapa bank terkemuka melalui telepon genggamnya.

Kami pertama kali mengoperasikan layanan GPRS secara komersial pada awal tahun 2002. Layanan GPRS dengan teknologi EDGE saat ini tersedia di banyak kota besar di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan

Papua dengan akses jaringan penuh. Bekerja sama dengan StarHub dan Research-In-Motion, kami meluncurkan Blackberry™ Enterprise Service kepada para pelanggan perusahaan kami di bulan Desember 2004 dan layanan Blackberry™ untuk pengguna perorangan di Maret 2005. Pada bulan Juni 2008, untuk membedakan dari operator jasa Blackberry™ lainnya, kami meluncurkan I-GPS dan I-Stock, aplikasi yang membuat pelanggan Blackberry™ kami dapat mengakses sistem navigasi dan harga saham pada saat itu juga (*real time*). Pada bulan Juli 2008, kami meluncurkan "Blackberry™ On-Demand" sehingga Blackberry™ dapat digunakan oleh pelanggan pra-bayar kami. Sampai dengan 31 Desember 2008, kami memiliki kurang lebih 30,000 pelanggan Blackberry™.

Kami mengadakan perubahan perjanjian interkoneksi dengan para operator telekomunikasi setelah diberlakukannya peraturan interkoneksi yang baru. Perubahan perjanjian ini dapat membuat jaringan selular kami berinterkoneksi dengan PSTN yang dioperasikan oleh Telkom, *international gateway* yang kami operasikan dan jaringan milik setiap operator selular serta telepon tetap nirkabel Indonesia lainnya, sehingga para pelanggan kami dapat berkomunikasi dengan para pelanggan dari penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya.

Kami menyediakan layanan *roaming* internasional kepada para pelanggan selular kami sehingga mereka dapat melakukan dan menerima sambungan telepon dan mengirim dan menerima pesan teks SMS ketika berada di luar negeri. Kami telah mengadakan perjanjian *roaming* dengan para operator jaringan selular GSM di Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan dan Asia. Per tanggal 31 Desember 2008, para pelanggan selular pasca bayar kami dapat melakukan *roaming* internasional di 313 jaringan, yang dimiliki oleh 244 operator di 116 negara.

Pada tanggal 12 Desember 2006, kami menjadi anggota perkumpulan operator telekomunikasi internasional terbesar di Asia, CONEXUS yang didirikan untuk meningkatkan nilai bersaing dari setiap anggotanya dalam memberikan layanan telekomunikasi internasional di negara mereka masing-masing dan di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Untuk mendukung layanan *roaming* saat ini melalui GSM, GPRS dan *wideband code division multiple access* atau WCDMA, para anggota aliansi bekerja sama dalam menyediakan *roaming* dengan teknologi HSDPA. Aliansi ini telah memperluas cakupan layanannya kepada lebih dari 150 juta pelanggan di sembilan negara, termasuk Indonesia.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Pemerintah mengadakan tender terbuka untuk ijin spektrum 3G dan, setelah berakhirnya proses tender, kami memperoleh satu ijin spektrum 3G untuk frekuensi 5 MHz dari spektrum yang ditenderkan dengan harga sebesar Rp320,0 milyar yang harus dibayar di muka, harga ini merupakan tawaran terendah di antara para pesaing. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ijin tersebut, kami diwajibkan untuk menyerahkan *performance bond* tahunan kepada Pemerintah senilai 5,0% dari total biaya lisensi, atau Rp20,0 milyar, yang mana yang lebih tinggi. Kami akan kehilangan *performance bond* ini bila kami tidak dapat menyediakan layanan 3G sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah. Ijin tersebut juga mewajibkan kami untuk membangun jaringan 3G di sekurang-kurangnya dua wilayah, Jakarta dan Surabaya dan wilayah sekitarnya dan menyediakan jaringan untuk mencakup sekurang-kurangnya 10,0% dari total penduduk dalam kedua wilayah tersebut pada tahun 2006, 20,0% pada tahun 2007 dan 30,0% pada tahun 2009. Ijin tersebut juga mewajibkan kami untuk membangun jaringan 3G di sekurang-kurangnya di wilayah tambahan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan ketentuan ijin kami, kami diwajibkan untuk menyelesaikan perluasan jaringan 3G kami untuk menyediakan cakupan jaringan ke 20% penduduk di Jakarta dan Surabaya dan kepada 10% dari penduduk di Jawa Barat, Yogyakarta dan Sumatera Utara pada akhir tahun 2007. Berdasarkan perkiraan kami per 31 Maret 2009, kami telah memiliki 100% cakupan populasi di Jakarta tetapi belum memperoleh cakupan populasi yang disyaratkan untuk wilayah lainnya.

Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan 3.5G broadband, suatu layanan telekomunikasi nirkabel berjalan dengan tekhnologi 3.5G, yang menggunakan HSDPA dengan kecepatan *downlink* sampai dengan 14 Mbps, dan paket akses uplink berkecepatan tinggi dengan kecepatan uplink antara 1,4 sampai 2 Mbps. Kami saat ini menawarkan dua jenis paket 3.5G *broadband*, yaitu paket dasar yang kuota penggunaan per bulannya dibatasi dengan biaya bulanan berkisar antara Rp90.000 untuk 500 megabytes sampai dengan Rp400.000 untuk 3 gigabytes, dan paket tidak terbatas dengan biaya yang dihitung berdasarkan tingkat kecepatan yang diinginkan, berkisar antara Rp100.000 untuk kecepatan sampai dengan 256 Kbps dengan penggunaan wajar sebesar 2 gigabytes, sampai dengan Rp1.500.000 untuk kecepatan sampai dengan 7,2 Mbps dengan penggunaan wajar sampai dengan 10 gigabytes.

Para Pelanggan dan Pemasaran

Kami melakukan segmentasi penduduk Indonesia berdasarkan lokasi, pendapatan yang dikeluarkan, dan faktor-faktor lainnya yang kami yakin dapat mengindikasikan keinginan dan kemampuan perorangan dan perusahaan untuk membeli produk dan jasa kami. Kemudian kami mengarahkan target ke wilayah berpenduduk lebih padat yang berpotensi menjadi pelanggan selular. Wilayah ini umumnya memiliki perekonomian yang lebih berkembang dan lebih sejahtera dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Dengan pendekatan ini, kami dapat memperoleh basis pelanggan selular yang beragam di seluruh wilayah kependudukan utama di Indonesia. Kami menjalankan strategi ini agar dapat bersaing dengan para pemain baru dan tekanan harga di wilayah kota besar.

Sejak diluncurkannya jasa selular kami di Indonesia, kami telah mencatat pertumbuhan pelanggan selular tiap tahunnya. Basis pelanggan pra-bayar kami telah meningkat secara tajam dalam tiga tahun terakhir ini dibandingkan dengan basis pelanggan pasca bayar kami. Per tanggal 31 Desember 2006, kami memiliki 825.859 pelanggan pasca bayar dan 15.878.780 pelanggan pra-bayar. Per tanggal 31 Desember 2008, basis pelanggan kami telah meningkat menjadi 919.213 pelanggan pasca bayar dan 35.591.033 pelanggan pra-bayar. Selain itu, di tahun 2008 dan 2009 kami memperoleh "Top Brand Award" dari Frontier Consulting Group dan majalah Marketing untuk jasa Matrix pasca bayar kami dan Mentari serta jasa IM3 pra bayar. Kami yakin bahwa para pelanggan selular Indonesia lebih memilih kenyamanan, kemudahan aktivasi, menghindari komitmen tetap dan pengecekan sejarah kredit yang dilakukan dalam program pasca bayar. Oleh karena itu, kami telah memfokuskan untuk meningkatkan jumlah pelanggan pra-bayar kami dikarenakan pelanggan pra-bayar meminimalisir risiko kredit pelanggan selular dan mengurangi biaya tagihan dan penagihan pembayaran.

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi tentang jumlah pelanggan pasca bayar, pra-bayar dan jumlah basis pelanggan selular kami per tanggal yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2006	**2007**	**2008**
Pelanggan selular:[(1)]			
Pra-bayar	15.878.780	23.945.431	35.591.033
Pasca bayar	825.859	599.991	919.213
Jumlah	**16.704.639**	**24.545.422**	**36.510.246**

(1) Pelanggan selular berarti jumlah pelanggan selular yang terdaftar dan aktif pada akhir periode yang terkait. Kami mendefinisikan "pelanggan selular yang aktif" sebagai pelanggan selular yang: (i) dalam hal pelanggan pasca bayar, tidak ada hutang yang belum dibayarkan lebih dari 100 hari sejak tanggal

tagihan terakhir; atau (ii) dalam hal pelanggan pra-bayar, mengisi ulang kartu SIM-nya dalam waktu 30 hari segera setelah berakhirnya masa berlaku kartu SIM dengan jumlah minimum tertentu ke dalam kartu SIM-nya. Lihat "-Aktivasi, Tagihan dan Perolehan Pembayaran."

Pada saat jasa selular pertama kali diluncurkan di Indonesia, para pelanggan selular terutama terdiri dari kalangan menengah ke atas dan pelanggan bisnis, termasuk pegawai negeri yang bekerja di badan pemerintahan. Seiring dengan turunnya biaya aktivasi dan harga telepon genggam dan meningkatnya kualitas layanan selular, jasa selular menjadi semakin terjangkau dan populer di dalam pasar berpenghasilan menengah baik untuk penggunaan pribadi maupun perusahaan. Para pelanggan selular ini biasanya memiliki rata-rata penggunaan bulanan yang lebih rendah dan sensitifitas harga yang lebih tinggi dibandingkan para pelanggan selular pada awal perkembangan pasar jasa selular di Indonesia.

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi tentang ARPU kami pada periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2006	2007	2008
		(Rp.)	
ARPU:[1]			
Pasca bayar	194.791	182.682	189.710
Pra-bayar	52.713	47.028	34.610
ARPU gabungan	60.023	52.821	38.639

(1) Pendapatan rata-rata bulanan (dalam Rupiah) per pelanggan selular dihitung dengan membagi pendapatan jasa selular yang timbul setiap bulan, tidak termasuk pendapatan yang bersifat satu kali, seperti biaya aktivasi dan biaya lelang nomor telepon khusus, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan selular. Rata-rata jumlah pelanggan selular adalah jumlah pelanggan selular yang aktif pada awal dan akhir dari setiap bulan dibagi dua. Kami mendefinisikan "pelanggan selular yang aktif" sebagai pelanggan selular yang: (i) dalam hal pelanggan pasca bayar, tidak ada hutang yang belum dibayarkan lebih dari 100 hari sejak tanggal tagihan terakhir; atau (ii) dalam hal pelanggan pra-bayar, mengisi ulang kartu SIM-nya dalam waktu 30 hari segera setelah berakhirnya masa berlaku kartu SIM dengan jumlah minimum tertentu ke dalam kartu SIM-nya. Lihat "–Aktivasi, Tagihan dan Perolehan Pembayaran".

Setelah diselesaikannya integrasi jaringan pada tahun 2005, dan optimalisasi jaringan selular kami pada triwulan pertama tahun 2006, kami yakin bahwa kami telah banyak meningkatkan kualitas layanan selular kami. Kami melanjutkan kegiatan pemasaran dan promosi berskala nasional di bawah kampanye "Punya Indosat" dalam upaya mempertahankan pelanggan selular kami yang sudah ada dan untuk memperoleh pelanggan selular yang baru. Kampanye "Punya Indosat" meliputi berbagai layanan nilai tambah yang inovatif, seperti "I-Ring", *ring-back tone* pribadi, "I-Say", layanan *voice messaging*, dan "I-Memova", satu dari layanan *push e-mail* kami, serta promosi-promosi seperti Mentari "Free Talk", Mentari "Hebat" dan IM3 "Raja SMS". Kami juga meluncurkan program "Poin Plus Plus", suatu program penghargaan yang memberikan akumulasi poin berdasarkan pemakaian kredit, isi ulang *voucher* atau periode berlangganan kepada para pelanggan pra bayar dan pasca bayar kami. Dengan program ini, para pelanggan dapat menukar poin mereka serta ikut serta dalam undian empat mobil Jaguar. Selain itu, kami secara reguler memuat iklan di surat kabar terkemuka, televisi, media luar, majalah dan pengiriman pos langsung dan penjualan silang produk kami dengan perusahaan terkemuka lainnya.

Untuk mengkonsolidasi pemasaran jasa selular, kami membuka pusat-pusat layanan lengkap, dengan nama "Galeri Indosat" yang dioperasikan oleh kami, dan "Griya Indosat" yang dioperasikan oleh distributor eksklusif kami. Pusat-pusat layanan kami memberikan layanan penjualan, layanan pelanggan/*customer service* dan informasi produk kepada para pelanggan kami. Per tanggal 31 Desember 2008, kami mengoperasikan 162 pusat-pusat layanan di seluruh Indonesia. Kami juga mempunyai tim karyawan yang berdedikasi untuk mengkoordinasi penjualan dan layanan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Untuk mendukung pemasaran langsung, kami memiliki jaringan *independent dealers*. *Dealer* regional dan multi-regional independen ini memiliki jaringan distribusi sendiri di seluruh Indonesia dan mempromosikan jasa selular kami, terutama kepada perorangan. *Dealer* ini meliputi distributor utama dari telepon genggam dan biasanya sudah memiliki jaringan retail mereka sendiri, tenaga penjual langsung dan sub-penjual di Indonesia. Gerai-gerai ini berfungsi sebagai cabang tambahan dari kami dan memberikan berbagai layanan, seperti informasi produk dan jasa, layanan pelanggan dan proses pembayaran tagihan. Para pelanggan selular baik yang sudah ada maupun yang baru dapat melakukan aktivasi dan pendaftaran dan membayar semua jasa selular pra-bayar kami di gerai-gerai ini. Kami terus mempertahankan hubungan kami dengan para *dealer* kami dalam upaya memperoleh volume penjualan yang lebih tinggi lagi dengan cara penempatan produk yang lebih baik, jaringan *dealer* yang terpadu dan meningkatkan loyalitas *dealer*.

Struktur Tarif dan Pendapatan Usaha Jasa Selular

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 12/2006, Pemerintah mengatur rumusan tarif untuk perubahan atas tarif jasa telekomunikasi dengan menetapkan harga terendah untuk beberapa tarif berdasarkan biaya interkoneksi. Biaya interkoneksi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007, namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa peraturan pelaksana berkenaan dengan rumusan tarif terendah retail. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 9/2008 pada tanggal 7 April 2008 mengenai rumusan tarif retail selular. Berdasarkan peraturan baru ini, kami telah menerapkan formulasi tarif retail baru pada bulan April 2008. Pada 30 April 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 15/2008 yang menggantikan Peraturan Menteri No. 12/2006 dan menetapkan batas maksimum tarif interkoneksi.

Pasar telekomunikasi selular Indonesia menggunakan sistem "*calling party pays*", yang mengharuskan pihak penelpon untuk membayar tarif percakapan telepon. Tarif langganan pasca bayar terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan dan biaya penggunaan berbasis interkoneksi. Biaya penggunaan berbasis interkoneksi dihitung dengan memperhatikan tiga biaya interkoneksi: biaya *originating*, transit dan terminasi, yang bergantung pada trafik *routing*. Rumusan tarif baru yang ditentukan oleh Pemerintah tidak membedakan antara tarif selular pra-bayar dan pasca bayar. Akan tetapi tarif untuk layanan pra-bayar dan pasca bayar dapat berbeda tergantung biaya elemen jaringan.

Biaya Aktivasi dan Biaya Bulanan. Biaya aktivasi merupakan biaya koneksi pertama yang dikenakan pada para pelanggan baik pra-bayar maupun packa bayar ketika berlangganan jaringan selular. Biaya bulanan merupakan tarif tetap yang hanya dikenakan pada para pelanggan pasca bayar untuk mempertahankan akses ke jaringan selular. Saat ini, para pelanggan pasca bayar kami tidak lagi dikenakan biaya aktivasi. Kami menawarkan beberapa program kepada para pelanggan pasca bayar, termasuk biaya penggunaan bulanan minimum sebesar Rp25.000, "Matrix Strong" sebesar Rp50.000 dan program promosi lainnya. Berdasarkan SAK, penjualan *voucher* perdana dan isi ulang dicatat sebagai pendapatan yang diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat penggunaan *airtime* yang tersedia atau pada saat telah habis masa berlakunya.

Biaya penggunaan. Ada tiga jenis panggilan: panggilan lokal, jarak jauh, dan internasional. Untuk keperluan penetapan terminasi, sambungan telepon dapat diterminasi pada salah satu dari jaringan selular, tetap ataupun satelit. Pada bulan September 2006, kami mengajukan DPI kepada Pemerintah, yang memuat usulan tarif untuk semua jenis sambungan telepon. Pemerintah telah menyetujui proposal tarif kami dan tarif ini telah digunakan sebagai dasar perjanjian koneksi dengan para operator telekomunikasi lainnya sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada awal tahun 2008, kami telah menyampaikan DPI baru kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan, mengenai usulan tarif interkoneksi baru, dan pada bulan April 2008 Pemerintah telah menyetujui DPI kami.

Layanan Nilai Tambah. Departemen Komunikasi dan Informatika tidak mengatur tarif SMS atau layanan nilai tambah lainnya sampai dengan awal tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 9/2008, Pemerintah telah mengatur formulasi tarif untuk layanan nilai tambah, termasuk SMS. Berdasarkan peraturan baru ini, kami mengenakan biaya penggunaan maksimum untuk penggunaan SMS sebesar Rp150 per pesan untuk para pelanggan pasca bayar dan Rp149 per pesan untuk para pelanggan layanan pra-bayar. Kami juga menawarkan promosi potongan harga untuk pelanggan pasca bayar dan pra-bayar. Penghitungan SMS didasarkan pada "*sender-keeps-all*", yang berarti kami akan memperoleh pendapatan setiap kali pelanggan selular kami mengirim SMS. Akan tetapi, kami tidak akan memperoleh pendapatan apabila pelanggan dari operator telekomunikasi lain mengirim SMS ke salah satu pelanggan selular kami. Untuk layanan GPRS kami, para pelanggan selular dikenakan Rp1 per kilobyte dari data yang diunduh. Kami menerima pembayaran *roaming* dari operator telekomunikasi asing ketika pelanggan mereka melakukan *roaming* di jaringan kami.

Interkoneksi

Kami saat ini berinterkoneksi dengan jaringan telepon tetap dan selular yang dioperasikan oleh semua operator jaringan di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Untuk meminimalisasi biaya interkoneksi kami, kami menggunakan fasilitas transmisi *backbone* kami sendiri bilamana dimungkinkan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Misalnya, untuk *routing* sambungan langsung jarak jauh dari seorang pelanggan di Surabaya ke pelanggan yang dituju di Jakarta dilakukan melalui saluran transmisi serat optik atau *microwave* milik kami sendiri sehingga kami dapat menghindari penggunaan jaringan milik operator lainnya dan dengan demikian mengurangi biaya interkoneksi yang terkait dengan *routing* intra-jaringan kami.

Aktivasi, Tagihan dan Perolehan Pembayaran

Para calon pelanggan dapat mengajukan permohonan untuk jasa selular di titik-titik penjualan dan distribusi kami. Akan tetapi, sebagian besar *independent dealers* kami hanya dapat menerima permohonan baru untuk jasa selular yang selanjutnya disampaikan kepada kami untuk diproses. Seorang calon pelanggan pasca bayar diwajibkan untuk menyerahkan bukti bahwa pelanggan tersebut telah memenuhi persyaratan kredit minimum kami. Apabila seorang calon pelanggan tidak memenuhi persyaratan pasca bayar kami, tenaga penjual kami akan merekomendasikan yang bersangkutan untuk menggunakan layanan pra-bayar. Setelah disetujui, kartu SIM pasca bayar akan diaktifkan dalam waktu 24 jam.

Kami akan menagih para pelanggan pasca bayar kami setiap bulannya melalui divisi penagihan kami yang terpusat. Dalam hal para pelanggan layanan pra-bayar, sistem tagihan nirkabel akan otomatis mengurangi nilai rekening pelanggan pra-bayar ketika biaya awal, transit dan terminasi dikenakan.

Para pelanggan pasca bayar kami memiliki berbagai pilihan cara pembayaran untuk melunasi tagihan bulanan mereka. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan kartu kredit terkemuka melalui galeri Indosat,

teller bank atau kantor pos cabang. Selain itu, para pelanggan dapat juga melakukan pembayaran dengan cara debit otomatis melalui bank atau kartu kredit, transfer bank, *Automatic Teller Machines, Electronic Data Capture, mobile banking, Internet banking,* dan *phone banking*. Jatuh tempo pembayaran adalah 20 hari sejak tanggal surat tagihan. Setelah 27 hari sejak tanggal surat tagihan, kami akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Bagi para pelanggan yang belum juga melunasi tagihannya 40 hari sejak tanggal surat tagihan, kami akan memblokir sambungan telepon masuk atau keluar mereka. Kami akan memutuskan layanan secara permanen dan membatalkan kartu SIM pelanggan untuk rekening yang tagihannya telah melewati jatuh tempo lebih dari 50 hari dan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan kami setelah 120 hari sejak tanggal surat tagihan.

Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan meminimalisasi kerugian. Kami mengirimkan *voucher* pra-bayar kepada para *independent dealers* kami hanya berdasarkan pembayaran tunai pada saat diserahkan dan kami tidak menerima pembayaran layanan kami dari para pelanggan selular melalui penjual independen kami. Selain itu, tergantung pada tingkat penggunaan, kami dapat mewajibkan pemberian uang jaminan yang dapat dikembalikan kepada para pelanggan. Kami akan mengkaji secara berkala rekening dari para pelanggan yang tingkat penggunaannya tinggi untuk memastikan agar uang jaminan mereka tetap memadai jumlahnya.

Persaingan

Persaingan bisnis jasa selular di Indonesia semakin ketat pada tahun-tahun terakhir ini. Persaingan di sektor industri komunikasi selular pada intinya didasarkan pada cakupan jaringan dan kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur khusus dan kualitas dan ketanggapan dari layanan pelanggan. Berdasarkan estimasi kami yang dibuat dengan data pasar yang tersedia, ada tiga penyelenggara layanan telepon nirkabel terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel (yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Telkom), kami dan Excelcomindo (yang mayoritas sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Telekom Malaysia), menyediakan sekitar 77,8% jasa telekomunikasi nirkabel di Indonesia per tanggal 31 Desember 2008.

Pada bulan Mei 2003, Telkom memperkenalkan produk TelkomFlexi, suatu layanan CDMA 2000 1x di wilayah Jakarta. Saat ini, Telkom menyediakan layanan ini di seluruh pulau Jawa dan beberapa kota besar di pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Telkom menyediakan layanan ini sebagai jasa akses telepon tetap nirkabel, akan tetapi layanan ini telah berkembang baik mobilitas maupun fitur nilai tambahnya sehingga menyerupai jasa selular. Setelah menerima permohonan dari asosiasi industri, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Keputusan Menteri No. 35/2004 yang menyatakan bahwa wilayah layanan untuk akses jaringan tetap nirkabel hanya terbatas pada wilayah yang sama dengan kode area dari layanan jaringan telepon tetap lokal. Dengan demikian, operator layanan akses telepon tetap nirkabel dilarang memperluas layanan *roaming*-nya ke kode area yang berbeda. Selain TelkomFlexi, Bakrie Telecom telah menyediakan layanan yang sama di wilayah Jakarta, Jawa dan Sumatera Utara.

Pada awal tahun 2004, PT Bimantara Citra Tbk. meluncurkan operator nirkabel baru bernama Mobile-8 yang menggunakan teknologi CDMA 2000 1x dan Evolution Data Optimized Technology. Mobile-8 telah menerima ijin berskala nasional untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi nirkabel dan bersaing dengan para operator GSM yang biasa dengan cara menarik para pelanggan selular yang baru dengan harga diskon sebagai keuntungan utamanya.

Sejak tahun 2005 dan 2006, banyak operator telekomunikasi Indonesia yang melaksanakan program perolehan pelanggan secara agresif dengan target meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing. Dengan menawarkan potongan harga, bonus dan tarif khusus, para operator berupaya membedakan layanannya dari layanan operator lainnya, terutama berdasarkan tarifnya. Persaingan ini mengakibatkan tarif menjadi terus menurun, dan dengan demikian kami yakin bahwa ARPU pelanggan selular terus mengalami penurunan untuk sebagian besar operator telekomunikasi Indonesia.

Selain ketatnya persaingan tarif jasa selular, beberapa operator telekomunikasi telah diberikan ijin untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi bergerak 3G. Kami yakin bahwa persaingan layanan 3G akan semakin ketat karena para operator telekomunikasi mulai memindahkan jaringannya ke pusat-pusat berpenduduk banyak. Saat ini, ada lima operator telekomunikasi yang memegang ijin layanan 3G, yaitu: Telkomsel, PT Hutchison Charoen Pokphand Telecommunication, PT Natrindo Selular, Excelcomindo dan Perusahaan. Pada tahun 2008, kami telah menyediakan layanan 3G di 19 kota di seluruh Indonesia dan kami telah mulai menawarkan layanan *wireless broadband*.

Pemerintah juga mengumumkan alokasi spektrum 800MHz dan memberikan ijin akses telepon tetap nirkabel berskala nasional kepada Bakrie Telecom dan Mobile-8.

Kami yakin bahwa rintangan untuk masuk ke industri jasa selular dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia saat ini cukup tinggi mengingat terbatasnya spektrum frekuensi yang tersedia, iklim permodalan yang tinggi, sulitnya memperoleh lahan untuk perluasan jaringan dan sudah terbentuknya pasar dari tiga pemain yang ada, yaitu kami, Telkomsel dan Excelcomindo. Namun demikian, kami mengantisipasi adanya peningkatan persaingan di dalam industri layanan selular dan akses telepon tetap nirkabel secara umum. Dalam menanggapi hal ini, kami bermaksud memfokuskan pengeluaran modal di masa mendatang untuk bisnis selular dan akses telepon tetap nirkabel dalam upaya meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan dan menyediakan berbagai layanan nilai tambah.

Jasa Telekomunikasi Telepon Tetap

Jasa telekomunikasi tetap kami meliputi layanan sambungan langsung jarak jauh dan internasional serta jasa akses telepon tetap nirkabel. Untuk tahun 2008, jasa telekomunikasi tetap memberikan kontribusi sebesar Rp1.744,7 milyar, atau 9,4%, kepada pendapatan operasional kami. Kami memperoleh pendapatan operasional dari jasa telekomunikasi tetap dari para operator lokal, dengan bagian terbesar dari Telkom, dan dari operator telekomunikasi asing. Dengan pengecualian terhadap pembayaran dari pelanggan selular, telepon nirkabel tetap dan jaringan tetap, kami tidak memperoleh pembayaran lainnya secara langsung dari para pelanggan untuk penggunaan jasa sambungan jarak jauh internasional. Pada tahun 2008, sebesar 5,2% dari pendapatan jasa telekomunikasi tetap kami berasal dari jumlah yang dibayarkan oleh Telkom dan operator lokal lainnya untuk panggilan keluar, sebesar 16,9% dari pendapatan tersebut berasal dari jumlah yang dibayarkan oleh operator selular dan sekitar 56,2% dari pendapatan tersebut berasal dari penyelesaian kewajiban bersih dengan operator telekomunikasi asing sehubungan dengan panggilan masuk dan keluar. Sisanya yaitu sebesar 21,7% dari pendapatan operasional telekomunikasi tetap kami berasal dari tagihan langsung untuk jasa-jasa khusus, seperti *calling card* dan pelanggan jaringan tetap. Angka-angka yang berkaitan dengan hal tersebut di atas untuk tahun 2007 adalah masing-masing sebesar 7,4%, 16,4%, 56,5% dan 19,7%.

Layanan-Layanan

Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh Internasional. Kami menyediakan berbagai jasa telekomunikasi suara internasional dan jasa telekomunikasi internasional baik *switched* maupun *non-switched*. Layanan *switched* memerlukan interkoneksi dengan PSTN atau fasilitas milik operator selular lainnya; sedangkan layanan *non-switched* dapat dilakukan melalui fasilitas transmisi kami tanpa perlu interkoneksi.

Melalui layanan "001" dan "008", saat ini Perusahaan menangani sebagian besar bisnis SLI di Indonesia. Akan tetapi, aturan duopoli di bidang bisnis SLI berakhir pada tanggal 1 Januari 2004, dimana ijin Telkom untuk menyelenggarakan layanan SLI mulai berlaku efektif. Terlebih lagi operator telekomunikasi lainnya dapat masuk ke bisnis SLI tanpa adanya kewajiban untuk membayar kompensasi ke operator telekomunikasi yang ada. Sebagai contoh, Bakrie Telecom diperkirakan akan meluncurkan SLI pada tahun 2009. Dalam mengantisipasi persaingan yang semakin meningkat sebagai akibat perubahan peraturan industri tersebut, pada bulan Maret 2005 kami meluncurkan program "FlatCall 016" dan terus berlanjut sampai kini sebagai produk baru yang ditujukan kepada para pelanggan di segmen pasar yang paling sensitif terhadap harga. Pada awal Januari 2007, dalam rangka mematuhi peraturan Pemerintah, kami mengganti kode akses menjadi 5 digit dan menamakan "FlatCall 01016". Produk "FlatCall 01016" menawarkan tarif yang bersaing untuk negara tujuan paling banyak dan menawarkan tarif VoIP biasa untuk negara-negara lainnya. Selama tahun 2008, kami terus memasarkan beberapa program di bawah "FlatCall 01016" untuk mempertahankan trafik percakapan untuk beberapa negara tujuan dan meningkatkan jumlah pelanggan kami.

Sambungan internasional kami disalurkan melalui salah satu dari lima *international gateway* kami. Dari *gateway* ini, layanan sambungan langsung jarak jauh internasional akan ditransfer via satelit atau kabel laut berdasarkan program routing yang telah ditetapkan, yang mana dibentuk berdasarkan kolaborasi dengan para operator telekomunikasi asing. Perusahaan asing yang menerima sambungan telepon melalui *international gateway* bertanggung jawab atas terminasi sambungan telepon ke pihak penerima mereka. Demikian juga halnya, apabila sambungan langsung jarak jauh internasional diterima di *gateway* kami akan dialihkan dari *gateway* ke tujuannya di dalam negeri melalui jaringan lokal Telkom, jaringan selular milik kami, jaringan tetap lokal milik kami atau salah satu operator selular lainnya dimana kami mengadakan perjanjian interkoneksi.

Untuk tahun 2008, pendapatan dari jasa panggilan internasional berjumlah Rp1.373,1 milyar.

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa data operasi untuk layanan sambungan langsung internasional untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2006		2007		2008	
	menit	% perubahan	menit	% perubahan	menit	% perubahan
	(dalam ribuan, kecuali persentase)					
Menit telepon masuk yang dibayar	980.471	21,3	1.236.604	26,1	1.484.450	20,0
Menit telepon keluar yang dibayar	153.824	(1,8)	296.891	93,0	473.992	59,7
Menit telepon masuk dan keluar yang dibayar	1.134.294	17,6	1.533.495	35,2	1.958.442	27,7
Rasio trafik telepon masuk dan keluar	6,37	-	4,17	-	3,13	-

Selama tahun 2007 dan 2008, sambungan telepon keluar internasional kami yang diukur berdasarkan menit yang dibayar, masing-masing naik sebesar 93,0% dan 59,7%, dibandingkan tahun sebelumnya, sementara di lain pihak sambungan telepon masuk internasional kami yang diukur berdasarkan menit yang dibayar, masing-masing naik sebesar 35,2% dan 20,0% pada periode yang sama. Sambungan telepon masuk dan keluar gabungan, yang juga diukur berdasarkan menit yang dibayar, masing-masing naik sebesar 35,2% dan 27,7% pada tahun 2007 dan 2008. Menurut kami, pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh strategi utama kami, yaitu memperluas jaringan dengan hati-hati untuk meningkatkan penjualan. Kami yakin bahwa semakin meningkatnya persaingan dari Telkom dan operator VoIP, yang beberapa di antaranya tidak memiliki ijin, akan mempengaruhi kegiatan usaha kami di masa mendatang.

Layanan Akses Telepon Tetap Nirkabel. Kami meluncurkan jasa akses telepon nirkabel tetap kami di tahun 2004 untuk mengembangkan bisnis telekomunikasi tetap kami dan untuk memperluas layanan selular kami. Dengan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x, jasa telepon nirkabel tetap kami menawarkan alternatif yang lebih ekonomis bagi pelanggan yang memerlukan pergerakan terbatas. Per tanggal 31 Desember 2008, layanan akses telepon tetap nirkabel kami, "StarOne," memiliki total basis pelanggan sebanyak 761.589, yang meliputi 80.227 pelanggan pasca bayar dan 681.362 pelangganan pra-bayar di 52 kota besar di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2008, total pendapatan dari layanan akses telepon tetap nirkabel adalah Rp244,3 milyar. Pada tahun 2008, kami mengeluarkan sekitar Rp151,5 milyar dari pengeluaran modal untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur CDMA 2000 1x. Pada tanggal 12 Desember 2006, Pemerintah memberikan ijin untuk dua kanal layanan akses telepon tetap nirkabel berskala nasional pada frekuensi 800MHz. Ijin ini menggantikan ijin akses telepon tetap nirkabel 1900MHz kami yang lama dan pada akhir tahun 2007 kami melakukan migrasi frekuensi CDMA dari 1900MHz ke frekuensi baru 800MHz di wilayah Jakarta. Kami memperluas layanan StarOne ke 52 kota pada bulan Desember 2008.

Sambungan Lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh Domestik. Kami telah meluncurkan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik dari titik akses Indosat seperti "StarOne" dan "I-Phone" di bulan Oktober 2005. Kami saat ini telah memiliki cakupan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh di 52 kota besar di Indonesia.

Pelanggan dan Pemasaran

Kami telah melaksanakan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan layanan bagi para pelanggan telepon tetap kami. Strategi pemasaran kami berfokus pada: (i) memperkuat strategi harga bertahap kami melalui pelaksanaan program "FlatCall 01016" untuk bersaing dengan layanan VoIP; (ii) memperluas pasar dan mempertahankan pelanggan kami melalui berbagai inisiatif; (iii) mengadakan komitmen volume trafik masuk dari operator telekomunikasi asing; dan (iv) memperluas cakupan layanan akses telepon tetap nirkabel. Kami biasanya mengadakan kampanye iklan berskala nasional dengan menggunakan media televisi, surat kabar, majalah, situs dan radio untuk meningkatkan kepedulian merek di antara pelanggan bisnis dan retail. Kami juga telah mendirikan dan memperkuat kantor penjualan regional di banyak lokasi di seluruh Indonesia.

Kami mempekerjakan tenaga penjualan khusus, termasuk kelompok penjualan yang berfokus pada 500 pelanggan terbesar kami, yaitu hotel, perusahaan besar, kantor pemerintah dan kedutaan besar. Kami mengadakan program loyalitas pelanggan yang memberikan insentif bagi para pengguna reguler. Selain itu, kami berupaya untuk memperluas basis pelanggan dengan cara mengadakan promosi bersama dengan perusahaan telekomunikasi internasional lainnya untuk mempromosikan layanan kami. Kami berupaya keras untuk memberikan layanan

berkualitas tinggi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tidak ada satu pelanggan pun yang secara individual memberikan pendapatan operasional jasa telekomunikasi tetap dalam jumlah lebih dari 1,0%.

Pada tahun 2008, sekitar 39,0% dari menit sambungan telepon keluar langsung jarak jauh internasional (termasuk panggilan yang dilakukan melalui "Flatcall 01016") berasal dari wilayah Jakarta, yang diikuti oleh Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara, yang secara bersama-sama merupakan 27,0% dari sambungan telepon keluar langsung jarak jauh internasional.

Kami membuat database kepemilikan yang memuat informasi pelanggan untuk dapat menganalisa preferensi pelanggan dan pola penggunaan serta mengembangkan pemasaran dan produk yang disesuaikan dengan pelanggan. Kami mengadakan sendiri riset pasar dan juga menunjuk konsultan untuk melakukan riset yang lebih luas tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan.

Struktur Tarif

Tarif. Pada tanggal 1 Januari 2007, Pemerintah memberlakukan rumusan tarif retail yang baru untuk para operator telekomuånikasi telepon tetap. Rumusan tarif mengatur tarif tertinggi dan digunakan untuk menghitung biaya bulanan dan penggunaan untuk sambungan telepon lokal, jarak jauh dan internasional. Pada tanggal 30 April 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 15/2008 yang menggantikan Peraturan Menteri No. 12/2006 dan menetapkan batas maksimum tarif interkoneksi dan mewajibkan operator untuk menghitung batas maksimum tarif dengan menggunakan formula berbasis biaya (*cost-based formula*). Tarif sambungan langsung jarak jauh internasional kami belum berubah, dan kami bermaksud memberlakukan tarif sambungan langsung jarak jauh internasional berdasarkan peraturan yang lama yang berdasarkan enam zona tarif untuk sambungan telepon tujuan.

Penyelenggaraan jasa sambungan langsung jarak jauh internasional antara dua negara biasanya dibentuk antar para perusahaan telekomunikasi secara bilateral. Jumlah yang dibayarkan kepada kami oleh operator telekomunikasi internasional untuk telepon masuk secara historis telah ditentukan dengan memperhitungkan tarif yang dinegosiasikan oleh kami dan para perusahaan internasional tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk tertentu dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Sejak tahun 2003, kami mulai mengganti sistem *accounting rate* dengan sistem *market termination rate-based pricing* dengan rekan penyelenggara telekomunikasi asing terbesar kami, berdasarkan mana kami telah menyetujui penggunaan tarif *asymmetric rates* untuk telepon masuk dan keluar. Kami memelihara koneksi langsung dengan 64 operator telekomunikasi asing dan menggunakan sistem *market termination rate-based pricing* dengan 62 operator telekomunikasi asing tersebut di 40 negara. Dalam sistem *accounting rate*, yang masih kami terapkan kepada 2 operator telekomunikasi asing (utamanya untuk negara yang belum maju atau negara yang hanya memiliki satu operator telekomunikasi), tarif per menit untuk panggilan masuk dan panggilan keluar adalah sama. Perjanjian tersebut mengatur ketentuan-ketentuan pembayaran yang harus dilakukan oleh kami kepada para operator telekomunikasi asing untuk penggunaan fasilitas mereka dalam upaya menghubungkan layanan sambungan langsung jarak jauh internasional yang ditagih di Indonesia, dan juga pembayaran yang harus dilakukan oleh para operator telekomunikasi asing kepada kami untuk penggunaan fasilitas kami (dan jaringan lokal Indonesia) dalam upaya menghubungkan layanan sambungan langsung jarak jauh internasional yang ditagih di luar negeri.

Di dalam praktek antar para perusahaan telekomunikasi, biaya yang harus dibayar berkenaan dengan penggunaan jaringan luar negeri harus dicatat, ditagih dan disampaikan oleh perusahaan telekomunikasi di negara dimana sambungan telepon tersebut ditagih. Berdasarkan tarif yang dinegosiasikan dengan masing-masing operator

telekomunikasi asing, kami melakukan pembayaran kepada perusahaan untuk trafik sambungan telepon keluar yang ditagih di Indonesia, dan kami menerima pembayaran dari perusahaan tersebut untuk trafik sambungan telepon masuk yang ditagih di luar negeri. Penyelesaian pembayaran antara perusahaan biasanya dilakukan setiap tiga bulan secara bersih (*net*). Perusahaan koresponden terbesar kami berlokasi di Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang dan Hong Kong.

Para penyelenggara layanan VoIP menentukan biaya perolehan pembayaran mereka sendiri, dan masing-masing penyelenggara harus bernegosiasi dengan penyelenggara jaringan yang terkait untuk biaya interkoneksi. Akan tetapi, perhitungan biaya interkoneksi harus berdasarkan peraturan, dimana pembayarannya harus ditentukan oleh Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi/*Telecommunications Traffic Clearing System* yang sampai saat ini belum beroperasi. Sehingga dengan demikian, kami mengadakan perjanjian dengan Telkom sebagai penyelenggara jaringan untuk interkonesi VoIP.

Interkoneksi dengan Jaringan Domestik. Meskipun kami menyediakan *international gateway* untuk sambungan telepon keluar dari dan telepon masuk ke Indonesia, semua layanan sambungan langsung jarak jauh internasional harus berakhir pada salah satu jaringan telepon tetap domestik atau selular. Pemerintah telah menetapkan biaya interkoneksi layanan sambungan langsung jarak jauh internasional yang melewati jaringan telepon tetap domestik dan akses jaringan tetap nirkabel. Kami memiliki perjanjian interkoneksi khusus dengan para operator yang melakukan interkoneksi langsung dengan *international gateway* milik kami. Perjanjian interkoneksi kami dengan para operator telekomunikasi tersebut telah diubah agar sesuai dengan peraturan interkoneksi baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada pertengahan tahun 2006 dan berlaku sejak bulan Januari 2007.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations). Pada bulan September 2005, Pemerintah mengumumkan perubahan tarif Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligations atau USO dari Rp750 untuk setiap sambungan telepon masuk ataupun keluar yang berhasil menjadi 0,75% dari jumlah pendapatan usaha kotor dikurangi biaya interkoneksi yang dibayar kepada perusahaan telekomunikasi lainnya dan piutang macet. Sejak diumumkannya perubahan tersebut, Pemerintah terus menyusun penjelasan peraturan untuk pelaksanaan lebih lanjut dari tarif USO. Oleh karena tidak adanya kepastian mengenai pihak penerima pembayaran USO di Pemerintahan, maka kami mencadangkan dana untuk pembayaran USO tersebut dan belum melakukan pembayaran pada tahun 2005. Pada awal tahun 2006, setelah diberlakukannya peraturan Pemerintah, kami mulai melakukan pembayaran tarif USO yang berkaitan dengan penggunaan tahun 2005 dari dana yang telah dicadangkan tersebut. Pada bulan Januari 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7/2009 yang meningkatkan tarif USO dari 0,75% dari pendapatan usaha kotor menjadi 1,25% dari pendapatan usaha kotor. Sejak tahun 2007, kami melakukan pembayaran secara tiga bulanan untuk tarif USO.

Tagihan Pelanggan

Para operator domestik mengendalikan proses tagihan dan penagihan dari panggilan jarak jauh internasional yang dilakukan melalui jaringan domestik. Operator domestik akan memotong biaya interkoneksi yang terhutang kepadanya dari jumlah uang yang diperoleh dan membayar sisanya dalam mata uang Rupiah kepada kami (tanpa bunga) dalam waktu paling lambat 25 hari setelah perolehan pembayaran dari pelanggan di Indonesia. Siklus perolehan pembayaran untuk sebagian besar operator domestik adalah sekitar 15 hari. Kami bertanggung jawab atas penerbitan dan pengiriman informasi tagihan kepada para operator domestik. Informasi ini biasanya dikirimkan dalam waktu satu hari setelah berakhirnya periode 30 hari sebelumnya dan selanjutnya pelanggan akan ditagih oleh para operator domestik sekitar lima hari setelah menerima informasi tagihan tersebut dari

kami, hal ini menjadikan siklus perolehan pembayaran kurang lebih 50 sampai dengan 80 hari. Untuk keperluan laporan keuangan, kami membukukan pendapatan per bulanan berdasarkan catatan trafik kami sendiri. Kami melakukan penagihan kepada operator selular dalam negeri pada pertengahan bulan berikutnya dan mewajibkan pembayaran pada akhir bulan. Oleh sebab itu, siklus penagihan yang normal untuk operator selular domestik kami adalah kurang lebih 20 sampai dengan 60 hari.

Sehubungan dengan sambungan telepon masuk yang berakhir pada jaringan domestik, kami membayar biaya interkoneksi kepada operator yang bersangkutan. Kami melakukan pembayaran tersebut dalam waktu 20 sampai dengan 60 hari dengan cara memperhitungkan pendapatan dari panggilan keluar kami. Penyelesaian pembayaran dari para operator telekomunikasi asing umumnya dilakukan dalam mata uang Dolar AS yang disetor ke Indonesia, dan jumlah pembayaran biaya interkoneksi yang harus dibayar oleh kami kepada para operator jaringan domestik dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Penggunaan jasa akses telepon nirkabel dan panggilan jarak jauh oleh pelanggan dihitung sejak awal bulan sampai dengan akhir bulan. Tagihan pelanggan akan diterbitkan pada awal dari bulan berikutnya dan diselesaikan pada hari kelima dari bulan tersebut. Tagihan akan diterima oleh pelanggan tidak lebih dari hari kesepuluh dari bulan tersebut dan pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal dua puluh pada setiap bulannya. Untuk jasa FWA, kami akan memblokir pelanggan apabila mereka belum melakukan pembayaran tagihan yang jatuh tempo pada tanggal dua puluh dua pada setiap bulannya. Bagi para pelanggan yang belum membayar tagihannya pada akhir bulan, kami akan menutup nomor tersebut sehingga pelanggan tidak dapat melakukan atau menerima panggilan. Kami akan memutuskan jasa layanan kami secara permanen dan menutup rekening pelanggan yang belum membayar tagihan mereka pada akhir bulan berikutnya. Untuk layanan SLJJ, kami akan memblokir pelanggan yang belum membayar tagihannya sampai dengan akhir bulan tersebut. Apabila pelanggan tersebut belum membayar tagihannya pada akhir bulan kedua, maka kami akan memblokir panggilan masuk kepada pelanggan tersebut. Kami akan memutuskan layanan dan membatalkan rekening pelanggan yang belum membayar tagihannya sampai dengan 90 hari sejak tanggal tagihan dikeluarkan tersebut.

Persaingan

Kami tidak lagi menjadi satu-satunya penyelenggara jasa SLI (yaitu, non-VoIP) yang sah di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2004, ijin penyelenggaraan yang diberikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika kepada Telkom untuk menyelenggarakan layanan SLI berlaku efektif. Ijin tersebut meliputi hak untuk menggunakan kode akses SLI "007" guna masuk ke dalam pasar layanan sambungan langsung jarak jauh internasional. Pemerintah juga akan mengeluarkan ijin baru untuk jasa SLI kepada operator telekomunikasi lainnya dalam rangka meningkatkan persaingan. Sebagai contoh, di tahun 2008 Pemerintah telah mengeluarkan ijin baru untuk jasa SLI kepada Bakrie Telecom. Sementara itu, Telkom tidak lagi melakukan praktek monopoli dalam penyelenggaraan jasa SLJJ. Pada April 2008, Perusahaan dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ untuk masing-masing pelanggan kami di Balikpapan. Berdasarkan perjanjian ini, pelanggan jaringan tetap telkom dapat menggunakan 01016 untuk mengakses jaringan SLJJ kami dan pelanggan FWA kami dapat menggunakan 01017 untuk mengakses jaringan Telkom. Pelaksanaan kode akses SLJJ yang baru telah meningkatkan persaingan dengan cara menawarkan lebih banyak pilihan jasa SLJJ kepada para pelanggan, termasuk dari Telkom. Sebagai tambahan, pembukaan kode akses SLJJ baru ini diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan mengurangi kerja sama antara para pelaku industri saat ini, yang dapat menyebabkan antara lain, berkurangnya marjin dan pendapatan usaha, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kami.

Peraturan Indonesia mengharuskan perlakuan akses yang sama ke semua fasilitas telekomunikasi domestik bagi

semua operator. Dengan demikian, kami memiliki akses yang sama ke fasilitas domestik Telkom. Peraturan yang berlaku saat ini memastikan adanya perlakuan akses yang sama ke pelanggan SLI bagi semua pesaing berdasarkan pilihan panggilan melalui kode-kode akses yang ditentukan.

Sejak tahun 2001, pasar jasa SLI tradisional menjadi semakin ketat, dengan adanya teknologi VoIP dan masuknya pemain baru ke dalam pasar, baik untuk trafik layanan SLI masuk maupun keluar. Kami memasuki pasar VoIP pada akhir tahun 2002. Bisnis VoIP kami meningkat secara tajam dari 10,4 juta menit di tahun 2003 menjadi 371,3 juta menit di tahun 2008.

Kami juga menghadapi persaingan dari para penyelenggara jasa akses telepon tetap nirkabel lainnya. Pada bulan Mei 2003, Telkom meluncurkan TelkomFlexi, suatu layanan CDMA 2000 di wilayah Jakarta. Saat ini, Telkom telah menyediakan layanan ini di lebih dari 250 kota di Indonesia. TelkomFlexi adalah operator akses telepon tetap nirkabel terbesar, yang diikuti oleh Bakrie Telecom dan kami. Kami perkirakan persaingan di bisnis ini akan terus meningkat seiring dengan dikeluarkannya ijin-ijin baru untuk penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel berskala nasional kepada Bakrie Telecom dan Mobile-8. Dengan diberikannya ijin ini, Bakrie Telecom memperluas jasa akses telepon tetap nirkabelnya ke lebih dari 30 kota di Indonesia.

Jasa MIDI

Kami mengakui adanya potensi pertumbuhan yang pesat di sektor layanan data dan jaringan lainnya termasuk layanan berbasis Internet dan semakin pentingnya layanan tersebut bagi strategi bisnis kami secara keseluruhan, sehingga kami memusatkan perhatian yang besar pada segmen bisnis ini. Produk dan jasa yang kami tawarkan dalam segmen bisnis ini meliputi layanan digital *leased line broadband and narrowband* berbasis *point-to-point* domestik dan internasional yang berkecepatan tinggi, layanan *packet-switching* berkinerja tinggi dan penyewaan transponder satelit dan jasa penyiaran. Pada tahun 2008, layanan MIDI menghasilkan Rp2.735,5 milyar atau 14,7% dari total pendapatan usaha konsolidasi Perusahaan. Melalui Peraturan DJPT No. 102/2007 tanggal 9 April 2007, Pemerintah mengumumkan bahwa Telkom adalah operator yang dominan untuk *leased circuits*. Sebagai akibat dari peraturan tersebut, kami percaya bahwa Telkom akan menjadi subyek dari persetujuan-persetujuan yang disyaratkan dalam peraturan tersebut sehubungan dengan posisi dominan yang dimilikinya sedangkan kami dapat mengajukan tarif baru tanpa disyaratkan untuk memperoleh persetujuan Pemerintah.

Jasa-Jasa

World Link, Direct Link dan Domestic Link. World Link adalah IPLC yang menyewakan jasa *leased line* antara lain sambungan internasional untuk sirkit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* dan memberikan sambungan berkecepatan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2Mbps untuk *narrowband* atau 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. *Direct Link* adalah jasa *leased line* melalui satelit yang berbasis *point to multipoint* dan memberikan kecepatan sambungan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2Mbps untuk *narrowband*. *Domestic Link* adalah jasa *leased line* domestik berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point*, dan memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. Kedua jasa ini menyediakan sirkit data digital berkualitas dan berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* dan memberikan kecepatan dari 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. Sebagian besar pelanggan *broadband World Link* adalah para penyelenggara telekomunikasi yang membutuhkan *dedicated broadband international data links*, dan pelanggan *narrowband World Link* kami sebagian besar terdiri dari para pengguna perusahaan yang berlangganan jasa *World Link* untuk keperluan

internal mereka. Koneksi VSAT digunakan untuk *World Link* dan pengguna *leased line* lainnya yang berlokasi di daerah yang tidak sepenuhnya dilewati jaringan domestik. Pelanggan *National Link broadband* kami di pasar domestik meliputi penyedia jasa telekomunikasi yang memerlukan sambungan data *broadband* domestik yang berdedikasi dan pelanggan *narrowband Domestic Link* kami terutama terdiri dari pelanggan korporasi yang memakai untuk kepentingan sendiri. Pada tahun 2008, *World Link*, *Direct Link* dan *Domestic Link* menghasilkan Rp688,3 milyar atau 25,2% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami.

IP VPN. Kami menyediakan jasa IP VPN yang memberikan para pelanggan konektivitas yang bersifat *multipoint*, interkoneksi LAN dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu aplikasi perhitungan yang rumit.

Frame Relay. Kami menyediakan jasa *frame relay* baik internasional maupun domestik, suatu teknologi *leased packet* berkecepatan tinggi, terutama melalui Indosat dan Lintasarta, yang memberikan para pelanggannya konektivitas yang bersifat multilateral, interkoneksi LAN dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu aplikasi perhitungan yang rumit. *Framed message* membuat transmisi data berlangsung dengan kecepatan yang tinggi dari koneksi tunggal yang sederhana untuk mencapai beberapa tujuan domestik ataupun internasional. Jasa *frame relay* dapat disesuaikan menurut keperluan tempat individu agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna atas *dedicated line* melalui jasa terestrial atau satelit *(VSAT frame relay)*. Per tanggal 31 Desember 2008, jasa *frame relay* domestik Lintasarta tersedia di 67 kota besar di Indonesia dan jasa *frame relay* internasional Indosat tersedia di lebih dari 225 negara di dunia dengan bekerja sama dengan ACASIA, C&W, dan NTT. Kami membukukan pendapatan usaha sebesar Rp315,8 milyar dari jasa ini di tahun 2008 atau 11,5% dari pendapatan usaha jasa MIDI kami di tahun 2008.

MPLS dan Metro Ethernet. MPLS dan Metro Ethernet adalah layanan *leased line* domestik berdasarkan IP. MPLS menyediakan sirkit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* dan memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45Mbps dan 155Mbps untuk *broadband*. Metro Ethernet memberikan *bandwidth* berkecepatan tinggi, dan kecepatan *line port* sebesar 10Mbps, 100Mbps dan 1Gbps dan basis Ethernet dengan kenaikan *bandwidth* sebesar 1Mbps yang dijamin.

Layanan Satelit. Kami menyewakan kapasitas *transponder* satelit Palapa-C2 kami yang berada di orbit di wilyah Asia-Pasifik bagi perusahaan penyiaran dan operator telekomunikasi. Indonesia memiliki pasar televisi yang besar dimana sejumlah perusahaan penyiaran domestik swasta dan *programer* internasional bersaing dengan perusahaan penyiaran milik negara. Banyak perusahaan penyiaran baik domestik dan internasional menyewa kapasitas *transponder* satelit kami. Kami mengadakan perjanjian sewa *transponder* satelit Palapa C-2 yang berbeda-beda jangka waktunya, akan tetapi umumnya berakhir dalam waktu dua sampai dengan lima tahun sejak tanggal berlakunya sewa. Sewa *transponder* dapat diakhiri karena adanya pelanggaran perjanjian sewa dan selain itu, sebagian besar dari perjanjian sewa mengatur bahwa pihak penyewa dapat mengakhiri sewa dengan pemberitahuan (umumnya enam sampai dengan 12 bulan) dengan membayar biaya pengakhiran perjanjian yang besarnya sama dengan suatu persentase dari uang sewa yang seharusnya dibayarkan apabila sewa *transponder* tidak diakhiri.

Kami juga menyediakan berbagai jasa tambahan lainnya, termasuk penggunaan sesekali atas jasa TV, indosat TV link, telemetri, jasa *tracking & control*, jasa jaringan privat, akses Internet dan multimedia dan *video conferencing*. Kami perkirakan permintaan atas jasa satelit akan terus meningkat, terutama disebabkan oleh semakin berkembangnya jasa derivatif satelit (layanan digital "Bouquet" dan "PalapaNet" kami). Tekanan tarif diperkirakan akan melunak sebagai konsekuensi dari meningkatnya permintaan. Pada tahun 2008, jasa satelit menghasilkan sekitar Rp96,3 milyar atau 3,5% dari pendapatan usaha jasa MIDI.

Layanan Internet. Kami menyediakan jasa *Internet Network Provider* bagi perusahaan ISP dan Jasa Akses Internet bagi para pelanggan pengguna akhir dan perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2008, kami mengoperasikan tiga ISP yang mengkontribusi pendapatan sebesar Rp703,9 milyar di tahun 2008. IMM menyediakan jasa *Internet dedicated* dan *dial-up*, dan per tanggal 31 Desember 2008, IMM memiliki basis pelanggan Internet sekitar 14.807 pelanggan, yang kami perkirakan mewakili lebih dari 88,8% dan 11,2% masing-masing di pasar *Internet dial-up* dan *Internet dedicated access* di Indonesia. Dalam mengantisipasi meningkatnya persaingan di segmen bisnis Internet, IMM telah mengembangkan strategi untuk memperluas bisnisnya dengan cara membangun *Internet protocol backbone* di wilayah-wilayah yang berpotensi berkembang, menempatkan jasa *public hotspot*, mendirikan pusat layanan pelanggan, mengembangkan jaringannya melalui investasi bersama dengan menggunakan teknologi *hybrid fiber* dan *coaxial* serta memperbaiki proses bisnisnya.

Lintasarta menawarkan kepada para pelanggannya "IdOLA" untuk penggunaan perorangan dan "LintasartaNet" untuk pelanggan perusahaan. Dengan IdOLA dan LintasartaNet, para pelanggan dapat mengakses informasi dari berbagai penyelenggara content di Indonesia dan di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan LintasartaNet untuk promosi Internet, alokasi software dan komputer, usaha koperasi atau transaksi perdagangan domestik dan internasional. Pada tahun 2008, pendapatan jasa Internet *dial-up* Lintasarta meningkat sebanyak 604,7%, terutama disebabkan oleh strategi promosi di tahun 2008. Pendapatan *internet dedicated services* juga meningkat sampai dengan 32,0% yang terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan jasa internet yang berdedikasi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, kami membukukan 25,7% dari pendapatan usaha jasa MIDI, dari jasa Internet.

VSAT Net/IP dan *VSAT Link*. Layanan *VSAT Net/IP* dan *VSAT Link* Lintasarta merupakan sistem data *networking* berbasis satelit. VSAT Net/IP menghubungkan dan mengendalikan trafik data antar lokasi yang berjauhan, yang dapat membangun data secara cepat untuk para pelanggan jaringan yang trafiknya rendah sampai dengan menengah, seperti di sektor jasa keuangan, transportasi, perdagangan dan distribusi. VSAT Link menyediakan transmisi digital berbasis *point-to-point* untuk lokasi yang jauh oleh perusahaan dengan trafik menengah sampai padat seperti pabrik, pertambangan dan industri jasa keuangan.

Pelanggan dan Pemasaran

Kegiatan pemasaran untuk layanan MIDI meliputi presentasi kelompok, pengiriman pos langsung, promosi dengan mitra, program mempertahankan pelanggan dan iklan di publikasi dan media cetak. Masing-masing unit usaha berupaya mempertahankan hubungan pelanggan melalui kegiatan seperti forum pengguna, seminar pelatihan, kunjungan dan pertemuan informal dengan para pelanggan. Lintasarta berfokus pada perluasan pangsa pasarnya di segmen industri di luar kompetensi utamanya yaitu di bidang perbankan dan keuangan, mengingat kemungkinan adanya konsolidasi dan restrukturisasi industri-industri tersebut di Indonesia. Selain itu, Lintasarta telah semakin berfokus pada upaya penjualan dan pemasarannya pada perusahaan berskala kecil sampai menengah atau UKM, dengan mengemas ulang produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Lintasarta sedang memperluas cakupan geografis produk dan jasanya yang sudah ada dalam rangka menghadapi permintaan yang meningkat atas infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil sebagai dampak dari perkembangan politik Indonesia, di antaranya pertumbuhan otonomi daerah.

Kami mendukung para pelanggan kami melalui staf lokal, *24-hour help desk* dan manajemen jaringan *real-time* terpadu. Pada bulan April 2000, Lintasarta memperoleh sertifikasi ISO 9002 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* dan VSAT. Pada bulan Januari 2002, kami memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* VSAT, yang membuktikan komitmen kami terhadap kepuasan pelanggan

dan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, Frontier dan majalah Marketing memberikan penghargaan "Top Brand Award" untuk kategori ISP kepada Perusahaan pada tahun 2005, 2006, dan 2007.

Struktur Tarif

Para pelanggan berbagai layanan MIDI kami dikenakan biaya berdasarkan jenis produk dan jasa yang digunakan, sektor industri mereka, lokasi geografis dan lamanya kontrak (yang umumnya berkisar satu sampai tiga tahun). Tarif layanan ini biasanya meliputi komponen-komponen sebagai berikut: biaya instalasi awal; biaya bulanan (berdasarkan lokasi dan kecepatan akses); biaya per transaksi (berdasarkan volume, waktu dan/atau jarak yang dilalui untuk trafik jaringan); dan biaya-biaya jasa lainnya, seperti konsultasi atau manajemen proyek.
Tarif sewa *transponder* satelit untuk penyewa internasional dinegosiasikan secara sendiri-sendiri dengan pelanggan dan bergantung pada persediaan dan permintaan jasa di wilayah yang dicakup oleh satelit Palapa-C2. Sewa untuk luar negeri kami rata-rata mencapai US$1,04 juta per tahun untuk *transponder* yang penuh. Beberapa sewa untuk luar negeri juga mengikuti faktor kenaikan tahunan yang berkisar antara 2,5% sampai dengan 10,0%. Hampir semua pembayaran sewa untuk luar negeri dilakukan setiap tiga bulan di muka dalam mata uang Dolar AS dan mata uang lainnya yang lazim digunakan. Departemen Komunikasi dan Informatika mengatur tarif yang dapat dikenakan untuk sewa *transponder* satelit bagi para pelanggan domestik. Berdasarkan peraturan Pemerintah, maksimum uang sewa tahunan untuk *transponder C-band* adalah US$1.4 juta; untuk penggunaan sesekali, tarif rata-ratanya adalah US$16 per menit berdasarkan durasi penggunaan.

Persaingan

Para penyelenggara jasa komunikasi data di Indonesia terutama bersaing dalam hal harga, ragam jasa yang disediakan dan kualitas jasa pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di antara para penyelenggara jasa komunikasi data semakin meningkat terutama karena dikeluarkannya ijin-ijin baru sebagai dampak dari deregulasi di sektor industri telekomunikasi Indonesia. Kami perkirakan persaingan akan terus semakin ketat. Menurut kami pesaing utama kami adalah Primacom dan Citra Sari Makmur untuk jasa VSAT, dan Citra Sari Makmur, Telkom, Excelcomindo dan Indonesia Comnet Plus (Icon+) untuk jasa *leased line*.

Sehubungan dengan jasa nilai tambah yang berkaitan dengan Internet, kami menghadapi persaingan yang ketat dan semakin meningkat dari Telkom dan ISP lainnya dengan bertambahnya ijin-ijin baru yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, dan dahulu oleh Departemen Perhubungan. ISP di Indonesia bersaing dalam hal kualitas jaringan, harga dan cakupan jaringan.

Oleh karena kondisi pasar menuntut kecepatan yang lebih tinggi dengan harga yang terjangkau, banyak penyedia *bandwidth* yang mulai melakukan investasi besar-besaran dalam rangka membangun infrastruktur yang canggih dengan menggunakan teknologi baru seperti *"Dense Wavelength Division Multiplrexing"* atau DWDM. Teknologi DWDM telah memberikan ancaman persaingan bagi layanan usaha kami karena infrastruktur tersebut memungkinkan penyedia *bandwidth* untuk memberikan kapasitas *bandwidth* yang lebih dengan biaya yang lebih efisien. Industri *bandwidth* telah memberikan tantangan dalam beberapa tahun terakhir dan sebagai hasilnya para operator baru seperti Moratel dan Matrix Cable System telah membangun kabel internasional di semester kedua tahun 2008 yang menghubungkan Indonesia dan Singapura.

Perusahaan-perusahaan di sektor bisnis satelit terutama bersaing dalam hal kekuatan cakupan, penawaran produk dan tarif. Umumnya, tarif layanan bergantung pada kombinasi dari kekuatan dan cakupan. Dalam beberapa

tahun terakhir ini, persaingan di sektor bisnis satelit di wilayah Asia-Pasifik semakin meningkat. Pengoperasian satelit terutama meliputi sewa *transponder* untuk perusahaan penyiaran dan operator layanan VSAT, selular dan SLI dan ISP. Kami menghadapi persaingan dari penyelenggara jasa domestik dan asing di masing-masing bidang ini. Dalam menyewakan *transponder* kami di satelit Palapa-C2, kami bersaing sangat ketat di Indonesia dengan PT Pasifik Satelit Nusantara atau Pasifik Satelit Nusantara, dan Telkom. Pasifik Satelit Nusantara juga memiliki *transponder* pada Mabuhay Philippines Satellite, yang digunakan terutama untuk jasa penyiaran televisi. Telkom saat ini mengoperasikan satelitnya sendiri (Telkom dan Palapa B4) dan stasiun bumi, terutama untuk menyediakan hubungan transmisi backbone untuk jaringannya. Telkom juga menyewakan kapasitas satelit dan menyediakan layanan stasiun bumi satelit *uplinking* dan *downlinking* kepada para pengguna domestik dan internasional. Satelit swasta lainnya yang ada dalam pasar penyiaran dalam wilayah cakupan satelit Palapa adalah AsiaSat-1, AsiaSat-2, AsiaSat-4, AsiaSat-35, Apstar-1, Apstar-2R, ThaiCom 3, PanAmSat-4 dan PanAmSat-7. APT Satellite yang mengoperasikan satelit Apstar, dan Shin Satellite PCL yang mengoperasikan satelit ThaiCom, juga bersaing secara langsung dengan kami di dalam pasar regional Asia. Pada tahun 2005, Excelcomindo mulai menawarkan layanan MPLS kepada para pelanggan perusahaannya.

Selain itu, dengan meningkatnya popularitas televisi *Direct-To-Home* atau DTH di antara perusahaan-perusahaan penyiaran nasional, bisnis satelit kami akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan diluncurkannya satelit-satelit regional yang baru dan berkemampuan tinggi. DTH adalah penerimaan program satelit dengan piringan satelit/*dish* tersendiri yang ditempatkan pada masing-masing rumah. Perusahaan penyiaran nasional berupaya memperoleh ijin DTH agar dapat menyediakan jasa penyiaran yang berskala nasional di Indonesia. DTH memungkinkan para perusahaan penyiaran untuk menyalurkan isi program mereka tanpa menggunakan dukungan jaringan kami. Oleh karena teknologi bergerak ke arah "all IP" dan meningkatnya permintaan atas jasa yang berbasis IP karena keuntungan-keuntungannya yang melebihi jaringan yang ada, kami menargetkan untuk mengerahkan suatu jaringan di masa mendatang agar jasa berbasis IP ini dapat tersedia secara luas di berbagai wilayah. Pada tahun 2008, kami telah selesai membangun *Disaster Recovery Center* atau DRC di Jatiluhur bagi para pelanggan perusahaan agar mereka dapat memiliki *data back-up* untuk mengamankan dan melindungi informasi bisnis mereka.

Jasa-Jasa Lainnya

Kami juga menyediakan jasa teleks dan telegram internasional, jasa *global mobile* dengan menggunakan sistem Inmarsat Mini M, dan jasa yang bersifat pendidikan lainnya. Pada tahun 2004, kami membukukan pendapatan dari jasa-jasa ini, terutama dari penjualan *software* Sisindosat. Dimulai sejak tahun 2005, dan oleh karena penjualan Sisindosat, pendapatan dari jasa-jasa lainnya dinyatakan sebagai pendapatan layanan MIDI.

Fasilitas dan Infrastruktur

Berikut ini adalah pembahasan mengenai jaringan SLI, jaringan selular serta fasilitas dan infrastruktur komunikasi lainnya milik kami, termasuk milik anak perusahaan utama kami yang beroperasi.

Jaringan Selular

Kami memiliki ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang memberikan hak untuk menyelenggarakan jasa selular di Indonesia berskala nasional untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Komponen-komponen utama dari jaringan selular kami adalah sebagai berikut:

- *base transceiver/Node B stations*: terdiri dari *transmitter* dan *receiver* dan berfungsi sebagai jembatan antara para pengguna selular dalam satu *cell* dan *mobile switching centers* melalui *base station controllers* dan *radio network controllers*;

- *base station controllers/radio network controllers*: merupakan alat untuk menghubungkan ke dan mengendalikan *base station* dalam setiap *cell site*;

- *mobile switching centers*: pusat yang mengendalikan *base station controllers* dan yang melakukan *routing* sambungan telepon; dan

- *transmission lines*: sambungan yang menghubungkan *mobile switching centers, base station controllers, base stations* dan PSTN.

Jaringan selular kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 10 MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 900 GSM, *bandwidth* frekuensi 20MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 1800 DCS dan 5MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 800 WCDMA. Berikut adalah tabel yang memuat beberapa informasi tentang jaringan selular kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2006	2007	2008
Base transceiver stations	6.942	9.960	12.677
Node B stations (3G BTS)	279	800	1.485
Total BTS (termasuk 2G dan 3G)	7.221	10.760	14.162
Base station controllers	177	226	279
Mobile switching centers	49	56	73
Radio network controllers	2	12	16
Media gateways	2	24	54

Kami membeli perangkat telekomunikasi selular kami terutama dari Alcatel, Ericsson, Nokia, Siemens dan Huawei. Jaringan kami merupakan sistem terpadu yang menggunakan perangkat switching, perangkat cell site dan transmisi jaringan dari *point-to-point microwave radio*. Sebagian besar *cell sites* dan *radio base stations* kami berlokasi di atau pada gedung atau tanah kosong yang kami miliki, atau kami sewa yang dinegosiasikan sendiri-sendiri untuk jangka waktu umumnya berkisar lima sampai dengan dua puluh tahun.

Jaringan Telepon Tetap

Kami menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon tetap dan telah membangun jaringan telekomunikasi telepon tetap yang terdiri dari enam *international gateway* yang disediakan oleh sirkit satelit, kabel laut dan transmisi *microwave*. Pada akhir tahun 2008, kami menyediakan jasa telepon tetap nirkabel di 52 kota di Indonesia.

International Gateways. Untuk bisnis sambungan langsung jarak jauh internasional, kami mengoperasikannya dengan menggunakan enam *gateway*, tiga *gateway* di Jakarta, dan masing-masing satu *gateway* di Surabaya,

Medan dan Batam, yang menyediakan semua koneksi layanan kami ke jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami. Kami membeli perangkat *gateway-switching* dari Lucent Technologies, Inc. dan Siemens.

Per tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki kapasitas *bandwidth* internasional sebesar 1.253,50 Mbps untuk suara dan 8.436,49 Mbps untuk transmisi data. Semua tujuan kami terkoneksi secara digital. *Bandwidth* yang tersedia untuk kami jauh lebih banyak dari kapasitas yang digunakan sehingga dapat mengakomodasi pertumbuhan trafik di masa mendatang. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan rata-rata penggunaan kurang dari 80% kapasitas untuk dapat mengakomodasi peningkatan penggunaan pada jam sibuk.

Setiap *international gateway* berhubungan dengan *international gateway* lainnya, sehingga setiap sambungan telepon mempunyai beberapa pilihan *routing* dan menyediakan sistem dengan kemampuan *back-up* apabila terjadi kerusakan perangkat atau kesibukan yang luar biasa pada salah satu *gateway*. Kami telah menempatkan perangkat interkoneksi di beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Telkom dan beberapa operator selular lainnya untuk menghubungkan jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami ke jaringan telekomunikasi domestik.

Transmisi suara dan data secara internasional antar *international gateway* terjadi melalui sirkit satelit atau kabel laut. Sirkit satelit tidak terpengaruh oleh jarak dan menyediakan jasa penyiaran yang membuatnya bersifat fleksibel sehubungan dengan tujuan sambungan telepon. Kabel laut, terutama kabel serat optik digital, dapat memberikan layanan berkualitas tinggi yang lebih murah. Akan tetapi, biaya kabel akan meningkat seiring dengan jauhnya jarak dan tujuannya harus tetap. Sirkit satelit dapat terpengaruh oleh kondisi atmosfir, sedangkan kabel laut dapat rusak akibat ulah manusia atau alam. Secara umum, kami menggunakan kabel laut dengan *cable-to-cable back-up* untuk hubungan jarak menengah di Asia dan satellite links backup untuk transmisi yang berjarak lebih jauh. Kami menggunakan *link microwave* dan serat optik untuk koneksi antara *gateway* dan stasiun bumi, dan untuk *gateway* Batam yang memiliki *microwave links* ke Singapura. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan 100% *redundancy* untuk semua link jarak jauh internasional kami (yang mungkin membutuhkan *routing* melalui negara ketiga) dalam upaya memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para pelanggan kami.

Kabel laut. Hak kepemilikan kami di dalam dan akses ke kapasitas kabel laut yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Eropa, dan yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik dengan Amerika Utara. Tabel berikut ini memuat cakupan geografis, umur dan kapasitas yang dialokasikan dari jaringan kabel kami, per tanggal 31 Desember 2008:

Jaringan Kabel Bawah Laut	Cakupan Geografis	Kapasitas (Mbps)
APCN (Jakarta)	Australia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Filipina, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Vietnam dan Thailand	1.596,35
APCN-2	Cina, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan	288,00
SEA-ME-WE 3 (Jakarta)	Australia, Austria, Belgia, Brunei, Kanada, Cina, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, India, Iran, Italia, Jepang, Macau, Malaysia, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Oman, Pakistan, Portugal, Arab Saudi, Qatar, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Inggris	7.414,72
TPC-5 (Jakarta)	Jepang, Amerika Serikat	118,00
SEA-ME-WE 3 (Medan-Batam)	Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, Thailand dan Inggris	43,46
APCN (Medan-Batam)	Jepang, Malaysia dan Korea Selatan	3,90
APCN dan JS (Surabaya)	Hong Kong dan Malaysia	12,8
SEA-ME-WE 3 dan JS	Malaysia dan Arab Saudi	11,26
Total		**9.082,50**

Untuk mendukung pengoperasian *gateway* kami di Surabaya, kami telah mengoperasikan kabel laut serat optik yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya sejak bulan Januari 1997. *Link* ini meningkatkan keandalan jaringan dan kualitas layanan kami di wilayah Surabaya.

Sirkit Microwave Internasional. Kami mengoperasikan sistem transmisi microwave antara gerbang Batam kami dan Singapura. Sistem ini memiliki kapasitas gabungan sebesar 445 Mbps untuk suara dan data, dan berfungsi sebagai stasiun relay untuk melakukan routing trafik ke wilayah yang tidak memiliki koneksi kabel serat optik.

Sirkit Satelit Internasional. Per tanggal 31 Desember 2008, *bandwidth* satelit kami yang tersedia adalah 10,7 Mbps untuk suara dan 0,64 Mbps untuk sirkit data melalui stasiun bumi di gerbang kami di Jakarta dan Medan. Kapasitas satelit kami saat ini diperoleh terutama dari Intelsat dan, sebagian kecil, dari satelit Palapa C-2. Sejak tanggal 31 Desember 2002, kami telah memindahkan trafik dari transmisi satelit menjadi kabel laut oleh karena kualitasnya yang lebih baik, ketersediaan yang lebih banyak dan biaya yang lebih hemat dengan penggunaan kabel laut.

Jaringan akses tetap nirkabel kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 5MHz pada spektrum 800MHz. Tabel berikut ini memuat beberapa informasi tentang jaringan akses tetap nirkabel

kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2006	2007	2008
Base transceiver stations	1.018	1.079	1.454
Base station controllers	26	27	34
Mobile switching centers	8	9	9
Media gateways	15	17	17

Fasilitas Komunikasi Lainnya

Sistem komunikasi Satelit Palapa-C2 dan serat optik terhubung ke pusat perdagangan utama di wilayah Jakarta serta wilayah terpencil di Indonesia dan digunakan untuk menyediakan layanan MIDI Perusahaan dan untuk *backhaul* selular.

Sistem Komunikasi Satelit Palapa-C2. Satelit komunikasi digunakan untuk berbagai hal bergantung pada fitur seperti jelajah, atau cakupan wilayah; kekuatan *transponder* (biasanya dinyatakan dalam dBW); dan *bandwidth transponder*. *Bandwidth transponder*, yang dinyatakan dalam megahertz, berbeda antara *C-band* dan *Ku-band transponder*. *C-band* digunakan di seluruh dunia sebagai standar komunikasi satelit untuk mengirim sinyal dengan gangguan atmosfir yang minim. *C-band* memberikan cakupan yang sangat luas meliputi sebagian besar benua Asia, yang membuatnya menjadi sangat populer untuk diaplikasikan seperti untuk penyiaran televisi. Sedangkan *Ku-band transponder* beroperasi dengan frekuensi berkisar 11-14 gigahertz. Meskipun frekuensi Ku-band lebih rentan terhadap gangguan kelembaban dan hujan daripada frekuensi *C-band*, *Ku-band* lebih cocok untuk aplikasi antena kecil. *Ku-band* umumnya digunakan untuk tujuan yang sama seperti halnya dengan *C-band*, dan juga untuk *satellite news gathering* (*truck-mounted antennas*) dan beberapa aplikasi VSAT. *Ku-band* terutama digunakan di wilayah yang banyak memakai sistem *ground-based microwave*. Untuk mengkompensasi atas hilangnya kekuatan sinyal akibat gangguan air dan hujan, pemancar *Ku-band* umumnya mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan transmiter *C-band* dan cakupan layanan yang lebih kecil.
Satelit Palapa-C2 memiliki enam *extended C-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz yang dimiliki Pasifik Satelit Nusantara, serta 24 standar *C-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz dan 4 *Ku-band transponder* dengan frekuensi 72-megahertz yang dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum dari masing-masing *C-band* dan *Ku-band transponder* adalah 40 dan 51 dBW. *C-band* dan *Ku-band* memiliki cakupan wilayah yang sama.

Satelit Palapa-C2 menyediakan cakupan *C-band* ke hampir seluruh wilayah Asia yang membentang dari Asia Tengah sampai Jepang dan dari Cina bagian selatan sampai Selandia Baru, termasuk beberapa bagian Australia. Tingkat dBW-nya berkisar dari *beam edge* sebesar 32 dBW sampai dengan *beam center* sebesar 40 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-C2 mampu memberikan layanan *uplink* dan *downlink* dari manapun dalam cakupan layanan satelit. Empat *Ku-band transponder* mencakup wilayah Cina bagian Timur, Cina Selatan dan Jepang, serta Cina Selatan ke seluruh bagian barat Indonesia, dengan kekuatan *transponder* tertinggi sebesar 51 dBW.

Satelit yang sekelas dengan satelit Palapa-C2 memiliki umur rata-rata 14 tahun. Kami perkirakan satelit Palapa-C2 akan terus beroperasi sampai dengan triwulan pertama tahun 2011. Produsen satelit telah memberikan garansi yang mencakup komponen listrik satelit sampai dengan bulan Juni 2008. Selain itu, kami memiliki

asuransi satelit. Akan tetapi, oleh karena satelit Palapa-C2 diketahui rentan terhadap kerusakan *Service Control Point*, maka asuransi satelit kami tidak meliputi risiko tidak berfungsinya satelit yang disebabkan oleh kerusakan jenis ini.

Pada tanggal 29 Juni 2007, kami menandatangani kontrak pembelian Palapa-D, yang akan menggantikan satelit Palapa-C2. Palapa-D saat ini sedang dibangun di Cannes, Perancis dan diharapkan akan diluncurkan pada September 2009. Sementara kami mempersiapkan peluncuran satelit Palapa-D, kami berupaya untuk memperpajang umur produktif satelit Palapa-C2 sampai dengan triwulan kedua tahun 2011 dengan menggunakan teknik "*inclined orbit*", yang mengurangi jumlah waktu *transponder* yang tersedia untuk disewakan namun banyak menurunkan pemakaian bahan bakar dan dapat memperpanjang umur produktif satelit selama beberapa tahun.

Fiber Optic and Microwave Terrestrial Links. Backbone serat optik kami yang baru yang berbasis DWDM telah menghubungkan semua kota di propinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. *Backbone* serat optik menyediakan 40-60 Gbps per detik untuk lalu lintas selular di dalam maupun antar kota-kota dan juga menyediakan *physical layer* untuk peningkatan *broadband* internet kami secara progresif saat ini melalui 3.5 HSDPA dan akses *wireless broadband* tetap. Oleh karena pertimbangan kapasitas dan teknologi, sistem *terestrial microwave* yang lama telah dipindahkan untuk mencakup *remote spur route areas*. Per tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki *fiber optic* dan *microwave terrestrial link* ke lebih dari 25 kota besar. Jaringan ini pada prinsipnya digunakan untuk layanan jasa Internet dan MIDI kepada pelanggan perusahaan.

Pada bulan Februari 2008, kami telah menandatangani kontrak dengan NEC, Jepang untuk pembuatan sistem kabel bawah laut, JAKABARE, yang baru yang diharapkan dapat menghubungkan Jawa, Kalimantan, Batam dan Singapura dan menyediakan kapasitas *bandwidth* yang tinggi untuk antar pulau dan kebutuhan *bandwidth* internasional dari/ke Indonesia untuk layanan selular dan MIDI. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk kapasitas *bandwidth* internasional dari/ke Singapura, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem kabel internasional kami. Sistem ini akan sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan dan dirancang untuk dapat beroperasi selama 25 tahun. Sistem ini akan dilengkapi dengan kapasitas 160 Gbps per detik dari kapasitas optimalnya yaitu 2.4Tbps per detik. Sistem kabel ini adalah proyek jangka panjang dan dijadwalkan akan siap diluncurkan pada bulan Juni 2009. Sistem ini diperkirakan dapat mengakomodasi kebutuhan *bandwidth* kami sampai dengan tahun 2012. Sampai dengan akhir 2009, kami berencana untuk membelanjakan sekitar US$100,0 juta untuk belanja modal yang akan digunakan untuk pembangunan gedung, *backhaul* dan infrastruktur pendukung lainnya dari sistem kabel ini.

IP/MPLS Backbone dan *Metro Ethernet Network*. Per tanggal 31 Desember 2008, kami telah menyelesaikan proyek pemasangan jaringan backbone IP/MPLS di lebih dari 157 *point of presence* di Indonesia. Melalui jaringan ini, kami menyediakan leased line virtual yang menawarkan akses *point-to-point Ethernet*, jasa virtual private LAN yang menawarkan akses multipoint-to-multipoint Ethernet dan jaringan *virtual private routed* yang menawarkan IP VPN dan Internet yang terhubung secara lokal. *Dual redundant boxes IP-MPLS Core* di 10 kota besar telah ditempatkan dan dihubungkan melalui *backbone* serat optik. Jaringan Metro Ethernet juga telah ditempatkan di 10 kota besar dan dihubungkan melalui jaringan *backbone fiber* optic kami. Jaringan Metro Ethernet juga telah ditempatkan di 9 kota besar untuk memberikan akses *broadband* bagi pasar korporasi di gedung-gedung pencakar langit dan backhaul selular untuk layanan 3.5 HSDPA. Aplikasi layanan yang digunakan oleh para pelanggan kami, di antaranya adalah akses Internet, jasa penyiaran, sambungan pusat data.

Struktur Organisasi

Bagan berikut ini merupakan struktur organisasi ringkas Perusahaan per 31 Desember 2008, termasuk anak perusahaan penting kami dan yurisdiksi pendirian masing-masing anak perusahaan tersebut. Daftar lengkap mengenai anak-anak perusahaan kami dan investasi-investasi kami di perusahaan-perusahaan afiliasi yang bersifat signifikan, dan kepemilikan persentase saham kami di dalam masing-masing perusahaan, per tanggal 31 Desember 2008 dimuat dalam Catatan 1 dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini.

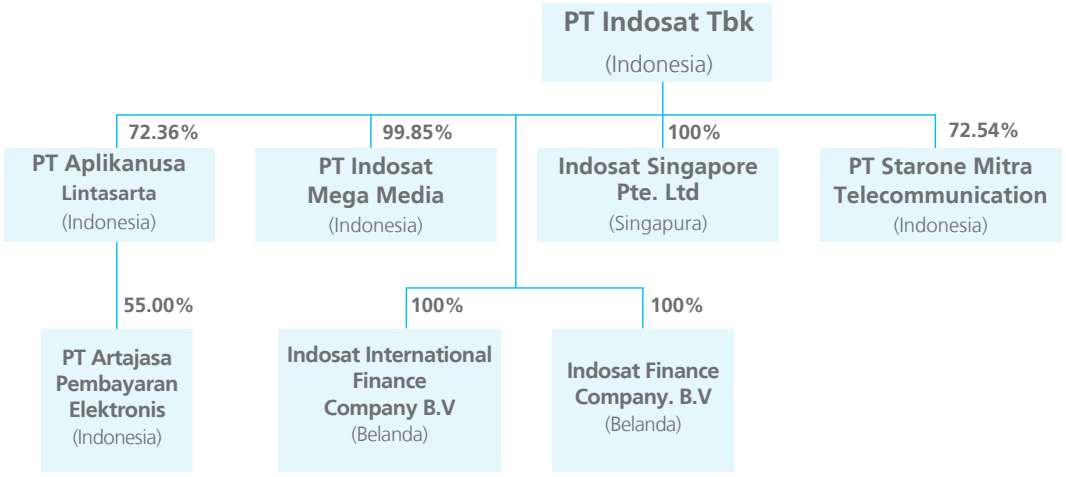

Asuransi

Per tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah mengasuransikan tanah/bangunan dan perangkat (kecuali kabel laut dan hak atas tanah), termasuk asuransi terhadap risiko gangguan bisnis. Selama tahun 2008, kami tidak memiliki asuransi terhadap risiko *consequential losses* yang terkait dengan barang yang diasuransikan. Secara umum, kami tidak mengalami kesulitan dalam memperpanjang polis asuransi dan kami yakin asuransi kami adalah wajar dan sesuai dengan standar industri.

Kami mempertahankan asuransi *in-orbit* untuk satelit Palapa-C2 berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan praktek industri. Kami telah memperpanjang polis tersebut dengan batas nilai pertanggungan sebesar US$10,2 juta, untuk kerugian total dan sebagian. Oleh karena satelit Palapa-C2 merupakan jenis satelit yang diketahui rentan terhadap kerusakan SCP, maka asuransi satelit kami tidak mencakup risiko tidak berfungsinya satelit yang disebabkan oleh kerusakan jenis ini.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perusahaan telah mendaftarkan merek dagang dan hak cipta untuk nama, logo dan beberapa jasa dari Perusahaan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Kami yakin bahwa merek dagang kami adalah penting untuk keberhasilan kami. Kami tidak pernah melakukan pembelaan terhadap salah satu dari merek dagang kami, akan tetapi kami akan melakukannya secara sungguh-sungguh, bilamana diperlukan.

Aktiva Tetap

Kecuali hak milik yang diberikan kepada perorangan di Indonesia, hak atas tanah dimiliki oleh Negara Indonesia berdasarkan Hukum Agraria No. 5/1960. Penggunaan tanah dapat dilakukan dengan hak atas tanah dimana pemegang hak atas tanah dapat menggunakan tanah sepenuhnya untuk jangka waktu yang ditentukan, yang mana dapat diperbaharui dan diperpanjang. Dalam banyak hal, hak atas tanah bebas diperjualbelikan dan dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman.

Aktiva tetap kami yang terpenting berada di Jakarta (sekitar 12.045 m2 digunakan sebagai *international gateway* dan kantor pusat), Ancol (sekitar 11.889 m2 digunakan sebagai stasiun kabel laut dan digunakan sebagai pusat *switching*), Tanjung Pakis, Karawang (sekitar 1.850 m2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Daan Mogot (sekitar 130.000 m2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Medan (sekitar 6.780 m2 digunakan sebagai *international gateway*), Jatiluhur (sekitar 135.850 m2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Pantai Cermin (sekitar 68.228 m2 digunakan sebagai stasiun bumi dan stasiun kabel laut), Batam (sekitar 2.000 m2 digunakan sebagai *international gateway* dan stasiun bumi), Tanjung Bemban (sekitar 3.000 m2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Surabaya (sekitar 11.246 m2 digunakan sebagai kantor regional) dan Banyu Urip-Gresik (sekitar 141.905 m2 digunakan sebagai stasiun bumi dan *international gateway* dan stasiun kabel laut), Takisung – Banjarmasin (sekitar 1.000 m2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Aeng Batu-batu-Makasar (sekitar 2.000 m2 digunakan sebagai stasiun kabel laut) dan Sei Kakap Pontianak (sekitar 5.000 m2 digunakan sebagai stasiun kabel laut). Kecuali Daan Mogot, yang kami sewa dari Telkom, kami memegang hak atas tanah atas sebagian besar aktiva tetap kami untuk jangka waktu awal berkisar antara 20 sampai dengan 30 tahun. Kami perkirakan hak atas tanah kami akan diperbaharui dengan biaya nominal di kemudian hari. Tidak ada satupun dari aktiva tetap kami yang dibebankan dengan hak tanggungan atau dibebankan dengan cara lain.

Alamat Kantor-Kantor Utama

Kantor Pusat:	Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 3001, 3869 999 Fax: (62-21) 3804 045
Kantor Regional Jabotabek & Banten	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 7001 Fax: (62-21) 3000 5702
Kantor Regional Sumatera Utara	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39, Medan 20236, Indonesia Tel: (62-61) 4567 001 Fax: (62-61) 4528 384
Kantor Regional Sumatera Selatan	Jl. Veteran No. 933, Palembang 30113, Indonesia Tel: (62-711) 355 816 Fax: (62-711) 372 600
Kantor Regional Jawa Tengah & DI Yogyakarta	Jl. Pandanaran No. 18, Semarang 50134, Indonesia Tel: (62-24) 8411 266 Fax: (62-24) 8415 011
Kantor Regional Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No. 141-147, Bandung 40111, Indonesia Tel: (62-22) 3000 0900 Fax: (62-22) 4230 856
Kantor Regional Jawa Timur & Bali Nusra	Jl. Kayoon No. 72, Surabaya 60271, Indonesia Tel: (62-31) 5455 001 Fax: (62-31) 5322 982, 546414
Kantor Regional Sulampapua	Jl. Slamet Riyadi No. 4, Makassar 90111, Indonesia Tel: (62-411) 326 808 Fax: (62-411) 326 828
Kantor Regional Kalimantan	Jl. MT Haryono No. 69, Balikpapan 76114, Indonesia Tel: (62-542) 741 001, 3030 001 Fax: (62-542) 7514 001, 7206 750

Industri Telekomunikasi Indonesia

Latar Belakang

Sejak tahun 1961, jasa telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara umum. Selain itu, banyaknya penduduk dan meningkatnya perekonomian Indonesia telah menyebabkan meningkatnya permintaan atas jasa telekomunikasi.

Pada tahun 2007, Indonesia memiliki penduduk sekitar 231,63 juta orang, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia berdasarkan perkiraan International Telecommunications

Union. *Gross Domestic Product* atau GDP Indonesia telah meningkat secara signifikan dari US$141,25 milyar di tahun 2001 menjadi US$432,8 milyar di tahun 2007 dalam mata uang Dolar AS saat ini menurut data Bank Dunia, yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 6,1%. Tingkat pertumbuhan ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan GDP sekitar 4,3% dan sekitar 5,7% yang dialami oleh Thailand dan Malaysia dalam periode yang sama. Menurut Bank Dunia, GDP per kapita pada tingkat daya beli juga telah meningkat dari US$3.043 di tahun 2000 menjadi US$3.728 di tahun 2007.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan untuk mengatur dan memiliki kendali pengawasan yang besar atas sektor telekomunikasi. Meskipun Pemerintah secara historis telah mempertahankan praktek monopoli di sektor jasa telekomunikasi di Indonesia, reformasi hukum baru-baru ini yang sebagian besar sudah berlaku sejak tanggal 8 September 2000 telah berupaya untuk membuat kerangka hukum yang mendukung persaingan usaha dan mempercepat investasi infrastruktur pada fasilitas-fasilitas telekomunikasi. Untuk penjelasan mengenai reformasi ini, lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan - Peraturan Industri Telekomunikasi Indonesia."

Di Indonesia, sebagian besar jasa telepon tetap diselenggarakan oleh Telkom, yaitu badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, yang memiliki dan menyelenggarakan PSTN dan titik akses telepon tetap nirkabel. Sebelum pelaksanaan peraturan interkoneksi yang baru, operator telekomunikasi terinterkoneksi dengan jaringan Telkom guna mengakses semua pengguna telepon tetap dan selular. Monopoli telepon tetap lokal Telkom berakhir pada tanggal 1 Agustus 2002, dan kami sejak saat itu mulai membangun jaringan tetap tersendiri. Menurut peraturan interkoneksi yang baru, para operator telekomunikasi dapat mengadakan perjanjian bilateral yang memungkinkan mereka untuk melakukan interkoneksi secara langsung dengan operator telekomunikasi lainnya.

Meskipun laju penetrasi selular relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, berdasarkan estimasi International Telecommunications Union, laju penetrasi selular Indonesia telah meningkat dari sekitar 13,8% di tahun 2004 menjadi sekitar 35,3% di tahun 2007, dengan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 42,7%. Profil pertumbuhan GDP dan laju penetrasi yang relatif rendah menunjukkan adanya potensi peningkatan pelanggan selular di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2007, jumlah telepon tetap, termasuk akses telepon tetap nirkabel, adalah sekitar 14,8 juta, yang mencerminkan penetrasi telepon tetap sebanyak 7,7%, yaitu salah satu yang terendah di wilayah Asia dan sebagai akibatnya hal ini mengakibatkan pertumbuhan telepon tetap yang stagnan berdasarkan sistem peraturan yang lama. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman beberapa informasi mengenai laju penetrasi selular dan telepon tetap di Indonesia dan wilayah Asia pada tahun 2007:

	Untuk tahun yang berakhir pada tgl 31 Desember 2007			
	Penduduk [1]	Penetrasi Telepon tetap[1]	Penetrasi Selular[1]	GDP per kapita [2]
	(Juta)			(US$)
Hong Kong	7,21	57 %	149 %	42.321
Singapura	4,44	42	133	50.299
Korea Selatan	48,22	46	90	24.712
Malaysia	26,57	16	88	13.379
Thailand	63,88	11	124	8.138
Filipina	87,96	4	59	3.410
Cina	1.328,63	28	41	5.345
India	1.169,02	3	20	2.753
Indonesia	231,63	8	35	3.728

(1) Sumber: *International Telecommunications UnionWorld Telecommunication/ICT Indicators Database & World Bank estimates, ICT Statistics 2007*.

(2) Penetrasi selular adalah persentase jumlah pelanggan selular dan populasi penduduk.

Pasar Jasa Selular

Industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di sektor jasa telekomunikasi selular beberapa tahun terakhir ini. International Telecommunications Union memperkirakan jumlah keseluruhan pelanggan selular di Indonesia meningkat dari sekitar 30,0 juta per tanggal 31 Desember 2004 menjadi sekitar 81,8 juta per tanggal 31 Desember 2007, yang merupakan peningkatan laju penetrasi selular dari sekitar 13,5% menjadi sekitar 35,3%. Terlepas dari tingkat pertumbuhan yang cepat ini, laju penetrasi selular sebesar 35,3% per tanggal 31 Desember 2007 relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia.

Tabel berikut ini memuat informasi berkenaan dengan industri telekomunikasi di Indonesia untuk periode yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember				
	2004	2005	2006	2007	Tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun 2003-2007
	(dalam juta, kecuali persentase)				
Penduduk Indonesia[1]	220,08	222,78	225,46	231,63	1,7%
Pelanggan selular[1]	30,0	46,9	63,8	81,8	39,2%
Penetrasi selular[2]	13,5%	21,1%	28,3%	35,3%	36,9%

(1) Sumber: *Internasional Telecommunication Union*, ICT Indicators Database & World Bank ICT Statistik 2007, tidak termasuk jasa nirkabel telepon tetap.

(2) Penetrasi selular merupakan jumlah pelanggan selular yang dinyatakan dalam persentase penduduk Indonesia.

Peluncuran jasa pra-bayar di tahun 1998, yang telah diterima secara luas di pasar Indonesia, telah membuat para operator selular mampu mengatasi piutang macet yang semakin banyak akibat krisis ekonomi, yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Investasi terus meningkat di industri telekomunikasi selular Indonesia dimana para operator mulai melakukan peningkatan jaringan-jaringan mereka.

Pasar nirkabel di Indonesia saat ini telah didominasi oleh tiga operator GSM terbesar: Telkomsel, kami dan Excelcomindo. Sejak tahun 2002, Pemerintah telah mengeluarkan ijin penyelenggaraan jasa selular yang baru dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Mobile-8 dan ijin penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Per September 2008, berdasarkan perkiraan kami, para operator GSM berskala nasional ini secara bersama-sama telah menguasai sekitar 86,0% dari pangsa pasar nirkabel Indonesia. Per September 2008, Telkomsel merupakan penyelenggara jasa selular nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggannya berkisar 60,5 juta dan menguasai sekitar 50,0% dari pangsa pasar GSM. Kami adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua dengan jumlah pelanggan berkisar 35,5 juta dan menguasai sekitar 29,0% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. Excelcomindo, penyelenggara terbesar ketiga, memiliki sekitar 25,1 juta pelanggan dan menguasai sekitar 20,7% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. Sedangkan jasa akses telepon tetap nirkabel didominasi oleh Telkom dengan merek Flexi dengan jumlah pelanggannya sekitar 9,1 juta, berdasarkan laporan triwulanan Telkom pada September 2008. Penyelenggara terbesar kedua adalah Bakrie Telecom dengan merek Esia dengan jumlah pelanggan sebesar 6,5 juta pelanggan, berdasarkan laporan manajemen triwulan ketiga tahun 2008. Kami merupakan penyelenggara terbesar ke-empat dengan jumlah pelanggan sebanyak 895.760 dengan merek StarOne. Terdapat juga beberapa pemain lainnya dengan skala lebih kecil seperti NTS, HCPT dan STI.

Pertumbuhan jumlah pelanggan nirkabel di Indonesia sebagian dipacu oleh sistem "*calling party pays*", peluncuran jasa pra-bayar, serta diperkenalkannya layanan SMS. Sistem "*calling party pays*" mengharuskan pihak asal sambungan telepon membayar tarif telepon. Berdasarkan pengalaman di lingkungan internasional, negara-negara yang menjalankan sistem "*calling party pays*" umumnya mengalami laju penetrasi telepon nirkabel yang lebih tinggi karena para pelanggan telepon nirkabel lebih besar kemungkinannya untuk memberikan nomor teleponnya dan tetap membiarkan telepon genggamnya dalam keadaan hidup.

Sejak peluncurannya di tahun 1998, layanan pra-bayar telah populer di Indonesia, sebagaimana yang terjadi juga di negara-negara lainnya di Asia karena layanan pra-bayar ini memungkinkan para pelanggannya untuk berlangganan telepon nirkabel tanpa perlu melewati prosedur pemeriksaaan atas sejarah kredit mereka. Layanan pra-bayar juga memberikan lebih banyak kontrol pada para pelanggan atas pengeluaran bulanan mereka. SMS telah terbukti populer di Indonesia, terutama pada layanan pra-bayar karena memberikan alternatif lain yang nyaman dan hemat biaya daripada komunikasi suara dan e-mail. Persaingan di industri layanan nirkabel Indonesia terutama terjadi dalam hal kualitas layanan, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur nilai tambah seperti voice mail dan sms.

Pasar Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional

Penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional di Indonesia memperoleh pendapatan dari trafik jarak jauh internasional baik ke dalam maupun ke luar negeri. Dua penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional adalah Telkom yang memberikan layanan "007" dan kami dengan kode akses "001" dan "008". Tarif ke luar negeri ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tarif ke dalam negeri dihitung berdasarkan *accounting rate* yang berlaku. Trafik ke luar negeri berasal dari pelanggan telepon tetap dan selular dan dikirimkan ke dua penyelenggara layanan internasional secara langsung melalui *international*

gateway atau secara tidak langsung melalui PSTN Telkom. Trafik sambungan internasional ke dalam negeri diterima di *international gateway* dan diarahkan ke tujuan yang dimaksud dari *international gateway* atau melalui jaringan PSTN Telkom yang pada akhirnya dialihkan ke tujuan yang dimaksud.

Di Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara yang pasarnya yang mulai berkembang, trafik komunikasi ke dalam negeri melebihi trafik komunikasi ke luar negeri dimana banyak negara-negara maju memperoleh penghasilan dari trafik sambungan jarak jauh internasional yang tidak berimbang.

Secara historis, trafik antar-operator diselesaikan berdasarkan konsep *accounting rate* yaitu metode kompensasi penyelenggara asal dan akhir. Umumnya, penyelenggara sambungan jarak jauh internasional melakukan negosiasi *accounting rate* per menit atas dasar *route-by-route* dengan menggunakan satu tarif yang dipakai oleh semua penyelenggara di *route* tersebut. Pada tahun 2003, kami mulai mengganti sistem *accounting rate* dengan sistem berbasis tarif terminasi pasar dengan beberapa pihak penyelenggara telekomunikasi asing, dimana kami menyetujui tarif asimetris untuk sambungan ke dalam maupun ke luar negeri. Berdasarkan sistem berbasis tarif terminasi pasar, kami dapat mengurangi tarif yang kami harus bayar untuk sambungan ke banyak tujuan internasional dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif sambungan dari tujuan tersebut ke Indonesia. Meskipun sistem tarif ini mengurangi tarif yang kami terima untuk sambungan ke dalam negeri, kami yakin bahwa secara keseluruhan hal ini dapat meningkatkan marjin kami untuk jasa sambungan jarak jauh internasional, terutama sambungan ke luar negeri.

Pada bulan Desember 2006, Pemerintah mengeluarkan Buku Putih Peluang Bisnis di sektor Jasa Telekomunikasi Telepon Tetap (lokal, SLJJ, SLI) dimana mereka mengundang para investor untuk ikut serta dalam tender untuk jasa telekomunikasi telepon tetap. Pemerintah berharap hal ini dapat meningkatkan laju penetrasi Indonesia.

Persaingan antar para penyelenggara VoIP yang menawarkan layanan seperti telepon hemat, yaitu "01017" yang ditawarkan Telkom dan "FlatCall 01016" yang ditawarkan oleh kami, dan kartu telepon pra-bayar telah mulai dan diperkirakan akan berdampak negatif pada pendapatan yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional yang telah ada.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur komunikasi data di Indonesia, permintaan atas layanan VoIP meningkat. VoIP menggunakan koneksi komunikasi data untuk memindahkan trafik suara ke Internet, yang biasanya menghemat banyak biaya bagi para pelanggan.

Meskipun Pemerintah telah memberlakukan sistem perijinan untuk membatasi jumlah operator VoIP di Indonesia, Pemerintah saat ini tidak lagi mengendalikan tarif yang dikenakan kepada para pengguna akhir dari layanan VoIP. Akan tetapi, Pemerintah telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk mengatur tarif tersebut di kemudian hari, dan diperkirakan peraturan tersebut akan membatasi tarif VoIP menjadi setara dengan tarif diskon maksimum pada kisaran 40,0% dari tarif PSTN yang berlaku saat ini.

Pasar Komunikasi Data

Secara historis, layanan data di Indonesia terutama terdiri dari layanan *narrow bandwidth leased line*, layanan x.25, layanan jaringan data digital dan layanan jaringan digital terpadu. Layanan jaringan data digital merupakan layanan digital leased line untuk transmisi data. Layanan jaringan digital terpadu merupakan protokol yang memberikan akses *dial-in* berkapasitas tinggi untuk jaringan publik. Jenis protokol ini dapat menangani trafik

suara dan data dalam bentuk digital secara bersamaan pada *digital link* yang sama melalui *integrated switches* melewati jaringan publik. Layanan x.25 merupakan protokol *open standard packet switching* yang dapat membuat terminal berkecepatan rendah sampai menengah memperoleh akses *dial-in* atau permanen ke jaringan dari tempat pengguna dan beroperasi pada jaringan. Tarif untuk layanan-layanan ini menurun pada beberapa tahun terakhir ini.

Meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya aplikasi multimedia diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas layanan data *broadband* yang canggih. Para operator di Indonesia tengah mempergunakan jaringan *broadband* tingkat lanjut agar dapat memberikan jasa *high-end* data, seperti jasa *frame relay*, *asynchronous transfer mode* dan *Internet protocol*. Secara khusus, layanan virtual *private network*, yang menggunakan ATM dan teknologi *Internet protocol*, dapat mengambil bagian yang lebih besar dari pangsa pasar karena layanan ini memberikan alternatif lain yang dapat diandalkan dan hemat biaya bagi jaringan privat yang bergantung pada *dedicated leased lines*.

Pasar Jasa Layanan Satelit

Beberapa tahun terakhir ini, persaingan yang semakin ketat terjadi di pasar satelit Asia-Pasifik. Perusahaan-perusahaan di bisnis ini bersaing terutama dalam hal kemampuan cakupan, penawaran produk dan harga. Pada tanggal 6 September 2005, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua operator telekomunikasi yang menggunakan satelit dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk memiliki ijin penyelenggaraan stasiun bumi dan stasiun luar angkasa. Ijin-ijin ini hanya diberikan kepada operator telekomunikasi yang memiliki *landing right* dan dengan ketentuan bahwa spektrum frekuensi yang digunakannya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap para operator yang ada. Satelit asing diperkenankan untuk beroperasi di Indonesia apabila operator telekomunikasi Indonesia memiliki hak penyelenggaraan yang bersifat timbal balik di negara asal satelit tersebut.

Trend Industri

Kami yakin bahwa trend industri telekomunikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Jasa Nirkabel

- Pertumbuhan yang terus berlanjut di sektor telekomunikasi nirkabel. Kami memperkirakan industri telekomunikasi nirkabel dan permintaan atas layanan telekomunikasi nirkabel akan terus tumbuh seiring dengan semakin berkembang dan semakin modernnya Indonesia.

- Migrasi trafik suara dan data ke nirkabel. Kami mengantisipasi bahwa layanan nirkabel akan semakin populer oleh karena meluasnya daerah cakupan dan meningkatnya kualitas jaringan nirkabel, menurunnya tarif telepon genggam dan semakin banyaknya layanan pra-bayar.

- Pertumbuhan yang signifikan pada tingkat penetrasi nirkabel di wilayah luar Jawa. Tingkat penetrasi nirkabel yang relatif rendah di luar Jawa memberikan potensi besar untuk para penyelenggara layanan nirkabel di Indonesia karena penduduk yang tinggal di luar Jawa semakin makmur.

- Pertumbuhan penggunaan jasa nilai tambah. Pertumbuhan tingkat penggunaan jasa nilai tambah, seperti SMS, *content* dan akses internet diharapkan meningkat di tahun-tahun mendatang, oleh karenanya akan membantu menstabilkan penurunan tingkat penggunaan dan ARPU untuk layanan suara.

- Meningkatnya persaingan dengan masuknya para operator nirkabel yang baru ke dalam pasar.

Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional
Meningkatnya persaingan di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Kami memperkirakan akan terjadi deregulasi Pemerintah dan peningkatan kualitas layanan VoIP untuk meningkatkan persaingan dengan jasa sambungan jarak jauh internasional.

Pertumbuhan jumlah sambungan telepon yang cukup. Kami yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan akan mendorong peningkatan jumlah layanan sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pertumbuhan layanan VoIP juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas jasa sambungan jarak jauh internasional.

Jasa MIDI
Meningkatnya permintaan atas layanan komunikasi data tingkat lanjut. Kami yakin bahwa meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya pasar untuk aplikasi multimedia dapat meningkatkan permintaan atas layanan komunikasi data yang canggih.

Semakin ketatnya persaingan di pasar ISP. Sebagai dampak dari liberalisasi pasar dan terus diterbitkannya ijin-ijin baru, kami mengantisipasi bahwa persaingan di pasar ISP akan meningkat. Kami yakin persaingan akan terjadi terutama dalam hal harga, kualitas layanan dan cakupan jaringan.

Meningkatnya permintaan atas layanan broadband. Kami yakin akan terjadi peningkatan preferensi dan permintaan pelanggan atas akses Internet berkecepatan tinggi yang mana akan mendorong pertumbuhan layanan *broadband* dalam negeri.

Peraturan Industri Telekomunikasi Indonesia

Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan dan memegang kendali regulasi dan melaksanakan kebijakan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Kerangka hukum industri telekomunikasi didasarkan pada beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Sebelum bulan Maret 1998, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah instansi yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Setelah pemilihan umum tahun 1999 dan pergantian Pemerintahan di tahun 2001, Departemen Perhubungan mengambil alih tanggung jawab pengaturan industri telekomunikasi. Pada bulan Februari 2005, tugas dan kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi dialihkan dari Departemen Perhubungan ke Departemen Komunikasi dan Informatika.

Melalui Departemen Komunikasi dan Informatika, Pemerintah mengatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Selain itu, Departemen Komunikasi dan Informatika mengatur alokasi spektrum frekuensi radio untuk semua operator telekomunikasi, yang diwajibkan untuk memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi atau DJPT, untuk setiap layanan yang menggunakan spektrum frekuensi. Selain tarif spektrum frekuensi radio, Pemerintah mewajibkan semua operator telekomunikasi untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) sebesar 1,0% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan penyisihan untuk piutang macet, untuk setiap tahun buku, yang harus dibayar dengan cicilan setiap triwulanan dalam jumlah yang sama banyaknya. Pada 16 Januari 2009, Pemerintah mengurangi biaya ini menjadi 0,5% dari pendapan usaha kotor dikurangi biaya interkoneksi dan penyisihan untuk piutang

macet. Selain BHP, Pemerintah juga mengatur bahwa semua penyelenggara telekomunikasi harus membayar Kewajiban Layanan Universal/Universal Service Obligation sebesar 0,75% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan penyisihan untuk piutang macet untuk setiap tahun buku, yang harus dibayar dengan cicilan setiap triwulanan dalam jumlah yang sama banyaknya.

Deregulasi di sektor telekomunikasi sangat terkait dengan program penyehatan ekonomi nasional. "Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan" Pemerintah menyebutkan tujuan program penyehatan ekonomi adalah untuk menstabilkan ekonomi melalui rencana yang lengkap berdasarkan:

- deregulasi;
- mendorong persaingan;
- liberalisasi;
- restrukturisasi;
- meningkatkan akses ke pasar; dan
- memberlakukan peraturan yang berorientasi pada pasar.

Kebijakan reformasi telekomunikasi Pemerintah diformulasi dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi" tanggal 17 September 1999. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah untuk:

- meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi;
- meliberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur persaingan melalui penghapusan praktek monopoli;
- meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kerangka peraturan;
- menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan mitra asing; dan
- menciptakan peluang bisnis untuk usaha berskala kecil dan menengah dan memfasilitasi peluang kerja yang baru.

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia baru-baru ini didasarkan pada Undang-Undang Telekomunikasi.

Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000 dan mengatur pedoman penting untuk reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, kemudahan bagi para pemain baru dan mendorong persaingan. Undang-Undang Telekomunikasi mengatur kerangka dan prinsip substanstif untuk liberalisasi industri telekomunikasi Indonesia. Pemerintah melaksanakan peraturan dan pedoman melalui peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan menteri dan keputusan-keputusan dari instansi pemerintah. Undang-Undang Telekomunikasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan, untuk membuat kebijakan dan untuk mengatur, mengawasi dan melakukan kontrol atas industri telekomunikasi di Indonesia. Pada saat itu, Menteri Perhubungan adalah badan pembuat peraturan untuk industri telekomunikasi, yang memiliki wewenang atas sektor telekomunikasi di Indonesia dan dapat mengeluarkan peraturan melalui keputusan menteri, membuat kebijakan dan menerbitkan izin serta membuat formulasi tarif.

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit diberlakukan sebagai peraturan-peraturan

pelaksana pertama dari Undang-Undang Telekomunikasi. Departemen Perhubungan juga mengeluarkan berbagai keputusan, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan No. 20/2001, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 06/PER/M.KOMINFO/04/2008, tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi atau Peraturan Jaringan Telekomunikasi, Peraturan Menteri Perhubungan No. 21/2001, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/PER/M.KOMINFO/04/2008, tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, atau Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Pada tanggal 11 Juli 2003, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, berdasarkan mana Menteri Perhubungan mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi di Indonesia kepada BRTI, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk industri telekomunikasi. BRTI pertama kali dibentuk pada bulan Januari 2004 dan meliputi DJPT, yang merupakan instansi Pemerintahan dan Komite Regulasi Telekomunikasi yang terdiri dari tujuh anggota, termasuk jabatan ketua yang dipegang oleh DJPT. Para anggota Komite Regulasi Telekomunikasi diangkat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Seluruh anggota Komite Regulasi Telekomunikasi: (i) harus berwarga negara Indonesia; (ii) memiliki keahlian profesional di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, ekonomi, hukum atau ilmu sosial; (iii) tidak memiliki kepentingan apapun di salah satu operator telekomunikasi; dan (iv) tidak diangkat sebagai direktur atau komisaris di salah satu operator telekomunikasi.

BRTI terutama bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di antara para penyelenggara telekomunikasi, memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika berkenaan dengan ijin penyelengaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, mengatur standar perangkat dan peralatan telekomunikasi dan mengawasi kinerja para operator jaringan dan jasa telekomunikasi. Saat ini, ketua BRTI juga merupakan kepala DJPT, dan keputusan BRTI diberlakukan dalam bentuk keputusan DJPT. Dengan demikian, BRTI belum sepenuhnya merupakan badan regulasi independen. Akan tetapi, pembentukan BRTI diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan badan regulasi telekomunikasi independen yang sesungguhnya.

Efektif sejak tanggal 7 Februari 2005, semua tugas dan kewenangan membuat kebijakan, aturan dan peraturan tentang industri telekomunikasi dialihkan dari Departemen Perhubungan ke Departemen Komunikasi dan Informatika. Setelah terjadinya pengalihan tugas dan kewenangan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh Menteri Perhubungan. Departemen Komunikasi dan Informatika saat ini merupakan pembuat keputusan utama di bidang telekomunikasi di Indonesia dan bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyesuaikan rumusan tarif. Pada tanggal 2 Maret 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika telah melantik anggota BRTI untuk periode ke-3, dimana dua orang di antaranya berasal dari Pemerintah dan lima orang berasal dari masyarakat.

Peraturan tentang Jasa Telepon Tetap dan Selular Dapat Mempengaruhi Persaingan Usaha Kami di Masa Mendatang

Departemen Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pembentukan dan penyesuaian tingkat tarif. Pada tahun 2006, Departemen Komunikasi dan Informatika mengeluarkan keputusan-keputusan kementerian seperti No. 8/2006 tentang interkoneksi berbasis biaya, No. 1/2006, No. 2/2006, No. 4/2006, No. 7/2006 dan No. 19/2006 tentang Ketentuan Jasa 3G, No. 5/2006 tentang Warung Telekomunikasi, No. 9/2006 tentang Tarif Telekomunikasi Telepon Tetap, No. 11/2006 tentang Penyadapan Sah, No. 12/2006 tentang Tarif Selular, No. 102/2006 tentang 2G dan 3G Ijin Jaringan Selular Indosat (perubahan), No. 181/2006 tentang Migrasi Jaringan FWA menuju Frekuensi Alokasi 800MHz.

Pada tahun 2007, Departemen Komunikasi dan Informatika mengeluarkan keputusan-keputusan Menteri, meliputi No. 162/2007 tentang alokasi aliran frekuensi radio 800 MHz untuk pengoperasian FWA-CDMA dan selular (perubahan keputusan Menteri No. 181/2006), No. 5/2007 tentang petunjuk pelaksanaan tarif pada kontribusi USO, No. 3/2007 tentang sewa jaringan, No. 11/2007 (sekarang No. 38/2007) yang mengatur pelaksanaan pengembangan infrastruktur menggunakan dana USO dan No. 43/2007 tentang penggantian ke-empat FTPs (Rencana Teknis Dasar/Fundamental Technical Plans) – 2000 yang mengganti tanggal pelaksanaan dari kode akses jarak jauh di Balikpapan menjadi tanggal 3 April 2008.

Pada bulan April 2008, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri No. 9/PER/M.KOMINFO/04/2008 dan Peraturan Menteri No. 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 yang mengatur mengenai tarif baru layanan selular termasuk layanan teleponi dasar melalui jaringan tetap. Peraturan baru tersebut mengatur jenis dan struktur tarif selular retail berdasarkan formula sebagai tarif tertinggi. Jenis tarif tersebut terdiri dari jasa layanan telepon dasar, layanan roaming dan multimedia struktur tarif terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan layanan tambah nilai. Tarif tertinggi untuk layanan selular retail tiap operator akan berbeda sebagai akibat dari perbedaan metode perhitungan antar operator. Berdasarkan peraturan baru tersebut, tarif untuk jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap dan SMS sebagai fasilitas tambahan harus diperhitungkan oleh operator dengan menggunakan formula berbasis biaya dengan hasil penghitungan yang dinyatakan sebagai batas maksimum tarif.

Penggolongan Penyelenggara Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi menggolongkan penyelenggara telekomunikasi menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi lebih lanjut menggolongkan penyelenggara jaringan telekomunikasi menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap, penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak selular dan penyelenggara jaringan telekomunikasi tertutup. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, untuk setiap kategori penyelenggara telekomunikasi diperlukan ijin. Penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan ijin untuk memiliki dan/atau menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Pemegang ijin penyelenggara jasa telekomunikasi berhak menyelenggarakan jasa, tetapi tidak diharuskan untuk memiliki jaringan sendiri. Ijin telekomunikasi khusus diperlukan untuk para penyelenggara jasa telekomunikasi privat atau untuk keperluan yang berkaitan dengan penyiaran dan keperluan keamanan nasional. Peraturan Jaringan Telekomunikasi mengatur bahwa ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Peraturan Jasa Telekomunikasi membedakan ijin penyelenggaraan jasa telepon dasar yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan ijin penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon dan multimedia yang dikeluarkan oleh DJPT.

Pengakhiran Hak Eksklusifitas

Pada tahun 1995, Telkom diberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon tetap lokal sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan layanan SLJJ sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Sementara Indosat dan Satelindo diberikan hak duopoli untuk secara eksklusif menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon dasar internasional sampai dengan tahun 2004.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Telekomunikasi dan Peraturan Jasa Telekomunikasi, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom dan hak duopoli yang sebelumnya diberikan kepada Indosat dan Satelindo. Pemerintah mengadopsi kebijakan duopoli agar kami dan Telkom bersaing sebagai penyelenggara jasa dan jaringan terpadu.

Pasar untuk penyediaan layanan SLI telah dibebaskan pada bulan Agustus 2003 dengan diakhirinya hak eksklusif Indosat dan Satelindo untuk menyediakan layanan SLI. Kami mulai menyediakan jasa telepon tetap sejak tahun 2002 dan jasa telepon nirkabel serta SLJJ pada tahun 2003, setelah menerima izin SLI kami. Telkom telah menerima izin layanan SLI dan mulai menawarkan layanan SLI dengan kode akses internasional "007" pada tahun 2004 yang bersaing langsung dengan kami.

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ dan akses telekomunikasi lokal, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan sambungan SLJJ. Pada tanggal 1 April 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika mengumumkan bahwa kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan bahwa Departemen Komunikasi dan Informatika akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "01017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada tanggal 3 Desember 2007, Pemerintah mengundangkan Keputusan Menteri No. 43/2007, yang mengundurkan tanggal pelaksanaan kode akses SLJJ menjadi tanggal 3 April 2008. Peraturan Menteri No. 43/PER/M. KOMINFO/12/2007 juga menetapkan jadwal pelaksanaan akses sambungan jarak jauh "01X". Pada bulan Januari 2007, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru mengenai interkoneksi dan sistem akses kode lima angka untuk jasa VoIP. Pada April 2008, kode akses tersebut telah digunakan di Balikpapan. Setelah pelaksanaan penduduk Balikpapan dapat memilih menggunakan "0", "01016" atau "01017" pada saat mereka melakukan telepon jarak jauhnya. Apakah kode akses SLJJ akan dilaksanakan di kota-kota lain akan tergantung pada studi yang dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atas pelanggan jasa telepon tetap Indosat dan Telkom dan atas beberapa kriteria seperti (i) Telkom harus membuka kode akses SLJJ "0101X" di wilayah tertentu dalam waktu tertentu apabila Indosat, sebagai operator SLJJ kedua, memiliki FWA dengan mobilitas terbatas yang sama dengan atau lebih dari 30,0% dari FWA Telkom dengan mobilitas terbatas atau (ii) Telkom harus membuka kode akses SLJJ "0101X" di beberapa wilayah tertentu dalam waktu tertentu apabila Indosat, sebagai operator SLJJ kedua, memiliki pelanggan *Fixed Terminal* yang sama dengan atau lebih dari 15,0% dari pelanggan PSTN dan FWA Telkom dengan mobilitas terbatas.

Tarif

Berdasarkan peraturan sebelumnya, tarif retail seperti biaya aktivasi, biaya bulanan, tarif penggunaan per menit untuk layanan tetap atau selular diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan tarif jasa sewa sirkit seperti biaya instalasi dan biaya bulanan berdasarkan tingkat kecepatan yang dipilih.

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999, Pemerintah saat ini telah memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman untuk merumuskan tarif jasa telekomunikasi tetap (Peraturan Menteri No. 9/2006) yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri No. 15/PER/M. KOMINFO/04/2008 dan merumuskan tarif jasa telekomunikasi selular (Peraturan Menteri No. 12/2006), yang telah diganti dengan Peraturan Menteri No. 9/2008. Pemerintah kemungkinan akan mengubah rumusan tarif ini dalam waktu dekat. Pemerintah mengatur pedoman rumusan tarif untuk usaha sewa jaringan berdasarkan Peraturan Menteri No. 3/2007.

Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Telekomunikasi, masing-masing penyelenggara harus memberikan jaminan kepada para konsumen mengenai beberapa hal, yaitu kualitas layanan, biaya penggunaan dan layanan serta kompensasi. Undang-undang juga memperbolehkan para pelanggan yang mengalami cidera atau menderita kerugian untuk mengajukan gugatan atas kelalaian penyelenggara telekomunikasi. Baru-baru ini, para pembuat peraturan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7/2009, yang menetapkan denda bagi para penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan kualitas untuk jasa-jasa yang disediakan olehnya.

Telepon Umum

Berdasarkan izin telekomunikasi tetap untuk jasa teleponi dasar yang kami miliki, kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan telepon umum sejumlah 3,0% dari total jaringan telekomunikasi tetap yang telah kami bangun.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations)

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, semua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations atau USO), yang mengharuskan semua penyelenggara untuk ikut serta dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai wilayah USO oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pada bulan Maret 2004, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri No. 34/2004 yang memuat spesifikasi pelaksanaan program dan zona USO, persyaratan teknis, pengoperasian, pendanaan dan monitor. Melalui Peraturan Pemerintah No. 28/2005, Peraturan Menteri No. 15/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 7/2009, Pemerintah mengumumkan peraturan-peraturan yang mengatur cara pembayaran USO dan perubahan tarif USO dari Rp750 untuk setiap panggilan keluar atau masuk internasional yang berhasil menjadi sebesar 1,25% dari jumlah pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi yang dibayarkan kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya dan piutang macet.

Pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri No. 11/2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri No. 38/2007 yang mengatur prosedur penggunaan dana USO untuk keperluan pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah dimana tidak ada jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2007, Pemerintah mengadakan penawaran tender untuk USO akan tetapi penawaran tersebut telah dibatalkan pada bulan Desember 2007. Peraturan Menteri No. 32/PER/M.KOMINFO/10/ 2008 menggantikan Peraturan Menteri No. 11/2007 dan No. 38/2008 tersebut. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penagihan dana, cara memberikan jasa telekomunikasi dan penyelenggara yang dapat mengikuti program USO.

Pengaturan Interkoneksi

Sesuai dengan larangan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengenai kegiatan kegiatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan para penyelenggara jaringan untuk memperbolehkan para pengguna dari satu jaringan mengakses para pengguna atau layanan pada jaringan lainnya berdasarkan tarif yang disepakati oleh setiap penyelenggara jaringan. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur bahwa tarif interkoneksi antara dua atau lebih penyelenggara jaringan harus bersifat transparan, disepakati bersama dan adil.

Pada tanggal 8 Februari 2006, melalui Peraturan Menteri No. 8/2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan interkoneksi yang baru yang merupakan peraturan interkoneksi berbasis biaya untuk menggantikan peraturan interkoneksi berbasis bagi hasil yang berlaku sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan baru, Pemerintah menetapkan suatu rumusan guna menghitung biaya interkoneksi dari setiap penyelenggara. Hasil perhitungan akan dievaluasi oleh Pemerintah dan digunakan oleh Pemerintah sebagai rujukan.

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh para penyelenggara akan dimasukkan ke dalam usulan DPI, bersama dengan usulan-usulan untuk skenario panggilan, penyaluran trafik, titik interkoneksi, tata cara permohonan dan pemberian interkoneksi, dan lain-lain. DPI juga harus mengungkapkan jenis jasa interkoneksi dan tarif yang dikenakan untuk tiap jasa yang ditawarkan. Penyedia akses interkoneksi harus memberlakukan sistem antri atas dasar *First-In–First-Serve*. Selain itu, mekanisme interkoneksi juga harus transparan dan tanpa diskriminasi.

Para penyelenggara telekomunikasi SLI yang dominan seperti Indosat dan para penyelenggara non-dominan mengajukan DPI pada bulan September 2006. DPI dari penyelenggara dominan disetujui oleh Pemerintah pada bulan Oktober 2006 dan pelaksanaan peraturan baru dimulai pada bulan Januari 2007 melalui perjanjian bilateral antar para penyelenggara. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, DPI akan diubah setiap tahun. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari penyelenggara dominan untuk mengganti DPI sebelumnya.

Rencana Teknis Dasar Nasional Pemerintah mengatur persyaratan teknis seperti rencana routing, penomoran, dan aspek teknis untuk interkoneksi antar jaringan-jaringan dari berbagai penyelenggara telekomunikasi, yang dapat membuat semua penyelenggara jaringan berinterkoneksi secara langsung tanpa harus melalui PSTN.

Peraturan mengenai Biaya

Setiap penyelenggara telekomunikasi diwajibkan membayar kepada Pemerintah biaya hak penggunaan (BHP), biaya frekuensi dan biaya orbit satelit, sebagaimana yang berlaku. BHP untuk masing-masing penyelenggara telekomunikasi adalah sekitar 0,5% dari pendapatan kotor, yang meliputi hal-hal seperti pendapatan dari sewa jaringan, tarif interkoneksi, biaya aktivasi pelanggan baru, tarif penggunaan, tarif roaming dan kartu SIM. Tarif frekuensi untuk jaringan GSM 900, DCS 1800 dan FWA dihitung berdasarkan suatu rumus yang pada intinya didasarkan pada jumlah pengendali *base station* dan *unit transmission receiver* yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Untuk layanan 3G, penyelenggara harus membayar tarif frekuensi berdasarkan *bandwidth allocated frequency*. Selain itu, para pengguna harus melakukan pembayaran satu kali di muka untuk biaya koneksi orbit satelit ketika satelit dioperasikan. Agar dapat memperoleh alokasi frekuensi untuk layanan 3G, Pemerintah mengadakan proses tender secara terbuka dimana Indosat berhasil memperoleh satu ijin spektrum 3G 5 MHz dari spektrum yang ditenderkan senilai Rp320,0 milyar yang harus dibayar di muka. Selain itu, Pemerintah juga mewajibkan adanya *performance bond* sebagai jaminan pemenuhan segala persyaratan yang tercantum dalam kontrak perijinan oleh penyelenggara.

Pendaftaran Pengguna Selular Pra-bayar

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah mulai mewajibkan para penyelenggara telekomunikasi untuk mengadakan pendaftaran para pengguna selular pra-bayar. Peraturan ini menyatakan bahwa proses pendaftaran tersebut wajib diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 28 April 2006, dimana kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2006. Kami telah merancang prosedur agar kewajiban pendaftaran dapat dilakukan pada titik awal penjualan dan kami telah menyelesaikan kewajiban pendaftaran pengguna

selular pra-bayar pada bulan September 2006, dengan membatalkan rekening sekitar 1,3 juta pelanggan yang tidak mendaftar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No 23/2005, semua penyelenggara akan terus mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan setiap pelanggan baru selular pra-bayar mereka dan untuk memberikan informasi terkini secara berkala kepada instansi pembuat peraturan mengenai perkembangan proses pendaftaran.

Peraturan tentang Satelit

Industri satelit internasional merupakan industri yang diatur secara ketat. Selain perijinan dan peraturan di dalam negeri, penempatan dan pengoperasian satelit kami harus didaftarkan pada Kantor Komunikasi Radio/Radio Communications Bureau dari Serikat Telekomunikasi Internasional/International Telecommunications Union dan proses konsultansi Intelsat. Setelah diadakannya Konferensi Radiokomunikasi Dunia/World Radiocommunication Conference (WRC) yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 16 November 2007, pendaftaran karakteristik satelit Indonesia di International Telecommunication Union telah dilakukan dan saat ini sedang dilakukan proses pendaftaran untuk jaringan satelit pada 113E dan 150,5E. Untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit 150,5E, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan Peraturan No. 79/DIRJEN/2009 pada tanggal 12 Maret 2009, mengenai pembentukan kelompok kerja yang terdiri atas DJPT, Telkom dan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 16 Maret 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Surat No. 110/M.KOMINFO/03/2009 mengenai persetujuan untuk kerjasama dengan Perusahaan dan Telkom untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit tersebut secara cepat.

Frekuensi Fixed Wireless Access-CDMA

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 181/2006, Pemerintah melakukan realokasi frekuensi untuk para penyelenggara FWA di frekuensi 800MHz sebagai bagian dari ijin frekuensi untuk layanan 3G (IMT-2000). Indosat sebelumnya telah diberikan ijin 5MHz pada frekuensi *Uplink* 1.880-1.885MHz dan *Downlink* 1.960-1.965MHz di Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan frekuensi *Uplink* 830-835MHz dan *Downlink* 875-880MHz untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Berdasarkan peraturan di atas, Indosat diberikan ijin untuk frekuensi 2x1.23MHz (*Uplink* 842.055-843.285MHz dan *Downlink* 887.055-888.285MHz serta *Uplink* 843.285-844.515MHz dan *Downlink* 888.285-889.515). Migrasi frekuensi telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2007. Pada tanggal 16 Januari 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7/2009, yang mengenakan denda atas ketidakpatuhan terhadap izin-izin jaringan telekomunikasi dan/atau telepon tetap dan jasa nilai tambah untuk telepon dan multimedia, dan juga ketidakpatuhan terhadap peraturan lainnya. Jumlah denda akan bervariasi dari Rp500.000 sampai Rp10 milyar dan akan dievaluasi dalam bentuk denda ketidakpatuhan dengan kriteria tertentu, antara lain kualitas jasa, interkoneksi, pemenuhan kandungan lokal dan kewajiban pelaporan. Peraturan tersebut berlaku efektif pada 16 Januari 2010.

Butir 5: **ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA**

Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama dengan laporan-laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit dan catatan-catatannya per tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 dan untuk tiap tahun selama tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, yang terdapat pada bagian lain dari laporan tahunan ini. Laporan-laporan keuangan konsolidasi Perusahaan telah diaudit sesuai dengan SAK, yang berbeda untuk beberapa hal yang bersifat material dengan US GAAP. Lihat "-Rangkuman Perbedaan- Perbedaan

Penting antara SAK dan US GAAP" untuk rangkuman mengenai beberapa perbedaan penting antara SAK dan US GAAP mengingat perbedaan-perbedaan tersebut berlaku atas kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk memudahkan.

A. Hasil-Hasil Usaha

Perusahaan adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu penuh di Indonesia dan menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan adalah operator selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular. Kami juga menyediakan layanan MIDI kepada para pelanggan perusahaan dan retail Indonesia maupun regional serta menyediakan jasa sambungan telepon jarak jauh di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan

Hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk hal-hal sebagai berikut:

Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Selular dan Pola Penggunaan Selular

Sejak diluncurkannya jasa selular kami di Indonesia, Perusahaan telah mencatat peningkatan jumlah pelanggan selular setiap tahunnya. Basis pelanggan selular kami meningkat dari 16,7 juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2006 menjadi 36,5 juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2008. Pendapatan usaha dari jasa selular meningkat dari Rp9.227,5 milyar atau 75,4% dari total pendapatan usaha di tahun 2006 menjadi Rp14.178,9 milyar atau 76,0% dari total pendapatan usaha di tahun 2008. Pertumbuhan ini didorong oleh terus meningkatnya permintaan di sektor jasa selular dan jasa telekomunikasi lainnya di Indonesia ditambah dengan diperluasnya jaringan dan kapasitas selular kami dan juga upaya pemasaran kami dalam menarik pelanggan baru. Jumlah dan pola penggunaan pelanggan selular baru dapat berbeda dari satu triwulan ke triwulan lainnya, tergantung pada paket harga yang kami tawarkan pada suatu triwulan tertentu dan yang ditawarkan oleh para pesaing kami.

Setelah dilakukannya penggabungan usaha Satelindo dan IM3 ke dalam Indosat di tahun 2003, kami mulai melakukan proses integrasi jaringan untuk menggabungkan dua jaringan ini dengan menggunakan platform selular yang sama. Oleh karena proses integrasi jaringan ini menghadapi kendala dalam hal luasnya wilayah geografis dan kecocokan perangkat, maka sejumlah pelanggan selular kami mengalami masa ketidakstabilan kualitas layanan selular selama berbagai tahapan proses integrasi, terutama pada tahun 2005 dan di daerah Jawa. Akibatnya, kami tidak dapat meluncurkan paket pemasaran yang berkaitan dengan jasa selular secara nasional sampai dengan triwulan pertama tahun 2006. Kami yakin bahwa masalah integrasi jaringan ini merupakan penyebab utama berkurangnya sekitar 1,5 juta pelanggan selular pada triwulan pertama tahun 2006. Kami berhasil menyelesaikan integrasi jaringan pada triwulan pertama tahun 2006 dan kami yakin bahwa kualitas layanan selular kami telah meningkat. Setelah dilakukannya integrasi jaringan, kami mulai meluncurkan inisiatif pemasaran secara nasional untuk menarik pelanggan selular baru, yaitu melalui program Mentari "Free Talk", Mentari "Hebat" dan IM3 "Raja SMS". Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan penggunaan SMS dan trafik suara dari pada jumlah pelanggan selular di tahun 2007 dan 2008 dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2008, kami kembali melakukan peluncuran beberapa paket pemasaran, termasuk Mentari "Free Talk" dan IM3 "Raja SMS", dan mempromosikan kampanye Mentari "Hebat". Sebagai hasil dari program-

program tersebut, kami juga mencatat peningkatan jumlah pelanggan sebesar 49,0% dari 24,5 juta pada bulan Desember 2007 menjadi 36,5 juta pada bulan Desember 2008. Meskipun kualitas jaringan selular telah meningkat dan beberapa paket pemasaran telah diluncurkan pada semester pertama tahun 2007, dampak dari peristiwa-peristiwa ini terhadap kondisi keuangan kami terus berlanjut sampai dengan semester kedua tahun 2007 dan pada tahun 2008.

Kenaikan pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular bergerak lebih lambat daripada kenaikan jumlah pelanggan selular. Hal ini terutama disebabkan oleh kombinasi antara ditingkatkannya upaya penetrasi ke pasar pelanggan selular berpenghasilan rendah, turunnya pendapatan efektif per menit Perusahaan akibat penawaran diskon dan diperluasnya zona lokal. Sesuai dengan tren industri di negara-negara lain, seiring dengan meningkatnya penetrasi pasar pelanggan selular di Indonesia, di lain pihak tingkat penggunaan pelanggan baru menurun. Faktor-faktor lain juga menyebabkan terjadinya tren ini, seperti meningkatnya penggunaan layanan SMS daripada layanan suara dan juga paket tarif yang kami tawarkan untuk menarik pelanggan baru tersebut. Sebagian besar pelanggan selular baru kami adalah pelanggan-pelanggan retail muda yang biasanya sering menggunakan layanan SMS, tetapi kurang menghasilkan trafik layanan suara dibandingkan dengan para pelanggan selular kami yang ada saat ini. Para pelanggan selular tersebut biasanya memiliki sensitifitas harga yang lebih tinggi dan sangat mungkin untuk berpindah ke penyelenggara telekomunikasi lainnya karena faktor harga dan promosi.

Tarif

Berdasarkan peraturan sebelumnya, Pemerintah mengatur tarif retail seperti biaya aktivasi, biaya bulanan, tarif penggunaan per detik untuk jasa selular dan juga tarif jasa telekomunikasi telepon tetap dan *leased circuit.* Rumusan tarif jasa telekomunikasi telepon tetap dimaksudkan untuk menentukan tarif tertinggi, sementara di lain pihak untuk jasa selular, rumusan tarif dimaksudkan untuk menentukan tarif terendah. Pemerintah menggunakan rumusan perhitungan tarif untuk menentukan tarif layanan *leased circuit,* yang pada intinya mewajibkan semua penyelenggara telekomunikasi tetap untuk melaksanakan rumusan tarif berdasarkan biaya yang sebenarnya dan yang diperkirakan, dalam menyelenggarakan jasa-jasa.

Perekonomian Indonesia

Menurut kami pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia sebagian didorong oleh pertumbuhan perekonomian Indonesia akhir-akhir ini, dan permintaan atas jasa-jasa tersebut akan terus berlanjut karena perekonomian Indonesia akan terus mengalami perkembangan dan modernisasi. Kinerja dan kualitas Perusahaan serta pertumbuhan basis pelanggan dan penawaran jasa Perusahaan kami sangat tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pengeluaran Modal

Oleh karena kami terus melakukan perluasan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan agar dapat meningkatkan jumlah pelanggan, maka kami perlu terus melakukan pengeluaran modal dalam jumlah yang besar. Sejak awal tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, kami telah menginvestasikan dana sebesar Rp28.989,6 milyar (US$2.929,9 juta) di berbagai bisnis Perusahaan. Berdasarkan program pengeluaran modal Perusahaan saat ini, kami berencana untuk menginvestasikan sekurang-kurangnya US$600.0 juta di tahun 2009 untuk pengeluaran modal untuk berbagai kegiatan usaha kami. Sementara kami berencana menggunakan sumber-sumber internal dan arus kas dari usaha-usaha Perusahaan untuk membiayai rencana pengeluaran modal tersebut, kami juga

bermaksud untuk menjajaki peluang perolehan dana melalui sumber-sumber eksternal. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari yang kami harapkan, turunnya peringkat hutang Perusahaan atau menurunnya kinerja keuangan atau rasio keuangan Perusahaan.

Ketidakstabilan Nilai Tukar Valuta Asing

Nilai mata uang Rupiah telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir dari nilai terendah yaitu sekitar Rp17.000 per dolar AS selama krisis keuangan Asia. Selama periode antara tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, nilai tukar Rupiah/dolar AS berkisar dari nilai terendah Rp12.400 per dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp8.672 per dolar AS dan selama tahun 2008, berkisar dari nilai terendah Rp12.400 per dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp9.051 per dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp10.950 per dolar AS.

Meskipun sebagian besar dari pendapatan usaha Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah, ada juga sebagian pendapatan usaha Perusahaan dalam mata uang dolar AS atau yang terkait dengan dolar AS. Pendapatan yang terkait dengan mata uang dolar AS adalah berdasarkan tarif dalam mata uang dolar AS yang ditagih dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar valuta asing yang berlaku untuk mata uang dolar AS ke Rupiah. Selain itu, sebagian besar dari pinjaman, pengeluaran modal dan beban usaha Perusahaan, termasuk pembayaran bunga untuk Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010, Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 dan Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, adalah dalam mata uang selain dari Rupiah, terutama dolar AS. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 51,3% dari pinjaman kami adalah dalam mata uang Rupiah, dan sisanya adalah dalam dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, antara lain nilai Rupiah dari beban yang harus dibayarkan dalam mata uang dolar AS akan meningkat karena faktor tersebut sehingga kami harus mengkonversi mata uang Rupiah yang lebih banyak lagi guna membayar kewajiban Perusahaan dalam dolar AS. Sebaliknya, meningkatnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, di antaranya, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan dari panggilan masuk internasional yang dilakukan oleh pengguna layanan operator asing, *roaming* oleh pelanggan operator asing di Indonesia dan hasil usaha dari layanan MIDI dan operasi satelit kami. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, kami mencatat rugi kurs bersih sebesar masing-masing Rp155,3 milyar dan Rp885,7 milyar.

Sebagai tambahan, sebagian besar aset dan kewajiban moneter kami dapat terkena dampak risiko mata uang asing. Aset moneter ini terutama terdiri dari kas, dan piutang usaha dari operator asing, dan piutang usaha berdenominasi mata uang asing. Kewajiban moneter kami yang dapat terkena dampak risiko mata uang asing terdiri dari hutang pengadaan, hutang pinjaman dan hutang obligasi yang timbul akibat pengeluaran modal yang berkaitan dengan kewajiban. Tingkat aset moneter bersih kami sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah panggilan masuk yang melampaui jumlah penggilan keluar dalam usaha SLI kami dan pendapatan dari mata uang asing kami. Dalam upaya mengelola risiko valuta asing Perusahaan dan mengurangi beban pembiayaan Perusahaan secara keseluruhan, dari tahun 2005 sampai dengan 2008, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing guna menurunkan risiko valuta asing Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil mengelola tingkat risiko valuta asing kami di kemudian hari ataupun bahwa kami tidak akan terus menerus terkena dampak risiko valuta asing Perusahaan. Risiko kami terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama terhadap mata uang dolar AS, dapat meningkat jika Perusahaan mengadakan hutang tambahan dalam mata uang dolar AS untuk membiayai rencana pengeluaran modal kami.

Tinjauan tentang Usaha-Usaha Perusahaan

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi berkenaan dengan masing-masing produk dan jasa utama Perusahaan untuk periode yang disebutkan:

	Selular	Telekomunikasi Telepon Tetap	MIDI	Jumlah
	(Rp. dalam milyar)			
Pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006:(1)				
Pendapatan usaha	9.227,5	1.109,3	1.902,6	12.239,4
Laba usaha	2.291,9	627,6	479,1	3.398,6
Penyusutan dan amortisasi	2.967,2	182,7	503,4	3.653,3
Aktiva Segmen	30.550,2	1.552,0	3.738,0	35.840,3
Kewajiban Segmen	19.665,8	760,3	931,6	21.357,7
Pengeluaran modal untuk aktiva segmen	5.961,1	366,7	593,5	6.921,3
Pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007:(1)				
Pendapatan usaha	12.752,5	1.567,4	2.168,6	16.488,5
Laba usaha	3.438,8	661,0	419,8	4.519,6
Penyusutan dan amortisasi	3.477,0	198,4	519,8	4.195,2
Aktiva Segmen	35.594,5	1.667,5	4.923,6	42.185,6
Kewajiban Segmen	27.859,4	989,6	1.278,6	30.127,6
Pengeluaran modal untuk aktiva segmen	8.382,6	428,3	915,3	9.726,4
Pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008:(1)				
Pendapatan usaha	14.178,9	1.744,7	2.735,5	18.659,1
Laba usaha	3.148,9	793,7	790,7	4.733,3
Penyusutan dan amortisasi	3.730,6	290,8	566,4	4.587,9
Aktiva Segmen	39.472,7	2.570,1	7.115,9	49.158,8
Kewajiban Segmen	29.574,7	1.197,3	3.795,1	34.567,2
Pengeluaran modal untuk aktiva segmen	10.042,8	682,9	1.616,2	12.341,9

(1) Segmen hasil dan aktiva mencakup hal-hal yang secara langsung berasal dari suatu segmen dan juga hasil dan aktiva yang dapat dialokasikan secara wajar. Pendapatan bunga tidak dilaporkan dalam segmen usaha karena kas dan setara kas dihitung dan dievaluasi secara terpisah dari kegiatan usaha. Beban bunga dan pajak penghasilan juga tidak dilaporkan dalam segmen usaha karena tidak dipertimbangkan di dalam evaluasi kinerja oleh manajemen Perusahaan. Pengeluaran modal untuk segmen aktiva merupakan total biaya yang timbul selama masa pembelian aktiva yang direncanakan akan digunakan lebih dari satu tahun.

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha Perusahaan terutama diperoleh melalui penyelenggaraan jasa selular, MIDI dan telepon tetap (khususnya sambungan jarak jauh internasional). Tabel berikut ini memperlihatkan perincian total pendapatan

usaha Perusahaan dan persentase kontribusi dari masing-masing layanan terhadap total pendapatan usaha Perusahaan untuk setiap periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2006		2007		2008	
	(Rp dalam milyar, kecuali persentase)					
Pendapatan usaha:						
Selular	9.227,5	75,4%	12.752,5	77,3%	14.178,9	76,0%
MIDI	1.902,6	15,5	2.168,6	13,2	2.735,5	14,7
Telekomunikasi Telepon Tetap	1.109,3	9,1	1.567,4	9,5	1.744,7	9,3
Jumlah pendapatan usaha	**12.239,4**	**100,0%**	**16.488,5**	**100,0%**	**18.659,1**	**100,0%**

Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan usaha Perusahaan bagi semua jenis jasa yang ditawarkan adalah jumlah pelanggan, tingkat penggunaan dan tarif jasa. Tingkat penggunaan jasa-jasa kami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terus meningkatnya permintaan atas jasa telekomunikasi di Indonesia, terus berkembangnya perekonomian Indonesia dan adanya persaingan.

Jasa Selular. Perolehan pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular berasal dari pendapatan pemakaian selular, fitur, pendapatan interkoneksi dan biaya langganan bulanan, dan juga biaya interkoneksi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya. Pada triwulan ke-empat tahun 2008, Perusahaan mulai mencatat penjualan modem *wireless broadband* dan penggunaan data komunikasi *wireless broadband* sebagai pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular. Pendapatan tersebut dahulu dicatat di bawah pendapatan usaha jasa MIDI.

Tabel berikut ini memperlihatkan komponen-komponen pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
		2006	2007	2008
		(Rp dalam Milyar)		
Pendapatan pemakaian		5.317,9	6.542,9	7.021,9
Fitur		3.022,7	4.185,3	5.095,1
Pendapatan interkoneksi		697,3	1.847,5	1.826,0
Pendapatan penyambungan		103,5	79,1	68,4
Pendapatan langganan bulanan		9,9	20,4	66,3
Lain-lain		76,2	77,3	101,2
Total pendapatan usaha dari jasa selular		9.227,5	12.752,5	14.178,9

Sebagian besar pelanggan selular Perusahaan adalah para pelanggan pra-bayar (sekitar 97,5% per tanggal 31 Desember 2008). Kami menawarkan berbagai macam fitur nilai tambah kepada para pelanggan pra-bayar, yang menyebabkan kenaikan pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari fitur nilai tambah, terutama layanan SMS dan SMS nilai tambah yang dapat mengakses berbagai macam informasi, seperti berita politik, olah raga dan bisnis. Kami juga telah memperbanyak fitur nilai tambah untuk para pelanggan pra-bayar, seperti layanan

ring-back tones, voice SMS, mobile office, voicemail, GPRS dan *MMS*. Kami perkirakan SMS dan fitur nilai tambah lainnya akan mengkontribusikan bagian pendapatan yang semakin besar untuk pendapatan usaha dari jasa selular karena kami terus berupaya menyediakan fitur-fitur nilai tambah yang baru kepada para pelanggan pra-bayar Perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 2007, kami meluncurkan layanan 3,5G *wireless broadband* di Jakarta dan Surabaya, yang menunjukkan pertumbuhan pelanggan yang pesat. Saat ini kami menawarkan layanan ini di 19 kota di Indonesia dan berencana untuk terus memperluas layanan ini ke kota-kota lainnya.

Jumlah pelanggan selular Perusahaan telah meningkat dari 16.704.639 per tanggal 31 Desember 2006 menjadi 24.545.422 dan 36.510.246 pelanggan selular masing-masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, yang merupakan kenaikan sebanyak 48,7% dari tahun 2007 ke tahun 2008.

Kami mengakui pendapatan jasa selular sebagai berikut:

- pendapatan usaha dari jasa selular yang timbul dari biaya pemakaian dan percakapan *roaming* diakui berdasarkan lamanya sambungan telepon yang berhasil yang menggunakan jaringan selular milik Perusahaan;

- untuk para pelanggan pasca bayar, biaya bulanan diakui pada saat layanan diberikan;

- untuk para pelanggan pra-bayar, komponen aktivasi dari pendapatan usaha dari jasa selular yang diperoleh dari penjualan paket perdana diakui setelah dilakukannya aktivasi oleh konsumen akhir. Penjualan paket perdana dan voucher isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan usaha dari jasa selular berdasarkan penggunaan *airtime* atau setelah habisnya masa berlaku *airtime;*

- penjualan modem *wireless broadband* dan selular setelah diserahkan kepada konsumen. Bergantung pada perjanjian dengan konsumen, pendapatan dari data komunikasi *wireless broadband* diakui dengan berdasar pada durasi penggunaan atau pembayaran tetap tiap bulan;

- pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari biaya interkoneksi dengan para operator (pendapatan pemakaian) diakui setiap bulan berdasarkan trafik yang benar-benar tercatat untuk bulan yang bersangkutan; dan

- pendapatan usaha dari jasa selular disajikan dalam jumlah bersih setelah kompensasi untuk para penyelenggara jasa nilai tambah.

Sebelum tahun 2007, Perusahaan menggunakan perjanjian pembagian-pendapatan untuk menetapkan biaya interkoneksi dengan operator selular tertentu, dan Perusahaan mencatat pendapatan usaha dari interkoneksi tersebut dengan secara bersih *(net-based method)*, setelah biaya interkoneksi dan setelah alokasi kepada penyelenggara telekomunikasi internasional. Namun, sejak tahun 2007, Pemerintah memberlakukan rezim interkoneksi berbasis biaya yang baru. Berdasarkan peraturan ini, kami saat ini melaporkan pendapatan usaha sebesar pendapatan kotor daripada pendapatan bersih. Sedangkan berdasarkan nilai kotor, kami mengakui laba interkoneksi dalam pendapatan usaha dan biaya interkoneksi dalam beban usaha. Namun selama periode pelaporan, biaya interkoneksi domestik dengan Telkom ditentukan berdasarkan petunjuk tarif yang dibuat Pemerintah, dan Perusahaan mencatat pendapatan usaha untuk interkoneksi tersebut dengan sebesar pendapatan kotor, sebelum biaya interkoneksi, namun setelah alokasi kepada penyelenggara telekomunikasi internasional. Kami menghitung biaya interkoneksi dengan metode tarif sebagai beban usaha pada tahun terjadinya. Menurut

peraturan interkoneksi berbasis biaya, para operator yang menyediakan SMS akan menggunakan mekanisme SKA *(Sender Keep All)*.

*Layanan MIDI***.** Pendapatan usaha dari layanan MIDI terutama berasal dari layanan *leased lines* berkecepatan tinggi dan *frame relay* yang diselenggarakan oleh Perusahaan dan Lintasarta, layanan *digital data network* yang diselenggarakan oleh Lintasarta, layanan satelit dan Internet yang diselenggarakan oleh Perusahaan, IMM dan Lintasarta. Pendapatan usaha dari layanan MIDI terdiri dari tarif biaya tetap untuk layanan *leased lines* berkecepatan tinggi dan satelit, atau kombinasi antara tarif tetap dan volume pemakaian untuk layanan-layanan lainnya. Dalam beberapa hal, biaya penyambungan akan dikenakan ketika dilakukan instalasi layanan atau ketika lokasi layanan dipindahkan. Setelah itu, biaya bulanan akan dikenakan bersama dengan biaya pemakaian yang dihitung berdasarkan *bandwidth*, volume, lama pemakaian atau jenis paket. Pendapatan dari layanan *leased line* berasal dari tarif biaya-tetap berdasarkan lamanya sambungan, kemampuan kecepatan dan *bandwidth*, jenis layanan sambungan yang diberikan, apakah lokasi layanan lokal atau internasional, dan biaya instalasi di tempat. Pada permulaan triwulan ke-empat 2008, kami mengklasifikasi ulang penjualan modem *wireless broadband* dan pemakaian data komunikasi *wireless broadband* dari jasa MIDI ke segmen bisnis jasa selular kami dan mulai mencatat pendapatan tersebut sebagai pendapatan usaha jasa selular.

Sebagian besar dari pendapatan usaha yang berasal dari layanan MIDI dinyatakan dalam mata uang Dolar AS dan oleh karenanya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Beberapa faktor lainnya juga mempengaruhi pendapatan usaha dari layanan MIDI, seperti persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi lokal dan para penyelenggara telekomunikasi internasional yang tidak mempunyai ijin usaha, penurunan tarif dan perpindahan dari layanan *leased line* ke layanan berbiaya rendah, seperti *frame relay*. Kami memperkirakan tren ini akan terus berlangsung tetapi kami mengantisipasi bahwa hal ini akan terkompensasi dengan peningkatan volume, termasuk peningkatan volume yang diakibatkan oleh meluasnya keberadaan Perusahaan di pasar domestik layanan MIDI.

Kami mengakui pendapatan jasa pemasangan untuk jasa internet pada saat dilakukan pemasangan untuk layanan dan untuk *frame net*, jasa *World Link* dan *Direct Link* pada saat selesainya pemasangan atau sambungan yang digunakan untuk tujuan sambungan jaringan di tempat pelanggan. Kami mencatat pendapatan yang berasal dari biaya jasa bulanan dan jasa MIDI lainnya pada saat layanan tersebut diberikan. Pendapatan yang berasal dari biaya pemakaian jasa internet dikenakan setiap bulan berdasarkan durasi penggunaan internet atau berdasarkan tarif tetap sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan. Kami mencatat pendapatan sewa satelit secara garis lurus sesuai dengan masa sewa *transponder*. Biaya sewa bulanan untuk kapasitas transponder satelit didasarkan terutama pada kapasitas yang disewa.

Layanan Telekomunikasi Tetap. Jasa telekomunikasi tetap meliputi jasa sambungan jarak jauh internasional dan layanan FWA yang kami luncurkan pada tahun 2004 dan jasa sambungan tetap. Jasa sambungan jarak jauh internasional yang terdiri dari layanan SLI "001" dan "008", "Flatcall 01016" dan juga layanan bantuan operator dan layanan-layanan nilai tambah, memberikan kontribusi sebanyak 78,7% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi telepon tetap pada tahun 2008, sementara sisanya berasal dari pendapatan layanan telepon tetap dan FWA.

Jasa sambungan jarak jauh internasional. Pendapatan usaha dari jasa sambungan jarak jauh internasional berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dan pendapatan dari percakapan telepon ke luar negeri. Untuk sebagian besar sambungan telepon keluar, tarif telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri No. 74/1998, dan kami memperoleh pembayaran dari operator-operator

domestik, seperti Telkom dan para operator telepon tetap dan selular domestik lainnya. Pembayaran tarif tersebut dinyatakan dan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan untuk sambungan telepon masuk, ada tiga faktor utama yang biasanya menentukan besarnya pendapatan usaha Perusahaan: volume trafik, harga yang disepakati dan fluktuasi mata uang. Kami telah menegosiasikan *volume commitments* dan *accounting rates* dengan para penyelenggara telekomunikasi asing dan telah melaksanakan sistem tarif berbasis terminasi pasar, dan menerima pendapatan bersih dari operator-operator tersebut. Pendapatan bersih dan accounting rate ini biasanya dinyatakan dan dilakukan dalam mata uang selain Rupiah, khususnya mata uang Dolar AS; dengan demikian, pendapatan sambungan telepon masuk dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya.

Meskipun kami telah melakukan berbagai macam tindakan untuk mempertahankan volume sambungan SLI, menurut pendapat kami, meningkatnya persaingan dari Telkom dan para penyelenggara VoIP telah mengakibatkan menurunnya volume sambungan SLI dan pendapatan usaha dari jasa sambungan jarak jauh internasional pada tahun 2007. Kami memperkirakan penggunaan layanan VoIP akan terus meningkat. Agar dapat bersaing dengan Telkom dan para penyelenggara VoIP lainnya dan agar dapat memaksimalkan kapasitas jaringan Perusahaan, kami telah secara agresif melakukan negosiasi *volume commitments* untuk sambungan telepon masuk dengan beberapa penyelenggara telekomunikasi asing, yang berhasil meningkatkan jumlah menit sambungan telepon masuk.

Layanan Akses Telepon Tetap Nirkabel. Per tanggal 31 Desember 2008, kami telah memiliki 761.589 pelanggan akses telepon tetap nirkabel di 52 kota di Indonesia. Pada akhir tahun 2008, kami memperluas layanan akses telepon tetap nirkabel ke beberapa kota lainnya dalam upaya meningkatkan kapasitas untuk sekitar empat juta pelanggan akses telepon tetap nirkabel Dengan demikian, kami mengharapkan di masa mendatang layanan telepon tetap nirkabel ini akan menjadi sumber yang semakin penting bagi pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap.

Pendapatan akses telepon tetap nirkabel yang berasal dari biaya pemakaian diakui berdasarkan durasi panggilan telepon yang berhasil dilakukan melalui jaringan tetap kami. Bagi para pelanggan pasca bayar, biaya aktivasi diakui setelah aktivasi dilakukan oleh pelanggan baru dalam jaringan tetap kami, sedangkan biaya jasa bulanan diakui pada saat jasa tersebut diserahkan. Bagi para pelanggan pra-bayar, komponen aktivasi penjualan paket perdana diakui setelah aktivasi dilakukan oleh konsumen akhir. Penjualan *vouchers* awal atau isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan diakui sebagai pendapatan pada saat penggunaan *airtime* atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Jasa Telepon Jaringan Tetap. Jasa Telepon Jaringan Tetap terdiri dari layanan telepon jarak jauh internasional, layanan SLI "001" dan "008" dan "Flatcall 01016". Pendapatan dari pemasangan jaringan tetap diakui pada saat pemasangan layanan dilakukan. Pendapatan dari biaya penggunaan diakui berdasarkan durasi atas panggilan yang berhasil dilakukan melalui jaringan tetap kami.

Beban Usaha

Beban usaha utama Perusahaan meliputi beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi, biaya karyawan, administrasi dan beban umum dan pemasaran. Pada tahun 2007, Perusahaan mulai mencatat pendapatan interkoneksi secara kotor, mencatat beban interkoneksi sebagai bagian dari beban usaha dalam akun beban jasa telekomunikasi sebagai akibat dari peralihan ke sistem tarif interkoneksi dengan berbasis biaya. Oleh karena peraturan berbasis biaya baru ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007, Perusahaan belum menyajikan

kembali pendapatan Perusahaan periode sebelum tahun 2007 untuk merefleksikan pencatatan berdasarkan pendapatan kotor tersebut.

Beberapa beban Perusahaan dinyatakan dalam mata uang Dolar AS atau mata uang selain Rupiah. Beban-beban tersebut meliputi pembayaran tarif interkoneksi internasional, beberapa perjanjian pemeliharaan dan biaya konsultasi.

Beban Jasa Telekomunikasi. Beban jasa telekomunikasi meliputi beban interkoneksi, pemeliharaan, ijin frekuensi radio, harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher isi ulang, listrik, gas dan air, *leased circuit*, uang sewa dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Biaya interkoneksi merupakan jumlah uang yang dibayar kepada para operator untuk layanan interkoneksi dan juga beban lainnya untuk infrastruktur yang disewa dan layanan proses tagihan yang disediakan oleh Telkom. Fluktuasi beban-beban ini umumnya berkaitan dengan fluktuasi trafik selular dan trafik sambungan jarak jauh internasional. Beban pemeliharaan meliputi pemeliharaan aktiva tetap Perusahaan, termasuk gedung, kabel laut, perangkat telekomunikasi, peralatan kantor dan kendaraan. Oleh karena kami terus memperluas cakupan dan kapasitas jaringan selular dan jaringan lainnya, kami memperkirakan bahwa beban pemeliharaan tersebut akan semakin besar. Beban ijin frekuensi radio meliputi biaya ijin yang dihitung berdasarkan penggunaan spektrum yang sebenarnya. Beban *leased circuit* meliputi biaya yang terkait dengan sewa saluran satelit dan kabel laut. Biaya hak penyelenggaraan biasanya semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan selular dan tingkat penggunaan karena biaya ini dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan usaha.

Penyusutan dan amortisasi. Kami menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap Perusahaan selama taksiran umur manfaatnya, yang dimulai pada bulan setelah aktiva tersebut digunakan dan setelah mempertimbangkan taksiran nilai residunya.

Sebagian besar beban penyusutan Perusahaan terkait dengan aktiva yang digunakan untuk layanan selular Perusahaan. Oleh karena kami terus memperluas dan meningkatkan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan Perusahaan, maka kami memperkirakan beban penyusutan tersebut akan semakin besar.

Karyawan. Beban karyawan meliputi gaji, insentif dan imbalan kerja lainnya, pajak penghasilan karyawan, bonus dan jasa tenaga *outsourcing*. Beban pengeluaran untuk karyawan kami semakin besar pada periode terakhir ini akibat semakin besarnya gaji dan pajak penghasilan karyawan dan juga imbalan yang dibayar melalui program pensiun dini Perusahaan.

Administrasi dan Umum. Beban administrasi dan umum meliputi uang sewa, penyisihan piutang ragu-ragu, biaya tenaga profesional, perjalanan, asuransi untuk aktiva tetap, katering, pelatihan, pendidikan dan penelitian, persediaan dan alat tulis kantor, komunikasi hubungan masyarakat dan lain-lain.

Pemasaran. Beban pemasaran meliputi biaya untuk pameran, promosi dan iklan yang berhubungan dengan program pemasaran Perusahaan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Komponen utama dari pendapatan (beban) lain-lain Perusahaan adalah pendapatan bunga, laba (rugi) selisih kurs-bersih, amortisasi goodwill, beban pendanaan, laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif—bersih. Laba atau rugi selisih kurs biasanya dipengaruhi oleh besarnya hutang non-Rupiah yang belum dibayar, piutang perusahaan

internasional di luar negeri dan valuta asing dari kas dan setara kas Perusahaan. Kami saat ini sedang melakukan lindung nilai/*hedging* atas sebagian kewajiban kami dalam mata uang Dolar AS berdasarkan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 dan ING/DBS Syndicated Loan Facility. Lihat "Butir 11: Pengungkapan Secara Kualitatif dan Kuantitatif Tentang Risiko Pasar."

Perpajakan

Sesuai dengan SAK, beban pajak periode berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aktiva dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui apabila kemungkinan besar jumlah manfaat pajak pada masa mendatang tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada tahun saat nilai aktiva direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak tangguhan dari perbedaan sementara dan rugi pajak yang belum digunakan, yang masing-masing berupa aktiva atau kewajiban, dinyatakan sebesar nilai bersih. Nilai bersih pajak tangguhan Perusahaan telah mengalami fluktuasi selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 terutama sebagai akibat perbedaan-perbedaan antara laporan keuangan dan laporan pajak. Dimulai pada tahun buku 2009, tarif pajak penghasilan perusahaan kami akan berkurang dari tarif pajak penghasilan perusahaan saat ini yang berkisar antara 10,0% sampai 30,0% menjadi tingkat tunggal 28,0% untuk tahun buku 2009 dan 25,0% untuk tahun buku 2010 dan seterusnya berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang dikeluarkan pada September 2008 dan mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan".

Laba bersih

Laba bersih Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 tidak menunjukkan peningkatan pendapatan usaha dan laba usaha pada periode-periode tersebut. Hal ini sebagian disebabkan adanya fluktuasi yang besar pada beberapa pos non-usaha yang mempengaruhi laba bersih Perusahaan pada periode-periode tersebut. Pos non-usaha tersebut di antaranya adalah fluktuasi pajak penghasilan yang ditangguhkan, laba atau rugi selisih kurs-bersih, dan laba atau rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih.

Hasil Usaha

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa pos dalam laporan laba rugi konsolidasi Perusahaan tahun 2006 yang telah direklasifikasikan menjadi Beban Usaha–Biaya Jasa Telekomunikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian dalam laporan laba rugi konsolidasi Perusahaan tahun 2007 dan 2008:

	Jumlah		
	2006	2007	2008
	(Rp dalam Milyar)		
Beban usaha - kompensasi kepada penyelenggara dan penyedia jasa telekomunikasi	369,7	1.708,0	1.909,4
Beban usaha-pemeliharaan	585,2	765,6	903,2
Beban usaha – *leased circuit*	180,2	235,7	350,3
Beban usaha – beban jasa telekomunikasi lainnya	1.569,1	2.070,6	2.880,4

Tabel berikut ini memperlihatkan data laporan laba rugi yang dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2006	2007	2008
Pendapatan usaha:			
Selular	75,4%	77,3%	76,0%
MIDI	15,5	13,2	14,7
Jasa telekomunikasi tetap	9,1	9,5	9,3
Jumlah Pendapatan usaha	100%	100%	100%
Beban usaha:			
Beban Jasa Telekomunikasi	22,1%	29,0%	32,4%
Penyusutan dan amortisasi	29,8	25,4	24,6
Karyawan	11,0	9,7	8,8
Pemasaran	3,8	4,2	4,9
Administrasi dan umum	5,4	4,3	4,0
Total beban usaha	72,2	72,6	74,7
Laba usaha	27,8	27,4	25,3
Pendapatan beban lainnya-bersih	(11,2)	(9,6)	12,9
Laba sebelum pajak penghasilan	16,5	17,8	12,4
Manfaat (beban) pajak penghasilan – bersih	(4,7)	(5,2)	2,3
Laba bersih	11,5%	12,4%	10,1%

Tahun 2008 Dibandingkan dengan tahun 2007

Pendapatan usaha

Total pendapatan usaha meningkat dari Rp16.488,5 milyar di tahun 2007 menjadi Rp18.659,1 milyar di tahun 2008, atau sebesar 13,2%, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan usaha dari jasa selular dan layanan MIDI. Selama tahun 2008, pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar Rp1.426,4 milyar, atau 11,2% dari Rp12.752,5 milyar di tahun 2007. Pendapatan usaha dari layanan MIDI meningkat sebesar Rp566,9 milyar, atau 26,1% dari Rp2.168,6 milyar di tahun 2007. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap mengalami kenaikan sebesar Rp177,3 milyar atau 11,3%, dari Rp1.567,4 milyar di tahun 2007.

Jasa selular. Pada tahun 2008, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa selular sebesar Rp14.178,9 milyar, yang merupakan peningkatan sebesar 11,2% dari Rp12.752,5 milyar di tahun 2007. Dengan demikian, pendapatan usaha dari jasa selular adalah sebesar 76,0% dari total pendapatan usaha kami untuk tahun 2008, dibandingkan dengan 77,3% untuk tahun 2007. Peningkatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah pelanggan selular Perusahaan sebesar 48,7% dari tahun 2007 ke tahun 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan efektif Perusahaan per menit karena potongan harga dan bonus yang kami tawarkan pada paket tarif sebagai tanggapan atas meningkatnya kompetisi harga dan akibat dari rendahnya biaya interkoneksi. Paket tarif kompetitif ini membantu peningkatan penetrasi pasar untuk pelanggan dengan pendapatan rendah dan membantu meningkatkan jumlah pelanggan kami.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp478,9 milyar atau 7,3% dari tahun 2007, dan merupakan 49,5% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa selular. Peningkatan penggunaan ini terutama disebabkan oleh adanya upaya pemasaran yang agresif untuk menarik para pelanggan baru dan perluasan basis pelanggan selular kami menyusul adanya kenaikan kompetisi harga, yang membuat penggunaan selular menjadi lebih terjangkau dan mengakibatkan peningkatan jumlah penggunaan selular.

Pada tahun 2008, pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari fitur nilai tambah meningkat sebesar Rp909,8 milyar atau 21,7%, dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini, terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan layanan SMS dan jasa nilai tambah dan *wireless broadband*, yang sebelumnya dicatat sebagai jasa MIDI. Kontribusi fitur nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa selular naik sebanyak 3,1% dari 32,8% di tahun 2007 menjadi 35,9% di tahun 2008.

Layanan MIDI. Pada tahun 2008, pendapatan usaha dari layanan MIDI meningkat sebesar 26,1% dari Rp2.168,6 milyar di tahun 2007 menjadi Rp2.735,5 milyar di tahun 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan domestik untuk penggunaan Internet, IP VPN, dan layanan leased lines. Pendapatan usaha dari IP VPN mewakili komponen jasa pendapatan usaha MIDI terbesar, yang meningkat sebesar Rp214,2 milyar. Peningkatan jasa IP VPN didorong oleh besarnya kapasitas dan semakin banyaknya sirkit yang disewa oleh pelanggan besar. Pendapatan usaha dari jasa Internet juga meningkat sebesar Rp133,9 milyar disebabkan terutama oleh semakin besarnya kapasitas ISP dan jasa Internet berbasis protokol.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi telepon tetap mengalami peningkatan sebesar 11,3% menjadi Rp1.744,7 milyar di tahun 2008 dari Rp1.567,4 milyar di tahun 2007. Pendapatan usaha dari layanan sambungan telepon internasional dan akses telepon tetap nirkabel, masing-masing merupakan 78,7% dan 14,0% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi telepon tetap. Sedangkan, 7,3% lainnya berasal dari jasa telepon tetap dan layanan-layanan lainnya pada tahun 2008. Pendapatan yang berasal dari sambungan telepon internasional meningkat dari Rp1.230,2 milyar di tahun 2007 menjadi Rp1.373,1 milyar di tahun 2008 karena adanya kenaikan pendapatan sambungan telepon masuk yang mengimbangi penurunan pendapatan telepon keluar sebagai akibat dari persaingan dengan para operator lain, seperti Telkom dan penyedia layanan VoIP. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 27,7% dari 1.533,5 juta menit di tahun 2007 menjadi 1.958,4 juta menit di tahun 2008. Jumlah *incoming traffic* meningkat sebesar 20,0% dari 1.236,6 juta menit di tahun 2007 menjadi 1.484,5 juta menit di tahun 2008, Hal ini terutama disebabkan oleh adanya *volume commitments* dengan beberapa penyelenggara telekomunikasi asing. *Outgoing traffic* meningkat sebesar 59,7% dari 296,9 juta menit di tahun 2007 menjadi 474,0 juta menit di tahun 2008, terutama disebabkan oleh meningkatnya pengguna trafik dari akses Indosat misalnya melalui "Flatcall 01016". *Outgoing traffic* dari akses non-Indosat mengalami penurunan karena persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan juga persaingan dengan para penyedia jasa VoIP.

Pendapatan usaha dari jasa akses telepon tetap nirkabel meningkat dari Rp218,7 milyar di tahun 2007 menjadi Rp244,3 milyar di tahun 2008, yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan basis pelanggan akses telepon tetap nirkabel Perusahaan.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp1.957,0 milyar atau 16,4%, dari Rp11.968,9 milyar di tahun 2007 menjadi Rp13.925,9 milyar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi dan kenaikan biaya pemasaran sebagai tanggapan dari tingginya tingkat kompetisi dalam pasar telekomunikasi Indonesia.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp1.263,5 milyar atau 26,4%, dari Rp4.779,9 milyar di tahun 2007 menjadi Rp6.043,4 milyar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh kenaikan beban terkait dengan pungutan Pemerintah, seperti biaya frekuensi radio, biaya USO dan biaya hak penyelenggaraan yang timbul karena bertambahnya jumlah BTS dan meningkatnya pendapatan usaha dari jasa selular kami di tahun 2008. Beban jasa telekomunikasi juga meningkat sebagai akibat dari peningkatan dalam (i) beban listrik, air dan gas dan sewa tempat sebagai akibat dari perluasan jumlah lokasi selular; (ii) biaya interkoneksi sebagai akibat meningkatnya *off-net traffic*; (iii) biaya pemeliharaan sebagai akibat dari aset tidak bergerak tambahan; (iv) biaya peminjaman sirkit sebagai akibat dari perluasan jaringan untuk selular dan layanan MIDI; dan (v) harga pokok kartu SIM dan vouchers isi ulang sebagai akibat dari kenaikan penjualan paket perdana.

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami peningkatan sebesar 9,4% dari Rp4.195,2 milyar di tahun 2007 menjadi Rp4.587,9 milyar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh hasil dari penggunaan peralatan selular baru dan pengelompokkan kembali aktiva tetap tertentu sejak 1 Januari 2008, sebagai akibat dari penelaahan dan penilaian berkala atas masa manfaat ekonomis dari aset Perusahaan.

Beban karyawan meningkat sebesar Rp44,2 milyar atau 2,8%, dari Rp1.594,8 milyar di tahun 2007 menjadi Rp1.639,0 milyar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian kenaikan gaji sebagai akibat dari tekanan inflasi.

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp225,2 milyar atau 32,5%, dari Rp692,9 milyar di tahun 2007 menjadi Rp918,1 milyar di tahun 2008, terutama disebabkan adanya kampanye pemasaran yang agresif dan program promosi yang secara strategis dilaksanakan sebagai tanggapan atas tingginya tingkat kompetisi.
Beban administrasi dan umum meningkat sebesar Rp31,3 milyar atau 4,4%, dari Rp706,1 milyar di tahun 2007 menjadi Rp737,4 milyar di tahun 2008, yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya tenaga profesional, sewa, biaya penggunaan kantor dan biaya pelatihan, sementara piutang ragu-ragu, biaya hubungan masyarakat, dan biaya makan karyawan berkurang. Berkurangnya piutang ragu-ragu timbul sebagai akibat dari pembalikan atas penyisihan piutang ragu-ragu dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena adanya penyelesaian atas piutang yang lama tertunggak. Piutang tersebut berasal dari pelanggan MIDI yang mana telah kami sisihkan 100%.

Laba usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha Perusahaan naik sebesar Rp213,7 milyar atau 4,7%, dari Rp4.519,6 milyar di tahun 2007 menjadi Rp4.733,3 milyar di tahun 2008.

Beban Lain-lain—Bersih

Beban lain-lain-bersih meningkat sebesar Rp818,2 milyar atau 51,5%, dari Rp1.590,0 milyar di tahun 2007 menjadi Rp2.408,2 milyar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs, khususnya pada triwulan ke-empat di tahun 2008, kenaikan beban pendanaan dan menurunnya laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih.

Laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih meningkat sebesar Rp68,6 milyar, atau 100,8% dari Rp68,0 milyar di tahun 2007, menjadi Rp 136,6 milyar di tahun 2008 akibat meningkatnya nilai tukar valuta asing, dimana tingkat swap Rupiah mewakili nilai tertinggi saat ini dari pemasukan kas di masa datang kepada kami. Rugi selisih kurs-bersih meningkat sebesar Rp 730,4 milyar, atau 470,3% dari Rp 155,3 milyar di tahun 2007 menjadi Rp885,7 milyar di tahun 2008 yang disebabkan oleh melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS selama tahun 2008, khususnya pada triwulan ke-empat tahun 2008.

Kami mencatat beban pendanaan sebesar Rp1.858,3 milyar di tahun 2008 dibandingkan dengan beban sebesar Rp1.428,6 milyar di tahun 2007, atau naik sebesar 30,1% dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi dan pinjaman baru pada tahun 2008, seperti fasilitas pinjaman sindikasi ING/DBS, Fasilitas Komersial HSBC, dan penerbitan Obligasi Indosat Ke-enam dan Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga, Fasilitas HSBC COFACE dan Fasilitas HSBC Sinosure, yang diterbitkan untuk membiayai pengeluaran modal. Meskipun penerbitan obligasi dan pinjaman baru ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran hutang atas kredit sindikasi ING/DBS, Obligasi Indosat Kedua dan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama kami, tingkat bunga rata-rata kami mengalami penurunan karena rendahnya tingkat bunga dari penerbitan obligasi dan pinjaman yang baru.

Kami mencatat peningkatan dalam pendapatan bunga menjadi Rp460,1 milyar pada tahun 2008, yang meningkat sebesar Rp227,7 milyar, atau 98,0% terhadap tahun 2007 yang disebabkan oleh tingginya rata-rata jumlah kas dan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Lain-lain-bersih mengalami penurunan sebanyak Rp46,5 milyar atau 58,1% dari Rp80,0 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp33,5 milyar pada tahun 2008, disebabkan oleh penurunan denda pajak.

Perpajakan

Kami mencatat beban pajak penghasilan-bersih sebesar Rp859,5 milyar di tahun 2007 dibandingkan dengan Rp419,8 milyar di tahun 2008. Penurunan beban pajak penghasilan-bersih disebabkan oleh penurunan beban pajak penghasilan tahun berjalan dan pajak penghasilan tahun berjalan. Penurunan beban pajak penghasilan saat ini disebabkan oleh penurunan pendapatan sebelum pajak sebagai akibat dari jatuhnya nilai tukar valuta asing dan tingginya beban pendanaan. Kami mencatat beban pajak penghasilan tangguhan sebesar Rp198,8 milyar di tahun 2007 dibandingkan dengan laba pajak penghasilan sebesar Rp159,9 milyar di tahun 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh penyesuaian dalam pengakuan tarif pajak penghasilan, yang akan berubah untuk tingkat pajak antara 10% sampai dengan 30,0% pada tahun 2008 menjadi 28,0% pada tahun 2009 dan 25,0% pada tahun 2010 dan berdampak dengan penurunan yang signifikan atas kewajiban pajak tangguhan Perusahaan.

Laba bersih

Laba bersih Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp163,5 milyar, atau 8,0%, dari Rp2.042,0 milyar di tahun 2007 menjadi Rp 1.878,5 milyar di tahun 2008, yang mana disebabkan oleh faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya.

Tahun 2007 Dibandingkan dengan tahun 2006

Pendapatan usaha

Total pendapatan usaha meningkat dari Rp12.239,4 milyar di tahun 2006 menjadi Rp16.488,5 milyar di tahun 2007, atau naik sebanyak 34,7% terutama disebabkan adanya kenaikan pendapatan usaha dari jasa selular. Selama tahun 2007, pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebanyak Rp3.525,0 milyar, atau 38,2% dari Rp9.227,5 milyar di tahun 2006 menjadi Rp12.752,5 milyar di tahun 2007. Pendapatan usaha dari layanan MIDI meningkat sebesar Rp266,0 milyar, atau 14,0%. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap mengalami kenaikan sebesar Rp458,1 milyar atau 41,3%, dalam setiap hal dibandingkan dengan tahun 2006.

Dengan menggunakan metode bersih untuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pendapatan usaha untuk tahun 2007 meningkat sebanyak Rp2.867,7 milyar, atau 23,4% meningkat dari Rp12.239,4 milyar di tahun 2006 menjadi Rp15.107,1 milyar di tahun 2007, dan pendapatan dari jasa selular seharusnya akan meningkat sebanyak Rp2.517,3 milyar atau 27,3% dari Rp9.227,5 milyar di tahun 2006 menjadi Rp11.744,9 milyar di tahun 2007. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap seharusnya akan meningkat sebanyak Rp84,4 milyar atau 7,6% dari Rp1.109,3 milyar di tahun 2006 menjadi Rp1.193,7 milyar di tahun 2007.

Jasa selular. Pada tahun 2007, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa selular sebesar Rp12.752,5 milyar, yang meningkat sebanyak 38,2% dari Rp9.227,5 milyar di tahun 2006. Peningkatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah pelanggan selular sebanyak 46,9% dari tahun 2006 ke tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor gabungan dari ditingkatkannya upaya penetrasi ke pasar pelanggan selular berpenghasilan rendah, penurunan pendapatan efektif Perusahaan per menit karena potongan harga dan bonus seperti paket tarif yang kami tawarkan dan diperluasnya zona lokal. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tren ini adalah peningkatan penggunaan SMS, dan bukan layanan suara. Sebagian besar pelanggan baru selular kami adalah orang-orang muda yang biasanya sering menggunakan layanan SMS, tetapi kurang menghasilkan trafik layanan suara dibandingkan dengan para pelanggan selular kami yang ada.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp1.225,1 milyar atau 23,0% dari tahun 2006, dan merupakan 51,3% dari total pendapatan usaha dari jasa selular. Peningkatan penggunaan ini terutama disebabkan adanya perluasan basis pelanggan selular kami dan upaya pemasaran yang agresif untuk menarik para pelanggan baru.

Pada tahun 2007, pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari fitur nilai tambah meningkat sebesar Rp1.162,6 milyar atau 38,5%, dibandingkan dengan tahun 2006. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan penggunaan layanan SMS dan jasa nilai tambah. Kontribusi fitur nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa selular tetap stabil dalam kisaran 32,8% di tahun 2006 dan 2007.

Layanan MIDI. Pada tahun 2007, pendapatan usaha dari layanan MIDI meningkat sebesar 14,0% dari Rp1.902,6 milyar di tahun 2006 menjadi Rp2.168,6 milyar di tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan

penggunaan Internet, IP VPN, dan leased lines akibat meningkatnya permintaan domestik atas jasa-jasa tersebut. Pendapatan usaha dari Internet merupakan komponen yang terbesar dari pendapatan usaha dari layanan MIDI, yang naik sebesar Rp148,0 milyar. Peningkatan layanan Internet tersebut terdorong karena adanya peningkatan layanan ISP dan layanan berbasis *Internet protocol*. Pendapatan usaha dari IP VPN meningkat sebesar Rp152,3 milyar, terutama oleh karena semakin banyak dan besarnya kapasitas *dedicated circuit* yang disewa oleh pelanggan besar.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap mengalami peningkatan sebanyak 41,3% menjadi Rp1.567,4 milyar di tahun 2007 dari Rp1.109,3 milyar di tahun 2006. Pendapatan usaha yang berasal dari layanan sambungan telepon internasional dan akses telepon tetap nirkabel, masing-masing mengkontribusikan 78,5% dan 14,0% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap. Sedangkan, 7,5% sisanya berasal dari layanan telepon tetap dan layanan-layanan lainnya. Pendapatan yang berasal dari sambungan telepon internasional meningkat dari Rp857,7 milyar di tahun 2006 menjadi Rp1.230,2 milyar di tahun 2007 karena adanya kenaikan pendapatan sambungan telepon masuk meskipun pendapatan sambungan telepon keluar Perusahaan mengalami penurunan akibat persaingan dengan para operator lain, seperti Telkom. Akan tetapi, total volume sambungan telepon internasional dari gateway "001" dan "008" Perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 35,2% dari 1.134,3 juta menit di tahun 2006 menjadi 1.533,5 juta menit di tahun 2007. Total trafik sambungan telepon masuk menjadi naik sebanyak 26,1% dari 980,5 juta menit di tahun 2006 menjadi 1.236,6 juta menit di tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan adanya komitmen harga dan volume dengan beberapa penyelenggara telekomunikasi asing. Sementara itu, trafik sambungan telepon keluar naik sebanyak 93,0% dari 153,8 juta menit di tahun 2006 menjadi 296,9 juta menit di tahun 2007, terutama disebabkan meningkatnya trafik pengguna dari "Flatcall 01016". Trafik sambungan telepon keluar dari akses non-Indosat mengalami penurunan akibat persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan juga persaingan dengan para penyelenggara jasa VoIP.

Meskipun pendapatan usaha Perusahaan dari layanan "Flatcall 01016" yang mengenakan tarif lebih rendah per menit ini mengalami peningkatan, peningkatan pendapatan tersebut tidak dapat mengkompensasi rendahnya pendapatan usaha yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional. Sementara itu, pendapatan usaha dari jasa akses telepon tetap nirkabel meningkat dari Rp149,9 milyar di tahun 2006 menjadi Rp218,7 milyar di tahun 2007, terutama disebabkan oleh adanya peningkatan basis pelanggan akses telepon tetap nirkabel Perusahaan.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp3.128,1 milyar atau 35,4%, dari Rp8.840,7 milyar di tahun 2006 menjadi Rp11.968,9 milyar di tahun 2007, terutama disebabkan adanya kenaikan beban usaha untuk beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi, beban biaya karyawan, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp2.075,7 milyar atau 76,8%, dari Rp2.704,2 milyar di tahun 2006 menjadi Rp4.779,9 milyar di tahun 2007, terutama disebabkan adanya kenaikan biaya interkoneksi akibat perubahan format pelaporan, kenaikan beban pemeliharaan sebagai akibat bertambahnya aktiva tetap dan biaya yang terkait dengan pungutan Pemerintah, seperti biaya frekuensi radio, pembayaran ijin 3G tahunan, USO dan biaya hak penyelenggaraan. Peningkatan beban tersebut terjadi akibat bertambahnya jumlah BTS dan pendapatan usaha dari jasa selular di tahun 2007. Beban *leased circuit* meningkat karena perluasan jaringan untuk jasa selular dan MIDI. Sebaliknya, beban kartu SIM menurun karena adanya penurunan harga pokok kartu SIM per unit.

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami peningkatan sebanyak 14,8% dari Rp3.653,3 milyar di tahun 2006 menjadi Rp4.195,2 milyar di tahun 2007. Kenaikan ini terutama karena diadakannya perangkat selular yang baru secara terus menerus. Biasanya, terdapat jeda waktu yang berlangsung selama beberapa bulan antara saat kami melakukan pengeluaran modal tertentu dan saat kami mulai melakukan penyusutan aktiva yang terkait dengan pengeluaran modal tersebut.

Beban biaya karyawan meningkat sebesar Rp244,3 milyar atau 18,1%, dari Rp1.350,5 milyar di tahun 2006 menjadi Rp1.594,8 milyar di tahun 2007, terutama disebabkan adanya penyesuaian kenaikan gaji para karyawan akibat tekanan inflasi yang dirasakan oleh para karyawan Perusahaan dan bonus-bonus yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja yang baik.

Beban administrasi dan umum meningkat sebesar Rp42,2 milyar atau 6,4%, dari Rp663,9 milyar di tahun 2006 menjadi Rp706,1 milyar di tahun 2007, terutama disebabkan adanya kenaikan biaya jasa akuntansi. Selain itu, Perusahaan juga mengalami kenaikan biaya listrik, air dan gas akibat perluasan bisnis Perusahaan.

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp224,0 milyar atau 47,8%, dari Rp468,9 milyar di tahun 2006 menjadi Rp692,9 milyar di tahun 2007, terutama disebabkan adanya kenaikan beban pemasaran yang terkait dengan kampanye pemasaran yang agresif untuk menarik pelanggan selular baru dan meningkatkan nilai merek dagang Perusahaan.

Laba usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha Perusahaan naik sebesar Rp1.120,9 milyar atau 33,0%, dari Rp3.398,7 milyar di tahun 2006 menjadi Rp4.519,6 milyar di tahun 2007.

Beban Lain-lain—Bersih

Beban lain-lain-bersih meningkat sebesar Rp214,2 milyar atau 15,6%, dari Rp1.375,8 milyar di tahun 2006 menjadi Rp1.590,0 milyar di tahun 2007, terutama disebabkan adanya kenaikan laba (rugi) derivatif dan penurunan laba (rugi) kurs.

Kami mencatat beban pendanaan sebesar Rp1.428,6 milyar di tahun 2007 dibandingkan dengan Rp1.248,9 milyar di tahun 2006, atau naik sebanyak 14,0% dibandingkan dengan tahun 2006. Hal ini terutama karena Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Kelima dan memperoleh fasilitas pinjaman baru termasuk Fasilitas Pinjaman Bank Central Asia, Fasilitas Pinjaman Bank Mandiri dan Fasilitas Pinjaman Goldman Sachs International, yang dengan tidak memperhitungkan pembayaran kembali untuk Obligasi Indosat Kedua, Obligasi Syari'ah Mudharabah dan Fasilitas Kredit Investasi III, menyebabkan peningkatan jumlah hutang selama tahun 2007. Akan tetapi, hutang-hutang baru ini memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada hutang-hutang yang Perusahaan yang telah dibayar pada tahun 2007.

Kami mencatat laba dari perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp68,0 milyar di tahun 2007 dibandingkan dengan rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp438,8 milyar yang terjadi di tahun 2006 akibat melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Akan tetapi, laba dari perubahan nilai wajar derivatif-bersih dikompensasikan dengan rugi selisih kurs-bersih sebesar Rp155,3 milyar di tahun 2007 yang mengakibatkan penurunan yang cukup banyak pada beban lain-lain Perusahaan-bersih dari fluktuasi mata uang Rupiah.

Kami membukukan beban lain-lain-bersih sebesar Rp80,0 milyar di tahun 2007 dan laba lainnya-bersih sebesar Rp21,2 milyar di tahun 2006 karena adanya beban pajak dan penyesuaian interkoneksi.

Perpajakan

Kami mencatat beban pajak penghasilan sebesar Rp576,1 milyar di tahun 2006 dibandingkan dengan Rp859,5 milyar di tahun 2007. Beban pajak penghasilan adalah sebesar 9,9% dari laba sebelum pajak penghasilan di tahun 2006 dan 22,6% di tahun 2007. Kenaikan beban pajak penghasilan kini-bersih disebabkan adanya kenaikan laba sebelum pajak akibat lebih tingginya peningkatan pendapatan usaha dibandingkan dengan peningkatan beban usaha. Kami mencatat beban pajak penghasilan tangguhan sebesar Rp376,5 milyar di tahun 2006 dibandingkan dengan Rp198,8 milyar di tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan pengaruh perbedaan temporer atas penyusutan, penghapusan piutang dan penyesuaian yang terjadi akibat pemeriksaan pajak.

Laba bersih

Laba bersih Perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp632,0 milyar, atau 44,8%, dari Rp1.410,1 milyar di tahun 2006 menjadi Rp2.042,0 milyar di tahun 2007, akibat faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Secara historis, kebutuhan likuiditas Perusahaan timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perusahaan. Bisnis telekomunikasi Perusahaan membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan, terutama selama tahap pembangunan jaringan. Meskipun kami memiliki banyak infrastruktur jaringan, kami memperkirakan bahwa Perusahaan akan kembali melakukan pengeluaran modal khususnya untuk pengembangan jaringan selular di daerah-daerah yang diperkirakan sebagai daerah yang tinggi pertumbuhannya, dan juga untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang telah ada.

Menurut kami, kas dan setara kas, arus kas dari kegiatan operasional Perusahaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia akan cukup memenuhi kebutuhan dana yang telah diperkirakan, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran modal yang telah direncanakan, di masa mendatang. Akan tetapi, apabila keadaan ekonomi dunia atau Indonesia memburuk, persaingan atau produk pengganti timbul lebih cepat dari yang diperkirakan saat ini atau nilai mata uang Rupiah melemah secara tajam terhadap Dolar AS, maka arus kas bersih Perusahaan yang berasal dari kegiatan operasi dapat menurun dan jumlah pengeluaran modal yang dibutuhkan dalam mata uang Rupiah dapat meningkat, dimana salah satu di antaranya dapat memberikan dampak buruk bagi likuiditas Perusahaan.

Arus Kas

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai arus kas Perusahaan secara historis:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2006	2007	2008
	(Rp dalam milyar)		
Arus kas bersih			
Diperoleh dari kegiatan operasi	5.669,6	8.273,9	6.513,3
Digunakan untuk kegiatan investasi	(6.331,0)	(7.290.4)	(10.286,9)
Diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan	(1.248,7)	4.236,9	1.458,5

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Kegiatan Operasional Perusahaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.669,6 milyar, Rp8.273,9 milyar dan Rp 6.513,3 milyar untuk masing-masing pada 2006, 2007 dan 2008. Pada tahun 2006, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional mengalami peningkatan dari tahun 2005 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dari jasa selular dan pendapatan bersih dari pelaksanaan perjanjian *forward* valuta asing. Pada tahun 2007, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional meningkat terutama karena adanya kenaikan pendapatan usaha sebesar Rp4.249,1 milyar yang didorong oleh adanya pertumbuhan di jasa selular, layanan MIDI dan jasa telekomunikasi telepon tetap, meskipun peningkatan tersebut sebagian diimbangi dengan kenaikan biaya interkoneksi sebesar kurang lebih Rp1.333,9 milyar. Pada 2008, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional menurun terutama karena kenaikan biaya operasional sebesar Rp1.992,8 milyar, kenaikan pembayaran beban bunga dan pembayaran premi *cross currency swap* pada tahun 2008.

Kas Bersih Yang Digunakan Dalam Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi adalah sebesar Rp6.331,0 milyar, Rp7.290,4 milyar, dan Rp10.286,9 milyar untuk masing-masing pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi selama 2006, 2007 dan 2008 terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap, masing-masing sebesar Rp6.054,0 milyar, Rp6.933,6 milyar, dan Rp10.307,9 milyar, seiring dengan dilakukannya perluasan cakupan dan kapasitas jaringan Perusahaan. Aktiva tetap yang dibeli terutama meliputi peralatan telekomunikasi lainnya, peralatan kantor, peralatan teknis FWA, peralatan teknis selular dan sarana penunjang bangunan dan partisi.

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Dalam) Kegiatan Pembiayaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan adalah sebesar Rp4.236,9 milyar dan Rp1.458,5 milyar masing-masing pada tahun 2007 dan 2008, sedangkan kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.248,7 milyar. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan pada tahun 2006 sebagian besar berupa pembayaran kembali obligasi yang harus dibayar sebesar Rp956,6 milyar dan pembayaran dividen tunai sebesar Rp809,0 milyar. Pada tahun 2006, kami juga menerima dana dari pinjaman jangka panjang dan hasil dari pelaksanaan ESOP Tahap I dan II, masing-masing sebesar Rp357,4

milyar dan Rp287,9 milyar. Kas bersih yang berasal dari pembiayaan di tahun 2007 berasal dari (i) penerbitan Obligasi Indosat Kelima dan Obligasi Syari'ah Ijarah II, sebesar Rp3.000,0 milyar dan (ii) pinjaman-pinjaman dari Goldman Sachs International, Bank Central Asia dan Bank Mandiri, sejumlah Rp4.450,9 milyar, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran obligasi yang harus dibayar sebesar Rp1.050 milyar dan pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp1.377,7 milyar. Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan pada 2008 terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dan obligasi tambahan yang diterima pada tahun 2008 sejumlah Rp6.776,6 yang sebagian diimbangi dengan pembayaran obligasi sebesar Rp3.828,8 milyar dan pembayaran dividen sebesar Rp1.021,0 milyar.

Hutang

Pada tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki pinjaman yang terhutang sebesar Rp21.756,7 milyar, yang terdiri dari:

- hutang pinjaman (bersih dari beban emisi yang belum diamortisasi dan bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) sebesar Rp10.812,2 milyar;

- hutang obligasi (bersih dari beban emisi yang belum diamortisasi, diskon yang belum diamortisasi dan bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) sebesar Rp10.315,6 milyar;

- pinjaman yang harus dibayar dalam waktu satu tahun sebesar Rp572,5 milyar; dan

- hutang obligasi yang harus dibayar dalam waktu satu tahun sebesar Rp56,4 milyar.

Peningkatan jumlah hutang pinjaman (bersih dari beban emisi yang belum diamortisasi, dan bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) menjadi Rp10.812,2 milyar per tanggal 31 Desember 2008 dari Rp4.249,0 milyar per tanggal 31 Desember 2007 disebabkan terutama oleh pencairan uang pinjaman tambahan dari Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS kami, Fasilitas HSBC COFACE, Fasilitas HSBC Sinosure dan Fasilitas Pinjaman Bank DBS Indonesia tahun 2008 dan juga jumlah tambahan dari peningkatan nilai wajar opsi pertukaran valuta asing dari Fasilitas Pinjaman Goldman Sachs International.

Peningkatan hutang obligasi (bersih dari beban emisi yang belum diamortisasi, diskon yang tidak diamortisasi dan bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) menjadi Rp10.315,6 milyar per tanggal 31 Desember 2008 dari Rp10.088,7 milyar per tanggal 31 Desember 2007 terutama disebabkan oleh penerbitan Obligasi Indosat Ke-enam dan Sukuk Ijarah Ketiga kami pada 2008. Rasio hutang terhadap ekuitas Perusahaan meningkat dari 100,9% per tanggal 31 Desember 2007 menjadi 125,0% per tanggal 31 Desember 2008. Perjanjian-perjanjian kredit yang ada mengatur, antara lain, beberapa ketentuan pembatasan *(negative covenants)* termasuk pembatasan rasio *debt service coverage*, pembatasan total hutang dan larangan menjaminkan, menjual aset atau mengadakan penggabungan usaha. Lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan - Hutang-Hutang Pokok."

Dari waktu ke waktu, kami dapat membeli kembali sebagian dari efek hutang kami melalui transaksi-transaksi pasar terbuka berdasarkan ketentuan-ketentuan pasar yang berlaku secara umum. Pada tanggal 12 dan 13 September 2005, kami membeli kembali sebagian Obligasi Seri A dari Obligasi Indosat Pertama yang bernilai pokok sebesar Rp48,5 milyar, dengan harga sebesar 101,175% dari nilai pokok yang dibeli kembali dan ditambah bunga yang belum dibayar sebesar Rp50,6 milyar.

Setelah pengambilalihan yang dilakukan Qtel sebesar 40,81% dari modal saham Perusahaan yang ditempatkan pada Juni 2008, kami melakukan penawaran sehubungan perubahan pengendalian kami untuk membeli kembali semua *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo pada tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* jatuh tempo pada tahun 2012 secara tunai pada harga 101% dari jumlah pokok ditambah bunga. Berdasarkan penawaran akibat perubahan pengendalian ini, kami membeli kembali US$65,2 juta dan US$140,6 juta jumlah pokok dari masing-masing *Guaranteed Notes* jatuh tempo pada tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* jatuh tempo pada tahun 2012. Pada bulan Mei dan November 2007, kami juga membayar kembali sebagian pinjaman dari Fasilitas Kredit Ekspor kami sejumlah US$7,6 juta. Kami membayar kembali Rp1.860,0 milyar atas Obligasi Indosat Ketiga kami untuk Obligasi Indosat Ketiga Seri A yang telah jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2008.

Penjelasan berikut ini berisi tentang hutang jangka panjang utama kami dan piutang obligasi.

Obligasi Indosat Kedua

Pada tanggal 6 November 2002, kami menerbitkan Obligasi Indosat Kedua dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang. Total nilai nominal Obligasi Indosat Kedua adalah sebesar Rp1.075,0 milyar. Obligasi tersebut terdiri dari tiga seri:

- Obligasi Seri A, memiliki nilai nominal awal sebesar Rp775,0 milyar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 15,75% per tahun dimulai dari tanggal 6 Februari 2003. Obligasi Seri A jatuh tempo pada tanggal 6 November 2007.

- Obligasi Seri B, memiliki nilai nominal awal sebesar Rp200,0 milyar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 16% per tahun yang terhutang per-tiga bulanan selama 30 tahun dimulai dari tanggal 6 Februari 2003. Kami berhak membeli kembali Obligasi Seri B, seluruhnya dan bukan sebagian, masing-masing pada ulang tahun emisi Obligasi Seri B ke-5, 10, 15, 20 dan 25 dengan harga senilai 101% dari nilai nominal Obligasi Seri B. Pemegang Obligasi Seri B dapat menggunakan opsi jualnya yang memberikan hak bagi para pemegangnya untuk mendapat pelunasan lebih awal dari kami dengan harga sebesar 100% dari nilai nominal Obligasi Seri B (i) pada setiap waktu, apabila peringkat obligasi tersebut turun menjadi "idAA-" atau lebih rendah atau (ii) pada ulang tahun emisi Obligasi Seri B ke-15, 20 dan 25. Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 6 November 2032.

- Obligasi Seri C, memiliki nilai nominal awal sebesar Rp100,0 milyar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 15,625% per tahun untuk tahun pertama yang dimulai sejak tanggal 6 Februari 2003 dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tanggal 6 November 2007. Tingkat suku bunga mengambang ditentukan dengan menggunakan tingkat suku bunga terakhir untuk deposito tiga bulanan dari Bank Indonesia, ditambah 1,625% per tahun. Tingkat suku bunga mengambang memiliki batas maksimum sebesar 18,5% per tahun dan batas minimum sebesar 15% per tahun. Obligasi Seri C jatuh tempo pada tanggal 6 November 2007.

Obligasi Indosat Kedua tidak dijamin dengan aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lainnya dan memiliki peringkat yang sama (pari passu) dengan hutang kami lainnya yang tidak dijamin. Kami telah menyetujui beberapa ketentuan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk mempertahankan:

- Ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000,0 milyar;

- rasio total pinjaman ditambah hutang pengadaan terhadap EBITDA kurang dari 3,50 : 1,00;

- rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 1,75 : 1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi triwulan; dan

- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 sampai dengan 2006 sebesar 2,5 : 1 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sekurang-kurangnya 3,0 : 1.

Pada tanggal 6 November 2007, kami telah melunasi Obligasi Indosat Kedua Seri A dan Seri C sebesar Rp875,0 milyar. Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan pemilik dari obligasi dalam mata uang Rupiah kami, termasuk pemilik Seri B Obligasi Indosat Kedua, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA" termasuk definisi baru mengenai "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan obligasi ini.

Obligasi Indosat Ketiga

Pada tanggal 15 Oktober 2003, kami menerbitkan Obligasi Indosat Ketiga dalam dua seri dengan total nilai nominal sebesar Rp2.500,0 milyar. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2008 dan Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2010.

Total nilai nominal Obligasi Seri A adalah sebesar Rp1.860,0 milyar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,50% per tahun. Total nilai nominal Obligasi Seri B adalah sebesar Rp640,0 milyar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,875% per tahun. Bunga untuk Obligasi Indosat Ketiga dibayarkan setiap tiga bulanan. Kami juga berhak untuk melakukan pembayaran lebih awal atas semua Obligasi Seri B pada ulang tahun emisi ke-4 dan ke-6, dengan harga senilai 100% dari nilai nominal obligasi. Setelah ulang tahun pertama obligasi, kami berhak membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi dengan harga pasar.

Obligasi Indosat Ketiga tidak dijamin dengan aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lainnya dan memiliki peringkat pari passu dengan hutang kami lainnya yang tidak dijamin. Hasil penerbitan Obligasi Indosat Ketiga digunakan untuk melunasi hutang anak perusahaan yang bergabung dengan kami, yaitu Satelindo. Kami telah menyetujui beberapa ketentuan mengenai pembatasan tertentu (*negative covenants*) sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Ketiga, termasuk namun tidak terbatas untuk mempertahankan:

- Ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000,0 milyar;

- rasio total pinjaman ditambah hutang pengadaan terhadap EBITDA kurang dari 3,50 : 1,00;

- rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 1,75 : 1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan; dan

- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 sampai dengan 2006 sekurang-

kurangnya 2,5 : 1 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 2010 sekurang-kurangnya 3 : 1.

Kami telah membayar sebesar Rp1.860,0 milyar untuk Obligasi Indosat Ketiga kami pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A pada 21 Oktober 2008. Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan pemilik dari obligasi dalam mata uang Rupiah kami, termasuk pemilik Seri B Obligasi Indosat Ketiga, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA", menambahkan definisi baru untuk "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan obligasi ini.

Obligasi Indosat Ke-empat

Pada tanggal 21 Juni 2005, kami menerbitkan Obligasi Indosat Keempat. Obligasi Indosat Keempat ini memiliki total nilai nominal sebesar Rp815,0 milyar dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2011. Tingkat suku bunga Obligasi Indosat Keempat adalah tingkat suku bunga tetap sebesar 12% per tahun, yang terhutang setiap tiga bulanan. Kami berhak melakukan pembayaran lebih awal atas semua obligasi pada ulang tahun keempat dari emisi Obligasi Indosat Keempat, dengan harga setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi. Setelah ulang tahun pertama obligasi, kami berhak membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi dengan harga pasar.

Obligasi Indosat Ke-empat tidak dijamin dengan aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lainnya dan memiliki peringkat pari passu dengan hutang kami lainnya yang tidak dijamin. Hasil penerbitan Obligasi Indosat Keempat telah digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka memperluas bisnis selular kami. Kami menyetujui beberapa ketentuan mengenai pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Keempat, termasuk namun tidak terbatas untuk mempertahankan:

- Ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000,0 milyar;
- rasio total pinjaman ditambah hutang pengadaan terhadap EBITDA kurang dari 3,50 : 1,00;
- rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 1,75 : 1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan untuk masing-masing tahun 2005 sampai dengan 2006 sekurang-kurangnya 2,5 : 1 dan untuk masing-masing tahun 2007 sampai dengan 2011 sekurang-kurangnya 3 : 1.

Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan semua pemilik dari obligasi dalam mata uang Rupiah kami, termasuk pemilik Obligasi Indosat Keempat, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA", menambahkan definisi baru untuk "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan di obligasi ini.

Obligasi Indosat Kelima

Pada tanggal 29 Mei 2007, kami menerbitkan Obligasi Indosat Kelima dalam dua seri dengan total nilai nominal sebesar Rp2.600,0 milyar. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2014 dan Obligasi Seri B akan

jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2017. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,2% per tahun dan Obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,65% per tahun. Setelah ulang tahun pertama obligasi, kami berhak membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi dengan harga pasar, baik sementara ataupun untuk tujuan pembayaran dini.

Obligasi Indosat Kelima tidak dijamin dengan aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lainnya dan memiliki peringkat pari passu dengan hutang kami lainnya yang tidak dijamin. Hasil Obligasi Indosat Kelima telah digunakan untuk membiayai rencana pengeluaran modal. Kami menyetujui beberapa ketentuan mengenai pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Kelima, termasuk namun tidak terbatas untuk mempertahankan:

- Ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000milyar;
- rasio total pinjaman ditambah hutang pengadaan terhadap EBITDA kurang dari 3,5 : 1;
- rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 1,75 : 1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya sebesar 3 :1.

Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan semua pemilik dari Pinjaman denominasi Rupiah kami, termasuk pemilik Obligasi Indosat Kelima, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA" dan "Ekuitas", menambahkan definisi baru mengenai "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan obligasi ini.

Obligasi Indosat Keenam

Pada tanggal 9 April 2008, kami telah menerbitkan Obligasi Indosat Keenam dalam dua seri dengan total nilai nominal sebesar Rp1.080.0 milyar. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013 dan Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2015. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, dan Obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,80% per tahun, untuk jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah ulang tahun pertama obligasi tersebut, kami berhak membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi dengan harga pasar, baik sementara ataupun untuk tujuan pembayaran dini.

Obligasi Indosat Keenam tidak dijamin dengan aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lainnya dan memiliki peringkat pari passu dengan hutang kami lainnya yang tidak dijamin. Kami menggunakan hasil penerbitan Obligasi Indosat Keenam untuk membiayai penambahan *base station sub-system* dan sistem transmisi. Kami telah menyetujui beberapa ketentuan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenants*), seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Obligasi Indosat Kelima. Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan pemilik dari obligasi dalam mata uang Rupiah kami, termasuk pemilik Obligasi Indosat Keenam, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA" dan "Ekuitas", menambahkan definisi baru mengenai "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan di obligasi ini.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010

Pada bulan Oktober 2003, anak perusahaan kami di bidang pembiayaan, Indosat Finance Company B.V., menerbitkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki total nilai nominal sebesar US$300.0 juta dan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,75% per tahun yang terhutang dalam cicilan enam bulanan dan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei dan 5 November setiap tahun, dimulai sejak tanggal 5 Mei 2004. Indosat Finance Company B.V. dapat membeli kembali sebanyak-banyaknya 35,0% dari total nilai pokok dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan dana dari satu atau lebih saham publik yang kami tawarkan, dengan harga senilai 107,75% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 juga dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Finance Company B.V., secara keseluruhan atau sebagian pada setiap waktu, pada atau setelah tanggal 5 November 2008 dengan harga senilai 103,875%, pada atau setelah tanggal 5 November 2009 dengan harga senilai 101,9375% dan pada atau setelah tanggal 5 November 2010 dengan harga senilai 100,0% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. Indosat memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 tercatat di Luxembourg Stock Exchange dan di Official List dari Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Finance Company B.V., secara keseluruhan tetapi tidak sebagian pada setiap waktu, dengan harga senilai 103,5625% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya sampai dengan tanggal pembelian kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi pajak penghasilan di Indonesia dan Belanda yang mengharuskan Indosat Finance Company B.V. atau kami membayar uang tambahan sehubungan dengan hutang yang melebihi jumlah tertentu. Apabila terjadi perubahan kendali di dalam Indosat Finance Company B.V. (termasuk penjualan, pemindahan, pengalihan, lease, penyerahan atau pelepasan lainnya atas semua atau sebagian besar aktivanya), seorang pemegang surat hutang berhak meminta Indosat Finance Company B.V. untuk membeli kembali semua atau sebagian dari surat hutang yang dimilikinya dengan harga senilai 101% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada, sampai dengan tanggal pembelian.

Indosat menerima hasil *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 pada tanggal 5 November 2003 berdasarkan perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan Indosat Finance Company B.V. dan menggunakan dananya terutama untuk melunasi sebagian hutang kami yang ada. Kami menyetujui beberapa ketentuan berkenaan dengan penerbitan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010, termasuk namun tidak terbatas pada kesepakatan-kesepakatan yang melarang kami untuk:

- mengadakan hutang tambahan;
- membayar dividen atau melakukan pembagian modal saham;
- membeli atau menarik kembali modal saham;
- melakukan penggadaian;
- menjual, menggadaikan, menjadikan agunan atau melepaskan modal saham dari anak perusahaan kami;

- menjual aktiva;
- mengadakan kesepakatan yang melarang pembagian dividen dari anak perusahaan;
- mengadakan transaksi dengan, atau untuk kepentingan, salah satu afiliasi;
- mengadakan transaksi *sale and lease back*;
- menjalankan usaha selain dari usaha telekomunikasi; atau
- melakukan konsolidasi, penggabungan usaha atau menjual semua atau sebagian besar aktiva kami, selain dari dalam rangka transaksi tertentu antara kami dengan satu atau lebih anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh kami.

Pada tanggal 11 Januari 2006, kami telah menyelesaikan proses permohonan persetujuan sehubungan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. Tujuan utama dari permohonan persetujuan adalah untuk mengubah beberapa ketentuan berkenaan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012. Dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012, kami dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan administrasi, dan untuk mengubah beberapa ketentuan yang termuat dalam surat perjanjian berkenaan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 yang lebih ketat lagi larangannya. Pada 19 September 2008, kami telah menyelesaikan penawaran sebagai akibat dari perubahan pengendalian untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. Per 31 Desember 2008 terdapat US$234,7 juta nilai pokok dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 yang terhutang.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012

Pada tanggal 22 Juni 2005, anak perusahaan pembiayaan kami, Indosat International Finance Company B.V., menerbitkan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 dengan tingkat suku bunga 7,125%, atau Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki total nilai nominal sebesar US$250.0 juta yang diterbitkan pada 99,323% dari nilai nominal tersebut dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2012. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,125% per tahun yang terhutang dalam cicilan enam bulanan, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni dan 22 Desember setiap tahun, dimulai sejak tanggal 22 Desember 2005. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Finance Company B.V., secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap waktu pada atau setelah tanggal 22 Juni 2010 dengan harga senilai 103,5625%, pada atau setelah tanggal 22 Juni 2011 dengan harga senilai 101,7813% dan pada atau setelah tanggal 22 Juni 2012 dengan harga senilai 100,0% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. Selain itu, sebelum tanggal 22 Juni 2008, Indosat International Finance Company B.V. dapat membeli kembali sebanyak-banyaknya 35,0% dari hasil satu atau lebih penawaran saham publik Perusahaan, dengan harga senilai 107,125% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 juga dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat International Finance Company B.V., secara keseluruhan tetapi tidak sebagian pada setiap waktu, dengan harga senilai 103,5625% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya sampai dengan tanggal pembelian kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi pajak penghasilan di Indonesia dan Belanda yang mengharuskan Indosat Finance Company B.V.

atau kami membayar sejumlah tambahan sehubungan dengan hutang yang melebihi jumlah tertentu. Apabila terjadi perubahan kendali di dalam Indosat Finance Company B.V. (termasuk penjualan, pemindahan, pengalihan, lease, penyerahan atau pelepasan lainnya atas semua atau sebagian besar aktivanya), seorang pemegang surat hutang berhak meminta Indosat Finance Company B.V. untuk membeli kembali semua atau sebagian dari surat hutang yang dimilikinya dengan harga senilai 101% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada, sampai dengan tanggal pembelian. Indosat memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 tercatat di Luxembourg Stock Exchange dan di Official List dari Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Perusahaan menerima hasil penerbitan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 pada tanggal 23 Juni 2005 berdasarkan perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan Indosat Finance Company B.V. dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi sebagian hutang kami yang ada. Kami menyetujui beberapa ketentuan berkenaan dengan penerbitan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 yang sebagian besar serupa dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan *consent solicitation*.

Sebagai bagian dari strategi manajemen permodalan Perusahaan, kami berencana untuk membeli sebagian *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 sampai dengan sebesar US$100,000,000, secara keseluruhan melalui kombinasi dari dua *notes* yang tidak akan bernilai lebih dari 25,0% dari nilai pokok dari salah satu *notes* tersebut. Tetapi, dikarenakan perubahan keadaan pasar, kami membatalkan rencana ini pada tanggal 7 April 2008. Pada tanggal 19 September 2008, kami menyelesaikan proses penawaran perubahan pengendalian untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012. Per 31 Desember 2008, terdapat US$109,4 juta nilai pokok dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 yang terhutang.

Fasilitas Export Credit

Pada tanggal 12 Mei 2006, kami mengadakan perjanjian fasilitas berjangka dengan Finnish Export Credit Ltd, sebagai pemberi pinjaman, dan ABN Amro Bank, N.V. sebagai agen fasilitas (*facility agent*), untuk fasilitas kredit ekspor, atau Fasilitas Kredit Ekspor, dengan total jumlah pokok sebesar US$38.0 juta. Jangka waktu fasilitas kredit ekspor adalah 60 bulan sejak tanggal perjanjian dan harus dibayar dalam sepuluh kali cicilan dengan jumlah yang sama yang dibagi rata selama jangka waktu fasilitas. Fasilitas kredit ekspor memiliki tingkat suku bunga 4,15% per tahun, yang dihitung dengan mengacu pada tingkat suku bunga komersial untuk Dolar AS. Setelah dilakukan penarikan fasilitas berdasarkan fasilitas kredit ekspor dan pelunasan, jumlah tersebut tidak lagi tersedia untuk dipinjamkan secara berulang. Perjanjian fasilitas memuat ketentuan-ketentuan tertentu tentang keuangan. Selama tahun 2006 dan 2007, kami membayar cicilan untuk fasilitas kredit ini masing-masing sebesar US$3,8 juta dan US$7,6 juta. Per tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki hutang sebesar US$19,0 juta berdasarkan fasilitas kredit ekspor ini. Pada tanggal 20 Maret 2009, kami membuat perjanjian dengan Finnish Export Credit Ltd untuk merubah definisi "Hutang", "EBITDA", "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas dalam fasilitas Kredit Ekspor kami sesuai dengan ketentuan amandemen perjanjian.

Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama

Pada tanggal 21 Juni 2005, kami menerbitkan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, yang memuat ketentuan-ketentuan yang umum digunakan dalam prinsip pembiayaan Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama memiliki total nilai nominal sebesar Rp285,0 milyar dan jatuh tempo pada 21 Juni 2011.

Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama tidak dijamin dengan suatu aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lain dan memiliki peringkat yang sama *(pari passu)* dengan hutang kami yang lainnya yang tidak dijamin. Para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama menerima cicilan imbalan Ijarah, yang terhutang setiap tiga bulanan, yang dihitung berdasarkan porsi dari pemegang yang bersangkutan atas Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, yang mana mengacu pada pendapatan usaha dari penyewaan layanan Indosat World Link. Para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama berhak atas persentase tertentu dari pendapatan usaha tersebut. Total Biaya Cicilan Ijarah, yang akan dibayar kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, adalah sebesar Rp34,2 milyar per tahun. Kami berhak melakukan pembayaran lebih awal atas semua Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama pada ulang tahun emisi keempat dengan harga senilai 100% dari nilai nominal Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama. Setelah ulang tahun pertama emisi, kami berhak membeli kembali sebagian atau seluruh Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama dengan harga pasar, baik sementara ataupun untuk tujuan pembayaran dini.

Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama tidak dijamin dengan aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lain. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, kami menyetujui untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Obligasi Indosat Keempat. Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan semua pemilik dari obligasi dalam mata uang Rupiah kami, termasuk pemilik Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA" meanambahkan definisi baru mengenai "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama ini.

Sukuk Ijarah Kedua

Pada tanggal 29 Mei 2007, kami menerbitkan Sukuk Ijarah Kedua, yang memuat ketentuan-ketentuan yang umum digunakan untuk fasilitas pembiayaan Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah Kedua memiliki total nilai nominal hingga Rp400,0 milyar dan jatuh tempo pada bulan Mei 2014.

Sukuk Ijarah Kedua tidak dijamin dengan suatu aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lain dan memiliki peringkat yang sama *(pari passu)* dengan hutang kami yang lainnya yang tidak dijamin. Para pemegang Sukuk Ijarah Kedua menerima cicilan imbalan ijarah, yang terhutang setiap tiga bulanan, yang dihitung berdasarkan porsi dari pemegang yang bersangkutan atas Sukuk Ijarah Kedua, yang mengacu pada pendapatan usaha dari penyewaan sirkit kami. Para pemegang Sukuk Ijarah Kedua berhak atas persentase tertentu dari pendapatan usaha tersebut. Total Cicilan Imbalan Ijarah, yang akan dibayar kepada para pemegang Sukuk Ijarah Kedua, adalah sebesar Rp40,8 milyar per tahun. Setelah ulang tahun pertama emisi Sukuk Ijarah Kedua, kami berhak membeli kembali sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah Kedua dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah Kedua, kami telah menyetujui beberapa ketentuan-ketentuan yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Obligasi Indosat Kelima. Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan pemilik dari obligasi dalam mata uang Rupiah kami, termasuk pemilik Sukuk Ijarah Kedua, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA" dan "Ekuitas" dan menambahkan definisi baru mengenai "Grup" dan rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Kedua ini.

Sukuk Ijarah Ketiga

Pada tanggal 9 April 2008, kami menerbitkan Sukuk Ijarah Ketiga, yang memuat ketentuan-ketentuan yang umum digunakan untuk fasilitas pembiayaan Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah Ketiga memiliki total nilai nominal sebesar Rp570,0 milyar dan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013.

Sukuk Ijarah Ketiga tidak dijamin dengan suatu aktiva tertentu atau dijamin oleh pihak lain dan memiliki peringkat yang sama *(pari passu)* dengan hutang kami yang lainnya yang tidak dijamin. Para pemegang Sukuk Ijarah Ketiga menerima cicilan imbalan ijarah, yang terhutang setiap tiga bulanan, yang dihitung berdasarkan porsi dari pemegang yang bersangkutan atas Sukuk Ijarah Ketiga, yang mengacu pada pendapatan usaha dari layanan Indosat World Link dan Internet Network Provider. Para pemegang Sukuk Ijarah Ketiga berhak atas persentase tertentu dari pendapatan usaha tersebut. Total Cicilan Imbalan Ijarah, yang akan dibayar kepada para pemegang Sukuk Ijarah Ketiga, adalah Rp58,425 milyar per tahun. Setelah ulang tahun pertama emisi Sukuk Ijarah Ketiga, kami berhak membeli kembali sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah Ketiga dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah Ketiga, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Obligasi Indosat Keenam. Pada 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan semua pemilik dari obligasi dalam mata uang Rupiah kami, termasuk pemilik Sukuk Ijarah Ketiga, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA" dan "Ekuitas" menambah definisi baru mengenai "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Ketiga ini.

Fasilitas Pinjaman Goldman Sachs International

Pada tanggal 30 Mei 2007, kami menerima pinjaman dari Goldman Sachs International, atau GSI, sebesar Rp434,3 milyar. Pinjaman tersebut diberikan kepada kami dalam jumlah US$50 juta untuk membiayai pembelian perangkat telekomunikasi. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, yang harus dibayar setiap tiga bulan pada tanggal 28 Februari, 30 Mei, 30 Agustus dan 30 November, mulai sejak 30 Agustus 2007 sampai dengan 30 Mei 2012.

Perjanjian pinjaman tersebut memberikan opsi bagi GSI untuk mengkonversikan pinjaman tersebut menjadi pinjaman dalam Dolar AS sebesar US$50.0 juta pada tanggal 30 Mei 2012, atau Opsi Konversi. Nilai wajar dari Opsi Konversi dinyatakan sebagai bagian dari hutang jangka panjang. Jika GSI menggunakan opsi tersebut, maka sejak tanggal 30 Mei 2012, pinjaman akan dikenakan suku bunga tetap sebesar 6,45% terhadap nilai pokok atas jumlah US$50.0 juta. Hutang pokok dan bunga dalam mata uang Dolar AS tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013.

Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan GSI mengenai peristiwa-peristiwa berikut yang dapat mengakibatkan pengakhiran pinjaman seperti (i) perubahan-perubahan tertentu yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan di Inggris ataupun Indonesia, (ii) cidera janji berdasarkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012, (iii) cidera janji berdasarkan notes yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang dollar AS atau cidera janji berdasarkan *notes* yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, (iv) pembelian kembali, pembelian atau pembatalan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 dan tidak ada hutang lain dalam mata uang Dolar AS

yang masih terhutang, dan (v) perubahan kendali dalam Perusahaan. Pada 24 Juni 2008, GSI tidak melaksanakan haknya untuk mengakhiri pinjaman tersebut sebagai hasil dari perubahan pengendalian yang dipicu oleh akuisisi Qtel terhadap 40,81% kepemilikan atas modal saham Perusahaan yang telah diterbitkan dan beredar, pada Juni 2008.

Fasilitas Pinjaman Bank Central Asia

Pada tanggal 28 Agustus 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Central Asia, atau BCA sebesar Rp1.600,0 milyar untuk membayar kembali Fasilitas Pinjaman Sindikasi kedua dan membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun dan seluruh pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulanan. Pada tanggal 20 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit tambahan sebesar Rp400,0 milyar dari BCA. Akibatnya, keseluruhan jumlah pokok dari fasilitas kredit dengan BCA menjadi sebesar Rp2.000,0 milyar. Pembayaran kembali atas pinjaman yang dicairkan akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun pertama dan kedua setelah pencairan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun ketiga dan keempat setelah pencairan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun kelima setelah pencairan pertama. Pada tanggal 27 September, 26 Oktober dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan pencairan pinjaman pertama, kedua dan ketiga dengan jumlah total sebesar Rp2.000,0 milyar. Pada 27 September 2008, kami membayar cicilan pertama tengah tahunan kami sejumlah Rp200,0 milyar.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Obligasi Indosat Kelima. Pada tanggal 12 Februari 2009, kami telah mengadakan perjanjian dengan BCA untuk mengubah definisi "EBITDA" menambah definisi mengenai "Pinjaman", "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 dalam fasilitas pinjaman kami sesuai dengan ketentuan perjanjian perubahan.

Fasilitas Pinjaman Bank Mandiri

Pada tanggal 18 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp2.000,0 milyar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun, dan semua bunga terhutang tiap tiga bulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah dicairkan akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun pertama dan kedua setelah pencairan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun ketiga dan keempat setelah pencairan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pada tanggal 27 September dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan pencairan pinjaman pertama dan kedua sebesar Rp2.000,0 milyar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Obligasi Indosat Kelima. Pada 27 September 2008, kami membayar cicilan pertama kami sejumlah Rp200,0 milyar. Pada tanggal 23 Maret 2009, kami telah mengadakan perjanjian dengan Bank Mandiri untuk melakukan pada perubahan definisi

"EBITDA", menambah definisi baru mengenai "Pinjaman", "Ekuitas" dan "Grup" dan rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dalam pinjaman kami sesuai dengan ketentuan perjanjian perubahan.

Fasilitas Pinjaman Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 1 November 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp500,0 milyar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman tersebut dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,7% untuk tahun pertama dan 10,4% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga yang berlaku untuk sertifikat Bank Indonesia tiga bulan ditambah 1,5% per tahun dan semua bunga terhutang tiap tiga bulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah dicairkan akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun pertama dan kedua setelah pencairan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun ketiga dan keempat setelah pencairan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Obligasi Indosat Kelima. Pada 1 Januari 2008, kami mencairkan seluruh fasilitas. Pada 31 Desember 2008, kami memiliki Rp500,0 milyar hutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman Bank DBS Indonesia. Pada tanggal 25 Maret 2009, kami mengadakan perjanjian dengan Bank DBS Indonesia untuk mengubah definisi "EBITDA", menambah definisi baru mengenai "Pinjaman", "Ekuitas" dan "Grup" dan rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dalam pinjaman kami sesuai dengan ketentuan perjanjian perubahan.

Pembiayaan Satelit HSBC

Pada tanggal 27 November 2007, kami menandatangani dua perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan HSBC Perancis dan satu perjanjian fasilitas dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, atau HSBC Jakarta untuk membiayai satelit telekomunikasi kami yang baru. Gabungan fasilitas kredit ekspor dan pembiayaan komersial ini terdiri dari:

- Perjanjian Fasilitas Berjangka COFACE 12 tahun sebesar US$157,2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% dari nilai Muatan Perancis berdasarkan Kontrak Satelit Palapa-D ditambah 100% Premi COFACE. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap tahunan sebesar 5,69%, yang terhutang setiap enam bulanan;

- Perjanjian Fasilitas Berjangka Sinosure 12 tahun sebesar US$44.2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% dari nilai Kontrak Jasa Peluncuran Satelit. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dolar AS sebesar LIBOR ditambah 0,35% per tahun, yang terhutang setiap enam bulan; dan

- Perjanjian Fasilitas Komersial 9 tahun sebesar US$27.0 juta untuk membiayai pembangunan dan peluncuran satelit dan pembayaran premi yang berkaitan dengan polis asuransi kredit pembelian jangka menengah dan jangka panjang sehubungan dengan Fasilitas Sinosure. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dolar AS sebesar LIBOR ditambah 1,45% per tahun, yang terhutang setiap enam bulanan.

Per tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki hutang sebesar US$104,1 juta yang belum dibayar berdasarkan Fasilitas COFACE, hutang sebesar US$28,6 juta yang belum dibayar berdasarkan Fasilitas Sinosure dan US$27,0

juta yang belum dibayar berdasarkan Fasilitas Komersial. Pada tanggal 18 Maret 2009, kami mengadakan perjanjian dengan HSBC Perancis dan HSBC Jakarta untuk merubah definisi "Pinjaman", "EBITDA" dan "Ekuitas" dan rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dalam Perjanjian Fasilitas COFACE, Perjanjian Fasilitas Sinosure dan Perjanjian Fasilitas Komersial.

Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS

Pada tanggal 12 Juni 2008, kami menandatangani fasilitas kredit sindikasi sebesar US$450.0 juta dengan 13 bank dan lembaga keuangan dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura dan DBS Bank Ltd. sebagai arrangers. Jumlah bunga yang harus dibayar atas hutang tersebut terdiri dari (i) marjin yang berlaku sebesar 1,85 persen per tahun untuk pemberi pinjaman non-Indonesia atau 1,90 persen per tahun untuk pemberi pinjaman yang bertempat tinggal di Indonesia dan (ii) LIBOR. Pembayaran kembali atas hutang yang telah dicairkan akan dibuat dengan cara cicilan per enam bulanan dimulai sejak tanggal 12 Juni 2011. Pada tanggal 24 Februari 2009, kami menandatangani suatu perjanjian dengan mayoritas kreditur untuk mengubah definisi "Hutang", "EBITDA" dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, dan perubahannya, kami telah menyetujui pembatasan (*covenant*) tertentu, termasuk namun tidak terbatas untuk menjaga pembatasan sebagai berikut:

- rasio total pinjaman terhadap EBITDA kurang dari 3,5 : 1;
- rasio pinjaman terhadap modal sebesar 2,5 : 1; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap akhir tahun buku dan pada akhir setiap 3 bulan pertama tahun buku kami, sekurang-kurangnya 2,5 : 1.

Pada 26 September dan 30 Oktober 2008, Perusahaan menerima pencairan pertama dan kedua dari fasilitas kredit ini sejumlah US$450,0 juta. Pada 31 Desember 2008, jumlah belum terbayar dalam fasilitas ini sebesar US$450,0 juta.

Lintasarta

Hutang jangka panjang Lintasarta terdiri dari beberapa fasilitas kredit investasi dari PT Bank Niaga Tbk atau sekarang CIMB Niaga, obligasi konversi yang tidak dijamin dan obligasi terbatas yang tidak dijamin. Per tanggal 31 Desember 2008, total fasilitas kredit investasi dari Bank Niaga adalah Rp49,4 milyar, dan total obligasi yang harus dibayar adalah Rp56,4 milyar.

Fasilitas Kredit Investasi II

Pada tanggal 14 Agustus 2003, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp15,0 milyar dari CIMB Niaga untuk pembiayaan suatu fasilitas *letter of credit*. Jumlah tersebut telah dicairkan pada tahun 2004 dan suku bunga dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulanan yang dijamin oleh Bank Indonesia ditambah 3,0% per tahun. Pinjaman tersebut terhutang setiap tiga bulanan dengan cicilan sebesar Rp1,5 milyar dimulai sejak tanggal 14 November 2004 dan pada bulan Februari 2007, cicilan terakhir telah dibayar lunas.

Fasilitas Kredit Investasi III

Pada tanggal 29 Juni 2004, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit baru dari PT Bank Niaga Tbk, sekarang CIMB Niaga untuk membeli perangkat telekomunikasi, komputer dan fasilitas pendukung lainnya, secara keseluruhan sebesar Rp98,0 milyar. Pinjaman tersebut memiliki tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulanan yang dijamin oleh Bank Indonesia ditambah 3,5% per tahun. Kami telah melakukan pelunasan secara tiga bulanan atas hutang pokok tersebut mulai pada tanggal 29 September 2005 sebesar Rp9,8 milyar setiap tiga bulan sampai dengan tanggal 29 Desember 2007. Pada tanggal 29 Desember 2007 kami telah membayar cicilan terakhir untuk fasilitas kredit ini.

Fasilitas Kredit Investasi IV

Pada tanggal 29 Agustus 2005, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit tanpa jaminan dari PT Bank Niaga Tbk, sekarang CIMB Niaga secara keseluruhan sebesar Rp45,0 milyar untuk pembelian perangkat telekomunikasi, komputer dan fasilitas pendukung lainnya. Pinjaman fasilitas tersebut memiliki tingkat suku bunga berdasarkan tingkat suku bunga tahunan untuk Sertifikat Bank Indonesia berjangka tiga bulanan yang berlaku saat itu ditambah 3,00% per tahun. Pinjaman memberikan tenggang waktu pelunasan hutang pokok tiga-bulanan yang pertama selama 14 bulan sejak tanggal perjanjian pinjaman. Pelunasan secara tiga bulanan atas hutang pokok dimulai sejak tanggal 29 November 2006 sebesar Rp4,5 milyar setiap tiga bulan dan terus berlanjut sampai tanggal 28 Februari 2009. Pada tanggal 28 Februari 2009, kami telah membayar cicilan triwulan terakhir untuk fasilitas kredit ini.

Pinjaman dari CIMB Niaga dijamin dengan perangkat yang dibeli dari dana fasilitas kredit dan piutang dari pengoperasian *frame relay*. Lintasarta juga harus memperoleh persetujuan tertulis dari CIMB Niaga apabila (i) gabungan kepemilikan saham Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia dan Perusahaan di dalam Lintasarta menjadi kurang dari 51,0% selama jangka waktu fasilitas, (ii) Lintasarta menimbulkan hutang baru atau (iii) Lintasarta melakukan investasi lebih dari US$1,0 juta, selain dari investasi untuk bisnisnya yang sudah ada. Lintasarta juga harus mempertahankan rasio keuangan tertentu, termasuk mempertahankan rasio penutupan hutang yang tidak kurang dari 1,20 : 1,00.

Fasilitas Kredit Investasi V

Pada tanggal 10 Juli 2007, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Niaga Tbk, sekarang CIMB Niaga sebesar Rp50 milyar untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer and fasilitas pendukung lain. Pinjaman tersebut memiliki tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga tahunan yang berlaku bagi sertifikat Bank Indonesia berjangka satu bulan ditambah 2,25% per tahun. Kami memulai pelunasan secara tiga bulanan atas hutang pokok tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp5,0 milyar, yang terhutang setiap triwulanan sampai dengan tanggal 10 Januari 2011.

Obligasi Terbatas I

Pada tanggal 2 Juni 2003, Lintasarta dan para pemegang sahamnya telah menyetujui untuk menerbitkan obligasi terbatas kepada para pemegang saham sebesar Rp40,0 milyar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 milyar. Obligasi terbatas tersebut tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 2 Juni 2006. Obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 16% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito

berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah marjin 3,0%, dengan batas maksimum sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 2 September 2003. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menyetujui dengan para pemegang obligasi untuk memperpanjang jatuh tempo dari tanggal 2 Juni 2006 menjadi 2 Juni 2009 dan nilai nominal Obligasi Terbatas menjadi Rp34,9 milyar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 milyar. Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari PT Bank Niaga Tbk, sekarang CIMB Niaga atas perubahan tanggal jatuh tempo dan nilai nominal dari Obligasi Terbatas I.

Obligasi Terbatas II

Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta dan para pemegang sahamnya telah menyetujui untuk mengeluarkan obligasi terbatas kepada para pemegang saham sebesar Rp66,2 milyar, termasuk bagian kami sebesar Rp35,0 milyar. Obligasi tersebut tidak dijamin dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2009. Obligasi memiliki tingkat suku bunga mengambang yang ditentukan dengan mengacu pada rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah marjin 3,0%, dengan batas maksimum sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 14 September 2006. Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari PT Bank Niaga Tbk, sekarang CIMB Niaga atas perubahan tanggal jatuh tempo dan nilai nominal dari Obligasi Terbatas II. Hasil penerbitan Obligasi Terbatas II digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka memperluas jangkauan telekomunikasi Lintasarta.

Kebijakan Dividen

Para pemegang saham menentukan pembayaran dividen di dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi. Di dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang diadakan pada tahun 2006, 2007 dan 2008, para pemegang saham mengumumkan dividen tunai final sebesar 50,0% dari laba bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007. Konsisten dengan hal tersebut, kami berniat untuk terus melakukan pembayaran dividen sebesar antara 30% sampai dengan 50%.

Sumber-Sumber Permodalan

Meskipun menurut kami, sebagian dari sumber-sumber internal dan arus kas dari kegiatan operasional Perusahaan akan digunakan untuk membiayai rencana pengeluaran modal Perusahaan, kami berharap dapat menjajaki peluang perolehan dana dari sumber-sumber eksternal. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tingkat pertumbuhan yang kami harapkan, turunnya peringkat hutang Perusahaan atau melemahnya kinerja keuangan atau rasio keuangan Perusahaan.

Apabila kami tidak dapat membiayai pengeluaran modal yang direncanakan dari arus kas internal Perusahaan, kami akan berupaya memperoleh sumber pembiayaan eksternal lainnya. Kemampuan kami untuk dapat memperoleh hutang pembiayaan tambahan tergantung pada beberapa ketentuan yang diatur pada perjanjian hutang Perusahaan yang telah ada. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan

dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang sesuai (termasuk pembiayaan dari pihak penjual (vendor) atau pihak ketiga lainnya) untuk membiayai pengeluaran modal yang telah direncanakan oleh Perusahaan. Apabila kami tidak dapat mencari sumber pembiayaan eksternal tambahan, maka kami akan memutuskan untuk menurunkan jumlah pengeluaran modal yang telah direncanakan. Penurunan jumlah pengeluaran modal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.

Pengeluaran Modal

Sejarah Pengeluaran Modal Perusahaan

Sejak awal tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, kami telah menginvestasikan dana sebesar Rp28.989,6 milyar (US$2.929,9 juta) di berbagai bidang usaha Perusahaan. Dana ini terutama digunakan untuk membeli peralatan dan jasa-jasa dari pemasok asing sehubungan dengan pengembangan jaringan selular kami. Kami telah menginvestasikan dana sebesar Rp12.341,9 milyar (US$1.127,1 juta) selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dimana investasi tersebut benar-benar difokuskan untuk perluasan jangkauan selular kami melalui penambahan lebih dari 3.402 BTS. Kami memperkirakan pengeluaran modal Perusahaan untuk tahun 2009 akan besar jumlahnya karena kami berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari jaringan selular Perusahaan yang telah ada dan untuk menyelesaikan perluasan jaringan selular yang disebabkan oleh tingkat permintaan di beberapa daerah yang berpenduduk lebih padat dan berpotensi menjadi pelanggan selular.

Pengeluaran Modal untuk Tahun 2009

Berdasarkan program pengeluaran modal Perusahaan, kami berencana untuk menginvestasikan dana sekitar US$600 juta pada tahun 2009 untuk pengeluaran modal bagi berbagai keperluan bisnis Perusahaan.

Kami bermaksud untuk mengalokasikan pengeluaran modal tahun 2009 sebagai berikut:

- Investasi jaringan selular: Kami berencana untuk menggunakan sebagian besar pengeluaran modal Perusahaan untuk membiayai peningkatan dan perluasan kapasitas dan jangkauan jaringan selular kami.

- Investasi lainnya: Kami berencana untuk menginvestasikan sisa anggaran pengeluaran modal Perusahaan untuk dua tahun mendatang di bidang jaringan non-selular, seperti jaringan akses-telepon tetap, oleh karena kami ingin menambah akses jaringan untuk para pelanggan perusahaan dan terus menyediakan layanan suara, sambungan jarak jauh dan layanan MIDI kepada para pelanggan dan juga melakukan pembangunan jaringan *backbone* Perusahaan.

Jumlah-jumlah yang disebutkan di atas merupakan rencana investasi yang telah dimasukkan ke dalam rencana anggaran investasi; pengeluaran yang sebenarnya dapat berbeda tergantung pada beberapa faktor, seperti metode pembiayaan dan waktu diselesaikannya penyerahan perangkat dan jasa yang dibeli. Secara historis, jumlah pengeluaran secara tunai yang sebenarnya hampir mendekati beban yang telah dianggarkan, sebanyak kurang lebih 20,0% dari anggaran.

Rencana pengeluaran modal yang disebutkan di atas adalah berdasarkan pemahaman kami atas kondisi pasar dan peraturan saat ini, dan kami dapat mengubah rencana tersebut apabila terjadi perubahan-perubahan

terhadap kondisi tersebut. Khususnya, tergantung pada kerangka hukum untuk jasa nirkabel lainnya, kami dapat memutuskan untuk meningkatkan investasi kami di jaringan dan jasa akses telepon tetap nirkabel, baik dengan cara menaikkan pengeluaran modal, realokasi rencana pengeluaran modal kami saat ini, mengadakan pola bagi hasil ataupun kombinasi dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Pola bagi hasil dapat berupa kemitraan dengan para investor swasta dimana para investor tersebut akan membiayai pembangunan proyek dengan imbalan perolehan pendapatan dari proyek tersebut, yang serupa dengan struktur *build-operate-transfer*.

Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasi kami telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan penilaian yang mempengaruhi jumlah aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban yang dilaporkan serta aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan serta biaya yang dilaporkan selama periode pelaporan tersebut. Taksiran dan penilaian manajemen didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang relevan pada kondisi tersebut. Kami secara terus menerus mengevaluasi taksiran dan penilaian tersebut. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari taksiran di atas bila asumsi atau kondisi yang sebenarnya berbeda. Kami meyakini dari sejumlah kebijakan akuntansi yang penting, kebijakan di bawah ini mengandung penilaian atau kompleksitas yang lebih tinggi.

Goodwill

Pada saat kami mengakuisisi anak perusahaan yang bukan merupakan perusahaan sepengendali, selisih lebih antara harga perolehan di atas bagian pemilikan kami atas nilai wajar aktiva anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, setelah dikurangi kewajiban, pada tanggal akuisisi diakui sebagai goodwill. Goodwill diamortisasi selama 15 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

Taksiran Umur Manfaat dan Penurunan Nilai Aktiva Tetap

Kami memperkirakan masa manfaat dari aktiva tetap untuk menentukan jumlah beban penyusutan yang dicatat pada tiap periode pelaporan. Masa manfaat diperkirakan pada saat aktiva diperoleh berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan aktiva yang sama, dengan mengantisipasi perubahan teknologi atau perubahan lainnya. Jika perubahan teknologi terjadi lebih cepat atau dalam bentuk yang berbeda dari yang diharapkan, masa manfaat yang telah ditentukan untuk aktiva tersebut dapat dipersingkat, mengakibatkan peningkatan pengakuan beban penyusutan di masa mendatang. Sebagai alternatif, perubahan teknologi ini dapat mengakibatkan suatu beban penurunan nilai yang mencerminkan penurunan nilai dari aktiva tersebut.

Pada tahun 2008, kami menerapkan SAK 16 (Revisi 2007). Berdasarkan SAK16 (Revisi 2007), kami memilih untuk menerapkan metode model biaya (*cost model*) untuk perhitungan aktiva tetap kami. Sejak tanggal 1 Januari 2008, kami mengelompokkan kembali beberapa aktiva tetap berdasarkan penelaahan dan penilaian berkala atas masa manfaat ekonomis atas aset kami. Masa manfaat ekonomis yang tersisa berdasarkan pengelompokkan

baru disesuaikan berdasarkan hal tersebut. Berikut ini adalah perkiraan masa manfaat (dalam tahun) sebelum dan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

	Sebelum Tanggal 1 Januari 2008	Sejak Tanggal 1 Januari 2008
Bangunan	15 sampai 20	20
Kabel laut (*)	12	-
Stasiun bumi (*)	10	-
Kabel bawah tanah (*)	15	-
Peralatan sentral (**)	10	-
Perangkat telekomunikasi lainnya (***)	5	-
Peralatan teknologi informasi	3 sampai 5	3 sampai 5
Peralatan kantor	5	3 sampai 5
Sarana penunjang bangunan dan partisi	5	3 sampai 15
Kendaraan	5	5
Peralatan teknis selular	10 sampai 15	10
Peralatan teknis satelit (*)	12	-
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	12	10 sampai 15
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	10	10
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	-	3 sampai 5
Peralatan jaringan akses tetap	-	10

(*) Klasifikasi ini telah dikelompokkan kembali menjadi peralatan transmisi dan *cross-connection*. Tidak terdapat perubahan dalam taksiran masa manfaat.

(**) Akun ini telah dinamakan kembali menjadi peralatan jaringan akses tetap dan beberapa komponen dalam kelompok ini telah direklasifikasi menjadi peralatan teknis selular dan pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran. Sisa masa manfaat telah disesuaikan.

(***) Akun ini telah dinamakan kembali menjadi pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran. Beberapa komponen dalam kelompok ini direklasifikasi menjadi peralatan teknologi informasi, peralatan kantor, sarana penunjang bangunan dan partisi, peralatan teknis selular, peralatan transmisi dan *cross-connection*, dan peralatan jaringan akses tetap. Sisa masa manfaat telah disesuaikan.

Dana Pensiun dan Kenikmatan Karyawan

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti kami, ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil aktiva dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun. Biaya jasa lalu diamortisasi sepanjang taksiran sisa masa kerja rata-rata karyawan. Kami menerapkan SAK 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja", yang mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan pasca kerja).

Pajak penghasilan

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aktiva dan kewajiban

antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui apabila kemungkinan besar jumlah manfaat pajak pada masa mendatang tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada saat nilai aktiva direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan Undang-Undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau, jika kami mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aktiva atau kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2008, kami mulai menerapkan SAK 30 (Revisi Tahun 2007), "Sewa" yang menggantikan SAK 30 (1990) "Akuntansi Untuk Sewa". Berdasarkan revisi SAK 30, suatu sewa yang mengalihkan sebagian besar risiko dan penghargaan insidental yang terkait dengan kepemilikan diklasifikasikan sebagai dana sewa. Pada saat dimulainya suatu jangka waktu sewa, kami akan mengakui suatu dana sewa sebagai aset dan kewajiban dalam neraca dalam jumlah yang setara dengan nilai wajar dari properti yang disewa atau, apabila lebih rendah, nilai dari pembayaran sewa minimum saat ini. Pembayaran sewa minimum dialokasikan dari biaya investasi dan pengurangan dari kewajiban yang ada. Biaya investasi dialokasikan untuk setiap periode selama jangka waktu sewa. Aset yang disewa dan kami pegang yang didanai dari biaya investasi disusutkan secara konsisten dengan menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dapat susut yang dimiliki secara langsung atau aset yang disusutkan seluruhnya dalam jangka waktu sewa yang lebih singkat dan nilai gunanya, apabila tidak ada kepastian yang wajar bahwa kami dapat memiliki aset tersebut pada akhir jangka waktu sewa. Penerapan SAK yang telah direvisi tidak miliki pengaruh yang bermakna terhadap kami.

Sewa yang tidak mengalihkan sebagian besar risiko dan penghargaan insidental yang terkait dengan kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa operasional. Sewa usaha diakui sebagai beban dengan basis garis lurus (*straight-line basis*) selama jangka waktu sewa.

Rangkuman Perbedaan-Perbedaan Penting antara SAK dan US GAAP

Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan disusun berdasarkan SAK, yang berbeda dalam beberapa aspek yang material dengan US GAAP. Berdasarkan jumlah dan sifat dari perbedaan antara US GAAP dan SAK, para pengguna dari laporan keuangan berdasarkan SAK tidak boleh mengasumsikan bahwa laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan US GAAP. Keterangan dari perbedaan-perbedaan antara SAK dan US GAAP diikhtisarkan di bawah ini.

Penyajian ini tidak dapat dianggap sebagai perbandingan antara perbedaan SAK dan US GAAP secara keseluruhan. Sebagai tambahan, tidak terdapat usaha yang dilakukan dalam hal ini untuk mengidentifikasi semua perbedaan pengungkapan, penyajian atau klasifikasi yang akan berdampak pada perlakukan dimana sebuah peristiwa atau transaksi disajikan dalam laporan keuangan atau catatan-catatan di dalamnya. Selanjutnya, tidak terdapat usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara SAK dan US GAAP di masa mendatang

sebagai hasil dari perubahan standar akuntansi yang telah ditentukan. Badan regulator yang mengumumkan SAK dan US GAAP memiliki proyek-proyek signifikan yang sedang berjalan yang dapat berdampak pada perbandingan di mas a datang, seperti berikut ini.

Bunga yang Dikapitalisasi ke Aktiva dalam Pembangunan dan Pemasangan

Berdasarkan SAK, salah satu kriteria untuk mengkapitalisasi beban bunga ke Aktiva Tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*) (seperti Aktiva dalam Pembangunan dan Pemasangan) adalah bunga yang dikapitalisasi harus dapat diatribusikan dengan aktiva tertentu tersebut. Kapitalisasi beban bunga perusahaan induk ke aktiva anak perusahaan tidak diperbolehkan menurut SAK. Perusahaan tidak mengkapitalisasi bunga atas pinjaman yang penerimaannya tidak digunakan untuk memperoleh Aktiva Tertentu.

Berdasarkan U.S. GAAP, *Statement of Financial Accounting Standards* ("SFAS") No. 34, "*Capitalization of Interest Cost*", tidak disebutkan bahwa beban bunga harus dapat diatribusikan dengan Aktiva Tertentu yang memenuhi syarat; oleh karena itu, bunga yang dapat dikapitalisasi termasuk beban bunga atas pinjaman umum dan khusus. Lebih lanjut, U.S. GAAP mewajibkan kapitalisasi beban bunga perusahaan induk ke seluruh pengeluaran yang memenuhi syarat. Perbedaan jumlah beban bunga yang dikapitalisasi berdasarkan SAK dan U.S. GAAP akan menyebabkan tambahan penyusutan yang diakui berdasarkan U.S. GAAP.

Selanjutnya, US GAAP mengharuskan kapitalisasi dari beban bunga perusahaan induk untuk semua pengeluaran yang memenuhi syarat (*qualifying expenditures*). Selisih jumlah beban bunga yang dikapitalisasi menurut SAK dan US GAAP berdampak pada penambahan beban penyusutan yang diakui berdasarkan US GAAP. Sebagai akibat dari perbedaan ini, setelah mengeluarkan selisih beban depresiasi yang diakibatkan oleh kapitalisasi beban bunga, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp326,3 milyar, Rp488,2 milyar dan Rp890,9 milyar lebih tinggi berdasarkan US GAAP.

Goodwill

Berdasarkan SAK, Goodwill diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat dari Goodwill. Berdasarkan U.S. GAAP, goodwill tidak diamortisasi tetapi ditelaah penurunan nilainya berdasarkan SFAS No. 142, "*Goodwill and Other Intangible Assets*". Sebagai akibat dari perbedaan ini, laba bersih Perusahaan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 akan menjadi masing-masing Rp226,3 milyar, Rp226,3 milyar dan Rp227,5 milyar lebih tinggi berdasarkan US GAAP.

Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan SAK, pendapatan dari jasa penyambungan diakui sebagai pendapatan pada saat aktivasi sambungan (untuk jasa pasca-bayar) atau pada saat aktivasi (untuk jasa pra-bayar). Berdasarkan U.S. GAAP, sesuai dengan *SEC Staff Accounting Bulletin* ("SAB") No. 104, "Revenue Recognition", pendapatan dari jasa penyambungan harus ditangguhkan dan diakui berdasarkan perkiraan jangka waktu hubungan dengan pelanggan yang bersangkutan. Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp43,6 milyar dan Rp10,8 milyar lebih tinggi dan Rp4,2 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

Kapitalisasi Rugi Kurs - Dikurangi Laba Kurs

Berdasarkan SAK, rugi kurs - dikurangi laba kurs atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan sebuah aktiva tertentu harus dikapitalisasi. Kapitalisasi rugi kurs bersih dihentikan pada saat pembangunan secara substansial selesai dan aktiva yang dibangun siap untuk digunakan. Berdasarkan U.S. GAAP, laba atau rugi kurs harus dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan pada saat terjadinya. Kapitalisasi rugi kurs bersih dan beban depresiasi yang bersangkutan berdasarkan SAK harus dibalik untuk tujuan U.S. GAAP. Sebagai akibat dari perbedaan ini dan setelah mengeluarkan selisih beban depresiasi yang diakibatkan oleh kapitalisasi rugi kurs, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, laba bersih Perusahaan akan menjadi Rp33,2 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP. Tidak terdapat kapitalisasi rugi kurs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008.

Hak Atas Tanah

Hak atas tanah di Indonesia, kecuali Hak Milik yang diberikan kepada perorangan, dikuasai oleh negara berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak pemakaian tanah diberikan melalui sertifikat hak atas tanah, di mana pemegang hak dapat memanfaatkan sebidang tanah selama periode tertentu yang dapat diperpanjang. Perusahaan memperkirakan bahwa hak atas tanah dapat diperpanjang dengan biaya nominal yang wajar di masa mendatang. Umumnya hak atas tanah dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat dijadikan jaminan hutang. Praktik yang umum berlaku adalah mengkapitalisasi harga perolehan hak atas tanah dan tidak mengamortisasikannya.

Berdasarkan SAK, biaya lain sehubungan dengan perolehan ijin Pemerintah untuk menggunakan tanah (seperti biaya notaris, pajak dan biaya lainnya) harus diamortisasi selama perkiraan masa pemakaian hak atas tanah yang diperoleh dari Pemerintah, yang dalam hal Perusahaan, berkisar antara 20 sampai 30 tahun. Berdasarkan US GAAP, biaya untuk memperoleh hak atas tanah dan serta biaya-biaya lainnya yang terkait, harus diamortisasi selama masa penggunaan hak atas tanah yang diperoleh dari pemerintah, yang berkisar antara 20 sampai 30 tahun. Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp12,4 milyar, Rp14,6 milyar dan Rp15,7 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

Dana Pensiun

Berdasarkan SAK, Perusahaan menerapkan SAK 24 (Revisi 2004) (Catatan 2q). Berdasarkan SAK 24 (Revisi 2004) tidak terdapat kewajiban peralihan (transition obligation) yang timbul pada saat penerapan awal dari SAK dan biaya jasa lalu diakui sebagai beban secara garis lurus selama periode rata-rata sampai manfaat tersebut menjadi hak karyawan (*vested*).

Berdasarkan U.S. GAAP, mulai pada tahun 2006, Perusahaan menerapkan SFAS No. 158, "*Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Post retirement Plans*", yang diamandemen oleh SFAS No. 87, 88, 106 and 132 (R). Berdasarkan SFAS No. 158, sebuah Perusahaan diharuskan mengakui status program manfaat karyawan yang didanai ataupun tidak didanai dalam neraca keuangan dan juga mengakui sebagai bagian dari Pendapatan Komprehensif Lainnya ("*Other Comprehensive Income*"), setelah pajak, laba atau rugi aktuarial dan biaya atau manfaat jasa lalu serta aktiva atau kewajiban peralihan yang terakumulasi pada tanggal penerapan yang sebelumnya tidak diakui sebagai bagian dari beban pensiun berkala bersih sesuai dengan SFAS No. 87 "*Employers' Accounting for Pensions*". SFAS No. 158 tidak mengubah perhitungan beban pensiun berkala

bersih sesuai dengan SFAS No. 87. Berdasarkan SFAS No. 87, kewajiban peralihan dan biaya jasa lalu diamortisasi sepanjang sisa masa kerja rata-rata karyawan. Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp7,4 milyar, Rp5,9 milyar dan Rp8,9 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

Hak Minoritas

Merupakan dampak bersih bagian pemegang saham minoritas atas ekuitas anak perusahaan, akibat perbedaan antara SAK dan U.S. GAAP yang mempengaruhi laba bersih anak perusahaan. Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp1,3 milyar, Rp0,05 milyar lebih tinggi dan Rp0,6 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

Jaminan Kesehatan Masa Pensiun

Pada bulan Juli 2004, Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") mengeluarkan SAK 24 (Revisi 2004) "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja dan juga mencakup jaminan kesehatan masa pensiun. Berdasarkan SAK 24 (Revisi 2004) tidak terdapat kewajiban peralihan (*transition obligation*) yang timbul pada saat penerapan awal dari SAK dan biaya jasa lalu diakui sebagai beban secara garis lurus selama periode rata-rata sampai manfaat tersebut menjadi hak karyawan (*vested*). Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengakui beban jaminan kesehatan masa pensiun selama taksiran masa kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaria sesuai dengan perlakuan yang diatur dalam SFAS No. 106, "*Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other than Pensions*". Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp0,2 milyar, Rp1,3 milyar dan Rp1,3 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

Mulai pada tahun 2006, Perusahaan menerapkan SFAS No. 158, dimana Perusahaan diharuskan mengakui status program manfaat karyawan yang didanai ataupun tidak didanai dalam neraca keuangan dan juga mengakui sebagai bagian dari Pendapatan Komprehensif Lainnya, setelah pajak, laba atau rugi aktuarial, biaya atau manfaat jasa lalu, serta aktiva atau kewajiban peralihan yang terakumulasi pada tanggal penerapan yang sebelumnya tidak diakui sebagai bagian dari beban manfaat berkala bersih.

Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi

Merupakan dampak dari perbedaan antara SAK dan U.S. GAAP dalam hal akuntansi perusahaan asosiasi untuk selisih kurs atas pinjaman yang berhubungan dengan aktiva dalam pembangunan (lihat Kapitalisasi Rugi Kurs - Dikurangi Laba Kurs di atas). Tidak terdapat bagian laba bersih perusahaan asosiasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008.

Laba Pra-Akuisisi

Merupakan perbedaan proporsi pemegang saham minoritas atas laba bersih IM3 sampai dengan tahun 2003 berdasarkan SAK dan U.S. GAAP pada saat akuisisi hak minoritas Anak Perusahaan tersebut. Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, ekuitas Perusahaan akan menjadi Rp14,3 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

Lainnya

Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian-penyesuaian yang tidak signifikan atas perbedaan antara SAK dan U.S. GAAP. Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp1,6 milyar, Rp0,3 milyar dan Rp0,3 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

Pajak Penghasilan Tangguhan

Rekonsiliasi pajak tangguhan diakibatkan oleh efek pajak dari penyesuaian rekonsiliasi antara SAK dan U.S. GAAP yang diungkapkan di atas. Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan", direvisi untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dampak dari perubahan tarif pajak ini dimasukkan dalam penyesuaian rekonsiliasi pajak tangguhan. Sebagai akibat dari perbedaan ini, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, laba bersih Perusahaan akan masing- masing menjadi Rp152,0 milyar, Rp192,1 milyar dan Rp78,3 milyar lebih rendah berdasarkan US GAAP.

C. Penelitian Pengembangan, Paten dan Lisensi, dan lain-lain

Selama tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008, kami tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat signifikan.

D. Informasi Tentang Trend

Lihat pembahasan pendahuluan pada "Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha" di atas untuk keterangan lebih lanjut mengenai trend-trend penting yang memberikan dampak bagi hasil-hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan. Lihat juga "Butir 3: Informasi Penting—Faktor-Faktor Risiko" untuk keterangan lebih lanjut mengenai mengapa informasi keuangan yang dilaporkan tidak selalu merupakan indikasi hasil usaha di kemudian hari.

E. Penyelenggaraan Off-Balance Sheet

Per tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan tidak mempunyai penyelenggaraan off-balance sheet yang sewa-jarnya dapat memberikan pengaruh pada saat ini atau di kemudian hari terhadap kondisi keuangan, peruba-han kondisi keuangan, pendapatan atau pengeluaran, hasil usaha, likuiditas, pengeluaran modal atau sumber modal Perusahaan, yang bersifat material bagi para investor.

F. Pengungkapan dalam bentuk Tabel (*Tabular Disclosure*) Tentang Kewajiban Kontraktual

Per tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan memiliki kewajiban kontraktual sebesar US$1.402,6 juta dari kontrak-kontrak dalam mata uang asing dan Rp14.481,7 milyar dari kontrak-kontrak dalam mata uang Rupiah. Kewajiban kontraktual dalam mata uang asing yang harus dibayar adalah US$421,7 juta di tahun 2009, US$390,5 juta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan US$498,6 juta dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013

dan US$91,8 juta dalam periode sejak tahun 2014 dan seterusnya. Kewajiban kontraktual dalam mata uang Rupiah yang harus dibayar adalah Rp3.055,7 milyar di tahun 2009, Rp3.089,9 milyar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, Rp4.089,4 milyar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan Rp4.246,7 milyar sejak tahun 2014 dan seterusnya.

	Pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember									
	Total		2009		2010-2011		2012-2013		2014 dan seterusnya	
	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$
Kewajiban kontraktual										
Hutang jangka panjang [1]	4.583,7	645,7	474,4	9,0	1.349,9	155,8	2.759,4	389,1	-	91,8
Hutang Obligasi [1] [2]	6.646,4	344,2	56,4	-	1.740,0	234,7	1.330,0	109,5	3.520,0	-
Kewajiban pembelian	2.524,9	399,4	2.524,9	399,4	-	-	-	-	-	-
Kewajiban tidak lancar lainnya	726,7	13,3	-	13,3	-	-	-	-	726,7	-
Total kewajiban tunai kontraktual	14.481,7	1.402,6	3.055,7	421,7	3.089,9	390,5	4.089,4	498,6	4.246,7	91,8

(1) Angka-angka ini tidak termasuk kewajiban bunga kontraktual yang terkait.
(2) Angka-angka ini telah dihitung berdasarkan asumsi bahwa opsi yang terkait dengan hutang pinjaman dan obligasi, tidak digunakan. Lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan-Hutang Pokok-Obligasi Indosat Kedua" dan "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan-Hutang Pokok- Obligasi Indosat Ketiga."

Butir 6: DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN

Direktur dan Manajemen Senior

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, Perusahaan memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Dua organ perusahaan ini terpisah, dan tidak seorangpun dapat menjadi anggota dari kedua organ perusahaan ini.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris kami terdiri dari sepuluh anggota, satu di antaranya diangkat menjadi Komisaris Utama. Para anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan para pemegang saham yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Dewan Komisaris diajukan oleh pemegang saham Seri A. Sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau Bapepam-LK, dan peraturan Bursa Efek Indonesia, empat orang komisaris telah diangkat sebagai Komisaris

Independen, yaitu: George Thia Peng Heok, Setyanto P.Santosa, Soeprapto S.IP, dan Michael Francis Latimer. Per tanggal 31 Desember 2008, Dewan Komisaris kami terdiri dari sepuluh anggota sebagai berikut:

Nama	Umur	Komisaris Sejak	Jabatan
H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani	49	2008	Komisaris Utama
Dr. Nasser Mohammed Marafih	48	2008	Komisaris
Jarman	51	2008	Komisaris
H.E. Sheikh Mohammed Bin Suhaim Hamad Al Thani	43	2007	Komisaris
Rachmat Gobel	46	2008	Komisaris
Rionald Silaban	43	2008	Komisaris
George Thia Peng Heok	60	2008	Komisaris Independen
Setyanto P.Santosa	62	2005	Komisaris Independen
Soeprapto S.IP	62	2005	Komisaris Independen
Michael Francis Latimer	59	2008	Komisaris Independen

Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Komisaris Perusahaan.

H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak bulan Agustus 2008. Saat ini, Sheikh Abdullah adalah *Chairman of the Board of Directors* Qtel. Dalam kapasitasnya sebagai *Chairman*, beliau telah mengembangkan sistem *corporate governance* Qtel untuk menjamin Qtel dikelola sesuai dengan praktek yang berlaku secara internasional. Sheikh Abdullah telah juga melakukan restrukturisasi dan pengembangan usaha Qtel di regional. Setelah akuisisi Qtel atas Wataniya, suatu perusahaan yang berbasis di Kuwait, dan merupakan transaksi telekomunikasi terbesar di wilayah Arab, Sheikh Abdullah ditunjuk sebagai *Chairman* Wataniya. Sheikh Abdullah juga merupakan anggota dari *Qatari Planning Council* dan *Chief* dari *Royal Court* (Amiri Diwan) sejak 2002 hingga 2005. Sheikh Abdullah memiliki latar belakang yang beragam baik dalam bidang militer maupun penerbangan dan merupakan penerbang bersertifikat (instruktur) dari *British Royal Air Force*.

Dr. Nasser Mohammed Marafih telah menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Agustus 2008 dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi. Dr. Marafih memulai karirnya di Qtel pada tahun 1992 sebagai penasihat ahli dari Universitas Qatar dan selanjutnya ditunjuk sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan (*Director of Strategic Planning and Development*) di tahun 1994 dan sebagai *Chief Executive Officer (CEO)* pada tahun 2002. Beliau telah sukses membawa Qtel melewati program transformasi dan restrukturisasi perusahaan menjadi unit bisnis dan *corporate centers*. Beliau memainkan peran penting dalam akuisisi Qtel atas Wataniya, suatu perusahaan yang berbasis di Kuwait pada 2007, suatu transaksi strategis dengan AT&T untuk memperoleh kepemilikan di NavLink. Dr. Marafih memiliki gelar Bachelor of Science dalam Teknik Elektro, *Master of Science* dan Ph.D. dalam bidang *Communication Engineering*, semuanya dari George Washington University, U.S. Dr. Marafih telah berpartisipasi dalam berbagai Komite pemerintahan tingkat tinggi dan menjadi anggota Direksi Nawras, anak perusahaan Qtel di Oman, *non-executive Director* di Starhub Ltd, Singapura, *non-executive Director* untuk Liberty Telecom Holding Inc di Filipina dan anggota Direksi Al Thuraya Satellite Company, Tunisiana, Asiacell, Nedjma, Wataniya Kuwait dan Wataniya Palestina. Dr. Marafih juga dosen dan asisten profesor di bidang *Electrical Engineering* di Universitas Qatar. Beliau adalah anggota dari *the Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc*. selama lebih dari sepuluh tahun.

Jarman telah menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Juni 2008. Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara urusan Usaha Energi dan Industri. Sebelumnya, beliau pernah memegang beberapa jabatan, termasuk sebagai Komisaris Utama dari PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sejak Maret 2004 hingga Mei 2008, Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sejak April 2003 hingga Maret 2004, Asisten Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara urusan Usaha Industri Strategis dan Telekomunikasi sejak Januari 2002 hingga Februari 2006 dan Komisaris dari PT Industri Sandang Nusantara (Persero) sejak Desember 2002 hingga sekarang. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Teknik Elektro dari Universitas Indonesia tahun 1981 dan Master of Science dari Rensselaer Polytechnic Institute, U.S. pada tahun 1991.

H.E. Sheikh Mohammed Bin Suhaim Hamad Al Thani telah menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2007. Sheikh Mohammed saat ini menjabat sebagai *Vice Chairman of the Board* dan *Chairman of the Investment Committee* Qtel. Beliau juga merupakan *Chairman* QTEL International, pendiri dan *Chairman* M-Holding Group, *Chairman* dari Evolvence Capital dan anggota dewan dari Naeem Holding. Beliau merupakan lulusan dari *School of Business Administration of Portland State University* di Oregon, Amerika Serikat.

Rachmat Gobel telah menjadi Komisaris sejak Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai pimpinan PT Gobel Indonesia, yang merupakan *partner joint venture* dari Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., suatu perusahaan terkemuka di bidang elektronik dan barang-barang elektronik dengan nama Panasonic. Beliau juga merupakan Wakil Ketua dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Beliau memperoleh gelar sarjana dari Universitas Chuo, Tokyo, pada tahun 1987, dalam bidang Perdagangan Internasional.

Rionald Silaban menjabat sebagai Komisaris sejak Agustus 2008 dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Managemen Risiko pada tahun yang sama. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Departemen Keuangan. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi termasuk Direktur Manajemen Risiko Fiskal Departemen Keuangan sejak tahun 2006 hingga 2008, Penasehat Senior di World Bank di Washington D.C., Amerika Serikat sejak 2004 hingga 2006, Kepala Divisi Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sejak tahun 2002 hingga 2004, Kepala Divisi Pengawasan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak 2000 hingga 2002, Kepala Divisi Jasa Keuangan di Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1998 hingga 2000, Wakil Direktur untuk Direktorat Privatisasi untuk Direktorat Umum Badan Usaha Milik Negara Departemen Keuangan sejak 1997 hingga 1998, Kepala Seksi Biro Hukum Departemen Keuangan sejak 1994 hingga 1997 dan Kepala Sekretariat Komite Privatisasi Departemen Keuangan sejak 1994 hingga 1997. Beliau memperoleh gelar kesarjanaannya dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar LL.M.dari *Georgetown University Law Centre*, Wahington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1993.

George Thia Peng Heok menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Juni 2008 dan ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit pada tahun yang sama. Beliau kemudian menjadi anggota Komite Manajemen Risiko pada Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur/Konsultan di Asiainc Private Limited. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi, termasuk sebagai Konsultan *Singapore Exchange* sejak tahun 2005 hingga 2008, Konsultan/Direktur *Strategic Advisor Private Limited* sejak tahun 2003 hingga 2006, Ketua Eksekutif MediaStream Limited sejak tahun 1999 hingga 2003, Direktur/Konsultan Phoenix Capital Private Limited sejak tahun 1995 hingga 1998, Ketua Eksekutif AsiaMatrix Limited sejak tahun 1993 hingga 1995, *Managing Director* Lum Chang Securities Private Limited sejak tahun 1991 hingga 1993, Managing Director Sun Hung Kai Securities Private Limited sejak tahun 1989 hingga tahun 1991, Managing Director Merrill Lynch International Bank Limited sejak tahun 1987 hingga 1989, Direktur Eksekutif/Partner, Kay Hian Private Limited sejak tahun 1985 hingga 1987 dan Managing Director Morgan Grenfell (Asia) limited sejak tahun 1975 hingga 1985. Beliau adalah

seorang akuntan publik bersertifikat and anggota dari *Chartered Association of Certified Accountants* (Inggris) dan *Singapore Institute of Directors*.

Setyanto P. Santosa telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Agustus 2008 dan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak Juni 2005. Saat ini, beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Ketua Eksekutif Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2003, Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dari tahun 1998 sampai dengan 2000, Komisaris Bank Bumi Daya dari tahun 1998 sampai dengan 1999, Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Industri ASEAN dari tahun 1996 sampai dengan 1998, Presiden Komisaris PT Pasifik Satelit Nusantara dari tahun 1993 sampai dengan 1997, Komisaris Satelindo dari tahun 1993 sampai dengan 1995, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia dari 1992 sampai dengan 1996 dan Presiden Direktur PT INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) dari tahun 1989 sampai dengan 1992. Beliau juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1971, gelar master dari Michigan State University, Department of Economics, East Lansing, Amerika Serikat pada tahun 1978, dan gelar doktor di bidang Ilmu Interdisipliner dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2007.

Soeprapto S.IP telah menjabat sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit sejak bulan Juni 2005. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Asisten Personil dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2001, dan Komisaris PT Nusariau Kencana Coal dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Selain itu, beliau telah menjabat sebagai Komisaris PT Mentari Abdi Pertiwi sejak tahun 2004. Beliau memperoleh gelar sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka, Jakarta dan pernah mengikuti pelatihan Lembaga Pertahanan Nasional.

Michael Francis Latimer menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Agustus 2008 dan ditunjuk sebagai anggota Komite Audit dan Komite Remunerasi pada tahun yang sama. Beliau adalah CEO Page Point Service (India) sejak tahun 1995 hingga 1998, dan menjabat di berbagai posisi di Orange, pertama sebagai *Chief Operating Officer* sejak tahun 1999 hingga 2001 dan sebagai *Executive Vice President* sejak tahun 2001 hingga 2003. Beliau memiliki usaha pribadi di Thailand selama beberapa tahun terakhir. Beliau memperoleh gelar kesarjanaannya dalam bidang *Business Management* dari University of Baltimore pada tahun 1971, dan MBA dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Masa jabatan dari masing-masing Komisaris berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang ke-empat setelah tanggal pengangkatannya, yang akan berakhir pada tahun 2012 untuk para Komisaris yang sedang menjabat saat ini. Seorang Komisaris dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya pada rapat umum pemegang saham. Seorang anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung, tanpa persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Dewan Komisaris adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas segala kepengurusan dan kegiatan Perusahaan sehari-hari di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk satu Direktur Utama. Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham yang diambil dalam

rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham Seri A. Per tanggal 31 Desember 2008, Direksi Perusahaan terdiri dari sembilan orang sebagai berikut:
Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Direktur Perusahaan:

Nama	Umur	Direktur Sejak	Jabatan
Johnny Swandi Sjam	48	2005	Direktur Utama
Kaizad Bomi Heerjee	44	2005	Wakil Direktur Utama
Fadzri Sentosa	45	2007	Direktur Jabotabek & Corporate Sales
Guntur S. Siboro	43	2007	Direktur Marketing
Syakieb Ahmad Sungkar	46	2007	Direktur Regional Sales
Raymond Tan Kim Meng	54	2004	Direktur Network
Roy Kannan	56	2007	Direktur Information Technology
Wong Heang Tuck	41	2004	Direktur Finance
Wahyu Wijayadi	51	2003	Direktur Corporate Services

Johnny Swandi Sjam telah menjabat sebagai Direktur Utama sejak Juni 2007. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau telah menjabat sebagai Direktur Jabotabek & Corporate Sales kami sejak 2006 sampai dengan 2007, Direktur Consumer Market dari 2005 sampai dengan 2006 dan Senior Vice President PT Indosat dari tahun 2003 sampai dengan 2005. Sebelumnya, beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indosat Mega Media dari tahun 2006 sampai dengan 2007, Komisaris PT Aplikanusa Lintasarta dari tahun 2006 sampai dengan 2007, Direktur Utama PT Satelindo dari tahun 2002 sampai dengan 2003 dan Direktur Utama PT Sisindosat dari tahun 1999 sampai dengan 2000. Beliau saat ini juga merupakan Ketua Komite Tetap bidang Telekomunikasi pada organisasi Kamar Dagang dan Industri. Beliau memperoleh gelar Master of Science di bidang Administrasi dan Kebijakan Bisnis dari Universitas Indonesia, dan diploma di bidang Manajemen Industri dan gelar sarjana di bidang Teknologi Informasi dari Universitas Gunadharma.

Kaizad Bomi Heerjee telah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak bulan Desember 2005. Sebelum bergabung dengan Indosat, beliau adalah Senior Vice President of International Operations and Business Development di STT dari tahun 2004 sampai dengan 2005. Dari tahun 2003 sampai dengan 2005, beliau menjabat sebagai Senior Vice President & Head of Business Markets di StarHub, suatu perusahaan komunikasi informasi Singapura. Beliau juga pernah menjabat sebagai Assistant Chief Executive dari Infocomm Development Authority of Singapore dari tahun 2000 sampai dengan 2003. Beliau juga pernah bekerja selama lebih dari 10 tahun di Compaq Computers and Digital Equipment Corporation dan memegang beberapa jabatan senior management, sales and marketing, dan jabatan teknis di seluruh dunia. Beliau memperoleh gelar Doktor di bidang Computer Science dari Dundee Institute of Technology (UK) pada tahun 1988 dan Master di bidang Information Technology dari University of Nottingham pada tahun 1985.

Fadzri Sentosa telah menjabat sebagai Direktur Jabotabek & Corporate Sales sejak bulan Juni 2007. Sebelumnya, Bapak Fadzri telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, seperti Group Head National Card dan Channel Management dari tahun 2006 sampai dengan 2007, Senior Vice President bidang Commerce, Jabotabek dari tahun 2005 sampai dengan 2006 dan Senior Vice President bidang Cellular Sales dari tahun 2003 sampai dengan 2004. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa

Lintasarta sejak 2007 dan sebelumnya merupakan anggota Direksi IM3 dan Satelindo. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Regional Business Management dari University of Technology, Sydney pada tahun 2001 dan sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986.

vGuntur S. Siboro telah menjabat sebagai Direktur Marketing sejak bulan Juni 2007. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, seperti Group Head of Integrated Marketing dari tahun 2006 sampai dengan 2007, Senior Vice President, kantor regional Sumatera dari tahun 2005 sampai dengan 2006, Senior Vice President bidang Fixed Wireless Access dari tahun 2004 sampai dengan 2005, Senior Vice President bidang Corporate Strategy dari tahun 2003 sampai dengan 2004, General Manager Strategic Development dari tahun 2002 sampai dengan 2003 dan General Manager Marketing and Product Development dari tahun 2001 sampai dengan 2002. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Monash University, Australia pada tahun 1991, Master of Engineering dari Cornell University pada tahun 1987 dan Bachelor of Science in Electrical Engineering dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1986.

Syakieb Ahmad Sungkar telah menjabat sebagai Direktur Regional Sales sejak bulan Juni 2007. Sebelumnya, Beliau telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, seperti Head regional Jawa Timur dan Bali dari tahun 2006 sampai dengan 2007 dan Senior Vice President bidang Sales dari tahun 2005 sampai dengan 2006, General Manager Penjualan untuk PT Indosat Multi Media Mobile sejak 2001 sampai dengan 2004 dan Manager Sales and Card Management untuk PT Telkomsel sejak 1997 sampai dengan tahun 2000. Beliau memperoleh gelar sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987.

Raymond Tan Kim Meng telah menjabat sebagai Direktur Network sejak bulan Juni 2005. Sebelumnya, beliau menjabat berbagai posisi pada Perusahaan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, antara lain sebagai Direktur Network Operations and Quality Management, Senior Vice President bidang Business Development, Wakil Direktur Utama PT Satelindo dan Direktur Procurement. Sebelum bergabung dengan Indosat, ia telah memegang jabatan senior di Nokia, Lucent Technologies, Nortel, Shinawatra DataCom dan SingTel. Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Electrical Engineering (Honors) dari University of Singapore pada tahun 1979.

Roy Kannan telah menjabat sebagai Direktur Information Technology sejak bulan Juni 2007. Beliau sebelumnya telah memegang beberapa jabatan, seperti Chief Information Officer di Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. dari tahun 2003 sampai dengan 2007, Chief Information Officer di RGM Group dari tahun 2001 sampai dengan 2003, Director of Manufacturing Solutions Practice, Asia Pacific di Digital Equipment dari tahun 1995 sampai dengan 2001, Direktur di Mastek Asia Pasific Pte. Ltd. dari tahun 1993 sampai dengan 1995, Manager di Digital Equipment India Limited dari tahun 1991 sampai dengan 1993 dan Direktur di Bhorucom Software Private Limited dari tahun 1989 sampai dengan 1991. Beliau memperoleh diploma pasca sarjana di bidang Manajemen dari Indian Institute of Management, India pada tahun 1976 dan Bachelor of Technology in Chemical Engineering dari Indian Institute of Technology pada tahun 1974.

Wong Heang Tuck telah menjabat sebagai Direktur Finance sejak bulan September 2004. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Senior Vice President Controlling Indosat dari bulan Maret 2004 sampai dengan September 2004, Vice President of Finance and Corporate Development di Keppel Communication Pte Ltd dari tahun 1992 sampai dengan 2003, Deputy General Manager of Business Development di Keppel Telecommunications and Transportation Ltd dari tahun 2000 sampai dengan 2003, Deputy General Manager of Corporate Development (Chairman's Office) Keppel Corporation Ltd dari tahun 2000 sampai dengan 2002. Beliau pernah meraih penghargaan First Class B. Eng (Hons) di bidang Mechanical Engineering dari University

of Manchester pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master in Business Administration dari Imperial College London pada tahun 1992.

Wahyu Wijayadi telah menjabat sebagai Direktur Corporate Services sejak bulan Juni 2007 dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Marketing sejak Maret 2006. Sebelumnya, beliau pernah menduduki beberapa jabatan termasuk Direktur Corporate Market dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 dan Direktur Telekomunikasi Tetap dan MIDI dari tahun 2003 sampai dengan 2005, General Manager Corporate Secretary Indosat dari tahun 2000 sampai dengan 2002, General Manager Kantor Regional Jakarta dari tahun 2002 sampai dengan 2003, Presiden Komisaris Satelindo dari tahun 2001 sampai dengan 2002, Presiden Komisaris Telkomsel dari tahun 2000 sampai dengan 2001 dan Direktur Operasional & Produksi di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan 2000. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 1989 dan gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982.

Masa jabatan Direktur berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang ke-lima setelah tanggal pengangkatannya. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham dapat memberhentikan Direktur sebelum habis masa jabatannya. Masa jabatan seorang Direktur akan berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan pailit atau berada dalam pengampuan berdasarkan putusan pengadilan, mengundurkan diri, meninggal atau apabila Direktur dilarang memegang jabatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila salah seorang anggota Direksi mengundurkan diri, ia wajib menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran dirinya kepada Perusahaan, sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya, dengan ketentuan Dewan Komisaris dapat mengesampingkan persyaratan jangka waktu pemberitahuan tersebut atas kebijakannya sendiri. Dalam waktu 30 hari setelah terdapat lowongan jabatan di dalam Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimum Direktur yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka rapat umum pemegang saham harus diadakan untuk mengisi lowongan jabatan tersebut. Seorang anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Seorang anggota Direksi dapat merangkap jabatan lain yang tidak mengakibatkan benturan kepentingan, dengan ketentuan ia harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan memberikan pemberitahuan kepada rapat umum pemegang saham. Apabila Direktur Utama bermaksud untuk merangkap jabatan, Direktur Utama harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Direksi adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

Tidak ada satupun anggota Komisaris ataupun Direktur yang memiliki kontrak kerja dengan Perusahaan, dan tidak terdapat kontrak kerja yang telah ditawarkan atau sedang dipertimbangkan. Selain itu, tidak ada hubungan keluarga antara para Komisaris ataupun para Direktur yang tercantum di atas. Per 31 Desember 2008, masing-masing Direktur telah menandatangani *Non-Compete Agreement*.

Remunerasi Para Komisaris dan Direktur

Untuk jasa-jasa yang diberikannya, para anggota Komisaris dan Direksi berhak atas remunerasi, yang besarnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan. Total pengeluaran remunerasi yang tercatat untuk dibayarkan kepada para anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun 2008, termasuk kompensasi dasar dan insentif jangka pendek dan jangka panjang adalah sebesar Rp50,0 milyar.

Remunerasi para anggota Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris. Dalam memutuskan hal tersebut, Dewan Komisaris akan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan akan melaporkan keputusannya kepada para pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Sejak tahun 2006, insentif per semester dihapuskan dan kami memperkenalkan skema baru, yaitu insentif jangka pendek berdasarkan kinerja perusahaan dan direktur setiap tahunnya, dan insentif jangka panjang berdasarkan kinerja saham Perusahaan selama tiga tahun.

Pensiun dan Fasilitas Lainnya

Kami dan Lintasarta telah menyusun rencana pensiun dan fasilitas lainnya untuk seluruh karyawan tetap. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), suatu perusahaan persero yang bergerak di bidang asuransi, mengelola rencana dan jumlah fasilitas pensiun yang akan diberikan pada masa pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir karyawan dan masa kerja mereka.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, kami dan Lintasarta mengeluarkan Rp184,5 milyar untuk dana pensiun, manfaat pasca pensiun (fasilitas berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan manfaat kesehatan pasca pensiun untuk karyawan kami. Per tanggal 31 Desember 2008, kami dan Lintasarta mengakui biaya pensiun dibayar di muka sebesar Rp173,1 milyar, manfaat pasca pensiun dan manfaat kesehatan pasca pensiun sebesar Rp597,1 milyar. Untuk informasi lebih lanjut tentang Dana Pensiun termasuk jumlah dana pensiun, masa pensiun atau manfaat lainnya dapat dilihat di Catatan 21 dan Catatan 24 dari Laporan Keuangan Konsolidasi kami.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Perusahaan bertindak sebagai penasehat dan pengawas secara keseluruhan, dengan fungsi utamanya yaitu mengkaji rencana pengembangan Perusahaan, mengawasi kinerja rencana kerja Perusahaan, mengkaji dan menyetujui anggaran, dan melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham. Keputusan-keputusan yang melebihi batas keuangan tertentu harus diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau para pemegang saham untuk dikaji dan disetujui. Dalam menjalankan kegiatan pengawasannya, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, tetapi rapat Dewan Komisaris dapat diadakan atas permintaan Komisaris Utama atau permintaan dari sekurang-kurangnya sepertiga dari seluruh Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak membuat keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila sebagian besar anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Pada setiap rapat, masing-masing Komisaris berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Komisaris yang ia wakili. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Komisaris lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Kecuali apabila diatur lain di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan-keputusan Dewan Komisaris harus diambil secara musyarawah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari anggota Dewan Komisaris. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut individu, maka Komisaris Utama yang menentukan. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui dan menandatangani keputusan.

Direksi secara umum bertanggung jawab untuk menjalankan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan kebijakan dan perintah yang dikeluarkan oleh rapat umum pemegang saham dan Dewan Komisaris. Direktur Utama berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan. Apabila Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, maka Wakil Direktur Utama berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan, atau apabila Wakil Direktur Utama berhalangan atau tidak dapat hadir, maka salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, akan berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan.

Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk: (i) membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal; (ii) mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, usaha patungan, manajemen atau perjanjian serupa dengan badan usaha atau pihak lain; (iii) membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan aktiva tetap atau aktiva lainnya milik Perusahaan; (iv) tidak menagih lagi dan menghapusbukukan piutang dari pembukuan serta persediaan barang; (v) mengikat Perusahaan sebagai penjamin; (vi) menerima atau memberikan pinjaman jangka waktu menengah atau panjang atau menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku); (vii) melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal; dan (viii) mendirikan anak perusahaan; (ix) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (x) menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pembayaran (asset liability management) Perusahaan; (xi) menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan untuk menandatangani transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan dan komitmen-komitmen lainnya; dan (xii) mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris yang dari waktu ke waktu memiliki nilai yang lebih rendah dari 5,0% (lima persen) atau lebih dari total pendapatan atau 2,5% (dua setengah persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar kami yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit. Dewan Komisaris diwajibkan untuk menentukan batasan nilai untuk tindakan-tindakan yang dimaksud dalam butir (i) sampai dengan (viii) di atas dan berhak untuk mengubah batasan tersebut dari waktu ke waktu. Apabila suatu tindakan Perusahaan nilainya di bawah batasan nilai yang ditetapkan, maka persetujuan Dewan Komisaris tidak diperlukan. Dalam memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir (vii) dan (viii), Dewan Komisaris juga akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku dan, dalam hal transaksi tersebut bernilai lebih dari 10,0% dari pendapatan Perusahaan atau 20,0% dari ekuitas atau jumlah lain sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan, maka transaksi tersebut harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham.

Rapat Direksi diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, atau apabila diminta oleh sepertiga dari seluruh anggota Direksi. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak membuat keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 anggota Direksi hadir atau diwakili. Seorang Direktur dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Direktur lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang dibuat untuk tujuan khusus tersebut. Pada setiap rapat direksi, masing-masing Direktur berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Direktur yang ia wakili. Keputusan-keputusan Direksi harus diambil secara musyarawah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan, apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama yang menentukan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi apabila seluruh anggota Direksi menyetujui dan menandatangani keputusan secara tertulis.

Setiap orang Direktur akan diberikan tanggung jawab khusus. Apabila terdapat lowongan jabatan di dalam Direksi, maka selama jabatan tersebut belum terisi, salah satu Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan melaksanakan pekerjaan dari Direktur yang tidak ada tersebut. Apabila karena alasan apapun, Perusahaan sama sekali tidak memiliki Direktur, maka Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Direksi dan wajib mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memilih anggota Direksi yang baru, dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari.

Anggaran Dasar mengatur bahwa apabila terdapat benturan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan seorang Direktur, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi yang lainnya. Apabila seluruh Direktur mempunyai benturan kepentingan, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau satu Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Apabila seluruh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka para pemegang saham dapat menunjuk salah satu atau lebih orang yang akan mewakili Perusahaan.

Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange, kami telah membentuk Komite Audit yang independen, yang terdiri dari lima orang dan diketuai oleh salah satu dari Komisaris Independen. Tugas-tugas Komite Audit meliputi pemberian nasehat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, termasuk hal-hal berikut ini: informasi keuangan Perusahaan (termasuk laporan dan proyeksi keuangan); menelaah independensi dan objektivitas dari akuntan publik Perusahaan; melakukan penelaahan atas cukupnya pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik Perusahaan untuk memastikan bahwa semua risiko material telah dipertimbangkan; cukupnya pengendalian internal Perusahaan; kepatuhan Perusahaan sebagai perusahaan terbuka terhadap peraturan pasar modal yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, dan tugas-tugas auditor internal Perusahaan. Komite Audit juga memeriksa dan melaporkan keluhan-keluhan kepada Dewan Komisaris, menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perusahaan, melakukan audit atas adanya dugaan kesalahan yang dilakukan di dalam keputusan-keputusan rapat Direksi atau penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan keputusan rapat tersebut dan membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Pada 5 Juni 2008, Lim Ah Doo dan Setio Anggoro Dewo telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Independen pada rapat umum pemegang saham tahunan kami dan tidak lagi menjadi anggota Komite Audit, dan George Thia Peng Heok telah diangkat sebagai Komisaris Independen. Pada 26 Agustus 2008, Michael Francis Latimer diangkat sebagai anggota Komite Audit. Per tanggal 31 Desember 2008, anggota Komite Audit terdiri dari George Thia Peng Heok (Ketua), Soeprapto S.IP, Michael Francis Latimer dan Unggul Saut Marupa Tampubolon. Pada 30 Desember 2008, Rusdy Daryono mengundurkan diri sebagai anggota dari Komite Audit. Setelah pengunduran diri tersebut, pada 1 Januari 2009, Kanaka Puradiredja diangkat sebagai anggota Komite Audit kami. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK disyaratkan paling sedikit dua orang anggota independen untuk menjabat sebagai anggota Komite Audit, Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon menjabat sebagai anggota independen dari Komite Audit. Kami telah memasukkan charter Komite Audit ke dalam situs Perusahaan di www.indosat.com, yang tersedia untuk umum.

Charter tersebut dikaji setiap satu tahun sekali dan charter yang direvisi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi

Komite Remunerasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi, bonus dan manfaat lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta para karyawan, termasuk struktur, ketentuan-ketentuan dan penerbitan opsi saham. Per tanggal 31 Desember 2008, anggota Komite Remunerasi terdiri dari Dr. Nasser Mohammed Marafih (Ketua), Michael Francis Latimer dan Soeprapto S.IP. Kami telah memasukkan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*) ke dalam situs Perusahaan di www.indosat.com, yang tersedia untuk umum.

Komite Manajemen Risiko

Pada tanggal 26 Oktober 2005, kami membentuk Komite Manajemen Risiko, yang melapor ke Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko Perusahaan mengevaluasi risiko potensial tentang bisnis Perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Perusahaan tentang penilaian risiko dan manajemen risiko, termasuk membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur Perusahaan yang ada, sebagaimana diperlukan. Per tanggal 31 Desember 2008, anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari Rachmat Gobel (Ketua), George Thia Peng Heok, Jarman dan Rionald Silaban. Kami telah memasukkan Piagam Komite Manajemen Risiko (*Management Risk Charter*) ke dalam situs Perusahaan di www.indosat.com, yang tersedia untuk umum.

Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2008, secara konsolidasi, Perusahaan mempekerjakan sekitar 7.700 karyawan, 4.959 di antaranya adalah karyawan tetap dan 2.741 lainnya adalah karyawan tidak tetap. Per tanggal 31 Desember 2008, di luar karyawan yang ditempatkan, anak-anak perusahaan kami telah mempekerjakan sekitar 966 karyawan tetap. Per tanggal 31 Desember 2008, karyawan tetap kami meliputi 772 karyawan tingkat manajer (karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi) dan 3.221 karyawan non-manajer, dibandingkan dengan 754 manajer and 3.170 non-manajer per tanggal 31 Desember 2007, dan 721 manajer dan 3.242 non-manajer per tanggal 31 Desember 2006. Tingkat *turnover* karyawan kami selama tahun 2008 adalah 4,60% per tahun, dimana lebih dari setengahnya berhenti secara sukarela dengan memilih program pensiun dini. Dengan demikian, per tanggal 31 Desember 2008, rata-rata jangka waktu karyawan yang bekerja di Perusahaan adalah 12,16 tahun.

Perusahaan memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan, termasuk program pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan pajak penghasilan dan akses ke koperasi yang didirikan oleh para karyawan.

Pada tanggal 25 Agustus 1999, karyawan kami membentuk suatu serikat pekerja yang dinamakan Serikat Pekerja Indosat, atau SPI. Pada tanggal 15 September 2006, manajemen kami dan SPI telah menandatangani suatu perjanjian kerja bersama yang memuat ketentuan-ketentuan kerja umum, meliputi jam kerja, gaji, pengembangan dan kompetensi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, tata tertib karyawan dan tata cara penyelesaian perselisihan. Perjanjian kerja bersama ini telah diperbaharui pada tanggal 5 Juni 2008. Kami yakin bahwa kami memiliki hubungan baik dengan serikat pekerja. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.3 dari perjanjian kerja bersama, kami mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja sedikitnya satu kali setiap 3 bulan. Kami telah mendirikan Komite Kerjasama yang terdiri atas anggota manajemen dan perwakilan serikat pekerja, dan komite ini telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Jakarta Pusat.

Sejumlah karyawan kami berhak atas pensiun berdasarkan program tunjangan yang telah ditetapkan, dimana mereka memperoleh pembayaran sekaligus dan tunjangan bulanan melalui program asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), suatu perusahaan asuransi milik negara. Per tanggal 31 Desember 2008, kami telah mengasuransikan 2.442 karyawan tetap melalui program pensiun yang dibiayai penuh. Berdasarkan program ini, seorang karyawan yang mengundurkan diri pada saat berusia 56 tahun, maka ia akan menerima tunjangan pensiun. Selain itu, kami juga membuat program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk para karyawan kami pada bulan Mei 2001. Setelah dilakukannya merger Satelindo dan IM3 ke dalam Indosat, kami menggabungkan program kami dengan program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk karyawan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Berdasarkan program kontribusi yang ditetapkan, seorang karyawan akan memberikan kontribusi sebesar 10,0% sampai dengan 20,0% dari gaji pokoknya, dan kami tidak memberikan kontribusi ke program tersebut. Administrasi dan manajemen program dikoordinasi oleh tujuh lembaga keuangan. Berdasarkan SAK dan US GAAP, kewajiban pensiun kami dianggap telah dibiayai penuh.

Para karyawan kami juga membentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Pegawai Indosat atau Kopindosat. Kopindosat menyediakan berbagai manfaat, seperti pinjaman yang bersifat konsumtif, prinsipal untuk para karyawan kami, dan penyewaan mobil dan peralatan, terutama untuk Perusahaan. Manajemen Kopindosat dipilih oleh para karyawan setiap tiga tahun sekali dalam rapat anggota tahunan. Kopindosat dan beberapa anak perusahaannya berada di bawah pengawasan manajemen kami. Kopindosat memiliki saham minoritas di dalam beberapa perusahaan afiliasi kami. Perusahaan juga menempatkan beberapa karyawan kami untuk sementara waktu di Kopindosat dan anak perusahaannya untuk membantu mereka dalam menjalankan usahanya, dan memberikan pelatihan kerja untuk para karyawannya.

Pada bulan November 2006, kami menerima penghargaan "HR Excellence Award 2006" dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI), majalah SWA dan Human Resources Indonesia untuk tiga kategori: manajemen sumber daya manusia; kinerja manajemen; dan manajemen pelatihan dan pengembangan. Kami adalah satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang mendapat penghargaan tersebut.

Kepemilikan saham

Seluruh direktur dan komisaris Perusahaan secara individual dan benefisial memiliki sebanyak kurang dari satu persen dari saham biasa Perusahaan dan kepemilikan saham mereka masing-masing di Perusahaan belum pernah diungkapkan kepada para pemegang saham atau diumumkan secara terbuka.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan

Para pemegang saham Perusahaan telah mengambil keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Desember 2002 dan rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 26 Juni 2003 untuk menyetujui program opsi saham karyawan untuk menerbitkan 258.875.000 saham Seri B (sebagaimana yang disesuaikan untuk pemecahan saham lima-untuk-satu pada tanggal 8 Maret 2004), atau sekitar 5,0% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, segera sebelum diadakan rapat umum pemegang saham. Berdasarkan program opsi saham karyawan, kami memberikan opsi membeli saham Perusahaan kepada para karyawan tetap, Direktur dan Komisaris IMM, Sisindosat, Lintasarta dan Perusahaan.

Kami memberikan opsi berdasarkan program opsi saham karyawan dalam dua tahap. Opsi ini memiliki jangka waktu penggunaan opsi/vesting period selama satu tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2004 untuk tahap pertama dan pada tanggal 1 Agustus 2005 untuk tahap kedua. Harga pelaksanaan untuk opsi saham

dihitung sebesar 90,0% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan selama periode tertentu sebelum diadakan rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2003 untuk tahap pertama, dan pada tahun 2004 untuk tahap kedua. Harga pelaksanaan opsi adalah Rp1.567,4 (yang disesuaikan untuk pemecahan saham lima-untuk-satu pada tanggal 8 Maret 2004) dan Rp3.702,6, masing-masing untuk tahap pertama dan tahap kedua. Opsi saham ini berakhir pada tanggal 31 Juli 2006 pada akhir jangka waktu penggunaan hak beli untuk tahap kedua dari program opsi saham. Kami belum mengadakan program opsi saham karyawan lainnya.

Butir 7: PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pemegang Saham Utama

Per tanggal 31 Maret 2009, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan terbagi atas satu saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp100. Selain itu, Pemerintah, bertindak melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, memiliki satu saham Seri A dan memiliki hak suara istimewa. ICLM dan ICLS secara bersama-sama memiliki sekitar 65,0% saham Perusahaan. Per tanggal 25 Maret 2009, 1.094.963.408 saham biasa (termasuk saham biasa yang mewakili ADS), mewakili jumlah total kurang lebih 20,15% dari saham yang telah dikeluarkan Perusahaan, dimiliki oleh 63 pemegang saham, yang beralamat di Amerika Serikat. Oleh karena saham biasa dan ADSs Perusahaan banyak dimiliki oleh pialang dan lembaga-lembaga lainnya atas nama pemegang efek, kami yakin bahwa jumlah pemegang saham biasa Perusahaan lebih besar.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi per tanggal 31 Maret 2009 tentang (i) pihak-pihak yang kami ketahui memiliki lebih dari 5,0% dari saham biasa Perusahaan (baik secara langsung atau tidak langsung melalui *American Depository Shares*) dan (ii) jumlah saham biasa Perusahaan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama Kelas	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Dimiliki	Persentase dari Jumlah Kelas Saham yang di tempatkan
Series A	Pemerintah	1	100,00%
Series B	ICLM(1)	2.171.250.000	39,96
Series B	ICLS(1)	1.360.806.600	25,04
Series B	Pemerintah	776.624.999	14,29
Series B	Wahyu Wijayadi	*	*
Series B	Raymond Tan Kim Meng	*	*
Series B	Johnny Swandi Sjam	*	*
Series B	Wong Heang Tuck	*	*
Series B	Fadzri Sentosa	*	*

*Kurang dari 1,0%

(1) ICLM dan ICLS adalah afiliasi yang secara tidak langsung dimiliki oleh Qtel.

Pemerintah

Sebelum dilakukannya penawaran saham perdana Perusahaan di tahun 1994, Pemerintah memiliki 100% saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Sejak awal tahun 2002, Pemerintah memiliki 65,0% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Berdasarkan kepemilikan saham tersebut, Pemerintah mengendalikan Perusahaan dan memiliki kekuasaan untuk memilih seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan untuk menentukan semua tindakan yang memerlukan persetujuan dari para pemegang saham. Selain itu, program pensiun, dana asuransi dan investor Indonesia lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, membeli sebagian saham biasa pada penawaran saham perdana Perusahaan.

Pada tanggal 16 Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan melalui global tender, yang mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 56,9%. Pada tanggal 20 Desember 2002, Pemerintah menjual 41,9% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan kepada ICLM (sebagaimana diuraikan di bawah ini), yang kembali mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 15,0%. Akan tetapi, selain dari saham biasa Perusahaan, struktur permodalan Perusahaan juga meliputi saham istimewa, yaitu saham Seri A, dan Pemerintah tetap memiliki kendali yang signifikan atas Perusahaan melalui kepemilikan satu saham Seri A.

Sebagai pemegang satu saham Seri A, Pemerintah memiliki hak suara istimewa. Hak-hak dan batasan-batasan material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas satu saham Seri A, kecuali bahwa Pemerintah tidak dapat memindahkan hak atas saham Seri A dan Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan tindakan: (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang melibatkan Perusahaan; (iii) likuidasi dan pembubaran; (iv) perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A. Beberapa hak veto tersebut di atas dibatasi untuk sementara waktu berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham antara Pemerintah dan ICLM sebagaimana diuraikan di bawah ini dimana Pemerintah bersedia untuk memberikan suara dari semua sahamnya sesuai dengan instruksi tertulis dari ICLM berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan di atas untuk jangka waktu selama satu tahun kalender sejak berlakunya penjualan saham kepada ICLM.

ICLM

Pada tanggal 15 Desember 2002, ICLM, yang pada waktu itu merupakan anak perusahaan dari STT Communications Ltd, menandatangani *Share Purchase Agreement dan Shareholders Agreement* dengan Pemerintah, yang bertindak melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan. STT Communications Ltd dimiliki 100% oleh STT, yang dalam hal ini dimiliki secara tidak langsung oleh Temasek Holdings (Private) Limited. Berdasarkan *Share Purchase Agreement,* Pemerintah menyetujui untuk menjual, dan ICLM menyetujui untuk membeli 434.250.000 saham Seri B yang merupakan 41,9% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan sejak tanggal perjanjian tersebut. Jual beli saham Seri B berdasarkan *Share Purchase Agreement* tersebut terlaksana pada tanggal 20 Desember 2002, dimana *Shareholders Agreement* berlaku efektif. Setelah dilaksanakannya transaksi jual beli saham ini, Pemerintah memiliki 155.324.999 saham Seri B, yang merupakan 15,0% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan. Keseluruhan harga beli untuk saham Seri B yang dibeli oleh ICLM berdasarkan *Share Purchase Agreement* adalah Rp5.623.537.500.000 (sekitar US$605,3 juta). Pada tanggal 5 Mei 2006, ICLS, memberitahukan Bapepam-LK bahwa per tanggal 4 Mei 2006, ICLS memiliki 46.340.000 saham Seri B di Perusahaan. ICLS merupakan afiliasi dari ICLM. Setelah dilakukannya pembelian saham oleh ICLM, per tanggal

4 Mei 2006, ICLS dan ICLM secara bersama memiliki 2.217.590.000 saham Seri B atau 41,16% dari saham Seri B di Perusahaan. Setelah berakhirnya transaksi ini, ICLM memiliki 2.171.250.000 (39,96%) dari saham Seri B di Perusahaan, Pemerintah memiliki satu saham Seri A dan 776.624.999 (14,29%) dari saham Seri B di Perusahaan dan ICLS memiliki 46.340.000 (0,85%) dari saham Seri B di Perusahaan.

Pada tanggal 17 Januari 2007, ICLM memberitahukan kepada Perusahaan mengenai rencana Qtel untuk melakukan investasi modal sekitar 25,0% di AMH, yang pada saat itu dimiliki sepenuhnya oleh STT Communications Ltd. Sepengetahuan kami transaksi tersebut telah diselesaikan pada tanggal 1 Maret 2007. Setelah diselesaikannya transaksi, STT Communications Ltd. secara efektif mengendalikan sekitar 75,0% dari AMH, yang memiliki secara langsung ICLM dan ICLS, dua dari para pemegang saham utama Perusahaan.

Pada 22 Juni 2008, setelah melakukan negosiasi dengan STT, Qtel membeli semua saham yang diterbitkan dan ditempatkan dari ICLM, sebuah perusahaan yang didirikan di bawah hukum Mauritius, dan ICLS, sebuah perusahaan tergabung di bawah hukum Singapura, sesuai dengan Perjanjian Pembelian Saham tertanggal 6 Juni 2008 antara Qtel dan STT. Sesuai dengan Perjanjian Pembelian Saham, Qtel, melalui anak perusahaannya Qatar South East Asia Holding S.P.C., membeli saham ICLM dan ICLS milik AMH, yang 75,0% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh STT Communications Ltd. dan 25,0% dimiliki secara tidak langsung oleh Qtel. Setelah akuisisi ini, sesuai dengan persyaratan dalam hukum Indonesia, Qtel melakukan penawaran tender untuk membeli sampai dengan 24,19% dari saham seri B kami (termasuk Saham Seri B yang berdasarkan ADSs) dan saat ini memiliki saham sebesar 65.0% pada Perusahaan.

Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan adalah pihak dari beberapa perjanjian dan mengadakan transaksi-transaksi dengan sejumlah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan kami, termasuk perusahaan usaha patungan, koperasi dan yayasan, dan juga dengan pemegang saham pengendali, yaitu Pemerintah dan ICLM, dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan atau dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah dan ICLM. Beberapa transaksi utama meliputi kas dan setara dengan kas sebesar Rp4.537,1 milyar yang disimpan di bank-bank milik pemerintah per tanggal 31 Desember 2008, pendapatan usaha dari Telkom sebesar Rp919,4 milyar dan biaya jasa kepada Departemen Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.327,2 milyar. Lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan–Peraturan Industri Telekomunikasi Indonesia–Undang-Undang Telekomunikasi–Peraturan Tarif." Selain itu, Perusahaan juga merupakan pihak dari berbagai perjanjian dengan badan usaha milik negara, seperti perusahaan asuransi, bank dan berbagai pemasok.

Butir 8: INFORMASI TENTANG KEUANGAN

Laporan Keuangan Konsolidasi dan Informasi Keuangan Lainnya

Lihat "Butir 17: Laporan Keuangan" untuk laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan tahunan ini. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi sejak tanggal laporan keuangan Perusahaan tersebut.

Proses Perkara Hukum

Dari waktu ke waktu, kami terlibat di dalam proses perkara hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan bisnis Perusahaan. Saat ini, Perusahaan tidak terlibat, dan belum terlibat di dalam, proses perkara pengadilan ataupun arbitrase yang menurut kami dapat memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha Perusahaan selain dari yang telah diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.

Pada tanggal 5 Mei 2004, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung No. 1610K/PDT/2003 yang memenangkan Primer Koperasi Pegawai Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (dikenal sebagai Primkopparseni), berkenaan dengan perselisihan transaksi valuta asing yang mengharuskan Perusahaan untuk membayar Rp13,7 milyar ditambah 6,0% bunga per tahun sejak tanggal 16 Februari 1998 sampai dengan tanggal pelunasan. Pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan telah memenuhi putusan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp19,3 milyar (US$2,1 juta) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut bahwa rapat anggota Primkopparseni dimana di dalamnya para anggota memutuskan untuk memperkarakan Perusahaan adalah tidak sah. Pada tanggal 12 Januari 2005, pengadilan memutuskan bahwa rapat anggota tersebut tidak sah, dan Primkopparseni mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengajuan banding ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 21 Februari 2006. Kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memohon ganti rugi atas biaya hukum dan atas pencemaran nama baik Perusahaan.

Berdasarkan Schedule TO yang diajukan oleh Qtel tertanggal 20 Januari 2009 dan disampakan kepada SEC pada tanggal 20 Januari 2009, pada 19 November 2007, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan dan menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura atau Temasek, bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. atau ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS, Singapore Telecomunications Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura atau Singtel, dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura atau SingTel Mobile telah melanggar hukum persaingan usaha Indonesia dan menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS dan SingTel atau Entitas Afiliasi Temasek untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau Indosat dalam waktu dua tahun, efektif sejak tanggal putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Hukum persaingan usaha Indonesia menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50,0% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek dan para pihak lainnya yang terkait telah mengajukan banding atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan dan membenarkan keputusan KPPU, dan menghukum Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atau Indosat dalam jangka waktu dua belas bulan setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 10 September 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi dan membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sebagai berikut: (1) menyatakan Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No.5/1999; (2) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menghentikan kepemilikan silang saham mereka di Telkomsel dan Indosat dengan mengalihkan sahamnya di Telkomsel atau Indosat, dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau mengurangi 50,0% kepemilikan

sahamnya di masing-masing Telkomsel dan Indosat tidak lebih dari dua belas bulan dari tanggal keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; (3) menghukum Temasek Holdings Pte. Ltd., secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menetapkan perusahaan dimana mereka akan melepaskan saham-saham tersebut dan melepaskan hak suara dan hak-hak untuk mengangkat direktur dan komisaris baik di Telkomsel maupun Indosat sampai dengan dilakukannya pelepasan seluruh saham yang dimilikinya atau dilakukannya penurunan kepemilikan saham sampai dengan 50,0% saham mereka di masing-masing Telkomsel dan Indosat sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas. Pada 22 Juni 2008, Qtel membeli semua 40,81% kepemilikan saham Entitas Afiliasi Temasek yang ada di Indosat.

Departemen Keuangan mengajukan klaim terhadap Perusahaan sebagaimana dimuat di dalam suratnya No. S-498/LK/2004 tanggal 5 Februari 2004, yang menuntut denda dividen sekitar Rp20,6 milyar dan Rp42,9 milyar oleh karena Perusahaan dianggap tidak melakukan pembayaran dividen secara tepat waktu kepada Pemerintah untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 1999 dan 2000. Peraturan yang ada mengharuskan badan usaha milik negara untuk melakukan pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tertentu yang ditetapkan. Pada bulan September 2007, kami menerima surat dari Menteri Keuangan No. S-416/MK.02/2007 tanggal 12 September 2007, yang menegaskan bahwa Perusahaan dibebaskan dari kewajiban pembayaran denda dividen untuk tahun 2000, tetapi tetap harus membayar denda dividen untuk tahun 1999. Pada tanggal 24 September 2007, kami telah melakukan pembayaran denda dividen sepenuhnya untuk tahun 1999, sebesar Rp20.632.565.973,30.

Selain hal tersebut di atas, kami juga menerima surat dari KPPU, No. 398/AK/KTPP/XI/2007, tanggal 15 November 2007, mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 dari UU No. 5/1999 yaitu melakukan penetapan harga *Short Message Service* (SMS) oleh para operator telekomunikasi (nomor perkara 26/KPPU-L/2007). Pada 18 Juni 2008, KPPU memutuskan bahwa hanya Telkom, Telkomsel, Excelcomindo, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom yang telah secara bersama-sama melanggar Pasal 5 Undang-Undang No.5/1999. Namun, setelah itu, Telkomsel dan Excelcomindo mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memanggil kami untuk hadir sebagai turut terlapor.

Runtutan gugatan *class action* juga diajukan terhadap kami, Telkomsel dan Excelcomindo di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan dengan kepemilikan silang saham Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh mengakibatkan penetapan harga jasa telekomunikasi yang tinggi yang merugikan masyarakat. Pada tanggal 31 Oktober 2007, sekelompok pelanggan telepon selular di Indonesia mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di Bekasi menuntut di antaranya ganti rugi sebesar Rp1.231,7 milyar sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Kami juga menjadi pihak tergugat dalam *class action* yang sama yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2007 atau *Class Action* Tangerang**.** Penggugat mewakili pelanggan kami, Telkomsel dan Excelcomindo di seluruh Indonesia yang menggunakan jasa-jasa Simpati, Mentari, Kartu As, IM3, Kartu Halo, Matrix, Jempol, Xplor dan Bebas dan menuntut kompensasi di antaranya sebesar Rp30.808,7 milyar. Pada tanggal 22 April 2008 kami menerima pemberitahuan bahwa kami, Temasek Holdings, STT, STT Communications Ltd., AMH, ICLM, ICLS. SingTel, SingTel Mobile, Telkomsel, Telkom dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah menjadi tergugat dalam gugatan *class action* yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para penggugat mewakili pelanggan Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo dan telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan *class action* di Tangerang. Para penggugat meminta di antaranya kompensasi sampai dengan Rp30.808,7 milyar. Pada Juli 2008, kami memperoleh pemberitahuan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Bekasi telah dicabut oleh Penggugat dan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah digabungkan dengan *Class Action* Tangerang. Gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang ditunda dengan putusan penundaan hakim, dikarenakan menunggu putusan banding ke Mahkamah Agung oleh Penggugat dari gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Maret 2009, kami memperoleh informasi bahwa Mahkamah

Agung pada tanggal 21 Januari 2009 telah mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Pengadian Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan gugatan *class action.*

Pada pemeriksaan pajak terhadap pembayaran pajak kami untuk tahun 2004 dan 2005 oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara atau KPP BUMN, pada tanggal 4 Desember 2006 dan 27 Maret 2007, Perusahaan diberitahu bahwa pemotongan pajak penghasilan untuk bunga pinjaman antar perusahaan (*intercompany loans*) yang dibayarkan kepada Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. sehubungan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2010 Perusahaan dengan jumlah pokok sebesar US$300,0 juta dan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 dengan jumlah pokok sebesar US$250,0 juta adalah 20,0%, bukan 10,0%. Berdasarkan opini dari Penasihat Pajak kami dan pemahaman kami atas hukum Indonesia, kami berpendapat bahwa perhitungan kami pertama kali atas pemotongan pajak adalah benar dan kami telah mengajukan keberatan kepada KPP BUMN terhadap pemeriksaan tersebut. Pada tanggal 18 Februari 2008 dan 4 Juni 2008, kami menerima surat dari Direktorat Pajak yang menolak keberatan kami terhadap pembayaran pajak tahun 2004 dan 2005, dan mengenakan pajak tambahan sebesar Rp 940,0 juta di tahun 2005. Kami menerima tambahan pajak untuk tahun 2005 akan tetapi kami mengajukan surat banding untuk keputusan pajak tahun 2004 dan 2005 ke Pengadilan Pajak, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2008 dan 2 September 2008. Per tanggal 31 Maret 2009, kami belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas keberatan-keberatan tersebut.

Kami juga mempermasalahkan kelebihan pembayaran pajak untuk tahun buku 2004 dan 2005 kepada Kantor Pajak. Pada tanggal 27 Maret 2007, kami menerima surat dari Kantor Pajak mengenai kelebihan pembayaran pajak yang mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyetujui pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai, masing-masing sebesar Rp135.766 juta dan Rp39.052 juta, jumlah mana lebih rendah daripada jumlah yang kami akui dalam laporan keuangan. Kami menerima perubahan atas pajak pertambahan nilai akan tetapi kami mengajukan keberatan atas revisi pajak penghasilan badan tahun 2005 kepada Kantor Pajak pada tanggal 22 Juni 2007. Pada tanggal 27 Mei 2008, kami menerima surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menerima sebagian keberatan kami pada tanggal 27 Mei 2008. Kami mengajukan surat banding untuk sisa revisi pajak penghasilan badan tahun 2005 pada tanggal 21 Agustus 2008. Per tanggal 31 Maret 2009, kami belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas banding tersebut.

Pada tanggal 24 Desember 2008, kami menerima surat kelebihan pembayaran pajak dari Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2005 sebesar Rp84.650 juta, dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada jumlah yang dinyatakan dalam surat keputusan sebelumnya yang kami terima pada tanggal 4 Juli 2008. Per tanggal 31 Maret 2009, kami sedang mempersiapkan untuk mengajukan banding terhadap perbedaan jumlah kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2004.

Kami tidak terlibat dalam perkara-perkara material lainnya, termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan secara berarti.

Kebijakan Dividen

Para pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2006, 2007 dan 2008, para pemegang saham Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai secara final sebesar 50,0% dari laba bersih Perusahaan untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007. Konsisten dengan praktek sebelumnya, kami bermaksud untuk terus membayar dividen sebesar antara 30% sampai 50%.

Butir 9: PENAWARAN DAN PENCATATAN

Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu dari saham biasa Perusahaan di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Seluruh harga yang tercantum sebelum tanggal 3 Desember 2007 adalah berasal dari BEJ, sedangkan seluruh harga yang tercantum setelah tanggal 3 Desember 2007 adalah berasal dari BEI, setelah BEI mulai beroperasi:

	Harga per Saham	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam Rp.)	
Tahunan		
2004(1)	6.000	3.040
2005(1)	6.400	4.275
2006(1)	6.750	4.050
2007(1)	9.900	5.600
2008(1)	8.750	3.950
Periode Triwulan(1)		
Triwulan Pertama 2007	6.750	5.600
Triwulan Kedua 2007	7.050	6.250
Triwulan Ketiga 2007	7.700	6.550
Triwulan Keempat 2007	9.900	7.600
Triwulan Pertama 2008	8.750	5.850
Triwulan Kedua 2008	7.000	5.300
Triwulan Ketiga 2008	6.750	5.800
Triwulan Keempat 2008	5.750	3.950
Triwulan Pertama 2009	5.900	4.200
Bulan(1)		
September 2008	6.350	5.800
Oktober 2008	5.700	3.950
November 2008	5.400	4.100
Desember 2008	5.750	4.700
Januari 2009	5.850	5.550
Februari 2009	5.900	4.200
Maret 2009	4.725	4.200
April (sampai dengan 7 April) 2009	5.950	5.150

(1) Sebagaimana disesuaikan sehubungan dengan pemecahan saham lima-untuk-satu pada tanggal 8 Maret 2004.

Pada tanggal 7 April 2009, harga penutupan untuk saham biasa Perusahaan adalah Rp5.800.

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk ADS, untuk periode tertentu, dari ADS di New York Stock Exchange atau NYSE.

	Harga per ADS	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam US$)	
Tahunan		
2004	33 1/4	17 13/16
2005	34 1/4	20 45/64
2006	38 71/128	21 13/16
2007	51 13/16	30 13/64
2008	47 1/64	16
Periode Tahunan		
Triwulan Pertama 2007	38 65/128	30 13/64
Triwulan Kedua 2007	40 13/64	34 27/128
Triwulan Ketiga 2007	43 43/64	33 25/64
Triwulan Keempat 2007	51 13/16	42 109/128
Triwulan Pertama 2008	47 1/64	32 23/32
Triwulan Kedua 2008	38 29/32	29 13/64
Triwulan Ketiga 2008	37 29/64	29 55/64
Triwulan Keempat 2008	31 13/16	16
Triwulan Pertama 2009	26 ¼	16 95/128
Bulan		
September 2008	33 17/32	29 55/64
Oktober 2008	31 4/5	20 187/264
November 2008	26	16
Desember 2008	25 225/264	18 27/32
Januari 2009	26 ¼	23 111/128
Februari 2009	24 55/64	17 29/64
Maret 2009	19 125/128	16 95/128
April (sampai dengan 7 April) 2009	25 45/128	20 127/128

Pada tanggal 7 April 2009, harga penutupan untuk ADS di NYSE adalah US$ 24 15/32.

Pasar

Saham biasa kami tercatat di BEI. BEI merupakan bursa perdagangan non-Amerika Serikat untuk saham biasa kami. Sebagai tambahan, tiap lembar ADS kami mewakili 50 saham biasa kami, dan tercatat di NYSE. Setelah pemecahan saham, yang telah efektif pada 10 Maret 2004, tiap ADS mewakili 50 saham Seri B (sebagaimana dibandingkan dengan 10 saham Seri B yang sebelumnya diwakili).

Bursa Efek di Indonesia

Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi BEI. BEI mulai beroperasi pada tanggal 3 Desember 2007, dan pada tahun 2007, BEI memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.539.041 milyar, dimana Rp1.982 milyar di antaranya berasal dari saham, Rp79.065 milyar dan 105 juta Dolar AS berasal dari obligasi perusahaan dan Rp477 triliun berasal dari obligasi pemerintah.

Tinjauan tentang BEI

Saat ini, ada dua sesi perdagangan efek harian, dari Senin sampai dengan Kamis, yaitu pukul 9:30 sampai dengan pukul 12:00, dan pukul 13:30 sampai dengan pukul 16:00. Sementara itu, ada dua sesi perdagangan di hari Jumat, dari pukul 9:30 sampai dengan pukul 11:30 dan dari pukul 14:00 sampai dengan pukul 16:00. Perdagangan di BEI berlangsung berdasarkan *order-driven market system.* Para investor harus menghubungi perusahaan pialang atau anggota BEI, yang akan menjalankan pesanan mereka melalui sistem perdagangan BEI. Perdagangan efek di BEI hanya dapat dilakukan oleh anggota BEI yang terdaftar sebagai anggota PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Perusahaan pialang juga dapat melakukan transaksi jual beli efek untuk dirinya sendiri. Tidak ada batasan kepemilikan saham oleh investor asing atau institusi asing, baik dalam bentuk penyertaan modal langsung maupun melalui transaksi perdagangan di BEI, kecuali untuk bank, yang hanya dapat dimiliki asing sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99,0%.

Perdagangan saham dibedakan menjadi tiga segmen pasar: pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai. Pasar reguler adalah mekanisme perdagangan saham dengan menggunakan satuan lot di pasar lelang yang berlangsung terus-menerus selama jam bursa. Sehubungan dengan perdagangan saham, satu lot saham terdiri dari 500 lembar saham. Fraksi harga dibatasi, yaitu sebagai berikut: (i) apabila harga saham berada di bawah Rp200, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp1 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp10; (ii) apabila harga saham sama dengan Rp200 atau lebih, tetapi kurang dari Rp500, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp5 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp50; (iii) apabila harga saham sama dengan Rp500 atau lebih, tetapi kurang dari Rp2.000, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp10 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100; (iv) apabila harga saham sama dengan Rp2.000 atau lebih, tetapi kurang dari Rp5.000, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp25 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalahRp250; and (v) apabila harga saham sama dengan Rp5.000 atau lebih, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp50 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp500. Pesanan-pesanan diproses dengan komputer yang akan melakukan *matching* antara "penawaran" dan "permintaan" yang ditempatkan sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga memprioritaskan pesanan pembelian dengan harga terendah atau pesanan penjualan dengan harga tertinggi. Apabila pesanan pembelian atau penjualan dilakukan pada harga yang sama, prioritas diberikan pada pesanan pembelian atau penjualan yang dilakukan pertama (prioritas waktu).

Perdagangan efek di pasar negosiasi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem lot saham dan aturan tahapan harga. Anggota BEI dapat mengumumkan pesanan penjualan atau pembelian melalui sistem perdagangan BEI dan dapat mengubah pesanan mereka berdasarkan negosiasi dengan anggota lainnya. Harga akhir terbentuk berdasarkan kesepakatan, tetapi disarankan untuk berpatokan pada harga saham di pasar reguler.

Transaksi-transaksi di pasar reguler dan pasar non-reguler pada BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah dilakukannya transaksi. Apabila anggota bursa melanggar ketentuan waktu

penyelesaian transaksi, maka anggota bursa tersebut diwajibkan untuk membayar 125,0% dari harga tertinggi untuk efek yang sama pada hari perdagangan yang sama.

Direksi BEI dapat membatalkan suatu transaksi apabila terbukti adanya unsur penipuan, manipulasi atau penggunaan informasi orang dalam. Direksi dapat menghentikan perdagangan efek sementara apabila terdapat indikasi adanya transaksi tipuan atau upaya manipulasi harga saham, informasi yang menyesatkan, penggunaan informasi orang dalam, efek palsu atau efek yang diblokir dari perdagangan, atau kejadian-kejadian penting lainnya.

Anggota BEI dapat mengenakan biaya untuk jasa-jasanya berdasarkan suatu perjanjian dengan para nasabahnya. Ketika melakukan transaksi saham di BEI, anggota bursa diwajibkan membayar biaya transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi kumulatif untuk setiap bulan ditambah 0,01% untuk transaksi di pasar tunai dan reguler yang dijamin oleh KPEI (dengan ketentuan biaya transaksi minimum sebesar Rp2.000.000). Komisi dan biaya transaksi tidak termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10,0% dan pajak transaksi sebesar 0,1% yang dikenakan atas nilai kumulatif dari penjualan saham.

Pasar modal Indonesia umumnya kurang likuid dibandingkan dengan di negara-negara yang memiliki pasar modal yang lebih berkembang. Tidak likuidnya pasar modal ini terutama untuk efek dalam jumlah besar. Selain itu, harga saham di pasar modal Indonesia biasanya lebih bergejolak dibandingkan pasar modal di negara lainnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan harga atau pada waktu dimana pemegang saham tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau tidak sama sekali. Selain itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan atau di atas harga beli dari pemegang saham yang bersangkutan.

Perdagangan di NYSE

Bank of New York berfungsi sebagai depositary atau Depositary. sehubungan dengan ADS Perusahaan, yang diperdagangkan di NYSE. Setelah dilakukannya pemecahan saham, yang berlaku efektif pada tanggal 10 Maret 2004, masing-masing ADS mewakili 50 saham biasa Perusahaan (dibandingkan sepuluh saham Seri B yang sebelumnya diwakili). Per tanggal 31 Maret 2009, 574.944.900 ADS yang merupakan 10,58% dari saham biasa Perusahaan, telah ditempatkan di Amerika Serikat dan terdapat 40 pemegang ADS Perusahaan yang terdaftar.

Butir 10: INFORMASI TAMBAHAN

Uraian tentang Anggaran Dasar dan Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2008, modal dasar Indosat adalah sebesar Rp2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar Perusahaan, 5.356.174.500 saham telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp543.393.350.000 oleh:

a. Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.500.000;

b. ICLM, 2.171.250.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp217.125.000.000; dan

c. Masyarakat, 2.486.058.500 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp248.605.850.000.

Pada tanggal 8 Maret 2004, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A dan saham Seri B dari Rp500 menjadi Rp100 per saham, yang meningkatkan jumlah saham dalam modal dasar Perusahaan menjadi 20.000.000.000 saham dan saham yang ditempatkan menjadi 5.177.500.000 saham. Setelah dilakukannya pemecahan saham, modal dasar Indosat adalah sebesar Rp2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar Perusahaan, 5.177.500.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.177.499.999 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp517.750.000.000 oleh:

a. Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.499.900;

b. ICLM, 2.171.250.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp217.125.000.000; dan

c. Masyarakat, 2.229.625.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp222.962.500.000.

Perubahan Anggaran Dasar Indosat, sehubungan dengan adanya pemecahan saham, telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor C-05582 HT.01.04. TH.2004, tanggal 8 Maret 2004. Perubahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah nomor 0540/RUB.09.05/III/2004, tanggal 9 Maret 2004. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perusahaan atau Anggaran Dasar mengatur bahwa setiap transaksi yang melibatkan benturan kepentingan antara Perusahaan dengan para direktur, dewan komisaris dan pemegang saham harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham, yaitu harus memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham independen.

Masing-masing Direktur menerima bonus tahunan serta insentif lainnya apabila Perusahaan dapat melampaui target keuangan dan operasional tertentu, dimana besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan. Bonus dianggarkan setiap tahunnya dan dibuat berdasarkan rekomendasi Direksi, yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada pemegang saham Perseroan. Masing-masing Komisaris diberikan honorarium bulanan dan beberapa tunjangan lainnya, yang besarnya ditentukan oleh pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan.

Direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mengendalikan, mempertahankan dan mengelola aset Perusahaan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Direksi diberi wewenang untuk memastikan agar Perusahaan dapat memperoleh pinjaman dana

sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam Anggaran Dasar. Kekuasaan Direksi untuk melakukan pinjaman hanya dapat diubah dengan cara mengubah Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan tentang usia pensiun tertentu dari Direktur atau untuk memiliki saham dalam batasan tertentu.

Saham Biasa

Berikut ini adalah ringkasan hak-hak dan batasan-batasan material berkenaan dengan saham biasa Indosat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir diubah pada tanggal 14 Juli 2008 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2008. Penjelasan yang diberikan di sini bukan merupakan penjelasan yang lengkap dan karena itu harus mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perusahaan, yang dalam beberapa hal dapat berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Anggaran Dasar.

Semua saham biasa adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar di dalam daftar pemegang saham Indosat. Direksi mengadakan daftar pemegang saham Indosat, dan Indosat harus memperlakukan pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham tersebut sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum berkenaan dengan saham biasa tersebut.

Segala pemindahan hak atas saham biasa harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan atau berdasarkan surat-surat lainnya, yang memberikan bukti yang cukup menurut pendapat Direksi. Pemindahan hak atas saham biasa berlaku hanya setelah pemindahan hak tersebut didaftarkan di daftar pemegang saham. Pihak yang memindahkan saham biasa akan diakui sebagai pemilik saham biasa tersebut sampai dengan nama pihak yang menerima pemindahan telah dicatatkan ke dalam daftar pemegang saham.

Para pemegang saham biasa berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu/*pre-emptive right* apabila Indosat mengeluarkan saham biasa, obligasi konversi, waran atau efek serupa. Hak memesan efek terlebih dahulu dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap pengeluaran hak memesan efek terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Indosat dan rencana tersebut harus diumumkan oleh Direksi di dalam dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia). Apabila para pemegang saham biasa tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang terkait, maka Direksi dapat mengeluarkan saham biasa, obligasi konversi, waran atau efek serupa tersebut kepada pihak ketiga dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sekurang-kurangnya sama dengan apa yang ditawarkan sebelumnya kepada para pemegang saham yang ada dan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Modal dasar Indosat hanya dapat ditingkatkan atau diturunkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan melalui perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar berlaku efektif hanya setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai pengecualian dari ketentuan-ketentuan di atas, Indosat dapat mengeluarkan saham baru tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan ketentuan tindakan tersebut

memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dimana pemegang saham Seri A hadir di dalam rapat dan menyetujui keputusan. Penerbitan saham ini dapat dilakukan sepanjang saham yang diterbitkan terbatas jumlahnya dan diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Indosat, dan saham tersebut dapat dijual oleh Indosat kepada pihak manapun dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan harga saham tidak lebih rendah dari harga nominal. Tidak ada batasan mengenai hak para investor asing untuk memiliki saham biasa Perusahaan jika saham tersebut diperoleh melalui pasar modal.

Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku secara mutatis mutandis dalam hal Indosat mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran atau efek lainnya yang serupa, dengan ketentuan bahwa setiap saham baru yang dikeluarkan sebagai akibat penerbitan obligasi konversi dan/atau waran atau efek lainnya yang serupa akan terbatas jumlahnya dan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Indosat.

Saham Seri A

Hak-hak dan batasan-batasan yang bersifat material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas satu saham Seri A, kecuali Pemerintah tidak dapat memindahkan hak atas saham Seri A dan Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan: (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang melibatkan Perusahaan; (iii) likuidasi dan pembubaran; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A.

Tujuan dan Jangka Waktu

Menurut Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juli 2008 dan telah disetujui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-48398.AH.01.02.Tahun 2008, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Indosat adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Indosat adalah menyelenggarakan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Indosat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi:

    a. Menjalankan usaha dan/atau kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika;

    b. Menjalankan usaha dan/atau kegiatan perencanaan, pembangunan sarana, pengadaan fasilitas telekomunikasi serta informatika termasuk pengadaan sumber daya yang mendukung;

    c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika yang dijalankan oleh Indosat), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi serta informatika, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri;

d. Menjalankan jasa yang berhubungan dengan pengembangan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika.

Perusahaan didirikan pada tanggal 10 November 1967 tanpa batas waktu pendirian.

Hak Suara

Setiap saham biasa memberikan hak bagi pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk memberikan satu suara pada setiap rapat umum pemegang saham Indosat. Pemegang saham menunjuk anggota Direksi untuk suatu periode yang dimulai pada tanggal rapat umum pemegang saham yang menunjuk mereka dan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal penunjukan mereka.

Rapat umum pemegang saham tahunan harus diadakan, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun. Pada rapat umum pemegang saham tahunan, Direksi wajib (i) melaporkan perihal jalannya Indosat dan administrasi keuangan dari tahun buku yang baru berlalu; (ii) menyampaikan neraca dan perhitungan laporan rugi laba untuk disetujui dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham; (iii) penggunaan keuntungan dan besarnya dividen yang harus dibayarkan; (iv) mengajukan penunjukkan akuntan; dan (v) mengajukan hal-hal lainnya demi kepentingan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku yang baru berlalu sebagaimana dicantumkan dalam laporan tahunan. Semua bahan yang diuraikan dalam butir (i) sampai dengan (v) tersedia di kantor Indosat untuk diperiksa oleh para pemegang saham pada saat panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal rapat umum pemegang saham tahunan. Usul-usul yang disampaikan secara sah oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25,0% dari saham yang ditempatkan oleh Indosat dapat dimasukkan ke dalam agenda rapat tersebut, dengan ketentuan usul-usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 21 hari sebelum rapat tersebut.

Direksi atau Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan wajib mengadakan rapat tersebut setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari seorang pemegang saham atau para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10,0% dari saham yang ditempatkan dalam Indosat. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut, Direksi akan membahas, memutuskan, dan jika Direksi memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Direksi akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-lambatnya 14 hari sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Direksi akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Apabila para Direktur tidak membuat panggilan rapat tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan akan mengajukan kembali permohonannya kepada Dewan Komisaris. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut Dewan Komisaris akan membahas, memutuskan, dan jika Dewan Komisaris memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Dewan Komisaris akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-lambatnya 14 hari sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Dewan Komisaris akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Apabila Dewan Komisaris tidak membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam waktu 22 hari setelah diterimanya permohonan tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat memanggil rapat atas biaya Indosat setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengumuman tentang rapat umum pemegang saham diberikan kepada para pemegang saham sekurang-kurangnya 14 hari sebelum panggilan rapat umum pemegang saham melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia), satu di antaranya memiliki peredaran yang luas di Indonesia. Panggilan rapat harus disampaikan melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia dan memiliki peredaran luas di Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tanggal rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili, maka ketentuan panggilan rapat dapat dikesampingkan dan rapat umum pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Secara umum kuorum untuk Rapat umum pemegang saham memerlukan kehadiran pemegang saham secara langsung atau kuasanya, berdasarkan surat kuasa, yang mewakili sekurang-kurangnya 50% dari saham biasa yang dikeluarkan Perusahaan.

Pemegang saham dapat diwakili di dalam rapat umum pemegang saham oleh seseorang yang memiliki surat kuasa, tetapi tidak satupun Komisaris, Direktur atau karyawan Indosat yang dapat bertindak dalam kapasitas tersebut. Kecuali ditentukan lain di dalam Anggaran Dasar, dan dengan memperhatikan hak suara istimewa dari Saham Istimewa, keputusan-keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari para pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham biasa hadir dan memberikan suara di dalam rapat (suara mayoritas biasa).

Tahun Buku dan Laporan Keuangan

Tahun buku Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Selambat-lambatnya 90 hari sejak penutupan tahun buku, Direksi wajib menyampaikan neraca, laporan rugi laba dan laporan-laporan keuangan lainnya yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Komisaris, yang harus mengkaji laporan-laporan ini dan melaporkan hasil pengkajiannya kepada rapat umum pemegang saham. Salinan dari dokumen-dokumen tersebut harus tersedia di kantor pusat Indosat sejak tanggal panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal penutupan rapat umum pemegang saham tahunan.

Rapat umum pemegang saham tahunan akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah neraca dan laporan rugi laba Indosat akan disetujui atau tidak. Persetujuan tersebut berarti memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab mereka selama tahun buku yang bersangkutan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam neraca dan laporan rugi laba.

Penggunaan Laba dan Dividen

Laba Indosat, sebagaimana ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak perusahaan, harus digunakan untuk dana cadangan, dividen atau keperluan lainnya, dimana persentasenya harus ditentukan oleh rapat umum pemegang saham setiap tahunnya.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, dimana keputusan tersebut juga menentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Seluruh saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat diumumkannya dividen atau pembagian laba lainnya berhak mendapat bagian yang sama atas dividen atau pembagian laba

lainnya tersebut. Dividen harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham Indosat, pada hari kerja yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dimana pembagian dividen diputuskan.

Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan keduanya, dapat mengumumkan pembagian dividen interim apabila kondisi keuangan Indosat mengijinkan, dengan ketentuan dividen interim akan dikompensasikan terhadap dividen yang akan dibagikan pada rapat umum pemegang saham tahunan berikutnya.

Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal dimana dividen harus dibayarkan menjadi tidak lagi harus dibayarkan dan dimasukkan ke dalam dana cadangan Indosat. Pemberitahuan tentang dividen dan dividen interim harus diumumkan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas atau nasional di Indonesia, di satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan pada bursa efek dimana saham Perusahaan tercatat.

Apabila laporan rugi laba dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup oleh dana cadangan yang dimaksud di atas, maka kerugian akan tetap dicatat di dalam laporan rugi laba dan untuk tahun-tahun selanjutnya Indosat dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat di dalam laporan rugi laba tersebut belum tertutup sama sekali.

Untuk menutup kerugian di kemudian hari, dana cadangan dapat dibentuk dan besarnya dana cadangan akan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Dana cadangan dapat digunakan untuk pengeluaran modal atau keperluan lainnya sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan. Akan tetapi, dana cadangan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Indosat. Setiap laba yang diperoleh dari dana cadangan tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi Indosat.

Likuidasi

Dalam hal terjadi likuidasi Perusahaan, Direksi akan bertindak sebagai likuidator jika dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sisa dari seluruh aset likuidasi yang telah dipersiapkan, setelah pembayaran seluruh utang dan kewajiban Perusahaan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham. Jika memungkinkan, pembayaran terhadap saham-saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan harga yang tertera pada sertifikat saham. Sisa aset likuidasi akan dibagikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari para pemegang saham dan disetujui oleh dua per tiga dari para pemegang saham dengan hak suara, dengan ketentuan hal-hal yang berkenaan dengan (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang melibatkan Perusahaan; (iii) likuidasi dan pembubaran; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A, hanya dapat diberlakukan apabila rapat dihadiri dan tindakan tersebut disetujui oleh pemegang saham Seri A.

Keputusan mengenai pengurangan modal dasar dan modal ditempatkan harus diumumkan oleh Direksi di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, dan yang lainya berbahasa Inggris, untuk kepentingan para kreditur. Dalam hal kuorum rapat umum

pemegang saham luar biasa tidak tercapai, maka dalam waktu tujuh sampai dengan dua puluh satu hari sejak rapat umum pemegang saham luar biasa yang pertama, rapat kedua dapat diadakan untuk memutuskan hal-hal yang tidak diselesaikan di dalam rapat pertama. Rapat kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per lima dari jumlah pemegang saham dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah pemegang saham dengan hak suara. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan pengurangan modal hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Transaksi-Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Indosat memiliki kebijakan untuk tidak mengadakan transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi kecuali apabila ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya tidak kurang menguntungkan Indosat dibanding dengan yang akan diperoleh Indosat di dalam transaksi yang dilakukan secara wajar dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK dan Pasal 19 dari Anggaran Dasar Perusahaan, setiap transaksi dimana di dalamnya terdapat benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) harus mendapat persetujuan mayoritas dari para pemegang saham biasa yang tidak memiliki benturan kepentingan di dalam transaksi yang diusulkan, kecuali apabila benturan kepentingan tersebut telah timbul sebelum Indosat mencatatkan sahamnya dan benturan kepentingan tersebut telah diungkapkan di dalam dokumen-dokumen penawaran saham. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, benturan kepentingan berarti perbedaan kepentingan ekonomis Indosat di satu pihak, dan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham mayoritas (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang dikeluarkan) Indosat dalam satu transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada kami dikarenakan penetapan harga yang tidak wajar. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK, benturan kepentingan juga terjadi apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali Indosat terlibat di dalam suatu transaksi dimana kepentingan pribadi mereka dapat berbenturan dengan kepentingan Indosat, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan Bapepam-LK.

Mengingat banyaknya perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau ICLM atau salah satu dari afiliasi mereka yang berada di Indonesia, kami memperkirakan bahwa seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan, Perusahaan ingin mengadakan usaha patungan atau pengaturan atau transaksi lainnya dengan suatu perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tersebut, Perusahaan dapat berkonsultasi dengan Bapepam-LK mengenai apakah rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi akan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan menurut ketentuan-ketentuan peraturan Bapepam-LK. Apabila Bapepam-LK memandang bahwa berdasarkan peraturannya rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami dapat melaksanakan rencana tersebut tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan. Akan tetapi, apabila Bapepam-LK berpendapat bahwa berdasarkan peraturannya rencana tersebut memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami akan berupaya memperoleh persetujuan pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak melanjutkan rencana tersebut.

Kontrak-Kontrak Material

Pada tanggal 9 Mei 2007, kami menandatangani dua perjanjian perwaliamanatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Kelima dan Sukuk

Ijarah Indosat Kedua. Obligasi Indosat Kelima diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2007 dan memiliki total nilai nominal Rp2.600,0 milyar. Sukuk Ijarah Indosat Kedua diterbitkan pada 29 Mei 2007 dan dan memiliki total nilai nominal Rp400,0 milyar.

Pada tanggal 30 Juli 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Telkomsel untuk menggunakan jaringan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi bergerak selular Telkomsel. Kami mengubah perjanjian ini pada tanggal 19 Desember 2007. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkomsel setuju untuk memungkinkan pelanggan masing-masing untuk melakukan sambungan lokal, sambungan lokal jarak jauh dan sambungan internasional antara jaringan telekomunikasi tetap kami dan jaringan bergerak selular Telkomsel. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi untuk penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun akan tetapi dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu tiga bulan sebelumnya.

Pada tanggal 19 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Telkomsel untuk menggunakan jaringan interkoneksi antara jaringan bergerak selular kami dengan jaringan bergerak selular Telkomsel. Kami mengubah perjanjian ini pada tanggal 18 Februari 2008. Berdasarkan perjanjian-perjanjian ini, kami dan Telkomsel setuju untuk memungkinkan pelanggan masing-masing untuk melakukan atau menerima panggilan-panggilan antara jaringan bergerak selular kami dan jaringan bergerak selular Telkomsel. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi untuk penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun. Perjanjian ini otomatis diperbaharui setiap dua tahun akan tetapi dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu tiga bulan sebelumnya.

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Telkom untuk menggunakan jaringan interkoneksi antara jaringan selular kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan berbagai macam panggilan antara jaringan telekomunikasi tetap kami dan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tariff interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada tanggal 31 Maret 2008, perjanjian tersebut diubah untuk mematuhi surat BRTI No. 009/DJPT3/KOMINFO/II/2008 tetang pelaksanaan pengaturan interkoneksi tahun 2008.

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian interkoneksi dengan Telkom untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh dan sambungan internasional antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pada tanggal 17 Maret 2008, kami menandatangani dua perjanjian perwaliamanatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Keenam dan Sukuk Ijarah Indosat Ketiga. Obligasi Indosat Keenam diterbitkan pada tanggal 9 April 2008 dan memiliki total nilai nominal Rp1.080,0 milyar. Sukuk Ijarah Indosat Ketiga memiliki total nilai nominal Rp570,0 milyar.

Untuk informasi lebih lanjut atas perjanjian ini, lihat "Butir 5: Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek – Hutang."

Pada tanggal 24 Maret 2009, kami menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi untuk Obligasi Indosat II Seri B, Obligasi Indosat III Seri B, Obligasi Indosat IV, Obligasi Indosat V, dan Obligasi Indosat VI, Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Ijarah untuk Obligasi Syariah Ijarah, serta Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah untuk Sukuk Ijarah Indosat II dan Sukuk Ijarah Indosat III, dan telah mendapatkan persetujuan untuk, antara lain mengubah definisi "Pinjaman", "Ebitda", dan "Ekuitas" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1, menjadi 2,5 banding 1 di masing-masing perjanjian perwaliamanatan untuk maisng-masing obligasi, obligasi syariah ijarah, dan sukuk ijarah.

Untuk informasi lebih lanjut atas perjanjian ini, lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan – Hutang Pokok."

Pengawasan Valuta Asing

Lihat "Butir 3: Informasi Penting–Valuta Asing" yang terdapat pada bagian lainnya dari laporan tahunan ini.

Perpajakan

Rangkuman di bawah ini memuat penjelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan menurut peraturan perpajakan Indonesia dan federal Amerika atas pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa. Rangkuman ini tidak dimaksudkan sebagai penjelasan yang bersifat persaingan mengenai semua pertimbangan pajak yang mungkin berkaitan dengan keputusan untuk membeli, memiliki atau melepaskan ADS atau saham biasa. PARA CALON PEMBELI HARUS BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MENGENAI KONSEKUENSI-KONSEKUENSI PAJAK INDONESIA DAN PAJAK FEDERAL, NEGARA BAGIAN DAN LOKAL AMERIKA BAGI DIRINYA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN, KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN ADS ATAU SAHAM BIASA.

Perpajakan Indonesia

Berikut adalah rangkuman konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Indonesia sehubungan dengan kepemilikan dan pelepasan saham biasa atau ADS bagi perorangan non-penduduk maupun badan non-penduduk yang memiliki saham biasa atau ADS ("Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia"). Sebagaimana digunakan di dalam kalimat sebelumnya, "perorangan non-penduduk" adalah orang berkebangsaan asing yang secara fisik tidak tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih selama jangka waktu dua belas bulan dalam periode manapun dengan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut perorangan non-penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS, dan "badan non-penduduk" adalah perusahaan atau badan non-perusahaan yang didirikan, berdomisili atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu yurisdiksi selain dari Indonesia dan tidak memiliki tempat usaha yang tetap atau secara lain menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia selama tahun pajak Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut badan non-penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS. Dalam menentukan tempat tinggal perorangan atau badan, akan dipertimbangkan juga ketentuan-ketentuan dari perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia menjadi salah satu pihaknya.

Dividen. Dividen yang diumumkan oleh Perusahaan yang berasal dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia sehubungan dengan saham biasa atau ADS akan dikenakan pajak potongan Indonesia, yang saat ini besarnya 20,0%, atas jumlah yang dibagikan (dalam hal dividen tunai) atau bagian pemegang saham yang bersangkutan atas nilai pembagian. Pengenaan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak berganda dapat diberikan apabila pihak penerima adalah *beneficial owner* dari dividen dan menyerahkan kepada Perusahaan (dengan tembusan ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia dimana Perusahaan terdaftar) surat pernyataan domisili pajak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili. Indonesia telah mengadakan perjanjian pajak berganda dengan lebih dari 50 negara, seperti Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia, pajak potongan atas dividen secara umum, apabila tidak ada hak suara sebanyak 20.0%, adalah sebesar 15.0%.

Keuntungan Modal/Capital Gains. Penjualan atau pemindahan hak atas saham biasa yang tercatat di bursa efek Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang menangani transaksi harus melakukan pemotongan pajak tersebut. Kepemilikan, penjualan atau pemindahan saham pendiri yang tercatat di bursa efek Indonesia, berdasarkan peraturan pajak Indonesia saat ini, dapat dikenakan juga pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Dengan memperhatikan pemberlakuan peraturan pelaksana (yang belum dikeluarkan sampai saat ini), perkiraan laba bersih yang diterima atau timbul dari penjualan aset bergerak di Indonesia, yang meliputi saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia atau ADS, oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia (kecuali penjualan aset berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dari undang-undang pajak penghasilan Indonesia) dapat dikenakan pajak potongan Indonesia sebesar 20,0%. Akan tetapi, ketentuan pajak penghasilan ini belum diterapkan di dalam prakteknya. Kami perkirakan, apabila dan jika peraturan pelaksana dikeluarkan berkenaan dengan ketentuan ini, maka di dalam prakteknya pajak potongan ini (i) hanya akan dikenakan apabila saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia dibeli dan dibayar oleh penduduk Indonesia yang merupakan subyek pajak atau oleh badan usaha tetap di Indonesia dari badan atau perorangan non-penduduk dan (ii) tidak akan mempengaruhi hasil bersih penjualan atau pemindahan ADS melalui perdagangan reguler di NYSE oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia.

Dalam hal dimana pembeli atau pialang Indonesia diwajibkan berdasarkan undang-undang pajak Indonesia untuk memotong pajak atas pembayaran harga beli untuk saham biasa atau ADS, pembayaran tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak potongan atau pajak penghasilan Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia adalah salah satu pihaknya (termasuk perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia). Akan tetapi, peraturan perpajakan Indonesia saat ini tidak mengatur secara tegas prosedur untuk mencabut kewajiban pembeli atau pialang Indonesia untuk memotong pajak dari hasil penjualan tersebut. Untuk memanfaatkan keringanan perjanjian pajak berganda, Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia harus berupaya memperoleh pengembalian uang/*refund* dari Kantor Pajak Indonesia dengan mengajukan permohonan khusus yang disertai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh instansi perpajakan yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili.

Bea materai. Transaksi-transaksi saham biasa di Indonesia akan dikenakan bea materai sebesar Rp6.000 untuk transaksi-transaksi bernilai lebih dari Rp1.000.000 dan Rp3.000 untuk transaksi-transaksi bernilai antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Untuk transaksi-transaksi bernilai kurang dari Rp250.000 tidak dikenakan bea materai

.

Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Federal AS

Pembahasan berikut ini berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Pemerintah federal Amerika Serikat bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, sebagaimana yang didefinisikan di bawah ini, sehubungan dengan kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa. Penjelasan di bawah ini adalah berdasarkan *Internal Revenue Code of 1986,* sebagaimana diubah atau *Code, Treasury Regulations* yang diberlakukan berdasarkan *Code*, perjanjian pajak penghasilan antara Amerika Serikat dan Indonesia dan penafsiran judisial dan administratif daripadanya, dimana seluruhnya berlaku pada tanggal laporan keuangan ini dan seluruhnya dapat diubah, bahkan mungkin berlaku secara retroaktif. Perlakuan pajak atas pemilik ADS atau saham biasa dapat berbeda tergantung pada situasi tertentu dari pemiliknya. Beberapa pemilik (termasuk namun tidak terbatas, perusahaan asuransi, organisasi yang dikecualikan dari pajak, lembaga keuangan, pihak yang tunduk pada alternatif pajak minimum, pialang-penjual, pihak yang memiliki "mata uang fungsional/*functional currency*" selain dari Dolar AS, pihak yang menerima ADS atau saham biasa sebagai imbalan atas jasa-jasanya, pihak yang memiliki baik secara langsung atau tidak langsung 10.0% atau lebih dari saham dengan hak suara Perusahaan, dan pihak yang memiliki ADS atau saham biasa sebagai bagian dari "lindung nilai/*hedge*", "strategi pergerakan harga/*straddle*" atau "transaksi konversi/*conversion transactions*" dalam pengertian *Sections 1221, 1092 dan 1258 of the Code* dan *the Treasury Regulations)* tunduk pada peraturan khusus yang tidak dibahas di sini. Kecuali sebagaimana dibahas di bawah ini berkenaan dengan pihak yang bukan merupakan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, rangkuman berikut ini terbatas untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang akan memiliki ADS atau saham biasa sebagai "aset modal/*capital asset*" dalam pengertian *Section 1221 of the Code*. Pembahasan berikut ini tidak menyinggung dampak dari undang-undang pajak negara bagian atau lokal terhadap pemilik ADS atau saham biasa.

Sebagaimana digunakan di sini, istilah "Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat" berarti pemilik ADS atau saham biasa, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, yang merupakan (i) warga negara atau penduduk Amerika Serikat; (ii) perusahaan (termasuk badan yang dianggap perusahaan untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat) yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, salah satu negara bagiannya atau *District of Columbia;* (iii) warisan yang penghasilannya tunduk pada pajak Amerika Serikat terlepas dari sumbernya; (iv) suatu pengelola dana jika Pengadilan Amerika Serikat dapat melakukan pengawasan utama terhadap administrasi pengelolaan dana dan satu atau lebih warganegara Amerika Serikat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh keputusan penting dari pengelola dana tersebut; atau (v) pemilik ADS atau saham biasa yang penghasilannya dari ADS atau saham biasa dikenakan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berdasarkan laba bersih.

Apabila suatu bentuk kemitraan/*partnership* atau badan atau pengaturan lainnya yang dianggap sebagai kemitraan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, memiliki ADS atau saham biasa, maka perlakuan pajak atas seorang mitra/*partner* umumnya tergantung pada status mitra tersebut dan kegiatan kemitraannya. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan mitra dari suatu kemitraan yang memiliki ADS atau saham biasa disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya.

Rangkuman berikut ini tidak membahas semua aspek dari pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat yang mungkin relevan bagi pemilik ADS atau saham biasa tertentu sehubungan dengan keadaan tertentu mereka dan situasi pajak penghasilan tertentu. Calon pemilik ADS atau saham biasa harus berkonsultasi dengan konsultan pajaknya mengenai konsekuensi-konsekuensi pajak baginya, secara terperinci, sehubungan dengan pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa, termasuk penerapan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan pajak negara bagian, lokal, asing dan lainnya dan kemungkinan dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan pajak Amerika Serikat atau lainnya.

Pajak atas Pembagian Dividen. Dengan memperhatikan pembahasan tentang "Status Perusahaan Investasi Asing Pasif" di bawah ini, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, besarnya pembagian laba berkenaan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa (termasuk pajak potongan yang harus dikenakan atas pembagian laba tersebut) akan dianggap sebagai dividen kena pajak seperti penghasilan biasa pada tanggal penerimaannya masing-masing oleh Depositary atau pemiliknya, sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi sebagaimana ditentukan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat. Pembagian laba, jika ada, yang melebihi penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi pertama-tama akan dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi tersebut, dan kemudian dianggap sebagai *capital gain* yang direalisasikan pada saat pelepasan ADS atau saham biasa. Bagian dari setiap pembagian laba yang dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak ini akan mengurangi dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasan yang dimilikinya. *Capital gain* bersifat jangka panjang apabila ADS atau saham biasa telah dimiliki lebih dari satu tahun. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak berhak atas faktor pengurang pajak sejumlah dividen yang diterima*/dividends received deduction,* yang seharusnya diperbolehkan berdasarkan *Code* untuk pembagian laba kepada perusahaan domestik, sehubungan dengan pembagian laba dari ADS atau saham biasa.

Untuk tahun kena pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2011, "penghasilan dividen yang memenuhi syarat*/qualified dividend income"* yang diterima oleh perorangan akan dikenakan pajak penghasilan federal yang besarnya lebih rendah dari yang dikenakan atas penghasilan biasa lainnya. Berdasarkan kegiatan usaha dan aset lancar Perusahaan saat ini dan perkiraan masa depan, kami berpendapat bahwa kami adalah "perusahaan asing yang memenuhi syarat" dan bahwa dividen Perusahaan yang dibayarkan kepada Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat perorangan dapat dianggap sebagai "penghasilan dividen yang memenuhi syarat", dengan ketentuan bahwa persyaratan mengenai jangka waktu kepemilikan yang berlaku atas ADS atau saham biasa dan ketentuan yang berlaku lainnya telah dipenuhi oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika yang bersangkutan. Dividen yang dibayar oleh perusahaan asing yang digolongkan sebagai perusahaan Investasi asing pasif/*passive foreign investment company* atau PFIC bukan merupakan "penghasilan dividen yang memenuhi syarat." Lihat "—Status Perusahaan investasi Asing Pasif" di bawah ini.

Apabila pembagian dividen dibayar dalam mata uang lain selain dari dolar AS, maka besarnya pembagian laba tersebut akan dikonversikan ke mata uang dolar AS dengan menggunakan nilai tukar *spot* pada tanggal diterimanya pembagian laba tersebut (untuk para pemilik ADS, pada tanggal dividen tersebut diterima oleh *Depositary*), terlepas apakah pembagian dividen tersebut benar-benar dikonversikan ke mata uang dolar AS pada tanggal itu. Setiap keuntungan atau kerugian berkenaan dengan mata uang non-Amerika Serikat yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing setelah tanggal itu akan dianggap sebagai laba atau rugi biasa.

Pajak atas Capital Gains and Losses. Dengan memperhatikan pembahasan tentang "Status Perusahaan Investasi Asing Pasif" di bawah ini, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat umumnya mengetahui adanya rugi atau laba kena pajak atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa yang besarnya sama dengan selisih antara jumlah yang diperoleh dari penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya tersebut dengan dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasa miliknya. Hal ini akan mengakibatkan *capital gain* atau *loss* jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada apakah ADS atau saham biasa tersebut telah dimiliki lebih dari satu tahun. Untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat non-perusahaan, pajak penghasilan Amerika Serikat yang dikenakan atas *capital gain* bersih jangka panjang yang diakui untuk satu tahun atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa, pada saat ini besarnya tidak akan melebihi 15.0% untuk tahun kena pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari

2011. Penempatan dan penarikan saham biasa sebagai ganti ADS yang dilakukan oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak akan mengakibatkan realisasi laba atau rugi untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat.

Status Perusahaan Investasi Asing Pasif. Aturan khusus pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berlaku bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki penyertaan di PFIC. Umumnya, perusahaan asing dianggap sebagai PFIC pada tahun kena pajak berjalan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat apabila 75,0% atau lebih dari penghasilan kotornya untuk tahun kena pajaknya terdiri dari penghasilan pasif (biasanya, bunga, dividen, uang sewa, royalti dan keuntungan bersih dari pelepasan aset yang menghasilkan penghasilan tersebut) atau 50,0% atau lebih dari aset rata-ratanya selama tahun kena pajak terdiri dari aset pasif yang menghasilkan, atau yang dimiliki sebagai hasil dari penghasilan pasif.

Berdasarkan kegiatan bisnis dan aset lancar Perusahaan saat ini dan proyeksi masa depan, kami berpendapat bahwa kami bukan PFIC dan kami memperkirakan bahwa kami tidak akan menjadi PFIC di kemudian hari. Akan tetapi, apabila Perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan yang diperkirakan pada saat ini, kami mungkin akan dianggap sebagai PFIC untuk tahun yang berjalan dan yang akan datang, tergantung pada kegiatan Perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, oleh karena status PFIC tergantung pada komposisi penghasilan dan aset perusahaan dan harga pasar dari asetnya dari waktu ke waktu, maka tidak ada jaminan bahwa kami tidak akan dianggap sebagai PFIC untuk setiap tahun kena pajak.

Apabila kami adalah PFIC dalam tahun kena pajak berjalan dimana pemilik berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa, pemilik tersebut akan dikenakan kebijakan pajak khusus terhadap penerimaan atas "pembagian berlebih" dan keuntungan yang direalisasikan dari penjualan atau disposisi lain termasuk gadai, atas ADS atau saham biasa. Pembagian yang diterima di dalam tahun kena pajak berjalan yang lebih besar dari 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang diterima selama waktu yang lebih singkat antara tiga tahun pajak sebelumnya atau selama ADS atau saham biasa dimiliki, akan diperlakukan sebagai pembagian berlebih. Kebijakan pajak khusus ini mengatur: (a) kelebihan pembagian atau keuntungan akan dikenakan secara proporsional selama periode kepemilikan; (b) jumlah yang dialokasikan perpajakan yang berlaku untuk tahun berjalan dan perpajakan untuk tahun sebelum tahun pertama dimana kami adalah PFIC, akan diperlakukan sebagai pendapatan biasa dan; (c) jumlah yang dialokasikan pada setiap dua tahun sekali akan dikenakan pajak tambahan yang harus dibayar pada tahun pajak berjalan dan dimana besarnya sama dengan total pada tahun-tahun tersebut; (i) jumlah yang dialokasikan untuk tahun tersebut dikalikan dengan tarif pajak tertinggi pada tahun tersebut; (ii) jumlahnya sebesar beban bunga yang ditagih yang akan dikenakan untuk tahun tersebut.

Pemilihan diberikan untuk menghindari konsekuensi pajak negatif dalam kondisi tertentu dimana pemilik memilih untuk melakukan perbandingan dengan harga pasar atas ADS atau saham biasa yang dimilikinya. Selanjutnya, walaupun pemegang PFIC diperkenankan untuk menggunakan peraturan-peraturan di atas dengan cara memilih untuk memperlakukan PFIC sebagai "pemilikan dana yang wajar" sesuai bagian 1295 dalam peraturan ini, opsi ini tidak berlaku untuk pemilik berkebangsaan Amerika Serikat karena kami tidak bermaksud untuk memenuhi persyaratan untuk memperbolehkan pemilik berkebangsaan Amerika Serikat untuk memilihnya.

Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya tentang konsekuensi-konsekuensi pajak penghasilan federal Amerika Serikat sehubungan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa dan atas penentuan pilihan *mark-to-market*. Apabila kami dipertimbangkan sebagai PFIC untuk pajak tahun berjalan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa selama tahun dimana Perusahaan dianggap sebagai PFIC diwajibkan untuk menyampaikan Form 8621 ke *Internal Revenue Service* atau IRS.

Pertimbangan Kredit Pajak Asing. Untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, Pemilik Berkebangsaan Amerika akan dianggap telah menerima jumlah pajak Indonesia yang telah dipotong dari pembayaran dividen dan telah menyetor pajak tersebut ke Indonesia. Sebagai akibat pemberlakuan peraturan ini, besarnya dividen yang dimasukkan ke dalam laba kotor Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat menjadi lebih besar dari jumlah uang tunai yang sesungguhnya diterima (atau dapat diterima) oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat.

Dengan memperhatikan batasan-batasan dan syarat-syarat yang dimaksud di dalam *Code*, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat dapat memilih untuk mengajukan klaim kredit terhadap kewajiban pajak penghasilan federal Amerika untuk pajak Indonesia yang telah dipotong dari dividen atau pajak Indonesia yang dikenakan atas *capital gain*, jika ada, atau, apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memilih untuk tidak mengkreditkan pajak asing untuk tahun kena pajak, mereka dapat melakukan pengurangan pajak tersebut. Untuk tujuan batasan kredit pajak asing, dividen dan *capital gain,* tergantung pada keadaan-keadaan tertentu dari Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, umumnya akan dianggap sebagai penghasilan "pasif" atau "umum". Selanjutnya, dividen umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan asing, dan keuntungan valuta asing dan *capital gain* umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan Amerika Serikat. *Capital loss* umumnya akan dialokasikan terhadap sumber penghasilan Amerika Serikat. Oleh karena *capital gain* umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan Amerika Serikat, karena batasan kredit pajak asing Amerika Serikat, maka setiap pajak Indonesia atau pajak asing lainnya sehubungan dengan ADS atau saham biasa saat ini tidak dapat dikreditkan, kecuali apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memiliki sumber penghasilan asing lainnya untuk tahun tersebut yang dapat masuk ke dalam keranjang batasan kredit pajak asing, atau tersedia pilihan untuk menganggap keuntungan tersebut sebagai sumber penghasilan asing. Para investor disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya mengenai tersedianya kredit pajak asing berdasarkan keadaan-keadaan mereka.

Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat. Kecuali kemungkinan adanya pengenaan cadangan pajak penghasilan Amerika Serikat (lihat "–Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan Informasi"), pembayaran setiap dividen atas ADS atau saham biasa kepada pemilik yang bukan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat ("Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat") tidak akan dikenakan pajak penghasilan federal Amerika Serikat dan setiap keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa, dengan ketentuan:

a. Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat tidak akan atau tidak sedang menjalankan perdagangan atau bisnis di negara Amerika Serikat;

b. tidak ada hubungan baik saat ini atau sebelumnya antara Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat dan negara Amerika Serikat, termasuk tanpa pembatasan seperti status Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat sebagai bekas warga negara atau penduduk Amerika Serikat; dan

c. dalam hal keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa oleh perorangan, Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat yang tidak berada di Amerika Serikat selama 183 hari atau lebih dalam tahun kena pajak atas penjualan atau terpenuhinya syarat-syarat lainnya.

Apabila dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa yang dimiliki oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat secara efektif berhubungan dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis (atau akibat adanya badan usaha tetap di Amerika Serikat, apabila pemilik merupakan penduduk dari suatu negara yang memiliki perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat), Pemilik Berkebangsaan Non-

Amerika Serikat dapat dikenakan pajak penghasilan Amerika Serikat atas dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut sesuai dengan persentase pajak yang ditetapkan untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, setelah dikurangi dengan faktor pengurang pajak sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan/*deductible expenses* terhubung secara efektif dengan penghasilan. Sebagai tambahan, apabila Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat adalah perusahaan asing, pemilik yang bersangkutan dapat dikenakan pajak keuntungan atas kantor cabang sebesar 30.0% dari penghasilan dan keuntungan yang berhubungan secara efektif untuk tahun pajak tersebut, sebagaimana disesuaikan untuk beberapa hal, kecuali apabila terdapat tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak penghasilan Amerika Serikat dengan negara tempat tinggal Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat. Untuk tujuan ini, dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa akan dimasukkan ke dalam penghasilan dan keuntungan yang kena pajak keuntungan atas kantor cabang apabila dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut berhubungan secara efektif dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat di negara Amerika Serikat.

Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan. Pembayaran yang dilakukan oleh agen pembayaran Amerika Serikat atau pialang perantara Amerika Serikat sehubungan dengan ADS atau saham biasa dapat dikenakan kewajiban membuat pelaporan kepada IRS dan cadangan terhadap pajak penghasilan. Cadangan pajak penghasilan tidak akan dikenakan apabila (i) pemilik yang memberikan nomor identifikasi subyek pajak yang benar dan membuat surat pernyataan lainnya yang ditentukan atau (ii) pada pemilik lainnya yang dikecualikan dari cadangan pajak penghasilan.

Setiap jumlah uang yang dipotong berdasarkan peraturan cadangan pajak penghasilan atas pembayaran kepada pemilik dapat diperoleh kembali dalam bentuk pengembalian uang atau kredit terhadap pajak penghasilan federal Amerika Serikat dari pemilik yang bersangkutan, dengan ketentuan pemilik tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan yang berlaku.

Butir 11: PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RISIKO PASAR

Pengungkapan dari Segi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Kami memiliki risiko terhadap pasar terutama yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan tingkat suku bunga dan risiko nilai ekuitas atas nilai investasi jangka panjang Perusahaan. Untuk mengatur risiko nilai tukar valuta asing dan nilai tingkat suku bunga, kami telah menandatangani kontrak *cross currency swap,* kontrak *interest rate swap* dan kontrak *currency forward* atau transaksi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau mengatur dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga pada pelaksanaan kegiatan bisnis dan arus kas kami. Kami mencatat hal-hal tersebut sebagai bukan transaksi lindung nilai (*hedge*), dimana perubahan dalam nilai wajar akan ditagih atau dikreditkan secara langsung sebagai beban atau pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Kami mengkonversi kelebihan dana dalam mata uang Rupiah menjadi Dolar AS secara berkala yang jumlahnya disesuaikan dengan pengeluaran kami dalam mata uang Dolar AS.

Sensitifitas terhadap Tingkat Suku Bunga

Per tanggal 31 Desember 2008, sebagian besar hutang Perusahaan yang belum dibayarkan dikenakan suku bunga tetap. Lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan—Hutang-Hutang Pokok".

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai instrumen keuangan kami yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Untuk hutang jangka panjang dan obligasi yang harus dibayar, tabel ini menyajikan arus kas pokok dan tingkat suku bunga yang terkait dengan perkiraan tanggal jatuh tempo. Informasi yang disajikan di dalam tabel tersebut telah dibuat berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini: (i) variabel tingkat suku bunga deposito dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah adalah berdasarkan tingkat suku bunga pada tahun 2008; (ii) tingkat suku bunga deposito jangka panjang dalam mata uang Rupiah adalah berdasarkan sertifikat Bank Indonesia untuk tiga bulan, sertifikat Bank Indonesia untuk satu bulan dan JIBOR tiga bulan pada bulan Desember 2008 ditambah marjin; (iii) tingkat suku bunga hutang jangka panjang dalam mata uang Dolar AS adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dari berbagai perjanjian. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa asumsi-asumsi tersebut adalah benar untuk periode di masa mendatang. Asumsi-asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia akibat terus berlangsungnya keadaan ekonomi yang tidak likuid dan faktor-faktor moneter dan makro eknomi lainnya yang mempengaruhi Indonesia.

		Jumlah pada tanggal 31 Desember 2008		Perkiraan tanggal jatuh tempo (per 31 Desember 2008)							
	Tingkat Suku Bunga	Valuta Asing	Ekuivalen Rupiah	2009	2010	2011	2012	2013	Setelah	Jumlah	Nilai Wajar
	(%)			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
				(Rp dalam milyar)							
Aktiva:											
Tingkat Suku Bunga Variabel											
Rp	1,250% - 14,000%		1.603,6	1.603,6						1.603,6	1.603,6
US$	0,002% - 6,000%	353,0	3.865,4	3.865,4	-	-	-	-	-	3.865,4	3.865,4
Jumlah Aktiva		353,0	5.469,0	5.469,0	-	-	-	-	-	5.469,0	5.469,0
Kewajiban:											
Hutang Pinjaman											
Tingkat Suku Bunga Tetap											
Rp.											
Pokok			4.534,3	450,0	650,0	675,0	2.075,0	684,3	-	4.534,3	4.534,3
Bunga	8,75-10,5%			485,9	503,3	412,6	274,0	21,6		1.697,4	-
US$											
Pokok		123,1	1.347,9	83,2	197,2	155,6	114,0	114,0	683,9	1.347,9	1.347,9
Bunga	4,15-5,69%			72,6	65,9	56,0	48,6	48,6	110,3	402,0	-
Tingkat Suku Bunga Variabel											
Rp.											
Pokok			49,4	24,5	20,0	4,9	-	-	-	49,4	49,4
Bunga	1 bulan SBI + 2,25% dan 3 bulan SBI + 3,00%			5,1	2,3	0,2	-	-	-	7,6	-
US$											
Pokok		505,6	5.536,7	14,8	60,9	1.292,8	1.652,5	2.194,6	321,1	5.536,7	5.536,7
Bunga	6 Bulan LIBOR + 0,35%; 1,45% dan 1,85%			193,0	196,6	172,2	98,1	60,4	8,9	729,1	-
Hutang Obligasi [1]											
Tingkat Suku Bunga Tetap											
Rp.											
Pokok			6.590,0	-	640,0	1.100,0	-	1.330,0	3.520,0	6.590,0	6.590,0
Bunga	10,2-16%			729,5	715,7	581,1	515,1	1.606,1		4.147,4	-
US$											
Pokok		344,2	3.768,5	-	2.570,5	-	1.198,0	-	-	3.768,5	3.768,5
Bunga	7,125-7,75%			284,6	251,4	85,4	42,7	-	-	664,1	-
Tingkat Suku Bunga Variabel											
Rp.											
Pokok			56,4	56,4	-	-	-	-	-	56,4	56,4
Bunga	3 bulan waktu rata-rata deposit + 3%			2,4	-	-	-	-	-	2,4	-
US$											
Pokok										-	-
Bunga										-	-
Jumlah Kewajiban		972,9	21.883,2	2.402,0	5.873,8	4.535,8	6.018,0	4.877,7	5.826,1	29.533,4	21.883,2
Arus Kas Bersih		**(619,9)**	**(16.414,2)**	**(3.067,0)**	**(5.873,8)**	**(4.535,8)**	**(6.018,0)**	**(4.877,7)**	**(5.826,1)**	**(24.064,4)**	**(16.414,2)**

Selain itu, per tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008, Perusahaan memiliki beberapa deposito dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS, yang juga memiliki risiko terhadap fluktuasi tingkat suku bunga.

Sensitifitas terhadap Nilai Tukar Valuta Asing

Kami memiliki risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing terutama akibat adanya kewajiban hutang jangka panjang, obligasi yang harus dibayar dan piutang dan hutang dalam mata uang Dolar AS.

Kewajiban utama kami yang harus dibayar adalah kewajiban pembayaran bersih dalam valuta asing kepada para operator telekomunikasi asing. Sementara di lain pihak, sebagian besar piutang kami adalah dalam mata uang Rupiah dari para operator domestik. Selama periode sejak 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2008, nilai tukar Rupiah/ Dolar AS berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.400 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp8.672 per Dolar AS, dan selama tahun 2008, berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.400 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp9.051 Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku adalah sebesar Rp10.950 per Dolar AS. Dengan demikian, kami mencatat kerugian nilai tukar bersih sebesar Rp155,3 milyar, dan Rp885,7 milyar masing-masing pada tahun 2007 dan 2008. Selama mata uang Rupiah terus melemah dari nilai tukar valuta asing yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2008, maka kewajiban pembayaran kami akan bertambah bila dihitung dalam mata uang Rupiah. Pertambahan kewajiban ini sebagian akan dikompensasikan dengan kenaikan nilai deposito dalam mata uang asing dan dengan kenaikan nilai piutang dalam mata uang asing. Sehubungan dengan utang dan obligasi dalam mata uang asing yang harus dibayar, selama mata uang Rupiah terus melemah dibandingkan dengan nilai tukar valuta asing yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2008, kewajiban kami berdasarkan utang yang harus dibayar dan obligasi yang harus dibayar akan bertambah bila dihitung dalam mata uang Rupiah. Lihat "Butir 3 – Informasi Kunci – Faktor Risiko – Risiko berkaitan dengan Indonesia – Penurunan nilai mata uang rupiah dapat menimbulkan kerugian bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan dan prospek kami."

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi-informasi mengenai instrumen keuangan kami dalam mata uang yang terkait dan menyajikan informasi tersebut dalam mata uang Rupiah yang setara nilainya, yang dalam hal ini merupakan mata uang yang digunakan dalam dokumen pelaporan kami. Tabel ini merangkum informasi mengenai instrumen dan transaksi yang sensitif terhadap nilai tukar valuta asing, termasuk deposito, hutang dan piutang, dan instrumen keuangan Perusahaan seperti deposito, piutang dan hutang, dan hutang jangka panjangnya. Tabel ini menyajikan arus kas pokok pada perkiraan tanggal jatuh tempo.

	Perkiraan tanggal jatuh tempo per tanggal 31 Desember							
	Mata uang asing (dalam ribuan)	2009	2010	2011	2012	2013	Setelahnya	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	(Rp dalam juta)							
Aktiva:								
Kas dan setara kas [1]								
Dalam US$	370,2	4.054,2	-	-	-	-	-	4.054,2
Piutang								
Dalam US$	112,5	1.232,6	-	-	-	-	-	1.232,6
Aktiva derivatif								
Dalam US$	60,0	656,6	-	-	-	-	-	656,6
Aktiva lancar lainnya								
Dalam US$	2,3	24,7	-	-	-	-	-	24,7
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa								
Dalam US$	0,8	8,3	-	-	-	-	-	8,3
Aktiva tidak lancar lainnya								
Dalam US$	1,1	12,4	-	-	-	-	-	12,4
Total Aktiva	**546,9**	**5.988,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.988,8**
Kewajiban:								
Hutang-dagang								
Dalam US$	31,0	339,9	-	-	-	-	-	339,9
Hutang Pengadaan								
Dalam US$	412,3	4.514,7	-	-	-	-	-	4.514,7
Biaya Masih harus Dibayar								
Dalam US$	39,0	427,5	-	-	-	-	-	427,5
Uang muka dari pelanggan								
Dalam US$	1,0	11,1	-	-	-	-	-	11,1
Kewajiban derivatif								
Dalam US$	28,9	315,9	-	-	-	-	-	315,9
Kewajiban Lancar lainnya								
Dalam US$	0,0	0,3	-	-	-	-	-	0,3
Kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa								
Dalam US$	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0
Hutang Pinjaman								
Dalam US$	645,7	98,0	258,1	1.448,4	1.766,5	2.494,4	1.005,0	7.070,4
Hutang Obligasi								
Dalam US$	344,2	-	2.570,5	-	1.198,0	-	-	3.768,5
Kewajiban tidak lancar lainnya								
Dalam US$	13,3	145,2				-	-	145,2
Jumlah Kewajiban	**1.515,4**	**5.852,6**	**2.828,6**	**1.448,4**	**2.964,5**	**2.494,4**	**1.005,0**	**16.593,5**
Arus Kas Bersih	**(968,5)**	**(136,2)**	**(2.828,6)**	**(1.448,4)**	**(2.964,5)**	**(2.494,4)**	**(1.005,0)**	**(10.604,7)**

(1) "Kas dan setara kas" terdiri dari kas, Bank dan deposito.

Informasi yang disajikan di dalam tabel ini telah ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi bahwa nilai tukar untuk Dolar AS adalah berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp10.950 = US$1,00. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa asumsi-asumsi tersebut akan benar untuk masa mendatang. Asumsi-asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti depresiasi nilai Rupiah pada periode mendatang. Lihat "Butir 3: Informasi Penting—Faktor-Faktor Risiko—Perubahan-perubahan di kemudian hari atas nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang asing lainnya yang dapat memberikan dampak buruk bagi bisnis kami."

Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang kami terutama terdiri dari investasi kecil dalam bentuk saham di perusahaan-perusahaan swasta Indonesia dan di perusahaan-perusahaan asing. Sehubungan dengan investasi kami di perusahaan-perusahaan Indonesia, kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat terkena dampak buruk akibat kondisi ekonomi di Indonesia.

Kontrak Swap Valuta Asing

Selama tahun 2008, Perusahaan tetap memiliki kontrak swap valuta asing yang dibuat pada tahun 2005 sampai dengan 2007, merestrukturisasi tiga kontrak swap valuta asing yang telah dimiliki Perusahaan dan membuat tiga kontrak swap valuta asing baru sebagai upaya untuk mengelola risiko Perusahaan terhadap valuta asing secara efektif. Kontrak-kontrak tersebut adalah kontrak bunga tetap valuta asing. Sejak 2007 sampai dengan 2008, Perusahaan telah menyelesaikan seluruh sisa kontrak *structured forward* dengan tiga lembaga keuangan internasional yang berbeda. Per tanggal 31 Desember 2008, kami mendapatkan fasilitas lindung nilai *(hedging facilities)* sebesar US$509,0 juta yang mewakili 52,3% dari obligasi dan pinjaman kami dalam mata uang dolar AS.

Selama periode dari bulan Mei sampai dengan November 2005, kami telah mengadakan kontrak-kontrak valuta asing dengan nilai keseluruhan sebesar US$250,0 juta, dimana berdasarkan kontrak-kontrak tersebut Perusahaan menyetujui untuk membayar mata uang Rupiah dan sebagai gantinya pihak lainnya wajib membayar mata uang Dolar AS berdasarkan nilai tukar spot yang disepakati berkisar antara Rp8.322,5 sampai dengan Rp9.800 per US$1,00 sebagai berikut:

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$100,0 juta, nilai tukar spotnya adalah Rp8.322,5 per US$1,00 dengan tanggal jatuh tempo 5 November 2010. Kami membayar premi berdasarkan kontrak tersebut, yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga LIBOR yang berlaku untuk enam bulan ditambah marjin tetap sebesar 2,62% per tahun untuk jumlah US$50,0 juta dan tingkat bunga tetap sebesar 6,96% per tahun untuk jumlah US$50,0 juta;

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$25,0 juta, nilai tukar spotnya adalah Rp9.800 per US$1,00 dengan tanggal jatuh tempo 5 November 2010 dan premi sebesar 4,3% per tahun;

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$75,0 juta, nilai tukar spotnya adalah (i) yang terendah di antara Rp9.700 dan nilai tukar spot harian terendah untuk mata uang Rupiah/Dolar AS yang berlaku antara tanggal 22 Agustus 2005 sampai dengan dan termasuk 20 Juni 2012 (nilai terendah) per US$1,00 apabila nilai tukar spot mata Rupiah/Dolar AS yang berlaku pada tanggal jatuh tempo lebih rendah atau sama dengan nilai terendah ditambah Rp4.300,00 (nilai tertinggi) atau (ii) nilai tukar spot mata uang Rupiah/Dolar AS yang

berlaku pada tanggal jatuh tempo dikurangi Rp4.300,00 per US$1,00 apabila nilai tukar spot mata uang Rupiah/Dolar AS pada tanggal jatuh tempo lebih tinggi dari nilai tertinggi. Tanggal jatuh tempo adalah 22 Juni 2012 dengan premi sebesar 3,28% per tahun;

- Kontrak-kontrak swap ini dibuat dengan memasukkan ketentuan keterkaitan kredit/*credit-linkage* dengan kami sebagai perusahaan acuan dan dengan kepailitan Perusahaan, serta kegagalan kami untuk membayar beberapa kewajiban hutang Perusahaan atau untuk melakukan restrukturisasi beberapa kewajiban hutang Perusahaan sebagai peristiwa kredit yang terkait. Apabila terjadi salah satu dari peristiwa kredit ini, maka kewajiban kami dan kewajiban pihak lainnya dari kontrak-kontrak swap ini akan diakhiri tanpa pembayaran atau penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh atau terhutang kepada salah satu pihak, termasuk pembayaran oleh salah satu pihak untuk nilai pasar-ke-pasar/*marked-to-market* dari kontrak-kontrak swap;

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$25,0 juta, tanggal jatuh temponya adalah 22 Juni 2012 dengan premi sebesar 2,99% per tahun. Kami tidak diwajibkan untuk merealisasikan kontrak jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau setara dengan Rp9.500. Nilai tukar spot adalah (i) Rp9.500 per US$1,00 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp9.500 tetapi kurang dari atau sama dengan Rp14.000 atau (ii) Rp9.500 per US$1,00 ditambah kelebihan dari nilai tukar spot sebenarnya yang melebihi Rp14.000 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp14.000; dan

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$25,0 juta, nilai tukar spotnya adalah Rp9.800 per US$1,00 dengan tanggal jatuh tempo 22 Juni 2012 dan premi sebesar 5,5% per tahun.

Akan tetapi, dalam hal Rupiah menguat terhadap dolar AS dan tingkat suku bunga LIBOR meningkat, kami akan mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tersebut, yang mana dapat memberikan dampak negatif bagi kondisi keuangan Perusahaan.

Sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2006, kami mengadakan empat kontrak valuta asing, masing-masing dengan nilai pokok sebesar US$25,0 juta, dengan jumlah keseluruhan sebesar US$100,0 juta, dimana berdasarkan kontrak-kontrak tersebut Perusahaan menyetujui untuk membayar dalam mata uang Rupiah dan sebagai gantinya pihak lainnya wajib membayar dalam mata uang dolar AS berdasarkan nilai tukar spot yang disepakati berkisar antara Rp8.700 sampai dengan Rp9.450 per US$1,00. Tanggal jatuh temponya adalah 22 Juni 2012 dan Perusahaan membayar premi berdasarkan kontrak-kontrak tesebut dengan tarif tetap masing-masing sebesar 4,78%, 4,15%, 3,75% dan 3,45% per tahun.

Pada bulan Agustus 2006, kami mengadakan kontrak valuta asing sebesar US$25,0 juta, dimana berdasarkan kontrak-kontrak tersebut Perusahaan menyetujui untuk membayar mata uang Rupiah dan sebagai gantinya pihak lainnya wajib membayar mata uang dolar AS berdasarkan nilai tukar spot yang disepakati sebesar Rp9.000 per US$ 1,00, dengan tanggal jatuh temponya 5 November 2010. Perusahaan membayar premi berdasarkan kontrak-kontrak tesebut dengan tarif tetap sebesar 4,00% per tahun untuk US$25,0 juta.

Sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008, kami mengadakan lima kontrak valuta asing dengan jumlah keseluruhan sebesar US$209,0 juta, dimana berdasarkan kontrak-kontrak tersebut Perusahaan menyetujui untuk membayar mata uang Rupiah dan sebagai gantinya pihak lainnya wajib membayar mata uang dolar AS berdasarkan nilai tukar spot yang disepakati sebagai berikut:

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$50,0 juta, pada tanggal 8 Agustus 2008, kami melakukan restrukturisasi dua dari kontrak valuta asing masing-masing senilai US$25,0 juta dengan premi 5,5% dan 4,15% per tahun menjadi kontrak valuta asing sebesar US$50,0 juta. Tanggal jatuh temponya adalah 22 Juni 2012 dengan premi sebesar 4,22% per tahun. Kami tidak diwajibkan untuk merealisasikan kontrak jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau setara dengan Rp8.950. Nilai tukar spot adalah (i) Rp8.950 per US$1,00 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp8.950 tetapi kurang dari atau sama dengan Rp11.000 atau (ii) Rp8.950 per US$1,00 ditambah kelebihan dari nilai tukar spot sebenarnya yang melebihi Rp11.000 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp11.000;

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$25,0 juta, dengan tanggal jatuh temponya 12 Juni 2013 dan premi sebesar 4,10% per tahun untuk US$25,0 juta sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 dan 4,10% dari jumlah dolar AS yang menurun sebagaimana diatur dalam kontrak sampai dengan tanggal 12 Juni 2013. Kami tidak diwajibkan untuk merealisasikan kontrak jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau setara dengan Rp8.800. Nilai tukar spot adalah (i) Rp8.800 per US$1,00 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp8.800 tetapi kurang dari atau sama dengan Rp12.000 atau (ii) Rp8.800 per US$1,00 ditambah kelebihan dari nilai tukar spot sebenarnya yang melebihi Rp12.000 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp12.000;

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$25,0 juta, pada tanggal 8 September 2008 kami merestruksurisasi kontrak valuta asing senilai US$25,0 juta tersebut dengan premi sebesar 2,99% per tahun. Tanggal jatuh temponya adalah 22 Juni 2012 dengan premi sebesar 2,52% per tahun. Kami tidak diwajibkan untuk merealisasikan kontrak jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau setara dengan Rp9.000. Nilai tukar spot adalah (i) Rp9.000 per US$1,00 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp9.000 tetapi kurang dari atau sama dengan Rp11.000 atau (ii) Rp9.000 per US$1,00 ditambah kelebihan dari nilai tukar spot sebenarnya yang melebihi Rp11.000 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp11.000;

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$25,0 juta, tanggal jatuh temponya adalah 12 Juni 2013 dengan premi sebesar 3,945% per tahun untuk US$25,0 juta sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 dan 3,945% dari jumlah dolar AS yang menurun sebagaimana diatur dalam kontrak sampai dengan tanggal 12 Juni 2013. Kami tidak diwajibkan untuk merealisasikan kontrak jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau setara dengan Rp8.800. Nilai tukar spot adalah (i) Rp8.800 per US$1,00 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp8.800 tetapi kurang dari atau sama dengan Rp12.000 atau (ii) Rp8.800 per US$1,00 ditambah kelebihan dari nilai tukar spot sebenarnya yang melebihi Rp12.000 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp12.000; dan

- Terhadap nilai kontrak sebesar US$84,0 juta, tanggal jatuh temponya adalah 5 November 2010 dengan premi yang dibayar di muka sebesar US$9.500 (setara dengan Rp105.212), yang telah dilunasi pada tanggal 19 Desember 2008 dan diamortisasi selama jangka waktu kontrak. Kami tidak diwajibkan untuk merealisasikan kontrak jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau setara dengan Rp11.500. Nilai tukar spot adalah (i) Rp11.500 per US$1,00 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp11.500 tetapi kurang dari atau sama dengan Rp15.000 atau (ii) Rp11.500 per US$1,00 ditambah kelebihan dari nilai tukar spot sebenarnya yang melebihi Rp15.000 jika nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo adalah lebih dari Rp15.000.

Kontrak Swap Tingkat Suku Bunga

Selama tahun 2008, kami mengadakan sepuluh kontrak swap tingkat suku bunga dengan lima lembaga keuangan internasional dengan nilai keseluruhan sebesar US$362,2 juta dimana kami menyetujui untuk membayar bunga tetap sebagai ganti pembayaran tingkat suku bunga mengambang yang terkait dengan LIBOR untuk enam bulan dalam mata uang dolar AS ditambah salah satu antara 0,35%, 1,45% atau 1,85% per tahun, agar dapat melakukan lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga pada perjanjian pembiayaan satelit komersial HSBC dan HSBC *Sinosure* dan Pinjaman Sindikasi ING/DBS Perusahaan.

Pada tanggal 20 Januari 2009, Indosat mengadakan kontrak swap tingkat suku bunga dengan Bank DBS untuk jumlah senilai US$26,0 juta, yang akan menurun berdasarkan jadwal yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan kontrak, Perusahaan menyetujui untuk membayar bunga yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tetap sebesar 3,83% pada setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 sebagai ganti pembayaran tingkat suku bunga enam bulan LIBOR untuk mata uang dolar AS ditambah 1,85% per tahun.

Pada tanggal 2 Maret 2009, kami mengadakan kontrak swap tingkat suku bunga dengan Bank of Tokyo MUFJ untuk jumlah senilai US$36,5 juta, yang akan menurun berdasarkan jadwal yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan kontrak, Perusahaan menyetujui untuk membayar bunga yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,1% pada setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 sebagai ganti pembayaran tingkat suku bunga enam bulan LIBOR untuk mata uang dolar AS ditambah 1,85% per tahun.

Pada tanggal 3 Maret 2009, kami mengadakan kontrak swap tingkat suku bunga dengan ING untuk jumlah senilai US$25,0 juta, yang akan menurun berdasarkan jadwal yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan kontrak, Perusahaan menyetujui untuk membayar bunga yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,0094% pada setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 sebagai ganti pembayaran tingkat suku bunga enam bulan LIBOR untuk mata uang dolar AS ditambah 1,85% per tahun.

Butir 12: **PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK EKUITAS**

Tidak berlaku

Bagian 2

Butir 13: CIDERA JANJI YANG BELUM DIBAYAR DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Menyusul terjadinya krisis keuangan Asia dan devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS pada akhir tahun 1997, Satelindo dinyatakan cidera janji akibat tidak memenuhi kewajiban hutangnya. Pada tahun 2000, Satelindo melakukan restrukturisasi kewajiban hutangnya pada tahun 2008. Sebelum dilakukannya restrukturisasi hutang, Satelindo mempunyai hutang pokok keseluruhan sebesar US$530,5 juta, dimana US$519,1 juta dari hutang tersebut telah direstrukturisasi. Per tanggal 31 Desember 2008, baik kami ataupun anak perusahaan kami tidak memiliki cidera janji yang bersifat material sehubungan dengan kewajiban yang masih terhutang.

Butir 14: PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL

Tidak ada.

Butir 15: PENGAWASAN DAN PROSEDUR

Pengawasan dan Prosedur Pengungkapan Informasi

Per tanggal 31 Desember 2008, atau Tanggal Evaluasi, manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, telah melakukan evaluasi terhadap efektifitas pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi, sebagaimana didefinisikan di dalam *Rules 13(a)-15(e)* dan *15(d)-15(e)* dari *Exchange Act*. Berdasarkan evaluasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada Tanggal Evaluasi, pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi Perusahaan telah dilakukan secara memadai untuk memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa informasi yang harus diungkapkan oleh Perusahaan di dalam laporan yang kami ajukan atau serahkan menurut ketentuan *Exchange Act* telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam aturan dan sesuai dengan format yang berlaku, dan bahwa informasi tersebut telah dikumpulkan dan diberitahukan kepada manajemen, termasuk kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memberikan waktu yang cukup untuk memberikan persetujuan atas pengungkapan tersebut.

Laporan Tahunan Manajemen tentang Pengendalian internal Atas Pelaporan Keuangan

Sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal *404* dari *Sarbanes-Oxley Act of 2002*, manajemen kami bertanggung jawab atas pembentukan dan pengadaan pengendalian internal yang memadai atas pelaporan keuangan, sebagaimana didefinisikan di dalam *Rule 13a-15(f)* dari *Exchange Act*. Sistem pengendalian internal Perusahaan atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan kepastian yang sewajarnya kepada manajemen dan

Komite Audit mengenai keandalan pelaporan keuangan Perusahaan dan penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di negara Amerika Serikat. Direksi Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Kerangka Pengendalian internal Terpadu/*Internal Control – Integrated Framework,* yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* atau COSO. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan meliputi kebijakan dan prosedur (1) mengenai pengadaan catatan yang memperlihatkan transaksi-transaksi dan pengaturan-pengaturan aset perusahaan secara terperinci, tepat dan wajar sebagaimana layaknya; (2) yang memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa transaksi-transaksi telah dicatat sebagaimana diperlukan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan agar penerimaan dan pengeluaran perusahaan yang telah dilakukan semata-mata sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi Perusahaan; dan (3) yang memberikan kepastian yang sewajarnya sehubungan dengan pencegahan atau pendeteksian pada waktunya terhadap akuisisi, penggunaan atau pelepasan tanpa ijin atas aset perusahaan yang akan sangat mempengaruhi laporan keuangan. Berdasarkan kriteria ini, manajemen kami menyimpulkan bahwa, pada tanggal 31 Desember 2008, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan telah berjalan secara efektif.

Semua sistem pengendalian internal, sebaik apapun rancangannya, mempunyai keterbatasan misalnya adanya kemungkinan kesalahan manusia/*human error* dan adanya tindakan menghindari atau melampaui pengawasan dan prosedur yang tidak dapat mencegah atau mendeteksi pernyataan yang salah. Selain itu, perkiraan-perkiraan dari setiap evaluasi tentang efektifitas untuk masa mendatang harus juga memperhatikan risiko bahwa pengawasan dapat menjadi tidak memadai karena adanya perubahan-perubahan keadaan.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota Ernst & Young Global, kantor akuntan publik terdaftar, telah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi kami yang dicantumkan dalam laporan tahunan ini dan telah mengeluarkan laporan penegasan atas pengendalian internal seputar laporan keuangan per 31 Desember 2008. Laporan penegasan ini terdapat dalam halaman F-3 laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir.

Perubahan-perubahan di dalam Pengendalian internal atas Pelaporan Keuangan

Tidak ada perubahan-perubahan di dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan selama periode yang dicakup dalam laporan tahunan ini yang dapat mempengaruhi, atau sewajarnya mungkin akan sangat mempengaruhi pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

Butir 16A: AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris telah menetapkan bahwa George Thia Peng Heok dan Kanaka Puradiredja yang telah diangkat sebagai Komite Audit pada tanggal 1 Januari 2009 adalah "ahli keuangan dari Komite Audit," sebagaimana didefinisikan di dalam Butir 16A dari Format 20-F, dan bahwa masing-masing dari mereka juga adalah "independen," sebagaimana didefinisikan di dalam *Rule 10A-3 dari Exchange Act*. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai George Thia Peng Heok, lihat "Butir 6. Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan—Direktur dan Manajemen Senior-Dewan Komisaris."

Butir 16B: KODE ETIK

Kami telah mengubah Kode Etik Perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan, termasuk *Chief Executive Officer, Chief Financial Officer* dan pejabat akuntan utama kami. Kami telah menempatkan Kode Etik ini di dalam situs kami di *www.indosat.com,* yang tersedia untuk umum.

Butir 16C: BIAYA DAN JASA AKUNTAN

Tabel berikut ini memuat rangkuman biaya jasa yang dibayar kepada Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota dari Ernst & Young Global dari Indonesia, auditor eksternal independen Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008:

	2007	2008
	(dalam US$)	
Biaya jasa audit (1)	2.132.600	1.963.307
Biaya yang terkait dengan audit (2)	1.557.200	953.962
Biaya jasa pajak (3)	-	-
Semua biaya lainnya (4)	-	-
Total Biaya	**3.689.800**	**2.917.269**

(1) Biaya jasa audit merupakan biaya jasa profesional audit keuangan terhadap laporan keuangan kami dan laporan keuangan anak perusahaan kami, PT Indosat Mega Media, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Starone Mitra Telekomunikasi dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dan audit pengendalian internal kami dan jasa *review atestasi* untuk memenuhi pasal 404 dari Sarbanes-Oxley Act of 2002.

(2) Biaya yang terkait dengan audit pada tahun 2007 dan 2008 terutama terdiri dari biaya untuk melaksanakan penelaahan terbatas triwulanan atas laporan keuangan konsolidasi kami, termasuk laporan keuangan anak perusahaan kami, dan untuk penerbitan obligasi pada tahun 2007 dan 2008.

(3) Biaya jasa pajak merupakan biaya jasa profesional yang terkait dengan kepatuhan terhadap pajak dan konsultasi perencanaan/nasihat tentang perpajakan.

(4) Semua biaya lainnya merupakan biaya jasa profesional untuk layanan-layanan yang tidak secara langsung mendukung audit laporan keuangan.

Layanan profesional ini terdapat dalam cakupan dari audit dan diijinkan layanan non-audit sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Komisi.

Pada Juni 2004, Komite Audit telah mengambil sebuah kebijakan yaitu seluruh jasa audit dan non-audit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Dalam keadaan apapun, auditor eksternal kami tidak dapat memberikan jasa yang dilarang berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act Of 2002* atau peraturan yang diterbitkan dibawahnya. Jasa audit yang tidak dilarang dapat diberikan kepada kami sesuai dengan proses persetujuan terlebih dahulu dan dengan memperhatikan larangan yang ada. Kebijakan mengenai persetujuan terlebih dahulu tersebut disyaratkan untuk semua layanan yang diberikan oleh auditor eksternal dan tidak termasuk persetujuan untuk biaya yang telah ditentukan sebelumnya, yang tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu atau pengecualian *de minimis.*

Butir 16D: PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN BURSA EFEK NEW YORK UNTUK KOMITE AUDIT

Sesuai dengan hukum Indonesia, Perusahaan mempunyai struktur dua tingkatan dewan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dijalankan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris secara prinsip bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi.

Menurut aturan Bursa Efek Indonesia, Komite Audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, satu di antaranya harus merupakan Komisaris Independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, sementara dua anggota lainnya merupakan pihak independen eksternal dimana satu di antaranya harus memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan. Komite Audit Perusahaan terdiri dari lima anggota dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Anggota Komite Audit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Aturan pencatatan baru yang diadopsi berdasarkan *Rule 10A-3 dari Exchange Act* mewajibkan perusahaan swasta asing yang efeknya dicatat di NYSE untuk mempunyai Komite Audit yang terdiri dari para direktur independen. Aturan ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2005. Menurut *Rule 10A-3-(c)(3),* perusahaan swasta asing dikecualikan dari persyaratan independensi apabila (i) pemerintah atau bursa dari negara asal mengharuskan perusahaan untuk mempunyai Komite Audit; (ii) Komite Audit terpisah dari Direksi atau mempunyai anggota baik dari dalam maupun luar Direksi; (iii) para anggota Komite Audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif manajemen dari perusahaan yang menjadi anggota Komite Audit; (iv) pemerintah atau bursa dari negara asal mensyaratkan bahwa Komite Audit bersifat independen dari manajemen perusahaan; dan (v) Komite Audit bertanggung jawab atas pengangkatan, pengikatan dan pengawasan kerja dari para auditor eksternal. Kami mengikuti ketentuan pengecualian umum berdasarkan *Rule 10A-3-(c)(3)* dari *Securities Exchange Act of 1934* sehubungan dengan komposisi Komite Audit kami sebagaimana dimaksud di dalam Bagian 303A.11 dari pengungkapan melalui situs kami, yang tersedia untuk umum pada situs **www.indosat.com.**

Kami yakin bahwa dengan mengikuti ketentuan pengecualian tersebut, hal ini tidak akan memberikan dampak yang material ataupun negatif bagi kemampuan Komite Audit untuk bertindak independen. Kami juga yakin bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk memastikan agar Komite Audit bebas dari pengaruh manajemen dan agar tersedianya suatu forum yang terpisah dari manajemen dimana para auditor dan para pihak yang berkepentingan dapat secara bebas membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Aturan Bursa Efek Indonesia mensyaratkan bahwa setiap anggota Komite Audit harus independen. Aturan ini juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya dua dari anggota Komite Audit merupakan anggota independen eksternal, yang berarti bahwa mereka harus independen tidak saja dari Direksi tetapi juga Dewan Komisaris dan Perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, kami yakin standar yang ditetapkan oleh aturan Bursa Efek Indonesia setidaknya sama efektifnya dengan ketentuan dari New York Stock Exchange dalam memastikan agar Komite Audit kami bertindak secara independen.

Butir 16E: PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai pembelian saham Seri B atau ADS kami oleh Qtel, sejak Juni 2008 sampai dengan Februari 2009:

Periode	(a) Total Jumlah Saham (atau Unit) yang dibeli	(b) Harga rata-rata yang dibayar per Saham (atau Unit)	(c) Total Jumlah Saham (atau Unit) Yang Dibeli sebagai bagian dari Rencana Pembelian yang Diumumkan Ke Masyarakat atau Program	(d) Jumlah Maksimum (atau Perkiraan Nilai Dalam Dolar) dari Saham atau Unit Yang Mungkin Akan Dibeli Berdasarkan Rencana atau Program
Bulan: Juni 2008 (1)				
ADS	0	N/A	N/A	N/A
Saham Biasa	2.217.590.0000	Rp 7.388	N/A	N/A
Bulan: Februari 2009 (2)				
ADS	10.010.572	US$31,0055	N/A	N/A
Saham Biasa	813.938.000	Rp 7.388	N/A	N/A

(1) Berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 6 Juni 2008 antara Qtel dan STT Communications Ltd., Qtel, melalui anak perusahaan yang seluruhnya dimilikinya, Qatar South East Asia Holdings S.P.C., telah membeli 100% kepemilikan dalam ICLS dan ICLM dengan nilai sebesar S$2.400.000.000, yang terdiri atas harga pembelian sebesar S$1.538.934.272 dan asumsi pembayaran sebesar S$861.065.728 dari ICLS dan ICLM kepada AMH dalam bentuk hutang pinjaman. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, kepemilikan utama dari saham ICLS dan ICLM dialihkan ke Qtel pada 6 Juni 2008 dan kepemilikan secara hukum dari saham ICLS dan ICLM dialihkan ke Qtel pada 22 Juni 2008. Hasil dari akuisisi saham ICLS dan ICLM adalah pengambilalihan tidak langsung oleh Qtel atas 2.217.590.000 saham biasa kami yang dimiliki oleh ICLS dan ICLM. Harga yang dibayarkan untuk pengambilalihan secara tidak langsung tersebut adalah Rp 7.388 per saham biasa.

(2) Pada 20 Januari 2009, Qtel, melalui anak perusahaan yang seluruhnya dimilikinya, ICLS, memulai proses penawaran tender di indonesia dan Amerika Serikat, atau Penawaran Tender, untuk membeli sampai dengan 1.314.466.775 saham biasa kami (termasuk saham biasa yang merupakan dasar ADS). Penawaran Tender ini berakhir pada 18 Februari 2009. Qtel menerima pembelian oleh ICLS sebanyak 813.938.000 saham biasa dan 10.010.572 ADS berdasarkan Penawaran Tender dan penyelesaian pembayaran untuk pembelian tersebut terjadi pada 5 Maret 2009. Harga pembelian yang dibayar dalam rangka Penawaran Tender adalah Rp 7.388 per saham biasa dan US$31,0055 per ADS (Dolar AS yang senilai dengan Rp369.400).

Butir 16F: PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT

Tidak ada perubahan atau perbedaan pendapat dengan akuntan terhadap segala hal yang menyangkut prinsip-prinsip akuntansi, praktik atau keterbukaan keuangan selama dua tahun buku terakhir.

Butir 16G: TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)

Perusahaan kami didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bursa perdagangan utama kami untuk saham biasa perusahaan adalah BEI. Saham biasa kami terdaftar di *United States Securities and Exchange Commission* dan tercatat di NYSE. Dengan demikian, Perusahaan kami tunduk pada ketentuan tata kelola perusahaan tertentu.

Ketentuan tata kelola perusahaan di negara kami terkandung terutama dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Peraturan Bapepam-LK dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh bursa efek Indonesia, yaitu BEI. Selain ketentuan peraturan ini, anggaran dasar Perusahaan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur praktek tata kelola perusahaan.

Namun demikian, banyak aturan tentang tata kelola perusahaan dari *NYSE Listed Company Manual* atau standar pencatatan NYSE, yang tidak diwajibkan untuk *foreign private issuer* dan kami diperbolehkan untuk mengikuti praktek tata kelola perusahaan dari negara asal kami sebagai pengganti sebagian besar standar tata kelola perusahaan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Meskipun kami secara sukarela telah mematuhi sebagian besar aturan tata kelola perusahaan menurut standar pencatatan NYSE, ada beberapa perbedaan antara standar tata kelola perusahaan kami dengan standar yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tercatat di NYSE yang akan dijelaskan di bawah ini.

Komite Audit

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki suatu Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota yang memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang dimaksud dalam *Section 303A.02*. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK, perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia wajib memiliki Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen dan dua anggota dari luar perusahaan. Komite Audit Perusahaan terdiri dari lima anggota, tiga di antaranya adalah Komisaris independen dan dua lainnya merupakan pihak luar yang independen, sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK.

Selain itu, menurut *charter* tertulis Komite Audit kami, Komite Audit tidak diharuskan untuk mempelajari pedoman pendapatan sebelum pengajuan untuk menjamin kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku sebagaimana diwajibkan menurut *Section 303A.07(c)(iii)(C),* meskipun *charter* tertulis ini mengharuskan Komite Audit untuk mempelajari setiap siaran pers yang memuat informasi keuangan. Tidak seperti ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE, Komite Audit Perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab langsung atas penunjukkan, retensi dan kompensasi untuk

auditor eksternal kami. Komite Audit Perusahaan kami hanya dapat memberikan rekomendasi auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, and keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari pemegang saham sebagaimana ditentukan oleh hukum Indonesia. Salinan dari *charter* tertulis Komite Audit kami dapat ditemui pada situs kami di **www.indosat.com.**

Susunan Direksi; Komite Pencalonan

Standar pencatatan NYSE mewajibkan agar direksi dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE terdiri dari sebagian besar direktur independen dan agar dibentuknya komite pencalonan. Perusahaan kami memiliki struktur dua dewan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, yang memisahkan kekuasaan manajemen (yang dijalankan oleh Direksi) dan kekuasaan pengawasan (yang dijalankan oleh Dewan Komisaris). Dengan demikian, apabila standar pencatatan NYSE menerapkan prinsip tata kelola perusahaan pada para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE, kami mengevaluasi praktek usaha kami dengan mengacu pada para Komisaris perusahaan. Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK dan aturan BEI, sepuluh anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota independen. Selain itu, kami tidak memiliki komite pencalonan. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham kami mencalonkan dan memilih orang-orang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Menurut standar pencatatan NYSE, para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE harus bertemu dalam sesi eksekutif yang terjadwal secara berkala tanpa manajemen. Sehubungan dengan hal ini, baik Peraturan Bapepam-LK ataupun aturan BEI tidak mewajibkan kami untuk mengadakan sesi eksekutif tersebut dimana Dewan Komisaris bertemu tanpa kehadiran Direktur. Dahulu, semua anggota Dewan Komisaris perusahaan kami yang merupakan orang-orang non-manajemen, bertemu dalam sesi eksekutif secara berkala, selain dari pertemuan untuk menyampaikan informasi yang biasa dilakukan oleh Direksi kami kepada Dewan Komisaris. Pada awal tahun 2005, kami memberlakukan prosedur dimana Dewan Komisaris perusahaan kami mengadakan pertemuan sesi eksekutif pada akhir dari setiap rapat terjadwal secara berkala, yang saat ini dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.

Komite Remunerasi

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki komite remunerasi yang seluruh anggotanya terdiri dari Direktur yang independen dengan *charter* tertulis yang mengatur kinerja dan tanggung jawab komite dan juga mewajibkan dilakukannya evaluasi kinerja tahunan. Komite Remunerasi kami terdiri dari tiga anggota Dewan Komisaris dan mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Akan tetapi, hanya satu komisaris dari tiga anggota komite yang merupakan komisaris independen dan *charter* tertulisnya tidak mengatur evaluasi kinerja tahunan Komite Remunerasi. Salinan dari peraturan Komite Remunerasi kami dapat ditemui dalam situs kami di **www.indosat.com.**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Independen

Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Termasuk Pengungkapan Tambahan US-GAAP)

PT Indosat Tbk

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
BESERTA LAPORAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR INDEPENDEN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Independen	
Neraca Konsolidasi……	1 - 4
Laporan Laba Rugi Konsolidasi……	5 - 6
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi……	7
Laporan Arus Kas Konsolidasi……	8 - 9
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi……	10 - 123

****

ERNST & YOUNG

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

Laporan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Independen

Laporan No. RPC-9846

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indosat Tbk

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Indosat Tbk ("Perusahaan") dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk setiap tahun dari periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan *Public Company Accounting Oversight Board* (Amerika Serikat). Standar-standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Indosat Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, dan hasil usaha serta arus kas konsolidasi untuk setiap tahun dari periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang berbeda untuk beberapa aspek tertentu dari prinsip akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat (Catatan 38, 39 dan 40 atas laporan keuangan konsolidasi).

Kami juga telah mengaudit berdasarkan standar dari *Public Company Accounting Oversight Board* (Amerika Serikat) pengendalian internal atas pelaporan keuangan PT Indosat dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengenai *Internal Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* dan laporan kami bertanggal 18 Maret 2009 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk hal tersebut.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Jakarta, Indonesia

18 Maret 2009

ERNST & YOUNG

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

Laporan Kantor Akuntan Publik Terdaftar Independen

Laporan No. RPC-9847

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indosat Tbk

Kami telah mengaudit pengendalian internal atas pelaporan keuangan PT Indosat Tbk ("Perusahaan") dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2008, berdasarkan kriteria mengenai *Internal Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (kriteria COSO). Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas pemeliharaan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan penilaian atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang termasuk di dalam Laporan Tahunan Manajemen atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan PT Indosat Tbk dan anak perusahaan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan *Public Company Accounting Oversight Board* (Amerika Serikat). Standar-standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dipelihara untuk semua hal yang material. Audit kami meliputi perolehan pemahaman atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, menelaah risiko adanya kelemahan material, pengujian dan evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian internal berdasarkan risiko yang ditelaah dan pelaksanaan prosedur lainnya yang kami anggap perlu dalam situasi tertentu. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Suatu pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan adalah sebuah proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai sehubungan dengan keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan bagi pihak luar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Suatu pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan mencakup kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang (1) berhubungan dengan penyimpanan catatan-catatan yang, cukup rinci, secara akurat dan wajar mencerminkan transaksi-transaksi dan penjualan/penghentian pemakaian aktiva Perusahaan; (2) memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi-transaksi dicatat sebagaimana mestinya yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan penerimaan dan pengeluaran perusahaan hanya dibuat berdasarkan otorisasi manajemen dan direksi perusahaan; dan (3) memberikan keyakinan memadai sehubungan dengan pencegahan atau deteksi berkala atas perolehan, penggunaan atau penjualan/penghentian pemakaian aktiva Perusahaan yang tidak terotorisasi yang berdampak material terhadap laporan keuangan.

Karena keterbatasan bawaan, pengendalian internal atas pelaporan keuangan mungkin tidak dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Disamping itu, proyeksi atas evaluasi efektivitas di masa mendatang mengandung risiko di mana pengendalian tersebut mungkin menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi atau tingkat kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur mungkin menjadi berkurang.

ERNST & YOUNG

Menurut pendapat kami, PT Indosat Tbk dan anak perusahaan memelihara, dalam semua hal yang material, pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara efektif pada tanggal 31 Desember 2008, berdasarkan kriteria COSO.

Kami juga telah mengaudit berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan *Public Company Accounting Oversight Board* (Amerika Serikat), posisi keuangan konsolidasi PT Indosat Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 serta laporan hasil usaha konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi serta laporan perubahan ekuitas konsolidasi untuk setiap tahun dari periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang dalam laporan kami bertanggal 18 Maret 2009 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk hal tersebut.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Jakarta, Indonesia

18 Maret 2009

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 Desember 2008 dan 2007
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2008	2007
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,3,24	5.737.866	8.053.006
Investasi jangka pendek - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sejumlah Rp25.395 pada tahun 2008 dan 2007	2d	-	1.250
Piutang	2e		
Usaha	4,14		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah Rp69.444 pada tahun 2008 dan Rp88.342 pada tahun 2007	24	76.078	133.345
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah Rp426.719 pada tahun 2008 dan Rp326.142 pada tahun 2007		1.264.628	897.623
Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah Rp18.867 pada tahun 2008 dan Rp17.240 pada tahun 2007		16.914	20.901
Persediaan	2f	241.991	161.573
Aktiva derivatif	2r,27	656.594	127.717
Uang muka		39.151	38.017
Pajak dibayar di muka	5,12	592.880	714.322
Biaya dibayar di muka	2g,2q,23,24	987.073	618.893
Aktiva lancar lainnya	2c,24	46.598	27.480
Jumlah Aktiva Lancar		9.659.773	10.794.127

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2008 dan 2007
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2008	2007
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Piutang hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah Rp2.419 pada tahun 2008 dan Rp2.257 pada tahun 2007	2e,24	42.496	56.455
Aktiva pajak tangguhan - bersih	2t,12	68.445	87.118
Investasi pada perusahaan asosiasi - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sejumlah Rp56.586 pada tahun 2008 dan Rp56.300 pada tahun 2007	2h,6	700	286
Investasi jangka panjang lainnya - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sejumlah Rp99.977 pada tahun 2008 dan 2007	2h,7	2.730	2.730
Aktiva tetap	2i,2j,2p, 8,14,20		
Nilai perolehan		63.478.411	51.164.867
Akumulasi penyusutan		(24.985.727)	(20.493.483)
Penurunan nilai		(98.611)	(98.611)
Bersih		38.394.073	30.572.773
Goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya - bersih	2l,9	2.064.681	2.350.467
Piutang jangka panjang		81.524	77.515
Pensiun dibayar di muka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2q,23,24	169.986	198.360
Uang muka jangka panjang	10,24	456.093	646.997
Lain-lain	2c,2g,24	752.822	518.258
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		42.033.550	34.510.959
JUMLAH AKTIVA		**51.693.323**	**45.305.086**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2008 dan 2007
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2008	2007
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang usaha			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	24	12.109	40.488
Pihak ketiga		596.645	405.962
Hutang pengadaan	11,24	6.446.357	6.206.649
Hutang pajak	2t,12	268.891	436.450
Biaya masih harus dibayar	2q,13,23,24	1.512.533	1.340.435
Pendapatan diterima di muka	2o	822.986	709.827
Uang muka pelanggan		32.121	40.947
Kewajiban derivatif	2r,27	315.866	64.310
Bagian jangka pendek dari:			
Hutang jangka panjang	2m,14	572.469	494.387
Hutang obligasi	2m,15	56.442	1.860.000
Kewajiban lancar lainnya	24	38.826	59.126
Jumlah Kewajiban Lancar		10.675.245	11.658.581
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang hubungan istimewa	24	14.699	64.850
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2t,12	1.305.185	1.482.221
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2m,2r,14		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	24	1.596.142	1.794.909
Pihak ketiga		9.216.018	2.454.124
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2m,15	10.315.616	10.088.741
Kewajiban tidak lancar lainnya	2q,16,23,24	871.859	919.560
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		23.319.519	16.804.405
JUMLAH KEWAJIBAN		**33.994.764**	**28.462.986**
HAK MINORITAS	2b	**288.938**	**297.370**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2008 dan 2007
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2008	2007
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 setiap saham Seri A dan Seri B			
Modal dasar - 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B	17	543.393	543.393
Agio saham	17	1.546.587	1.546.587
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi/anak perusahaan	2h	404.104	403.812
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b	13.291	6.177
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya		100.678	80.258
Belum ditentukan penggunaannya		14.801.568	13.964.503
JUMLAH EKUITAS		**17.409.621**	**16.544.730**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**51.693.323**	**45.305.086**

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2008	2007	2006
PENDAPATAN USAHA	2o,18,24, 29,30,31			
Selular		14.178.922	12.752.496	9.227.537
Multimedia, Komunikasi Data, Internet ("MIDI")		2.735.495	2.168.584	1.902.589
Telekomunikasi tetap		1.744.716	1.567.415	1.109.281
Jumlah Pendapatan Usaha		**18.659.133**	**16.488.495**	**12.239.407**
BEBAN USAHA	2o			
Beban jasa telekomunikasi	19,24	6.043.414	4.779.883	2.704.173
Penyusutan dan amortisasi	2i,2l,8,9	4.587.891	4.195.202	3.653.266
Karyawan	2n,2p,2q, 20,23,24	1.638.993	1.594.786	1.350.468
Pemasaran		918.124	692.896	468.920
Administrasi dan umum	21,24	737.432	706.124	663.921
Jumlah Beban Usaha		**13.925.854**	**11.968.891**	**8.840.748**
LABA USAHA		**4.733.279**	**4.519.604**	**3.398.659**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2o			
Pendapatan bunga	24	460.089	232.411	212.823
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - bersih	2r,27	136.603	68.023	(438.774)
Beban pendanaan	2m,14,15, 22,24	(1.858.294)	(1.428.604)	(1.248.899)
Laba (rugi) kurs - bersih	2r,2s,4	(885.729)	(155.315)	304.401
Amortisasi goodwill	2l,9	(227.317)	(226.507)	(226.507)
Lain-lain - bersih	12	(33.516)	(79.996)	21.202
Beban Lain-lain - Bersih		**(2.408.164)**	**(1.589.988)**	**(1.375.754)**
BAGIAN BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI	2h,6	**-**	**-**	**(238)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**2.325.115**	**2.929.616**	**2.022.667**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2t,12			
Tahun berjalan		(579.723)	(660.675)	(199.629)
Tangguhan		159.893	(198.842)	(376.478)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		**(419.830)**	**(859.517)**	**(576.107)**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2008	2007	2006
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN		1.905.285	2.070.099	1.446.560
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2b	(26.763)	(28.056)	(36.467)
LABA BERSIH		**1.878.522**	**2.042.043**	**1.410.093**
LABA PER SAHAM DASAR	2v,17,25	**345,70**	**375,79**	**260,90**
LABA PER SAHAM DILUSIAN	2v,17,25	**345,70**	**375,79**	**258,82**
LABA PER ADS DASAR (50 lembar saham Seri B per ADS)	2v,17,25	**17.285,10**	**18.789,73**	**13.045,17**
LABA PER ADS DILUSIAN	2v,17,25	**17.285,10**	**18.789,73**	**12.940,98**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

Uraian	Catatan	Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi/Anak Perusahaan	Opsi Saham	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Laba		Bersih
							Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2006		**535.617**	**1.178.274**	**403.812**	**90.763**	**228**	**49.922**	**12.056.712**	**14.315.328**
Program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP):									
Penerbitan modal saham ditempatkan yang berasal dari pelaksanaan ESOP Tahap II	2n,17	7.776	368.313	-	(90.763)	-	-	-	285.326
Penurunan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. dari euro, serta Indosat Singapore Pte. Ltd. dan Satelindo International Finance B.V. dari dolar A.S. ke rupiah - setelah ditambah (dikurangi) manfaat (beban) pajak penghasilan terkait masing-masing sebesar (Rp136), (Rp135), Rp17 dan Rp272	2b	-	-	-	-	(46)	-	-	(46)
Keputusan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada tanggal 29 Juni 2006									
Deklarasi dividen kas	26	-	-	-	-	-	-	(808.956)	(808.956)
Pembentukan dana cadangan	26	-	-	-	-	-	16.235	(16.235)	-
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	1.410.093	1.410.093
Saldo pada tanggal 31 Desember 2006		**543.393**	**1.546.587**	**403.812**	**-**	**182**	**66.157**	**12.641.614**	**15.201.745**
Kenaikan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. dari euro dan Indosat Singapore Pte. Ltd. dari dolar A.S. ke rupiah - setelah dikurangi beban pajak penghasilan terkait masing-masing sebesar Rp1.272, Rp1.250 dan Rp48	2b	-	-	-	-	5.995	-	-	5.995
Keputusan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2007									
Deklarasi dividen kas	26	-	-	-	-	-	-	(705.053)	(705.053)
Pembentukan dana cadangan	26	-	-	-	-	-	14.101	(14.101)	-
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	2.042.043	2.042.043
Saldo pada tanggal 31 Desember 2007		**543.393**	**1.546.587**	**403.812**	**-**	**6.177**	**80.258**	**13.964.503**	**16.544.730**
Kenaikan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. dari euro dan Indosat Singapore Pte. Ltd. dari dolar A.S. ke rupiah - setelah dikurangi beban pajak penghasilan terkait masing-masing sebesar Rp1.056, Rp1.021 dan Rp592	2b	-	-	-	-	6.228	-	-	6.228
Kenaikan selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi/ anak perusahaan dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang berasal dari penurunan tarif pajak	2h,12	-	-	292	-	886	-	-	1.178
Keputusan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2008									
Deklarasi dividen kas	26	-	-	-	-	-	-	(1.021.037)	(1.021.037)
Pembentukan dana cadangan	26	-	-	-	-	-	20.420	(20.420)	-
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	1.878.522	1.878.522
Saldo pada tanggal 31 Desember 2008		**543.393**	**1.546.587**	**404.104**	**-**	**13.291**	**100.678**	**14.801.568**	**17.409.621**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

	Catatan	2008	2007	2006
ARUS KAS DARI KEGIATAN USAHA				
Penerimaan kas dari:				
Pelanggan		18.336.914	16.678.536	12.177.148
Pendapatan bunga		460.020	225.635	217.152
Penerimaan tagihan pajak	5	271.321	195.441	86.981
Penyelesaian kontrak derivatif	27a	58.375	-	-
Terminasi kontrak swap	27q,27w,27x	-	3.702	-
Penerimaan dari kontrak swap suku bunga	27x-27aa	-	1.386	5.250
Pengeluaran kas untuk:				
Karyawan, pemasok dan lainnya		(9.700.867)	(6.975.765)	(5.081.152)
Beban pendanaan		(1.776.934)	(1.367.791)	(1.237.161)
Pajak		(897.161)	(370.179)	(391.881)
Beban swap dari kontrak swap valuta asing	27a,27c-27p	(235.971)	(117.036)	(103.216)
Pembayaran kontrak swap suku bunga	27x-27aa	(2.432)	-	-
Terminasi Kontrak Swap	27q,27w,27x	-	-	(3.498)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Kegiatan Usaha		**6.513.265**	**8.273.929**	**5.669.623**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI				
Penerimaan pendapatan dividen	7	26.348	40.105	-
Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek		1.250	-	47.587
Penerimaan dari penjualan aktiva tetap	8	1.131	478	1.249
Perolehan aktiva tetap	8	(10.307.932)	(6.933.646)	(6.054.014)
Perolehan aktiva tak berwujud	9	(6.952)	(10.532)	(320.000)
Penambahan investasi pada perusahaan asosiasi	6	(700)	-	-
Setoran modal pemegang saham minoritas pada sebuah anak perusahaan		-	47.685	-
Penambahan uang muka untuk pembelian aktiva tetap		-	(433.226)	-
Penambahan investasi jangka pendek		-	(1.250)	-
Penambahan investasi jangka panjang lainnya	1d	-	-	(5.779)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi		**(10.286.855)**	**(7.290.386)**	**(6.330.957)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN				
Penerimaan dari hutang jangka panjang	14	5.126.570	4.450.924	357.366
Penerimaan dari hutang obligasi	15	1.650.000	3.000.000	31.150
Penyelesaian kontrak derivatif	27b	109.099	-	-
Penurunan (kenaikan) kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya		4.200	(5.400)	(1.685)
Pembayaran hutang obligasi	15	(3.828.827)	(1.050.000)	(956.644)
Pembayaran dividen kas	25	(1.021.037)	(705.053)	(808.956)
Pembayaran hutang jangka panjang	14	(506.220)	(1.377.742)	(84.394)
Beban swap dari kontrak swap valuta asing	27b	(64.009)	(61.572)	(61.885)
Pembayaran dividen kas anak perusahaan ke pemegang saham minoritas		(11.326)	(14.207)	(11.537)
Penerimaan dari pelaksanaan ESOP Tahap I dan Tahap II		-	-	287.910
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan		**1.458.450**	**4.236.950**	**(1.248.675)**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (lanjutan)
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

	Catatan	2008	2007	2006
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(2.315.140)**	**5.220.493**	**(1.910.009)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		8.053.006	2.807.260	4.717.269
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS ANAK PERUSAHAAN BARU	1d	**-**	25.253	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	**5.737.866**	**8.053.006**	**2.807.260**
RINCIAN KAS DAN SETARA KAS:				
Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang		5.469.039	7.802.448	2.566.854
Kas dan bank		268.827	250.558	240.406
Kas dan setara kas yang disajikan pada neraca konsolidasi		**5.737.866**	**8.053.006**	**2.807.260**
INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS:				
Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas:				
Perolehan aktiva tetap yang dikreditkan ke:				
Hutang jangka panjang		1.516.354	-	-
Hutang pengadaan		274.248	2.515.646	753.734
Uang muka jangka panjang		190.906	-	113.580
Kewajiban tidak lancar lainnya		45.511	266.573	-
Agio saham		-	-	88.179
Opsi saham		-	-	(90.763)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Indosat Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan akta notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H. No. 55 tanggal 10 November 1967 di Negara Republik Indonesia. Akta pendirian ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24. Pada tahun 1980, Perusahaan dijual oleh American Cable and Radio Corporation, anak perusahaan dari International Telephone & Telegraph, kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (Persero).

Pada tanggal 7 Februari 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Surat No. 14/V/PMA/2003 atas perubahan status dari Badan Usaha Milik Negara (Persero) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan perubahan status hukum tersebut.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 109 tanggal 14 Juli 2008 dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memperkuat tata kelola perusahaan ("*good corporate governance*") yang baik di dalam lingkungan Perusahaan dan untuk semua mendukung kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan ini telah dilaporkan ke dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48398.AH.01.02 tanggal 6 Agustus 2008.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bertujuan untuk menyelenggarakan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah ini:

- Menjalankan kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika
- Menjalankan kegiatan perencanaan, pembangunan sarana dan pengadaan fasilitas telekomunikasi serta usaha informatika termasuk pengadaan sumber daya yang mendukung
- Menjalankan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika yang diselenggarakan Perusahaan), melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi serta usaha informatika dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan (baik di dalam maupun di luar negeri)
- Menjalankan pelayanan yang berhubungan dengan pengembangan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika.

Perusahaan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1969.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1991, Perusahaan telah ditegaskan kembali sebagai Badan Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional di bawah otorisasi Pemerintah.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 36 mengenai Telekomunikasi ("Undang-undang Telekomunikasi") yang berlaku efektif mulai tanggal 8 September 2000. Berdasarkan Undang-undang tersebut, penyelenggaraan jasa telekomunikasi meliputi:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
- Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan penyelenggara telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Undang-undang Telekomunikasi melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diharapkan menjadi pembuka jalan bagi liberalisasi pasar.

Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi tersebut, status Perusahaan sebagai Badan Penyelenggara tidak berlaku lagi dan Perusahaan harus memperoleh izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tertentu.

Pada tanggal 14 Agustus 2000, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Perhubungan ("Menhub"), memberi izin prinsip kepada Perusahaan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi *Digital Communication System* ("DCS") 1800 nasional sebagai kompensasi atas terminasi dini, efektif tanggal 1 Agustus 2003, hak eksklusif jasa telekomunikasi internasional Perusahaan yang diberikan sebelum izin tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2001, Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan dari Menhub. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KP.247 tanggal 6 November 2001, izin penyelenggaraan tersebut dialihkan kepada anak perusahaannya, PT Indosat Multi Media Mobile (lihat "e" di bawah).

Pada tanggal 7 September 2000, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menhub, memberikan izin prinsip kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan telepon lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri sebagai kompensasi atas terminasi hak eksklusif jasa telekomunikasi internasional Perusahaan. Di lain pihak, Telkom telah diberikan izin prinsip untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional sebagai kompensasi atas terminasi dini hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri.

Berdasarkan surat Menhub tanggal 1 Agustus 2002, Perusahaan diberikan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap lokal dengan wilayah operasi Jakarta dan Surabaya. Izin penyelenggaraan ini diperbaharui menjadi izin nasional pada tanggal 17 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KP.130 Tahun 2003. Nilai izin yang diberikan kepada Telkom dan Perusahaan atas terminasi hak eksklusif mereka, masing-masing atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal/domestik dan internasional telah ditentukan oleh penilai independen.

Dalam Pengumuman Departemen Perhubungan Republik Indonesia No. PM.2 Tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp178.000 setelah pajak sebagai akibat dari terminasi dini hak eksklusif tersebut. Selanjutnya, pembayaran atas kewajiban Perusahaan sebagai akibat dari terminasi dini tersebut akan diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Hal ini sejalan dengan pasal IX *Shares Purchase Agreement* tanggal 15 Desember 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Indonesia Communications Limited ("ICL"), yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk mengambil alih dan menjamin ICL bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan membayar atas nama Perusahaan segala kewajiban, jumlah atau tagihan yang harus dibayar atau ditanggung oleh Perusahaan sehubungan dengan terminasi hak eksklusif tersebut di atas.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah beberapa izin penyelenggaraan yang dimiliki Perusahaan:

No. Izin	Tanggal Penerbitan Izin	Pemberi Izin	Periode Izin	Keterangan
KP.68/Thn 2004	15 Maret 2004	Menhub	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular (termasuk jasa teleponi dasar), yang telah digantikan oleh lisensi No.102/KEP/M.KOMINFO/10/ 2006
KP.69/Thn 2004	15 Maret 2004	Menhub	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup (VSAT, frame relay, dan lainnya)
KP.203/Thn 2004	21 Mei 2004	Menhub	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan jaringan tetap dan jasa teleponi dasar yang meliputi jasa telepon lokal, sambungan langsung jarak jauh nasional dan sambungan internasional
19/KEP/M.KOMINFO/02/2006 dan 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006	14 Februari 2006 dan 27 Maret 2006	Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo")	10 tahun	Penetapan sebagai pemenang dan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz (dikenal sebagai "3G") untuk 1 blok (2 x 5 Mhz) frekuensi (*)
102/KEP/M.KOMINFO/10/2006	11 Oktober 2006	Menkominfo	Dievaluasi setiap 1 tahun	Amandemen atas izin penyelenggaraan No. KP.68/Thn 2004 tanggal 15 Maret 2004 untuk mencakup hak dan kewajiban yang timbul dari layanan 3G
181/KEP/M.KOMINFO/12/2006	12 Desember 2006	Menkominfo	-	Pengalokasian dua kanal frekuensi skala nasional, yaitu kanal 589 dan 630 pada pita frekuensi 800 Mhz untuk Layanan Jaringan Tetap Lokal Nirkabel dengan Mobilitas Terbatas
162/KEP/M.KOMINFO/05/2007	2 Mei 2007	Menkominfo	-	Izin penggunaan sementara kanal 548 untuk Layanan Jaringan Tetap Lokal Nirkabel dengan Mobilitas Terbatas sampai dengan bulan Desember 2007 dengan kewajiban membayar biaya hak penggunaan pita frekuensi radio selama satu tahun (**)
01/DIRJEN/2008	7 Januari 2008	Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT")	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan layanan internet
51/DIRJEN/2008	9 Januari 2008	DJPT	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan layanan interkoneksi internet (*Network Access Point*/NAP), untuk menggantikan izin sebelumnya yang diberikan kepada Satelindo
52/DIRJEN/2008	9 Januari 2008	DJPT	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan layanan internet teleponi untuk menggantikan izin penyelenggaraan *Voice Over Internet Protocol* ("VoIP") No.823/DIRJEN/2002 dengan cakupan nasional yang telah habis masa berlakunya di 2007

(*) Sebagai salah satu pemenang dalam seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000, Perusahaan berkewajiban, antara lain, melakukan pembayaran biaya nilai awal sebesar Rp320.000 (Catatan 2l) dan biaya hak penggunaan pita frekuensi radio.

(**) Perusahaan telah membatalkan rencananya menggunakan kanal 548 karena masalah teknis selama proses migrasi. Perusahaan telah memberitahukan hal tersebut kepada DJPT melalui suratnya No. 1114/I00-ICO/REL/07 tanggal 27 Desember 2007.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 9 Januari 2008, berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 10/14/DASP, Perusahaan mendapat persetujuan untuk mengeluarkan kartu prabayar *"Indosat m-wallet"* yang berfungsi sebagai alat pembayaran baru. Perusahaan juga ditunjuk sebagai *"Special Principal"* dan *"Technical Acquirer"* untuk kartu prabayar tersebut.

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo mengeluarkan Keputusan Menteri No. 02/PER/M.KOMINFO/2008 mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Berdasarkan keputusan tersebut, pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah untuk menentukan penempatan dari menara dan lokasi dimana menara bisa dibangun. Selanjutnya, sebuah penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi diwajibkan untuk mengijinkan penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasinya tanpa diskriminasi. Keputusan ini juga mengharuskan setiap kontraktor, penyedia dan pemilik menara adalah perusahaan yang 100% dimiliki oleh lokal.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta dan memiliki 8 kantor regional yang terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan dan Makassar.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Semua saham Seri B Perusahaan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (entitas baru setelah penggabungan usaha antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada bulan November 2007) sejak tahun 1994. *American Depositary Shares* Perusahaan yang diterbitkan (setiap ADS mewakili 50 saham Seri B) mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York sejak tahun 1994.

Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi-obligasi Perusahaan yang diterbitkan ke publik adalah sebagai berikut:

Obligasi	Tanggal Efektif	Didaftarkan dan Diperdagangkan di
1. Obligasi Indosat Kedua Seri B Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap	6 November 2002	Bursa Efek Indonesia
2. Obligasi Indosat Ketiga Seri B Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap	15 Oktober 2003	Bursa Efek Indonesia
3. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010	5 November 2003	*Luxembourg Stock Exchange* dan *Singapore Exchange Securities Trading Limited*
4. Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap	21 Juni 2005	Bursa Efek Indonesia
5. Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat Tahun 2005	21 Juni 2005	Bursa Efek Indonesia
6. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012	22 Juni 2005	*Singapore Exchange Securities Trading Limited*
7. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap	29 Mei 2007	Bursa Efek Indonesia
8. Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	29 Mei 2007	Bursa Efek Indonesia
9. Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap	9 April 2008	Bursa Efek Indonesia
10. Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	9 April 2008	Bursa Efek Indonesia

1. UMUM (lanjutan)

c. Karyawan, Direktur, Komisaris dan Komite Audit

Berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 5 Juni 2008, 5 Juni 2007 dan 29 Juni 2006 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 29, No. 11 dan No. 175 oleh Aulia Taufani, S.H. (sebagai notaris pengganti Sutjipto, S.H.) pada tanggal yang sama, dan resolusi Rapat Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Agustus 2008 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 343 oleh Aulia Taufani, S.H. pada tanggal yang sama, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, masing-masing adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Komisaris Utama	H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani	Peter Seah Lim Huat	Peter Seah Lim Huat
Komisaris	Dr. Nasser Mohd. A. Marafih	Sio Tat Hiang	Sio Tat Hiang
Komisaris	Rachmad Gobel	Sum Soon Lim	Sum Soon Lim
Komisaris	Sheikh Mohammed Bin Suhaim Hamad Al-Thani	Sheikh Mohammed Bin Suhaim Hamad Al-Thani	-
Komisaris	Jarman	Lee Theng Kiat	Lee Theng Kiat
Komisaris	Rionald Silaban	Roes Aryawijaya	Roes Aryawijaya
Komisaris	Setyanto P. Santosa *	Setyanto P. Santosa	Setyanto P. Santosa
Komisaris	Michael Francis Latimer *	Lim Ah Doo *	Lim Ah Doo *
Komisaris	Thia Peng Heok George *	Setio Anggoro Dewo *	Farida Eva Riyanti Hutapea *
Komisaris	Soeprapto S. IP *	Soeprapto S. IP *	Soeprapto S. IP *

* Komisaris independen

	2008 dan 2007	2006
Direktur Utama	Johnny Swandi Sjam	- ** dan ***
Wakil Direktur Utama	Kaizad Bomi Heerjee	Kaizad Bomi Heerjee
Direktur Keuangan	Wong Heang Tuck	Wong Heang Tuck
Direktur *Corporate Service*	Wahyu Wijayadi	S. Wimbo S. Hardjito
Direktur Teknologi Informasi	Roy Kannan	Joseph Chan Lam Seng
Direktur Jabotabek dan Penjualan Korporat	Fadzri Sentosa	Johnny Swandi Sjam
Direktur Penjualan Regional	Syakieb A. Sungkar	Wityasmoro Sih Handayanto
Direktur Pemasaran	Guntur S. Siboro	Wahyu Wijayadi
Direktur Jaringan	Raymond Tan Kim Meng	Raymond Tan Kim Meng

** Pada tanggal 16 Juni 2006, Dewan Komisaris telah menyetujui pengunduran diri Hasnul Suhaimi sebagai Direktur Utama, efektif tanggal 8 Juni 2006.
*** Selama tidak adanya Direktur Utama, tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh Wakil Direktur Utama.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Ketua	Thia Peng Heok George	Lim Ah Doo	Lim Ah Doo
Anggota	Michael Francis Latimer	Setio Anggoro Dewo	Farida Eva Riyanti Hutapea
Anggota	Soeprapto S. IP	Soeprapto S. IP	Soeprapto S. IP
Anggota	Unggul Saut Marupa Tampubolon	Achmad Rivai	Achmad Rivai
Anggota	Rusdy Daryono	Achmad Fuad Lubis	Achmad Fuad Lubis

Perusahaan dan anak perusahaan (secara bersama-sama disebut "Perusahaan") mempunyai sekitar 7.700, 7.645 dan 7.786 karyawan, termasuk pekerja harian lepas, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur Anak Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perusahaan mempunyai pemilikan langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan berikut:

Anak Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha	Mulai Beroperasi	Persentase Pemilikan (%)		
				2008	2007	2006
Indosat Finance Company B.V.("IFB") [1]	Amsterdam	Keuangan	2003	100,00	100,00	100,00
Indosat International Finance Company B.V. ("IIFB") [2]	Amsterdam	Keuangan	2005	100,00	100,00	100,00
Indosat Singapore Pte. Ltd. ("ISP")	Singapura	Telekomunikasi	2005	100,00	100,00	100,00
PT Indosat Mega Media ("IMM")	Jakarta	Multimedia	2001	99,85	99,85	99,85
PT Satelindo Multi Media ("SMM")[3]	Jakarta	Multimedia	1999	99,60	99,60	99,60
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta") [4]	Jakarta	Komunikasi Data	1989	72,36	72,36	72,36
PT Starone Mitra Telekomunikasi ("SMT")	Semarang	Telekomunikasi	2006	72,54	55,36	14,60
PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("APE")	Jakarta	Telekomunikasi	2000	39,80	39,80	39,80
Satelindo International Finance B.V. ("SIB") [5]	Amsterdam	Keuangan	1996	-	-	100,00

Anak Perusahaan	Jumlah Aktiva (Sebelum Eliminasi)		
	2008	2007	2006
IFB [1]	2.637.074	2.882.340	2.762.776
IIFB [2]	1.235.816	2.382.722	2.283.380
ISP	21.167	10.249	7.300
IMM	741.086	753.797	605.538
SMM [3]	10.690	10.690	10.690
Lintasarta [4]	1.338.710	1.075.467	985.605
SMT	147.864	176.444	36.460
APE	133.241	104.487	94.311
SIB [5]	-	-	7.555

[1] Berdasarkan keputusan pemegang saham IFB tanggal 6 November 2008, IFB memutuskan untuk melakukan pengembalian setoran modal sejumlah EUR99.996 (dalam jumlah penuh). Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima pengembalian modal tersebut.

[2] Berdasarkan keputusan pemegang saham IIFB tanggal 6 November 2008, IIFB memutuskan untuk melakukan pengembalian setoran modal sejumlah EUR1.124.064 (dalam jumlah penuh). Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima pengembalian modal tersebut.

[3] Berdasarkan keputusan dari pemegang saham SMM, SMM akan dilikuidasi efektif per tanggal 5 Mei 2006. Pada tanggal 31 Desember 2008, proses likuidasi tersebut masih belum difinalisasikan.

[4] Mengacu pada Catatan 15 tentang konversi atas Obligasi Konversi Lintasarta pada bulan Juni 2007.

[5] Dilikuidasi pada bulan Januari 2007

SMT didirikan pada tanggal 15 Juni 2006 di Semarang, Jawa Tengah, oleh Perusahaan, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT Dawamiba Engineering dan PT Trikomsel Multimedia untuk melakukan pembangunan dan penyediaan jasa telepon jaringan tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi *Code Division Multiple Access* (CDMA) 2000-1x untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar SMT tanggal 23 Agustus 2006, pada bulan Agustus 2006 Perusahaan melakukan penyetoran kas sebesar Rp5.779 sebagai bagian dari penyetoran modal ke SMT. SMT mulai melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Januari 2007.

Selanjutnya, berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar SMT tanggal 24 April 2007, pada bulan Mei 2007, Perusahaan melakukan penambahan setoran modal kas sebesar Rp49.728 dan kontribusi *in-kind* dalam bentuk peralatan telekomunikasi senilai Rp45.523. Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Perusahaan mempunyai kepemilikan sebesar 51,00% di SMT. Namun, salah satu pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan penambahan setoran modal seperti yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kepemilikan Perusahaan di SMT meningkat menjadi 55,36%. Peningkatan persentase kepemilikan ini telah disetujui para pemegang saham SMT berdasarkan risalah rapat pemegang saham tanggal 30 Juli 2007.

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur Anak Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 27 November 2008, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah ("SPJT") untuk membeli 17,18% kepemilikan SPJT di SMT dengan harga Rp33.680. Pembelian tersebut, yang menimbulkan pengakuan goodwill sebesar Rp9.724 (Catatan 9), meningkatkan kepemilikan Perusahaan di SMT dari 55,36% menjadi 72,54%. Pada tanggal 3 Desember 2008, Perusahaan telah membayar penuh SPJT untuk pembelian tersebut.

e. Penggabungan Usaha Perusahaan, Satelindo, Bimagraha dan IM3

Berdasarkan Akta Penggabungan Usaha dari notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 57 tanggal 20 November 2003 ("tanggal penggabungan usaha"), Perusahaan, PT Satelit Palapa Indonesia ("Satelindo"), PT Bimagraha Telekomindo ("Bimagraha") dan PT Indosat Multi Media Mobile ("IM3") sepakat untuk melakukan penggabungan usaha, dengan Perusahaan sebagai entitas yang dipertahankan. Seluruh aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh Satelindo, Bimagraha dan IM3 dialihkan kepada Perusahaan pada tanggal penggabungan. Ketiga perusahaan tersebut bubar secara hukum tanpa kewajiban untuk melakukan proses likuidasi.

Nama "Satelindo" dan "IM3" dalam catatan atas laporan keuangan berikut mengacu pada entitas-entitas tersebut sebelum bergabung dengan Perusahaan, atau sebagai entitas yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah diambil alih oleh Perusahaan sebagai akibat dari penggabungan usaha.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Perusahaan telah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, instrumen derivatif yang dicatat dengan nilai wajar dan investasi tertentu yang dinyatakan berdasarkan nilai wajar atau sebesar nilai aktiva bersih.

Laporan arus kas konsolidasi mengelompokkan penerimaan dan pembayaran kas dalam kegiatan usaha, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari kegiatan usaha disajikan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah rupiah.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi mencakup akun-akun Perusahaan dan Anak Perusahaan (Catatan 1d).

Efektif mulai tanggal 16 Mei 2007, aktiva bersih SMT dikonsolidasikan sebagai hasil dari kepemilikan Perusahaan sebesar 55,36% (Catatan 1d), sementara sebelum tanggal 16 Mei 2007, investasi di SMT dicatat dengan menggunakan metode biaya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasi juga mencakup akun-akun APE (anak perusahaan yang dimiliki 55% oleh Lintasarta). Laporan keuangan APE pada tahun 2008, 2007 dan 2006 dikonsolidasi karena kebijakan keuangan dan operasinya dikendalikan oleh Lintasarta.

Akun-akun IFB, IIFB, ISP dan SIB (pada tahun 2006) dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal neraca untuk akun neraca dan kurs rata-rata selama tahun berjalan untuk akun laporan laba rugi. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan IFB, IIFB, ISP dan SIB (pada tahun 2006) disajikan pada neraca konsolidasi sebagai bagian dari akun "Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan" pada bagian Ekuitas, neraca konsolidasi.

Hak minoritas pada anak perusahaan merupakan bagian pemilikan pemegang saham minoritas pada ekuitas (termasuk laba bersih) anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Semua transaksi dan saldo signifikan antar perusahaan telah dieliminasi dalam konsolidasi.

c. Kas dan Setara Kas

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

Kas dan deposito berjangka yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang, fasilitas *Letter of Credit*, bank garansi dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan Setara Kas". Kas dan deposito berjangka disajikan sebagai bagian dari "Aktiva Lancar Lainnya" atau "Aktiva Tidak Lancar - Lain-lain".

d. Investasi Jangka Pendek

- Reksadana

  Reksadana diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", dinyatakan sebesar nilai aktiva bersih pada tanggal neraca. Laba atau rugi yang belum terealisasi dari perubahan nilai aktiva bersih pada tanggal neraca dikreditkan (dibebankan) pada usaha tahun berjalan.

- Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dicatat berdasarkan harga perolehan.

e. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut pada akhir tahun.

f. Persediaan

Persediaan, terutama terdiri dari kartu SIM, paket perdana, voucher pulsa isi ulang, modem *broadband* dan *handset* selular, dinilai menurut nilai yang terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata bergerak.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka, terutama terdiri dari biaya frekuensi, premi nilai awal (*upfront premium*) untuk kontrak swap valuta asing (Catatan 27p), sewa dan gaji, dibebankan saat aktiva terkait digunakan. Bagian jangka panjang dari biaya dibayar di muka disajikan sebagai bagian dari "Aktiva Tidak Lancar - Lain-lain".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Investasi

Investasi terdiri dari:

- Investasi pada perusahaan asosiasi

  Investasi saham dimana Perusahaan mempunyai pemilikan modal minimal 20%, tetapi tidak lebih dari 50%, dinyatakan dengan metode ekuitas dimana harga perolehan dari investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal akuisisi serta dikurangi dengan pendapatan dividen yang diterima. Bagian Perusahaan atas laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi akan disesuaikan dengan amortisasi garis lurus selama lima belas tahun dari perbedaan antara harga perolehan investasi dan bagian pemilikan Perusahaan atas nilai wajar aktiva bersih pada tanggal akuisisi (goodwill).

  Apabila bagian Perusahaan atas ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi, setelah transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan /perusahaan asosiasi, berbeda dengan bagian Perusahaan atas ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi sebelum transaksi tersebut, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai kredit atau beban pada akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi/Anak Perusahaan", setelah dikurangi pajak penghasilan yang terkait, setelah menyesuaikan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi tersebut dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

- Investasi atas saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar harga perolehan.
- Investasi atas saham yang nilai wajarnya tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, dicatat sebesar nilai wajarnya, sesuai dengan SAK 50.

i. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman tertentu selama masa konstruksi), dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap.

Sesuai dengan SAK 16 (Revisi 2007), Perusahaan telah memilih metode biaya untuk pengukuran aktiva tetapnya. Perusahaan mengelompokkan kembali beberapa aktiva tetap tertentu sejak tanggal 1 Januari 2008 berdasarkan hasil penelaahan ulang dan evaluasi periodik terhadap masa manfaat ekonomis dari aktiva tersebut. Sisa masa manfaat ekonomis dari pengelompokkan baru tersebut telah disesuaikan. Berikut adalah taksiran masa manfaat (dalam tahun) sebelum dan mulai 1 Januari 2008.

	Sebelum 1 Januari 2008	Mulai 1 Januari 2008
Bangunan	15 sampai 20	20
Kabel laut (*)	12	-
Stasiun bumi (*)	10	-
Kabel bawah tanah (*)	15	-
Peralatan sentral (**)	10	-
Peralatan telekomunikasi lainnya (***)	5	-
Peralatan teknologi informasi	3 sampai 5	3 sampai 5
Peralatan kantor	5	3 sampai 5
Sarana penunjang bangunan dan partisi	5	3 sampai 15
Kendaraan	5	5
Peralatan teknis selular	10 sampai 15	10
Peralatan teknis satelit (*)	12	-
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	12	10 sampai 15
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	10	10
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	-	3 sampai 5
Peralatan jaringan akses tetap	-	10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Aktiva Tetap (lanjutan)

(*) Klasifikasi ini telah dikelompokkan kembali menjadi peralatan transmisi dan *cross-connection*. Tidak terdapat perubahan dalam taksiran masa manfaat.

(**) Akun ini telah dinamakan kembali menjadi peralatan jaringan akses tetap dan beberapa komponen dalam kelompok ini direklasifikasi menjadi peralatan teknis selular dan pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran. Sisa masa manfaat telah disesuaikan.

(***) Akun ini telah dinamakan kembali menjadi pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran. Beberapa komponen dalam kelompok ini direklasifikasi menjadi peralatan teknologi informasi, peralatan kantor, sarana penunjang bangunan dan partisi, peralatan teknis selular, peralatan transmisi dan *cross-connection* dan peralatan jaringan akses tetap. Sisa masa manfaat telah disesuaikan.

Hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar yang meningkatkan kondisi aktiva melebihi standar kinerja semula, dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap, dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

Aktiva dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar harga perolehan. Semua biaya pinjaman, termasuk bunga, amortisasi biaya yang terkait dengan perjanjian pinjaman (Catatan 14e dan 14h) dan selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aktiva tertentu, dikapitalisasi ke harga perolehan aktiva dalam pembangunan dan pemasangan. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan dan pemasangan selesai dan aktiva yang dibangun atau dipasang tersebut siap untuk digunakan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aktiva tetap ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

j. Penurunan Nilai Aktiva

Sesuai dengan SAK 48, “Penurunan Nilai Aktiva”, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aktiva pada tanggal neraca. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aktiva, Perusahaan mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aktiva tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada usaha tahun berjalan.

k. Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan SAK 30 (Revisi 2007), “Sewa”, yang menggantikan SAK 30 (1990), “Akuntansi Sewa Guna Usaha”. Menurut SAK revisi ini, suatu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewa yang digunakan oleh lessee sesuai dengan sewa pembiayaan disusutkan secara konsisten dengan menggunakan metode yang sama dengan aset yang disusutkan yang dimiliki secara langsung atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaat, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan kepemilikan pada akhir masa sewa.

Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Penerapan dari SAK revisi ini tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Goodwill dan Aktiva Tak Berwujud Lainnya

Pada saat Perusahaan mengakuisisi suatu anak perusahaan yang bukan merupakan perusahaan sepengendali, selisih lebih antara harga perolehan di atas bagian pemilikan Perusahaan atas nilai wajar aktiva anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, setelah dikurangi kewajiban, pada tanggal akuisisi diakui sebagai goodwill.

Akuisisi dari hak minoritas pada sebuah anak perusahaan oleh Perusahaan dicatat dengan menggunakan *parent entity extension method*. Berdasarkan metode ini, aktiva dan kewajiban dari anak perusahaan tidak disajikan kembali untuk mencerminkan nilai wajar mereka pada tanggal akuisisi. Selisih antara harga pembelian dan bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas aktiva dan kewajiban yang tercermin dalam neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi diakui sebagai goodwill.

Goodwill diamortisasi selama 15 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Pada saat akuisisi suatu anak perusahaan, aktiva tak berwujud yang diakui diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aktiva tersebut sebagai berikut:

	Tahun
Basis pelanggan (*Customer base*)	
- Pra-bayar	6
- Pasca-bayar	5
Izin spektrum (*Spectrum license*)	5
Merk (*Brand*)	8

Biaya Nilai Awal (*Upfront fee*) sehubungan dengan izin penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz (Catatan 1a) diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun.

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun.

Perusahaan menelaah nilai tercatat goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya pada saat terdapat peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa nilainya menurun. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada usaha tahun berjalan.

m. Beban Emisi Pinjaman dan Obligasi

Beban yang timbul sehubungan dengan penerbitan pinjaman dan obligasi dikurangkan dari hasil penerbitan pinjaman dan obligasi bersangkutan. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal pinjaman atau obligasi diakui sebagai premium atau diskonto yang diamortisasi selama umur pinjaman dan obligasi.

n. Kompensasi Berbasis Saham

Sesuai dengan SAK 53, “Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham”, beban kompensasi diakui dengan metode akrual selama periode pengakuan hak kompensasi (*vesting period*) berdasarkan nilai wajar seluruh opsi saham pada tanggal pemberian kompensasi (*grant date*).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Selular

Pendapatan selular yang berasal dari pemakaian pulsa dan penjelajahan diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan selular Perusahaan.

Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan.

Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan akhir. Penjualan voucher pulsa perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Penjualan modem *broadband* nirkabel dan *handset* selular diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan. Pendapatan dari komunikasi data *broadband* nirkabel diakui berdasarkan durasi dari pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung perjanjian dengan pelanggan.

Pendapatan selular disajikan sebesar jumlah bersih, setelah kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah.

MIDI

Internet

Pendapatan dari jasa instalasi diakui pada saat instalasi selesai dilakukan. Pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan. Pendapatan dari pemakaian diakui setiap bulan berdasarkan durasi pemakaian internet atau berdasarkan jumlah beban tetap, tergantung perjanjian dengan pelanggan.

Frame Net, World Link dan Direct Link

Pendapatan dari jasa instalasi diakui pada saat penyelesaian instalasi perangkat yang digunakan untuk tujuan koneksi jaringan di tempat pelanggan. Pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan.

Sewa Satelit

Pendapatan satelit diakui dengan metode garis lurus selama periode sewa.

Pendapatan jasa MIDI lainnya diakui pada saat penyerahan jasa tersebut.

Telekomunikasi Tetap

Telepon Internasional

Pendapatan telepon internasional ke luar negeri (“outgoing”) dicatat berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat selama tahun berjalan dan disajikan dalam jumlah bersih, setelah alokasi kepada perusahaan telekomunikasi internasional.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Telekomunikasi Tetap (lanjutan)

Telepon Jaringan Tetap Nirkabel

Pendapatan telepon jaringan tetap nirkabel dari pemakaian pulsa diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan aktivasi diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan baru di jaringan tetap Perusahaan, sedangkan pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan.

Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan akhir. Penjualan voucher pulsa perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Telepon Jaringan Tetap

Pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap diakui pada saat instalasi selesai dilakukan. Pendapatan dari pemakaian diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri dan internasional lainnya diakui setiap bulan berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat selama bulan berjalan.

Pendapatan interkoneksi yang didasarkan pada perjanjian interkoneksi berdasarkan pembagian pendapatan (Catatan 30) diakui sebesar pendapatan bersih, setelah dikurangi beban/biaya interkoneksi. Pendapatan interkoneksi yang tidak didasarkan pada perjanjian pembagian kontraktual, yaitu yang berdasarkan pada tarif yang ditentukan oleh keputusan Pemerintah (Catatan 29), dilaporkan sebesar pendapatan kotor, sebelum dikurangi beban/biaya interkoneksi (Catatan 19). Beban/biaya interkoneksi tersebut dilaporkan sebagai beban usaha pada tahun terjadinya.

Pada tahun 2007, Perusahaan menandatangani beberapa nota kesepakatan untuk mengubah perjanjian interkoneksi berdasarkan pembagian pendapatan yang ada dan untuk mencerminkan skema interkoneksi berbasis biaya yang baru berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 (Catatan 30). Berdasarkan skema yang baru, pendapatan interkoneksi dilaporkan sebesar pendapatan kotor sejak tahun 2007. Beban/biaya interkoneksi tersebut (Catatan 19) dilaporkan sebagai beban usaha pada tahun terjadinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

p. Beban Karyawan

Beban karyawan yang langsung berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan pemasangan aktiva tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aktiva yang bersangkutan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Dana Pensiun dan Kenikmatan Karyawan

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan, ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil aktiva dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih dari masing-masing imbalan yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aktiva dana pensiun, mana yang lebih tinggi, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang melebihi 10% batas koridor diakui secara merata selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari karyawan. Biaya jasa lalu diamortisasi sepanjang taksiran sisa masa kerja rata-rata karyawan.

Perusahaan menerapkan SAK 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja", yang mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan pasca kerja).

r. Derivatif

Perusahaan menandatangani dan melakukan beberapa kontrak/transaksi swap valuta asing, swap suku bunga dan *forward* valuta asing untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga yang berasal dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi perusahaan dalam mata uang asing.

Perusahaan menerapkan SAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". SAK 55 (Revisi 1999) mengatur standar akuntansi dan pelaporan untuk transaksi derivatif dan aktivitas lindung nilai, yang mengharuskan setiap instrumen derivatif (termasuk instrumen derivatif melekat) diakui sebagai aktiva atau kewajiban berdasarkan nilai wajar setiap kontrak. Nilai wajar merupakan perhitungan nilai kini (*present value*) dengan menggunakan data dan asumsi-asumsi yang berlaku umum. Berdasarkan kriteria khusus untuk akuntansi lindung nilai pada SAK 55 (Revisi 1999), semua instrumen derivatif yang ada pada Perusahaan tidak memenuhi persyaratan tersebut dan oleh karena itu tidak dikategorikan sebagai lindung nilai yang efektif untuk tujuan akuntansi. Perubahan atas nilai wajar dari instrumen derivatif dibebankan atau dikreditkan pada usaha tahun berjalan.

Aktiva dan kewajiban derivatif disajikan masing-masing sebagai aktiva dan kewajiban lancar. Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada neraca yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa yang akan datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.

Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif, beban atau pendapatan swap, beban atau pendapatan terminasi dan penyelesaian dari instrumen derivatif dibebankan atau dikreditkan pada "Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif - Bersih", yang disajikan sebagai bagian dari Penghasilan (Beban) Lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasi.

s. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aktiva tertentu, dikapitalisasi ke aktiva dalam pembangunan dan pemasangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

s. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, kurs yang digunakan (dalam jumlah penuh) masing-masing adalah Rp10.950, Rp9.393 dan Rp9.020 untuk AS$1, yang dihitung dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli mata uang asing yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun tersebut.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aktiva dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui apabila kemungkinan besar jumlah manfaat pajak pada masa mendatang tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada tahun saat nilai aktiva direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aktiva atau kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

u. Pelaporan Segmen

Perusahaan menerapkan SAK 5 (Revisi 2000), “Pelaporan Segmen”, dalam penyajian laporan segmen pada laporan keuangannya. SAK 5 (Revisi 2000) memberikan panduan yang lebih terinci dalam mengidentifikasi pelaporan segmen usaha dan segmen geografis. Informasi keuangan yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi kinerja segmen disajikan pada Catatan 33.

v. Laba per Saham Dasar/ADS Dasar dan Laba per Saham Dilusian/ADS Dilusian

Sesuai dengan SAK 56, “Laba per Saham”, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam tahun berjalan setelah memperhitungkan pengaruh dari pelaksanaan ESOP, jika ada (Catatan 25).

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan, setelah mempertimbangkan efek dilusi yang disebabkan oleh opsi saham sehubungan dengan ESOP dan obligasi konversi yang diterbitkan anak perusahaan (Catatan 15).

Laba per ADS dasar/dilusian dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar/dilusian dengan 50, sesuai dengan jumlah saham per ADS.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan, dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode yang dilaporkan. Hasil sebenarnya dapat berbeda dari taksiran tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007
Kas		
Rupiah	1.518	1.563
Dolar A.S. (AS$10)	108	-
	1.626	1.563
Bank		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 24)		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	15.048	15.910
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	4.158	5.873
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	2.398	2.431
PT Bank Syariah Mandiri ("Mandiri Syariah")	1.786	612
PT Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta ("BPD - DIY")	1.175	626
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	563	1.612
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")*	-	2.278
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	2.785	2.602
Dolar A.S.		
Mandiri (AS$247 pada tahun 2008 dan AS$638 pada tahun 2007)	2.710	5.996
Lain-lain (AS$81 pada tahun 2008 dan AS$37 pada tahun 2007)	886	351
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk) ("CIMB Niaga")	10.264	5.264
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB")	9.774	9.111
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")	9.572	2.370
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	7.840	41.472
Citibank N.A., Cabang Jakarta	1.188	11.199
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000)	11.943	8.459
Dolar A.S.		
Citibank N.A., Cabang Jakarta (AS$7.956 pada tahun 2008 dan AS$3.788 pada tahun 2007)	87.122	35.580
Fortis Bank, Belanda (AS$6.538 pada tahun 2008 dan AS$6.528 pada tahun 2007)	71.589	61.316

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2008	2007
Pihak ketiga (lanjutan)		
Dolar A.S. (lanjutan)		
Citibank Singapura (AS$1.287 pada tahun 2008 dan AS$411 pada tahun 2007)	14.091	3.858
DB (AS$1.105 pada tahun 2008 dan AS$2.902 pada tahun 2007)	12.100	27.261
Lain-lain (AS$19 pada tahun 2008 dan AS$512 pada tahun 2007)	209	4.814
	267.201	248.995
Deposito berjangka		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 24)		
Rupiah		
Mandiri	666.890	1.953.535
Mandiri Syariah	201.000	454.000
BRI	106.000	685.000
BNI	75.390	56.746
PT Bank Tabungan Negara (Persero) (“BTN”)	69.400	265.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1.500	20.000
BPD - DIY	1.000	1.000
Danamon*	-	411.800
PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)*	-	150.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	-	1.000
Lain-lain	-	104
Dolar A.S.		
Mandiri (AS$139.079 pada tahun 2008 dan AS$12.724 pada tahun 2007)	1.522.916	119.517
BNI (AS$110.000 pada tahun 2008 dan AS$30.000 pada tahun 2007)	1.204.500	281.790
BRI (AS$60.000)	657.000	-
DBS* (AS$40.000)	-	375.720
Danamon* (AS$10.000)	-	93.930
BTN (AS$5.000)	-	46.965
Pihak ketiga		
Rupiah		
DBS*	150.000	-
CIMB Niaga	103.500	386.000
Danamon*	79.300	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Muamalat”)	61.000	225.000
DB	30.198	788.685
Bukopin	22.200	371.500
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	16.000	-
BCA	5.288	216.450
Bank Permata Syariah	5.000	-
PT Bank Syariah Mega Indonesia	4.000	-
Mega	-	2.801
Lain-lain	5.981	2.061

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2008	2007
Deposito berjangka (lanjutan)		
Pihak ketiga (lanjutan)		
Dolar A.S.		
Bank UOB Indonesia (AS$25.000)	273.750	-
Muamalat (AS$10.000 pada tahun 2008 dan AS$35.000 pada tahun 2007)	109.500	328.755
DB (AS$5.623 pada tahun 2008 dan AS$23.061 pada tahun 2007)	61.576	216.609
CIMB Niaga (AS$3.050 pada tahun 2008 dan AS$27.100 pada tahun 2007)	33.397	254.550
Bukopin (AS$10.000)	-	93.930
Danamon* (AS$252)	2.753	-
	5.469.039	7.802.448
Jumlah	**5.737.866**	**8.053.006**

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

Deposito berjangka dalam rupiah memperoleh bunga per tahun berkisar antara 1,250% sampai 14,000% pada tahun 2008, antara 2,250% sampai 11,400% pada tahun 2007, dan antara 3,250% sampai 13,200% pada tahun 2006, sedangkan deposito berjangka dalam dolar A.S. memperoleh bunga per tahun berkisar antara 0,002% sampai 6,000% pada tahun 2008, antara 1,500% sampai 5,380% pada tahun 2007 dan antara 1,000% sampai 5,150 pada tahun 2006.

Tingkat bunga yang diperoleh dari deposito berjangka pada bank yang mempunyai hubungan istimewa sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

4. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 24)		
Telkom (termasuk AS$271 pada tahun 2008 dan AS$268 pada tahun 2007)	32.801	38.208
Lain-lain (termasuk AS$5.032 pada tahun 2008 dan AS$15.850 pada tahun 2007)	112.721	183.479
Jumlah	145.522	221.687
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	69.444	88.342
Bersih	**76.078**	**133.345**

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

	2008	2007
Pihak ketiga:		
Perusahaan telekomunikasi internasional (termasuk AS$81.810 pada tahun 2008 dan AS$61.322 pada tahun 2007)	895.820	575.998
Perusahaan dalam negeri (termasuk AS$24.987 pada tahun 2008 dan AS$21.211 pada tahun 2007)	506.191	365.802
Pelanggan pasca-bayar dari:		
Selular	249.124	244.949
Telepon jaringan tetap	28.565	22.742
Telepon jaringan tetap nirkabel	11.647	14.274
Jumlah	1.691.347	1.223.765
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	426.719	326.142
Bersih	**1.264.628**	**897.623**
Jumlah	**1.340.706**	**1.030.968**

Analisis umur piutang adalah sebagai berikut:

	2008		2007	
Umur Piutang	**Jumlah**	**Persentase (%)**	**Jumlah**	**Persentase (%)**
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
0 - 6 bulan	82.495	56,69	108.159	48,79
7 - 12 bulan	10.199	7,01	43.094	19,44
13 - 24 bulan	3.382	2,32	10.998	4,96
Lebih dari 24 bulan	49.446	33,98	59.436	26,81
Jumlah	**145.522**	**100,00**	**221.687**	**100,00**
Pihak ketiga				
0 - 6 bulan	984.794	58,23	697.857	57,02
7 - 12 bulan	191.825	11,34	201.021	16,43
13 - 24 bulan	266.779	15,77	153.054	12,51
Lebih dari 24 bulan	247.949	14,66	171.833	14,04
Jumlah	**1.691.347**	**100,00**	**1.223.765**	**100,00**

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu pada akun piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Saldo awal tahun	88.342	141.263
Penyisihan (pembalikan)	(23.514)	2.978
Efek bersih penyesuaian kurs	6.660	2.373
Penghapusan	(2.044)	(58.272)
Saldo akhir tahun	**69.444**	**88.342**

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu pada akun piutang usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2008	2007
Pihak ketiga		
Saldo awal tahun	326.142	423.730
Penyisihan	97.795	112.052
Efek bersih penyesuaian kurs	35.872	7.772
Penghapusan	(33.090)	(217.412)
Saldo akhir tahun	**426.719**	**326.142**

Efek bersih penyesuaian selisih kurs disebabkan oleh menguatnya atau melemahnya rupiah terhadap dolar A.S. atas piutang dalam dolar A.S. yang sebelumnya telah disisihkan dan dikreditkan atau dibebankan pada "Laba (Rugi) Kurs - Bersih".

Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan, kecuali piutang usaha dari Telkom.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutup risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2008, sekitar 0,69% piutang usaha digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank jangka panjang yang diperoleh oleh Lintasarta (Catatan 14).

5. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007
Tagihan pajak	329.241	610.852
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	261.127	98.901
Lain-lain	2.512	4.569
Jumlah	**592.880**	**714.322**

Tagihan pajak tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 terutama terdiri dari pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun pajak 2004, 2005 dan 2006.

Pada tanggal 5 September 2006, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atas PPN Perusahaan untuk tahun pajak 2004 periode April - Juli 2004 dan November - Desember 2004 sejumlah Rp86.981, yang telah diterima pada bulan November 2006.

Pada tanggal 4 Desember 2006, Perusahaan menerima SKPLB dari DJP atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp199.552. Pada tanggal 12 April 2007, Perusahaan menerima pembayaran sebesar Rp130.813 atas SKPLB tersebut setelah dikurangi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas PPN Perusahaan periode Januari - Maret 2004 dan Agustus - Oktober 2004, dan pajak penghasilan Pasal 23 dan 26 untuk tahun pajak 2004, termasuk denda dan bunga (Catatan 12).

5. PAJAK DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Pada tanggal 27 Maret 2007, Perusahaan menerima SKPLB dari DJP yang memberitahukan persetujuan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dan PPN untuk tahun pajak 2005, masing-masing sebesar Rp135.766 dan Rp39.052, dimana jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah yang dicatat Perusahaan dalam laporan keuangannya. Perusahaan menerima sebagian koreksi atas pajak penghasilan badan dan semua koreksi atas PPN sejumlah Rp5.375 untuk tahun pajak 2005, dan dibebankan pada usaha tahun berjalan di tahun 2007. Pada tanggal 16 Mei 2007, Perusahaan menerima pembayaran sebesar Rp63.843 setelah dikurangi dengan SKPKB pajak penghasilan Pasal 23 dan 26 untuk tahun pajak 2005, termasuk denda dan bunga (Catatan 12) dan Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk pajak penghasilan lainnya. Pada tanggal 22 Juni 2007, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak atas koreksi pajak penghasilan badan tahun 2005 yang tersisa (Catatan 12).

Pada tanggal 17 Maret 2008, Perusahaan menerima pembayaran dari Kantor Pajak sebesar Rp25.440 atas keberatan Perusahaan atas pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun pajak 2005 yang telah disetujui oleh Kantor Pajak (Catatan 12).

Pada tanggal 27 Mei 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-230/WPJ.19/BD.05/2008 dari DJP yang menyetujui sebagian keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan badan untuk tahun 2005 sebesar Rp2.725. Pada tanggal 17 Juli 2008, Perusahaan menerima pembayaran sebesar Rp1.785 setelah dikurangi dengan tambahan SKPKB pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2005 (Catatan 12). Pada tanggal 21 Agustus 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan badan tahun 2005 yang tersisa. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2008, Perusahaan menerima SKPLB dari DJP yang memberitahukan Perusahaan mengenai persetujuan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dan PPN untuk tahun pajak 2006 masing-masing sebesar Rp232.439 dan Rp11.657, dimana jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah yang dicatat oleh Perusahaan dalam laporan keuangannya. Perusahaan menerima sebagian koreksi atas pajak penghasilan badan dan semua koreksi atas PPN untuk tahun pajak 2006, sejumlah Rp9.168, dan dibebankan pada usaha tahun berjalan di tahun 2008. Pada tanggal 21 Juli 2008, Perusahaan menerima kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dan PPN untuk tahun pajak 2006 masing-masing sebesar Rp232.439 dan Rp11.657. Pada tanggal 15 September 2008, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada DJP atas koreksi pajak penghasilan badan tahun 2006 yang tersisa. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima keputusan dari DJP terkait surat keberatan tersebut.

6. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, akun ini terdiri dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas sebagai berikut:

	Lokasi	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Harga Perolehan	Bagian Perusahaan atas atas Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Yang Belum Dibagikan	Nilai Tercatat
2008						
PT Multi Media Asia Indonesia	Indonesia	Telekomunikasi berbasis satelit	26,67	56.512	(212)	56.300
PT Lintas Media Danawa *	Indonesia	Layanan informasi dan komunikasi	35,00	700	-	700
PT Swadharma Marga Inforindo	Indonesia	Layanan informasi dan telekomunikasi	20,00	100	186	286
Jumlah				57.312	(26)	57.286
Dikurangi penyisihan penurunan nilai						56.586
Bersih						**700**

6. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (lanjutan)

	Lokasi	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Harga Perolehan	Bagian Perusahaan atas atas Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Yang Belum Dibagikan	Nilai Tercatat
2007						
PT Multi Media Asia Indonesia	Indonesia	Telekomunikasi berbasis satelit	26,67	56.512	(212)	56.300
PT Swadharma Marga Inforindo	Indonesia	Layanan informasi dan telekomunikasi	20,00	100	186	286
Jumlah				56.612	(26)	56.586
Dikurangi penyisihan penurunan nilai						56.300
Bersih						**286**

* PT Lintas Media Danawa ("LMD") adalah perusahaan asosiasi dari Lintasarta. LMD didirikan pada tanggal 28 Juli 2008 untuk menyediakan layanan informasi dan komunikasi, seperti layanan pusat data, *e-learning* dan *distant learning* untuk layanan pendidikan publik dan layanan *content* berbasis Protokol Internet (misalnya IPTV, permainan internet dan sentra gerbang pembayaran internet).

Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan sebesar Rp56.586 dan Rp56.300 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, adalah cukup untuk menutup risiko kemungkinan kerugian investasi di atas.

7. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, akun ini terdiri dari:

Investasi pada saham yang dicatat dengan metode biaya - bersih	2.631
Efek ekuitas yang tersedia untuk dijual*	99
Jumlah	**2.730**

* terdiri dari BNI dan Telkom masing-masing sebesar Rp89 dan Rp10.

Investasi saham yang dicatat dengan metode biaya:

	Lokasi	Kegiatan Usaha	2008 dan 2007 Kepemilikan (%)	2008 dan 2007 Harga Perolehan/ Nilai Tercatat
PT First Media Tbk (sebelumnya PT Broadband Multimedia Tbk atau "BM")*	Indonesia	Televisi kabel dan penyelenggara layanan jaringan internet	2,29	50.000
ICO Global Communication (Holdings) Limited	Bahamas	Layanan satelit	0,0087	49.977
Asean Cableship Pte. Ltd. ("ACPL")**	Singapura	Perbaikan dan pemeliharaan kabel laut	16,67	1.265
Lain-lain			12,80 -14,29	1.366
Jumlah				102.608
Dikurangi penurunan nilai				99.977
Bersih				**2.631**

* Pada tanggal 5 Februari 2007, kepemilikan Perusahaan di BM terdilusi menjadi 2,29% karena Perusahaan tidak menggunakan hak memesan terlebih dahulu sehubungan dengan penerbitan "Rights" oleh BM.

** Pada tanggal 13 Maret, 30 April dan 28 September 2007, Perusahaan menerima pendapatan dividen dari ACPL sejumlah AS$4.389 (setara dengan Rp40.105), sedangkan pada tanggal 1 April dan 6 Oktober 2008, Perusahaan menerima pendapatan dividen dari ACPL sejumlah AS$2.712 (setara dengan Rp26.348).

Perusahaan membentuk penyisihan penurunan nilai investasi saham yang dicatat dengan metode biaya sejumlah Rp99.977 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, yang menurut keyakinan Perusahaan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas investasi.

8. AKTIVA TETAP

Rincian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	2008				
		Transaksi selama Tahun Berjalan			
	Saldo Awal Tahun	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir Tahun
Nilai Tercatat					
Hak atas tanah	428.828	7.712	-	36.569	473.109
Bangunan	459.859	4.577	-	87.264	551.700
Kabel laut*	-	-	-	-	-
Stasiun bumi*	-	-	-	-	-
Kabel bawah tanah*	-	-	-	-	-
Peralatan sentral*	-	-	-	-	-
Peralatan jaringan akses tetap	966.529	-	-	20.432	986.961
Peralatan telekomunikasi lainnya*	-	-	-	-	-
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	1.025.804	213	-	72.390	1.098.407
Peralatan teknologi informasi	1.642.238	537	-	213.662	1.856.437
Peralatan kantor	1.457.758	133.347	1.065	15.161	1.605.201
Sarana penunjang bangunan dan partisi	6.730.616	3.777	-	1.916.744	8.651.137
Kendaraan	20.133	4.404	2.961	2.595	24.171
Peralatan teknis selular	19.792.690	-	-	2.856.979	22.649.669
Peralatan teknis satelit*	-	-	-	-	-
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	9.877.587	276.716	17.381	613.406	10.750.328
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	751.922	-	-	152.425	904.347
Aktiva dalam pembangunan dan pemasangan	8.010.903	11.903.668	-	(5.987.627)	13.926.944
Jumlah	51.164.867	12.334.951	21.407	-	63.478.411
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	235.203	23.593	-	-	258.796
Kabel laut *	-	-	-	-	-
Stasiun bumi*	-	-	-	-	-
Kabel bawah tanah*		-	-	-	-
Peralatan sentral*	-	-	-	-	-
Peralatan jaringan akses tetap	633.733	73.288	-	-	707.021
Peralatan telekomunikasi lainnya*	-	-	-	-	-
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	488.465	303.316	-	-	791.781
Peralatan teknologi informasi	1.061.695	344.491	-	-	1.406.186
Peralatan kantor	949.514	151.771	1.060	-	1.100.225
Sarana penunjang bangunan dan partisi	2.476.996	653.124	-	-	3.130.120
Kendaraan	12.338	3.677	2.085	-	13.930
Peralatan teknis selular	9.317.768	2.041.685	-	-	11.359.453
Peralatan teknis satelit*	-	-	-	-	-
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	5.088.406	834.367	17.357	-	5.905.416
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	229.365	83.434	-	-	312.799
Jumlah	20.493.483	4.512.746	20.502	-	24.985.727
Dikurangi penurunan nilai aktiva	98.611	-	-	-	98.611
Nilai Buku Bersih	**30.572.773**				**38.394.073**

*Akun ini telah dikelompokkan kembali atau dinamakan kembali oleh Perusahaan (Catatan 2i).

8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	2007						
		Transaksi selama Tahun Berjalan					
	Saldo Awal Tahun	Pengelompokan Kembali	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Perolehan Anak Perusahaan	Saldo Akhir Tahun
Nilai Tercatat							
Hak atas tanah	400.597	(273)	-	-	27.504	1.000	428.828
Bangunan	456.091	(63.801)	641	-	65.715	1.213	459.859
Kabel laut	885.344	(885.344)	-	-	-	-	-
Stasiun bumi	125.347	(125.347)	-	-	-	-	-
Kabel bawah tanah	857.946	(857.946)	-	-	-	-	-
Peralatan sentral	375.231	(375.231)	-	-	-	-	-
Peralatan jaringan akses tetap	-	939.007	-	-	27.522	-	966.529
Peralatan telekomunikasi lainnya	2.130.835	(2.130.835)	-	-	-	-	-
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	-	878.340	-	1.570	149.034	-	1.025.804
Peralatan teknologi informasi	1.080.576	226.776	3.517	6.301	336.909	761	1.642.238
Peralatan kantor	1.544.897	(243.230)	107.009	948	50.030	-	1.457.758
Sarana penunjang bangunan dan partisi	1.432.521	4.231.093	3.560	1.502	1.058.380	6.564	6.730.616
Kendaraan	17.498	69	3.174	608	-	-	20.133
Peralatan teknis selular	25.797.738	(7.964.992)	-	190.526	2.150.470	-	19.792.690
Peralatan teknis satelit	1.290.575	(1.290.575)	-	-	-	-	-
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	479.020	7.646.623	195.269	65.397	1.622.072	-	9.877.587
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	539.633	15.666	37.203	-	159.420	-	751.922
Aktiva dalam pembangunan dan pemasangan	4.291.429	-	9.365.492	-	(5.647.056)	1.038	8.010.903
Jumlah	41.705.278	-	9.715.865	266.852	-	10.576	51.164.867
Akumulasi Penyusutan							
Bangunan	222.353	(22.920)	35.750	-	-	20	235.203
Kabel laut	525.191	(525.191)	-	-	-	-	-
Stasiun bumi	118.237	(118.237)	-	-	-	-	-
Kabel bawah tanah	148.869	(148.869)	-	-	-	-	-
Peralatan sentral	258.697	(258.697)	-	-	-	-	-
Peralatan jaringan akses tetap	-	533.347	100.386	-	-	-	633.733
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.364.343	(1.364.343)	-	-	-	-	-
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	-	394.005	96.030	1.570	-	-	488.465
Peratalatan teknologi informasi	793.366	67.479	207.128	6.301	-	23	1.061.695
Peralatan kantor	830.332	11.937	108.191	946	-	-	949.514
Sarana penunjang bangunan dan partisi	697.636	1.124.733	655.798	1.502	-	331	2.476.996
Kendaraan	9.987	1.984	965	598	-	-	12.338
Peraltan teknis selular	10.382.388	(3.008.915)	2.134.820	190.525	-	-	9.317.768
Peraatan teknis satelit	985.512	(985.512)	-	-	-	-	-
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	212.424	4.320.308	621.035	65.361	-	-	5.088.406
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	138.684	(21.109)	111.790	-	-	-	229.365
Jumlah	16.688.019	-	4.071.893	266.803	-	374	20.493.483
Dikurangi penurunan nilai aktiva	98.611	-	-	-	-		98.611
Nilai Buku Bersih	**24.918.648**						**30.572.773**

Kabel laut merupakan bagian investasi Perusahaan pada sirkit kabel laut yang dibangun, dioperasikan, dipelihara dan dimiliki bersama-sama dengan negara lain, berdasarkan kontrak dan/atau perjanjian pembangunan dan pemeliharaan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, penjualan aktiva tetap tertentu adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Penerimaan dari penjualan	1.131	478	1.249
Nilai buku bersih	(905)	(49)	(537)
Laba	**226**	**429**	**712**

8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi sebesar Rp4.512.746, Rp4.071.893, Rp3.491.631 masing-masing untuk tahun 2008, 2007 dan 2006.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aktiva atau pemulihan cadangan penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam SAK 48 selama tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2008, sekitar 0,11% aktiva tetap digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh Lintasarta (Catatan 14).

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah mengasuransikan aktiva tetapnya (kecuali kabel laut dan hak atas tanah) dengan nilai pertanggungan sebesar AS$103.701 dan Rp36.750.845, termasuk asuransi atas satelit Perusahaan sebesar AS$10.200. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan ini dapat menutup kemungkinan kerugian akibat kebakaran, ledakan, petir, kerusakan pesawat udara dan bencana alam lainnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap tertentu (Catatan 2i). Dampak dari perubahan tersebut adalah peningkatan (penurunan) laba sebelum pajak penghasilan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2008	(234.185)
2009	313.468
2010	313.572
2011	157.283
2012	47.963
2013	(7.901)

Rincian aktiva dalam pembangunan dan pemasangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	Persentase Penyelesaian	Biaya Perolehan	Estimasi Penyelesaian
2008			
Peralatan teknis selular	10 - 98	7.976.940	Januari - September 2009
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	5 - 99	3.853.958	Januari - September 2009
Sarana penunjang bangunan dan partisi	20 - 99	1.286.909	Januari - September 2009
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	25 - 99	362.647	Januari - September 2009
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	40 - 95	148.211	Januari - Juni 2009
Peralatan teknologi informasi	40 - 98	134.430	Januari - Juni 2009
Bangunan	15 - 80	77.810	Januari 2009 - Januari 2010
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	40 - 95	86.039	Januari - April 2009
Jumlah		**13.926.944**	
2007			
Peralatan teknis selular	15 - 95	4.661.020	Maret - Desember 2008
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	29 - 98	1.174.721	Maret - Desember 2008
Sarana penunjang bangunan dan partisi	60 - 99	1.149.994	Januari - Juni 2008
Peralatan teknis satelit	3	536.518	September 2009
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	25 - 95	234.646	Januari - Juni 2008
Kabel bawah tanah	42 - 99	119.138	Januari - Juni 2008
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	41 - 99	134.866	Januari - September 2008
Jumlah		**8.010.903**	

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aktiva dalam pembangunan dan pemasangan adalah masing-masing sebesar Rp134.875, Rp29.071 dan Rp62.154 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

9. GOODWILL DAN AKTIVA TAK BERWUJUD LAINNYA

Goodwill diperoleh dari akuisisi saham Satelindo dan Bimagraha masing-masing pada tahun 2002 dan 2001, dan dari akuisisi tambahan kepemilikan di Lintasarta pada tahun 2005 dan di SMT pada tahun 2008.

Aktiva tak berwujud yang diperoleh dari akuisisi Satelindo pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Izin spektrum (*Spectrum license*)	222.922
Basis pelanggan (*Customer base*)	
- Pasca-bayar	154.220
- Pra-bayar	73.128
Merk (*Brand*)	147.178
Jumlah	**597.448**

Perubahan dalam akun goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Saldo awal tahun	2.350.467	2.689.751
Penambahan:		
- Piranti lunak yang tak terintegrasi	6.952	10.532
- Goodwill (Catatan 1d)	9.724	-
Amortisasi goodwill	(227.317)	(226.507)
Amortisasi aktiva tak berwujud lainnya	(75.145)	(123.309)
Saldo akhir tahun	**2.064.681**	**2.350.467**

10. UANG MUKA JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan uang muka kepada pemasok dan kontraktor untuk pengadaan atau pembangunan aktiva tetap, yang akan direklasifikasi ke aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tetap yang dibeli sudah diterima atau setelah pembangunan atau pemasangan aktiva tetap mencapai tahap penyelesaian persentase tertentu.

11. HUTANG PENGADAAN

Akun ini terdiri dari hutang untuk pengeluaran modal dan operasional yang terdiri dari:

	2008	2007
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 24) (termasuk AS$505 pada tahun 2008 dan AS$3.648 pada tahun 2007)	77.718	168.158
Pihak ketiga (termasuk AS$411.796 pada tahun 2008 dan AS$419.567 pada tahun 2007)	6.368.639	6.038.491
Jumlah	**6.446.357**	**6.206.649**

Hutang pengadaan yang telah ditagih adalah masing-masing sebesar Rp1.266.204 dan Rp852.289 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Hutang pengadaan yang belum ditagih adalah masing-masing sebesar Rp5.180.153 dan Rp5.354.360 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007.

12. HUTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007
Taksiran hutang pajak penghasilan, dikurangi pembayaran pajak di muka sebesar Rp500.923 pada tahun 2008 dan Rp374.278 pada tahun 2007	78.800	286.397
Pajak penghasilan:		
Pasal 21	75.427	85.848
Pasal 22	8.232	3.754
Pasal 23	44.738	21.691
Pasal 25	32.369	28.132
Pasal 26	11.765	1.049
PPN	7.092	1.674
Lain-lain	10.468	7.905
Jumlah	**268.891**	**436.450**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasi	2.325.115	2.929.616	2.022.667
Laba Anak Perusahaan sebelum pajak penghasilan dan dampak dari eliminasi konsolidasi antar perusahaan	(167.147)	(83.443)	(129.605)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	2.157.968	2.846.173	1.893.062
Koreksi positif			
Kenikmatan karyawan masih harus dibayar - bersih	128.321	151.455	98.255
Penyisihan piutang ragu-ragu	102.455	108.573	88.248
Sumbangan	62.105	26.764	15.787
Penyisihan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian	21.914	15.632	11.386
Representasi dan jamuan	15.729	13.417	8.031
Ketetapan dan denda pajak penghasilan dan PPN	9.594	-	73.994
Amortisasi biaya emisi pinjaman dan hutang obligasi dan diskon (Catatan 14 dan 15)	6.634	1.677	3.940
Amortisasi goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya	2.747	7.721	-
Beban pensiun berkala bersih	1.528	6.768	-
Lain-lain	98.169	111.130	49.221
Koreksi negatif			
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(443.499)	(206.948)	(183.613)
Penyusutan - bersih	(440.218)	(780.225)	(1.213.527)
Bagian laba bersih anak perusahaan/ perusahaan asosiasi	(171.383)	(139.649)	(180.626)
Penghapusan piutang	(22.269)	(271.102)	(199.627)
Realisasi opsi saham sebagai hasil dari pelaksanaan ESOP Tahap II	-	-	(90.763)

12. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2008	2007	2006
Koreksi negatif (lanjutan)			
Beban pensiun berkala bersih	-	-	(13.704)
Amortisasi goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya	-	-	(6.872)
Lain-lain	-	(4.416)	(172)
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	**1.529.795**	**1.886.970**	**353.020**

Perhitungan beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	**1.529.795**	**1.886.970**	**353.020**
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan (sesuai tarif pajak yang berlaku)			
Perusahaan	458.921	566.073	105.888
Anak Perusahaan	120.802	94.602	93.741
Jumlah beban pajak penghasilan - tahun berjalan	579.723	660.675	199.629
Beban (manfaat) pajak penghasilan - tangguhan - pengaruh perbedaan temporer pada tarif pajak maksimum (30%)			
Perusahaan			
Penyusutan - bersih	132.066	234.067	364.058
Bagian laba bersih anak perusahaan/ perusahaan asosiasi	51.415	41.895	54.188
Penghapusan piutang	6.681	81.330	59.888
Kenikmatan karyawan yang masih harus dibayar - bersih	(38.496)	(45.436)	(29.477)
Penyisihan piutang ragu-ragu	(30.737)	(32.572)	(26.474)
Penyisihan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian	(6.574)	(4.689)	(3.416)
Amortisasi biaya emisi pinjaman dan hutang obligasi dan diskon (Catatan 14 dan 15)	(1.990)	(503)	(1.182)
Amortisasi goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya	(824)	(2.316)	2.062
Beban pensiun berkala bersih	(458)	(2.030)	4.111
Beban kompensasi untuk ESOP	-	-	27.229
Penyesuaian karena pemeriksaan pajak	-	-	(62.956)
Lain-lain	(18.910)	(31.690)	(10.950)
	92.173	238.056	377.081
Anak Perusahaan	5.753	(39.214)	(603)
Beban pajak penghasilan bersih - tangguhan	97.926	198.842	376.478
Beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan yang berasal dari pengurangan tarif pajak			
Perusahaan	(271.648)	-	-
Anak Perusahaan	13.829	-	-
Manfaat pajak tangguhan - bersih	(257.819)	-	-
Beban pajak penghasilan - bersih	**419.830**	**859.517**	**576.107**

12. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Perhitungan taksiran hutang pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan		
Perusahaan	458.921	566.073
Anak Perusahaan	120.802	94.602
Jumlah beban pajak penghasilan - tahun berjalan	579.723	660.675
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan		
Pasal 22	99.462	97.754
Pasal 23	9.053	46.611
Pasal 25	317.745	160.929
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan	426.260	305.294
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Anak Perusahaan		
Pasal 22	1.036	885
Pasal 23	3.214	20.112
Pasal 25	72.086	47.987
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka Anak Perusahaan	76.336	68.984
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	502.596	374.278
Taksiran hutang pajak penghasilan		
Perusahaan	32.661	260.779
Anak Perusahaan	46.139	25.618
Jumlah taksiran hutang pajak penghasilan	**78.800**	**286.397**
Tagihan pajak (disajikan sebagai bagian dari "Pajak Dibayar Dimuka")		
Anak Perusahaan	1.673	-

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak 30% pada laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan bersih seperti pada laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasi	**2.325.115**	**2.929.616**	**2.022.667**
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 30%	697.535	878.885	606.800
Bagian Perusahaan atas laba Anak Perusahaan sebelum pajak penghasilan dan pembalikan eliminasi konsolidasi antar perusahaan	51.495	43.669	53.783

12. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2008	2007	2006
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap			
Kenikmatan karyawan	19.027	16.979	6.433
Sumbangan	18.632	8.045	4.797
Ketetapan dan denda pajak penghasilan dan VAT	2.878	(670)	25.302
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(140.563)	(70.395)	(63.434)
Lain-lain	9.073	(1.948)	4.829
Penyesuaian karena pemeriksaan pajak dan lain-lain	19.572	(15.048)	(62.403)
Manfaat pajak tangguhan bersih akibat penurunan tarif pajak	(257.819)	-	-
Beban pajak penghasilan bersih sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasi	**419.830**	**859.517**	**576.107**

Jumlah pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Aktiva pajak tangguhan		
Kenikmatan karyawan masih harus dibayar - bersih	187.587	178.747
Penyisihan piutang ragu-ragu	125.027	122.437
Penyisihan penurunan nilai investasi pada perusahaan asosiasi dan investasi jangka panjang lainnya	39.069	46.883
Beban pensiun	17.775	26.517
Penyisihan investasi jangka pendek	6.349	7.618
Jumlah	375.807	382.202
Kewajiban pajak tangguhan		
Aktiva tetap	1.490.947	1.641.735
Investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi setelah dikurangi amortisasi goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya	179.607	212.134
Beban emisi pinjaman dan hutang obligasi yang ditangguhkan dan diskon	2.805	5.228
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	1.460	1.752
Lain-lain	5.088	3.437
Jumlah	1.679.907	1.864.286
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	**1.304.100**	**1.482.084**

12. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Rincian saldo aktiva dan kewajiban pajak tangguhan setiap perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008		2007	
	Aktiva Pajak Tangguhan	Kewajiban Pajak Tangguhan	Aktiva Pajak Tangguhan	Kewajiban Pajak Tangguhan
Perusahaan	-	1.304.100	-	1.482.084
Anak Perusahaan				
Lintasarta	63.805	-	71.177	-
IMM	4.640	-	2.806	-
APE	-	565	-	137
ISP	-	331	-	-
SMT	-	189	13.135	-
SMM	-	-	-	-
Jumlah	**68.445**	**1.305.185**	**87.118**	**1.482.221**

Aktiva pajak tangguhan Lintasarta sebagian besar berkaitan dengan pajak tangguhan atas perbedaan temporer dalam pengakuan penyusutan aktiva tetap.

Perbedaan temporer signifikan atas mana aktiva pajak tangguhan dihitung, tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan sampai kenikmatan karyawan masih harus dibayar telah dibayarkan, piutang ragu-ragu dihapuskan, penyisihan penurunan nilai investasi pada perusahaan asosiasi dan investasi jangka panjang lainnya terealisasi pada saat penjualan investasi dan beban pensiun dibayar. Kewajiban pajak tangguhan signifikan berasal dari perbedaan dasar pencatatan aktiva tetap, investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi, dan beban emisi pinjaman dan hutang obligasi yang ditangguhkan dan diskon menurut pembukuan dan pelaporan pajak.

Penyisihan aktiva pajak tangguhan telah dibentuk untuk aktiva pajak tangguhan tertentu dari sebuah anak perusahaan. Penyisihan aktiva pajak tangguhan mengurangi aktiva pajak ke jumlah yang kemungkinan cukup besar akan dapat direalisasi.

Pada tahun 2005, sebagai hasil pemeriksaan atas pajak penghasilan badan tahun pajak 2003, akumulasi rugi pajak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp934.637 disesuaikan oleh Kantor Pajak menjadi Rp501.179. Pada tanggal 31 Oktober 2005, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak atas koreksi pajak tersebut. Pada tanggal 13 Oktober 2006, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari DJP No. KEP-1716/WPJ.07/BD.05/2006 yang menolak keberatan Perusahaan atas koreksi pajak. Pada tanggal 10 Januari 2007, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan keberatan Perusahaan atas koreksi pajak dan selanjutnya menerima keputusan yang menguntungkan bagi pihaknya. Pada tanggal 4 Juli 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-00080/WPJ.19/KP.0303/2008 (KEP-00080) dari Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2003. Pada tanggal 24 Desember 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari DJP No. KEP-539/WPJ.19/BD.05/2008 tentang peningkatan SKPLB untuk tahun pajak 2004 menjadi sebesar Rp84.650 (Catatan 35e), dimana jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan dalam KEP-00080. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan sedang mempersiapkan surat banding mengenai pengembalian pajak yang tersisa seperti yang ditetapkan dalam KEP-00080 (Catatan 35c).

12. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Pada tanggal 4 Desember 2006, Perusahaan menerima SKPKB/STP dari DJP atas PPN Perusahaan untuk periode Januari - Maret 2004 dan Agustus - Oktober 2004 sejumlah Rp8.238 (termasuk denda dan bunga) dan pajak penghasilan pasal 23 dan 26 masing-masing sebesar Rp8 dan Rp60.493 (termasuk denda dan bunga) untuk tahun pajak 2004 (Catatan 5). Perusahaan menerima SKPKB atas pajak penghasilan Pasal 23 dan PPN. Pada tanggal 28 Februari 2007, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak sehubungan dengan koreksi pajak penghasilan pasal 26. Pada tanggal 18 Februari 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-0067/WPJ.19/BD.05/2008 dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2004. Pada tanggal 14 Mei 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan keberatan Perusahaan atas koreksi pajak. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak sehubungan dengan banding tersebut.

Pada tanggal 27 Maret 2007, Perusahaan menerima SKPKB dari DJP atas pajak penghasilan pasal 23 dan 26 masing-masing sebesar Rp28.479 dan Rp82.126 (termasuk denda dan bunga) untuk tahun pajak 2005 (Catatan 5). Perusahaan menerima sebagian koreksi pajak atas pajak penghasilan pasal 23 sejumlah Rp3.039 yang dibebankan pada usaha tahun 2007. Pada tanggal 22 Juni 2007 dan 11 Juni 2007, Perusahaan mengirimkan surat keberatan ke Kantor Pajak, masing-masing atas SKPKB pajak penghasilan Pasal 23 untuk koreksi pajak yang tersisa dan pasal 26 tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-076/WPJ.19/BD.05/2008 dari DJP yang menerima keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun pajak 2005 (Catatan 5). Pada tanggal 4 Juni 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. 261/WPJ.19/BD.05/2008 dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2005. Sebagai tambahan, berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Perusahaan dikenakan tambahan koreksi pajak penghasilan pasal 26 sebesar Rp940 (Catatan 5) yang diterima oleh perusahaan. Pada tanggal 2 September 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2005. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak sehubungan dengan banding tersebut.

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai “Pajak Penghasilan”, direvisi untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (Catatan 37). Perubahan tersebut mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Perusahaan mencatat dampak dari penurunan tarif pajak sebagai pengurang beban pajak penghasilan sebesar Rp257.819 (Catatan 12) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan kredit sebesar Rp292 pada “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi/ Anak Perusahaan” dan Rp886 pada “Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan”, yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam neraca konsolidasi.

Akumulasi rugi pajak SMM dan SMT pada tanggal 31 Desember 2008 dapat dikompensasikan sampai dengan tahun 2013 berdasarkan jadual sebagai berikut:

Tahun Jatuh Tempo	Jumlah
2009	2.035
2010	1.885
2011	14.190
2012	30.205
2013	26.660
Jumlah	**74.975**

13. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007
Perbaikan dan perawatan jaringan	303.200	222.594
Bunga	298.935	202.936
Biaya hak penggunaan frekuensi radio	257.671	233.146
Pemasaran	161.698	134.950
Kenikmatan karyawan	122.049	215.720
Insentif agen penjual (*dealer*)	80.760	42.720
Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi	49.227	82.790
Jasa konsultan	45.792	50.186
Kewajiban pelayanan universal (“USO”)	38.526	60.741
Umum dan administrasi	25.829	9.949
Sewa	21.762	17.584
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp20.000)	107.084	67.119
Jumlah	**1.512.533**	**1.340.435**

14. HUTANG JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 24)		
Mandiri - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp3.858 pada tahun 2008 dan Rp5.091 pada tahun 2007	1.796.142	1.994.909
Pihak ketiga - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp233.736 pada tahun 2008 dan Rp7.128 pada tahun 2007; dan diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp31.844 pada tahun 2008 dan Rp37.191 pada tahun 2007	9.588.487	2.748.511
Jumlah hutang jangka panjang	11.384.629	4.743.420
Dikurangi bagian jangka pendek:		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	200.000	200.000
Pihak ketiga	372.469	294.387
Jumlah bagian jangka pendek	572.469	494.387
Bagian jangka panjang	**10.812.160**	**4.249.033**

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Rincian hutang dari Mandiri dan Fasilitas Pinjaman Sindikasi 2 (dibayar penuh pada bulan September 2007) adalah sebagai berikut:

a. Mandiri

Pada tanggal 18 September 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dari Mandiri untuk pembelian peralatan telekomunikasi sebesar Rp2.000.000. Pinjaman ini dikenakan (i) suku bunga tetap untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya berdasarkan tingkat bunga JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 1,5% per tahun. Bunga terhutang setiap triwulanan. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 27 September dan 27 Desember 2007, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman pertama dan kedua sejumlah Rp2.000.000.

Pembayaran lebih awal secara sukarela (seluruh atau sebagian dari pinjaman) diperbolehkan tanpa dikenakan denda jika pembayaran lebih awal tersebut dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 7 hari sebelumnya. Pembayaran lebih awal sebelum bulan ke-24 setelah tanggal perjanjian diperbolehkan dengan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 27 September 2008, Perusahaan membayar cicilan tengah tahunan pertamanya sebesar Rp200.000.

b. Fasilitas Pinjaman Sindikasi 2

Pada tanggal 2 Oktober 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi sejumlah Rp3.165.000 dengan bank sindikasi berikut:

Bank	Tranche	Jumlah
BCA	C	975.000
Mandiri *	B	900.000
BNI *	C	900.000
Danamon **	A	240.000
Bukopin	A	150.000
Jumlah		**3.165.000**

* pihak yang mempunyai hubungan istimewa
** tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

Pada tanggal 8 Desember 2003, Perusahaan menarik sebesar Rp200.000 dan Rp1.800.000, masing-masing dari fasilitas pinjaman Tranche B dan C. Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan menggunakan pinjaman untuk membayar hutang IM3 dan Satelindo berdasarkan *Master Restructuring Agreement*, dan/atau pembiayaan pengeluaran modal, dan/atau kebutuhan Perusahaan lainnya secara umum apabila hutang IM3 dibayar dengan menggunakan fasilitas lainnya.

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Fasilitas Pinjaman Sindikasi 2 (lanjutan)

Suku bunga tahunan adalah tetap sebesar 9,3% untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007. Selama bulan April - Juni 2007 dan Juli - September 2007, suku bunga tahunan mengambang adalah masing-masing sebesar 10,6% dan 10,5%.

Pada tanggal 7 Desember 2004, Perusahaan membayar cicilan tengah tahunan pertamanya sebesar Rp73.125, Rp61.875 dan Rp22.220 masing-masing ke BCA, BNI dan Mandiri.

Pada tanggal 31 Maret 2005, Perusahaan melakukan pembayaran lebih awal pinjaman ini sebesar Rp290.112, Rp245.480 dan Rp57.188 masing-masing ke BCA, BNI dan Mandiri. Pada tanggal yang sama, Perusahaan juga menandatangani amandemen perjanjian pinjaman dengan BCA, BNI dan Mandiri. Amandemen tersebut mencakup, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- Saldo pinjaman yang tersisa akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2008. Namun, amandemen ini memberikan opsi pelunasan awal kepada Perusahaan, yang dimulai pada tanggal 1 April 2007 sampai tanggal jatuh tempo. Setiap pembayaran lebih awal yang dilakukan sebelum tanggal 1 April 2007 akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah yang dibayar kembali.

- Pinjaman ini dikenakan bunga sebagai berikut:
  - 1 April 2005 - 31 Maret 2007 : suku bunga tetap sebesar 9,3% per tahun
  - 1 April 2007 - 31 Maret 2008 : 10,5% per tahun atau suku bunga referensi ditambah marjin sebesar 2,5%, mana yang lebih tinggi.

Pada tanggal 6 September 2007, Perusahaan melunasi pinjaman ini secara penuh sebesar Rp1.250.000 untuk pokok pinjaman dan Rp24.792 untuk cicilan bunga terakhir.

Pinjaman dari pihak ketiga terdiri dari:

	2008	2007
Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp47.276	4.880.224	-
BCA - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp3.858 pada tahun 2008 dan Rp5.091 pada tahun 2007	1.796.142	1.994.909
HSBC Perancis - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp176.408	1.276.607	-
DBS * - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp769	499.231	-
Goldman Sachs International		
Pokok Pinjaman, setelah dikurangi diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp31.844 pada tahun 2008 dan Rp37.191 pada tahun 2007	402.456	397.109
Opsi konversi valuta asing	185.768	76.767
Pinjaman Komersial 9 Tahun - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp3.962	292.093	-
Finnish Export Credit Ltd. - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp1.463 pada tahun 2008 dan Rp2.038 pada tahun 2007	206.587	247.817
Fasilitas Kredit Investasi 5 dari CIMB Niaga	44.933	9.463
Fasilitas Kredit Investasi 4 dari CIMB Niaga	4.446	22.446
Jumlah	9.588.487	2.748.511
Dikurangi bagian jangka pendek	372.469	294.387
Bagian jangka panjang	**9.216.018**	**2.454.124**

* tidak termasuk sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17).

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. - 13 Lembaga Keuangan

Pada tanggal 12 Juni 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dengan 13 lembaga keuangan (termasuk ING Bank N.V. dan DBS Bank Ltd.) dengan jumlah AS$450.000. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan Perusahaan berupa (i) pengeluaran modal, (ii) pembelian kembali sebagian dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dan/atau *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012, dan/atau (iii) kebutuhan modal kerja. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR dolar A.S. ditambah marjin (1,9% per tahun untuk *onshore lenders* atau 1,85% per tahun untuk *offshore lenders*), yang terhutang setiap 6 bulanan.

Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap 6 bulanan, sebagai berikut: (a) 25% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga setelah penandatanganan perjanjian (tanggal pembayaran pertama), (b) 24% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada bulan ke-6 setelah tanggal pembayaran pertama, (c) 8% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada bulan ke-12 dan ke-18 setelah tanggal pembayaran pertama, dan (d) 35% dari total pinjaman yang ditarik, pada bulan ke-24 setelah tanggal pembayaran pertama.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan jika pembayaran dilakukan setelah bulan ke-6 dari tanggal perjanjian pinjaman dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman (dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan kelipatan AS$1.000).

Pada tanggal 26 September dan 30 Oktober 2008, Perusahaan menerima penarikan pertama dan kedua dari fasilitas kredit ini sejumlah AS$450.000 (setara dengan Rp4.704.650).

d. BCA

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dari BCA sebesar Rp1.600.000 untuk pembayaran Fasilitas Pinjaman Sindikasi 2 dan pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini dikenakan (i) suku bunga tetap untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya berdasarkan tingkat bunga JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 1,5% per tahun. Pada tanggal 20 September 2007, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit sebesar Rp400.000. Sebagai hasilnya, fasilitas kredit ini menjadi sebesar Rp2.000.000. Bunga terhutang setiap triwulanan. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun kelima setelah penarikan pertama.

Pada tanggal 27 September, 26 Oktober dan 27 Desember 2007, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman pertama, kedua dan ketiga sejumlah Rp2.000.000.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pembayaran lebih awal secara sukarela (seluruh atau sebagian dari pinjaman) diperbolehkan tanpa dikenakan denda, jika pembayaran lebih awal tersebut dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 7 hari sebelumnya. Pembayaran lebih awal sebelum bulan ke-24 dari tanggal perjanjian diperbolehkan dengan denda 2% dari jumlah yang dibayarkan.

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. BCA (lanjutan)

Pada tanggal 27 September 2008, Perusahaan membayar cicilan tengah tahunan pertamanya sebesar Rp200.000.

e. HSBC Perancis

Pada tanggal 27 November 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan HSBC Perancis terkait dengan:

- Perjanjian Fasilitas Berjangka COFACE 12 Tahun ("Fasilitas COFACE")

  Fasilitas ini berjumlah AS$157.243 untuk membiayai pembayaran 85% atas komponen yang dibuat di Perancis sesuai dengan Kontrak Satelit Palapa D ditambah 100% premi COFACE. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 5,69% yang terhutang setiap 6 bulanan. Jumlah pinjaman setelah periode ketersediaan akan dibayar kembali dalam 20 kali cicilan tengah tahunan. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan tengah tahunan akan dimulai 6 bulan setelah mana yang lebih dulu dari: (a) tanggal penyelesaian dari "*Satellite In-Orbit Acceptance Review*" sesuai dengan Kontrak Satelit Palapa D dan (b) tanggal 29 September 2009.

  Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah melakukan penarikan dari fasilitas kredit ini sejumlah AS$104.095,44 (setara dengan Rp1.139.845).

- Perjanjian Fasilitas Berjangka SINOSURE 12 Tahun ("Fasilitas SINOSURE")

  Fasilitas ini berjumlah AS$44.200 untuk membiayai pembayaran 85% atas Kontrak Layanan Peluncuran (*Launch Service Contract*). Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR dolar A.S. ditambah 0,35% per tahun, yang terhutang setiap 6 bulanan. Jumlah pinjaman setelah periode ketersediaan akan dibayar kembali dalam 20 kali cicilan tengah tahunan. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan tengah tahunan akan dimulai 6 bulan setelah mana yang lebih dulu dari: (a) tanggal penyelesaian dari "*Satellite In-Orbit Acceptance Review*" sesuai dengan Kontrak Satelit Palapa D dan (b) tanggal 29 September 2009.

  Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah melakukan penarikan dari fasilitas kredit ini sejumlah AS$28.600 (setara dengan Rp313.170).

Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi berberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

f. DBS

Pada tanggal 1 November 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dari DBS untuk pengeluaran modal dan pengeluaran umum Perusahaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000. Pinjaman ini dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,7% untuk tahun pertama dan 10,4% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulanan ditambah 1,5% per tahun. Bunga terhutang setiap triwulanan. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian.

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

f. DBS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2008, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman ini secara penuh.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pembayaran lebih awal secara sukarela diperbolehkan pada setiap tanggal pembayaran bunga tanpa dikenakan denda jika pembayaran tersebut dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal penarikan pertama dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya. Pembayaran lebih awal sebelum bulan ke-24 dari tanggal perjanjian diperbolehkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah yang dibayarkan.

g. Goldman Sachs International ("GSI")

Pada tanggal 30 Mei 2007, Perusahaan menerima pinjaman dari GSI sebesar Rp434.300 yang diterima dalam dolar A.S. sebesar AS$50.000 untuk membiayai pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun atas Rp434.300 dan terhutang setiap triwulan pada tanggal 28 Februari, 30 Mei, 30 Agustus dan 30 November mulai tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012.

Perjanjian ini memberikan opsi kepada GSI untuk melakukan konversi pinjaman tersebut menjadi pinjaman dolar A.S. sebesar AS$50.000 pada tanggal 30 Mei 2012 ("Opsi Konversi FX"). Nilai wajar Opsi Konversi FX pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah masing-masing sebesar AS$16.965,12 dan AS$8.172,79 (masing-masing setara dengan Rp185.768 dan Rp76.767). Apabila GSI mengambil opsi tersebut, maka mulai tanggal 30 Mei 2012, pinjaman akan dikenakan bunga tetap sebesar 6,45% per tahun atas pokok pinjaman AS$50.000 dan baik pinjaman maupun bunga dalam dolar A.S. akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan GSI tentang beberapa kejadian yang dapat menyebabkan terminasi pinjaman, diantaranya (i) perubahan yang berhubungan dengan perpajakan di Inggris atau Indonesia, (ii) kegagalan pelunasan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 (Catatan 15), (iii) kegagalan pelunasan Notes dolar A.S. dan obligasi rupiah Perusahaan (Catatan 15), (iv) penarikan kembali, pembelian, atau pembatalan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 (Catatan 15) dan tidak terdapat saldo Notes dolar A.S. Indosat karena penarikan kembali, pembelian, atau pembatalan dan (v) perubahan kendali dalam Perusahaan.

Pada tanggal 24 Juni 2008, Perusahaan menerima surat pernyataan melepaskan tuntutan (*waiver letter*) dari GSI yang menegaskan bahwa GSI tidak akan melakukan terminasi atas pinjaman sehubungan dengan perubahan kendali dalam Perusahaan (Catatan 17).

h. Pinjaman Komersial 9 Tahun dengan HSBC Cabang Jakarta, PT Bank Lippo Tbk dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta

Pada tanggal 27 November 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan HSBC Cabang Jakarta terkait dengan Pinjaman Komersial 9 Tahun sebesar AS$27.037 dari HSBC Cabang Jakarta untuk membiayai pembangunan dan peluncuran satelit serta pembayaran premi SINOSURE sehubungan dengan Fasilitas SINOSURE (Catatan 14e). Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR dolar A.S. ditambah 1,45% per tahun, yang terhutang setiap 6 bulanan.

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

h. Pinjaman Komersial 9 Tahun dengan HSBC Cabang Jakarta, PT Bank Lippo Tbk dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta (lanjutan)

Pembayaran pinjaman akan dilakukan dalam lima belas cicilan tengah tahunan setelah 24 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman (tanggal pembayaran pertama). Untuk 5 cicilan pertama, Perusahaan akan membayar masing-masing sebesar AS$1.351,85 dan sebesar AS$2.027,78 untuk cicilan berikutnya.

Perjanjian ini juga mengatur bahwa HSBC Cabang Jakarta dapat mengalihkan sebagian dari haknya atau melakukan transfer atas sebagian hak dan kewajibannya, seperti tertera dalam perjanjian, kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada tanggal 10 Maret 2008, HSBC Cabang Jakarta memindahkan hak dan kewajibannya kepada PT Bank Lippo Tbk dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta.

Pada tanggal 1 April 2008, Perusahaan menerima penarikan secara penuh untuk Pinjaman Komersial 9 Tahun. Penarikan ini terdiri dari AS$13.537 (setara dengan Rp124.527) dari HSBC Cabang Jakarta, AS$10.000 (setara dengan Rp91.990) dari PT Bank Lippo Tbk dan AS$3.500 (setara dengan Rp32.197) dari Bank of China Limited, Cabang Jakarta.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

i. Finnish Export Credit Ltd. (“FEC”)

Pada tanggal 12 Mei 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari FEC sebesar AS$38.000 dengan ABN-AMRO Bank N.V., Cabang Jakarta sebagai “pengatur pinjaman” (“arranger”) dan ABN-AMRO Bank N.V., Cabang Stockholm sebagai “fasilitator pinjaman” (“facility agent”) untuk pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 4,15% per tahun. Pokok pinjaman beserta dengan bunga, terhutang dalam cicilan tengah tahunan sampai dengan tanggal 12 Mei 2011.

Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan jika pembayaran dilakukan setelah 60 hari dari tanggal pinjaman dengan pemberitahuan 15 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar seluruh atau sebagian pinjaman (dengan jumlah minimum AS$10.000 dan kelipatan AS$1.000).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

j. Fasilitas Kredit Investasi 5 dari CIMB Niaga

Pada tanggal 10 Juli 2007, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari Niaga sebesar Rp50.000 untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer dan peralatan penunjang lainnya. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 1 bulanan ditambah 2,25% per tahun. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan 3 bulanan sebesar Rp5.000 dimulai pada tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011. Lintasarta telah melakukan penarikan seluruhnya dari fasilitas kredit ini.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh peralatan (Catatan 8) yang dibeli dari penerimaan fasilitas kredit ini.

Pinjaman ini juga mempunyai pembatasan yang sama seperti Fasilitas Kredit Investasi 3 dan 4 dari CIMB Niaga.

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

k. Fasilitas Kredit Investasi 4 dari CIMB Niaga

Pada tanggal 29 Agustus 2005, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga sebesar Rp45.000 untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer dan peralatan penunjang lainnya. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulanan ditambah 3% per tahun. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan 3 bulanan sebesar Rp4.500 dimulai pada tanggal 29 November 2006 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh peralatan (Catatan 8) yang dibeli dari penerimaan fasilitas kredit ini dan piutang usaha frame relay (Catatan 4).

Pinjaman ini juga mempunyai pembatasan yang sama seperti Fasilitas Kredit Investasi 3 dan 5 dari CIMB Niaga.

l. Fasilitas Kredit Investasi 3 dari CIMB Niaga

Pada tanggal 29 Juni 2004, Lintasarta memperoleh sebuah pinjaman dari fasilitas kredit dari CIMB Niaga untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer dan peralatan penunjang lainnya sebesar Rp98.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga deposito berjangka 3 bulanan yang dijamin oleh Bank Indonesia ditambah 3,5% per tahun. Pembayaran pokok pinjaman terhutang dalam cicilan 3 bulanan sebesar Rp9.800 dimulai pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh peralatan (Catatan 8) yang dibeli dari penerimaan fasilitas kredit ini, piutang usaha frame relay dan piutang usaha dari salah satu pelanggan Lintasarta (Catatan 4).

Pinjaman ini juga mempunyai pembatasan yang sama seperti Fasilitas Kredit Investasi 4 dan 5 dari CIMB Niaga, termasuk persetujuan tertulis sebelumnya dari CIMB Niaga untuk pinjaman baru yang diperoleh oleh Lintasarta.

Jadual pembayaran pokok semua pinjaman hutang jangka panjang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan sesudahnya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	Dua belas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2009	2010	2011	2012	2013 dan sesudahnya	Jumlah
Dalam rupiah						
Mandiri	200.000	300.000	300.000	1.000.000	-	1.800.000
BCA	200.000	300.000	300.000	1.000.000	-	1.800.000
DBS	50.000	50.000	75.000	75.000	250.000	500.000
GSI	-	-	-	-	434.300	434.300
CIMB Niaga	24.446	20.000	4.933	-	-	49.379
Sub-jumlah	**474.446**	**670.000**	**679.933**	**2.075.000**	**684.300**	**4.583.679**
Dalam dolar A.S.						
Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. (AS$450.000)	-	-	1.231.875	1.576.800	2.118.825	4.927.500
HSBC Perancis (AS$132.695,44)	-	145.301	145.301	145.301	1.017.112	1.453.015
Fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun (AS$27.037)	14.803	29.606	29.606	44.408	177.632	296.055

14. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

	Dua belas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2009	2010	2011	2012	2013 dan sesudahnya	Jumlah
Dalam dolar A.S. (lanjutan)						
FEC (AS$19.000)	83.220	83.220	41.610	-	-	208.050
GSI (AS$16.965,12)	-	-	-	-	185.768	185.768
Sub-jumlah	**98.023**	**258.127**	**1.448.392**	**1.766.509**	**3.499.337**	**7.070.388**
Jumlah	**572.469**	**928.127**	**2.128.325**	**3.841.509**	**4.183.637**	**11.654.067**

Dikurangi:	
- beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi	(237.594)
- diskon pinjaman yang belum diamortisasi	(31.844)
Bersih	**11.384.629**

Amortisasi beban emisi pinjaman dan diskon pinjaman adalah sebesar Rp15.331 pada tahun 2008, Rp9.132 pada tahun 2007 dan Rp10.928 pada tahun 2006 (Catatan 22).

15. HUTANG OBLIGASI

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007
Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp6.948 pada tahun 2008 dan Rp7.629 pada tahun 2007	2.593.052	2.592.371
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 - setelah dikurangi beban emisi hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp6.977 pada tahun 2008 dan Rp13.389 pada tahun 2007	2.563.503	2.804.511
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 - setelah dikurangi diskon hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp4.129 pada tahun 2008 dan Rp11.338 pada tahun 2007 dan beban emisi hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp8.649 pada tahun 2008 dan Rp23.781 pada tahun 2007	1.185.261	2.313.131
Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp4.256	1.075.744	-
Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp4.404 pada tahun 2008 dan Rp5.842 pada tahun 2007	810.596	809.158
Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp2.709 pada tahun 2008 dan Rp8.622 pada tahun 2007	637.291	2.491.378
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp2.229	567.771	-

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

	2008	2007
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.042 pada tahun 2008 dan Rp1.179 pada tahun 2007	398.958	398.821
Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat Tahun 2005 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.560 pada tahun 2008 dan Rp2.071 pada tahun 2007	283.440	282.929
Obligasi Indosat Kedua Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang	200.000	200.000
Obligasi Terbatas II yang diterbitkan oleh Lintasarta*	31.150	31.150
Obligasi Terbatas I yang diterbitkan oleh Lintasarta**	25.292	25.292
Jumlah hutang obligasi	10.372.058	11.948.741
Dikurangi bagian jangka pendek	56.442	1.860.000
Bagian jangka panjang	**10.315.616**	**10.088.741**

* setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas II yang diterbitkan kepada Perusahaan sejumlah Rp35.000
** setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas I yang diterbitkan kepada Perusahaan sejumlah Rp9.564

Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 29 Mei 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Kelima"), dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp2.600.000. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp1.230.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun mulai tanggal 29 Mei 2007. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2014.

- Obligasi Seri B sebesar Rp1.370.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,65% per tahun mulai tanggal 29 Mei 2007. Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2017.

Obligasi juga akan jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selaku agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi, sebagai berikut:

Seri A : Mulai tanggal 29 Agustus 2007 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 29 Mei 2014.
Seri B : Mulai tanggal 29 Agustus 2007 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 29 Mei 2017.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Hasil bersih obligasi ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap (lanjutan)

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva perusahaan, kecuali aktiva yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Juni 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010

Pada bulan Oktober 2003, Perusahaan, melalui IFB, menerbitkan *Guaranteed Notes* ("GN") Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap dan dengan nilai nominal keseluruhan sebesar AS$300.000. GN ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun terhutang dalam cicilan tengah-tahunan pada tanggal 5 Mei dan 5 November setiap tahun, mulai tanggal 5 Mei 2004. GN ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2010.

GN dapat ditarik kembali atas opsi IFB, seluruh atau sebagian, setiap saat pada atau setelah tanggal 5 November 2008. GN dapat ditarik kembali dengan harga 103,8750%, 101,9375% dan 100,0000% dari nilai pokok GN selama periode 12 bulan masing-masing mulai dari tanggal 5 November pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Lebih lanjut, sebelum tanggal 5 November 2006, IFB dapat menarik kembali sampai dengan 35% dari seluruh nilai pokok GN, dengan dana dari satu atau lebih penawaran saham umum (*Public Equity Offerings*) Perusahaan dengan harga 107,75% dari nilai pokok GN, ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada.

GN juga dapat ditarik kembali atas opsi IFB, seluruh tetapi tidak sebagian, setiap saat, dengan harga 103,5625% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penarikan kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi potongan pajak di Indonesia dan Belanda yang mensyaratkan IFB atau Perusahaan untuk membayar jumlah tambahan sehubungan dengan jumlah GN di atas jumlah tertentu. Atas perubahan kendali dari IFB (termasuk penjualan, pengalihan, penunjukan, penyewaan, pemindahan atau penghapusan seluruh atau sebagian besar aktiva IFB), pemegang GN berhak untuk meminta IFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya dengan harga 101% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada, pada tanggal pembelian.

Hasil bersih GN ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, diterima pada tanggal 5 November 2003 dan terutama digunakan untuk membayar sebagian hutang Indosat (termasuk Satelindo dan IM3) sebesar Rp1.500.000 dan AS$447.500.

Berdasarkan ketentuan GN, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

GN ini dijamin penuh oleh Perusahaan.

Pada tanggal 11 Januari 2006, IFB mengeluarkan *consent solicitation statement* ("solicitation") sehubungan dengan GN Jatuh Tempo Tahun 2010. Tujuan utama *solicitation* ini adalah untuk mengubah pembatasan tertentu dalam ketentuan GN Jatuh Tempo Tahun 2010 untuk menyesuaikan dengan persyaratan ketentuan dalam GN Jatuh Tempo Tahun 2012. Usulan amandemen terhadap ketentuan tersebut mencakup, antara lain, perubahan batas pinjaman yang diperkenankan untuk diperoleh IFB dan Lintasarta, dan kemampuan IFB untuk memperoleh pinjaman baru.

Pada tanggal 24 Januari 2006, IFB menerima persetujuan dari para pemegang GN Jatuh Tempo Tahun 2010 yang mewakili jumlah pokok pinjaman sebesar AS$239.526 atau 79,842% dari saldo GN tersebut.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juli 2008, IFB mengumumkan Penawaran atas Perubahan Kendali kepada semua pemegang GN 2010 (Catatan 17). Penawaran tersebut adalah untuk membeli GN 2010 dengan harga 101% dari nilai pokok ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pembayaran dan jumlah tambahan lainnya. Penawaran tersebut berakhir pada tanggal 17 September 2008. Pemegang GN melaksanakan haknya untuk meminta IFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya.

Pada tanggal 19 September 2008, IFB melakukan pembayaran sejumlah AS$67.805 (setara dengan Rp642.109) untuk bagian GN 2010 yang dibeli dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$65.253 (setara dengan Rp617.946) dengan harga 101% dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian dan biaya tambahan lainnya.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir, GN tersebut memiliki peringkat BB (yang dipublikasikan pada bulan November 2008) dan Ba2 (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2008), masing-masing dari Standard & Poor's ("S&P") dan Moody's Investors Service ("Moody's").

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012

Pada tanggal 22 Juni 2005, Perusahaan, melalui IIFB, menerbitkan GN Jatuh Tempo Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap dan dengan nilai nominal keseluruhan sebesar AS$250.000. GN ini diterbitkan dengan harga 99,323% dari nilai pokoknya. GN ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,125% per tahun terhutang dalam cicilan tengah-tahunan pada tanggal 22 Juni dan 22 Desember setiap tahun, mulai tanggal 22 Desember 2005. GN ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2012.

GN dapat ditarik kembali atas opsi IIFB, seluruh atau sebagian, setiap saat pada atau setelah tanggal 22 Juni 2010 dengan harga 103,5625%, 101,7813% dan 100,0000% dari nilai pokok GN selama periode 12 bulan masing-masing mulai dari tanggal 22 Juni pada tahun 2010, 2011 dan 2012, ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada. Lebih lanjut, sebelum tanggal 22 Juni 2008, IIFB dapat menarik kembali sampai dengan 35% dari seluruh nilai pokok GN, dengan dana dari satu atau lebih penawaran saham umum (*Public Equity Offerings*) Perusahaan dengan harga 107,125% dari nilai pokok GN, ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada. GN juga dapat ditarik kembali atas opsi IIFB, seluruh tetapi tidak sebagian, setiap saat, dengan harga 103,5625% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penarikan kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi potongan pajak di Indonesia dan Belanda yang mensyaratkan IIFB atau Perusahaan untuk membayar jumlah tambahan sehubungan dengan jumlah GN di atas jumlah tertentu. Atas perubahan kendali dari IIFB (termasuk penjualan, pengalihan, penunjukan, penyewaan, pemindahan atau penghapusan seluruh atau sebagian besar aktiva IIFB), pemegang GN berhak untuk meminta IIFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya dengan harga 101% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada, pada tanggal pembelian.

Hasil bersih GN ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, diterima pada tanggal 23 Juni 2005 dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Perusahaan, termasuk pengeluaran modal.

Berdasarkan ketentuan GN, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

GN ini dijamin penuh oleh Perusahaan.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juli 2008, IIFB mengumumkan Penawaran atas Perubahan Kendali kepada semua pemegang GN 2012 (Catatan 17). Penawaran tersebut adalah untuk membeli GN 2012 dengan harga 101% dari nilai pokok ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pembayaran dan jumlah tambahan. Penawaran tersebut berakhir pada tanggal 17 September 2008. Pemegang GN melaksanakan haknya untuk meminta IIFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya.

Pada tanggal 19 September 2008, IIFB melakukan pembayaran sejumlah AS$144.441 (setara dengan Rp1.367.858) untuk bagian GN 2012 yang dibeli dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$140.590 (setara dengan Rp1.331.387) dengan harga 101% dari nilai pokok yang dibeli kembali, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian dan biaya tambahan lainnya.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir, GN tersebut memiliki peringkat BB (yang dipublikasikan pada bulan November 2008) dan Ba2 (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2008), masing-masing dari S&P dan Moody's.

Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 9 April 2008, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Keenam"), dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp1.080.000. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp760.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun mulai tanggal 9 April 2008. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013.
- Obligasi Seri B sebesar Rp320.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,80% per tahun mulai tanggal 9 April 2008. Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2015.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

KSEI sebagai agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi, sebagai berikut:

Seri A : Mulai tanggal 9 Juli 2008 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 9 April 2013.
Seri B : Mulai tanggal 9 Juli 2008 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 9 April 2015.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 9 April 2008.

Hasil bersih obligasi ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva perusahaan, kecuali aktiva yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini. Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Juni 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 21 Juni 2005, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Keempat"), dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp815.000 dengan nilai nominal Rp50 per lembar obligasi. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun, terhutang dalam cicilan tiga-bulanan. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2011.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo jika Perusahaan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- *Opsi Pelunasan Awal* : Perusahaan mempunyai hak untuk membayar lebih awal seluruh obligasi pada ulang tahun emisi ke-4, pada tingkat harga 100% dari nominal obligasi.
- *Opsi Pembelian Kembali* : Setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva perusahaan, kecuali aktiva yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Juni 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 15 Oktober 2003, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Ketiga"), dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp2.500.000 dengan nilai nominal Rp50 per lembar obligasi. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp1.860.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,5% per tahun selama 5 tahun mulai tanggal 22 Oktober 2003.
- Obligasi Seri B sebesar Rp640.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,875% per tahun selama 7 tahun mulai tanggal 22 Oktober 2003.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo jika Perusahaan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- *Opsi Pelunasan Awal* : Perusahaan mempunyai hak untuk membayar lebih awal seluruh Obligasi Seri A pada ulang tahun emisi ke-4, pada tingkat harga 100% dari nominal obligasi. Perusahaan juga mempunyai hak untuk membayar lebih awal keseluruhan Obligasi Seri B pada ulang tahun emisi ke-4 dan ke-6 pada tingkat harga 100% dari nominal obligasi.
- *Opsi Pembelian Kembali* : Setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap (lanjutan)

KSEI sebagai agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi sebagai berikut:

Seri A : Mulai tanggal 22 Januari 2004 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 22 Oktober 2008.
Seri B : Mulai tanggal 22 Januari 2004 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 22 Oktober 2010.

Hasil obligasi ini digunakan untuk setoran modal ke Satelindo, yang selanjutnya digunakan untuk membayar hutangnya dan Obligasi Bunga Mengambang yang Dijamin.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva perusahaan, kecuali aktiva yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Pada tanggal 21 Oktober 2008, Perusahaan melakukan pelunasan secara penuh Obligasi Indosat Ketiga seri A sebesar Rp1.860.000.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 ("Sukuk Ijarah III")

Pada tanggal 9 April 2008, Perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah III, dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp570.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar.

Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp58.425, terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 April 2013.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 9 April 2008.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva perusahaan, kecuali aktiva yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Juni 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA$_{(sy)}$+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 ("Sukuk Ijarah II")

Pada tanggal 29 Mei 2007, Perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah II, dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp400.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2014.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar.

Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp40.800, terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva perusahaan, kecuali aktiva yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Juni 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}AA_{(sy)}$+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat Tahun 2005 ("Obligasi Syari'ah Ijarah")

Pada tanggal 21 Juni 2005, Perusahaan menerbitkan Obligasi Syari'ah Ijarah, dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp285.000 dengan nilai nominal Rp50 per lembar obligasi. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2011.

Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp34.200, terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo jika Perusahaan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- *Opsi Pelunasan Awal* : Perusahaan mempunyai hak untuk membayar lebih awal seluruh obligasi pada ulang tahun emisi ke-4, pada tingkat harga 100% dari nominal obligasi.
- *Opsi Pembelian Kembali* : Setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat Tahun 2005 ("Obligasi Syari'ah Ijarah") (lanjutan)

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva perusahaan, kecuali aktiva yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Juni 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}AA_{(sy)}$+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Indosat Kedua Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang

Pada tanggal 6 November 2002, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Kedua Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang ("Obligasi Indosat Kedua"), dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp1.075.000 dengan nilai nominal Rp50 per lembar obligasi. Obligasi tersebut terdiri dari tiga seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp775.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 15,75% per tahun mulai tanggal 6 Februari 2003. Obligasi Seri A jatuh tempo pada tanggal 6 November 2007.
- Obligasi Seri B berjumlah Rp200.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 16% per tahun selama 30 tahun mulai tanggal 6 Februari 2003. Obligasi tersebut akan jatuh tempo jika Perusahaan atau pemegang obligasi melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - *Opsi Beli* : Perusahaan mempunyai hak untuk membayar lebih awal seluruh Obligasi Seri B pada ulang tahun emisi ke-5, ke-10, ke-15, ke-20 dan ke-25 pada tingkat harga 101% dari nominal obligasi.
  - *Opsi Jual* : Pemegang obligasi mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan awal dari Perusahaan seharga 100% dari nominal obligasi pada: 1) setiap saat apabila peringkat obligasi turun menjadi $_{id}AA-$ atau lebih rendah (Opsi Jual Khusus) atau 2) ulang tahun emisi ke-15, ke-20 dan ke-25 (Opsi Jual Reguler).
- Obligasi Seri C berjumlah Rp100.000 memiliki tingkat bunga tetap untuk tahun pertama dimulai tanggal 6 Februari 2003 sebesar 15,625% per tahun dan tingkat bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tanggal 6 November 2007. Tingkat bunga mengambang dihitung berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia 3-bulanan terakhir ditambah marjin sebesar 1,625%. Tingkat bunga mengambang mempunyai batas maksimum sebesar 18,5% per tahun dan batas minimum sebesar 15% per tahun.

KSEI, sebagai agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi, sebagai berikut:

Seri A dan C	: Mulai tanggal 6 Februari 2003 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 6 November 2007.
Seri B	: Mulai tanggal 6 Februari 2003 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 6 November 2032.
- *Opsi Beli*	: Pada tanggal 6 Februari 2003 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan tanggal-tanggal 6 November 2007, 2012, 2017, 2022 dan 2027.
- *Opsi Jual*	: Pada tanggal 6 Februari 2003 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan tanggal-tanggal 6 November 2017, 2022 dan 2027.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman modal kerja dari Mandiri dan fasilitas pinjaman berjangka dari BCA.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Kedua Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang (lanjutan)

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva Perusahaan, kecuali aktiva yang dijaminkan secara khusus kepada para kreditur Perusahaan lainnya, menjadi jaminan *pari-passu* untuk seluruh kewajiban Perusahaan lainnya termasuk obligasi ini.

Pada tanggal 6 November 2007, Perusahaan melunasi secara penuh Obligasi Indosat Kedua Seri A dan C sejumlah Rp875.000.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Juni 2008, obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Terbatas II yang diterbitkan oleh Lintasarta

Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta mengadakan perjanjian dengan para pemegang sahamnya untuk menerbitkan Obligasi Terbatas II sebesar Rp66.150. Obligasi terbatas ini merupakan obligasi tanpa jaminan yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2009 dan memiliki tingkat bunga mengambang yang dihitung berdasarkan rata-rata deposito berjangka rupiah 3 bulanan Mandiri, BNI, BRI dan BTN ditambah premi tetap sebesar 3%. Batas maksimum tingkat bunga mengambang sebesar 19% dan batas minimum sebesar 11% per tahun. Bunga obligasi terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 14 September 2006.

Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas penerbitan Obligasi Terbatas II (Catatan 14).

Hasil Obligasi Terbatas II ini digunakan untuk pengeluaran modal dalam rangka pengembangan peralatan telekomunikasi Lintasarta.

Obligasi Terbatas I yang diterbitkan oleh Lintasarta

Pada bulan Juni 2003, Lintasarta mengadakan perjanjian dengan para pemegang sahamnya untuk menerbitkan Obligasi Terbatas I sejumlah Rp40.000. Obligasi terbatas ini merupakan obligasi tanpa jaminan yang jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2006 dan memiliki tingkat bunga tetap sebesar 16% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya.

Pada tanggal jatuh tempo, Lintasarta melunasi sebagian dari Obligasi Terbatas sejumlah Rp5.144 dan sisanya sebesar Rp34.856 diperpanjang waktu jatuh temponya sampai dengan tanggal 2 Juni 2009. Perpanjangan waktu jatuh tempo ini dibuat berdasarkan amandemen pertama Perjanjian Obligasi Terbatas I pada tanggal 14 Juni 2006. Obligasi ini memiliki tingkat bunga mengambang yang dihitung berdasarkan rata-rata deposito berjangka rupiah 3 bulanan Mandiri, BNI, BRI dan BTN ditambah premi tetap sebesar 3%. Batas maksimum tingkat bunga mengambang sebesar 19% dan batas minimum sebesar 11% per tahun. Bunga obligasi terhutang setiap tiga-bulanan.

Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas perubahan tanggal jatuh tempo dan nilai nominal dari Obligasi Terbatas I (Catatan 14).

Obligasi Syari'ah Mudharabah Indosat Tahun 2002 ("Obligasi Syari'ah Mudharabah")

Pada tanggal 6 November 2002, Perusahaan menerbitkan Obligasi Syari'ah Mudharabah, dengan BRI sebagai wali amanat. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp175.000 dengan nilai nominal Rp50 per lembar obligasi dan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2007.

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Syari'ah Mudharabah Indosat Tahun 2002 ("Obligasi Syari'ah Mudharabah") (lanjutan)

Setiap pemegang obligasi berhak atas Pendapatan Bagi Hasil ("PBH") yang dihitung berdasarkan nisbah dikalikan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merujuk pada pendapatan Satelindo dan IMM, masing-masing dari jasa satelit dan internet. Besarnya nisbah (dalam persentase) atas pendapatan satelit dan internet adalah sebagai berikut:

	Persentase (%)	
Tahun	**Satelit**	**Internet**
1	6,91	10,75
2	6,91	9,02
3	6,91	7,69
4	6,91	6,56
5	6,91	5,50

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dan para pemegang obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Syari'ah Mudharabah pada tanggal 1 Oktober 2003, Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang sebelumnya mengacu kepada pendapatan Satelindo dari jasa satelit berubah menjadi pendapatan Perusahaan dari jasa yang sama. Besarnya nisbah (dalam persentase) dari pendapatan satelit Perusahaan juga berubah menjadi sebagai berikut:

Tahun	**Persentase (%)**
1	6,91
2	9,34
3	9,34
4	9,34
5	9,34

KSEI, selaku agen pembayaran, akan membayar Pendapatan Yang Dibagihasilkan setiap tiga bulan mulai tanggal 6 Februari 2003 sampai dengan tanggal 6 November 2007.

Hasil obligasi digunakan untuk mengganti sebagian dana internal yang telah digunakan untuk pengembangan bidang usaha selular Indosat melalui akuisisi Satelindo.

Berdasarkan ketentuan obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aktiva tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aktiva Perusahaan, kecuali aktiva yang dijaminkan secara khusus kepada para kreditur Perusahaan lainnya, menjadi jaminan *pari-passu* untuk seluruh kewajiban Perusahaan lainnya termasuk obligasi ini.

Pada tanggal 6 November 2007, Perusahaan melunasi secara penuh Obligasi Syari'ah Mudharabah sebesar Rp175.000.

Obligasi Konversi yang diterbitkan oleh Lintasarta

Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diadakan pada bulan Maret 2002, para pemegang saham Lintasarta menyetujui, antara lain, deklarasi dividen kas sebesar Rp25.300 dimana sebesar Rp4.149 (setelah dikurangi pajak) telah dibayar di bulan Juni 2002. Sisa dividen didistribusikan dalam bentuk Obligasi Konversi tanpa jaminan dengan tingkat bunga tetap tahunan 19% dan dibayar setiap tiga-bulanan.

Pada tanggal 23 Mei 2003, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas penerbitan Obligasi Konversi tersebut (Catatan 14).

15. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Konversi yang diterbitkan oleh Lintasarta (lanjutan)

Berdasarkan amandemen pertama terhadap Perjanjian Obligasi Konversi tanggal 12 Juli 2004, tingkat bunga tetap Obligasi Konversi yang diterbitkan oleh Lintasarta diubah menjadi tingkat bunga mengambang. Tingkat bunga mengambang tersebut dihitung dari rata-rata tingkat bunga deposito berjangka rupiah 6 bulanan di Mandiri, BNI, BRI dan BTN, ditambah premi tetap sebesar 3%. Tingkat bunga mengambang tersebut mempunyai batas maksimum sebesar 19% dan batas minimum sebesar 11% per tahun. Amandemen pertama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2004.

Obligasi tersebut dikonversi menjadi saham Lintasarta dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada saat jatuh tempo tanggal 3 Juni 2007 (Catatan 1d).

Jadual pembayaran pokok hutang obligasi pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	Dua belas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013 dan sesudahnya ***	**Jumlah**
Dalam dolar A.S.						
Guaranteed Notes *						
Jatuh Tempo tahun 2010 (AS$234.747)	-	2.570.480	-	-	-	2.570.480
Jatuh Tempo tahun 2012 (AS$109.410)	-	-	-	1.198.039	-	1.198.039
Sub-jumlah	**-**	**2.570.480**	**-**	**1.198.039**	**-**	**3.768.519**
Dalam rupiah						
Obligasi Indosat Kelima *	-	-	-	-	2.600.000	2.600.000
Obligasi Indosat Keenam*	-	-	-	-	1.080.000	1.080.000
Obligasi Indosat Keempat *	-	-	815.000	-	-	815.000
Obligasi Indosat Ketiga *	-	640.000	-	-	-	640.000
Sukuk Ijarah III *	-	-	-	-	570.000	570.000
Sukuk Ijarah II *	-	-	-	-	400.000	400.000
Obligasi Syari'ah Ijarah *	-	-	285.000	-	-	285.000
Obligasi Indosat Kedua *	-	-	-	-	200.000	200.000
Obligasi Terbatas Lintasarta II	31.150	-	-	-	-	31.150
Obligasi Terbatas Lintasarta I	25.292	-	-	-	-	25.292
Sub-jumlah	**56.442**	**640.000**	**1.100.000**	**-**	**4.850.000**	**6.646.442**
Jumlah	**56.442**	**3.210.480**	**1.100.000**	**1.198.039**	**4.850.000**	**10.414.961**
Dikurangi :						
- beban emisi GN yang belum diamortisasi						(15.626)
- beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi						(23.148)
- diskon GN yang belum diamortisasi						(4.129)
Bersih						**10.372.058**

* Mengacu ke pembahasan sebelumnya mengenai opsi pelunasan awal untuk masing-masing obligasi/GN.

Amortisasi beban emisi hutang obligasi/GN dan diskon hutang GN sebesar Rp38.210 pada tahun 2008, Rp18.829 pada tahun 2007 dan Rp16.691 pada tahun 2006 (Catatan 22).

16. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terutama terdiri dari bagian jangka panjang dari imbalan pasca-kerja (Catatan 23), imbalan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (Catatan 23), imbalan kerja lainnya dan uang muka pelanggan.

17. MODAL SAHAM

Pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah	Persentase Kepemilikan (%)
2008			
Saham Seri A			
Pemerintah Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Indonesia Communications Limited, Mauritius	2.171.250.000	217.125	39,96
Pemerintah Republik Indonesia	776.624.999	77.662	14,29
Pemegang saham dengan persentase kepemilikan di atas 5% (Catatan 37):			
Fidelity Entities	553.479.050	55.348	10,19
Goldman Sachs (Asia) L.L.C	469.653.300	46.965	8,64
Noonday (Farallon Entities)	432.226.800	43.223	7,95
SKAGEN Funds (SKAGEN AS)	349.945.317	34.995	6,44
Indonesia Communications Pte. Ltd., Singapura	46.340.000	4.634	0,85
Direktur:			
Raymond Tan Kim Meng	222.500	22	0,01
Wahyu Wijayadi	152.500	15	0,00
Wong Heang Tuck	75.000	8	0,00
Johnny Swandi Sjam	30.000	3	0,00
Fadzri Sentosa	10.000	1	0,00
Publik lainnya (persentase pemilikan di bawah 5%)	633.924.033	63.392	11,67
Jumlah	**5.433.933.500**	**543.393**	**100,00**
2007			
Saham Seri A			
Pemerintah Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Indonesia Communications Limited, Mauritius	2.171.250.000	217.125	39,96
Pemerintah Republik Indonesia	776.624.999	77.662	14,29
JP Morgan Chase Bank U.S. Resident (Norbax, Inc.) (pemegang saham dengan persentase kepemilikan diatas 5% - Catatan 37)	308.712.900	30.871	5,68
Indonesia Communications Pte. Ltd., Singapura	46.340.000	4.634	0,85
Komisaris - Lee Theng Kiat	135.000	14	0,00
Direktur:			
Raymond Tan Kim Meng	222.500	22	0,01
Wahyu Wijayadi	152.500	15	0,00
Wong Heang Tuck	75.000	8	0,00
Johnny Swandi Sjam	30.000	3	0,00
Fadzri Sentosa	10.000	1	0,00
Publik lainnya (persentase pemilikan di bawah 5%)	2.130.380.600	213.038	39,21
Jumlah	**5.433.933.500**	**543.393**	**100,00**

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Saham "Seri A" adalah saham khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mempunyai hak suara khusus. Hak dan batasan yang berlaku pada saham "Seri B" juga berlaku bagi saham "Seri A", kecuali bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat mengalihkan saham "Seri A", dan mempunyai hak veto sehubungan dengan (i) perubahan maksud dan tujuan Perusahaan; (ii) penambahan modal tanpa hak memesan terlebih dahulu; (iii) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; (iv) perubahan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak saham "Seri A" sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; dan (v) pembubaran dan likuidasi Perusahaan. Saham "Seri A" juga memiliki hak untuk menunjuk satu orang direktur dan satu orang komisaris Perusahaan.

Berdasarkan surat dari ICL kepada Perusahaan tanggal 2 Maret 2004, mengenai pemberitahuan penjaminan saham Perusahaan, ICL memberitahukan kepada Perusahaan bahwa ICL menjaminkan hampir seluruh saham "Seri B" Perusahaan yang dimilikinya sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh STT Communications Limited ("STTC"), pemegang saham tunggal ICL, dari pihak ketiga.

Pada tanggal 5 Mei 2006, Indonesia Communications Pte. Ltd., Singapura ("ICLS"), anak perusahaan yang dimiliki penuh oleh STTC, melaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") bahwa ICLS telah membeli sejumlah 46.340.000 saham "Seri B" Perusahaan dari pasar.

Pada tanggal 27 Februari 2007, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Standard Chartered Bank, agen sekuritas, mengenai pembebasan jaminan saham Perusahaan yang dimiliki ICL atas fasilitas pinjaman yang diperoleh STTC.

Pada tanggal 1 Maret 2007, STTC menjual 25% kepemilikannya di Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. ("AMH") ke Qatar Telecom ("Qtel"), sehingga kepemilikan STTC di AMH turun menjadi 75%. AMH memiliki secara langsung ICL dan ICLS.

Pada tanggal 6 Juni 2008, STTC menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (*Share Purchase Agreement*) untuk menjual 75% kepemilikannya di ICL dan ICLS kepada Qtel. Proses penutupan dari penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juni 2008, dan menyebabkan kepemilikan langsung Qtel atas ICL dan ICLS. Sebagai akibatnya, Qtel menjadi pemegang saham utama di Perusahaan (Catatan 14g dan 15).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, ICL dan ICLS memiliki sejumlah 2.217.590.000 saham Seri B yang setara dengan 40,81% kepemilikan pada Perusahaan.

Sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham Karyawan oleh Perusahaan sejak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan 31 Juli 2006, sejumlah 256.433.500 saham Seri B telah diterbitkan dengan jumlah agio saham sebesar Rp873.512.

18. PENDAPATAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007	2006
Selular			
Pendapatan pemakaian	7.021.877	6.542.933	5.317.871
Fitur	5.095.088	4.185.286	3.022.735
Pendapatan interkoneksi (Catatan 31)	1.825.957	1.847.486	697.265
Pendapatan jasa penyambungan	68.461	79.115	103.506
Pendapatan langganan bulanan	66.302	20.372	9.924
Lain-lain	101.237	77.304	76.236
Sub-jumlah	**14.178.922**	**12.752.496**	**9.227.537**

18. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

	2008	2007	2006
MIDI			
Internet	703.914	570.041	422.037
IP VPN	610.819	396.644	244.328
World link dan direct link	456.692	370.804	302.091
Frame net	315.791	305.125	387.276
Sewa jaringan	231.570	163.043	146.492
Digital data network	124.891	100.266	151.454
Jasa aplikasi	118.895	98.626	72.865
Sewa satelit	96.280	95.682	124.473
TV link	8.679	6.947	14.765
Lain-lain	67.964	61.406	36.808
Sub-jumlah	**2.735.495**	**2.168.584**	**1.902.589**
Telekomunikasi Tetap			
Telepon Internasional			
Percakapan telepon dari luar negeri ke Indonesia ("*incoming calls*")	1.265.968	964.865	541.744
Percakapan telepon ke luar negeri ("*outgoing calls*")	107.099	265.323	315.995
Telepon jaringan tetap nirkabel	244.304	218.702	149.906
Telepon jaringan tetap	126.660	117.384	98.886
Lain-lain	685	1.141	2.750
Sub-jumlah	**1.744.716**	**1.567.415**	**1.109.281**
Jumlah	**18.659.133**	**16.488.495**	**12.239.407**

Pendapatan usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa berjumlah Rp1.790.115, Rp2.082.642 dan Rp954.027 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Jumlah ini merupakan 9,59%, 12,63% dan 7,79% dari jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk tahun 2008, 2007 dan 2006 (Catatan 24).

Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi disajikan secara kotor, kecuali untuk pendapatan usaha yang didasarkan pada perjanjian pembagian kontraktual (Catatan 2o). Pada tahun 2007, Perusahaan menandatangani beberapa nota kesepakatan untuk mengubah perjanjian interkoneksi pembagian pendapatan yang ada dan untuk mencerminkan skema interkoneksi berbasis biaya yang baru berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 (Catatan 31).

19. BEBAN USAHA - JASA TELEKOMUNIKASI

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007	2006
Interkoneksi (Catatan 30)	1.690.407	1.518.127	184.261
Biaya hak penggunaan frekuensi radio	993.082	759.747	461.468
Pemeliharaan	903.244	765.638	585.158
Listrik, gas dan air	507.985	289.079	204.580
Sewa sirkit	447.319	331.830	280.077
Harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang	391.101	311.723	330.387
Sewa	361.319	261.855	213.300

19. BEBAN USAHA - JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

	2008	2007	2006
Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi	170.321	145.917	115.305
USO (Catatan 30)	123.452	109.377	86.779
Harga pokok modem dan *handset*	111.537	24.151	-
Pemasangan	88.179	35.213	21.264
Pengiriman dan transportasi	84.825	74.517	54.591
Penagihan dan penerimaan	49.209	54.043	54.565
Perizinan	46.603	20.335	15.290
Komunikasi	9.739	5.681	14.698
Asuransi	2.997	3.836	3.684
Lain-lain	62.095	68.814	78.766
Jumlah	**6.043.414**	**4.779.883**	**2.704.173**

Beban interkoneksi berkaitan dengan keterhubungan (interkoneksi) antara jaringan telekomunikasi milik Perusahaan dengan jaringan milik Telkom atau penyelenggara telekomunikasi lainnya (Catatan 2o).

20. BEBAN USAHA - KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007	2006
Gaji dan honorarium	420.297	348.282	328.781
Insentif dan tunjangan lainnya	287.889	275.282	257.003
Bonus	279.483	301.587	166.610
Tunjangan pajak penghasilan karyawan	251.950	230.379	205.702
Tunjangan kesehatan masa pensiun (Catatan 23)	120.147	106.109	86.152
Tenaga kontrak	115.890	135.683	116.316
Pengobatan	61.220	61.616	52.566
Beban pensiun (Catatan 23)	36.796	47.266	30.174
Penyelesaian pemutusan hubungan kerja, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Catatan 23)	27.581	23.594	20.233
Pensiun dini*	19.598	58.104	69.630
Lain-lain	18.142	6.884	17.301
Jumlah	**1.638.993**	**1.594.786**	**1.350.468**

* Pada tanggal 27 Juni 2006, Direksi Perusahaan mengeluarkan Keputusan No. 051/DIREKSI/2006 tentang "Manfaat Tambahan bagi Karyawan yang mengajukan Pengunduran Diri Sukarela". Berdasarkan keputusan ini, karyawan yang memenuhi syarat untuk pensiun dini dan sukarela mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Direksi diberikan manfaat tambahan berupa tambahan gaji, uang perjalanan dan paket pelatihan. Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, terdapat masing-masing 41, 108 dan 169 karyawan yang mengambil opsi tersebut.

Beban karyawan yang dikapitalisasi ke aktiva dalam pembangunan dan pemasangan masing-masing sebesar Rp37.111, Rp51.979 dan Rp39.794 pada tahun 2008, 2007 dan 2006.

21. BEBAN USAHA - ADMINISTRASI DAN UMUM

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007	2006
Sewa	141.245	125.271	127.525
Transportasi	122.987	110.984	99.413
Honorarium tenaga ahli	116.043	96.322	85.153
Penyisihan piutang ragu-ragu (Catatan 4)	74.281	115.030	110.224
Listrik, gas dan air	60.760	54.701	49.601
Kantor	49.673	32.001	26.883
Pelatihan, pendidikan dan penelitian	39.443	33.273	28.879
Asuransi	26.093	27.193	35.552
Makan karyawan	22.045	26.726	31.683
Komunikasi	20.203	14.166	12.257
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp20.000)	64.659	70.457	56.751
Jumlah	**737.432**	**706.124**	**663.921**

22. BEBAN LAIN-LAIN - BEBAN PENDANAAN

Akun ini terdiri dari:

	2008	2007	2006
Bunga pinjaman	1.776.514	1.396.142	1.204.642
Amortisasi beban emisi pinjaman dan hutang obligasi dan diskon (Catatan 14 dan 15)	53.541	27.961	27.619
Rugi atas pembelian kembali GN 2010 dan GN 2012 (Catatan 15)	19.493	-	-
Biaya bank	8.746	4.501	3.157
Biaya *solicitation* (Catatan 15)	-	-	13.481
Jumlah	**1.858.294**	**1.428.604**	**1.248.899**

23. DANA PENSIUN

Perusahaan, Satelindo dan Lintasarta menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perusahaan, Satelindo dan Lintasarta menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk karyawannya dimana manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, mengelola program pensiun ini. Kontribusi pensiun ditentukan dengan perhitungan aktuaria secara periodik yang dilakukan oleh Jiwasraya.

Berdasarkan amandemen program pensiun Perusahaan tanggal 22 Desember 2000, yang diamandemen lebih lanjut pada tanggal 29 Maret 2001, pola manfaat dan pembayaran premi diubah. Sebelum amandemen tersebut, premi dibayar tahunan sampai program tersebut dibiayai penuh dan manfaat terdiri dari manfaat pensiun (pensiun rutin bulanan atau *lump-sum*) dan asuransi kematian. Sehubungan dengan amandemen tersebut, jumlah premi yang jatuh tempo pada tanggal 1 September 2000 untuk membiayai penuh program ini dihitung dan dibayarkan dalam beberapa tahap sampai dengan bulan Januari 2002. Amandemen tersebut juga mencakup tambahan manfaat dalam bentuk Pensiun Hari Tua bulan ketigabelas yang dibayarkan setiap tahun yaitu empat belas hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.

23. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Amandemen ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 1 September 2000 dan termasuk kenaikan gaji dasar pensiun sebesar 9% secara majemuk setiap tahun terhitung sejak 1 September 2001. Amandemen ini juga menyatakan bahwa tidak akan dilakukan kenaikan premi, termasuk jika terjadi pemberhentian karyawan secara massal atau perubahan status perkawinan.

Jumlah cicilan premi keseluruhan berdasarkan amandemen perjanjian adalah sebesar Rp355.000, yang dibayarkan Perusahaan pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 1 Maret 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Jiwasraya untuk penyediaan program asuransi kematian pasti untuk 1.276 karyawan pada tanggal 1 Januari 2007, yang tidak tercatat sebagai peserta program pensiun manfaat pasti seperti yang dijelaskan di atas. Berdasarkan perjanjian tersebut, karyawan akan menerima:

- Jaminan ekspirasi setara dengan nilai tunai pada usia pensiun normal, atau
- Jaminan kematian bukan karena kecelakaan setara dengan 100% uang asuransi ditambah nilai tunai ketika karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan, atau
- Jaminan kematian karena kecelakaan setara dengan 200% uang asuransi ditambah nilai tunai ketika karyawan meninggal dunia karena kecelakaan.

Premi sebesar Rp7.600 dibayarkan secara penuh pada tanggal 29 Maret 2007. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2007 dan bulan Februari sampai dengan Desember 2008, Perusahaan melakukan pembayaran premi tambahan masing-masing sebesar Rp275 untuk tambahan 55 karyawan dan Rp805 untuk tambahan 161 orang karyawan.

Pada tanggal 25 Juni 2003, Satelindo menandatangani perjanjian dengan Jiwasraya untuk mengubah pola manfaat dan pembayaran premi program pensiun sebelumnya. Amandemen ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 25 Desember 2002 sampai dengan tanggal 25 Juni 2003. Ketentuan lain yang baru mencakup hal-hal berikut:

- Kenaikan gaji dasar pensiun sebesar 6% secara majemuk setiap tahun terhitung sejak tanggal 25 Desember 2002
- Tunjangan pensiun bulan ketigabelas yang dibayarkan setiap tahun yaitu empat belas hari menjelang hari raya Idul Fitri
- Kenaikan pembayaran berkala manfaat pensiun sebesar 6% secara majemuk setiap tahun terhitung sejak satu tahun setelah menerima manfaat pensiun berkala yang pertama
- Apabila tingkat bunga rata-rata tahunan deposito berjangka bank pemerintah melebihi 15%, manfaat pensiun peserta program pensiun akan meningkat sebesar persentase tertentu sesuai dengan formula yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 15 April 2005, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan Jiwasraya untuk menggantikan perjanjian yang ada. Berdasarkan pada perjanjian yang baru, pola manfaat dan pembayaran premi diubah. Perjanjian ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2005. Jumlah cicilan premi berdasarkan perjanjian adalah sebesar Rp61.623 dan terhutang dalam 10 cicilan tahunan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

23. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Perjanjian baru ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 1 April 2003. Ketentuan lain yang baru mencakup hal-hal berikut:

- Kenaikan gaji dasar pensiun sebesar 3% (sebelumnya diproyeksikan 8%) secara majemuk setiap tahun terhitung sejak 1 April 2003
- Kenaikan pembayaran berkala manfaat pensiun sebesar 5% secara majemuk setiap tahun dimulai sejak satu tahun setelah menerima manfaat pensiun berkala yang pertama
- Apabila tingkat bunga rata-rata tahunan deposito berjangka bank pemerintah melebihi 15%, manfaat pensiun peserta program pensiun akan meningkat sebesar persentase tertentu sesuai dengan formula yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 2 Mei 2005, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan Jiwasraya untuk mengubah perjanjian di atas. Amandemen ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 1 April 2003 sampai dengan tanggal 30 November 2004 dengan jumlah tambahan 10 cicilan premi tahunan sejumlah Rp1.653 yang terhutang mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

Kontribusi dari Lintasarta ke Jiwasraya berjumlah Rp9.653, Rp9.968 dan Rp9.999 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

Beban pensiun berkala bersih program pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dihitung berdasarkan penilaian aktuaria masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Penilaian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *"projected-unit-credit"* dan dengan menggunakan asumsi berikut:

	2008	2007	2006
Tingkat diskonto tahunan	12,0%	10,0%	10,5%
Ekspektasi tingkat pengembalian aktiva dana pensiun tahunan	4,5 - 9,0%	4,5 - 9,0%	10,0%
Tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun	3,0 - 9,0%	3,0 - 9,0%	3,0 - 9,0%
Tabel kematian	TMI 1999	TMI 1999	CSO 1980

a. Komposisi beban pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Beban bunga	66.100	63.417	63.649
Beban jasa	29.502	38.801	37.660
Amortisasi atas rugi aktuaria yang belum diakui	5.088	5.577	-
Pengakuan segera biaya jasa lalu - manfaat tertanam	-	4.078	-
Pengembalian aktiva dana pensiun	(63.894)	(64.607)	(71.135)
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 20)	**36.796**	**47.266**	**30.174**

23. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

b. Status pendanaan program pensiun pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Nilai wajar aktiva dana pensiun	805.199	730.787
Kewajiban pensiun yang diproyeksikan	(541.239)	(672.145)
Kelebihan aktiva dana pensiun atas kewajiban pensiun yang diproyeksikan	263.960	58.642
Rugi (laba) aktuaria yang belum diakui	(90.860)	142.349
Pensiun dibayar di muka - bersih	**173.100**	**200.991**

c. Perubahan pensiun dibayar di muka selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Saldo awal		
Perusahaan	187.801	225.296
Lintasarta	13.190	8.278
Beban pensiun berkala bersih		
Perusahaan	(33.607)	(43.394)
Lintasarta	(3.189)	(3.872)
Pengembalian dari Jiwasraya		
Perusahaan	(558)	(1.976)
Lintasarta	(995)	(1.184)
Kontribusi ke Jiwasraya		
Perusahaan	805	7.875
Lintasarta	9.653	9.968
Saldo akhir		
Perusahaan	**154.441**	**187.801**
Lintasarta	**18.659**	**13.190**

d. Pensiun dibayar di muka terdiri dari:

	2008	2007
Bagian jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari "Biaya Dibayar di Muka")		
Perusahaan	2.712	2.128
Lintasarta	402	503
	3.114	2.631

23. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

	2008	2007
Bagian jangka panjang		
Perusahaan	151.729	185.673
Lintasarta	18.257	12.687
	169.986	198.360
Jumlah pensiun dibayar di muka	**173.100**	**200.991**

Aktiva dana pensiun pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 terutama terdiri dari deposito berjangka, efek hutang, investasi jangka panjang dalam bentuk saham dan properti.

Program Pensiun Iuran Pasti

Pada bulan Mei 2001 dan Januari 2003, Perusahaan dan Satelindo membantu karyawan mereka untuk memiliki program pensiun iuran pasti, sebagai tambahan atas program pensiun manfaat pasti seperti disebut di atas. Mulai bulan Juni 2004, Perusahaan juga membantu karyawan eks-IM3 untuk memiliki program pensiun iuran pasti. Berdasarkan program pensiun iuran pasti tersebut, kontribusi karyawan adalah sebesar 10% - 20% dari gaji pokoknya, sedangkan Perusahaan tidak memberikan kontribusi. Jumlah kontribusi karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah masing-masing sebesar Rp16.866, Rp15.842 dan Rp16.686. Aktiva dana pensiun dikelola oleh tujuh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Satelindo, berdasarkan pilihan karyawan.

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Perusahaan, Lintasarta dan IMM mencatat beban manfaat karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ("UUK") No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Karyawan mereka akan menerima manfaat sejumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini atau program pensiun manfaat pasti, mana yang lebih tinggi.

Beban pensiun berkala bersih berdasarkan UUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dihitung berdasarkan penilaian aktuaria masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Penilaian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "*projected-unit-credit*" dan dengan menggunakan asumsi berikut:

	2008	2007	2006
Tingkat diskonto tahunan	12,0%	10,0%	10,5%
Tingkat kenaikan kompensasi tahunan	11,0%	10,0%	10,0%

a. Komposisi beban pensiun berkala berdasarkan UUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Beban jasa	16.779	13.201	11.709
Beban bunga	10.357	9.160	7.230
Amortisasi rugi akturia yang belum diakui	445	662	1.294
Pengakuan segera biaya jasa lalu - manfaat tertanam	-	571	-
Beban pensiun berkala (Catatan 20)	**27.581**	**23.594**	**20.233**

23. DANA PENSIUN (lanjutan)

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (lanjutan)

b. Komposisi beban pensiun yang masih harus dibayar berdasarkan UUK pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Kewajiban pensiun yang diproyeksikan	156.444	104.527
Rugi aktuaria yang belum diakui	(43.115)	(16.191)
Beban pensiun masih harus dibayar	**113.329**	**88.336**

c. Perubahan beban pensiun yang masih harus dibayar berdasarkan UUK selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Saldo awal		
Perusahaan	78.604	62.972
Lintasarta	7.013	5.450
IMM	2.719	978
Beban pensiun berkala		
Perusahaan	24.440	20.290
Lintasarta	1.642	1.563
IMM	1.499	1.741
Pembayaran manfaat		
Perusahaan	(2.526)	(4.658)
Lintasarta	(46)	-
IMM	(16)	-
Saldo akhir		
Perusahaan	**100.518**	**78.604**
Lintasarta	**8.609**	**7.013**
IMM	**4.202**	**2.719**

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, biaya pensiun berdasarkan UUK disajikan sebagai bagian dari biaya masih harus dibayar (Catatan 13) masing-masing sebesar Rp2.155 dan Rp1.828 untuk bagian jangka pendek dan masing-masing sebesar Rp111.174 dan Rp86.508 dalam kewajiban tidak lancar lainnya (Catatan 16) untuk bagian jangka panjang.

Jaminan Kesehatan Masa Pensiun

Perusahaan menyediakan jaminan kesehatan masa pensiun untuk para karyawannya yang meninggalkan Perusahaan setelah memenuhi persyaratan pensiun dini. Pasangan dan anak-anak dari karyawan yang telah terdaftar secara resmi dalam catatan administrasi Perusahaan juga memenuhi syarat untuk menerima manfaat tersebut. Jika karyawan tersebut meninggal dunia, pasangan dan anak-anak dari karyawan tersebut masih memenuhi syarat untuk menerima jaminan kesehatan masa pensiun sampai dengan pasangan tersebut meninggal atau menikah kembali dan anak-anak tersebut mencapai usia 25 atau telah menikah.

23. DANA PENSIUN (lanjutan)

Jaminan Kesehatan Masa Pensiun (lanjutan)

Pemanfaatan dari jaminan kesehatan masa pensiun ini dibatasi sampai dengan batas maksimum tahunan yang mengacu ke pensiun bulanan dari Jiwasraya sebagai berikut:

- 16 kali dari pensiun bulanan Jiwasraya untuk pensiunan yang menerima pensiun bulanan dari Jiwasraya
- 16 kali setara dengan pensiun bulanan untuk pensiunan yang menjadi pegawai tetap setelah tanggal 1 September 2000
- 16 kali dari pensiun bulanan terakhir untuk pensiunan yang pensiun setelah tanggal 1 Juli 2003 dan tidak menerima pensiun bulanan Jiwasraya.

Beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dihitung berdasarkan penilaian aktuaria masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Penilaian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "*projected-unit-credit*" dan dengan menggunakan asumsi berikut:

	2008	2007	2006
Tingkat diskonto tahunan	12,0%	10,0%	10,5%
Tingkat tren biaya maksimum	6,0%	6,0%	8,0%
Tingkat tren tahun depan	18,0%	18,0%	16,0%
Periode untuk mencapai tingkat tren biaya maksimum	6 tahun	6 tahun	4 tahun

a. Komposisi beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Beban bunga	76.300	54.944	41.413
Amortisasi rugi aktuaria yang belum diakui	16.398	8.086	5.077
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum diakui	10.452	10.452	10.452
Beban jasa	16.997	32.627	28.043
Manfaat tambahan sehubungan dengan pensiun dini	-	-	1.167
Beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala (Catatan 20)	**120.147**	**106.109**	**86.152**

b. Komposisi beban jaminan kesehatan masa pensiun masih harus dibayar pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Kewajiban pensiun yang diproyeksikan	492.615	767.828
Rugi (laba) aktuaria yang belum diakui	43.315	(333.412)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(52.158)	(62.610)
Beban jaminan kesehatan masa pensiun masih harus dibayar	**483.772**	**371.806**

23. DANA PENSIUN (lanjutan)

Jaminan Kesehatan Masa Pensiun (lanjutan)

c. Perubahan beban jaminan kesehatan masa pensiun masih harus dibayar selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Saldo awal	371.806	272.958
Beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala bersih	120.147	106.109
Pembayaran manfaat	(8.181)	(7.261)
Saldo akhir	**483.772**	**371.806**

d. Efek dari kenaikan 1% dalam tingkat tren biaya jaminan kesehatan masa pensiun yang diasumsikan akan menghasilkan beban jasa dan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dan akumulasi kewajiban jaminan kesehatan masa pensiun pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Beban jasa dan bunga	94.418	137.426	96.680
Akumulasi kewajiban jaminan kesehatan masa pensiun	588.492	943.774	579.973

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, jaminan kesehatan masa pensiun disajikan sebagai bagian dari biaya masih harus dibayar (Catatan 13) masing-masing sebesar Rp9.654 dan Rp9.661 untuk bagian jangka pendek, dan masing-masing sebesar Rp474.118 dan Rp362.145 dalam kewajiban tidak lancar lainnya (Catatan 16) untuk bagian jangka panjang.

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Rincian akun dan transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi, kecuali disebutkan lain) adalah sebagai berikut:

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aktiva/Kewajiban (%)	
	2008	2007	2008	2007
Kas dan setara kas (Catatan 3)				
Bank-bank milik negara	4.537.105	3.919.899	8,78	8,65
Bank-bank swasta*	-	1.034.499	-	2,29
Jumlah	**4.537.105**	**4.954.398**	**8,78**	**10,94**
Piutang usaha (Catatan 4)				
Telkom	32.801	38.208	0,06	0,08
PT Televisi Republik Indonesia (Persero) ("TVRI")	27.016	43.745	0,05	0,10
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	20.346	4.110	0,04	0,01
Bank-bank milik negara	17.644	32.253	0,04	0,07
PT Pos Indonesia (Persero)	11.966	9.329	0,02	0,02
PT Citra Sari Makmur ("CSM")	10.932	4.875	0,02	0,01
PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")	6.419	11.618	0,01	0,03
Lembaga Kantor Berita Negara ("LKBN") Antara	650	1.049	0,00	0,00
StarHub Pte. Ltd. ("StarHub"), Singapura *	-	53.452	-	0,12
Singapore Telecommunications Ltd. ("SingTel"), Singapura *	-	945	-	0,00
Lain-lain	17.748	22.103	0,04	0,05
Jumlah	145.522	221.687	0,28	0,49
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	69.444	88.342	0,13	0,20
Bersih	**76.078**	**133.345**	**0,15**	**0,29**

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aktiva/Kewajiban (%)	
	2008	2007	2008	2007
Biaya dibayar di muka				
Depkominfo	632.350	397.946	1,22	0,87
Jiwasraya	3.114	2.631	0,01	0,01
Kopindosat	2.790	2.810	0,01	0,01
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	1.648	-	0,00	-
Telkom	1.434	-	0,00	-
Lain-lain	2.091	3.494	0,00	0,01
Jumlah	**643.427**	**406.881**	**1,24**	**0,90**
Aktiva lancar lainnya				
Bank-bank milik negara	29.740	16.667	0,06	0,04
Lain-lain	7	7	0,00	0,00
Jumlah	**29.747**	**16.674**	**0,06**	**0,04**
Piutang hubungan istimewa				
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	23.629	24.668	0,05	0,06
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	7.153	-	0,01	-
Kopindosat	5.958	5.949	0,01	0,01
Telkomsel	2.892	22.401	0,01	0,05
Karyawan kunci	817	2.084	0,00	0,00
Bank - bank milik negara	-	1.480	-	0,00
Lain-lain	4.466	2.130	0,01	0,01
Jumlah	44.915	58.712	0,09	0,13
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	2.419	2.257	0,01	0,01
Bersih	**42.496**	**56.455**	**0,08**	**0,12**
Pensiun dibayar di muka jangka panjang (Catatan 23)				
Jiwasraya	**169.986**	**198.360**	**0,33**	**0,44**
Uang muka jangka panjang				
Kopindosat	2.577	2.464	0,01	0,00
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	1.830	3.472	0,00	0,01
PT Nexwave *	-	3.557	-	0,01
PT SCS Astra Graphia Technologies *	-	68	-	0,00
Jumlah	**4.407**	**9.561**	**0,01**	**0,02**
Aktiva tidak lancar - lain-lain				
Bank-bank milik negara	32.520	36.654	0,06	0,08
Telkom	21.032	22.370	0,04	0,05
Kopindosat	12.288	10.669	0,03	0,02
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4.744	-	0,01	-
Lain-lain	1.733	5.231	0,00	0,01
Jumlah	**72.317**	**74.924**	**0,14**	**0,16**

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aktiva/Kewajiban (%)	
	2008	2007	2008	2007
Hutang usaha				
Indonesia Comnet Plus ("Comnet")	5.226	-	0,02	-
Qtel **	1.699	-	0,01	-
Telkom	431	1.646	0,00	0,01
Telkomsel	-	13.213	-	0,05
Optus *	-	2.226	-	0,01
Lain-lain	4.753	23.403	0,01	0,08
Jumlah	**12.109**	**40.488**	**0,04**	**0,15**
Hutang pengadaan (Catatan 11)				
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	34.737	92.931	0,10	0,33
Kopindosat	25.240	37.441	0,08	0,13
PT Personel Alih Daya	17.739	14.652	0,05	0,05
PT NexWave *	-	16.638	-	0,06
PT SCS Astra Graphia Technologies *	-	6.496	-	0,02
Lain-lain	2	-	0,00	-
Jumlah	**77.718**	**168.158**	**0,23**	**0,59**
Biaya masih harus dibayar				
Departemen Komunikasi dan Informatika	345.424	376.677	1,03	1,32
Kopindosat	18.441	21.991	0,05	0,08
Karyawan kunci	17.524	26.046	0,05	0,09
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	3.330	-	0,01	-
Lain-lain	4.872	6.170	0,01	0,02
Jumlah	**389.591**	**430.884**	**1,15**	**1,51**
Kewajiban lancar lainnya				
Telkomsel	2.738	2.560	0,01	0,01
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	-	24.184	-	0,08
Starhub *	-	177	-	0,00
Lain-lain	620	-	0,00	-
Jumlah	**3.358**	**26.921**	**0,01**	**0,09**
Hutang hubungan istimewa				
TVRI	6.910	2.262	0,02	0,01
PT Pos Indonesia (Persero)	3.813	48	0,01	0,00
Bank-bank milik negara	2.072	1.875	0,01	0,01
Kopindosat	1.303	1.509	0,00	0,00
Telkom	601	45.487	0,00	0,16
Comnet	-	5.373	-	0,02
Lain-lain	-	8.296	-	0,03
Jumlah	**14.699**	**64.850**	**0,04**	**0,23**
Hutang jangka panjang (Catatan 14)				
Bank milik negara	**1.796.142**	**1.994.909**	**5,28**	**7,01**
Kewajiban tidak lancar lainnya				
Telkomsel	9.782	11.445	0,03	0,04
StarHub *	-	855	-	0,00
Jumlah	**9.782**	**12.300**	**0,03**	**0,04**

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)
** termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah			Persentase terhadap Pendapatan atau Beban Bersangkutan (%)		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
Pendapatan usaha						
Telkom	919.410	1.172.722	545.060	4,93	7,11	4,45
Telkomsel	375.198	393.831	(13.539)	2,01	2,39	(0,11)
Bank-bank milik negara	214.631	201.144	131.397	1,15	1,22	1,07
StarHub *	36.748	49.133	66.213	0,20	0,30	0,54
Bank-bank swasta *	28.161	52.014	1.118	0,15	0,32	0,01
SingTel *	17.304	46.255	66.564	0,09	0,28	0,54
PSN	9.847	7.166	5.490	0,05	0,04	0,04
CSM	7.420	7.948	11.058	0,04	0,05	0,09
PT Angkasa Pura (Persero)	4.888	5.535	4.652	0,03	0,03	0,04
Departemen Komunikasi dan Informatika	1.857	6.915	5.383	0,01	0,04	0,04
LKBN Antara	987	3.568	7.628	0,00	0,02	0,06
PT Garuda Indonesia (Persero)	426	485	470	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	173.238	135.926	122.533	0,93	0,83	1,02
Jumlah	**1.790.115**	**2.082.642**	**954.027**	**9,59**	**12,63**	**7,79**
Beban usaha						
Beban jasa telekomunikasi						
Departemen Komunikasi dan Informatika	1.286.855	1.015.041	663.552	9,24	8,48	7,51
Telkom	941.224	973.793	343.854	6,76	8,14	3,89
Telkomsel	584.470	474.337	-	4,20	3,96	-
PT Personel Alih Daya	68.948	17.090	-	0,50	0,14	-
Comnet	37.649	34.254	34.146	0,27	0,29	0,39
PLN	34.659	29.710	33.982	0,25	0,25	0,38
SingTel *	12.637	23.563	15.671	0,09	0,20	0,17
Perusahaan Gas Negara	8.388	8.331	-	0,06	0,07	-
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	7.015	1.571	5.001	0,05	0,01	0,06
StarHub *	3.321	10.355	1.835	0,02	0,09	0,02
Kopindosat	2.615	5.432	6.838	0,02	0,04	0,08
PSN	2.206	2.742	-	0,02	0,02	-
Lain-lain	3.570	-	2.370	0,02	-	0,02
Jumlah	**2.993.557**	**2.596.219**	**1.107.249**	**21,50**	**21,69**	**12,52**
Karyawan						
Karyawan kunci	134.613	127.350	108.589	0,97	1,06	1,23
Kopindosat	114.368	135.911	39.726	0,82	1,14	0,45
Jiwasraya	36.796	47.266	30.174	0,26	0,39	0,34
Jumlah	**285.777**	**310.527**	**178.489**	**2,05**	**2,59**	**2,02**
Administrasi dan umum						
Kopindosat	45.124	39.863	48.560	0,32	0,33	0,55
PLN	42.436	41.747	41.203	0,31	0,35	0,47
Usaha Gedung Bank Dagang Negara ("UGBDN")	4.806	4.976	5.628	0,04	0,04	0,06
Lain-lain	7.396	7.763	968	0,05	0,07	0,01
Jumlah	**99.762**	**94.349**	**96.359**	**0,72**	**0,79**	**1,09**

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah			Persentase terhadap Pendapatan atau Beban Bersangkutan (%)		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan bunga						
Bank-bank milik negara	222.727	103.294	107.022	9,25	6,49	7,78
Bank-bank swasta *	36.458	33.127	18.839	1,51	2,08	1,37
Lain-lain	879	1.789	2.385	0,04	0,12	0,17
	260.064	**138.210**	**128.246**	**10,80**	**8,69**	**9,32**
Beban pendanaan						
Bank-bank milik negara	(196.667)	(66.482)	(60.181)	(8,16)	(4,18)	(4,38)
Bank-bank swasta *	(16.302)	-	-	(0,68)	-	-
Lain-lain	(6.715)	(7.010)	(6.231)	(0,28)	(0,44)	(0,45)
	(219.684)	**(73.492)**	**(66.412)**	**(9,12)**	**(4,62)**	**(4,83)**
Bersih	**40.380**	**64.718**	**61.834**	**1,68**	**4,07**	**4,49**

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
1.	Bank-bank milik negara	Afiliasi	Kas dan setara kas, hutang jangka panjang dan pendapatan usaha - MIDI
2.	Bank-bank swasta*	Afiliasi	Kas dan setara kas, hutang jangka panjang dan pendapatan usaha - MIDI
3.	TVRI	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
4.	Telkom (Catatan 28i dan 31)	Afiliasi	Pendapatan usaha - selular, telekomunikasi tetap dan MIDI; beban usaha - beban jasa telekomunikasi
5.	Telkomsel (Catatan 31)	Afiliasi	Pendapatan usaha - selular dan telekomunikasi tetap
6.	PT Pos Indonesia (Persero)	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
7.	CSM	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
8.	PSN	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
9.	LKBN Antara	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
10.	StarHub*	Afiliasi	Pendapatan usaha - telepon internasional

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
11.	SingTel*	Afiliasi	Pendapatan usaha - telepon internasional
12.	Departemen Komunikasi dan Informatika	Instansi Pemerintah	Pendapatan usaha - MIDI; beban usaha - beban jasa telekomunikasi
13.	Jiwasraya	Afiliasi	Pensiun dibayar di muka jangka panjang
14.	Kopindosat	Afiliasi	Beban usaha - karyawan, beban administrasi dan umum
15.	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Afiliasi	Hutang pengadaan
16.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Instansi Pemerintah	Kewajiban lancar lainnya
17.	Pertamina	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
18.	Karyawan kunci	Afiliasi	Beban usaha - karyawan , dan uang muka/bagian yang belum diamortisasi dari uang muka perumahan dan transformasi, dan insentif transformasi
19.	PT NexWave*	Afiliasi	Hutang pengadaan
20.	PT SCS Astra Graphia Technologies*	Afiliasi	Hutang pengadaan
21.	Comnet	Afiliasi	Beban usaha - jasa telekomunikasi
22.	Qtel**	Pemegang saham utama	Pendapatan usaha - telekomunikasi tetap
23.	Optus*	Afiliasi	Pendapatan usaha - telepon internasional
24.	PT Personel Alih Daya	Afiliasi	Beban usaha - karyawan dan beban jasa telekomunikasi
25.	PLN	Afiliasi	Beban usaha - jasa telekomunikasi
26.	PT Angkasa Pura (Persero)	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
27.	Garuda Indonesia	Afiliasi	Pendapatan usaha - MIDI
28.	UGBDN	Afiliasi	Beban usaha - jasa telekomunikasi

* tidak termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)
** termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejak tanggal 6 Juni 2008 (Catatan 17)

25. LABA PER SAHAM

Tabel berikut ini menyajikan perhitungan laba per saham dasar:

	2008	2007	2006
Pembilang untuk laba per saham dasar - laba bersih	1.878.522	2.042.043	1.410.093
Pengaruh dilusi dari obligasi konversi (Catatan 15)	-	-	(11.262)
Pembilang untuk laba per saham dilusian	**1.878.522**	**2.042.043**	**1.398.831**
Penyebut - jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sepanjang tahun (termasuk pengaruh dari pelaksanaan ESOP) - (Catatan 17)	**5.433.933.500**	**5.433.933.500**	**5.404.654.859**
Laba bersih per saham	**345,70**	**375,79**	**260,90**
Laba bersih per saham dilusian	**345,70**	**375,79**	**258,82**
Laba per ADS dasar (50 lembar saham Seri B per ADS)	**17.285,10**	**18.789,73**	**13.045,17**
Laba per ADS dilusian	**17.285,10**	**18.789,73**	**12.940,98**

26. PEMBAGIAN LABA DAN PEMBENTUKAN SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan, para pemegang saham Perusahaan, antara lain memutuskan, untuk menetapkan penggunaan laba bersih tahunan untuk dana cadangan kerugian dan pembagian dividen kas, dan jumlah selebihnya dialokasikan untuk reinvestasi dan modal kerja.

Tanggal RUPS	Dana Cadangan (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
Laba Bersih Tahun 2005			
29 Juni 2006	16.235	149,32	8 Agustus 2006
Laba Bersih Tahun 2006			
5 Juni 2007	14.101	129,75	13 Juli 2007
Laba Bersih Tahun 2007			
5 Juni 2008	20.420	187,90	15 Juli 2008

Pembayaran dividen kepada Pemerintah dilakukan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

27. DERIVATIF

Perusahaan menandatangani beberapa kontrak swap dan *forward* valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007:

	Jumlah Nosional (AS$)	Nilai Wajar (Rp)			
		2008		2007	
		Piutang	Hutang	Piutang	Hutang
Kontrak Swap Valuta Asing:					
a. Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("StandChart") [12]	25.000	-	-	8.973	-
b. GSI	100.000	223.306	-	66.489	-
c. GSI	25.000	36.569	-	-	20.678
d. GSI	75.000	22.604	-	21.255	-
e. Merrill Lynch Capital Market Bank Limited ("MLCMB") [11]	25.000	-	-	-	952
f. MLCMB [9]	25.000	-	-	-	28.634
g. StandChart	25.000	59.003	-	-	8.288
h. MLCMB [10]	25.000	-	-	-	5.758
i. StandChart	25.000	73.690	-	6.853	-
j. StandChart	25.000	83.663	-	17.126	-
k. HSBC, Cabang Jakarta	25.000	69.427	-	6.666	-
l. Merrill Lynch International Bank Limited, Cabang London ("MLIB")	50.000	-	31.106	-	-
m. MLIB	25.000	-	4.418	-	-
n. MLIB	25.000	-	1.345	-	-
o. DBS	25.000	-	20.991	-	-
p. GSI	84.000	87.600	-	-	-
Sub-jumlah		**655.862**	**57.860**	**127.362**	**64.310**
Kontrak *Forward* Valuta Asing:					
q. Goldman Sachs Capital Market, L.P, New York ("GSCM")[3]	10.000	-	-	-	-
r. StandChart[4]	2.000	-	-	98	-
s. JPMorgan Close Bank, Cabang Singapura ("JPMorgan")[5]	3.000 atau 6.000	-	-	257	-
t. StandChart[6]	1.500 atau 3.000	-	-	-	-
u. JPMorgan[8]	3.000 atau 6.000	-	-	-	-
v. StandChart[6]	1.500 atau 3.000	-	-	-	-
w. GSCM[7]	10.000	-	-	-	-
Sub-jumlah		**-**	**-**	**355**	**-**
Kontrak Swap Suku Bunga:					
x. GSCM [1]	25.000	-	-	-	-
y. GSCM [2]	25.000	-	-	-	-
z. HSBC, Cabang Jakarta	27.037 dengan jumlah menurun	-	28.549	-	-
aa. HSBC, Cabang Jakarta	44.200 dengan jumlah menurun	-	67.402	-	-
ab. GSCM	100.000	-	111.690	-	-
ac. DBS	25.000 dengan jumlah menurun	-	16.941	-	-
ad. DBS	25.000 dengan jumlah menurun	-	13.856	-	-
ae. Bank of Tokyo MUFJ ("BTMUFJ")	25.000 dengan jumlah menurun	-	7.094	-	-
af. BTMUFJ	25.000 dengan jumlah menurun	-	5.271	-	-
ag. BTMUFJ	25.000 dengan jumlah menurun	-	3.882	-	-
ah. StandChart	40.000 dengan jumlah menurun	732	-	-	-
ai. DBS	26.000 dengan jumlah menurun	-	3.321	-	-
Sub-jumlah		**732**	**258.006**	**-**	**-**
Jumlah		**656.594**	**315.866**	**127.717**	**64.310**

27. DERIVATIF (lanjutan)

(1) kontrak ditandatangani pada bulan Maret 2006 dan diterminasi pada bulan Oktober 2006
(2) kontrak ditandatangani pada bulan Juli 2006 dan diterminasi pada bulan Juni 2007
(3) kontrak ditandatangani pada bulan Januari 2007 dan diterminasi pada bulan Juni 2007
(4) kontrak ditandatangani pada bulan Februari 2007 dan diselesaikan pada bulan Februari 2008
(5) kontrak ditandatangani pada bulan April 2007 dan diselesaikan pada bulan April 2008
(6) kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2007 dan diselesaikan pada bulan Desember 2007
(7) kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2007 dan diterminasi pada bulan Juli 2007
(8) kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2007 dan diterminasi pada bulan Agustus 2007
(9) kontrak ditandatangani pada bulan November 2005 dan direstrukturisasi menjadi kontrak baru pada bulan Agustus 2008
(10) kontrak ditandatangani pada bulan Maret 2006 dan direstrukturisasi menjadi kontrak baru pada bulan Agustus 2008
(11) kontrak ditandatangani pada bulan September 2005 dan direstrukturisasi menjadi kontrak baru pada bulan September 2008
(12) kontrak ditandatangani pada bulan April 2004 dan diselesaikan pada bulan November 2008

Perubahan nilai wajar kontrak swap dan *forward* valuta asing bersih serta derivatif melekat (Catatan 14g), beban atau pendapatan swap, beban atau pendapatan terminasi, dan penyelesaian dari instrumen derivatif sejumlah Rp136.603, Rp68.023 dan (Rp438.774) masing-masing pada tahun 2008, 2007 dan 2006, dibebankan ke "Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif - Bersih" yang disajikan sebagai bagian dari Penghasilan (Beban) Lain-lain pada laporan laba rugi konsolidasi.

Berikut adalah rincian dari kontrak:

Kontrak Swap Valuta Asing

No.	*Counter-Parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi (Rp)		
					2008	2007	2006
a.	StandChart [(i)]	23 April 2004 - 5 November 2008 Jumlah swap sebesar Rp214.625 untuk AS$25.000	LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 2,60%	Setiap tanggal 5 Mei dan 5 November	16.263	18.335	16.911
b.	GSI	13 Mei 2005 - 5 November 2010 Jumlah swap sebesar Rp832.250 untuk AS$100.000	(i) Tingkat bunga tetap sebesar 6,96% per tahun untuk AS$50.000 dan (ii) tingkat bunga LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 2,62% per tahun untuk AS$50.000, dan dikurangi dengan (a) tingkat bunga LIBOR dolar A.S. 6 bulanan per tahun dikalikan dengan AS$11.750 selama periode 13 Mei 2005 sampai dengan 13 Mei 2008 dan (b) jumlah sebesar AS$11.750 pada tanggal 13 Mei 2008. Pada tanggal 14 Mei 2008, Perusahaan menerima pembayaran dalam jumlah tetap sebesar AS$11.750 (setara dengan Rp109.099) sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dari GSI.	Setiap tanggal 5 Mei dan 5 November	64.009	61.572	61.885
c.	GSI	13 Mei 2005 - 5 November 2010 Jumlah swap sebesar Rp245.000 untuk AS$25.000	4,30% dari AS$25.000	Setiap tanggal 5 Mei dan 5 November	11.005	9.866	9.689
d.	GSI	22 Agustus 2005 - 22 Juni 2012 Jumlah swap rupiah tertentu setara dengan AS$75.000 dikalikan dengan kurs nilai tukar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk AS$75.000	3,28% dari AS$75.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	25.665	22.873	22.995

[(i)] Pada tanggal 5 November 2008, kontrak ini berakhir dan Perusahaan memperoleh laba atas penyelesaian dari swap valuta asing sebesar Rp58.375.

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-Parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi (Rp)		
					2008	2007	2006
e.	MLCMB [iii]	20 September 2005 - 22 Juni 2012 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ▪ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari Rp9.500 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$25.000 dikalikan dengan (1 - Rp9.500 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh) apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp9.500, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp14.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$25.000 dikalikan dengan (Rp14.000 - Rp9.500) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp14.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	2,99% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	3.482	6.793	6.892
f.	MLCMB [ii]	16 November 2005 - 22 Juni 2012 Jumlah swap sebesar Rp245.000 untuk AS$25.000	5,50% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	6.406	12.495	12.677
g.	StandChart	11 Januari 2006 - 22 Juni 2012 Jumlah swap sebesar Rp236.250 untuk AS$25.000	4,78% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	12.474	11.111	10.817
h.	MLCMB [ii]	1 Maret 2006 - 22 Juni 2012 Jumlah swap sebesar Rp229.975 untuk AS$25.000	4,15% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	4.887	9.613	9.375
i.	StandChart	15 Maret 2006 - 22 Juni 2012 Jumlah swap sebesar Rp228.550 untuk AS$25.000	3,75% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	9.786	8.717	6.685
j.	StandChart	12 Mei 2006 - 22 Juni 2012 Jumlah swap sebesar Rp217.500 untuk AS$25.000	3,45% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	9.004	8.019	4.897
k.	HSBC	8 Agustus 2006 - 5 November 2010 Jumlah swap sebesar Rp225.000 untuk AS$25.000	4,00% dari AS$25.000	Setiap tanggal 5 Mei dan 5 November	10.184	9.214	2.278

[ii] Pada tanggal 8 Agustus 2008, Perusahaan melakukan restrukturisasi atas kontrak- kontrak ini menjadi sebuah kontrak baru (Catatan 27l).
[iii] Pada tanggal 8 September 2008, Perusahaan melakukan restrukturisasi atas kontrak ini menjadi sebuah kontrak baru (Catatan 27m).

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-Parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi (Rp)		
					2008	2007	2006
l.	MLIB [(ii)]	8 Agustus 2008 - 22 Juni 2012 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ▪ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp8.950 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$50.000 dikalikan dengan (1 - Rp8.950 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh) apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp8.950, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$50.000 dikalikan dengan (Rp11.000 - Rp8.950) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	4,22% dari AS$50.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	3.203	-	-
m.	MLIB	2 September 2008 - 12 Juni 2013 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ▪ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp8.800 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu sesuai kontrak dikalikan dengan (kurs spot rupiah/AS$ - Rp8.800) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh) apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp8.800, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	4,10% dari AS$25.000 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011, dan 4,10% dari jumlah dolar A.S. yang menurun sesuai kontrak sampai dengan tanggal 12 Juni 2013	Setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember	15.567	-	-

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-Parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi (Rp)		
					2008	2007	2006
m.	MLIB (lanjutan)	▪ sejumlah dolar A.S. tertentu sesuai kontrak dikalikan dengan (Rp3.200 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)					
n.	MLIB [iii]	8 September 2008 - 22 Juni 2012 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ▪ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp9.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$25.000 dikalikan dengan (1 - Rp9.000 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh) apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp9.000, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$25.000 dikalikan dengan (Rp11.000 - Rp9.000) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	2,52% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	-	-	-

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-Parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi (Rp)		
					2008	2007	2006
o.	DBS	10 September 2008 - 12 Juni 2013 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ■ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal pembayaran sama dengan atau kurang dari Rp8.800 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan jumlah dolar A.S. pada tanggal pembayaran dikalikan dengan (kurs spot rupiah/AS$ - Rp8.800) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh) apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal pembayaran lebih besar dari Rp8.800, dan sama dengan atau kurang dari Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan jumlah dolar A.S. pada tanggal pembayaran dikalikan dengan (Rp12.000 - Rp8.800) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal pembayaran lebih besar dari Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	3,945% dari AS$25.000 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011, dan 3,945% dari jumlah dolar A.S. yang menurun sesuai kontrak sampai dengan tanggal 12 Juni 2013	Setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember	2.833	-	-

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-Parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi (Rp)		
					2008	2007	2006
p.	GSI	16 Desember 2008 - 5 November 2010 Perusahaan akan menerima: ▪ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp11.500 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$84.000 dikalikan dengan (kurs spot rupiah/AS$ - Rp11.500 dibagi dengan kurs spot rupiah per AS$) (dalam jumlah penuh) apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp11.500, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp15.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ▪ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$84.000 dikalikan dengan (Rp3.500 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp15.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	Premi dibayar dimuka sebesar AS$9.500 (setara dengan Rp105.212) yang pembayarannya dilakukan secara penuh pada tanggal 19 Desember 2008. Premi ini diamortisasi selama periode kontrak swap.	-	1.991	-	-

Seluruh kontrak swap valuta asing dengan GSI (kontrak nomor b, c dan d) dirancang dengan memasukkan *credit-linkage* dengan Perusahaan sebagai entitas referensi dan dengan (i) kebangkrutan Perusahaan, (ii) kegagalan untuk melakukan pembayaran atas hutang tertentu atau (iii) restrukturisasi hutang tertentu sebagai peristiwa kredit *(credit events)* yang relevan. Atas terjadinya salah satu dari peristiwa kredit ini, kewajiban Perusahaan dan GSI yang timbul dari kontrak swap tersebut akan diterminasi tanpa pembayaran atau penyelesaian lebih lanjut dari atau ke masing-masing pihak, termasuk pembayaran oleh salah satu pihak atas nilai pasar dari kontrak swap tersebut.

Kontrak *Forward* Valuta Asing

No.	*Counter Parties*	Periode Kontrak	Kurs Tetap Rupiah terhadap AS$ (dalam jumlah penuh)	Tanggal-tanggal Penyelesaian
q.	GSCM [(iv)]	2 Januari 2007 - 5 Juli 2007	Rp8.955 per AS$1	4 Mei 2007, 6 Juni 2007 dan 5 Juli 2007
r.	StandChart [(v)]	15 Februari 2007 - 20 Februari 2008	Rp8.950 per AS$1	Setiap bulan mulai tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan tanggal 20 Februari 2008
s.	JPMorgan [(v)]	24 April 2007 - 28 April 2008	Kurs spot pada tanggal penyelesaian	Setiap bulan mulai tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan tanggal 28 April 2008
t.	StandChart [(v)]	1 Mei 2007 - 28 Desember 2007	Kurs spot pada tanggal penyelesaian	Setiap bulan mulai tanggal 4 Juni 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak *Forward* Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter Parties*	Periode Kontrak	Kurs Tetap Rupiah terhadap AS$ (dalam jumlah penuh)	Tanggal-tanggal Penyelesaian
u.	JPMorgan [(vi)]	3 Mei 2007 - 28 Desember 2007	Kurs spot pada tanggal penyelesaian	Setiap bulan mulai tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007
v.	StandChart [(v)]	4 Mei 2007 - 28 Desember 2007	Kurs spot pada tanggal penyelesaian	Setiap bulan mulai tanggal 8 Juni 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007
w.	GSCM [(vii)]	10 Mei 2007 - 20 November 2007	Rp8.790 per AS$1	Setiap bulan mulai tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 November 2007

[(iv)] Pada tanggal 8 Juni 2007, Perusahaan melakukan terminasi dini atas kontrak *forward* valuta asing dengan GSCM. Berdasarkan konfirmasi terminasi, Perusahaan berhak menerima hasil terminasi sebesar AS$76 (setara dengan Rp688). Penyelesaian penuh tersebut diterima pada tanggal 12 Juni 2007.
[(v)] Kontrak-kontrak ini (r, s, t dan v) berakhir masing-masing pada tanggal 20 Februari 2008, 28 April 2008, 28 Desember 2007 dan 28 Desember 2007.
[(vi)] Pada tanggal 24 Agustus 2007, kontrak ini diterminasi dan tidak ada arus kas yang berasal dari terminasi tersebut sesuai dengan prasyarat di dalam kontrak.
[(vii)] Pada tanggal 5 Juli 2007, Perusahaan melakukan terminasi dini atas kontrak *forward* valuta asing dengan GSCM. Berdasarkan konfirmasi terminasi, Perusahaan berhak menerima hasil terminasi sebesar AS$335 (setara dengan Rp3.014), yang kemudian diterima pada tanggal 10 Juli 2007.

Kontrak Swap Suku Bunga

No.	*Counter Parties*	Periode Kontrak	Suku bunga Swap Tahunan	Tanggal Penerimaan Pendapatan (Beban) Swap	Jumlah Pendapatan (Beban) Swap Diterima (Dibayar) (Rp)		
					2008	2007	2006
x.	GSCM [(viii)]	15 Maret 2006 - 22 Juni 2012	4,90% dari AS$25.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk 7,125% per tahun dikalikan dengan indeks tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya secara kuartalan sampai dengan tahun 2012	Setiap tanggal 22 Maret, 22 Juni, 22 September dan 22 Desember	-	-	3.860
y.	GSCM [(ix)]	18 Juli 2006 - 22 Juni 2012	5,90% dari AS$25.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk 7,125% per tahun dikalikan dengan indeks tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya secara semesteran sampai dengan tahun 2012	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	-	1.386	1.390
z.	HSBC	23 April 2008 - 27 November 2016	5,42% dari AS$27.037, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,45% per tahun	Setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober sampai dengan bulan Oktober 2009, dan setiap tanggal 27 Mei dan 27 November sampai dengan tanggal terminasi	(1.784)	-	-
aa.	HSBC	23 April 2008 - 29 September 2019	4,82% dari AS$44.200, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. ditambah 0,35% per tahun	Setiap tanggal 28 Januari dan 28 Juli sampai dengan bulan Juli 2009, dan setiap tanggal 29 Maret dan 29 September sampai dengan tanggal terminasi	(648)	-	-

[(viii)] Pada tanggal 16 Oktober 2006, Perusahaan melakukan terminasi dini atas kontrak ini. Berdasarkan konfirmasi terminasi, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran terminasi sebesar AS$380 (setara dengan Rp3.498), yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2006.
[(ix)] Pada tanggal 22 Juni 2007, GSCM melaksanakan opsi terminasi dini terhadap kontrak ini.

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Suku Bunga (lanjutan)

No.	*Counter Parties*	Periode Kontrak	Suku bunga Swap Tahunan	Tanggal Penerimaan Pendapatan (Beban) Swap	Jumlah Pendapatan (Beban) Swap Diterima (Dibayar) (Rp)		
					2008	2007	2006
ab.	GSI	2 September 2008 - 12 Juni 2013	(8,10% - *underlyer return*) dari AS$100.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember sampai dengan bulan Juni 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-
ac.	DBS	5 September 2008 - 12 Juni 2013	5,625% dari AS$25.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember sampai dengan bulan Desember 2010, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-
ad.	DBS	23 Oktober 2008 - 12 Juni 2013	5,28% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-
ae.	BTMUFJ	1 Desember 2008 - 12 Juni 2013	4,46% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-
af.	BTMUFJ	4 Desember 2008 - 12 Juni 2013	4,25% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-
ag.	BTMUFJ	12 Desember 2008 - 12 Juni 2013	4,09% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-

27. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Suku Bunga (lanjutan)

No.	*Counter Parties*	Periode Kontrak	Suku bunga Swap Tahunan	Tanggal Penerimaan Pendapatan (Beban) Swap	Jumlah Pendapatan (Beban) Swap Diterima (Dibayar) (Rp)		
					2008	2007	2006
ah.	StandChart	19 Desember 2008 - 12 Juni 2013	3,85% dari AS$40.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-
ai.	DBS	22 Desember 2008 - 12 Desember 2012	4,02% dari AS$26.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	-	-	-

28. PERJANJIAN DAN IKATAN SIGNIFIKAN

a. Pada tanggal 31 Desember 2008, ikatan pengeluaran modal yang merupakan perjanjian kontraktual yang belum terealisasi sehubungan dengan pengadaan dan instalasi aktiva tetap adalah sebesar AS$399.397 (Catatan 35f) dan Rp2.524.927.

Ikatan pengeluaran modal signifikan adalah sebagai berikut:

Tanggal Kontrak	Keterangan Kontrak	Pemasok	Nilai Kontrak/*Purchase Orders ("PO")* yang Telah Diterbitkan	Nilai Kontrak/PO yang Belum Dilaksanakan
25 Februari 2008	*Supply and Installation of Submarine Backbone Network in Java Kalimantan Batam Singapore (JAKABARE)*	NEC Corporation	AS$68.310 dan Rp21.705	AS$52.642 dan Rp18.199
29 Juni 2007	*Palapa D Satellite In-Orbit Delivery ("Palapa D Satellite")*	Thales Alenia Space	AS$217.600	AS$87.713
16 Mei 2007	*Supply of GSM Cellular Infrastructure*	PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy dan Nokia Siemens Networks GmbH & Co.KG.	AS$239.506 dan Rp857.675	AS$69.596 dan Rp412.900
2 Mei 2007	*Supply and Installation of Telecommunication Infrastructure*	PT Huawei Tech Investment dan Huawei Technologies Co. Ltd.	AS$32.247 dan Rp214.278	AS$9.956 dan Rp27.008
20 April 2007	*Telecommunication Equipment Supply and Service*	PT Alcatel Lucent Indonesia dan Alcatel Shanghai Bell Co. Ltd.	AS$43.858 dan Rp527.636	AS$3.108 dan Rp159.958
3 April 2007	*Supply of GSM Infrastructure*	PT Ericsson Indonesia dan Ericsson AB	AS$315.649 dan Rp933.415	AS$100.422 dan Rp484.533
29 September 2006	*WCDMA/HSDPA Radio Access Network Development Project*	PT Ericsson Indonesia dan Ericsson AB	AS$55.220 dan Rp216.039	AS$11.924 dan Rp65.772
25 September 2006	*Single Intelligent Network*	PT Ericsson Indonesia dan Ericsson AB	AS$70.479 dan Rp194.558	AS$2.751 dan Rp506

28. PERJANJIAN DAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Pada tanggal 19 September 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tanpa jaminan selama tiga tahun dengan BCA sebesar Rp500.000 untuk kebutuhan pendanaan dan pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan tingkat bunga JIBOR 3 bulanan ditambah 2,25% per tahun. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 20% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun pertama, (b) 30% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun kedua, dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga.

   Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menggunakan fasilitas pinjaman ini.

c. Pada tanggal 25 Mei 2007, Perusahaan dan enam operator telekomunikasi lainnya menandatangani sebuah nota kesepakatan tentang pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring untuk bagian timur Indonesia ("Tahap I Proyek Palapa Ring") dimana Perusahaan akan menanggung sebesar 10% dari total nilai proyek sebesar Rp3.000.000. Sebagai tambahan, para pihak juga sepakat untuk menanggung biaya persiapan dan implementasi ("biaya persiapan") dari Tahap I Proyek Palapa Ring secara sama rata sampai dengan jumlah sebesar Rp2.000. Jika biaya persiapan melebihi Rp2.000, maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh para pihak. Namun, salah satu operator telekomunikasi tersebut kemudian memutuskan untuk mundur dari proyek ini.

   Pada tanggal 10 November 2007, Perusahaan dan lima operator telekomunikasi lainnya (termasuk Telkom, pihak yang mempunyai hubungan istimewa) menandatangani perjanjian konsorsium untuk pembangunan dan pemeliharaan Palapa Ring dimana Perusahaan setuju untuk menanggung 13,36% dari jumlah biaya proyek sebesar AS$225.037. Perjanjian ini menggantikan nota kesepakatan sebelumnya.

   Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah membayar sejumlah AS$1.503.

d. Pada tanggal 27 April 2007, Perusahaan bergabung dalam Konsorsium *Asia-America Gateway* ("AAG") dengan menandatangani Perjanjian Konstruksi dan Pemeliharaan. AAG adalah konsorsium kabel laut yang terdiri dari 19 perusahaan anggota. Perusahaan berkomitmen melakukan investasi sejumlah AS$5.000 (pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah membayar sejumlah AS$3.326) untuk hak kepemilikan sebesar 0,9031%, sebagai anggota konsorsium. Pengeluaran modal sehubungan dengan teknik (*engineering*), penyediaan, pembangunan dan pemasangan AAG akan ditanggung secara proporsional oleh anggota konsorsium sesuai dengan hak kepemilikan mereka.

e. Perusahaan mempunyai ikatan untuk membayar biaya frekuensi radio tahunan sepanjang periode izin 3G, selama Perusahaan memegang izin 3G (Catatan 1a). Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tanggal 8 Februari 2006.

f. Pada tanggal 25 Agustus 2005, Perusahaan memperoleh fasilitas dari Deutsche Bank AG (Cabang Jakarta) untuk mendanai kebutuhan modal kerja umum Perusahaan. Fasilitas ini terdiri dari:

   - Fasilitas pinjaman sebesar Rp25.000 yang dapat ditarik sebagai uang muka dengan nilai minimum sebesar Rp100 untuk setiap uang muka. Setiap uang muka akan jatuh tempo dalam jangka waktu maksimum enam bulan dan dikenakan bunga sebagai berikut:
     - Bunga atas setiap uang muka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang akan terhutang sebesar 1,7% per tahun di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia.
     - Bunga atas setiap uang muka yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari tiga bulan tetapi kurang dari enam bulan akan terhutang sebesar 2,5% per tahun di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulanan.

28. PERJANJIAN DAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

- Fasilitas bank garansi sebesar AS$2.000. Hutang dari fasilitas ini jatuh tempo dalam jangka waktu maksimum satu tahun. Perusahaan diwajibkan untuk menjaminkan simpanan kas/ margin kas/rekening Perusahaan yang ditempatkan di Deutsche Bank AG (Cabang Jakarta) untuk penerbitan bank garansi.

Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 November 2005 dan telah diperpanjang. Fasilitas ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 bulan berikutnya, kecuali terdapat pemberitahuan awal tertulis untuk tidak diperpanjang.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, fasilitas ini belum diterminasi dan Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.

g. Pada tanggal 20 Juli 2005, Perusahaan memperoleh fasilitas dari HSBC untuk mendanai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perusahaan. Fasilitas tersebut diamandemen pada tanggal 14 Mei 2007 untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 28 Februari 2008. Fasilitas ini terdiri dari:

- Fasilitas *Overdraft* sebesar AS$2.000 (termasuk fasilitas *overdraft* dalam mata uang rupiah sebesar Rp16.000). Bunga dikenakan berdasarkan saldo harian sebesar 3,75% per tahun dan 6% per tahun di bawah suku bunga pinjaman terbaik HSBC *(HSBC Best Lending Rate)* masing-masing untuk pinjaman dalam mata uang rupiah dan dolar A.S.

- Fasilitas pinjaman *revolving* sebesar AS$5.000 (termasuk pinjaman *revolving* dalam mata uang rupiah sebesar Rp40.000). Pinjaman ini jatuh tempo dengan jangka waktu maksimum enam bulan dan dapat ditarik dalam beberapa *tranche* dengan nilai minimum sebesar AS$500 dan Rp500, masing-masing untuk pinjaman dalam mata uang dolar A.S. dan rupiah. Bunga dikenakan berdasarkan saldo harian sebesar 3% per tahun dan 6% per tahun di bawah suku bunga pinjaman berjangka HSBC *(HSBC Term Lending Rate)* masing-masing untuk pinjaman dalam mata uang rupiah dan dolar A.S.

Perusahaan juga memperoleh fasilitas keuangan dari HSBC sebagai berikut:

- Swap valuta asing terbatas (tertimbang) sebesar AS$7.000 untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan akan lindung nilai terhadap fluktuasi valuta asing dan suku bunga internasional melalui swap valuta asing dan/atau swap suku bunga, dengan jatuh tempo maksimum 5 tahun.
- Risiko kurs valuta asing terbatas (tertimbang) sebesar AS$3.000 untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan akan lindung nilai terhadap fluktuasi kurs valuta asing melalui transaksi spot dan *forward*, dengan jatuh tempo maksimum 3 bulan.

Swap valuta asing terbatas (tertimbang) dan risiko kurs valuta asing terbatas (tertimbang) diamandemen pada tanggal 14 Mei 2007 menjadi fasilitas risiko kurs valuta asing terbatas (tertimbang) [*exposure risk limit (weighted)*]/opsi tukar valuta asing [*foreign exchange option ("opsi FX")*] sejumlah AS$21.000 untuk memfasilitasi kebutuhan Perusahaan akan lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing melalui transaksi spot, *forward*, swap valuta asing dan swap suku bunga dengan jatuh tempo maksimum 5 tahun, dan opsi FX dengan jatuh tempo maksimum 1 tahun.

Selanjutnya, pada tanggal 22 April 2008, Perusahaan memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi 28 Februari 2009, meningkatkan fasilitas risiko kurs valuta asing terbatas (tertimbang)/ opsi FX menjadi AS$62.500 dan memperpanjang jatuh tempo lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing melalui transaksi spot dan *forward* menjadi maksimum 5 tahun, transaksi swap valuta asing dan opsi FX menjadi maksimum 7 tahun dan transaksi swap suku bunga menjadi jatuh tempo maksimum 12 tahun.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.

28. PERJANJIAN DAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Pada tahun 1994 dan 1998, Perusahaan ditunjuk masing-masing sebagai Administrator Keuangan [Financial Administrator ("FA")] dan *Central Billing Party* ("CBP"), oleh konsorsium yang didirikan untuk membangun dan menjual/menyewakan kabel laut Asia Pacific Cable Network ("APCN") untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sebagai FA, Perusahaan mengumpulkan dan mendistribusikan dana hasil penjualan *Indefeasible Right of Use* ("IRU") dan *Defined Underwritten Capacity* ("DUC") dan jasa *Occassional Commercial Use* ("OCU") APCN, sementara sebagai CBP, Perusahaan mengelola dana dari anggota konsorsium untuk meng-*upgrade* kabel APCN.

Dana penjualan IRU dan DUC, jasa OCU serta dana yang diterima untuk meng-*upgrade* kabel APCN bukan merupakan milik Perusahaan dan oleh karena itu, tidak dicatat dalam pembukuan Perusahaan. Namun, Perusahaan mengelola dana ini dalam rekening terpisah. Pada tanggal 25 April 2005, Perusahaan tidak lagi ditunjuk sebagai CBP.

Pada tanggal 31 Desember 2008, saldo dana (termasuk perolehan bunga) yang dalam pengelolaan Perusahaan berjumlah AS$6.451. Selain dana dari penjualan IRU, anggota konsorsium juga akan menerima bagian mereka atas bunga yang diperoleh atas penempatan dana tersebut.

i. Perjanjian lain yang dibuat bersama Telkom adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan perjanjian kerjasama, kompensasi kepada Telkom sehubungan dengan jasa penyewaan sirkit/saluran, seperti *world link* dan *bit link* adalah sebesar 15% dari pendapatan tertagih Perusahaan yang berasal dari jasa tersebut.

  Perusahaan dan Satelindo juga menyewa sirkit dari Telkom untuk menghubungkan Jakarta, Medan dan Surabaya.

- Pada tahun 1994, Satelindo mengadakan perjanjian penyerahan penggunaan sebidang tanah hak pengelolaan ("*Land Transfer Agreement*") dengan Telkom untuk penyerahan penggunaan lahan tanah seluas 134.925 meter persegi yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat, dimana terletak stasiun pengendali bumi (*earth control station*) milik Satelindo. Berdasarkan perjanjian tersebut, Satelindo berhak menggunakan lahan tanah untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian, dengan harga setara AS$40.000 dikurangi Rp43.220. Jangka waktu perjanjian tersebut dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

  Perjanjian ini selanjutnya digantikan oleh perjanjian sewa tanah tanggal 6 Desember 2001, dengan syarat yang sama seperti perjanjian *Land Transfer Agreement*.

- Pada tahun 1999, Lintasarta mengadakan perjanjian dengan Telkom, dimana Telkom menyewakan transponder kepada Lintasarta. Perjanjian ini telah mengalami beberapa amandemen, terakhir berdasarkan amandemen kedelapan tanggal 5 November 2008. Sewa transponder yang dibebankan pada usaha berjumlah Rp21.782 dan Rp15.021 masing-masing pada tahun 2008 dan 2007 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Usaha - Beban Jasa Telekomunikasi" dalam laporan laba rugi konsolidasi.

29. SISTEM TARIF

a. Jasa Telekomunikasi Internasional

Tarif jasa ("tarif") dengan perusahaan telekomunikasi internasional ditentukan berdasarkan peraturan telekomunikasi internasional yang dibuat oleh *International Telecommunication Union* ("ITU"). Peraturan ini mensyaratkan bahwa pengelola telekomunikasi internasional, berdasarkan perjanjian timbal balik, menyusun dan merevisi tarif perhitungan ("*accounting rate*") yang akan diterapkan, dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi spesifik dan rekomendasi dari *Consultative Committee on International Telegraph and Telephone* ("CCITT"). Tarif ini dibagi dalam porsi terminal yang dibayarkan kepada pengelola di negara terminal, dan bila harus melalui transit, dalam porsi transit yang dibayarkan kepada pengelola di negara transit.

ITU juga mengatur bahwa unit moneter yang digunakan, bila tidak diatur secara khusus dalam perjanjian, adalah Special Drawing Right ("SDR") atau Gold Franc, yang setara dengan 1/3,061 SDR. Tiap pengelola sesuai dengan hukum negaranya masing-masing, akan menentukan biaya yang akan ditagih dari pelanggan masing-masing.

Tarif yang ditagih kepada pelanggan telepon internasional di Indonesia, yang disebut juga tarif pungut, ditetapkan dengan surat keputusan Menhub, yang biasanya lebih tinggi dari tarif perhitungan. Selama periode 1996 sampai dengan 1998, Menhub telah melakukan perubahan tarif yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1997, 15 Maret 1998 dan 15 November 1998.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/02/06 tanggal 28 Februari 2006, tarif pungut dihitung dengan formula tarif yang disebut formula *price cap* yang telah memperhitungkan indeks harga konsumen mulai tanggal 1 Januari 2007.

b. Jasa Selular

Tarif untuk operator selular ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (selanjutnya menjadi "Menhub" dan sekarang menjadi "Menkominfo") No. KM.27/PR.301/MPPT-98 tanggal 23 Februari 1998. Berdasarkan peraturan ini, tarif selular terdiri dari:

- Biaya pasang/aktivasi sambungan
- Biaya berlangganan
- Biaya pemakaian

Tarif maksimum pasang/aktivasi sambungan adalah sebesar Rp200.000 per satuan sambungan. Tarif maksimum bulanan adalah sebesar Rp65.000 per bulan. Biaya pemakaian terdiri dari:

1. Biaya pendudukan frekuensi ("airtime")

   Tarif maksimum airtime yang dibebankan ke STBS pemanggil adalah sebesar Rp325 per menit. Sistem pertarifan STBS berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Selular ke selular	:	2 kali biaya airtime
b. Selular ke PSTN	:	1 kali biaya airtime
c. PSTN ke selular	:	1 kali biaya airtime
d. Telepon umum kartu ke selular	:	1 kali biaya airtime ditambah *surcharge*/biaya tambahan 41%

29. SISTEM TARIF (lanjutan)

b. Jasa Selular (lanjutan)

2. Biaya percakapan

a. Biaya percakapan pelanggan STBS yang menghubungi pelanggan lain dengan menggunakan jaringan PSTN diberlakukan sama seperti tarif percakapan pada PSTN dengan diferensiasi waktu STBS. Khusus untuk penggunaan jaringan PSTN lokal dihitung sebesar 50% dari tarif lokal PSTN yang berlaku
b. Biaya percakapan sambungan jarak jauh antara dua daerah pelayanan yang berbeda tanpa menggunakan jaringan PSTN disamakan dengan tarif yang berlaku pada pelanggan PSTN yang melakukan panggilan sambungan langsung jarak jauh ("SLJJ").

Biaya maksimum penjelajahan aktif adalah Rp1.000 untuk setiap panggilan dan dibebankan kepada pelanggan STBS pemanggil yang sedang melakukan penjelajahan.

Tarif untuk pelanggan pra-bayar juga ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KM.79 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 dan pada dasarnya lebih tinggi dari tarif untuk pelanggan pasca-bayar. Para operator selular diperbolehkan untuk menentukan tarifnya masing-masing. Namun, tarif pemakaian maksimum untuk pelanggan pra-bayar tidak boleh lebih dari 140% tarif pemakaian jam sibuk pelanggan pasca-bayar yang berlaku.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.27/PR.301/MPPT-98 tanggal 23 Februari 1998 dan No. KM.79 Tahun 1998 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 mengenai tarif jasa teleponi dasar jaringan bergerak selular. Berdasarkan peraturan terbaru, tarif selular terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 mengenai tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular.

Berdasarkan peraturan baru ini, operator selular harus menerapkan tarif baru yang disebut batas harga ("*price cap*"). Jenis tarif untuk layanan telekomunikasi melalui jaringan selular terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah
- Tarif jasa multimedia

Tarif retail seharusnya dihitung berdasarkan Biaya Elemen Jaringan, Biaya Aktivitas Layanan Retail dan Marjin Laba.

Penerapan tarif baru untuk penyelenggara telekomunikasi dominan wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah. Penyelenggara telekomunikasi dominan adalah penyelenggara telekomunikasi yang memiliki pendapatan lebih dari 25% atas jumlah pendapatan industri pada segmen tertentu.

Mulai bulan Mei 2008, Perusahaan telah menerapkan secara penuh sistem tarif telekomunikasi selular baru ini.

29. SISTEM TARIF (lanjutan)

c. Jasa Telekomunikasi Tetap

Pada bulan Februari 2006, Departemen Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006 mengenai tarif jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap.

Pada tanggal 30 April 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No. 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 mengenai tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap. Peraturan ini juga diterapkan untuk layanan telepon jaringan tetap nirkabel.

Berdasarkan peraturan baru ini, tarif untuk jasa teleponi dasar dan SMS (*short message service*) harus dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan. Penyelenggara telekomunikasi jaringan tetap harus menerapkan tarif baru yang disebut batas harga ("*price cap*").

Mulai bulan Mei 2008, Perusahaan telah menerapkan secara penuh sistem tarif telekomunikasi tetap baru ini.

30. TARIF INTERKONEKSI

Tarif interkoneksi antar operator telekomunikasi dalam negeri ditetapkan berdasarkan Keputusan Menhub No. KM.108/PR.301/MPPT-94 tanggal 28 Desember 1994. Peraturan ini telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir Keputusan No. KM.37 Tahun 1999 tanggal 11 Juni 1999. Keputusan ini, bersama dengan Keputusan No. KM.46/PR.301/MPPT-98 tanggal 27 Februari 1998, menetapkan struktur dan besaran tarif interkoneksi antara jaringan telekomunikasi selular dengan PSTN, jaringan telekomunikasi selular dengan jaringan telekomunikasi internasional, jaringan telekomunikasi selular dengan jaringan telekomunikasi selular dalam negeri lainnya, jaringan telekomunikasi internasional dengan PSTN dan antara dua PSTN dalam negeri.

Berdasarkan keputusan Menhub, pengaturan tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

1. Struktur dan Besaran Tarif Interkoneksi

a. Antara internasional dengan PSTN lokal

Berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KM.37 Tahun 1999 tanggal 11 Juni 1999, tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

	Tarif	Dasar Perhitungan
Tarif akses	Rp850 untuk setiap panggilan	Jumlah panggilan ke luar negeri *(outgoing)* dan dari luar negeri *(incoming)* yang berhasil tersambung
Tarif pemakaian	Rp550 untuk setiap menit percakapan	Jumlah waktu (durasi) percakapan dari panggilan ke luar negeri *(outgoing)* dan dari luar negeri *(incoming)* yang berhasil tersambung

b. Antara PSTN dalam negeri dan PSTN dalam negeri lainnya

Biaya interkoneksi untuk percakapan telekomunikasi dalam negeri (lokal dan SLJJ) antara PSTN dalam negeri dengan PSTN dalam negeri lainnya diatur dan disepakati bersama antara penyelenggara PSTN dalam negeri.

30. TARIF INTERKONEKSI (lanjutan)

1. Struktur dan Besaran Tarif Interkoneksi (lanjutan)

   c. Antara STBS dan PSTN dalam negeri

   Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.46/PR.301/MPPT-98 ("Keputusan No. 46") tanggal 27 Februari 1998 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1998, tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

   (1) Percakapan Lokal

   Untuk percakapan lokal yang berasal dari STBS ke pelanggan PSTN, operator selular membayar operator PSTN sebesar 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku. Untuk percakapan lokal dari PSTN ke pelanggan selular, operator selular menerima biaya pendudukan frekuensi ("airtime") yang dibebankan operator PSTN kepada pelanggannya.

   (2) SLJJ

   Untuk SLJJ yang berasal dari PSTN ke pelanggan selular, operator selular menerima sebagian tarif SLJJ, dengan proporsi berkisar mulai 15% dari tarif ditambah biaya airtime dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 60% dari tarif ditambah biaya airtime dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh operator selular tersebut.

   Untuk SLJJ yang berasal dari STBS ke pelanggan PSTN, operator selular berhak memperoleh sebagian tarif SLJJ, dengan proporsi berkisar mulai 15% dari tarif dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 60% dari tarif dalam hal seluruh bagian jarak jauh diselenggarakan oleh operator selular tersebut.

   d. Antara STBS dan STBS lainnya

   Berdasarkan Keputusan No. 46, tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

   (1) Percakapan Lokal

   Untuk percakapan lokal yang berasal dari STBS ke STBS lainnya, operator selular "asal" membayar biaya airtime kepada operator selular "tujuan". Jika percakapan dilakukan melalui PSTN, operator selular asal membayar operator PSTN 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku.

   (2) SLJJ

   Untuk SLJJ yang berasal dari STBS, operator selular berhak memperoleh sebagian tarif SLJJ, dengan proporsi berkisar mulai 15% dari tarif dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 85% dari tarif dalam hal seluruh percakapan jarak jauh diselenggarakan oleh operator selular tersebut dan percakapan ditujukan kepada operator selular lainnya, sampai dengan 100% jika percakapan ditujukan kepada operator selular yang sama.

30. TARIF INTERKONEKSI (lanjutan)

1. Struktur dan Besaran Tarif Interkoneksi (lanjutan)

   e. Antara PSTN internasional dengan STBS

      Mulai tahun 1998, tarif interkoneksi untuk percakapan selular internasional ke atau dari pelanggan selular luar negeri dari atau ke pelanggan selular dalam negeri, baik yang percakapannya dilakukan melalui PSTN dalam negeri maupun tidak, menggunakan tarif yang sama dengan percakapan melalui PSTN domestik sebagaimana disebutkan dalam catatan "a" di atas. Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan bersama dengan operator telekomunikasi selular, Perusahaan (termasuk Satelindo sampai saat penggabungan - Catatan 1e) sampai dengan 31 Desember 2006 masih menggunakan perjanjian awal pembagian kontraktual untuk tarif interkoneksi (Catatan 31).

   f. Interkoneksi antar Sentral Gerbang Internasional

      Biaya interkoneksi untuk percakapan telekomunikasi internasional antar sentral gerbang internasional diatur dan disepakati bersama antara badan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional dengan badan usaha patungan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional.

2. Kewajiban Pelayanan Universal ["*Universal Service Obligation* ("USO")]

   Pada tanggal 30 September 2005, Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 yang mengatur kebijakan program USO dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotor tahunan (setelah dikurangi piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan USO.

   Menkominfo juga mengeluarkan Peraturan No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007, yang mengatur tata cara provisi USO seperti mekanisme pelelangan, tarif, wilayah pelayanan USO dan persyaratan teknis.

3. Pembagian Pendapatan

   Pendapatan dari tarif akses dan biaya pemakaian yang berasal dari percakapan telekomunikasi internasional yang melibatkan interkoneksi jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh beberapa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang tidak diatur oleh keputusan ini, dibagi secara proporsional ke setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri, dimana bagian pendapatan interkoneksi tersebut akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian bilateral diantara penyelenggara.

KM. 37 Tahun 1999 dan Keputusan No. 46 selanjutnya digantikan oleh Keputusan Menhub No. 32 Tahun 2004 mengenai interkoneksi berbasis biaya menggantikan perjanjian interkoneksi yang berbasis pembagian pendapatan. Berdasarkan keputusan tersebut, penyelenggara tujuan panggilan akan menetapkan biaya interkoneksi berdasarkan formula yang diputuskan oleh Pemerintah, yang mengharuskan penyelenggara telekomunikasi membebankan interkoneksi berdasarkan biaya menyelenggarakan panggilan tersebut.

Tanggal berlaku efektif keputusan ini yang sebelumnya mulai tanggal 1 Januari 2005 ditunda sampai dengan tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 (Catatan 31).

Penerapan tagihan interkoneksi antara penyelenggara telekomunikasi dimulai dari perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Semua perjanjian interkoneksi harus mengacu pada Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") (*Reference Interconnection Offer)*. Semua penyelenggara telekomunikasi harus menerbitkan DPI, dan penyelenggara telekomunikasi dominan harus mendapat persetujuan dari Pemerintah.

30. TARIF INTERKONEKSI (lanjutan)

Pada tanggal 4 Agustus 2006, DJPT mengeluarkan keputusan No. 278/DIRJEN/2006 yang menyetujui DPI yang berasal dari Perusahaan dan dua penyelenggara telekomunikasi dominan lainnya (Telkom dan Telkomsel). Keputusan ini diterapkan efektif mulai tanggal 1 Januari 2007 yang disepakati oleh semua penyelenggara telekomunikasi dan disetujui oleh Pemerintah. Pada tanggal 11 April 2008, DJPT menyetujui diberlakukannya DPI yang baru dari penyelenggara telekomunikasi dominan (Telkom, Telkomsel dan Perusahaan). DJPT mengharuskan agar seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri mengubah perjanjian interkoneksi agar sesuai dengan DPI baru mulai tanggal 1 April 2008.

Pada tanggal 1 April 2008, Perusahaan telah menerapkan tarif interkoneksi yang baru berdasarkan DPI yang disetujui.

31. PERJANJIAN INTERKONEKSI

Perusahaan (termasuk Satelindo dan IM3 sampai dilakukan merger - Catatan 1e) mengadakan perjanjian interkoneksi dengan operator-operator dalam negeri dan luar negeri. Beberapa perjanjian interkoneksi yang signifikan adalah sebagai berikut:

1. Telkom

Perjanjian/transaksi interkoneksi yang signifikan dengan Telkom adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan telekomunikasi tetap

Pada tanggal 23 September 2005, Perusahaan dan Telkom mengadakan perjanjian interkoneksi jaringan tetap lokal, jarak jauh dan internasional. Hal-hal pokok yang dicakup dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Interkoneksi antara jaringan tetap lokal, jarak jauh dan internasional Perusahaan dan Telkom yang memungkinkan pelanggan jasa telekomunikasi tetap Perusahaan untuk melakukan atau menerima panggilan ke atau dari pelanggan atau sentral gerbang internasional Telkom.
- Jasa panggilan internasional Perusahaan dan Telkom dapat diakses dan terus menerus terbuka pada jaringan tetap kedua belah pihak.
- Perusahaan dan Telkom bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing.
- Kompensasi untuk jasa yang disediakan didasarkan pada tarif interkoneksi yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
- Masing-masing pihak melakukan penagihan atas jasa panggilan internasional pihak lainnya yang digunakan oleh pelanggan pihak lainnya. Masing-masing pihak harus membayar kepada pihak lainnya 1% dari penerimaan tagihan yang dilakukan oleh pihak lainnya, ditambah biaya proses penagihan sebesar Rp82 sebagai kompensasi atas proses penagihan. Namun, biaya penerimaan tagihan dan proses penagihan tersebut diubah menjadi biaya layanan (“service charge”), yang dihitung sebesar Rp1.250 per menit dari *outgoing call* berlaku mulai 1 April 2008.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Telkom menandatangani nota kesepakatan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru sesuai dengan peraturan interkoneksi berbasis biaya yang efektif mulai tanggal 1 Januari 2007. Nota kesepakatan ini diamandemen pada tanggal 18 Desember 2007.

31. PERJANJIAN INTERKONEKSI (lanjutan)

1. Telkom (lanjutan)

   b. Jasa Selular

   Perusahaan menandatangani perjanjian interkoneksi antara jaringan bergerak selular dengan jaringan tetap Telkom pada tanggal 1 Desember 2005. Berdasarkan perjanjian tersebut, interkoneksi antara jaringan bergerak selular Perusahaan dengan jaringan tetap Telkom yang memungkinkan pelanggan selular Perusahaan untuk melakukan atau menerima panggilan ke atau dari pelanggan telekomunikasi tetap Telkom.

   Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Telkom menandatangani nota kesepakatan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru sesuai dengan peraturan interkoneksi berbasis biaya yang efektif mulai tanggal 1 Januari 2007. Nota kesepakatan ini diamandemen pada tanggal 18 Desember 2007.

2. PT Excelcomindo Pratama atau "Excelcom", Mobile-8 (setelah Komselindo bergabung dengan Mobile-8) dan Telkomsel

   Hal-hal yang diatur antara lain sebagai berikut:

   - Interkoneksi antara sentral gerbang internasional Perusahaan dan Satelindo dengan jaringan STBS operator tersebut untuk melakukan percakapan internasional dari atau ke luar negeri melalui sentral gerbang internasional Perusahaan dan Satelindo.
   - Perusahaan dan Satelindo menerima sebagian pendapatan operator tersebut dari percakapan yang dilakukan melalui sentral gerbang internasional Perusahaan dan Satelindo sebagai kompensasi atas interkoneksi tersebut.
   - Satelindo dan IM3 juga mengadakan perjanjian dengan operator tersebut di atas untuk interkoneksi STBS GSM milik Satelindo dan IM3 dengan jaringan operator tersebut, yang memungkinkan pelanggan operator tersebut melakukan panggilan/mengirim pesan singkat ("SMS") kepada atau menerima panggilan/SMS dari pelanggan Satelindo dan IM3.
   - Perjanjian ini dapat diperbaharui setiap tahun.

   Perusahaan (termasuk Satelindo dan IM3 sampai saat penggabungan - Catatan 1e) dan operator di atas masih tetap melakukan perhitungan berdasarkan perjanjian tersebut dengan menerapkan perhitungan kompensasi semula, kecuali untuk biaya interkoneksi.

   Pada tanggal 8, 27 dan 28 Desember 2006, Perusahaan menandatangani nota kesepakatan masing-masing dengan Telkomsel, Mobile-8 dan Excelcom mengenai penerapan tarif interkoneksi baru berbasis biaya yang efektif pada tanggal 1 Januari 2007 sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 (Catatan 30). Nota kesepakatan dengan masing-masing Mobile-8, Excelcom dan Telkomsel diamandemen masing-masing pada tanggal 14 September, dan 17 dan 19 Desember 2007.

Pendapatan (beban) interkoneksi - bersih dari (kepada) operator tersebut adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Telkom	189.556	449.730	399.122
Telkomsel	2.170	5.405	(50.782)
Mobile-8	14.341	18.247	2.028
Excelcom	(30.818)	25.341	(34.675)
Pendapatan bersih	**175.249**	**498.723**	**315.693**

32. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Saldo aktiva dan kewajiban moneter Perusahaan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2008 (dikonversi ke dalam ekuivalen dolar A.S. apabila dalam mata uang selain dolar A.S.) adalah sebagai berikut:

	Jumlah dalam Dolar A.S.	Konversi ke Rupiah *
Aktiva:		
Kas dan setara kas	370.247	4.054.207
Piutang		
Usaha	112.100	1.227.495
Lain-lain	467	5.114
Aktiva derivatif	59.963	656.594
Aktiva lancar lainnya	2.259	24.736
Piutang hubungan istimewa	756	8.278
Aktiva tidak lancar - lain-lain	1.131	12.388
Jumlah aktiva	546.923	5.988.812
Kewajiban:		
Hutang usaha	31.044	339.932
Hutang pengadaan	412.301	4.514.696
Biaya masih harus dibayar	39.048	427.576
Uang muka pelanggan	1.010	11.059
Kewajiban derivatif	28.846	315.866
Kewajiban lancar lainnya	23	252
Kewajiban hubungan istimewa	1	11
Hutang jangka panjang (termasuk bagian yang jatuh tempo)	645.698	7.070.388
Hutang obligasi (termasuk bagian yang jatuh tempo)	344.157	3.768.519
Kewajiban tidak lancar lainnya	13.260	145.202
Jumlah kewajiban	1.515.388	16.593.501
Posisi kewajiban bersih	**968.465**	**10.604.689**

* dikonversikan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal neraca

33. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya dalam tiga segmen dilaporkan: selular, telekomunikasi tetap dan MIDI. Segmen usaha diatur secara terpisah karena masing-masing menawarkan jasa/produk yang berbeda dan melayani pasar yang berbeda pula. Perusahaan hanya beroperasi dalam satu wilayah geografis, oleh karena itu informasi segmen geografis tidak disajikan.

Hasil segmen dan aktiva termasuk pos-pos yang dapat diatribusikan secara langsung maupun yang dialokasikan dengan dasar yang memadai. Pengeluaran modal segmen adalah jumlah pengeluaran selama tahun berjalan untuk memperoleh aktiva segmen yang penggunaannya diharapkan lebih dari satu tahun.

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi konsolidasi menurut segmen industri adalah sebagai berikut:

	Segmen Utama			
	Selular	Telekomunikasi Tetap	MIDI	Jumlah Segmen
2008				
Pendapatan Usaha				
Pendapatan dari pelanggan ekstern	14.178.922	1.744.716	2.735.495	18.659.133
Pendapatan antar segmen	(363.347)	363.347	472.460	472.460
Jumlah pendapatan usaha	13.815.575	2.108.063	3.207.955	19.131.593
Eliminasi pendapatan antar segmen				(472.460)
Pendapatan usaha - bersih				**18.659.133**
Penghasilan				
Laba usaha	3.148.860	793.706	790.713	4.733.279
Pendapatan bunga				460.089
Laba perubahan nilai wajar derivatif - bersih				136.603
Beban pendanaan				(1.858.294)
Rugi kurs - bersih				(885.729)
Beban pajak penghasilan - bersih				(419.830)
Amortisasi goodwill				(227.317)
Lain-lain - bersih				(33.516)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan				**1.905.285**
Informasi Lainnya				
Aktiva segmen	39.472.716	2.570.142	7.115.939	49.158.797
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan				7.909.907
Eliminasi aktiva antar segmen				(5.375.381)
Aktiva - bersih				**51.693.323**
Kewajiban segmen	29.574.729	1.197.315	3.795.130	34.567.174
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan				3.527.000
Eliminasi kewajiban antar segmen				(4.099.410)
Kewajiban - bersih				**33.994.764**
Pengeluaran modal	10.042.807	682.907	1.616.189	12.341.903
Penyusutan dan amortisasi	3.730.620	290.842	566.429	4.587.891

	Segmen Utama			
	Selular	Telekomunikasi Tetap	MIDI	Jumlah Segmen
2007				
Pendapatan Usaha				
Pendapatan dari pelanggan ekstern	12.752.496	1.567.415	2.168.584	16.488.495
Pendapatan antar segmen	(205.765)	205.765	364.192	364.192
Jumlah pendapatan usaha	12.546.731	1.773.180	2.532.776	16.852.687
Eliminasi pendapatan antar segmen				(364.192)
Pendapatan usaha - bersih				**16.488.495**

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	Segmen Utama			
	Selular	Telekomunikasi Tetap	MIDI	Jumlah Segmen
2007 (lanjutan)				
Penghasilan				
Laba usaha	3.438.770	661.039	419.795	4.519.604
Pendapatan bunga				232.411
Laba perubahan nilai wajar derivatif - bersih				68.023
Beban pendanaan				(1.428.604)
Beban pajak penghasilan				(859.517)
Amortisasi goodwill				(226.507)
Rugi kurs - bersih				(155.315)
Lain-lain - bersih				(79.996)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan				**2.070.099**
Informasi Lainnya				
Aktiva segmen	35.594.557	1.667.532	4.923.560	42.185.649
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan				9.715.950
Eliminasi aktiva antar segmen				(6.596.513)
Aktiva - bersih				**45.305.086**
Kewajiban segmen	27.859.412	989.627	981.244	29.830.283
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan				3.821.202
Eliminasi kewajiban antar segmen				(5.188.499)
Kewajiban - bersih				**28.462.986**
Pengeluaran modal	8.382.846	428.278	915.273	9.726.397
Penyusutan dan amortisasi	3.477.044	198.378	519.780	4.195.202

	Segmen Utama			
	Selular	Telekomunikasi Tetap	MIDI	Jumlah Segmen
2006				
Pendapatan Usaha				
Pendapatan dari pelanggan ekstern	9.227.537	1.109.281	1.902.589	12.239.407
Pendapatan antar segmen	(222.650)	222.650	318.119	318.119
Jumlah pendapatan usaha	9.004.887	1.331.931	2.220.708	12.557.526
Eliminasi pendapatan antar segmen				(318.119)
Pendapatan usaha - bersih				**12.239.407**
Penghasilan				
Laba usaha	2.291.923	627.611	479.125	3.398.659
Laba kurs - bersih				304.401
Pendapatan bunga				212.823
Beban pendanaan				(1.248.899)
Beban pajak penghasilan				(576.107)
Rugi perubahan nilai wajar derivatif - bersih				(438.774)
Amortisasi goodwill				(226.507)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi				(238)
Lain-lain - bersih				21.202
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan				**1.446.560**

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	Segmen Utama			
	Selular	Telekomunikasi Tetap	MIDI	Jumlah Segmen
2006 (lanjutan)				
Informasi Lainnya				
Aktiva segmen	30.550.224	1.552.003	3.738.044	35.840.271
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan				4.520.191
Eliminasi aktiva antar segmen				(6.131.804)
Aktiva - bersih				**34.228.658**
Kewajiban segmen	19.665.806	760.291	731.026	21.157.123
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan				2.633.240
Eliminasi kewajiban antar segmen				(4.964.070)
Kewajiban - bersih				**18.826.293**
Pengeluaran modal	5.961.152	366.718	593.458	6.921.328
Penyusutan dan amortisasi	2.967.185	182.702	503.379	3.653.266

34. KONDISI EKONOMI

Kegiatan Perusahaan dipengaruhi dan mungkin akan terus dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa mendatang, yang mungkin dapat berdampak pada ketidakstabilan nilai mata uang dan tingkat bunga, begitu juga dengan penurunan harga saham yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh Pemerintah dan faktor lainnya, yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan. Laporan keuangan ini mencakup dampak kondisi ekonomi sepanjang hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Seperti yang telah diatur oleh *United States Securities and Exchange Commission ("U.S. SEC"),* pada tanggal 20 Januari 2009, Perusahaan telah melakukan *filling schedule* 14D-9, *"Solicitation/ Recommendation Statement"* kepada U.S. SEC sebagai tanggapan terhadap Penawaran Tender (*Tender Offer)* yang akan dilakukan oleh Qtel, pemegang saham utama Perusahaan, di Amerika Serikat dan Indonesia.

b. Pada tanggal 20 Januari 2009, Perusahaan menandatangani kontrak swap suku bunga dengan DBS dengan nilai nosional sebesar AS$26.000, yang akan berkurang berdasarkan jadual yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarakan kontrak, Perusahaan setuju untuk membayar bunga yang dihitung dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,83% setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai tanggal 12 Desember 2012, sebagai pertukaran atas suku bunga LIBOR dolar A.S. enam bulanan ditambah 1,85% per tahun.

c. Pada tanggal 21 Januari 2009, Perusahaan mengirimkan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai permintaan tambahan untuk meningkatkan SKPLB untuk tahun pajak 2004 sebagaimana disebutkan dalam KEP-00080 (Catatan 12).

d. Pada tanggal 28 Januari 2009, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman ke-13 sebesar AS$4.156 dari fasilitas pinjaman COFACE dari HSBC Perancis (Catatan 14e).

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

e. Pada tanggal 2 Februari 2009, Perusahaan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak sebesar Rp84.650 untuk tambahan kelebihan pembayaran pajak untuk pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2004 (Catatan 12).

f. Pada tanggal 12 Februari 2009, Perusahaan menandatangani amandemen perjanjian dengan BCA untuk beberapa ketentuan dalam perjanjian fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000 (Catatan 14d) dan Rp500.000 (Catatan 28b). Amandemen ini mencakup perubahan definisi dan rasio keuangan tertentu dari persyaratan pinjaman (*loan covenants*).

g. Pada tanggal 24 Februari 2009, Perusahaan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit 5 tahun yang tidak dijaminkan sebesar AS$450.000 dengan 13 lembaga keuangan (termasuk ING Bank N.V. dan DBS Bank Ltd.) (Catatan 14c). Amandemen ini mencakup perubahan definisi dan rasio keuangan tertentu dari persyaratan pinjaman (*loan covenants*).

h. Pada tanggal 27 Februari 2009, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari FEC dan DBS untuk melakukan amandemen perjanjian pinjaman terkait (masing-masing pada Catatan 14i dan 14f) untuk merubah definisi dan rasio keuangan tertentu dari persyaratan pinjaman (*loan covenants*).

i. Pada tanggal 2 Maret 2009, Perusahaan menandatangani sebuah kontrak swap suku bunga dengan BTMUFJ dengan jumlah nosional AS$36.500, yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kontrak, Perusahaan setuju untuk membayar bunga yang dihitung dengan menggunakan suku bunga tetap sebesar 4,1% setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011 dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan 12 Juni 2012 sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S 6 bulanan ditambah dengan 1,85% per tahun.

j. Pada tanggal 3 Maret 2009, Perusahaan menandatangani kontrak swap suku bunga dengan ING Bank N.V dengan jumlah nosional AS$25.000, yang akan menurun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kontrak, Perusahaan setuju untuk membayar bunga yang dihitung dengan menggunakan suku bunga tetap sebesar 4,0094% setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan 12 Desember 2011 sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S 6 bulanan ditambah dengan 1,85% per tahun.

k. Pada tanggal 4 Maret 2009, ICLS, anak perusahaan yang dimiliki langsung oleh Qtel, meningkatkan kepemilikannya di Perusahaan sebesar 23,29%, yang secara efektif meningkatkan kepemilikan Qtel menjadi sebesar 65%.

l. Pada tanggal 6 Maret 2009, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman ke-14 sebesar AS$1.974 dari fasilitas COFACE dari HSBC Perancis (Catatan 14e).

m. Pada tanggal 16 Maret 2009, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp500.000 dari fasilitas kredit dari BCA (Catatan 28b).

n. Pada tanggal 18 Maret 2009, Perusahaan melakukan amandemen terhadap Fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun (Catatan 14h) dan Fasilitas COFACE dan SINOSURE (Catatan 14e) untuk merubah definisi dan rasio keuangan tertentu dari persyaratan pinjaman (*loan covenants*).

o. Pada tanggal 18 Maret 2009, kurs yang berlaku adalah Rp11.979 untuk AS$1 (dalam jumlah penuh), sementara pada tanggal 31 Desember 2008, kurs yang berlaku adalah Rp10.950 untuk AS$1 (dalam jumlah penuh). Dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009, Perusahaan mengalami rugi kurs sekitar Rp996.550 (tidak termasuk dampak penilaian kembali kontrak derivatif pada tanggal 18 Maret 2009) atas kewajiban dalam mata uang asing, setelah dikurangi aktiva dalam mata uang asing, pada tanggal 31 Desember 2008 (Catatan 32).

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

Penjabaran kewajiban dalam mata uang asing, setelah dikurangi aktiva dalam mata uang asing, tidak dapat ditafsirkan bahwa kewajiban dan aktiva dalam mata uang asing ini telah, telah dapat atau akan dapat dikonversikan ke rupiah di masa depan dengan kurs yang berlaku dari Rupiah pada dolar A.S. pada tanggal 31 Desember 2008 atau kurs pertukaran lainnya.

Ikatan untuk pengeluaran modal dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2008 seperti yang diungkapkan dalam Catatan 28a akan menjadi sekitar Rp4.784.377 jika dijabarkan dengan kurs pada tanggal 18 Maret 2009.

36. PERNYATAAN SAK YANG DIREVISI

Berikut ini adalah ringkasan revisi SAK 50 dan SAK 55 terbaru yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia:

- SAK 14 (Revisi 2008), "Persediaan", berisi perlakuan akuntansi tentang persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan panduan untuk menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya terhadap beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Pernyataan ini juga memberikan panduan untuk rumus perhitungan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. SAK 14 (2008) ini menggantikan SAK 14: Persediaan (1994) dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini dianjurkan.

- SAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. SAK 50 (Revisi 2006) ini menggantikan SAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 (direvisi menjadi pada atau setelah 1 Januari 2010). Penerapan lebih dini dianjurkan.

- SAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan items non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. SAK 55 (Revisi 2006) ini menggantikan SAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 (direvisi menjadi pada atau setelah 1 Januari 2010). Penerapan lebih dini dianjurkan.

Perusahaan belum menerapkan SAK revisi ini. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari SAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasi.

37. PERATURAN PEMERINTAH

- Pada tanggal 28 Desember 2007, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Peraturan Pemerintah No. 81/2007 ("PP No. 81/2007") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka". Peraturan ini mengatur perseroan terbuka di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1(b) dari Undang-undang Pajak Penghasilan, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (Catatan 17) dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi oleh perseroan terbuka dalam waktu paling singkat enam bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan tidak berharap dapat memenuhi kriteria untuk memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan, dan oleh karenanya tidak menerapkan penurunan tarif pajak ini terhadap aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan.

- Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang "Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan" (Catatan 12). Peraturan ini mengubah, antara lain, skema tarif pajak penghasilan badan, obyek pajak, dan definisi dari biaya yang dapat dikurangkan secara pajak. Seluruh ketentuan dalam peraturan ini akan dilaksanakan efektif mulai tanggal 1 Januari 2009.

38. IKHTISAR PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT

Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ("SAK"). Perusahaan telah menyajikan informasi berikut dalam Catatan ini dan Catatan 39, untuk menyajikan sifat dan pengaruh perbedaan antara SAK dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat ("U.S. GAAP") terhadap laba bersih dan ekuitas Perusahaan. Penjelasan tambahan untuk pengungkapan U.S. GAAP disajikan pada Catatan 40.

a. Bunga yang dikapitalisasi ke Aktiva dalam Pembangunan dan Pemasangan

Berdasarkan SAK, salah satu kriteria untuk mengkapitalisasi beban bunga ke Aktiva Tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*) (seperti Aktiva dalam Pembangunan dan Pemasangan) adalah bunga yang dikapitalisasi harus dapat diatribusikan dengan aktiva tertentu tersebut. Kapitalisasi beban bunga perusahaan induk ke aktiva anak perusahaan tidak diperbolehkan menurut SAK. Perusahaan tidak mengkapitalisasi bunga atas pinjaman yang penerimaannya tidak digunakan untuk memperoleh Aktiva Tertentu.

Berdasarkan U.S. GAAP, *Statement of Financial Accounting Standards* ("SFAS") No. 34, "*Capitalization of Interest Cost*", tidak disebutkan bahwa beban bunga harus dapat diatribusikan dengan Aktiva Tertentu yang memenuhi syarat; oleh karena itu, bunga yang dapat dikapitalisasi termasuk beban bunga atas pinjaman umum dan khusus. Lebih lanjut, U.S. GAAP mewajibkan kapitalisasi beban bunga perusahaan induk ke seluruh pengeluaran yang memenuhi syarat. Perbedaan jumlah beban bunga yang dikapitalisasi berdasarkan SAK dan U.S. GAAP akan menyebabkan tambahan penyusutan yang diakui berdasarkan U.S. GAAP.

38. IKHTISAR PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan)

b. Goodwill

Berdasarkan SAK, Goodwill diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat dari Goodwill.

Berdasarkan U.S. GAAP, goodwill tidak diamortisasi tetapi ditelaah penurunan nilainya berdasarkan SFAS No. 142, "*Goodwill and Other Intangible Assets*".

c. Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan SAK, pendapatan dari jasa penyambungan diakui sebagai pendapatan pada saat aktivasi sambungan (untuk jasa pasca-bayar) atau pada saat aktivasi (untuk jasa pra-bayar).

Berdasarkan U.S. GAAP, sesuai dengan *SEC Staff Accounting Bulletin* ("SAB") No. 104, "*Revenue Recognition*", pendapatan dari jasa penyambungan harus ditangguhkan dan diakui berdasarkan perkiraan jangka waktu hubungan dengan pelanggan yang bersangkutan.

d. Kapitalisasi Rugi Kurs - Dikurangi Laba Kurs

Berdasarkan SAK, rugi kurs - dikurangi laba kurs atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan sebuah aktiva tertentu harus dikapitalisasi. Kapitalisasi rugi kurs bersih dihentikan pada saat pembangunan secara substansial selesai dan aktiva yang dibangun siap untuk digunakan.

Berdasarkan U.S. GAAP, laba atau rugi kurs harus dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan pada saat terjadinya. Kapitalisasi rugi kurs bersih dan beban depresiasi yang bersangkutan berdasarkan SAK harus dibalik untuk tujuan U.S. GAAP.

e. Hak atas tanah

Hak atas tanah di Indonesia, kecuali Hak Milik yang diberikan kepada perorangan, dikuasai oleh negara berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak pemakaian tanah diberikan melalui sertifikat hak atas tanah, di mana pemegang hak dapat memanfaatkan sebidang tanah selama periode tertentu yang dapat diperpanjang. Perusahaan memperkirakan bahwa hak atas tanah dapat diperpanjang dengan biaya nominal yang wajar di masa mendatang. Umumnya hak atas tanah dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat dijadikan jaminan hutang. Praktik yang umum berlaku adalah mengkapitalisasi harga perolehan hak atas tanah dan tidak mengamortisasikannya.

Berdasarkan SAK, biaya lain sehubungan dengan perolehan ijin Pemerintah untuk menggunakan tanah (seperti biaya notaris, pajak dan biaya lainnya) harus diamortisasi selama perkiraan masa pemakaian hak atas tanah yang diperoleh dari Pemerintah, yang dalam hal Perusahaan, berkisar antara 20 sampai 30 tahun.

Berdasarkan U.S. GAAP, biaya untuk memperoleh hak atas tanah dan serta biaya-biaya lainnya yang terkait, harus diamortisasi selama masa penggunaan hak atas tanah yang diperoleh dari Pemerintah, yang berkisar antara 20 sampai 30 tahun.

38. IKHTISAR PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan)

f. Dana Pensiun

Berdasarkan SAK, Perusahaan menerapkan SAK 24 (Revisi 2004) (Catatan 2q). Berdasarkan SAK 24 (Revisi 2004) tidak terdapat kewajiban peralihan (*transition obligation*) yang timbul pada saat penerapan awal dari SAK dan biaya jasa lalu diakui sebagai beban secara garis lurus selama periode rata-rata sampai manfaat tersebut menjadi hak karyawan (*vested*).

Berdasarkan U.S. GAAP, mulai pada tahun 2006, Perusahaan menerapkan SFAS No. 158, "*Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans"*, yang mengamandemen SFAS No. 87, 88, 106 and 132 (R). Berdasarkan SFAS No. 158, suatu perusahaan diharuskan mengakui status program manfaat karyawan yang didanai ataupun tidak didanai dalam neraca keuangan dan juga mengakui sebagai bagian dari Pendapatan Komprehensif Lainnya ("*Other Comprehensive Income*"), setelah pajak, laba atau rugi aktuarial dan biaya atau manfaat jasa lalu serta aktiva atau kewajiban peralihan yang terakumulasi pada tanggal penerapan yang sebelumnya tidak diakui sebagai bagian dari beban pensiun berkala bersih sesuai dengan SFAS No. 87 "*Employers' Accounting for Pensions*". SFAS No. 158 tidak mengubah perhitungan beban pensiun berkala bersih berdasarkan SFAS No. 87. Sesuai dengan SFAS No. 87, kewajiban peralihan dan biaya jasa lalu diamortisasi sepanjang sisa masa kerja rata-rata karyawan.

g. Hak Minoritas

Merupakan dampak bersih bagian pemegang saham minoritas atas ekuitas anak perusahaan, akibat perbedaan antara SAK dan U.S. GAAP yang mempengaruhi laba bersih anak perusahaan.

h. Jaminan Kesehatan Masa Pensiun

Pada bulan Juli 2004, Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") mengeluarkan SAK 24 (Revisi 2004) "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja dan juga mencakup jaminan kesehatan masa pensiun. Berdasarkan SAK 24 (Revisi 2004) tidak terdapat kewajiban peralihan (*transition obligation*) yang timbul pada saat penerapan awal dari SAK dan biaya jasa lalu diakui sebagai beban secara garis lurus selama periode rata-rata sampai manfaat tersebut menjadi hak karyawan (*vested*).

Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengakui beban jaminan kesehatan masa pensiun selama taksiran masa kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaria sesuai dengan perlakuan yang diatur dalam SFAS No. 106, "*Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other than Pensions*".

Mulai pada tahun 2006, Perusahaan menerapkan SFAS No. 158, dimana perusahaan diharuskan mengakui status program manfaat karyawan yang didanai ataupun tidak didanai dalam neraca keuangan dan juga mengakui sebagai bagian dari Pendapatan Komprehensif Lainnya, setelah pajak, laba atau rugi aktuarial, biaya atau manfaat jasa lalu, serta aktiva atau kewajiban peralihan yang terakumulasi pada tanggal penerapan yang sebelumnya tidak diakui sebagai bagian dari beban manfaat berkala bersih. Berdasarkan SFAS No. 106, kewajiban peralihan dan biaya jasa lalu diamortisasi sepanjang sisa masa kerja rata-rata karyawan.

38. IKHTISAR PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PRINSIP AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI AMERIKA SERIKAT (lanjutan)

i. Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi

Merupakan dampak dari perbedaan antara SAK dan U.S. GAAP dalam hal akuntansi perusahaan asosiasi untuk selisih kurs atas pinjaman sehubungan dengan aktiva dalam pembangunan (lihat "d" di atas).

j. Laba Pra-akuisisi

Merupakan perbedaan proporsi pemegang saham minoritas atas laba bersih IM3 sampai dengan tahun 2003 berdasarkan SAK dan U.S. GAAP pada saat akuisisi hak minoritas Anak Perusahaan tersebut.

k. Lainnya

Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian-penyesuaian yang tidak signifikan atas perbedaan antara SAK dan U.S. GAAP.

l. Pajak Penghasilan Tangguhan

Rekonsiliasi pajak tangguhan diakibatkan oleh efek pajak dari penyesuaian rekonsiliasi antara SAK dan U.S. GAAP yang diungkapkan di atas.

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan", direvisi untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (Catatan 37). Perubahan tersebut mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dampak dari perubahan tarif pajak ini dimasukkan dalam penyesuaian rekonsiliasi pajak tangguhan.

39. REKONSILIASI LABA BERSIH DAN EKUITAS BERDASARKAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Berikut ini adalah ikhtisar penyesuaian terhadap laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dan terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang diperlukan untuk merekonsiliasi laba bersih dan ekuitas berdasarkan SAK dan U.S. GAAP:

	2008	2007	2006
	Rp	Rp	Rp
Laba bersih menurut laporan keuangan konsolidasi berdasarkan SAK	1.878.522	2.042.043	1.410.093

39. REKONSILIASI LABA BERSIH DAN EKUITAS BERDASARKAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (lanjutan)

	2008	2007	2006
	Rp	Rp	Rp
Penyesuaian U.S. GAAP			
Kenaikan (penurunan) disebabkan oleh:			
Kapitalisasi beban bunga	890.914	488.199	326.314
Amortisasi goodwill	227.476	226.348	226.348
Beban penyusutan	(147.442)	(77.387)	(47.242)
Amortisasi hak atas tanah	(15.732)	(14.558)	(12.422)
Beban pensiun berkala bersih	(8.880)	(5.924)	(7.424)
Pendapatan jasa penyambungan ditangguhkan - setelah dikurangi amortisasi	(4.233)	10.828	43.599
Beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala bersih	(1.296)	(1.334)	(155)
Hak minoritas	(604)	49	(1.260)
Kapitalisasi rugi kurs bersih	-	-	(33.207)
Lainnya	(258)	(337)	(1.636)
Pengaruh pajak penghasilan tangguhan atas penyesuaian U.S. GAAP (penyesuaian untuk tahun 2008 termasuk dampak dari perubahan tarif pajak penghasilan badan)	(78.314)	(192.117)	(151.979)
Penyesuaian bersih	861.631	433.767	340.936
Laba bersih sesuai U.S. GAAP	**2,740,153**	**2.475.810**	**1.751.029**
Laba per saham dasar	**504,27**	**455,62**	**323,99**
Laba per saham dilusian	**504,27**	**455,62**	**321,94**
Laba per ADS dasar (50 saham Seri B per ADS)	**25.213,36**	**22.781,01**	**16.199,28**
Laba per ADS dilusian	**25.213,36**	**22.781,01**	**16.097,23**

39. REKONSILIASI LABA BERSIH DAN EKUITAS BERDASARKAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (lanjutan)

	2008	2007
	Rp	Rp
Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi berdasarkan SAK	17.409.621	16.544.730
Penyesuaian U.S. GAAP		
Kenaikan (penurunan) disebabkan oleh:		
Kapitalisasi beban bunga	2.414.080	1.523.166
Amortisasi goodwill	2.050.042	1.822.566
Pensiun dibayar di muka	90.860	(142.349)
Akumulasi penyusutan	(159.934)	(12.492)
Amortisasi hak atas tanah	(106.183)	(90.451)
Kapitalisasi rugi kurs bersih - setelah dikurangi laba	(60.063)	(60.063)
Pendapatan jasa penyambungan ditangguhkan - setelah dikurangi amortisasi	(41.548)	(37.315)
Laba pra-akuisisi	(14.303)	(14.303)
Beban jaminan kesehatan masa pensiun yang masih harus dibayar	(8.843)	(396.021)
Hak minoritas	(5.800)	(5.196)
Pembalikan kewajiban pajak tangguhan atas selisih transaksi perubahan ekuitas Satelindo dan Bimagraha akibat penggabungan usaha	(1.293)	(1.293)
Lainnya	(33.400)	(7.895)
Pengaruh pajak tangguhan atas penyesuaian U.S. GAAP	(1.092.174)	(862.531)
Penyesuaian bersih	3.031.441	1.715.823
Ekuitas sesuai dengan U.S. GAAP	**20.441.062**	**18.260.553**

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP

Informasi berikut ini disajikan dalam basis U.S. GAAP:

a. Ringkasan signifikan dari neraca konsolidasi

	2008	2007
Aktiva lancar	10.001.237	11.126.487
Aktiva tidak lancar	46.618.763	37.713.637
Jumlah aktiva	**56.620.000**	**48.840.124**
Kewajiban lancar	10.728.398	11.707.500
Kewajiban tidak lancar	25.160.998	18.574.750
Jumlah kewajiban	35.889.396	30.282.250
Hak minoritas	289.542	297.321
Ekuitas	20.441.062	18.260.553
Jumlah kewajiban dan ekuitas	**56.620.000**	**48.840.124**

b. Akun-akun penilaian dan yang memenuhi syarat

Berikut ini merupakan ikhtisar pergerakan dari akun-akun penilaian dan yang memenuhi syarat:

Keterangan	Saldo Pada Awal Tahun	Dibebankan (Dikreditkan) ke akun biaya dan beban	Pengurangan	Efek Penyesuaian Selisih Kurs	Saldo Pada Akhir Tahun
2008					
Penyisihan piutang ragu-ragu:					
Piutang usaha					
Lain-lain	17.240	2.031	(1.245)[a]	841	18.867
Piutang hubungan istimewa	2.257	44	-	118	2.419
Penyisihan aktiva pajak tangguhan	1.640	(209)	-	-	1.431
Jumlah	**21.137**	**1.866**	**(1.245)**	**959**	**22.717**
2007					
Penyisihan piutang ragu-ragu:					
Piutang usaha					
Lain-lain	16.572	266	-	402	17.240
Piutang hubungan istimewa	2.795	(562)	-	24	2.257
Penyisihan aktiva pajak tangguhan	1.640	-	-	-	1.640
Jumlah	**21.007**	**(296)**	**-**	**426**	**21.137**

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

b. Akun-akun penilaian dan yang memenuhi syarat (lanjutan)

Keterangan	Saldo Pada Awal Tahun	Dibebankan (Dikreditkan) ke akun biaya dan beban	Pengurangan	Efek Penyesuaian Selisih Kurs	Saldo Pada Akhir Tahun
2006					
Penyisihan piutang ragu-ragu:					
Piutang usaha					
Lain-lain	34.575	(2.069)	(15.175)[a]	(759)	16.572
Piutang hubungan istimewa	1.753	1.037	-	5	2.795
Penyisihan aktiva pajak tangguhan	4.708	-	(3.068)[b]	-	1.640
Jumlah	**41.036**	**(1.032)**	**(18.243)**	**(754)**	**21.007**

[a] pengurangan penyisihan piutang ragu-ragu karena penghapusan piutang usaha
[b] pengurangan penyisihan aktiva pajak tangguhan karena jatuh temponya akumulasi kerugian pajak

c. Laporan Pendapatan Komprehensif

Berikut ini adalah laporan pendapatan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006:

	2008	2007	2006
Laba bersih**	2.740.153	2.475.810	1.751.029
Pendapatan Komprehensif Lainnya:			
Perubahan manfaat pensiun yang dicatat sebagai pendapatan komprehensif lainnya - setelah efek pajak sebesar Rp151.329 pada tahun 2008 dan (Rp38.997) pada tahun 2007 (Catatan 38f and 38h)	453.987	(90.991)	-
Penjabaran selisih kurs - setelah efek pajak penghasilan sebesar Rp2.371 pada tahun 2008, Rp2.570 pada tahun 2007 dan (Rp18) pada tahun 2006	7.114	5.995	(46)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Bersih	**3.201.254**	**2.390.814**	**1.750.983**

** Dampak dari perubahan tarif pajak terhadap saldo awal Pendapatan Komprehensif Lainnya sebesar Rp34.843 termasuk dalam laba bersih tahun 2008. Berdasarkan SFAS 109, dampak dari perubahan tarif pajak dimasukkan dalam laba bersih dalam periode dimana tarif pajak telah secara substantif berlaku; ketentuan ini juga berlaku untuk perubahan pajak tangguhan yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas atau Pendapatan Kompehensif Lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, akumulasi rugi komprehensif lainnya masing-masing adalah sebesar Rp55.389 dan Rp481.647 berdasarkan U.S. GAAP.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

d. Pensiun dan manfaat kesehatan masa pensiun

Mulai pada tahun 2006, Perusahaan menerapkan pengakuan dan pengungkapan SFAS 158 yang mengharuskan Perusahaan untuk mengakui status pendanaan (yaitu selisih antara nilai wajar aktiva program manfaat karyawan dan kewajiban manfaat yang diproyeksikan) program dana pensiun dan manfaat kesehatan masa pensiun dalam neraca konsolidasi, dengan penyesuaian terhadap akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak. Penyesuaian terhadap akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada saat penerapan merupakan rugi aktuarial bersih yang belum diakui, biaya jasa lalu yang belum diakui dan kewajiban peralihan yang belum diakui yang tersisa dari penerapan awal SFAS 87 dan SFAS 106, dimana sebelumnya semuanya tersebut dikurangkan terhadap status pendanaan program manfaat karyawan dalam neraca konsolidasi Perusahaan sesuai dengan SFAS 87 dan SFAS 106.

Selanjutnya, jumlah ini akan diakui sebagai biaya manfaat berkala bersih sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan untuk mengamortisasi jumlah tersebut. Kemudian, rugi dan laba aktuarial yang timbul pada periode setelahnya dan tidak diakui sebagai biaya manfaat berkala bersih pada periode yang sama akan diakui sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya, jumlah tersebut akan diakui sebagai bagian dari biaya manfaat berkala bersih dengan dasar yang sama dengan jumlah yang diakui dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada saat penerapan SFAS 158.

Komposisi dari beban untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006
Program Pensiun Manfaat Pasti			
Beban bunga	66.100	63.417	63.650
Beban jasa	29.503	38.801	37.660
Amortisasi bersih	13.967	15.579	7.425
Pengembalian aktiva dana pensiun yang diharapkan	(63.894)	(64.607)	(71.136)
Beban pensiun berkala bersih	**45.676**	**53.190**	**37.599**
Manfaat kesehatan masa pensiun lainnya			
Beban bunga	89.900	103.427	48.579
Beban jasa	33.016	49.154	39.248
Amortisasi bersih	29.113	17.577	18.512
Manfaat tambahan sehubungan dengan pensiun dini	-	-	1.167
Jumlah beban manfaat kesehatan masa pensiun lainnya berkala	**152.029**	**170.158**	**107.506**

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

d. Pensiun dan manfaat kesehatan masa pensiun (lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai akumulasi rugi komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 terdiri dari:

	2008	2007
Program Pensiun Manfaat Pasti		
Kewajiban peralihan yang belum diakui	-	68
Biaya jasa lalu yang belum diakui	6.235	6.668
Kerugian aktuarial yang belum diakui	14.932	256.519
Jumlah	21.167	263.255
Dikurangi pajak tangguhan	5.292	78.977
Bersih	**15.875**	**184.278**
Manfaat kesehatan masa pensiun lainnya		
Kewajiban peralihan yang belum diakui	514	780
Biaya jasa lalu yang belum diakui	57.150	68.397
Kerugian aktuarial yang belum diakui	12.743	364.460
Jumlah **	70.407	433.637
Dikurangi pajak tangguhan	17.602	130.091
Bersih	**52.805**	**303.546**
Jumlah	**68.680**	**487.824**

** Manfaat kesehatan masa pensiun lainnya, seperti tunjangan perumahan dan manfaat UUK, termasuk sebagai "Lain-lain" pada Catatan 39. Akumulasi rugi komprehensif lainnya sehubungan dengan tunjangan perumahan dan manfaat UUK adalah sebesar Rp49.627 dan Rp24.381 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

d. Pensiun dan manfaat kesehatan masa pensiun (lanjutan)

Kewajiban peralihan, biaya jasa lalu dan rugi aktuarial bersih yang termasuk dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2008 dan diharapkan akan diakui sebagai beban pensiun berkala bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	Program Pensiun Manfaat Pasti	Manfaat Kesehatan Masa Pensiun	Jumlah
Kewajiban peralihan	-	266	266
Biaya jasa lalu	432	11.247	11.679
Rugi aktuarial bersih	484	1.834	2.318
Jumlah	916	13.347	14.263
Dikurangi pajak tangguhan	256	3.737	3.993
Bersih	**660**	**9.610**	**10.270**

Rekonsiliasi antara kewajiban pensiun yang diproyeksikan dan nilai wajar aktiva dana pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan akumulasi kewajiban pensiun pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2008	2007
Program pensiun manfaat pasti		
Status Pendanaan		
Kewajiban pensiun yang diproyeksikan		
Saldo awal tahun	672.145	644.903
Beban bunga	66.100	63.417
Beban jasa	29.503	38.801
Biaya jasa lalu	-	4.078
Pembayaran manfaat	(34.302)	(64.813)
Laba aktuarial dari kewajiban	(192.207)	(14.241)
Saldo akhir tahun	541.239	672.145
Nilai wajar dari aktiva dana pensiun		
Saldo awal tahun	730.787	727.656
Pengembalian aktual dari dana pensiun	99.808	53.262
Kontribusi dari pemberi kerja	10.458	17.842
Pembayaran manfaat	(35.853)	(67.973)
Saldo akhir tahun	805.200	730.787
Status pendanaan pada akhir tahun	**263.961**	**58.642**
Akumulasi kewajiban pensiun	**322.948**	**373.463**

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

d. Pensiun dan manfaat kesehatan masa pensiun (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, status kelebihan pendanaan dari program pensiun manfaat pasti masing-masing adalah sebesar Rp263.961 dan Rp58.642, yang diakui pada laporan neraca sebagai pensiun dibayar di muka (aktiva lancar) masing-masing adalah sebesar Rp3.114 dan Rp2.260 dan pensiun dibayar di muka jangka panjang masing-masing adalah sebesar Rp260.847 dan Rp56.382.

Tidak terdapat aktiva dana pensiun yang diharapkan akan dikembalikan kepada Perusahaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

	2008	2007
Manfaat masa pensiun lainnya		
Status yang tidak didanai		
Kewajiban masa pensiun yang diproyeksikan		
Saldo pada awal tahun	905.665	613.354
Beban bunga	89.900	103.427
Beban jasa	33.016	49.154
Laba (rugi) aktuarial dari kewajiban	(334.116)	161.963
Pembayaran manfaat	(15.694)	(22.233)
Status yang tidak didanai pada akhir tahun	**678.771**	**905.665**
Akumulasi kewajiban pensiun	**549.834**	**824.795**

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, status yang belum didanai dari aktiva manfaat kesehatan masa pensiun masing-masing adalah sebesar Rp678.771 dan Rp905.665, diakui dalam laporan neraca sebagai biaya masih harus dibayar (kewajiban lancar) masing-masing adalah sebesar Rp11.809 dan Rp11.489 dan kewajiban masa pensiun jangka panjang masing-masing sebesar Rp633.585 dan Rp856.698 dan juga sebagai pengurang piutang jangka panjang sebesar Rp33.377 dan Rp37.478 masing-masing pada tahun 2008 dan 2007.

e. PPN

Pada bulan Maret 2006, *"The Emerging Issues Task Force"* ("EITF") mencapai sebuah konsensus mengenai "*Issue No. 06-3, How Sales Taxes Collected from Customers and Remitted to Governmental Authorities Should Be Presented in the Income Statement (That Is, Gross versus Net Presentation)" ("EITF 06-3")*. EITF 06-3 membahas ketentuan pengungkapan dan klasifikasi dalam laporan laba rugi untuk seluruh pajak yang dikenakan terhadap transaksi yang menghasilkan pendapatan. EITF juga menyimpulkan bahwa perusahaan harus menyajikan pajak tersebut secara kotor atau bersih, sesuai dengan kebijakan akuntansi mereka, yang harus diungkapkan sesuai dengan APB No. 22.

Perusahaan telah menyajikan pendapatan secara bersih setelah PPN dalam laporan laba rugi konsolidasinya berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah diterapkan secara konsisten semenjak periode penyajian paling awal.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

f. FIN 48

Pada bulan Juni 2006, *Financial Accounting Standards Board* (*FASB*) menerbitkan interpretasi No. 48, *"Accounting for Uncertainty in Income Taxes, an interpretation of FASB Statement No. 109",* (*"FIN 48"*). FIN 48 mengklarifikasi perlakuan akuntansi terhadap ketidakpastian untuk pajak penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan SFAS No. 109 *"Accounting for Income Taxes"* dengan menetapkan panduan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap ketidakpastian posisi pajak yang diambil ataupun diharapkan akan diambil dalam surat pemberitahuan pajak. FIN 48 berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2006.

Perusahaan menerapkan FIN 48 pada tanggal 1 Januari 2007. Berdasarkan analisa terhadap semua posisi pajak berkaitan dengan pajak pendapatan sesuai dengan SFAS 109, Perusahaan menentukan bahwa penerapan FIN 48 tidak menimbulkan kewajiban pajak untuk manfaat pajak yang tidak diakui pada tanggal 1 Januari 2007 dan tidak terdapat kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2008 dan 2007 yang akan mengubah kesimpulan tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Perusahaan mengantisipasi bahwa, terdapat keyakinan yang memadai, tidak akan terdapat perubahan yang signifikan terhadap posisi mereka dalam kaitan dengan manfaat pajak yang tidak diakui pada tahun 2009.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, tidak terdapat bunga atau denda terkait dengan Pajak Penghasilan Badan.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan menjadi subjek untuk pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008, 2007 dan 2006.

Perusahaan mengakui bunga dan denda untuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, masing-masing dalam akun beban bunga dan beban lain-lain, dalam laporan keuangan konsolidasi.

g. SFAS 157

Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan SFAS No. 157, *"Fair Value Measurements"* (*"SFAS 157"*) efektif pada tanggal 1 Januari 2008. SFAS 157 mendefinisikan nilai wajar, memperluas ketentuan pengungkapan seputar nilai wajar dan menspesifikasi sebuah hirarki dari teknik penilaian berdasarkan apakah masukan *(inputs)* untuk teknik penilaian tersebut dapat diobservasi atau tidak dapat diobservasi. *Inputs* yang dapat diobservasi mencerminkan data pasar yang diperoleh dari sumber independen, sedangkan *inputs* yang tidak dapat diobservasi mencerminkan asumsi Perusahaan dan anak perusahaan. Kedua jenis *inputs* ini menciptakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat pertama – harga kuotasi (*quoted prices*) untuk instrumen keuangan yang identik di pasar aktif.
- Tingkat kedua – harga kuotasi (*quoted prices*) untuk instrumen keuangan yang serupa di pasar aktif; harga kuotasi (*quoted prices*) untuk instrumen keuangan yang identik atau instrumen keuangan yang serupa di pasar yang tidak aktif dan penilaian "*model-derived*" dimana semua *inputs* dan *value driver* yang signifikan dapat diobservasi di pasar aktif.
- Tingkat ketiga – penilaian yang berasal dari teknik penilaian dimana terdapat satu atau lebih *inputs* atau *value driver* yang signifikan tidak dapat diobservasi.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

g. SFAS 157 (lanjutan)

Bagian berikut ini menjelaskan metodologi penilaian yang digunakan oleh Perusahaan dan anak perusahaan untuk mengukur beragam instrumen keuangan pada nilai wajarnya, termasuk indikasi tingkat di dalam hirarki nilai wajar dimana setiap instrumen secara umum diklasifikasikan. Sesuai keadaan, penjelasan meliputi model penilaian, *inputs* penting untuk model penilaian dan juga asumsi yang signifikan lainnya.

A. Instrumen Derivatif

Swap valuta asing (termasuk derivatif melekat)
Kontrak-kontrak ini dilaksanakan *over the counter* dan dinilai dengan menggunakan teknik penilaian internal karena tidak terdapat harga pasar kuotasi yang tersedia untuk instrumen-instrumen tersebut. Teknik penilaian dan *inputs* tergantung pada jenis derivatif dan sifat dari instrumen yang mendasari. Teknik penilaian utama yang digunakan untuk menilai instrumen ini adalah arus kas yang didiskonto (*discounted cash flows)*. Nilai wajar dari kontrak derivatif mencerminkan kas yang akan dibayarkan atau diterima oleh Perusahaan. *Inputs* penting tergantung pada jenis derivatif dan sifat dari instrumen yang mendasari dan termasuk kurva imbal hasil suku bunga, kurs valuta asing, *Credit Default Spread* dan harga spot dari instrumen yang mendasari. Kontrak-kontrak ini ditempatkan pada Tingkat Kedua.

Swap suku bunga
Dalam swap suku bunga yang umum, serangkaian pembayaran yang dihitung dengan menggunakan suku bunga mengambang dari jumlah nosional pokok ditukar dengan sebuah aliran pembayaran yang dihitung dengan menggunakan suatu suku bunga tetap dengan perhitungan yang serupa. Ini adalah suatu swap suku bunga mengambang ke suku bunga tetap (*floating-to-fixed interest rate swap*). Teknik penilaian pokok yang digunakan untuk menilai instrumen ini adalah *discounted cash flows*. Nilai wajar dari kontrak derivatif mencerminkan kas yang akan dibayarkan atau diterima oleh Perusahaan. *Inputs* penting tergantung pada jenis derivatif dan sifat dari instrumen yang mendasari dan termasuk kurva imbal hasil suku bunga dan tanggal-tanggal pembayaran. Kontrak-kontrak ini ditempatkan pada Tingkat Kedua.

B. Instrumen Keuangan Lainnya

Perusahaan memilih untuk menangguhkan sebagian dari SFAS 157 berdasarkan ketentuan dari FSP 157-2 mengenai pengukuran nilai wajar yang digunakan dalam mengevaluasi goodwill, aktiva tak berwujud lainnya dan aktiva tidak lancar lainnya untuk penurunan nilai dan mengevaluasi *Asset Retirement Obligations* dan kewajiban dari penghentian atau penjualan kegiatan usaha (*exit or disposal activities*).

Dampak dari penerapan sebagian SFAS 157 efektif pada tanggal 1 Januari 2008 adalah tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan.

Pengukuran Nilai Wajar secara Berulang

Aktiva dan kewajiban keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan tingkat terendah dari *inputs* yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Penilaian dampak signifikan dari suatu *inputs* tertentu terhadap pengukuran nilai wajar membutuhkan pertimbangan dan dapat mempengaruhi penilaian dari aktiva dan kewajiban yang diukur dan penempatannya dalam hirarki nilai wajar.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

g. SFAS 157 (lanjutan)

Keterangan	Pengukuran Nilai Wajar Pada Tanggal 31 Desember 2008		
	Harga Kuotasi Pasar Aktif untuk Aktiva yang Identik (Tingkat 1)	*Inputs* Signifikan yang Dapat Diobservasi (Tingkat 2)	*Inputs* Signifikan yang Tidak Dapat Diobservasi (Tingkat 3)
AKTIVA			
Derivatif	-	**656.594**	-
KEWAJIBAN			
Derivatif	-	**315.866**	-
Derivatif melekat	-	**185.768**	-
Bersih	**-**	**154.960**	**-**

h. SFAS 159

Perusahaan dan anak perusahaan memilih untuk menerapkan SFAS No. 159, *"The Fair Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities"* (*"SFAS 159"*) efektif pada tanggal 1 Januari 2008. Berdasarkan SFAS 159, Perusahaan diperbolehkan untuk memilih pencatatan aktiva dan kewajiban keuangan (termasuk juga beberapa instrumen non-keuangan yang memiliki sifat seperti instrumen keuangan) pada nilai wajar dengan dasar instrumen per instrumen. Perubahan nilai wajar harus diakui dalam laporan laba rugi untuk masing-masing periode pelaporan. Pemilihan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap akuntansi nilai wajar untuk aktiva dan kewajiban keuangan dalam U.S. GAAP sama dengan perlakuan dalam SAK.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, penerapan SFAS 159 tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan.

i. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

SFAS 141(R)

Pada bulan Desember 2007, FASB menerbitkan SFAS 141(R), "*Business Combination*". SFAS 141(R) tetap mempertahankan syarat fundamental dari SFAS 141 - metode akuisisi secara akuntansi (disebut juga metode *purchase*) digunakan untuk semua penggabungan usaha dan pengakuisisi yang teridentifikasi untuk setiap penggabungan usaha. Berdasarkan SFAS 141(R):

- Pihak pengakuisisi (*acquirer*) harus mengakui aktiva yang diperoleh, kewajiban yang diambil, termasuk yang timbul dari kontinjensi kontraktual, setiap pertimbangan kontinjensi dan setiap *non-controlling interest* dari perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*) pada tanggal akuisisi, sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi, dengan pengecualian terbatas yang disebutkan dalam pernyataan tersebut.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

i. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru (lanjutan)

SFAS 141(R) (lanjutan)

- Pihak pengakuisisi dalam sebuah penggabungan usaha yang terdiri dari beberapa tahapan (terkadang disebut juga sebagai akuisisi bertahap (*step acquisition*)) harus mengakui aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi, begitu juga dengan *non-controlling interest* dari perusahaan yang diakuisisi, pada jumlah penuh dari nilai wajar mereka (atau jumlah lainnya yang ditentukan sesuai dengan SFAS 141(R)).

- Pihak pengakuisisi harus mengakui goodwill pada tanggal akuisisi, yang diukur sebesar nilai sisa, yang dalam kebanyakan dari penggabungan usaha akan menghasilkan goodwill sebagai nilai lebih dari jumlah yang ditransfer ditambah dengan nilai wajar dari *non-controlling interest* pada perusahaan yang diakuisisi pada tanggal akuisisi dan dalam sebuah penggabungan usaha yang terdiri dari beberapa tahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan pihak pengakuisisi sebelumnya dalam perusahaan yang diakuisisi terhadap nilai wajar dari aktiva bersih yang dapat diidentifikasi yang diperoleh.

SFAS 141(R) diterapkan secara prospektif untuk penggabungan usaha dengan tanggal akuisisi pada atau setelah tanggal permulaan periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 15 Desember 2008. Penerapan lebih dini tidak diperkenankan.

Perusahaan dan anak perusahaan saat ini sedang melakukan evaluasi mengenai dampak dari, jika ada, penerapan SFAS 141(R) terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan.

SFAS 160

Pada bulan Desember 2007, FASB menerbitkan SFAS 160, "*Non-controlling interest in Consolidated Financial Statements*", untuk mengamandemen *Accounting Research Buletin 51*, "*Consolidated Financial Statements*". SFAS 160 (i) menetapkan standar akuntansi dan pelaporan untuk *non-controlling interest* pada anak perusahaan dan untuk de-konsolidasi anak perusahaan, (ii) mengklarifikasi bahwa *non-controlling interest* pada anak perusahaan adalah kepemilikan dalam suatu entitas yang dikonsolidasi yang harus dilaporkan sebagai ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi dan (iii) mengubah cara penyajian laporan laba rugi konsolidasi dengan mengharuskan laba bersih konsolidasi untuk dilaporkan sebesar jumlah yang dapat diattribusikan kepada perusahaan induk dan *non-controlling interest*.

Berdasarkan SFAS 160, perusahaan induk diharuskan untuk:

- Membuat pengungkapan, pada laporan laba rugi konsolidasi, mengenai jumlah laba bersih konsolidasi yang dapat diattribusikan kepada perusahaan induk dan *non-controlling interest.*

- Mengakui laba atau rugi dari laba bersih ketika sebuah anak perusahaan tidak lagi dikonsolidasi dan menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi yang secara jelas mengidentifikasi dan membedakan antara kepemilikan perusahaan induk dan kepemilikan dari *non-controlling interest* dalam sebuah anak perusahaan.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

i. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru (lanjutan)

SFAS 160 (lanjutan)

SFAS 160 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang diterbitkan untuk tahun fiskal dan periode interim yang termasuk di dalam tahun fiskal tersebut, yang dimulai pada atau setelah tanggal 15 Desember 2008. Penerapan lebih dini tidak diperkenankan.

Perusahaan dan anak perusahaan saat ini sedang melakukan evaluasi mengenai dampak dari, jika ada, penerapan SFAS 160 terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan.

SFAS 161

Pada bulan Maret 2008, FASB menerbitkan SFAS 161, "*Disclosure about Derivative Instruments and Hedging Activities, an amendment of FASB Statement No. 133*". SFAS 161 diterapkan untuk semua instrumen derivatif dan lindung nilai terkait yang diatur dalam SFAS 133, "*Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities*". SFAS 161 mengharuskan entitas untuk mengungkapkan transparansi yang lebih lengkap mengenai (a) bagaimana dan mengapa sebuah entitas menggunakan instrumen derivatif, (b) bagaimana instrumen derivatif dan lindung nilai terkait dicatat sesuai dengan SFAS 133 dan interpretasi yang terkait, dan (c) bagaimana instrumen derivatif berdampak terhadap posisi keuangan sebuah entitas, hasil operasi dan arus kas.

Berdasarkan SFAS 161, sebuah entitas diharuskan untuk menyajikan:

- Pengungkapan kualitatif mengenai tujuan dari penggunaan derivatif berdasarkan *risk exposure* utama dan berdasarkan tujuan atau strategi.
- Informasi mengenai volume dari aktivitas derivatif dalam suatu format yang fleksibel, yang diyakini sebagai yang paling relevan dan praktis.
- Pengungkapan dalam bentuk tabel mengenai posisi di neraca dan jumlah nilai wajar kotor dari instrumen derivatif, laporan laba rugi dan posisi *other comprehensive income* dan jumlah laba dan rugi dari instrumen derivatif per jenis kontrak.
- Pengungkapan mengenai risiko kredit terkait dengan fitur kontijensi dari kontrak derivatif.

SFAS 161 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang diterbitkan untuk tahun fiskal dan periode interim yang dimulai setelah tanggal 15 November 2008. Penerapan lebih dini dianjurkan.

Perusahaan dan anak perusahaan tidak menerapkan lebih dini SFAS 161 pada laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2008.

SFAS 162

Pada bulan Mei 2008, FASB menerbitkan SFAS No. 162, "*The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles*". SFAS 162 menentukan urutan sumber dari prinsip akuntansi yang berlaku umum berdasarkan urutan otoritas sebagai berikut:

a. FASB *Statement of Financial Accounting Standards and Interpretations*, SFAS 133 *Implementation Issues*, FASB *Staff Positions* dan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) *Accounting Research Bulletins* dan *Accounting Principles Board Opinions* yang tidak digantikan/dibatalkan oleh keputusan FASB.

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN U.S. GAAP (lanjutan)

i. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru (lanjutan)

SFAS 162 (lanjutan)

b. FASB *Technical Bulletins* dan, jika disetujui oleh FASB, AICPA *Industry Audit and Accounting Guides* dan *Statements of Position.*
c. AICPA *Accounting Standards Executive Committee Practice Bulletins* yang telah disetujui oleh FASB, posisi konsensus dari *FASB Emerging Issues Task Force* (EITF) dan topik yang didiskusikan dalam *Appendix D* dari *EITF Abstracts (EITF D-Topics)*
d. Panduan implementasi (Q&As) yang dipublikasikan oleh Staf FASB, AICPA *Accounting Interpretations*, AICPA *Industry Audit and Accounting Guides* dan *Statements of Position* yang belum disetujui oleh FASB, dan praktik yang telah diakui secara luas dan berlaku secara umum atau di dalam industri tertentu.

SFAS 162 berlaku efektif 60 hari setelah tanggal 15 November 2008. Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi dampak dari, jika ada, penerapan SFAS 162, terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan.

SFAS 163

Pada bulan Mei 2008, FASB menerbitkan *Statement No. 163, "Accounting for Financial Guarantee Insurance Contracts, an interpretation of FASB Statement No. 60" (SFAS 163).* Pernyataan ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk mengakui kewajiban klaim sebelum suatu *event of default* (kejadian yang diasuransikan) terjadi, ketika terdapat bukti bahwa *credit deterioration* telah terjadi dalam suatu kewajiban keuangan yang diasuransikan (*insured financial obligaton*). Pernyataan ini juga mengklarifikasi penerapan SFAS 60, "*Accounting and Reporting by Insurance Enterprises*", terhadap kontrak asuransi garansi keuangan (*financial guarantee insurance contracts*), termasuk pengakuan dan pengukuran yang digunakan untuk mencatat pendapatan premi dan kewajiban klaim.

SFAS 163 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dikeluarkan untuk tahun fiskal yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2008 dan periode interim yang termasuk di dalam tahun fiskal tersebut, kecuali untuk beberapa pengungkapan mengenai aktivitas manajemen risiko dari perusahaan asuransi. Pernyataan ini mengharuskan pengungkapan aktivitas manajemen risiko dari perusahaan asuransi efektif dilakukan pada periode pertama (termasuk periode interim) setelah pernyataan ini terbit. Penerapan dini tidak diperkenankan, kecuali untuk pengungkapan tersebut.

Perusahaan dan anak perusahaan tidak mengharapkan bahwa SFAS 163 akan memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan.

41. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diselesaikan pada tanggal 18 Maret 2009.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006
(AUDITED - TERMASUK PENGUNGKAPAN TAMBAHAN US-GAAP)
PT INDOSAT Tbk

BOARD OF DIRECTORS STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2006, 2007 AND 2008 (AUDITED - INCLUDING US-GAAP RECONCILIATION)
PT INDOSAT Tbk

No. 009/A00/FIN/09

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Johnny Swandi Sjam
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Alamat Rumah : Jl. Pulo Asem 1 No. 10 Rawamangun – Jakarta Timur
   Nomor telepon : 3869 600
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Wong Heang Tuck
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Alamat Rumah : Jl Kebon Kacang Raya No.2 Jakarta Pusat
   Nomor telepon : 3869 606
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

We the undersigned:

1. *Name : Johnny Swandi Sjam*
   Office Address : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Home Address : Jl. Pulo Asem 1 No. 10 Rawamangun - Jakarta Timur
   Phone Number : 3869 600
   Designation : President Director

2. *Name : Wong Heang Tuck*
   Office Address : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Home Address : Jl. Kebon Kacang Raya No. 2 Jakarta Pusat
   Phone Number : 3869 606
   Designation : Finance Director

hereby declares:

1. *Responsible to the preparation and the presentation of the company's financial statements;*
2. *The company's financial statements are prepared and presented according to the generally acceptable accounting principle;*
3. a. *All information contained in the company's financial statements is complete and true;*
   b. *The company's financial statement does not contain any false material information or facts, and does not omit any material information or facts;*
4. *Responsible to the company's internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 15 April/*April* 15 , 2009

Direktur Utama *President Director*	Direktur Keuangan/ Finance Director
Johnny Swandi Sjam	**Wong Heang Tuck**
NIK. 30000009	NIK. 30000003

Pertanggungjawaban Terhadap Laporan Tahunan 2008

Laporan Tahunan 2008 ini berikut perhitungan tahunan/laporan keuangan dan informasi lain yang terkait di dalamnya dipersiapkan oleh PT Indosat Tbk.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indosat Tbk membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008.

Informasi keuangan yang dilaporkan di sini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan pada bagian-bagian tertentu mencakup beberapa perkiraan yang dibuat berdasarkan estimasi maupun penilaian terbaik oleh Direksi PT Indosat Tbk.

Dewan Komisaris

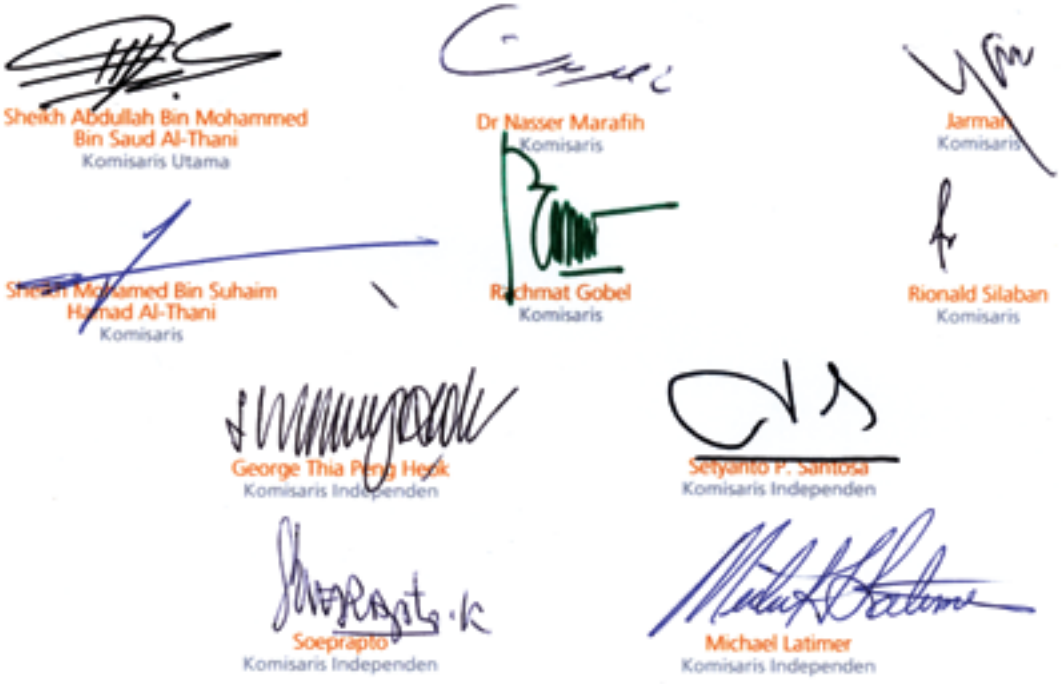

Direksi

Informasi bagi Pemegang Saham

MODAL SAHAM (PER TANGGAL 31 DESEMBER 2008)
Modal Dasar:
Rp2.000.000.000.000 terdiri dari 20.000.000.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH (PER TANGGAL 31 DESEMBER 2008) 5.433.933.500 SAHAM TERDIRI DARI 1 SAHAM SERI A DAN 5.433.933.499 SAHAM SERI B DENGAN NILAI NOMINAL Rp543.393.350.000, YAITU:

a. Pemerintah Indonesia (1 saham Seri A dan 776.624.999 saham seri B)
b. Indonesia Communications Limited (2.171.250.000 saham seri B)
c. Indonesia Communication Pte. Ltd (46.340.000 saham seri B)
d. Publik (2.439.718.500 saham Seri B).

KEPEMILIKAN SAHAM DI ATAS 5% PER 31 DESEMBER 2008
1. ICL Entities (40,81%)
2. Republik Indonesia (14,29%)
3. Fidelity Entities (10,05%)
4. Goldman Sachs (8,64%)
5. Noonday/Farallon Entities (7,95%)
6. Skagen Entities (6,44%)
7. Publik (11,82%)

LAPORAN TAHUNAN 2008 DALAM FORMAT 20-F
Laporan ini memuat sebagian besar informasi keuangan Perusahaan yang disajikan dalam Laporan Tahunan dalam Format 20-F yang akan dilaporkan ke U.S. Securities and Exchange Commission.

INFORMASI UNTUK PEMEGANG SAHAM
Pertanyaan pemegang saham dan publik dapat dialamatkan kepada (termasuk permintaan Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan dalam Format 20-F):

DIVISI INVESTOR RELATIONS
Gedung Indosat, lantai 2 Podium Depan
Jl. Medan Merdeka Barat No.21,
Jakarta 10110, Indonesia
Tel : (62-21) 3000 3001, 3869 615
Fax : (62-21) 380 4045
E-mail : investor@indosat.com

SITUS INTERNET
Arsip data keuangan, informasi untuk pemegang saham, berita terbaru dan informasi umum tentang Indosat dapat diakses melalui situs: http://www.indosat.com

NAMA BURSA EFEK DIMANA SAHAM INDOSAT DICATATKAN
Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bursa Efek New York/New York Stock Exchange (NYSE)

NAMA DAN ALAMAT PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Bank Kustodian untuk ADRs
The Bank of New York
Depository Receipt Division
101 Barclay Street
New York, New York 10286, USA
Tel. + 1 212-815-2293 (International Caller)
Fax. + 1 212-571-3050/1/2
1-888-BNY-ADRs (Toll free within USA)
E-mail: shareowners@bankofny.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT EDI Indonesia
Wisma SMR, Lantai 10
Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350, Indonesia
Tel. (62-21) 651 5130
Fax. (62-21) 651 5131

AUDITOR INDEPENDEN
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Anggota Ernst & Young
Gedung Bursa Efek Jakarta
Tower I, Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5289 5000
Fax. (62-21) 5289 5555

WALI AMANAT/TRUSTEE
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Desk Investment Banking - Divisi Treasury
Gedung BRI II, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (62-21) 570 9060 ext. 2371-2335
Fax. (62-21) 251 1647

The Bank of New York
Global Trust Administration
Floor 21 West
101 Barclay Street
New York, New York 10286, USA
Fax. +1 212 815 5802/5803

THE BANK OF NEW YORK
Global Trust Services
One Temasek Avenue
#02-01 Milenia Tower
Singapore 039192
Fax. +65 6883 0338

NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK
PT Pemeringkat Efek Indonesia
Setiabudi Atrium, Lantai 8, Suite 809-810
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 – Kuningan, Jakarta 12920
Tel. (62-21) 521 0077
Fax. (62-21) 521 0078

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Indosat tahun 2008 akan diselenggarakan pada bulan Juni 2008, bertempat di Gedung Indosat.

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN
PT Indosat Mega Media
Jl. Kebagusan Raya No. 36, Pasar Minggu,
Jakarta 12550
Tei. (62-21) 7854 6868
Fax. (62-21) 7854 6999, 7854 6998

PT Aplikanusa Lintasarta
Jl. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta, 10250
Tel. (62-21) 230 2345
Fax. (62-21) 230 3883

PT Indosat Tbk

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21
Jakarta 10110
Indonesia
T + (62.21) 3000 3001, 3869 615
F + (62.21) 3804 045

www.indosat.com